# PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
# NOMOR 8 TAHUN 2025

Pemerintah Kota Magelang

# Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang 2025

*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang*

WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
# NOMOR 8 TAHUN 2025
# TENTANG
# PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025;
b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan maupun pengurangan program, kegiatan subkegiatan, serta pagu setiap urusan pemerintahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 Perubahan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 disusun dengan sistematika:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025;
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH dan
g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 8

# DAFTAR ISI

**BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1-1**
1.1 LATAR BELAKANG ..... 1-1
1.1.1 Proses Penyusunan ..... 1-2
1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan ..... 1-3
1.2 LANDASAN HUKUM ..... 1-4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..... 1-6
1.3.1 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 ..... 1-8
1.3.2 RPJMD Kota Magelang ..... 1-8
1.3.3 Rencana Pembangunan Sektoral ..... 1-9
1.3.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah ..... 1-9
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ..... 1-9
1.4.1 Maksud ..... 1-9
1.4.2 Tujuan ..... 1-9
1.5 SISTEMATIKA RKPD ..... 1-10

**BAB 2 EVALUASI HASIL KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... 2-1**
2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ..... 2-1
2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ..... 2-5
2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... 2-5
2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... 2-12
2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan ..... 2-29
2.2.4 Urusan Pendukung Fungsi Pemerintahan ..... 2-34
2.2.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... 2-35
2.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ..... 2-38
2.2.7 Unsur Kewilayahan ..... 2-38
2.2.8 Unsur Pemerintahan Umum ..... 2-39
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... 2-40
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... 2-40
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ..... 2-41

**BAB 3 PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025 ..... 3-1**
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ..... 3-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global ..... 3-1
3.1.2 Kondisi Perekonomian Nasional dan Jawa Tengah ..... 3-2
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Magelang ..... 3-4
3.1.4 Pemerataan Pendapatan ..... 3-4
3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi ..... 3-5
3.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... 3-6
3.1.7 Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB ..... 3-6
3.1.8 PDRB per Kapita ..... 3-8
3.1.9 Inflasi ..... 3-9
3.1.10 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2025 ..... 3-9
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... 3-10
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... 3-12

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... 3-13
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... 3-14

**BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... 4-1**
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ..... 4-1
4.1.1 Visi Pembangunan Daerah ..... 4-1
4.1.2 Misi Pembangunan Daerah ..... 4-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran ..... 4-3
4.1.4 Keselarasan dengan RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045 ..... 4-9
4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 ..... 4-10
4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2025 ..... 4-10
4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... 4-10
4.3 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU KOTA MAGELANG ..... 4-76
4.3.1 Arah Pengembangan Internal Wilayah ..... 4-77
4.3.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang ..... 4-78
4.3.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang ..... 4-80
4.3.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis ..... 4-82
4.3.5 Arah Pengembangan Eksternal Wilayah ..... 4-84
4.4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2025 ..... 4-86
4.5 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) ..... 4-87
4.6 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG TARGET PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) ..... 4-93
4.7 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN KERENTANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM ..... 4-96
4.8 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ..... 4-97

**BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... 5-1**
5.1 RENCANA KERJA ..... 5-1
5.1.1 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2025 ..... 5-1
5.1.2 Program Prioritas I ..... 5-28
5.1.3 Program Prioritas II ..... 5-97
5.1.4 Program Prioritas III ..... 5-97
5.2 PENDANAAN DAERAH ..... 5-97
5.2.1 Indikator Kinerja per Program berdasarkan Urusan ..... 5-98
5.2.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah ..... 5-130
5.3 DUKUNGAN PROGRAM RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2025 TERHADAP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ..... 5-132
5.4 RENCANA TINDAK LANJUT ..... 5-132

**BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... 6-1**

**BAB 7 PENUTUP** ..... Error! Bookmark not defined.

# DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 ..... 1-3
Tabel 1.2 Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 yang Berorientasi pada Proses ..... 1-3
Tabel 1.3 Pendekatan Substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2025 ..... 1-4
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-1
Tabel 2.2 Tabel Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-5
Tabel 2.3 Tabel Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-7
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d. Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-8
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d. Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-10
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-11
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-11
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-12
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hingga Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-14
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pangan s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-15
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-15
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-16
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-18
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hingga Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-19
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hingga Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-19
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s.d. Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-20
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-21
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-21
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-22
Tabel 2.20 Tabel Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-24
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-26
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-26
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Magelang Hingga Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-27
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Hingga Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-27
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Hingga Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-28
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Peternakan s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-29
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-29
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-31
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-32
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-33
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-34
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-35
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Perencanaan s.d Triwulan I Tahun 2025 ..... 2-35

Tabel 2.34 Variabel Pembentuk Indikator Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas ....2-36
Tabel 2.35 Variabel Pembentuk Indikator Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ....2-36
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan keuangan Kota Magelang s.d Triwulan I Tahun 2025 ....2-36
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Kepegawaian s.d Triwulan I Tahun 2025....2-37
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan I Tahun 2025 ....2-37
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan I Tahun 2025 ....2-38
Tabel 2.40 Tabel Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah s.d Triwulan I Tahun 2025....2-38
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Urusan Kewilayahan s.d. Triwulan I Tahun 2025 ....2-38
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kota Magelang s.d Triwulan I Tahun 2025 ....2-39
Tabel 2.43 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Magelang ....2-41
Tabel 2.44 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Magelang....2-41
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2020-2024 .... 3-3
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2017-2023 .... 3-4
Tabel 3.3 Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kriteria Bank Dunia, 2019-2024 .... 3-5
Tabel 3.4 Indikator Ketenagakerjaan Kota Magelang, 2019-2024.... 3-6
Tabel 3.5 PDRB per Kapita Kota Magelang, 2019-2023 .... 3-8
Tabel 4.1 Penjelasan Visi .... 4-2
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Magelang dalam Visi Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025.... 4-3
Tabel 4.3 Keterkaitan antara Tema Pembangunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ....4-10
Tabel 4.4 Sasaran dan Target Indikator Makro Nasional Tahun 2025 ....4-11
Tabel 5.1 Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kota Magelang terhadap Arah Kebijakan dalam RKP Tahun 2025 .... 5-2
Tabel 5.2 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) .... 5-4
Tabel 5.3 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. .... 5-5
Tabel 5.4 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastuktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi .... 5-9
Tabel 5.5 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas ....5-14
Tabel 5.6 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri ....5-18
Tabel 5.7 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan ....5-20

Tabel 5.8 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan....5-23
Tabel 5.9 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur....5-25
Tabel 5.10 Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025....5-28
Tabel 5.11 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 1 : Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat....5-29
Tabel 5.12 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 2: Pemantapan Peran Masyarakat Sebagai Mitra....5-31
Tabel 5.13 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 3 : Pemantapan Perlindungan Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin....5-33
Tabel 5.14 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 4 : Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam Perekonomian daerah....5-36
Tabel 5.15 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 5 : Penguatan Perwujudan Ruang Kota Layak Huni....5-39
Tabel 5.16 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 6 : Penguatan Ketahanan Derah dan Sosial Budaya Masyarakat....5-41
Tabel 5.17 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 7 : Pemantapan Layanan Publik Prima....5-45
Tabel 5.18 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 8 : Pemantapan Daya Saing Daerah....5-53
Tabel 5.19 Akomodasi Hasil Musrenbang....5-58
Tabel 5.20 Akomodasi Musrenbang per Kelurahan....5-58
Tabel 5.21 Akomodasi Pokok Pikiran DPRD....5-59
Tabel 5.22 Akomodasi Pokir per Fraksi Pengusul....5-60
Tabel 5.23 Akomodasi Forum Konsultasi Publik....5-60
Tabel 5.24 Akomodasi Focussed Group Discussion....5-61
Tabel 5.25 Program Daerah yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)....5-61
Tabel 5.26 Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang Menerapkan Konsep,Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)....5-89
Tabel 5.27 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur....5-93
Tabel 5.28 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen....5-94
Tabel 5.29 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting....5-95
Tabel 5.30 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim....5-96
Tabel 5.31 Hubungan Program Prioritas dan Dukungan ke Pusat dan Provinsi....5-98
Tabel 5.32 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan....5-112
Tabel 5.33 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan....5-112
Tabel 5.34 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....5-113
Tabel 5.35 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman....5-114
Tabel 5.36 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat....5-115
Tabel 5.37 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial....5-115

Tabel 5.38 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja ....5-116
Tabel 5.39 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ....5-116
Tabel 5.40 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan ....5-117
Tabel 5.41 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan ....5-117
Tabel 5.42 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ....5-117
Tabel 5.43 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ....5-118
Tabel 5.44 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ....5-119
Tabel 5.45 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ....5-119
Tabel 5.46 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ....5-119
Tabel 5.47 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika ....5-120
Tabel 5.48 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ....5-120
Tabel 5.49 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ....5-121
Tabel 5.50 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga ....5-121
Tabel 5.51 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik ....5-121
Tabel 5.52 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian ....5-122
Tabel 5.53 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ....5-122
Tabel 5.54 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan ....5-122
Tabel 5.55 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ....5-123
Tabel 5.56 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan ....5-123
Tabel 5.57 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata ....5-123
Tabel 5.58 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ....5-124
Tabel 5.59 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ....5-124
Tabel 5.60 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian ....5-125
Tabel 5.61 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah ....5-125
Tabel 5.62 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat DPRD ....5-126
Tabel 5.63 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan ....5-126
Tabel 5.64 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Keuangan ....5-126
Tabel 5.65 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Kepegawaian ....5-127
Tabel 5.66 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Pendidikan dan Pelatihan ....5-127
Tabel 5.67 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Penelitian dan Pengembangan ....5-127
Tabel 5.68 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ....5-127
Tabel 5.69 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Kewilayahan - Kecamatan ....5-128
Tabel 5.70 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Pemerintahan Umum - Kesatuan Bangsa dan Politik ....5-128
Tabel 5.71 Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 ....5-130
Tabel 5.72 Dukungan Program Terhadap Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 ....5-132
Tabel 5.73 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KOTA MAGELANG TAHUN 2025 ....5-133
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Magelang Tahun 2025 .... 6-1
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 .... 6-7

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Program Kota Magelang Tahun 2025 .....6-14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya ..... 1-7
Gambar 1.2 Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial ..... 1-7
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (%), 2019-2024 ..... 3-5
Gambar 3.2 Struktur Perekonomian Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha, 2024..... 3-7
Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Kota Magelang Menurut Pengeluaran, 2024..... 3-7
Gambar 3.4 PDRB per kapita (ADHB) Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (Juta Rupiah/tahun), 2021-2024..... 3-8
Gambar 4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026..... 4-9
Gambar 4.2 Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025.....4-19
Gambar 4.3 Konstelasi Kota Magelang dengan wilayah sekitarnya.....4-77
Gambar 4.4 Rencana Bagian Wilayah Perencanaan Kota Magelang .....4-80
Gambar 4.5 Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang .....4-82
Gambar 4.6 Rencana Kawasan Strategis Kota Magelang .....4-84
Gambar 5.1 Tema dan arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang .....5-88

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan RKPD 2025 berada di momentum transisional antara paska pelantikan Kepala Derah dengan proses penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029. Secara hukum positif, maka Perubahan 2025 masih mengacu pada RPJMD 2021-2026. Namun demikian menindaklanjuti SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, menekankan bahwa Pemerintah daerah menyesuaian RKPD Kota Magelang Tahun 2025 mendasarkan pada hasil capaian Triwulan 1 Tahun 2025.

Secara positif Tahun 2025 merupakan perencanan tahun ke lima RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 untuk mencapai Visi Kota Magelang Maju Sehat dan Bahagia. Pada tahun 2025 tema yang diusung adalah PEMANTAPAN UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA. Tema ini untuk diarahkan untuk pengembangan daya saing daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya. Untuk sinergitas perencanaan, maka RKPD Kota Magelang tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2025, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Dengan dilantiknya kepala dan wakil kepala daerah yang baru bersamaan dengan momentum penyusunan RPJMD 2025-2026 serta penyusunan RKPD 2025P dan 2026, maka dalam dokumen ini sudah terwarnai dengan **Visi Misi Kota Magelang Tahun 2025-2029 yaitu Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang harmonis, humanis nyaman dan berkelanjutan**. Untuk mencapai Visi dimaksud diupayakan melalui 6 misi dan didukung 4 klaster priorotas, 19 Program Unggulan dan 11 program prioritas.

Secara kronologis, dalam manajemen pembangunan daerah terdapat empat tahap yang harus dilalui yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dengan dukungan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat, efektif, dan efisien. Penyusunan dokumen perencanaan periode n+1, dilaksanakan pada periode n, dengan memperhatikan penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan periode sebelumnya (n-1) yang memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Kota Magelang tahun 2025 hingga Triwulan 1 Tahun 2025, menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 mempunyai nilai yang sangat strategis dalam melandasi pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang tahun 2025. Dalam penyusunannya, harus mempedomani RPJMD, RKP 2025, Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, RKPD Kota Magelang tahun 2025 harus memperhatikan dan mempertimbangkan dokumen perencanaan tingkat Pusat dan Provinsi dan memperhatikan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tepatnya pada pasal 343 bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan pasal 343 Permendagri 86 tahun 2017 tersebut, situasi yang terjadi di Kota Magelang adalah :

a. Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBD Kota Magelang tahun 2024 telah menyatakan besaran SILPA APBD yang dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di tahun 2025, pada kenyataannya berada jauh di bawah prediksi sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan anggaran Tahun 2025.
b. Hasil evaluasi atas capaian indicator kinerja yang megindikasikan perlunya penyesuaian, pergeseran dan perubahan komposisi sumber daya dalam rangka percepatan pencapaian indicator kinerja yang ditargetkan di akhir tahun 2025

Selanjutnya, Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### 1.1.1 Proses Penyusunan

Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan pentahapan tahun ke tiga RPJMD Kota Magelang 2021-2026. Penyusunannya diawali dengan persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Perubahan RKPD, orientasi mengenai Perubahan RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tim penyusun Perubahan RKPD terdiri dari personil lintas perangkat daerah yang dipandang mampu untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tahapan proses penyusunan dokumen dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

   Penyusunannya diawali dengan perumusan rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah tahun berjalan. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD 2025 mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

   Rancangan Perubahan RKPD 2025 disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan, dan saran masukan, yang selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Surat Edaran tersebut disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai lampiran rancangan Perubahan RKPD untuk menyempurnakan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah. Untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD, maka dilakukan verifikasi rancangan perubahan renja perangkat daerah. Saran dan rekomendasi pada saat verifikasi menjadi bahan penyempurnaan perubahan Renja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang merupakan penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD berdasarkan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi

   Berdasarkan hasil verifikasi perubahan renja perangkat daerah, rancangan perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD tahun 2025. Selanjutnya, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BAPPERIDA untuk difasilitasi dengan hasil yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2025.
3. Penetapan RKPD menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD

   Rancangan perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan RKPD tahun 2025. Peraturan Walikota tersebut dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang kemudian

disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Kota Magelang tahun 2025.

Perumusan Rancangan Perubahan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah dengan rancangan Renja Perangkat Daerah dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan perubahan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

### 1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Proses penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2025 dilaksanakan sesuai regulasi yang disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD periode sebelumnya yaitu tahun 2022 (tahun n-1). Oleh karenanya, penyusunan RKPD ini dilaksanakan dengan memperhatikan dan mendasarkan pada data dan informasi pembangunan daerah serta capaian kinerja perangkat daerah yang telah diverifikasi untuk lebih memperdalam permasalahan termasuk faktor pendukung dan penghambatnya.

Untuk memastikan output hasil penyusunan RKPD adalah berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka penyusunan dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Prinsip Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025

| PRINSIP | INDIKATOR |
|---|---|
| Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional | Konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang (RKPD) tahun 2022 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah |
| Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing | Pelibatan para pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen perencanaan melalui Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Tingkat Kota; forum konsultasi publik, dan "*focused group discussion*" |
| Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah | Pendekatan yang berorientasi pada substansi, dengan penyusunan rencana kerja yang diperjelas lokasi kegiatan sesuai dengan RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang tetang RTRW 2011-2031, pembangunan kewilayahan Propinsi Jawa Tengah dan Nasional |
| Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional | Penetapan urutan kegiatan sebagai prioritas pembangunan disusun berdasarkan pada data potensi dan kebutuhan lokasi kegiatan, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD*

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu pendekatan teknokratik, politik, bottom up/top down serta partisipatif, serta pendekatan yang berorientasi pada substansi yaitu pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial. Detil konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 1.2 dan Tabel 1.3:

*Tabel 1.2 Pendekatan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 yang Berorientasi pada Proses*

| KRITERIA | PARAMETER |
|---|---|
| DARI BAWAH (BOTTOM- UP) | 1. Usulan dari Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kota. |

| KRITERIA | PARAMETER |
|---|---|
| | 2. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan |
| DARI ATAS (TOP-DOWN) | 3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2025, Prioritas Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2025. |
| | 4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025. |
| TEKNOKRATIK | 5. Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. |
| | 6. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025. |
| | 7. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Magelang Tahun 2025. |
| | 8. Mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025 sampai dengan TW 2. |
| PARTISIPATIF | 9. Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum-forum yang diselenggarakan seperti Musrenbang dan Konsultasi Publik |
| POLITIK | 10. Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. |
| | 11. Melakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan saat reses pada tahun 2023 |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD*

*Tabel 1.3 Pendekatan Substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2025*

| PENDEKATAN | PARAMETER |
|---|---|
| HOLISTIK-TEMATIK | Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya |
| INTEGRATIF | Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah |
| SPASIAL | Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD*

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
16. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
30. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo_Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

34. Peraturan Presiden Republik Inonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2025;
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

## 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah dengan manajemen yang baik, maka didahului dengan perencanaan pembangunan daerah yang menghasilkan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Menurut periodisasinya, Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu RPJPD, rencana jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu RPJMD, dan rencana kerja tahunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu RKPD. Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Hubungan antar dokumen sebagaimana Gambar 1.2 di bawah.

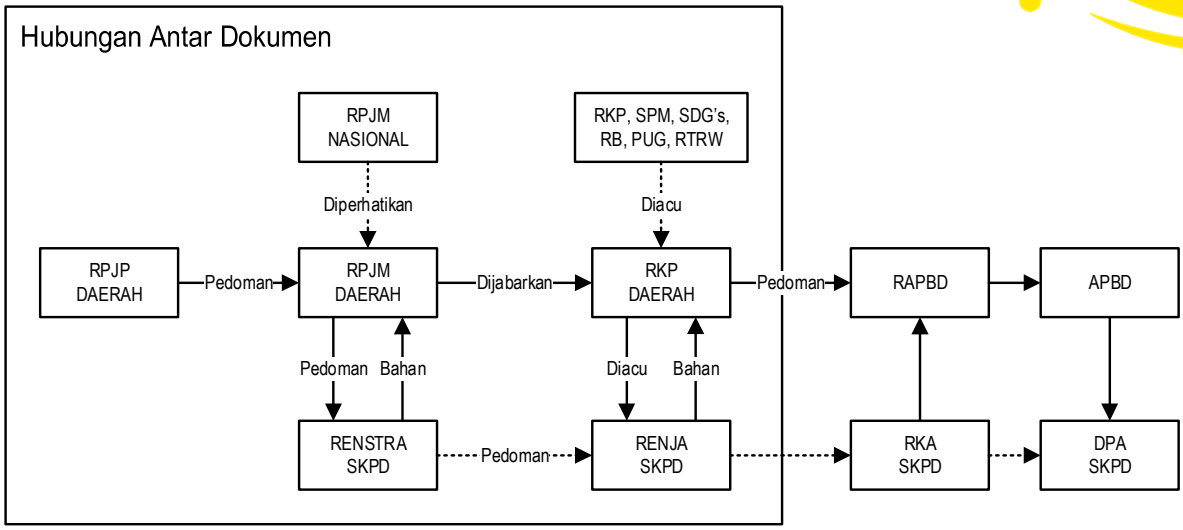


*Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya*

*Sumber: UU No 25 Tahun 2004*

Untuk implementasi pendekatan perencanaan yang berorientasi pada substansi, maka aspek keruangan (spasial) menjadi hal yang utama, sehingga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 terutama struktur dan pola ruang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD 2025. Demikian pula dengan telaah terhadap usulan Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD memperhatikan pada lokasi yang jelas, serta data kebutuhan penanganan permasalahan terutama kemiskinan dan kawasan kumuh yang prioritas kebutuhannya telah dituangkan dalam peta sehingga akomodasi usulan akan memperhatikan prioritas berdasarkan lokasi yang jelas.

Kedudukan RKPD terhadap RTRW sebagaimana tertuang dalam Gambar 1-3.

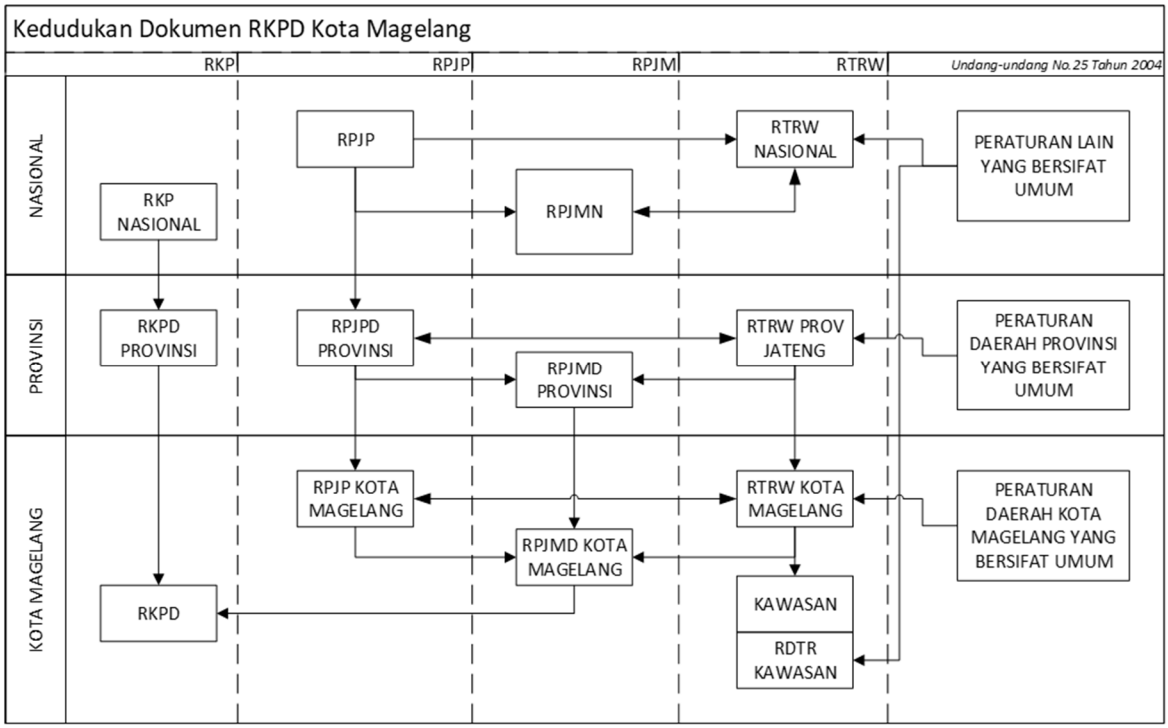


*Gambar 1.2 Kedudukan Dokumen RKPD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan dan Spasial*

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD*

Penjelasaan detil masing-masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **RPJM Nasional**

Sebagai salah satu benang merah perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah untuk mewujudkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan Nasional adalah dengan merujuk pada RPJMN 2020-2025 dengan tema *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*. Sasaran pembangunannya adalah *mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing*.

Perhatian utama adalah kepada **7 (tujuh)** Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2025 sebagai penerjemahan **4 (empat)** pilar RPJMN ke IV untuk mencapai tujuan utama periode terakhir RPJPN 2005-2025; serta **5 (lima)** arahan utama Presiden RI terkait fokus Pembangunan Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2020-2025 yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

2. **Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025**

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan, RKPD Kota Magelang Tahun 2025 merujuk pada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis lainnya. Hal ini merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan sinergitas kebijakan dan dukungan pembangunan daerah Kota Magelang kepada kebijakan nasional. Pemerintah Kota Magelang berupaya semaksimal mungkin agar target target pembangunan nasional dapat tercapai dengan kontribusi yang diberikan dari pembangunan di Kota Magelang Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2025.

Dengan tema RKP Tahun 2025 : **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk dapat berkontribusi melalui sinergitas dan harmonisasi program-program prioritas tahun 2025.

### 1.3.1 RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031

Mendasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam pendekatan penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi, salah satunya adalah melalui pendekatan spasial yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 secara konsisten memperhatikan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, guna mewujudkan pembangunan yang komprehensif, berwawasan lingkungan dengan ketaatan terhadap struktur dan pola ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Oleh karena itu , pemanfaatan ruang harus konsisten dengan perencanaan tata ruang, tertib tata ruang, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. Pada akhirnya tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, kesenjangan antar wilayah terkurangi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, namun sesuai dengan tata kelola fungsi keruangan wilayah. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada dokumen penataan ruang akan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

### 1.3.2 RPJMD Kota Magelang

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025 ditujukan untuk **"Pemantapan menuju Masyarakat yang Sehat dan Bahagia"**, dengan prioritas pada:

1. Pemantapan kesejahteraan masyarakat;
2. Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra ;
3. Pemantapan perlindungan social dalam pengangan fakir miskin;
4. Percepatan peningkatankontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah ;

5. Penguatan perwujudan ruang kota layak huni ;
6. Penguatan ketahanan daerah dan social budaya masyarakat ;
7. Pemantapan layanan public prima
8. Pemantapan daya saing daerah .

### 1.3.3 Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 juga memperhatikan beberapa dokumen pembangunan sektoral baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kota Magelang. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di maksud antara lain: Pencapaian SDGS, RAD KLA, RAD HAM, Roadmap Reformasi Birokrasi, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, Master Plan Kampung Tematik, Masterplan Kebun Raya Gunung Tidar, Masterplan Aloon Aloon, Masterplan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana dan Pedoman PUG di Jawa Tengah.

### 1.3.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahunan di tingkat OPD, adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam menyusun Renja OPD, Rancangan awalnya dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dan forum perangkat daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan. Perangkat Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Bapperida untuk menjaga sinergitas substansinya dengan RKPD. Bapperida akan menindak lanjuti dengan verifikasi Renja OPD untuk memastikan kesesuaian rancangan Renja OPD dengan rancangan RKPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang merupakan perencanaan pembangunan perangkat daerah periode waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2025.

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2025;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.
3. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
4. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025.

### 1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

## 1.5 SISTEMATIKA RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 terdiri dari substansi dan sistematika sebagai berikut:

**PERATURAN WALIKOTA**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD 2025 yang memuat latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen perencanaan RKPD, agar urgensitas dan kepentingan penyusunan serta sinergitas antar bab dapat dengan mudah dipahami.

**BAB II HASIL EVALUASI KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN BERKENAAN**

Menyajikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Daerah sampai dengan pelaksanaan hingga triwulan pertama pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2025.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang realisasi dan prediksi capaian indikator makro, kondisi ekonomi tahun 2024, prediksi 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah; sumber-sumber pendapatan dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Menyajikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta menyajikan persandingan tema dan arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai landasan dalam permusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII PENUTUP**

Menyajikan penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 diperlukan sinergisitas yang kokoh dan terpadu di jajaran pemerintah Kota Magelang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

# BAB 2
# EVALUASI HASIL KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

## 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

*Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama s.d Triwulan I Tahun 2025*

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | | |
| **MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq** | | | | | | | | |
| Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter | | **Nilai Pembangunan Masyarakat** | | **88.58** | **81.19** | **65.92** | **81.19** | **T** |
| | Meningkatnya toleransi | Nilai penguatan toleransi | | 100 | 63 | 25 | 39.68 | SR |
| | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum | Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum | | 84.71 | 94.61 | 69.90 | 73.88 | S |
| | Meningkatnya stabilitas daerah | Nilai stabilitas daerah | | 97.15 | 93.98 | 99.19 | 100 | ST |
| | Meningkatnya penguatan kebudayaan | Nilai pemajuan kebudayaan | | 68.18 | 66.36 | 68.18* | 100 | ST |
| | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Nilai partisipasi masyarakat | | 92.85 | 88 | 67.33 | 76.51 | T |
| **MISI 2: Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas SDM** | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM | | **Indeks pembangunan manusia** | | **82.15** | **82.64** | **NA** | **NA** | **NA** |
| | Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing | Indeks pendidikan | | 0.79 | 0.782 | NA | NA | NA |
| | | Indeks pembangunan literasi masyarakat | | 17 | 17 | NA | NA | NA |
| | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Indeks kesehatan | | 0.8850 | 0.8780 | NA | NA | NA |
| | Meningkatnya daya beli masyarakat | Pengeluaran perkapita yang disesuaikan | Ribu Rp | 13.175 | 12.987 | NA | NA | NA |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | | |
| | Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan | Indeks pembangunan gender | | 96.43 | 96 | NA | NA | NA |
| **MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif** | | | | | | | | |
| Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif | | **Indeks reformasi birokrasi** | | **84.85** | **83.10** | **NA** | **NA** | **NA** |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | | 92.58 | 85.41 | 93.05 | 100 | ST |
| | Menciptakan birokrasi yang kapabel | Nilai kematangan organisasi daerah (KOD) | | 37.25 | 30.80 | NA | NA | NA |
| | | Indeks sistem merit | | 0.8232 | 0.7300 | NA | NA | NA |
| | | Indeks SPBE | | 3.69 | 2.98 | NA | NA | NA |
| | Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel | Maturitas SPIP | Nilai | 3.339 | 3.921 | NA | NA | NA |
| | | Nilai SAKIP | Nilai | 75.02 | 80.25 | NA | NA | NA |
| | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai | 66.11 | 93.60 | NA | NA | NA |
| **MISI 4: Meningkatnya Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan** | | | | | | | | |
| Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif | | **Pertumbuhan ekonomi** | **%** | **5.45** | **5.18** | **NA** | **NA** | **NA** |
| | Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan | Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan | % | 30.56 | 29.85 | NA | NA | NA |
| | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase pertumbuhan investasi | % | 16.05 | 16 | -53.86 | 0 | SR |
| | Meingkatnya angka kunjungan wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | % | 12.79 | 3.18 | NA | NA | NA |
| | | **Persentase penduduk miskin** | **%** | **5.94** | **6.76** | **NA** | **NA** | **NA** |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | | |
| | Peningkatan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial | Persentase PMKS | % | 4.49 | 9.18 | NA | NA | NA |
| | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah | Tingkat pengangguran terbuka | % | 4.40 | 6.30 | NA | NA | NA |
| | | **Ketimpangan pendapatan** | **%** | **16.07** | **16.46** | **NA** | **NA** | **NA** |
| | Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | Persentase pertumbuhan UMKM | % | 3.49 | 4.50 | NA | NA | NA |
| **MISI 5: Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur** | | | | | | | | |
| Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan | | **Indeks kualitas ruang kota** | | **66.07** | **68.64** | **NA** | **NA** | **NA** |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur kota | Indeks Infrastruktur Wilayah | | 64.33 | 91.86 | 60.08 | 65.40 | S |
| | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | % | 83.40 | 78 | 83.40 | 100 | ST |
| | Meningkatnya aksesibilitas perkotaan | Indeks aksesibilitas perkotaan | | 68.71 | 73.80 | 53.92 | 73.06 | S |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase luas kawasan kumuh | % | 0.57 | 0 | NA | NA | NA |
| | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 64.33 | 51 | NA | NA | NA |
| | | Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik | % | 16.24 | 17.50 | 16.24 | 92.80 | ST |
| Meningkatnya Ketahanan Daerah | | **Indeks Resiliensi Daerah** | | **67.05** | **71.94** | **67.05*** | **93.20** | **ST** |
| | Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | Indeks ketahanan daerah | | 48 | 57.40 | 48* | 83.62 | ST |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | Capaian Kinerja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | | |
| | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Skor PPH | | 86.10 | 92.74 | NA | NA | NA |

*Sumber: Pemerintah Kota Magelang, 2025*
**Realisasi menggunakan data triwulan IV 2024*

Dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025, sebagian indikator tujuan maupun sasaran belum dapat diketahui bagaimana realisasinya sampai dengan triwulan I 2025. Dari total 8 (delapan) indikator tujuan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, terdapat 1 (satu) indikator tujuan yang dapat didekati bagaimana capaiannya sampai dengan triwulan I tahun 2025. Nilai Pembangunan Masyarakat sebagai satu indikator yang menggambarkan tercapainya Misi 1 sudah memiliki capaian kinerja 81.19, meskipun salah satu komponen kompositnya yaitu Nilai Pemajuan Kebudayaan masih menggunakan realisasi tahun 2024. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik mengingat waktu tahun 2025 yang masih berjalan. Indikator tujuan lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Kualitas Ruang Kota, dan Indeks Resiliensi Daerah belum dapat tergambarkan bagaimana kinerjanya sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Selanjutnya, dari 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, baru 10 (sepuluh) indikator yang dapat diukur sampai dengan triwulan I 2025. Sepuluh indikator sasaran tersebut yaitu:

1. Nilai Penguatan Toleransi (Misi 1)

   Capaian kinerja indikator sasaran tersebut sampai dengan triwulan I 2025 masih di angka 39.68 dan dipastikan akan meningkat seiring berjalannya waktu tahun 2025.

2. Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Misi 1)

   Sampai dengan triwulan I 2025, capaian kinerja indikator sasaran tersebut sudah cukup baik dengan angka 73.88 dan sudah berada pada kategori Sedang.

3. Nilai Stabilitas Daerah (Misi 1)

   Pada triwulan I 2025, nilai stabilitas daerah Kota Magelang sudah pada kondisi yang optimal dengan capaian kinerja berada pada angka 100 dengan kategori Sangat Tinggi. Diketahui bahwa dari bulan Januari-Maret 2025 terdapat 36 kasus kriminalitas dengan 35 kasus diantaranya telah ditangani. Perlu menjadi catatan bahwa kedepan, kasus kriminalitas perlu ditangani sepenuhnya. Selain itu, upaya penguatan kondusivitas daerah melalui koordinasi instansi terkait juga dengan kerjasama masyarakat perlu dikuatkan guna upaya menakan risiko terjadinya konflik sejak dini.

4. Nilai Partisipasi Masyarakat (Misi 1)

   76.51% merupakan angka yang relatif baik untuk menunjukkan Nilai Partisipasi Masyarakat mengingat ini masih berada pada triwulan I tahun 2025. Kondisi tersebut akan meningkat seiring dengan berjalannya tahun 2025.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (Misi 3)

   Pada triwulan I 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada angka 93.05; ini lebih tinggi daripada target tahun 2025 yang sebesar 85.41 sehingga capaian kinerjanya sudah 100 dengan kategori Sangat Tinggi. Kondisi ini perlu dipertahankan hingga akhir tahun 2025.

6. Persentase Pertumbuhan Investasi (Misi 4)

   Pertumbuhan investasi masih menunjukkan kondisi yang negatif pada triwulan I 2025 yaitu dengan realisasi -53.86%. Hal ini terjadi karena pada awal tahun masih belum optimal investasi yang masuk dan akan didorong hingga akhir tahun 2025.

7. Indeks infrastruktur Wilayah (Misi 5)

   Realisasi indeks infrastruktur wilayah sampai dengan triwulan I 2025 berada di angka 60.08%. Hambatan pada triwulan I yaitu belum diketahui bagaimana kondisi sarana prasarana persampahan meskipun di sisi lain sarana prasarana lainnya seperti jalan, drainase, irigasi, jempatan, air limbah, daa air minum kondisinya masih sama seperti akhir tahun 2024.

8. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Misi 5)

   Pada triwulan I 2025, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang reliasasinya berada pada angka 83.40%. Nilai ini masih sama dengan akhir tahun 2024 meskipun jika dibandingkan dengan target 2025 yang berada pada angka 78; capaian kinerjanya sudah berada di angka 100%.

9. Indeks Aksesibilitas Perkotaan (Misi 5)

   Indeks aksesibilitas perkotaan menunjukkan kinerja yang relatif baik mengingat posisi masih berada pada triwulan I 2025 yaitu dengan capaian kinerja 73.06. Hambatan dalam capaian kinerja ini berada pada komponen komposit cakupan transpotasi terintegrasi meskipun pada komponen yang lain yaitu cakupan universal design di sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, kebudayaan dan rekreasi, serta sarana pemerintahan yang belum menunjukkan perbaikan dibanding akhir tahun 2024.

10. Persentase Ruang terbuka Hijau Publik (Misi 5)

    Persentase RTH Publik sampai dengan triwulan 1 2025 realisasinya berada pada angka 16.24%. Nilai ini belum menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2024. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan target 2025 yang berada di angka 17.50%; ini sudah menunjukkan capaian kinerja yang baik dengan posisi 92.80% (kategori Sangat Tinggi).

## 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

### 2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 2.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

*Tabel 2.2 Tabel Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD | % | 84.58 | 98 | 67,79 | 88,10 | T |
| | | APM SD/ MI | % | 99,96 | 100 | 98,92* | 99,96 | ST |
| | | APK SD/ MI | % | 120.11 | 100 | 109.28* | 100 | ST |
| | | Angka Putus Sekolah SD/MI | % | 0.00 | 0 | 0 | 100 | ST |
| | | APM SMP/MTs | % | 78,10 | 100 | 80,64* | 80,64 | T |
| | | APK SMP/MTs | % | 183.74 | 100 | 96.37* | 96,37 | ST |
| | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | % | 0.00 | 0 | 0 | 100 | ST |
| | | Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan | % | 100 | 97 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | % | 95.24 | 72,51 | 98,44 | 100 | ST |
| | | Persentase SD Terakreditasi | % | 98.65 | 100 | 98,67 | 98,67 | ST |
| | | Persentase SMP Terakreditasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 2 | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 3 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1 | % | 98.95 | 99,50 | 100 | 100 | ST |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| | | Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1 | % | 65.92 | 77,50 | 80,85 | 100 | ST |
| 4 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 5 | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra | Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku) | % | 20.90 | 30 | 20,90 | 69,66 | S |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025;*
**BPS Provinsi Jawa Tengah*

Dari 17 indikator kinerja urusan pendidikan, terdapat 13 indikator yang kinerjanya sangat tinggi dan, 3 indikator dengan kinerja tinggi, dan 1 indikator dengan kinerja sedang jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2025. Adapun indikator yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. APK PAUD

   Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2025 masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 98%, dengan realisasi hingga saat ini baru mencapai 67,79%. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih rendahnya kesadaran dan pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan PAUD di beberapa wilayah, baik dari segi jumlah lembaga, ketersediaan tenaga pendidik, maupun sarana prasarana, turut menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi anak usia dini. Faktor lainnya adalah belum optimalnya dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dalam mendukung perluasan layanan PAUD yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. APM SMP/MTs.

   Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada Triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan angka realisasi akhir tahun 2024 berdasarkan data dari BPS, yaitu sebesar 80,64. Meskipun tergolong dalam kategori tinggi, capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 100%. Salah satu kendala dalam pencapaian indikator ini adalah perbedaan angka realisasi yang ditunjukkan oleh sumber data yang berbeda. Data BPS mencatat nilai APM SMP/MTs sebesar 80,64, sedangkan data dari Dapodik untuk periode yang sama menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, yaitu 145,59. Perbedaan ini disebabkan oleh belum dilakukannya pemisahan antara peserta didik yang berdomisili di Kota Magelang dan peserta didik dari luar daerah yang bersekolah di Kota Magelang. Akibatnya, jumlah anak usia 13–15 tahun yang terdata sebagai bersekolah di Kota Magelang menjadi lebih besar dibandingkan jumlah anak usia 13–15 tahun yang benar-benar berasal dari Kota Magelang.

   Jika mengacu pada indikator lain seperti angka putus sekolah pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs, keduanya menunjukkan angka nol dalam periode yang sama. Oleh karena itu, salah satu justifikasi awal atas belum tercapainya target APM SMP/MTs adalah kemungkinan adanya anak usia 13–15 tahun yang telah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMA/SMK, karena mengalami percepatan (akselerasi) dalam jenjang pendidikan. Namun demikian, hingga akhir tahun 2025, diperlukan pendalaman lebih lanjut terhadap kondisi riil di lapangan, termasuk pemilahan data yang lebih akurat dalam penyusunan indikator APM SMP/MTs.

3. Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku). Indikator ini sampai dengan TW I tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan status capaian kinerja sedang. Beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini adalah panjangnya proses pembuatan buku, dari mulai proses

penulisan, kemudian penerbitan buku sampai dengan mendapatkan ISSN. Proses ini sangat memakan waktu dan biaya sedangkan sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah daerah, sehingga semua dilakukan dengan biaya sendiri.

#### 2.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

*Tabel 2.3 Tabel Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular | % | 100% | 65% | 100 | 100 | ST |
| | | Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular | % | 100% | 75% | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100% | 100% | 17,60 | 17,60 | SR |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 100% | 100% | 17,28 | 17,28 | SR |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 97.37% | 100% | 25* | 25* | SR |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 125.77 | 100% | 93,96 | 93,96 | ST |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 100% | 100% | 12,41 | 12,41 | SR |
| | | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar | % | 100% | 100% | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | % | 96.51% | 100% | 100 | 100 | ST |
| | | Indeks Keluarga Sehat | % | 0.41 | 0.80 | 0,49 | 61,25 | SR |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi) | % | 98.05% | 100% | 92,37 | 92,37 | ST |
| 3 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | % | 97.54% | 100% | 98,55 | 98,55 | ST |
| | | Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene | % | 100% | 100% | 100 | 100 | ST |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 4 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri | % | 82.35% | 88,24% | 82.24% | 88,24 | ST |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025*

Dari keempat belas indikator kinerja urusan kesehatan, terdapat sembilan indikator yang kinerjanya sangat tinggi, dan lima indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2025. Adapun kendala utama pada indikator-indikator dengan capaian rendah dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

   Capaian indikator ini masih rendah karena hingga Triwulan I Tahun 2025 belum semua ibu hamil mencapai kunjungan keempat atau K4. Hal ini wajar mengingat proses pelayanan masih berjalan. Diharapkan hingga akhir tahun, seluruh ibu hamil dapat menyelesaikan pemeriksaan kehamilan secara lengkap.

2. Indikator Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

   Capaian masih rendah karena kegiatan pelayanan persalinan masih dalam proses pelaksanaan. Dinas kesehatan menargetkan seluruh ibu bersalin akan mendapatkan pelayanan hingga Triwulan IV Tahun 2025.

3. Indikator Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

   Indikator ini mencakup layanan seperti penimbangan balita delapan kali setahun, pemberian vitamin A dua kali, serta pemantauan tumbuh kembang melalui SDIDTK. Hingga Triwulan I, kegiatan ini belum sepenuhnya terlaksana, namun diharapkan akan selesai pada triwulan berikutnya..

4. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

   Seperti indikator lainnya, capaian masih rendah karena pelaksanaan kegiatan masih berlangsung. Namun, optimisme tetap tinggi bahwa target akan tercapai menjelang akhir tahun.

5. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

   Capaian IKS menghadapi tantangan karena sebagian keluarga belum memenuhi 12 indikator yang menjadi dasar penilaian. Indikator yang paling sulit diintervensi melibatkan perubahan perilaku, seperti tidak merokok dalam rumah, kepatuhan minum obat hipertensi, penggunaan kontrasepsi, dan kepatuhan berobat TB secara teratur.

   Meski demikian, berdasarkan penghitungan manual dari data PIS-PK oleh seluruh puskesmas di Kota Magelang, nilai IKS telah mencapai angka 0,873 yang menunjukkan capaian sudah sesuai target.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat lima indikator dengan capaian rendah pada awal tahun, pelaksanaan program masih berjalan dan optimisme tetap tinggi bahwa seluruh target dapat tercapai hingga akhir tahun 2025.

#### 2.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

*Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d. Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | Status |
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik | % | 58,00 | 81,00 | 58,00 | 71,60 | S |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan | Persentase rumah tangga yang memiliki akses | % | 77,94 | 98,50 | 77,09 | 78,26 | T |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | Status |
| | Sistem Penyediaan Air Minum | terhadap pelayanan sumber air minum layak | | | | | | |
| | | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | % | 87,74 | 30,00 | 89,49 | 100 | ST |
| 3 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase pembangunan TPST/3R | % | 29,73 | 70,00 | 29,73 | 42,47 | SR |
| 4 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak | % | 73,27 | 92,82 | 72,47 | 78,07 | T |
| 5 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik | % | 34,75 | 64,00 | 34,75 | 54,29 | R |
| 6 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang memiliki PBG | % | 27,15 | 27,25 | 26,77 | 98,25 | ST |
| | | Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota | % | 10,00 | 100 | 25,00 | 25,00 | SR |
| 7 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase Kawasan Strategis yang ditata | % | 70,00 | 100 | 70,00 | 70,00 | S |
| 8 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab | % | 85,69 | 94,88 | 85,69 | 90,31 | ST |
| 9 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | SR |
| 10 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | % | 83,34 | 75,00 | 83,34 | 73,47 | S |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025*

Dari 12 indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat 3 indikator yang kinerjanya sangat tinggi,2 indikator dengan kinerja tinggi, 3 indikator kinerja sedang, 1 indikator kinerja rendah dan 3 indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2025. Capaian kinerja hingga triwulan I masih relatif sama dengan capaian tahun sebelumnya karena mayoritas pekerjaan fisik masih belum dimulai masih pada tahap persiapan.

Kendala pencapaian indikator kinerja sedang, rendah, dan sangat rendah yaitu:

1. Indikator persentase panjang jaringan irigasi yang kondisi baik

   Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah kondisi irigasi yang rusak mayoritas masih berupa saluran alami dengan kelerengan curam yang secara teknis membutuhkan konstruksi kompleks dan pendanaan yang besar. Saluran irigasi dalam kondisi rusak dan sedang di Kota Magelang sepanjang 6.951 meter.

2. Indikator persentase drainase dalam kondisi baik

   Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini hampir sama dengan capaian panjang irigasi kondisi baik, yaitu mayoritas saluran drainase kondisi rusak masih berupa saluran alami yang secara teknis membutuhkan konstruksi

dengan pendanaan yang besar. Saluran drainase dalam kondisi rusak dan sedang di Kota Magelang sepanjang 13.201 meter.

3. Indikator persentase progres pembangunan gedung balai kota

   Kendala dalam pencapaian indikator ini hingga target akhir tahun 2025 karena ada perubahan penjadwalan dalam pekerjaan fisik pembangunan.

4. Indikator Persentase Kawasan Strategis yang ditata belum tercapai hingga triwulan I karena belum semua dokumen RTBL kawasan strategis ditetapkan sebagai perwal yang mempengaruhi capaian perwujudan fisik pada beberapa kawasan strategis. Pemerataan pembangunan di Kota Magelang melalui pengoptimalan fungsi kawasan strategis juga perlu terus didorongkan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat citra dan identitas penanda Kota Magelang serta penguatan fungsi untuk menunjang aktivitas di kawasan strategis.

5. Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

   Capaian kinerja indikator ini masih sangat rendah karena pekerjaan konstruksi yang diawasi masih dimulai pekerjaannya di triwulan I sehingga belum ada proyek yang diawasi.

6. Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

   Penilaian perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang hingga triwulan I masih sama dengan akhir tahun 2024 karena proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang maupun Informasi Rencana Kota masih berproses.

7. Persentase pembangunan TPST/3R

   Pembangunan TPST/3R masih memiliki persentase 42,47 % karena peralihan konsep dari TPST/3R menjadi PDU sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat untuk menjadi TPST/3R beberapa syarat tidak memenuhi seperti jarak dari TPST/3R ke rumah penduduk, sehingga untuk pengembangannya masih memerlukan aturan yang pasti.

#### 2.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

*Tabel 2.5 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d. Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | % | 90 | 90 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/ kota | % | 23,39 | 35,09 | 100 | 100 | ST |
| 2. | Program Kawasan permukiman | Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata | % | 88,00 | 88,00 | 73,47 | 73,47 | T |
| 3 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani | % | 50,63 | 80,41 | 74,21 | 92,28 | ST |
| 4. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. | % | 99,03 | 100 | 96,70 | 96,70 | ST |

*Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025*

Hingga Triwulan I tahun 2025, kinerja pelaksanaan program dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman menunjukan kecenderungan positif dengan status capaian kinerja sangat tinggi untuk empat indikator dan satu indikator tercapai dengan status tinggi. Program kawasan permukiman memiliki status tinggi karena kegiatan ini mulai dilaksanakan di triwulan II dan III.

### 2.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

*Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 2 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang menerima bantuan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 3 | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 4 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS yang diberdayakan | % | 83.33 | 83.33 | 16.67 | 20 | SR |
| 5 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2024*

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja indikator program urusan Pemerintahan bidang sosial menunjukkan kinerja cukup baik, tetapi masih ada 1 indikator yang sangat rendah di triwulan I yaitu Persentase PSKS yang diberdayakan. Pemberdayaan PSKS akan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas PSKS dan juga kepedulian, untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang. Terkait indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani, sampai dengan triwulan I tahun 2025 terdapat 18 korban yang ditangani oleh Dinas Sosial akibat 4 kejadian.

### 2.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

*Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | ST |
| 2 | Program Penanggulangan Bencana | Presentase layanan penanggulangan bencana | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | ST |
| 3 | Program Pencegahan, Penanggulangan, | Persentase pencegahan, penanggulangan, | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | ST |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| | Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | | | | | | |
| | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran* | menit | 5,89 | 15,00 | 6,60 | 100,00% | ST |

*Sumber: Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Satpol Pamong Praja Kota Magelang, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja indikator program urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik. Seluruh indikator kinerja program menunjukkan status kinerja yang sangat tinggi (ST). Persentase penyelesaian pelanggaran K3 menunjukkan realisasi 100% dari target 100%. Sampai dengan triwulan I, terdapat 37 pelanggaran perda dan dapat terselesaikan semua. Patroli pemantauan akan terus dilakukan untuk memantau dan segera menyelesaikan apabila terjadi pelanggaran K3 di lapangan.

Persentase layanan Penanggulangan bencana juga menunjukkan kinerja 100%. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat 14 kejadian dan sudah tertangani semua. Mayoritas kejadian adalah pohon tumbang (4 kejadian) dan ranting pohon patah (3 kejadian). Selain itu, terdapat kejadian rumah/atap roboh, talud dan tanah longsor, serta 1 kejadian kecelakaan air. Kejadian-kejadian tersebut terdapat 1 korban meninggal akibat kecelakaan air. Upaya pencegahan bencana akan terus dilakukan dengan koordinasi dengan OPD-OPD terkait seperti DPUPR, Dinas Perkim, dan DLH. Selain itu, peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat juga dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan prima kepadad masyarakat.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran memiliki 2 indikator yang sudah menunjukkan kinerja yang baik. Indikator Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran menunjukkan kinerja 100%. Indikator Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran juga menunjukkan kinerja 100%. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, waktu tanggap menunjukkan angka 6,60 menit. Kondisi ini didukung oleh lingkup wilayah Kota Magelang yang kecil. Namun terdapat kendala ketika mengakses Kawasan padat penduduk dengan akses jalan yang sempat.

### 2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 2.2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

*Tabel 2.8 Capaian Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | % | 75,83 | 95,25 | 0 | 0 | SR |
| | | Persentase Angkatan Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja | % | 82,53 | 82,53 | 33,86 | 41,06 | SR |
| 2 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitasi Penempatan Kerja | % | 87,27 | 87,27 | 71,43 | 81,85 | ST |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| | | Persentase Peserta Pelatihan yang Menjalankan Wirausaha | % | 52 | 70 | 54,39 | 77,69 | T |
| 3 | Program Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 52 | 45 | 37,91 | 84,25 | T |

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Tahun 2025*

Dari 5 (lima) indikator kinerja program pada urusan tenaga kerja menunjukkan 1 (satu) indikator dengan kinerja sangat tinggi, 2 (dua) indikator dengan kinerja tinggi dan 2 (dua) indikator dengan kinerja sangat rendah.

1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

   Indikator kinerja ini masih dilaksanakan sampai dengan triwulan I berakhir. Sehingga kinerja dari indikator ini belum terlihat. Masih ada beberapa kendala yaitu instruktur yang bersertifikat kompetensi dari LSP masih sangat terbatas. Selain itu, perbandingan jumlah instruktur yang ada dengan jumlah pelatihan yang harus dilaksanakan belum imbang. Kendala lain yang dihadapi adalah dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai dengan pelatihan yang dilaksanakan.

2. Persentase Angkatan Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja

   Capaian kinerja persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan adalah sangat rendah. Hal ini dikarenakan proses pelatihan belum selesai dilaksanakan hingga akhir triwulan I. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah sarana prasarana pelatihan yang belum memadai apabila dibandingkan jumlah pelatihan yang harus dilaksanakan.

3. Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitasi Penempatan Kerja

   Kinerja dari indikator ini sangat tinggi. Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang telah melaksanakan MoU dengan beberapa perusahaan sehingga sangat membantu untuk meningkatkan kinerja indikator ini. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang memfasilitasi mini jobfair yang cukup efektif untuk membantu mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Namun jumlah lowongan yang terdaftar masih belum sebanding dengan jumlah pencari kerja. Selain itu, bursa kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai fasilitasi rekruitmen tenaga kerja Kota Magelang lebih banyak di dominasi oleh pencari kerja dari luar Kota Magelang.

4. Persentase Peserta Pelatihan yang Menjalankan Wirausaha

   Capaian dari indikator ini tinggi dikarenakan usulan peserta wirausaha yang berasal dari RT (warga) sudah mulai dilaksanakan di triwulan I. Kendala yang dihadapi adalah keberlanjutan monitoring evaluasi yang seringkali peserta tidak memberikan informasi yang jelas.

5. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)

   Kinerja indikator ini tinggi, namun masih mengalami kendala yaitu kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tata kelola kerja yang layak sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang terus melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kegitan baik secara offline maupun online.

### 2.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

*Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hingga Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase program perangkat daerah yang responsif gender | % | 17,34 | 18,13 | 18,13 | 100 | ST |
| | | Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga | % | 23,85 | 23,85 | 17,04 | 71,42 | R |
| | | Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | % | 24 | 24 | 24 | 100 | ST |
| | | Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan | % | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 100 | ST |
| 2 | Program Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)* | % | 63,16 | 0,04 | 18,43 | 8,85 | SR |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Keluarga Berkualitas | % | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 100 | ST |
| 4 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Persentase PD yang mengelola data gender dan anak | % | 28,57 | 28,57 | 39,29 | 100 | ST |
| 5 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak | % | 73,08 | 61,29 | 73,08 | 100 | ST |

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dari delapan indikator urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 6 indikator berstatus kinerja sangat tinggi, satu indikator dengan kinerja rendah, dan satu lagi merupakan indikator dengan kinerja sangat rendah bila dibandingkan dengan target tahun 2025. Dua indikator yang tergolong rendah dan sangat rendah adalah :

1. Persentase perempuan keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga menunjukkan tingkat capaian sebesar 71,42% dari target yang harus dipenuhi di tahun 2025. Samapai dengan triwulan I tahun 2025, sebanyak 300 orang perempuan kepala keluarga telah mengikuti pelatihan peningkatan perekonomian. Adapun sisanya berdasarkan target 23,85% dari total jumlah perempuan kepala keluarga yaitu 120 orang direncanakan menjadi peserta pelatihan yang akan dilaksanakan pada triwualn III. Sehingga sampai dengan akhir tahun target pelatihan optimis akan dicapai.
2. Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)* sampai dengan triwulan I 2025 menunjukkan jumlah 12 kasus. Kasus kekerasan tersebut didominasi oleh kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT). Angka yang masih cukup tinggi mengingat untuk mencapai zero kekerasan terhadap perempuan walaupun tentunya tealh dilakukan beragam Upaya preventif diantaranya melalui Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta advokasi kebijakan dan pendampingan korban kekerasan. Pada tahun 2025 juga telah dibentuk UPTD PPPA yang diharapkan mampu berkontribusi untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pembentukan UPTD juga memberikan kemudahan bagi para korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.

### 2.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

*Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pangan s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaaan Pangan | % | 114,85 | 100 | 123,89 | 123,89 | ST |
| 2 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan | % | 100 | 100 | 0 | 0 | SR |
| 3 | Program pengawasan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Aman | % | 88,48 | 96,52 | 90,57 | 93,83 | ST |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025*

Berdasarkan evaluasi pada Triwulan I tahun 2025 kinerja program urusan pangan memiliki status yang berbeda beda, dimana 2 dari 3 program masih berstatus Sangat Rendah dan hanya 1 Program yang memiliki Capaian sangat Tinggi. Hal ini tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program penanganan kerawanan masih berstatus 0% karena pada Triwulan I kegiatan penanganan masih dalam proses pelaksanaan sementara identifikasi kelurahan sudah dilakukan pada tahun sebelumnya dimana sebanyak 9 Kelurahan berstatus prioritas 4. Berdasarkan kriteria yang disusun oleh BAPANAS bahwa prioritas 1-3 masuk dalam kategori Rawan Pangan sedangkan prioritas 4-6 masuk dalam kategori Rentan Pangan. Adapun 9 kelurahan yang masuk dalam kategori rentan pangan berdasarkan dokumen FSVA Tahun 2024 adalah Kelurahan Magersari, Jurangombo Selatan, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Magelang, Panjang dan Gelangan
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Triwulan ke I baru melakukan pengambilan sampel sebanyak 53 sampel dan 5 diantaranya mengandung cemaran bahan berbahaya yang masing-masing mengandung residu pestisida. Ke 5 bahan pangan segar ini adalah :
   a. Kiwi yang berasal dari Yogyakarta,
   b. Cabe rawit, cabe keriting dan Kobis yang berasal dari Kaliangkrik, Kab. Magelang
   c. Jamur Enoki yang berasal dari China
3. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat memiliki capaian yang sangat tinggi karena dukungan dari ketersediaan Beras yang cukup melimpah dipasaran dimana Posisi Kota Magelang yang merupakan central perdagangan memungkinkan tingginya pasokan dari daerah lain melebihi jumlah kebutuhan masyarakat akan beras.

### 2.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

*Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani | % | 33,33 | 80 | 0 | 0 | SR |
| 2 | Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah | % | 97,67 | 80 | 0 | 0 | SR |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 3 | Program pengelolaan tanah kosong | Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan | % | 100 | 80 | 100 | 100 | ST |
| 4 | Program penatagunaan tanah | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 62,42 | 99 | 0 | 0 | SR |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025*

Dari empat indikator kinerja urusan pertanahan, terdapat satu indikator dengan capaian sangat tinggi dan tiga indikator sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 mencapai realisasi sangat rendah. Indikator dengan capaian sangat rendah tersebut meliputi:

1. Indikator persentase kasus sengketa tanah yang tertangani sangat rendah dengan realisasi hingga Triwulan I tahun 2025 masih 0% dengan target 80% karena penyelesaian sengketa pertanahan masih dalam proses pengadilan. Diharapkan penyelesaian sengketa pertanahan di akhir tahun 2025 sudah terselesaikan.
2. Indikator persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan hingga Triwulan I tahun 2025 masih 0% dikarenakan kasus permasalahan tanah yang mendapat ganti rugi/santunan tanah masih dalam proses administrasi. Kasus ini merupakan kasus yang belum terselesaikan pada tahun 2024, karena ahli waris dari penerima santunan merupakan ODGJ sehingga membutuhkan syarat administrasi dan rekomendasi yang lebih rumit.
3. Indikator Persentase luas lahan bersertifikat menunjukkan realisasi 0 % dikarenakan masih dalam proses pemberkasan administrasi di BPN. Sampai dengan April 2025, jumlah pendaftaran tanah hak pakai sebanyak 7 bidang dan sampai dengan sekarang belum terbit ijinnya. Jumlah PSU Perumahan komersil yang didaftarkan sebanyak 14 bidang dari 5 perumahan, dan jumlah bidang yang sudah terbit sertifikatnya sebanyak 1 bidang pada bulan April 2025. Dari segi luas lahan bersertifikat, tahun ini tanah pemerintah kota yang sudah bersertifikat seluas 2.197.757 m2 dari 3.520.706 m2.

Indikator Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu 100%. Meskipun demikian, capaian yang sangat tinggi tersebut diperoleh karena tidak adanya tanah kosong milik negara yang tersedia di Kota Magelang, sehingga tidak ada permasalahan pertanahan.

### 2.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

*Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | % | 100 | 100 | 50 | 50 | R |
| 2 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | % | 100 | 100 | 0 | 0 | SR |
| 3 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati | % | 30,25 | 31,33 | 30,52 | 97,41 | ST |
| 4 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3 | % | 66,67 | 83,33 | 66,67 | 80 | T |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | % | 43,33 | 46,67 | 43,33 | 92,84 | ST |
| 6 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | % | 22,22 | 24,14 | 0 | 0 | SR |
| 7 | Program Penghargan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase cakupan penghargaanyang diterima masyarakat | % | 14,06 | 18,23 | 14,06 | 77,14 | T |
| 8 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 50 | 50 | R |
| 9 | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan persentase sampah yang terkelola | % | 1,21 | 3,50 | -0,32 | -9,14 | SR |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025*

Dari 8 program urusan Lingkungan Hidup, 3 program memiliki capaian yang tinggi dan sangat tinggi sementara 5 program memiliki capaian yang rendah dan sangat rendah.

Beberapa program memiliki capaian Tinggi dan sangat tinggi bukan terletak pada kinerja organisasi pada tahun 2025 yang cukup tinggi, akan tetapi lebih pada bentuk pelaporan kinerja yang bersifat jangka Panjang dan angka capaian tidak diukur tiap tahun tapi melanjutkan capaian pada tahun sebelumnya.

Sementara beberapa program yang memiliki capaian kinerja yang masih rendah dan sangat rendah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program perencanaan lingkungan hidup menargetkan 1 Dokumen untuk tahun 2025 berupa Dokumen Rencana Aksi Daerah Gerakan Rendah Karbon (RAD GRK). Berdasarkan pada capaian Triwulan 2, dokumen ini masih dalam tahap proses penyusunan.
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup masih memiliki capaian 0% karena pada Triwulan 2 Tahun 2025, kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan masih dalam tahap pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium berupa sampel Air, Tanah dan Udara. Sampel ini juga belum memenuhi keterwakilan pada setiap musimnya sehingga masih membutuhkan sampel lain yakni pada musim kemarau untuk memperoleh hasil pemantauan yang maksimal dan memenuhi kriteria yang lebih valid.
3. Kegiatan penyuluhan Lingkungan oleh DLH kepada sejumlah Lembaga Pendidikan dan Masyarakat belum dapat dilaksanakan pada Triwulan 1 Tahun 2025 sehingga capaian pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat masih 0%.
4. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat merupakan kegiatan perlombaan dibidang lingkungan dengan harapan adanya peningkatan aktivitas masyarakat terkait dengan peningkatan kualitas lingkunga hidup. Kegiatan ini masih dalam proses dan hasilnya diperoleh pada akhir tahun.
5. Pada awal tahun 2025 ini DLH memperoleh 2 pengaduan lingkungan berupa kebisingan di Gedung Informa yang mengganggu kegiatan belajar mengajar di SMA Muhammadiyah 1 dan Peternakan Kuda di RW 7 Potrobangsan. sementara saat baru 1 pengaduan yang dapat diselesaikan.

6. Program pengelolaan persampahan memiliki capaian yang sangat rendah yakni -0,32%, hal ini terjadi karena terkendala pada aspek sarana prasarana, kemampuan SDM, kapasitas kelembagaan pada Bank Sampah yang mengalami kemunduran serta manajemen persampahan yang belum berjalan maksimal.

### 2.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL | % | 100 | 99.95 | 99.79 | 99.84 | ST |
| | | Persentase Kepemilikan KK | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase Kepemilikan KIA | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 2 | Program Pencatatan Sipil | Persentase pasangan yang memiliki akta Perkawinan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase penerbitan akta kematian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase penerbitan akta perceraian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 3 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis Teknologi Informasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 4 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja indikator program urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan kinerja yang baik. Keseluruhan indikator menunjukkan status ketercapaian Sangat Tinggi (ST) meskipun ada 1 indikator yang belum mencapai target, yaitu Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL. Pada indikator ini, sampai dengan triwulan I terdapat 99.568 penduduk usia wajib KTP dan sudah ada 99.354 penduduk usia wajib KTP yang sudah direkam. Upaya jemput bola pelayanan akan terus dilakukan tetapi terdapat beberapa kendala salah satunya adalah pemutusan akses *machine to machine* (m2m) dari pusat yang akan disolusikan dengan berlangganan jaringan tertutup untuk jemput bola.

### 2.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

*Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hingga Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Persentase kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 2 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 3 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase kelurahan yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |

*Sumber: DPMP4KB, 2025*

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan I 2025 keseluruhannya menunjukkan kinerja sangat tinggi untuk semua indikator dari tiga program yang diampu. Pada program peningkatan kerja sama antar desa, seluruh kelurahan di Kota Magelang sejumlah 17 kelurahan telah difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi tersebut berupa fasilitasi pertemuan antar kelurahan, pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat serta pendampingan oleh tenaga pendamping kelurahan terkait program pemberdayaan masyarakat yaitu RKM.

Selain itu, dalam kaitannya dengan program administrasi pemerintaha desa, kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa terlihat dari Evaluasi Perekembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) yang diselenggarakan oleh Direktorat Evaluasi Penyelenggaraan Desa Kemendagri, sejak tahun 2024 seluruh kelurahan di Kota Magelang telah mencapai kategori cepat berkembang. Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap tahunnya meliputi penilaian pada bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Tantangan kedepan adalah upaya untuk mempertahankan capaian kategori kelurahan cepat berkembang setiap tahunnya dengan dengan arah pertimbangan menyesuaikan indikator dalam Indeks Desa yang telah diluncurkan Bappenas tahun 2025 yang meliputi layanan dasar, social, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata Kelola pemerintahan.

Sesuai dengan Permendagri No 18 Tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan dalam hal ini meliputi RT dan RW melalui pendampingan penyusunan profil RT dan Rencana Kerja RT, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pemberdayaan yang dilakukan meliputi fasilitasi kegiatan, pembinaan, dan pelatihan tugas pokok dan fungsi LKK serta evaluasi kinerja khususnya untuk LPM melalui Lomba LPM Tingkat Kota Magelang.

### 2.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang sampai dengan triwulan I tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut.

*Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hingga Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada | % | 40,34 | 27 | NA | NA | NA |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| | | Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)* | | | | | | |
| 2 | Program Pembinaan Keluarga Berencana | *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) | % | 71,04 | 71,04 | 68,57 | 96,52 | ST |
| 3 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB | % | 72,53 | 75 | 37,32 | 49,76 | SR |

*Sumber: DPMP4KB Kota Magelang, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan I tahun 2025 menunjukkan kinerja yang bervariasi. Kinerja urusan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada program pengendalian penduduk, persentase penurunan ASFR usia 15-19 th belum dapat diketahui. Angka ASFR dirilis oleh Kemendukbangga/BKKBN di akhir semester I setiap tahunnya. Namun demikian, melihat pada kondisi tahun-tahun sebelumnya, penurunan ASFR selalu mencapai target. Upaya preventif melalui pembinaan Bina Keluarga Remaja, Kampanye pencegahan perkawinan anak oleh Duta Generasi Berencana (Genre), pendampingan melalui program-program kelas parenting dan sosialisasi mengenai Kesehatan reproduksi bagi remaja putri dinilai cukup efektif menekan angka ASFR.
2. Indikator kedua yang yaitu prevalensi CPR sebesar 68,57% pada triwulan I tahun 2025 hampir memenuhi penyesuaian target tahun 2025 yang berada di angka 71,04%. Sebanyak 9.418 Pasangan usia subur dari total jumlah PUS sebesar 13.734 telah mengikuti program KB. Kegiatan Safari KB gratis serta peningkatan pengetahuan mengenai ragam kontrasepsi melalui penyuluhan dan pendampingan terutama kepada perempuan dengan usia kawin pertama berkontribusi besar terhadap pemenuhan target CPR.
3. Adapun pada indikator ketiga yaitu perentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB, tingkat capainnya masih berstatus sangat rendah Hal ini disebabkan peningkatan jumlah anggota keluarga tribina,UPPKS yang semula pada tahun 2024 sebanyak 3.176 menjadi 4.022 keluarga pada tahun 2025. Sementara itu, dari 4.022 keluarga, baru 1.501 yang ber-KB. Sehingga diharapkan pada triwulan selanjutnya upaya pembinaan keluarga tribina berbasis kelompok yang dilakukan focus kepada peningkatan kapasitas tenaga pendamping bina keluarga, sosialisasi kepada kelompok binaan serta pendekatan personal melalui kunjungan rumah diharapkan dapat menaikkan persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB.

### 2.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

*Tabel 2.16 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s.d. Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Kinerja Lalu Lintas Kota (VC Ratio) | | 0,72 | 0,61 | 0,70 | 84,96 | T |
| | | Pengguna moda transportasi umum di perkotaaan (PPTUK) | % | 8,29 | 7,84 | 7,04 | 89,75 | T |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025*

Kinerja program pada urusan perhubungan menunjukkan kinerja yang tinggi pada kedua indikator penandanya. Meskipun hingga triwulan I capaian kinerja indikator program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sudah tinggi, hingga akhir tahun 2025 perlu didorongkan upaya untuk menurunkan atau minimal mempertahankan nilai VC Ratio dan

meningkatkan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK). Upaya untuk meningkatkan kinerja capaian indikator tersebut sejalan dengan salah satu program unggulan walikota terpilih, yaitu pengembangan angkutan pelajar gratis.

### 2.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

*Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Angka | 5 | 5 | 5* | 100 | ST |
| 2 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase pemanfaatan aplikasi informatika | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2025*
**Angka realisasi tahun 2024*

Berdasarkan tabel tersebut, sampai dengan triwulan I tahun 2025, kinerja Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menunjukkan capaian yang baik. Indikator persentase pemanfaatan aplikasi informatika menunjukkan realisasi 100,00% sampai dengan triwulan I ini. Kondsi ini didorong banyaknya aplikasi informatika yang disusun oleh OPD sendiri maupun aplikasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sehingga mau tidak mau seluruh OPD akan memanfaatkan aplikasi informatika.

Untuk tingkat keterbukaan Informasi publik, angka yang digunakan merupakan angka capaian tahun 2024 yaitu 5 (informatif). Penilaian tahun 2025 masih belum dilakukan penilaian. Upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator ini adalah perbaikan dan peningkatan kualitas data dan Informasi dalam website dan media sosial Pemerintah Kota Magelang.

### 2.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

*Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Jumlah KSP / USP Koperasi memiliki izin usaha simpan pinjam | % | 38,22 | 58,87 | 38,05 | 64,64 | R |
| 2 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan | % | 53,75 | 42,91 | 53,94 | 98,08 | ST |
| 3 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya | % | 11,11 | 27,55 | 2,21 | 8,03 | SR |
| 4 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya | % | 43,71 | 26,18 | 43,71 | 99,99 | ST |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 5 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi berkualitas | % | 38,33 | 46,00 | 26,14 | 56,83 | R |
| 6 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan | % | 60,34 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | SR |
| 7 | Program Pengembangan UMKM | Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro | % | 2,61 | 2,00 | -74,94 | 0,00 | SR |

*Sumber: DPPKUM, 2025*

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki 7 indikator kinerja. dari 7 (tujuh) indikator terdapat 2 (dua) indikator yang memiliki status Sangat Tinggi yaitu Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan dengan capaian 98,08 % dan indikator Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya dengan capaian 99,99 %. Adapun 5 indikator yang perlu perhatian antara lain:

1. Jumlah KSP/USP Koperasi memiliki izin usaha simpan pinjam

   Realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2025 berada pada angka 38,05 % dengan tingkat capaian terhadap akhir RPJMD 64,64% dengan status Rendah. Masih diperlukan upaya yang keras untuk sosialisasi terhadap KSP/USP Koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam.

2. Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya

   Realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2025 berada pada angka 2,21 % dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 8,03 % dengan status Sangat Rendah. dari 226 koperasi simpan pinjam di Kota Magelang baru terdapat 5 koperasi yang dikategorikan dengan sebagai koperasi sehat berdasarkan kertas kerja penilaian koperasi. indikator penilaian kesehatan yang meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan. Perlu upaya sosialisasi dan pembinaan berkaitan dengan tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan terhadap koperasi di Kota Magelang.

3. Persentase koperasi berkualitas

   Realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2025 berada pada angka 26.14 % dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 56.83 % dengan status Rendah. Ketercapaian ini dipengaruhi oleh baru terdapat 63 koperasi dari 241 koperasi yang meningkat kualitasnya,dengan kriteria telah Rapat Anggota Tahunan (RAT), peningkatan volume usaha dan pertumbuhan aset. Diperlukan upaya pembinaan dan pendampingan serta dorongan terhadap koperasi di Kota Magelang agar dapat melaksanakan RAT dan melaporkan kepada instansi terkait.

4. Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan
5. Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro

   Sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025, omzet pelaku usaha mikro sebesar Rp 207.094.218.795,00. Peningkatan omzet usaha mikro perlu ditingkatkan demi mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang. Upaya pelatihan, peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran serta membangun jejaring perlu dilaksanakan untuk mendongkrak omzet pelaku usaha mikro.

#### 2.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal s.d Triwulan I Tahun 2025

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Investor PMA/PMDN | % | 83,36 | 100 | 95,81 | 95,81 | ST |
| 2 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase LOI yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 3 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai SOP | % | 98,82 | 98,82 | 99,03 | 100 | ST |
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | % | 26,64 | 30 | 1,50 | 5 | SR |
| 5 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Data, Informasi dan Sistem Informasi PM | % | 177,99 | 10 | -55,93 | 0 | SR |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, Tahun 2025*

Kinerja dari kelima program pada urusan penanaman modal memerlukan akselerasi pencapaian target pada triwulan berikutnya. Dari kelima indikator kinerja, terdapat tiga yang memiliki status sangat tinggi, dua indikator memiliki status rendah. Kendala yang dihadapi dari pencapaian indikator urusan penanaman modal adalah:

1. Persentase Investor PMA/PMDN

   Indikator Persentase Investor PMA/PMDN memiliki kinerja sangat tinggi. Penyumbang investasi terbanyak adalah dari usaha mikro. Adapun kendala yang dihadapi yaitu masih sedikitnya kepeminatan investor untuk berinvestasi di Kota Magelang dikarenakan masih sedikitnya asset yang *clean and clear* bagi pengusaha. Selain itu belum optimalnya informasi mengenai potensi investasi di Kota Magelang menyebabkan investor dari luar Kota Magelang kurang mengetahui potensi investasi di Kota Magelang.

2. Persentase LOI yang ditindaklanjuti

   Status capaian kinerja indikator persentase LOI yang ditindaklanjuti sangat tinggi. Walaupun capaian indikator kinerja sudah sangat tinggi, namun terdapat kendala sedikitnya kepeminatan investor untuk berinvestasi di Kota Magelang. Salah satu penyebabnya adalah adanya kendala administrasi dari asset milik daerah yang ditawarkan untuk diinvestasikan.

3. Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai SOP

   Status pencapaian dari indikator ini sangat tinggi. Namun masih ada kendala yaitu belum optimalnya koordinasi antara OPD pemberi rekomendasi.

4. Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

   Realisasi indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terkategori rendah. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban serta ketiadaan sanksi yang tegas untuk pelaku usaha yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan sehingga perlu sosialisasi dan pendekatan yang lebih masif.

5. Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Data, Informasi dan Sistem Informasi PM

   Realisasi indikator ini sangat rendah. Hal ini dikarenakan keamanan web yang kurang sehingga web diretas. Hal ini menyebabkan data pengguna informasi menjadi hilang dan web untuk sementara di takedown. Selain itu, data digital yang telah disediakan belum optimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena keterbatasan dalam penggunaan teknologi.

### 2.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan melalui 2 program. Realisasi indikator kinerja program urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

*Tabel 2.20 Tabel Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan | % | 67,74 | 77,27 | 19,35 | 25,04% | SR |
| | | Persentase peningkatan pemuda yang dibina | % | 11,23 | 6,15 | -73,68 | 0% | SR |
| 2 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga | % | 39,05 | 17,65 | 10.500 | 100% | ST |
| | | Persentase peningkatan atlet yang dibina | % | 13,74 | 11,76 | -32,58 | 0% | SR |
| | | Persentase pelatih yang bersertifikat | % | 80,65 | 83,87 | 81,72 | 97,44% | ST |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase organisasi kepramukaan yang dibina | % | 100 | 97,14 | 100 | 100% | ST |

*Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Magelang, 2025*

Dari 3 (tiga) program dengan 6 (enam) indikator program kinerja urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, terdapat 2 (dua) indikator yang kinerjanya sangat tinggi, 3 (tiga) indikator yang kinerjanya sangat rendah serta 1 (satu) indikator kinerja rendah, jika dibandingkan terhadap target tahun 2025. Masih adanya indikator yang belum mencapai target yaitu:

1. Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan kondisi di triwulan I masih berada di bawah target, hal tersebut dikarenakan dari 31 organisasi kepemudaan yang terdata, baru sebanyak 6 organisasi pemuda yg dibina oleh Disporapar. Perlu upaya keras untuk bisa mencapai target pada akhir tahun 2025. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target adalah dengan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dimana perlu dipahamkan pentingnya regenerasi, dan juga agar dapat meningkatkan partisipasi OKP dalam program kepemudaan.

   Berikut beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan:

2. Persentase peningkatan pemuda yang dibina juga masih sangat rendah capaiannya di triwulan I ini, masih jauh dari yang ditargetkan pada akhir tahun 2025. Dari total 190 orang, baru bisa dilaksanakan pembinaan kepada 50 orang pemuda. Dibutuhkan keras dan upaya untuk mencapai target di akhir tahun. Beberapa upaya yang dilaksanakan adalah dengan pendampingan bisnis, dan pelatihan. Di triwulan I ini beberapa pelatihan yang dilaksanakan untuk pemuda adalah barista, fashion design, dan bakery. Lomba pemuda pelopor biasanya dilaksanakan di triwulan II atau IV. Demikian juga dengan kegiatan Wirausaha pemuda atau BOS muda, rencana pada triwulan II atau ke III sudah selesai untuk yang pelaksanaan tahap I. Sedang mulai dipersiapkan untuk pembukaan pendaftaran BOS muda untuk tahap II.

3. Persentase peningkatan atlet yang dibina capaiannya juga belum menunjukkan kenaikan yang signifikan di triwulan I ini. Dari target 89 atlet, baru 60 atlet yang dibina di triwulan I. Capaian tersebut selain dari kelas khusus olahraga (KKO) di SMP N 11, yang di tahun ini sudah menjadi 3 kelas. Kegiatan pembinaan olahraga masih terus dilaksanakan pada triwulan I ini telah dilaksanakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) pada bulan Januari dan Februari 2025 Untuk 14 cabang olah raga. Upaya untuk mencapai target sampai dengan akhir tahun 2025 pada bulan April akan mengikuti POPDA tingkat Kedu, dan kegiatan untuk kesehatan masyarakat yaitu segar D'mosseling juga sudah berjalan. Sampai dengan bulan Desember masih ada beberapa even menunggu untuk diikuti yaitu popda jateng SD, SMP, SMA, Selain itu event untuk disabilitas tahun 2025 ini juga ada 2 yaitu Peparpeda (Pekan Paralimpik Pelajar Daerah), serta peparprov. Pembinaan yang dilakukan oleh KONI adalah persiapan pra porprov dan kalau yang dari KORMI ada Forda (Festival Olahraga Masyarakat Daerah), dan fornas.

Pelaksanaan 5 (lima) indikator kepemudaan dan olahraga yang kinerjanya sudah sangat tinggi, untuk indikator “Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga”, “Persentase pelatih yang bersertifikat” dan “Persentase organisasi kepramukaan yang dibina” hingga triwulan I tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk peningkatan prestasi olah raga di triwulan I ini telah dilaksanakan telah dilaksanakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) pada bulan Januari dan Februari 2025. Sebnyak 14 cabang olah raga yang dilombakan, diantaranya taekwondo, renang, sepak takraw, atletik, basket,

panahan, pencak silat, karate, tenis meja, bulutangkis, voli indoor, sepak bola, tenis lapangan dan kempo, dimana dari ke 14 cabor tersebut kesemuanya mendapatkan kejuaraan.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan POPDA.

### 2.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

*Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data | % | 33.33 | 39 | 33.33 | 85.46 | T |

*Sumber: Bidang Pusat Statistik 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator program urusan Pemerintahan bidang statistik menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indikator persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data menunjukkan status capaian Tinggi (T). Sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini, data set yang ada masih sama dengan kondisi akhir tahun 2024 yaitu sejumlah 800 data set. Listing data dan pendataan akan terus dilakukan untuk menambah jumlah data set yang dipublikasikan sampai dengan akhir tahun 2025.

### 2.2.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

*Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi | Angka | 109* | 109 | 109* | 100 | ST |
| | | Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi | Angka | 61* | 61 | 61* | 100 | ST |
| | | Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi | Angka | 61* | 61 | 61* | 100 | ST |
| | | Nilai Pengelolaan Aset Informasi | Angka | 138* | 138 | 138* | 100 | ST |
| | | Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi | Angka | 72* | 72 | 72* | 100 | ST |

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2025*

*Angka realisasi tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator urusan persandian menunjukkan kinerja yang baik. Dari 5 indikator yang ada, semua sudah memiliki status capaian yang Sangat Tinggi (ST). Realisasi triwulan I tahun 2025 menggunakan hasil penilaian Indeks KAMI tahun 2023 karena tahun 2024 tidak mengajukan penilaian ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan tahun 2025 ini belum mengajukan penilaian. Pada tahun 2025 ini, upaya untuk pemenuhan indikator tersebut terus dijaga dan dilakukan. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan dari regulasi atau SOP yang sudah dibuat untuk mendukung implementasi dalam penilaian Indeks KAMI.

### 2.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

*Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Magelang Hingga Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2026 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ST |
| 2 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | % | 91,67 | 92,00 | 91,67 | 100 | ST |
| 3 | Program Pembinaan Sejarah | Cakupan pembinaan sejarah | % | 100 | 67,00 | 100 | 100 | ST |
| 4 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | % | 35,29 | 17,00 | 35,29 | 100 | ST |
| 5 | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase peningkatan kunjungan museum | % | 58,44 | 20,00 | -91,97 | 0 | SR |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025*

Dari lima indikator kinerja urusan kebudayaan, terdapat empat indikator yang menunjukkan capaian sangat tinggi jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025. Namun, terdapat satu indikator dengan capaian yang masih sangat rendah, yaitu persentase peningkatan kunjungan museum.

Capaian indikator ini masih jauh dari target peningkatan sebesar 20%, sebagaimana direncanakan dalam tahun 2025. Hingga Triwulan I Tahun 2025, jumlah kunjungan museum belum menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pelaksanaan program baru berjalan satu triwulan.

Meskipun demikian, dengan berbagai strategi promosi dan peningkatan layanan museum yang telah direncanakan, capaian indikator ini tetap optimis dapat dikejar dan tercapai hingga akhir tahun 2025.

### 2.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

*Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Hingga Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase pemerataan layanan perpustakaan | % | 64,06 | 64,06 | 37,50 | 58,54 | R |
| | | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan | % | 51,09 | 51,09 | 82,09 | 100 | ST |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| | | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan | % | 68,18 | 70,41 | 68,75 | 97,64 | ST |
| | | Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan | % | 47,67 | 47,67 | 46,17 | 96,85 | ST |
| | | Persentase perpustakaan ber-SNP | % | 45,89 | 50 | 46,20 | 92,40 | ST |
| | | Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan | % | 34,85 | 34,85 | -24,31 | 0 | SR |
| | | Persentase peningkatan anggota perpustakaan | % | 32,67 | 32,67 | 32,91 | 100 | ST |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dari tujuh indikator urusan perpustakaan, 5 indikator berstatus kinerja sangat tinggi dan dua lainnya berkinerja rendah dan sangat rendah. Faktor pendorong dan pengahmbat kinerja tersebut diantaranya :

1. Pada indikator rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, kinerja jauh melampaui target dikarenakan *updating system* pencatatan koleksi yang saat ini tidak hanya merujuk pada koleksi perpustakaan kota namun juga perpustakaan yang ada pada jenjang Pendidikan maupun pada perpustakaan yang ada di masyarakat. Selain itu, Kerjasama dengan berbagai sector utamanya media massa mendukung ketercapaian target melalui program donasi buku ke perpustakaan.
2. Indikator persentase pemerataan layanan perpustakaan. Dari total 192 RW, baru 72 RW terlayani layanan perpustakaan. Upaya pemerataan terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi layanan perpustakaan, penambahan jam perpustakaan keliling dikarenakan 2 dari 4 armada perpustakaan keliling mengalami kerusakan. Untuk itulah pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk armada menjadi perhatian sehingga di triwulan selanjutnya target titik layanan dapat tercapai.
3. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan pada triwulan I tahun 2025 masih menunjukkan hasil dibawah tahun 2024 pada triwulan yang sama, sehingga indikator peningkatan persentase belum dapat dihitung. Namun seperti tahun selanjutnya, ketercapaian target akan diupayakan dilakukan pada triwulan II, terutama saat musim liburan sekolah melalui kegiatan yang diinisiasi oleh Disperpusip yang melibatkan pengunjung/ masyarakat terutama anak sekolah. Upaya pelibatan masyarakat juga terus digalakkan melalui ajang kreatifitas Duta Baca, Duta Literasi dan komunitas peduli literasi yang ada di Kota Magelang. Sinergi lintas sector dari berbagai pihak diharapkan mampu meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan sehingga menjangkau seluruh daerah dan masyarakat.

### 2.2.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

*Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Hingga Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengelolaan Arsip | Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan | % | 100 | 100 | 95,33 | 95,33 | ST |
| 2 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan | % | 100 | 100 | 25 | 25 | SR |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2025*

Kinerja urusan kearsiapan sampai dengan triwulan I tahun 2025 bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 mempunyai 2 indikator dengan kinerja yang berbeda. Satu indikator berkinerja tinggi yaitu persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan dan yang kedua memiliki indikator kinerja sangat rendah yaitu persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan. Pada program perlindungan dan penyelamatan arsip, target penyelamatan adalah sebanyak 3.000 arsip setiap tahunnya yang mana di breakdown menjadi 750 arsip per triwulan. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebanyak 750 arsip dinamis telah dilindungi dan terselamatkan. Adapun sisanya akan dilakukan sesuai rencana yaitu pada triwulan II, III dan IV sehingga diharapkan target pada akhir tahun akan tercapai.

Dalam kaitannya dengan Nilai pengawasan arsip Kota Magelang tahun 2024 mengalami kenaikan 2,19 poin dari tahun 2023 dengan nilai 86,46. Namun demikian, dalam nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) hanya memperoleh nilai 80,85, jauh dibawah nilai ASKE sebesar 90,2. Dengan demikian, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama pada aspek sumber daya kearsipan yaitu peningkatan kompetensi arsiparis dan pembinaan serta monitoring evaluasi kearsipan.

### 2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

*Tabel 2.26 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Peternakan s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program pengelolaan perikanan budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | % | 0,75 | 1 | 0,18 | 18 | SR |
| 2 | Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Jumlah total produksi olahan perikanan (ton) | % | 236 | 238 | 51 | 21,43 | SR |

*Sumber: Disperpa Kota Magelang, Tahun 2025*

Dua Program dari Urusan Kelautan dan Perikanan ini memiliki capaian Sangat Rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Perikanan Pengelolaan Budidaya sangat bergantung kepada ketersediaan lahan dan ketersedian sumberdaya air. Perikanan di Kota Magelang sangat menggantungkan air dari Irigasi, sementara itu air yang mengalir pada Saluran Irigasi merupakan air yang difungsikan untuk kegiatan pertanian, sehingga pada musim-musim tertentu sering terjadi adanya konflik penggunaan air. Hal inilah yang melatarbelakangi terhambatnya produksi sektor perikanan.
2. Pengolahan Ikan di Kota Magelang masing terbilang tradisonal dan terbatas pada pengolahan ikan bandeng menjadi banding presto. Meskipun memperoleh bantuan dari pusat berkaitan dengan pengolahan ikan, namun kemampuan SDM ini yang menjadi hambatan bagi perkembangan varian produk pengolahan ikan. Sehingga penjualan pun hanya terbatas di pasar tradisional. Oleh karena itu perlu kiranya pengembangan disektor pengolahan ikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan SDM dibidangnya serta pengembangan sarana prasarana disektor pengolahan ikan.

#### 2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

*Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Presentase Destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik | % | 86,67 | 86,67 | 0 | 0 | SR |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 2 | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara | % | 27,20 | 11,11 | 71,77 | 100 | ST |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota | % | 23,77 | 13,33 | -29,37 | 0 | SR |
| 3 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kapasitasnya | % | 7,86 | 4,72 | 1,99 | 25 | SR |
| | | Persentase peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | % | 66,67 | 33,33 | 0 | 0 | SR |

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2025*

Terdapat lima indikator program yang menunjukkan kinerja urusan pariwisata. Capaian kinerja urusan pariwisata pada triwulan 1 masih sangat rendah kecuali pada presentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara.

1. Persentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik

   Capaian kinerja indikator ini masuk kategori sangat rendah pada triwulan 1. Hal ini disebabkan belum ada pendataan terhadap destinasi wisata pada triwulan 1. Kendala yang dihadapi adalah disebabkan keterbatasan pemahaman pengelola destinasi pariwisata untuk meningkatan pengelolaan destinasi.

2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara

   Capaian kinerja indikator ini adalah sangat tinggi. Kota Magelang sebagai penyangga KSPN Borobudur harus dapat mengambil peran untuk menangkap wisatawan yang datang ke Borobudur. Salah satu yang dilakukan adalah penyiapan akomodasi. Pada tahun 2025 ini tealh terdapat tambahan pembangunan hotel oleh investor. Selain itu, pembinaan destinasi terutama destinasi edukasi yang seringkali menjadi tujuan bagi wisatawan mancanegara.

3. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota

   Daya tarik wisata Kota Magelang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan destinasi dan berbagai macam event yang ada di Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang berusaha untuk meningkatkan skala event menjadi skala regional, sehingga bekerjasama dengan pemerintah wilayah sekitarnya atau kawasan Gelangmanggung.

4. Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya

   Capaian kinerja SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya masih rendah pada triwulan 1. Pembinaan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Kendala yang dihadapi adalah motivasi SDM pariwisata untuk menerapkan hasil pelatihan masih kurang. Selain itu peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di setiap wilayah masih kurang berperan dalam pariwisata di Kota Magelang. Hal ini dilihat hanya kurang dari lima pokdarwis yang aktif di Kota Magelang.

5. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya

   Capaian peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif masih sangat rendah pada triwulan 1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pada triwulan 1 masih sangat rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan pendukung belum dilakukan di triwulan 1. Kendala lain yang dihadapi adalah masih belum semua pelaku ekonomi kreatif terdata dan terpetakan.

### 2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

*Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase sarana pembibitan yang terpelihara | % | 73,51 | 73,51 | 73,51 | 100 | ST |
| | | Persentase Peningkatan sarana Peternakan | % | 12,50 | 14,29 | 0 | 0 | SR |
| 2 | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase Prasarana Pertanian | % | 29,17 | 57,50 | 29,17 | 50,73 | R |
| | | Persentase Peningkatan prasarana Peternakan | % | 12,50 | 14,29 | 0 | 0 | SR |
| 3 | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan | % | 6,30 | 6,62 | -7,4 | -111,8 | SR |
| | | Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH | % | 2,20 | 3,36 | 0,55 | 16,37 | SR |
| 4 | Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani | % | 83,28 | 100 | 93,20 | 93,20 | ST |
| 5 | Program perizinan usaha pertanian | Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala | % | 9,09 | 10 | 14,29 | 142,9 | ST |
| 6 | Program penyuluhan pertanian | Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya | % | 12 | 12 | 0 | 0 | SR |
| | | Persentase kelompok tani yang naik kelas | % | 80 | 80 | 0 | 0 | SR |

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang, Tahun 2025*

Dari 6 program dan 10 indikator urusan pertanian, hanya tiga indikator yang telah memiliki capaian sangat tinggi, hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Indikator Persentase sarana pembibitan yang terpelihara merupakan kegiatan pendataan sarana/prasarana yang dimiliki oleh Disperpa sebagai dukungan terhadap sektor produksi pertanian, dimana pada dasarnya kurang memberikan gambaran kinerja organisasi namun ditinjau dari aspek pemeliharaan, secara otomatis 100% tercapai selama peralatan tersebut dalam kondisi baik.
2. Indikator Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani memiliki capaian yang cukup tinggi karena kinerja sektor pertanian dilapangan yang cukup baik dan cekatan dalam memberikan arahan serta Tindakan pada bencana hama dan penyakit padi.
3. Indikator Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala juga memiliki capaian yang sangat tinggi karena proses pengawasan secara berkala pada objek usaha yang kebanyakan merupakan praktek layanan Kesehatan hewan dan *petshop*.

Adapun 4 program yang masih memiliki capaian yang sangat rendah disebabkan oleh hal hal sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Peningkatan sarana Peternakan pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan masuk dalam kategori sangat rendah karena adanya pembatasan anggaran terkait dengan dengan pengadaan sarana peternakan terutama Rumah Potong Hewan.
2. Demikian juga dengan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang masih memiliki capaian yang sangat rendah, merupakan akibat dari pembatasan anggaran APBD untuk pembelian peralatan dan perlengkapan.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki capaian yang sangat rendah diakibatkan oleh meningkatnya jumlah temuan penyakit hewan dibandingkan dengan Triwulan 1 pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 ditemukan 27 jenis penyakit hewan sementara pada Triwulan ke 1 pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 29 jenis penyakit hewan.
4. Program Penyuluhan Pertanian juga memiliki capaian yang sangat rendah karena penilaian terhadap objek pelatihan baik individual maupun kelompok hanya bisa dilakukan di akhir tahun.

#### 2.2.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

*Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha | % | 96,08 | 96,00 | 94,12 | 98,04 | ST |
| 2 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100 | ST |
| 3 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase koefisien variasi harga antar waktu* | % | 1,34 | 8,00 | 0,12 | 100 | ST |
| 4 | Program Pengembangan Ekspor | Nilai ekspor | US$ | 3.098.437,00 | 3.421.982,00 | 855.812,00 | 25,01 | SR |
| 5 | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 98,93 | 98,93 | 95,04 | 96,07 | ST |

*Sumber: Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang, 2025*

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan memiliki 5 indikator kinerja. Dari 5 (lima) indikator terdapat 1 (satu) indikator yang memiliki status Sangat Rendah yaitu Nilai ekspor. Sampai dengan TW I realisasi nilai ekspor US$ 855,812.00 dengan tingkat capaian 25%.

### 2.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

*Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | % | 8,73 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | SR |
| 2 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 100 | 85,00 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha | % | 67,18 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | SR |
| 3 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap | % | 100 | 90,00 | 25,00 | 25,00 | SR |

*Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang, 2025*

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian memiliki 4 indikator kinerja. dari 4 (empat) indikator terdapat 1 (satu) indikator yang memiliki status Sangat Tinggi yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan capaian 100 %. Adapun 3 indikator yang perlu perhatian antara lain:

1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah

   Realisasi indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2025 berada pada angka -8,73 % dibanding dengan capaian akhir tahun 2024 dengan status Sangat Rendah (SR). Masih diperlukan upaya yang keras untuk melaksanakan Pendataan Industri Kecil dan menengah di Kota Magelang. Pendataan ini dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui jumlah pelaku usaha industri di Kota Magelang.

2. Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha

   Realisasi Indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2025 berada pada angka -67,18 % dibanding dengan capaian akhir tahun 2024 dengan status Sangat Rendah (SR). Perlu upaya sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk dapat memiliki legalitas usaha.

3. Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap

   Realisasi Indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2025 berada pada angka 25% dibanding dengan capaian akhir tahun 2024 dengan status Sangat Rendah (SR). Masih terdapat pelaku Industri kecil dan menengah yang belum dapat mengakses Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas) Kemenperin. Perlu upaya sosialisasi dan pendampingan terhadap IKM untuk dapat mengakses aplikasi tersebut.

### 2.2.4 Urusan Pendukung Fungsi Pemerintahan

#### 2.2.4.1 Fungsi Sekretariat Daerah

*Tabel 2.31 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang | % | 100 | 30.80 | NA | NA | NA |
| | | Indeks Kepuasan Pimpinan (Prokompim) | Nilai | 84 | 85 | NA | NA | NA |
| | | Indeks Kepuasan Pimpinan (Umum) | Nilai | 83.92 | 85 | NA | NA | NA |
| 2 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| | | Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 3 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase progres fisik seluruh OPD | % | 99.49 | 99 | 24.16 | 24.16 | SR |
| | | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 25 | 25 | SR |
| | | Tingkat kematangan UKPBJ | Level | 3 | 2 | 3 | 100 | ST |

*Sumber: Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025*

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang diampu oleh Sekretariat Daerah, 3 (tiga) indikator diantaraya belum dapat diketahui bagaimana capaiannya karena pengukuran dilakukan pasca-triwulan I 2025. Beberapa indikator yang perlu menjadi catatan yaitu persentase progres fisik seluruh OPD serta persentase koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan. Persentase progress fisik seluruh OPD capaian kinerjanya baru di angka 25% mengingat pada triwulan I 2025 beberapa kegiatan sempat mengalami penundaan sebagai konsekuensi atas munculnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Terkait dengan persentase koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan, dari total 84 kegiatan sepanjang tahun 2025, baru 21 kegiatan yang terlaksana sampai triwulan I 2025.

#### 2.2.4.2 Fungsi Sekretariat Dewan

*Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |

*Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, 2025*

Sekretariat dewan memiliki satu indikator kinerja yaitu persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana. Sampai triwulan I 2025, kinerja indikator tersebut telah mencapai target dan berada pada kategori sangat tinggi.

### 2.2.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 2.2.5.1 Perencanaan

*Tabel 2.33 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Perencanaan s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas | % | 77,81 | 68,49 | 50,00 | 61,17 | R |
| 2 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 90,58 | 100,00 | 90,58 | 90,58 | ST |
| | | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | % | 90,63 | 100,00 | 90,63 | 90,63 | ST |
| | | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 70,83 | 100,00 | 70,83 | 70,83 | S |

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, 2025*

Dari 4 indikator kinerja urusan perencanaan, terdapat 2 indikator yang kinerjanya sangat tinggi, 1 indikator kinerja sedang dan 1 indikator kinerja rendah, jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2025. Kendala pencapaian indikator kinerja sedang dan rendah yaitu:

1. Indikator Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas

   Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah Desk Capaian Kinerja baru dilakukan pada TW II (April 2025), sehingga nilai komponen pembentuk indikator berupa “Jumlah rekomendasi dalam Pengendalian dan Evaluasi” dan “Jumlah rekomendasi dalam Pengendalian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti” masih 0.

   Variabel Pembentuk Indikator Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas.

*Tabel 2.34 Variabel Pembentuk Indikator Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas*

| No | Variabel | Capaian TW I 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang yang memenuhi syarat untuk diakomodir | 896 |
| 2 | Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang | 896 |
| 3 | Jumlah rekomendasi dalam Pengendalian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti | 0 |
| 4 | Jumlah rekomendasi dalam Pengendalian dan Evaluasi | 0 |
| | **Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas** | **50.00** |

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, 2025*

2. Indikator Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

   Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah belum semua indikator, target, dan program di Renstra OPD sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL).

*Tabel 2.35 Variabel Pembentuk Indikator Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*

| No | Variabel | Capaian TW I 2025 |
|---|---|---|
| **Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | |
| 1 | Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL) | 15 |
| 2 | Jumlah seluruh indikator di Renstra OPD (Bidang IWIL) | 27 |
| 3 | Jumlah Target di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL) | 15 |
| 4 | Jumlah seluruh target di Renstra OPD (Bidang IWIL) | 27 |
| 5 | Jumlah Program di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL) | 15 |
| 6 | Jumlah seluruh program di Renstra OPD (Bidang IWIL) | 16 |

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, 2025*

### 2.2.5.2 Keuangan

*Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan keuangan Kota Magelang s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran | % | 100 | 100 | 25 | 25 | SR |
| | | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan | % | 100 | 100 | 61.98 | 61.98 | R |
| | | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Cakupan pengelolaan barang milik daerah | % | 100 | 89.29 | 82.14 | 91.99 | ST |
| 3 | Program Pengelolaan | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | % | 160.98 | 121.15 | 46.15 | 38.09 | SR |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| | Pendapatan Daerah | | | | | | | |

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2025*

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja urusan keuangan menunjukkan kinerja yang cukup sampai dengan triwulan I tahun 2025. Dari 5 indikator kinerja program, masih terdapat 2 indikator dengan status capaian Sangat Rendah (SR), 1 indikator berstatus kinerja Rendah (R) dan 2 indikator yang lain sudah berstatus kinerja Sangat Tinggi (ST). Indikator dengan status SR adalah Persentase capaian Pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran dan Persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam pengukuran indikator ini, penetapan dokumen penganggaran yang tepat waktu sebagai salah satu komponen pengukuran, sehingga upaya untuk penetapan dokumen penganggaran dari KUA-PPAS sampai dengan penetapan APBD perlu dikawal untuk ketercapaian indikator ini. Indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah juga perlu diupayakan peningkatan pendapatan dan juga pemetaan potensi untuk peningkatan pendapatan ke depannya.

### 2.2.5.3 Kepegawaian

*Tabel 2.37 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Kepegawaian s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase Capaian Target Aspek Sistem Merit | % | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 100% | ST |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang, 2025*

Dari 1 indikator kinerja urusan kepegawaian, indikator tersebut telah memiliki kinerja yang sangat tinggi jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2025.

### 2.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

*Tabel 2.38 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Sesuai dengan Jabatannya | % | 42,92 | 35,00 | 0,40 | 0,81 | SR |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang, 2025*

Dari 1 indikator kinerja urusan pendidikan dan pelatihan, indikator tersebut memiliki kinerja yang sangat rendah jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2025. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan pada Triwulan II-Triwulan IV. Selain itu, adanya penambahan jumlah pegawai yang menyebabkan angka pembagi indikator meningkat serta kebijakan efisiensi anggaran (pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50%) menyebabkan capaian Triwulan IV diprediksi akan menurun.

#### 2.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan

*Tabel 2.39 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan | % | 41,18 | 42,31 | 41,18 | 97,32% | ST |
| | | Persentase Pemanfaatan Hasil Inovasi | % | 33,83 | 24,00 | 33,83 | 100,00% | ST |

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, 2025*

Dari 2 indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan, seluruh indikator telah memiliki kinerja yang sangat tinggi jika dibandingkan terhadap target akhir tahun 2025.

### 2.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

*Tabel 2.40 Tabel Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase penyelenggaraan pengawasan | % | 147.36 | 96.00 | 60.36 | 62.88 | R |
| 2 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi | % | 100 | 85,00 | 100 | 100 | ST |

*Sumber: Inspektorat Kota Magelang, 2025*

Dari 2 indikator kinerja urusan Unsur pengawasan urusan pemerintahan, terdapat 1 indikator yang kinerjanya sangat tinggi, dan 1 indikator kinerja rendah, jika dibandingkat terhadap target akhir tahun 2025. Indikator dengan capaian rendah yaitu persentase penyelenggaraan pengawasan. Kendala yang dihadapi adalah capaian indikator ini sangat tergantung pada OPD, tampak pada jumlah review dan evaluasi yang di rencanakan dan dievaluasi, namun baru sedikit yang ditindaklanjuti oleh OPD. Untuk hal tersebut inspektorat akan mengawal OPD dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi. Indikator ini optimis akan tercapai sampai dengan akhir tahun 2025.

### 2.2.7 Unsur Kewilayahan

*Tabel 2.41 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Urusan Kewilayahan s.d. Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | % | 100 | 100 | 0 | 0 | SR |
| 3 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ST |

*Sumber: Kecamatan se- Kota Magelang, 2025*

Sampai dengan triwulan I 2025, sebagian besar indikator kinerja unsur kewilayahan sudah berada pada kondisi sangat tinggi, yaitu dengan capaian kinerja 100%. Satu indikator yang belum terlihat kinerjanya adalah cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Hal ini berkaitan dengan sampai dengan twiwulan I 2025 pelaksanaan pemberdayaan masyarakat baru sampai dalam tahap perencanaan. Sampai dengan akhir tahun 2025 seiring dengan selesainya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, indikator ini diharapkan dapat tercapai.

### 2.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

*Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kota Magelang s.d Triwulan I Tahun 2025*

| No | Program | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Tahun 2025 | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi s.d. TW I | Tingkat Capaian s.d. TW I | |
| 1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan | % | 80,00 | 60,38 | 80,00 | 100% | ST |
| 2 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik | % | 12,51 | 5,18 | 00 | 00% | SR |
| 3 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan | % | 62,12 | 65,04 | 18,56 | 28,54% | SR |
| | | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | % | 86,74 | 86,99 | 29,55 | 33,96% | SR |
| 4 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | % | 9,09 | 10,06 | 6,01 | 59,74% | S |
| 5 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Konflik Sosial | Angka | 0 | 0 | 0 | 100% | ST |

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2025*

Dari 5 (lima) program dengan 6 (enam) indikator program kinerja urusan pemerintahan umum terdapat 2 (dua) indikator yang kinerjanya sangat tinggi, 1 (satu) indikator kinerja sedang, dan 3 (tiga) indikator kinerja sangat rendah, jika dibandingkan terhadap target tahun 2025. Masih adanya indikator yang belum mencapai target disebabkan masih adanya beberapa sub kegiatan pendukung pada masing – masing program yang belum semuanya dilaksanakan hingga triwulan I, namun akan dilaksanakan pada triwulan II, III atau IV tahun 2025. Terkait dengan capaian kinerja indikator program Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik yang pada triwulan I ini capaiannya masih nol, karena kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut telah direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II.

Capaian Indikator "Presentase Ormas yang diberdayakan" jika dilihat dari kinerja tahunan juga termasuk katagori sangat rendah karena dari jumlahtotal ormas yang ada sebanyak 264 ormas baru dilaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sebanyak 49 ormas di triwulan I ini. Rencana upaya yang dilaksanakan guna memberdayakan ormas salah satunya sesuai dengan instruksi dari Kemendagri untuk membentuk tim pengawasan ormas yang anggotanya terdiri atas lintas instansi, TNI, Polrii, Kejaksaaan bekerjasama dalam kegiatan pembinaan ormas dengan menghadirkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai sebagai narsum.

Untuk pencapaian indikator program "Presentase Ormas yang aktif" jika dilihat dari kinerja tahunan termasuk katagori sangat rendah, namun apabila dilihat dari capaian kinerja per triwulan di triwulan I tahun 2024 capaian di triwulan I tahun 2025 ini sudah melebihi dimana capaian di trriwulan I tahun 2024 adalah 20,58% sedangkan di triwulan I tahun 2025 ini 29,55%. Namun demikian tetap dilaksanakan upaya untuk pencapaian target sampai dengan akhit tahun 2025. Upaya yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang adalah dengan membentuk forum komunikasi antar ormas di Kota Magelang. Selain itu juga direncanakan akan dilaksanakan penilian kinerja ormas. Degan demikian diharapkan ormas yang aktif akan semakin baik.

Pencapaian indikator program "Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya" jika dilihat dari kinerja tahunan termasuk katagori sedang, karena pada triwulan I ini sudah dilaksanakan pendataan ulang untuk Tokoh agama, tokoh masyarakat, Pelajar dan mahasiswa. Dari data sebanyak 25.514 di tahun 2025, setelah dilaksanakan pendataan ulang menjadi sejumlah 23.457. Pendataan yang dilaksanakan Kesbangpol berkolaborasi dengan bagian Kesra Setda Kota Magelang, dan Kemenag. Perlu adanya terobosan ataupun langkah-langkah yang nyata dengan melakukan sosialisasi, dan pembinaan terhadap FKUB dan Forum pembauran kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK. Dimana FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Pelaksanaan penyuluhan P4GN dan sosialisasi kampung bebas narkoba juga menjadi kegiatan untuk upaya menaikkan capaian indikator kinerja.

## 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Kondisi pembangunan Kota Magelang yang diukur melalui capaian kinerja utama daerah belum dapat tergambarkan sepenuhnya pada triwulan I 2025 mengingat masih banyaknya data yang belum tersedia. Meskipun demikian, mengacu pada bagaimana capaian kinerja hingga triwulan IV 2025 hingga data sementara pada triwulan I 2025 beberapa hambatan yang dihadapi Kota Magelang yaitu sebagai berikut:

1. Menurunnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
2. Kebutuhan Akselerasi Pertumbuhan Investasi
3. Pertumbuhan UMKM yang Masih Perlu Didorong
4. Kualitas Infrastruktur Wilayah yang Belum Optimal
5. Masih Adanya Permukiman Kumuh

*Tabel 2.43 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Magelang*

| Akar Masalah | Permasalahan | | Aktivitas untuk Mengatasi Permasalahan |
|---|---|---|---|
| | Data Dukung | Statement Permasalahan | |
| Belum optomalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.<br>Belum optimalnya ketepatan waktu penetapan dan publikasi domumen. | Realisasi IPKD<br>2022 = 73.72<br>2023 = 68.02<br>2024 = 66.11 | Menurunnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Pelengkapan dokumen administrasi persyaratan IPKD termasuk penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. |
| Belum semua pelaku usaha memenuhi ketentuan perundangan dengan memenuhi perizinan yang ditetapkan.<br>Belum optimalnya pemanfaatan asset milik daerah dikarenakan terkendala pada administrasi.<br>Belum optimalnya penyebaran informasi untuk para investor di luar Kota Magelang | Realisasi persentase pertumbuhan investasi sampai dengan TW I 2025 = -53,86 | Kebutuhan akselerasi pertumbuhan investasi | Penguatan pemasaran potensi investasi Kota Magelang yang diikuti penguatan legalitas dan prinsip *clean and clear* pada asset yang potensial untuk diinvestasikan. |
| Belum terbentuknya *demand* yang kuat sehingga belum dapat menarik pelaku UMKM baru untuk tumbuh. | Capaian kinerja indikator persentase pertumbuhan UMKM pada TW IV 2024 masih sebesar 77.56%. | Pertumbuhan UMKM yang masih perlu didorong | Dukungan terhadap akses modal dan pasar yang lebih kuat dan nyata. |
| Masih adanya sarana infrastruktur yang sebagian besar/hampir sebagian besar belum berada pada kondisi baik yaitu sarana prasarana persampahan, drainase, dan irigasi. | Realiasi indeks kualitas infrastruktur wilayah sampai TW I 2025 masih sebesar 60.08. | Kualitas infrastruktur wilayah yang belum optimal | Peningkatan kualitas pada prasarana persampahan, drainase, dan irigasi |
| Upaya pengentasan pemukiman kumuh dilakukan secara bertahap sehingga bersifat *multiyears.*<br>Masih terdapat beberapa kasus upaya pengentasan kawasan permukiman kumuh yang tidak sesuai kebutuhan karena belum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap lokasi. | Persentase luas permukiman kumuh hingga TW IV 2024 masih sebesar 0.57% | Masih adanya permukiman kumuh | Akselerasi pengentasan kawasan permukiman kumuh yang tepat sasaran |

*Sumber: Pemerintah Kota Magelang, 2025*

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

*Tabel 2.44 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Magelang*

| Akar Masalah | Permasalahan | | Aktivitas untuk Mengatasi Permasalahan |
|---|---|---|---|
| | Data Dukung | Statement Permasalahan | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan** | | | |
| Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya PAUD | APK PAUD 2025 baru mencapai 67,79% dari target 98% | Tingkat partisipasi anak usia dini dalam pendidikan belum optimal karena rendahnya kesadaran orang tua, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah | Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD melalui media, komunitas, dan kegiatan parenting di lembaga PAUD. |

| Akar Masalah | Permasalahan | | Aktivitas untuk Mengatasi Permasalahan |
|---|---|---|---|
| | Data Dukung | Statement Permasalahan | |
| Perbedaan sumber data (BPS dan Dapodik) terkait APM SMP/MTs | BPS: 80,64;<br>Dapodik: 145,59 | Perbedaan data menyebabkan ketidakakuratan dalam menilai capaian APM SMP/MTs. | Harmonisasi dan verifikasi data lintas sumber, serta pemilahan peserta didik berdasarkan domisili. |
| Proses penulisan dan penerbitan buku memakan waktu dan biaya | Indikator pendidik menulis buku belum capai target, | Pendidik kesulitan memenuhi indikator karena proses penulisan hingga penerbitan buku membutuhkan waktu lama dan biaya besar, tanpa dukungan dari pemerintah daerah. | Penyediaan pelatihan penulisan karya sastra, fasilitasi penerbitan dan pendaftaran ISSN, serta pemberian insentif atau hibah penulisan buku. |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan** | | | |
| Perubahan perilaku masyarakat yang lambat mempengaruhi capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) | Beberapa indikator sulit dicapai, seperti tidak merokok dalam rumah tangga, kepatuhan minum obat hipertensi, dan perilaku berobat TB secara teratur. Nilai IKS dari hasil penghitungan manual: 0,873 | Capaian IKS terganggu oleh indikator berbasis perilaku yang sulit diintervensi, meskipun nilai IKS secara umum sudah memenuhi target | Edukasi kesehatan berkelanjutan. Pendampingan keluarga berisiko rendah IKS oleh kader dan tenaga kesehatan. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk kampanye perubahan perilaku |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | |
| kondisi irigasi yang rusak mayoritas masih berupa saluran alami dengan kelerengan curam | Saluran irigasi dalam kondisi rusak dan sedang di Kota Magelang sepanjang 6.951 meter | Saluran irigasi kewenangan Kota Magelang dalam kondisi baik baru mencapai 58% | Pemeliharaan saluran dan peningkatan fisik irigasi |
| saluran drainase kondisi rusak masih berupa saluran alami | Saluran drainase dalam kondisi rusak dan sedang di Kota Magelang sepanjang 13.201 meter. | Saluran drainase primer Kota Magelang dalam kondisi baik baru mencapai 32,40% | Pemeliharaan rutin dan Peningkatan fisik saluran drainase |
| Penjadwalan ulang kegiatan pembangunan gedung balai kota | Pembangunan fisik gedung balai kota baru mencapai 25% | Belum selesainya pembangunan gedung balai kota | Pembangunan gedung balai kota |
| Belum 100% kawasan strategis memiliki dokumen perencanaan<br>Belum 100% perwujudan pembangunan fisik di kawasan strategis | Kinerja persentase kawasan strategis yang ditata s.d. TW I 2025 baru mencapai 70% | Perwujudan kawasan strategis yang ditata di Kota Magelang belum mencapai 100% | Penetapan RTBL kawasan strategis menjadi perwal<br>Pembangunan citra penanda kota (gerbang kota)<br>Pembangunan fisik kawasan strategis (kawasan aloon-aloon dan kawasan sidotopo) |
| Pekerjaan konstruksi yang diawasi masih dimulai pekerjaannya di triwulan I sehingga belum ada proyek yang diawasi | Pekerjaan konstruksi yang diawasi masih dimulai pekerjaannya di triwulan I sehingga belum ada proyek yang diawasi | Pekerjaan konstruksi yang diawasi masih dimulai pekerjaannya di triwulan I sehingga belum ada proyek yang diawasi | Pengawasan Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | |
| - | - | - | - |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** | | | |
| | Persentase PSKS yang diberdayakan sebesar 16,67% | Belum semua PSKS diberdayakan hingga triwulan I tahun 2025 | Pemberdayaan dan pelatihan untuk PSKS |

| Akar Masalah | Permasalahan | | Aktivitas untuk Mengatasi Permasalahan |
|---|---|---|---|
| | Data Dukung | Statement Permasalahan | |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | |
| Masih kurangnya efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta kesiapsiagaan bencana | IKD 2024 sebesar 48,00 | Ketahanan daerah Kota Magelang masih perlu ditingkatkan | Penguatan upaya pencegahan bencana<br>Penyusunan rencana kontingensi |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja** | | | |
| Kurangnya motivasi dan keberanian bagi peserta kewirausahaan untuk menerapkan hasil pelatihannya | Data monev hasil pelatihan kewirausahaan | Belum optimalnya pelatihan kewirausahaan dalam menghasilkan wirausaha di Kota Magelang | Meningkatkan motivasi kepada peserta pelatihan untuk memiliki keberanian berusaha serta meningkatkan monev terhadap peserta hasil pelatihan kewirausahaan |
| Kurangnya motivasi bagi warga Kota Magelang untuk mengikuti fasilitasi penempatan tenaga kerja | Data pendaftar dan yang diterima kerja bagi pencari kerja yang berasal dari Kota Magelang | Belum optimalnya fasilitasi penempatan tenaga kerja bagi warga Kota Magelang | Melaksanakn sosialisasi dan bursa kerja per kecamatan agar lebih mendekat dengan pencari kerja yang berasal dari Kota Magelang<br>Melakukan kerja sama dengan bursa kerja khusus milik SMK |
| Tidak adanya penerapan sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan tata kelola yang layak karena pemberian sanksi merupakan kewenangan provinsi | Data perusahaan yang telah menerapkan tata kelola yang layak | Belum semua perusahaan menerapkan tata kelola yang layak | Melaksanakan sosialisasi secara massif dan pendekatan ke perusahaan yang belum menerapkan tata kelola perusahaan yang layak |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | |
| Jumlah Perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga belum memenuhi target | 300 orang yang dilatih dari total target 460 perempuan kepala keluarga dan rentan | Belum semua perempuan rentan yang menajdi target pelatihan mendapatkan pelatihan peningkatan perekonomian keluarga | Pelatihan lanjutan akan dilaksanakan di tw III untuk ketercapaian target indikator |
| Rasio kekerasan terhadap perempuan masih tinggi | Sebanyak 12 kasus kekerasan terhadap perempuan dari total 64.919 total penduduk perempuan | Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan | Upaya preventif melalui sosialisasi, pembinaan pusat pembelajaran keluarga, kampanye anti kekerasan dalam rumah tangga<br>Upaya kuratif melalui pendampingan, advokasi, perbaikan layanan UPTD PPPA |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** | | | |
| - | - | - | - |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan** | | | |
| Tanah Pemerintah Kota Magelang masih ada yang belum tersertifikatkan | Data tanah milik pemerintah kota yang belum bersertifikat | Belum semua lahan pemerintah kota bersertifikat | Percepatan pendataan dan pemberkasan tanah-tanah milik pemerintah kota.<br>Sinergitas antara pemerintah kota dan BPN |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup** | | | |
| - | - | - | - |

| Akar Masalah | Permasalahan | | Aktivitas untuk Mengatasi Permasalahan |
|---|---|---|---|
| | Data Dukung | Statement Permasalahan | |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | |
| Pemutusan akses machine to machine (M2M) dari pusat | | Layanan jemput bola akan sedikit terhambat | Langganan jaringan untuk layanan jemput bola |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | |
| - | - | - | - |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | |
| - | - | - | - |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan** | | | |
| - | - | - | - |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika** | | | |
| Aplikasi yang diluncurkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota untuk keperluan masing- masing | Adanya aplikasi yang dikembangkan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Magelang yang belum bisa sharing *Application Programming Interface* (API) | Banyak aplikasi yang belum terintegrasi | Pengawalan arsitektur SPBE |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** | | | |
| Rendahnya Koperasi yang meningkat status kesehatannya | Jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) yang meningkat status kesehatannya | Belum semua koperasi simpan pinjam (KSP)di Kota Magelang yang meningkat status kesehatannya | Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan untuk mengoptimalkan hasil dari kertas kerja penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam KSP |
| Rendahnya koperasi berkualitas | Jumlah Koperasi berkualitas berdasarkan RAT, Volume usaha dan aset | Belum semua koperasi di Kota Magelang berkualitas. Indikator antara lain<br>Melaksanakan RAT<br>Peningkatan Volume Usaha Koperasi<br>Peningkatan aset | Melakukan Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan kepada Koperasi untuk melaksanakan RAT dan melaporkan kepada instansi terkait, Peningkatan volume usaha dan peningkatan aset |
| rendahnya peningkatan omzet pelaku usaha mikro | Jumlah omset usaha mikro Kota Magelang | Belum optimalnya peningkatan omzet pelaku usaha mikro di Kota magelang | Pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro di Kota Magelang baik dari sisi managemen usaha, manageman Sumber daya manusia, serta memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam mengembankan pemasarannya. |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** | | | |
| Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan perizinan dan pelaporan | Data monev pengawasan terhadap pelaku usaha | Masih rendahnya pelaku usaha yang memenuhi ketentuan perundang-undangan | Sosialisasi pemenuhan ketentuan perundang-undangan dan jemput bola bagi pelaku usaha yang belum menindaklanjuti ajuan perizinan |
| Belum clean dan clearnya asset milik daerah yang potensial untuk diinvestasikan | Data asset yang sudah clean and clear | Belum optimalnya pertumbuhan investasi di Kota Magelang | Mengupayakan penyelesaian admnistrasi bagi asset yang potensial |

| Akar Masalah | Permasalahan | | Aktivitas untuk Mengatasi Permasalahan |
|---|---|---|---|
| | Data Dukung | Statement Permasalahan | |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga** | | | |
| Kurang aktifnya sebagian organisasi pemuda. Kurangnya dukungan dan motivasi. Kurangnya pembinaan dan mentor. Kurangnya even kejuaraan untuk pemuda. Terbatasnya ruang bagi pemuda untuk berekspresi | Pendidikan dan kemampuan literasi. Ketenagakerjaan. Pengangguran. Data organisasi pemuda yang aktif | Kurangnya kesempatan, dukungan dan pembinaan yang diperlukan untuk mengembangan potensi pemuda secara penuh | Mengadakan forum-forum. Kepemudaa. Monev kegiatan kepemudaan dan organisasi pemuda |
| Belum terbentuknya organisasi disabilitas | Data disabilitas<br>Data atlet disabilitas | Belum optimalnya fasilitas infrastruktur olah raga yang memadai , pembinaan dan pelatihan yang profesional serta jumlah jumlah atlit disabilitas yang dibina dan berprstasi, sangat mempengaruhi prestasi olah raga disabilitas. | Mendorong pembentukan organisasi disabilitas |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik** | | | |
| Belum ada penambahan data set di portal open data | Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data sebesar 33,33% | Masih perlunya penambahan data set yang dipublikasikan dalam portal open data | Identifikasi kebutuhan data |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian** | | | |
| Pelaksanaan SOP maupun regulasi masih kurang<br>Infrastruktur khususnya ruang server belum memenuhi standar<br>Belum ada uji publik dan evaluasi secara berkala terhadap sistem keamanan informasi yang ada | Tingkat kematangan Indeks KAMI tahun 2023 Kota Magelang berada pada I+ s/d III | Keamanan informasi masih belum memenuhi standar ISO 27001 | Menyusun SOP<br>Melaksanakan SOP dan regulasi<br>Melakukan audit<br>Menindaklanjuti hasil audit<br>Melakukan uji coba sistem keamanan informasi |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** | | | |
| Kunjungan museum masih rendah pada Triwulan I Tahun 2025 | Capaian indikator peningkatan kunjungan museum masih jauh dari target 20% | Capaian indikator peningkatan kunjungan museum sangat rendah dibanding target akhir tahun 2025 | Meningkatkan promosi museum melalui media sosial dan kolaborasi dengan sekolah<br>Menyelenggarakan event tematik dan pameran khusus di museum<br>Meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas museum |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** | | | |
| Pemerataan layanan perpustakaan belum memenuhi target | Terdapat 72 Titik layanan dari total 192 RW ten | Kurang memadainya sarpras penunjang dalam layanan perpustakaan | Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan<br>Pengaturan Kembali jadwal perpustakaan keliling<br>Monitoring dan evaluasi kegiatan perpus keliling |

| Akar Masalah | Permasalahan | | Aktivitas untuk Mengatasi Permasalahan |
|---|---|---|---|
| | Data Dukung | Statement Permasalahan | |
| Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan masih rendah | Pada tw I tahun 2024 sejumlah 2.411 orang terlibat dalam kegiatan, sementara pada triwulan yang sama tahun 2025 baru 1.825 orang yang terlibat | Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan | Upaya pelibatan akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya terutama triwulan II dan IV terutama saat musim liburan sekolah<br>Fasilitasi komunitas – komunitas literasi sesuai dengan amanah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** | | | |
| Belum optimalnya pemenuhan Audit Sistem Kearsipan Internal | Nilai ASKI 80,85 (kategori baik) | Belum semua OPD memliki arsiparis.<br>Belum optimalnya pengelolaan arsip di OPD terutama penyusutan arsip I | Kegiatan magang kearsipan sebagai dasar pemenuhan SDM Arsiparis di setiap OPD dengan output kegiatan adalah ketersediaan pengelola arsiparis di setiap OPD berdasarkan SK Kepala OPD<br>Pembinaan dan monev kearsipan kepada OPD |
| **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan** | | | |
| - | - | - | - |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | | | |
| Rendahnya kesadaran pariwisata | Hasil pendalaman evaluasi kinerja | Belum optimalnya peran pokdarwis dalam membentuk iklim pariwisata yang kondusif | Peningkatan kapasitas SDM |
| Masih terbatasnya data pelaku ekonomi kreatif serta belum ada pemetaan pelaku ekonomi kreatif | Data pelaku ekonomi kreatif | Belum optimalnya pemetaan ekonomi kreatif dan peran sertanya untuk mendukung pariwisata | Pendataan dan pemetaan pelaku ekonomi kreatif |
| Daya tarik wisata masih tergolong rendah | Kinerja program prosentase peningkatan wisatawan nusantara pada triwulan I | Masih rendahnya kunjungan wisatawan Kota Magelang | Perlu event untuk mempromosikan Kota Magelang<br>Peningkatan kualitas destinasi<br>Pengenalan tempat wisata melalui angkot wisata gratis |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** | | | |
| - | - | - | - |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | |
| Tidak ada urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral di Kota Magelang | | | |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan** | | | |
| Rendahnya pelaku usaha yang memiliki izin usaha | Jumlah usaha (gudang, minuman beralkohol dan tempat penyimpanan bahan berbahaya) yang memiliki izin usaha | masih terdapat pelaku usaha (gudang, minuman beralkohol dan tempat penyimpanan bahan berbahaya) yang belum memiliki izin usaha | Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha (gudang, minuman beralkohol dan tempat penyimpanan bahan berbahaya) yang belum memiliki izin usaha |

| Akar Masalah | Permasalahan | | Aktivitas untuk Mengatasi Permasalahan |
|---|---|---|---|
| | Data Dukung | Statement Permasalahan | |
| rendahnya nilai ekspor di Kota Magelang | Nilai ekspor | belum optimalnya pelaku usaha untuk melaksanakan ekspor | melaksanakan pelatihan pemenuhan persyaratan ekspor bagi pelaku usaha yang dianggap mampu melaksanakan ekspor, memfasilitasi pameran skala internasional |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian** | | | |
| Rendahnya Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kota Magelang | belum semua pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kota Magelang terdata dan update | Melaksanakan sosialisasi dan mekanisme pendataan / update data pelaku industri kecil dan menengah. |
| Rendahnya IKM yang memiliki legalitas usaha | Jumlah pelaku usaha industri yang memiliki izin usaha sektor industry | belum semua pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kota Magelang memiliki izin usaha industri | Melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha industri untuk memiliki legalitas usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Rendahnya informasi industri terkini dan lengkap | Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | belum semua pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kota Magelang yang memiliki akun SIINas | Melaksanakan sosialisasi , pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha industri untuk memiliki akun SIINas dan melaporkan aktivitas usahanya dalam periode tertentu melalui aplikasi SIINas |
| **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi** | | | |
| Tidak ada urusan pemerintahan bidang transmigrasi di Kota Magelang | | | |
| **URUSAN PENDUKUNG FUNGSI PEMERINTAHAN** | | | |
| **Fungsi Sekretariat Daerah** | | | |
| | | | |
| **Fungsi Sekretariat DPRD** | | | |
| | | | |
| **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **Perencanaan** | | | |
| Desk Capaian Kinerja baru dilaksanakan pada TW II (April 2025) | Jumlah rekomendasi dalam Pengendalian dan Evaluasi = 0<br>Jumlah rekomendasi dalam Pengendalian dan Evaluasi yang ditindaklanjuti = 0 | Indikator "Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan" kinerjanya sedang | Desk Capaian Kinerja TW I dilakukan pada TW I (sesuai jadwal yang seharusnya) |

| Akar Masalah | Permasalahan | | Aktivitas untuk Mengatasi Permasalahan |
|---|---|---|---|
| | Data Dukung | Statement Permasalahan | |
| Belum semua indikator, target, dan program di Renstra OPD sesuai dengan indikator RPJMD (Bidang IWIL) | Jumlah indikator di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD = 15<br>Jumlah seluruh indikator di Renstra OPD = 27<br>Jumlah Target di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD = 15<br>Jumlah seluruh target di Renstra OPD = 27<br>Jumlah Program di Renstra OPD yang sesuai dengan indikator RPJMD = 15<br>Jumlah seluruh program di Renstra OPD = 16 | Indikator "Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas" kinerjanya rendah | Memastikan agar seluruh indikator, target, dan program di Renstra OPD sesuai dengan indikator RPJMD.<br>Melakukan pendampingan Renstra periode selanjutnya secara intensif untuk mengawal agar variabel beserta definisi operasional yang digunakan dapat disesuaikan, sehingga kinerja antar tahun dapat diperbandingkan. |
| **Keuangan** | | | |
| Belum terpenuhinya proporsi anggaran infrastruktur<br>Rasio ketergantungan keuangan masih di atas 50% | IPKD<br>2022= 70,9872<br>2023= 68,0192<br>2024= 66,1126 | Penurunan IPKD Kota Magelang | Pengawalan perencanaan-penganggaran<br>Pemenuhan proporsi anggaran wajib dan pemenuhan SPM<br>Peningkatan pendapatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana Pusat |
| | Proporsi PAD terhadap total pendapatan sekitar 30% | Keuangan Kota Magelang masih tergantung pembiayaan dari Pusat | Pemetaan potensi pendapatan<br>Peningkatan beberapa tarif pajak/retribusi |
| **Kepegawaian** | | | |
| - | - | - | - |
| **Pendidikan dan Pelatihan** | | | |
| - | - | - | - |
| **Penelitian dan Pengembangan** | | | |
| - | - | - | - |
| **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| Persentase penyelenggaraan pengawasan | | Kendala yang dihadapi adalah capaian indikator ini sangat tergantung pada OPD | Inspektorat akan mengawal OPD dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi. |
| **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | |
| | | | |
| **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | |
| - | - | - | - |

*Sumber: Pemerintah Kota Magelang, 2025*

# BAB 3
# PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi di Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan pada perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan pertama RKPD Kota Magelang Tahun 2025, mengindikasikan perlunya penyesuaian khususnya dalam kebijakan keuangan daerah tahun 2025.

## 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep *money follow programme priority*.

Selain itu kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2026 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Bab ini akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas disamping juga untuk mencapai program dalam RPJMD yang dari hasil evaluasi pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori program yang akan tercapai dan program yang perlu upaya keras untuk mencapai target RPJMD. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sesuai target dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat secara kualitas untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki ketimpangan pendapatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan daerah tahun 2026 ini akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kota Magelang.

### 3.1.1 Kondisi Perekonomian Global

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 3,2 persen dari pertumbuhan 3,3 persen di tahun 2023. Ketidakpastian global yang semakin kompleks dipercaya turut memberi andil dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Beberapa faktor jangka pendek seperti dampak invasi Rusia Ke Ukraina, meningkatnya fragmentasi geopolotik dan geoekonomi, eksalasi timur tengah utamanya Iran dan Israel meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan pertumbuhan ekonomi global diprediksi stagnan di pertumbuhan 3,3 persen selama tahun 2025.

Penurunan *Baltic Dry Index* menunjukkan aktivitas perdagangan global selama tahun 2023 mengalami perlambatan. Rata-rata indeks turun dari level 1.930,86 di tahun 2022 menjadi sebesar 1.393,56 di tahun 2023. Volume perdagangan pada tahun 2023 diperkirakan melambat dan terkontraksi sebesar 1,2 persen dari yang sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 9,6 persen dan 3,0 persen di tahun 2021 dan 2022. Pergeseran perilaku belanja konsumen dari belanja barang ke jasa, penurunan harga komoditas, tekanan inflasi dan suku bunga yang tinggi serta penguatan dolar Amerika Serikat diyakini menjadi beberapa penyebab terjadinya perlambatan aktivitas perdagangan global, selain ketegangan geopolitik yang semakin meningkat.

Pertumbuhan perdagangan global tahun 2025 diproyeksi hanya sebesar 2,6 persen dikarenakan adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi tiongkok serta tekanan harga panan akibat perubahan iklim. Meskipun masih ada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi, namun harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut. Pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai pasokan yang terbatas dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Diproyeksikan perdagangan global tahun 2021 hingga tahun 2024 menjadi pemulihan perdagangan global yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat, Purchasing Managers Index (PMI) sektor manufaktur yang menjadi indikator aktivitas manufaktur global juga mengalami perlambatan selama tahun 2024. Berbeda dengan PMI untuk setor jasa yang justru mengalami ekspansi. Perbaikan PMI sektor manufaktur dan sektor jasa terlihat di tiga bulan pertama di tahun 2025. Pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global menyebabkan harga komoditas juga mengalami penurunan dari kenaikan tinggi di tahun sebelumnya. Harga komoditas utamanya energi yang turun di tahun 2023 turut berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral di banyak negara. Kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral berbagai negara merupakan respon untuk menurunkan tekanan inflasi. Tingkat suku bunga yang tinggi seperti suku bunga The Fed, Bank of England dan European Central Bank yang berkepanjangan memicu resiko perlambatan aktivitas perekonomian global.

### 3.1.2 Kondisi Perekonomian Nasional dan Jawa Tengah

Di tengah kondisi ketidakpastian global, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,03 persen di tahun 2024. kendati demikian, dibandingkan tahun sebelumnya, perekonomian nasional mengalami sedikit perlambatan. Ekonomi nasional mengalami kontraksi pada pertumbuhan 5,03 persen di tahun 2024 dari sebelumnya 5,05 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekspor yang positif, terjaganya inflasi dan intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilu turut menjaga perekonomian domestik bertahan di atas 5 persen. Produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 4,8 persen menjadi US$4.960,3 atau setara dengan Rp 78,6 juta di tahun 2024. Sementara *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 mencapai US$4.750, masih termasuk dalam kategori *upper-middle income country* sebagaimana tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat mampu tumbuh 5,11 persen di tahun 2024. Pertumbuhan konsumsi ini didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat meningkatkan subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel menyebabkan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,94 persen. Peningkatan aktivitas partai politik menjelang dan saat pelaksanaan pemilu baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden, meningkatkan pertumbuhan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga hingga 12,48 persen.

Investasi yang diukur dengan Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan 4,61 persen di tahun 2024, meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PMTB didorong oleh investasi pembangunan perumahan, infrastruktur jalan tol dan bendungan. Pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2024 mendorong konsumsi pemerintah tumbuh 6,61 persen atau dua kali lipat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Ekspor barang dan jasa tumbuh 6,51 persen, meningkat dibanding tahun 2023 sehingga kontribusi ekspor terhadap PDB juga meningkat mencapai 22,18 persen di tahun 2024.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor jasa lainnya (9,52 persen) yang disumbang oleh peningkatan aktivitas rekreasi seiring peningkatan jumlah wisatawan nusantara (tumbuh 21,61 persen) dan wisatawan mancanegara (tumbuh 19,05 persen) serta berbagai event olahraga dan hiburan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan menempati peringkat kedua dengan pertumbuhan 8,69 persen didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang karena mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi lainnya, termasuk dipicu oleh libur natal dan tahun baru. Lapangan usaha akomodasi dan makan minum tumbuh 8,56 persen, merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi ketiga.

Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto di tahun 2024 mencapai 18,98 persen, atau naik 0,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 4,43 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan subsektor industri logam dasar yang tumbuh 13,34 persen sejalan permintaan luar negeri utamanya besi dan baja. Subsektor industri barang logam, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 6,16 persen didorong oleh permintaan luar negeri,

sementara subsektor industri makanan dan minuman tumbuh 5,90 persen didorong oleh permintaan domestik untuk konsumsi dan bahan baku industri serta permintaan luar negeri. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi bagi perekonomian tahun 2024 yaitu sebesar 0,90 persen. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat seiring dengan pembangunan proyek infastruktur oleh pemerintah dan swasta hingga mampu tumbuh 7,02 persen di tahun 2024, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya perdagangan eceran bukan mobil dan sepeda motor yang tumbuh sejalan dengan peningkatan produksi lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan serta meningkatnya volume impor mendorong sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,86 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat di tahun 2024 menjadi modal besar untuk menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan pada kisaran 5,20 persen. Pelaksanaan pemilu presiden, legislatif di bulan februari dan pemilu kepala daerah di bulan november diperkirakan mendorong konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga tumbuh sebesar 5,02 persen. Inflasi domestik diperkirakan terjaga pada rentang 1,5-3,5 persen. Kinerja ekspor dan impor diperkirakan menguat dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pasca pandemi.

Industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025. Kinerja industri pengolahan didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilu, keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas serta penerapan industri hijau. Di sisi lain, kinerja pariwisata juga diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya penyelenggaraan berbagai event nasional maupun internasional. Peningkatan aktivitas wisatawan diharapkan berdampak pada meningkatnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga meningkatkan devisa pariwisata.

*Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2020-2024*

| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jawa Tengah | -2,65 | 3,33 | 5,31 | 4,98 | 4,95 | Akhir Tahun 2024 |
| Indonesia | -2,07 | 3,69 | 5,31 | 5,05 | 5,03 | Akhir Tahun 2024 |

*Sumber: BPS, 2024*

Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta selama tahun 2024 mencapai 4,79 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi juga meningkat sebesar 3,86 juta orang. Capaian tersebut berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2024 menjadi sebesar 4,91 persen, dari sebelumnya 5,32 persen (tahun 2023). Seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2025 diperkirakan dapat diturunkan hingga di kisaran 5,0-5,7 persen. Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi masih akan diteruskan untuk mendukung teracapainya target penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Penyaluran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), BPNT, bantuan pangan beras, BLT Mitigasi Risiko Pangan dan PIP yang dikucurkan pada triwulan I 2024 mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi 9,03 persen di Maret 2024 dari 9,36 persen di Maret 2023. Terhitung September 2024 tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 8,57 persen yang didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 2,63 persen (triwulan III terhadap triwulan I 2024) serta inflasi pada level rendah sebesar 0,74 persen (september 2024). Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan di tahun 2025 masih di kisaran 8,5-9,0 persen. Seiring dengan penurunan kemiskinan, pemerintah memperkirakan kondisi gini rasio tahun 2025 mengalami perbaikan pada rentang 0,381-0,384.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp1.817.776,96 milliar dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 1.157.025,94 milliar. Berdasarkan besaran PDRB tersebut, perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,95 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang tumbuh 4,98 persen. Perlambatan ekonomi didorong utamanya oleh melambatnya pertumbuhan industri pengolahan. Kondisi ini dipicu adanya penurunan produksi industri batubara dan pengilangan migas serta penurunan produksi industri pengolahan lainnya. Kondisi normal pasca Covid-19 juga membuat

kinerja sektor transportasi dan pergudangan mengalami sedikit perlambatan meskipun tetap tumbuh positif dari 8,12 persen (tahun 2023) menjadi 5,56 persen (tahun 2024). Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga ikut melambat dari 11,24 persen menjadi 10,03 persen. Kendati demikian, perekonomian Jawa Tengah mengalami perbaikan di sektor konstruksi dari 6,07 persen menjadi 7,97 persen. Selain itu peningkatan juga terjadi di pertanian, jasa pendidikan, jasa kesehatan serta sub sektor penggalian.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 33,84 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,49 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,03 persen; dan Konstruksi sebesar 11,39 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 71,75 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen penunjang utama adalah konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 61,29 persen. Peningkatan PDRB di Jawa Tengah secara otomatis meningkatkan PDRB per kapita menjadi sebesar Rp47,97 juta, atau meningkat 6,21 persen dibanding tahun sebelumnya.

### 3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Magelang

Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam kondisi normal baru pasca pandemi mampu menjaga kestabilan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari capaian indikator makro sampai akhir tahun 2024. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka yang cukup signifikan, serta pertumbuhan IPM yang tertinggi di Jawa Tengah. Selain itu kestabilan perekonomian juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mampu bertahan di angka 5 persen dengan inflasi yang berada di kisaran 3 persen. Kendati demikian, muncul tantangan ketimpangan pendapatan yang melebar, ditunjukkan oleh gini ratio yang sempat meningkat.

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selama tahun 2024 dapat dilihat dari peningkatan capaian kinerja makro di aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial berikut:

*Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2017-2023*

| Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,46 | 5,44* | -2,45 | 3,20 | 5,77 | 5,45 | 5,56 |
| TPT (%) | 4,88 | 4,37 | 8,59 | 8,73 | 6,71 | 5,25 | 4,40 |
| IPM (%) | 78,31 | 78,80 | 78,99 | 79,43 | 80,39 | 81,17 | 82,15 |
| Inflasi (%) | 2,65 | 2,19 | 1,84%-3,84%* | 1,53** | 6,31** | 3,28** | 2,19** |
| Rasio Gini | 0,387 | 0,412 | 0,405 | 0,452 | 0,427 | 0,419 | 0,462 |
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 7,87 | 7,46 | 7,58 | 7,75 | 7,10 | 6,11 | 5,94 |

*Sumber: BPS Kota Magelang, 2024*
** Prediksi ** Berdasarkan inflasi sister city Kota Tegal*

### 3.1.4 Pemerataan Pendapatan

Seberapa besar ketimpangan pendapatan terjadi di masyarakat bisa diukur menggunakan beberapa pendekatan indikator seperti gini ratio ataupun melihat dari share kelompok pengeluaran versi bank dunia. Secara makro, distribusi pendapatan (pengeluaran) masyarakat bisa diukur ketimpangannya menggunakan gini ratio. Dilihat dari angkanya, gini ratio di Kota Magelang masih tergolong tinggi pada kisaran 0,4 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Magelang masih relatif tinggi meskipun beberapa tahun terakhir sudah mengalami penurunan.

Secara lebih detail, pemerataan pendapatan ditunjukkan oleh share pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia. Persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2023 dengan tren menurun. Periode sebelum pandemi Covid, penduduk berpenghasilan 40% terbawah menikmati 16,29 persen dari total konsumsi di Kota Magelang. Pada tahun 2023 persentasenya menurun hanya sebesar 16,07 persen. Meski demikian persentase ini mengindikasikan Kota Magelang masih berada pada kelompok

ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Sementara itu, kelompok 20 persen penduduk Kota Magelang dengan pendapatan tinggi justru menikmati hampir separuh (49,32%) dari total pengeluaran di Kota Magelang di tahun 2023. Penurunan gini ratio yang mengindikasikan penurunan ketimpangan lebih disebabkan karena peningkatan share pengeluaran dari kelompok penduduk berpendapatan 40% menengah yang diikuti dengan penurunan share pengeluaran kelompok berpendapatan 20% tertinggi.

*Tabel 3.3 Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kriteria Bank Dunia, 2019-2024*

| Tahun | Kriteria Bank Dunia | | |
|---|---|---|---|
| | 40% Pendapatan Bawah | 40% Pendapatan Menengah | 20% Pendapatan Tinggi |
| **2019** | 15,17 | 37,58 | 47,25 |
| **2020** | 16,26 | 36,80 | 46,95 |
| **2021** | 14,90 | 32,91 | 52,19 |
| **2022** | 16,24 | 33,16 | 50,59 |
| **2023** | 16,07 | 34,62 | 49,32 |
| **2024** | | | |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024*

### 3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian di Kota Magelang tahun 2024 ini mampu menghasilkan nilai tambah yang ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar Rp.11.821,94 milliar. Secara nominal angka ini meningkat Rp. 833,3 milliar dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp.10.988,11 milliar. Berdasarkan harga konstan tahun 2010 (adhk) PDRB Kota Magelang tahun 2024 senilai Rp. 7.668,79 milliar yang meningkat dari Rp. 7.264,92 milliar di tahun 2023 atau meningkat Rp.403,87 milliar.

Ekonomi Kota Magelang tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,56 persen. Sebagaimana tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tahun 2024 ini mampu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Pusat yang hanya sebesar 4,95 persen dan 5,03 persen.

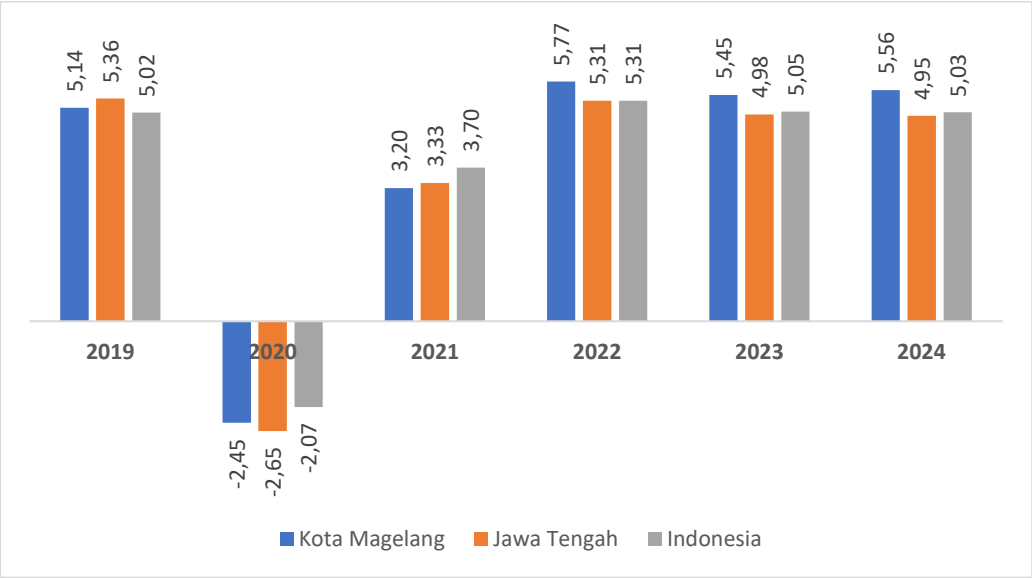


*Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (%), 2019-2024*

*Sumber: BPS Kota Magelang (2024)*

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perekonomian di Kota Magelang tahun ini sedikit berbeda dengan Jawa Tengah dan Indonesia. Perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah tahun ini mengalami perlambatan dibanding tahun lalu,

namun hal itu tidak terjadi di Kota Magelang. Dibanding tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di Kota Magelang lebih baik dibanding kondisi Jawa Tengah dan Indonesia.

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara lapangan usaha yang lain, sebesar 10,20 persen. Selanjutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi serta lapangan usaha jasa kesehatan juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,42 persen dan 8,24 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi di komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga yang tumbuh hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 16,42 persen. Pertumbuhan ini didorong adanya pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif masing-masing sebesar 2,92 persen dan 5,31 persen. Konsumsi rumah tangga meskipun sedikit melambat namun masih tetap tumbuh positif sebesar 5,02 persen.

### 3.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan penanganan pengangguran di Kota Magelang ditunjukkan oleh menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja. TPT Kota Magelang menurun dari 5,25 persen (2023) menjadi 4,40 persen (2024). Seiring dengan penurunan TPT, Jumlah pengangguran terbuka di Kota Magelang tahun 2024 berkurang sebanyak 653 orang dibanding tahun lalu sehingga jumlah penganggur hanya tinggal sejumlah 2.979 orang.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan selain ditandai dengan menurunnya TPT, juga diikuti dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kendati jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka berkurang namun TPAK Kota Magelang ternya juga menurun dari 69,66 persen (2023) menjadi 67,66 persen (2024). Angka ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang ada di Kota Magelang terdapat sekitar 67 orang yang termasuk dalam angkatan kerja di tahun 2024. Jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 1.566 orang, sehingga jumlahnya di tahun 2024 menjadi sebanyak 67.633 orang. Menurunnya TPAK yang diiringi dengan menurunnya TPT menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk bekerja. Tahun 2024 jumlah penduduk bekerja berkurang sebanyak 913 orang sehingga jumlahnya menjadi sebanyak 64.654 orang.

*Tabel 3.4 Indikator Ketenagakerjaan Kota Magelang, 2019-2024*

| Tahun | Penduduk Bekerja | Pengangguran Terbuka | Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | TPT (%) | TPAK (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2019** | 60.649 | 2.769 | 63.418 | 34.220 | 4,37 | 64,95 |
| **2020** | 60.612 | 5.699 | 66.311 | 31.767 | 8,59 | 67,61 |
| **2021** | 60.317 | 5.769 | 66.086 | 32.444 | 8,73 | 67,07 |
| **2022** | 62.347 | 4.487 | 66.834 | 32.091 | 6,71 | 67,56 |
| **2023** | 65.567 | 3.632 | 69.199 | 30.141 | 5,25 | 69,66 |
| **2024** | 64.654 | 2.979 | 67.633 | 32.329 | 4,40 | 67,66 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang (2024).*

### 3.1.7 Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB

Struktur perekonomian Kota Magelang tahun 2023 secara umum memiliki struktur yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Penyangga utama perekonomian di Kota Magelang masih berasal dari tiga lapangan usaha dominan yaitu industri pengolahan (16,49 persen), konstruksi (15,93 persen) dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,98 persen). Lapangan usaha industri pengolahan memberi kontribusi tertinggi dalam perekonomian di Kota Magelang dalam dua tahun terakhir, menggeser posisi lapangan usaha kontruksi.

Struktur perekonomian Kota Magelang tahun 2024 dari sisi penggunaan belum banyak mengalami perubahan, didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Lebih dari separuh (56,15 persen) nilai tambah yang dihasilkan (adhb) di Kota Magelang digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga dengan nilai sebesar Rp. 6.637,72 milliar. Dibandingkan tahun lalu, konsumsi rumah tangga meningkat 5,02 persen.

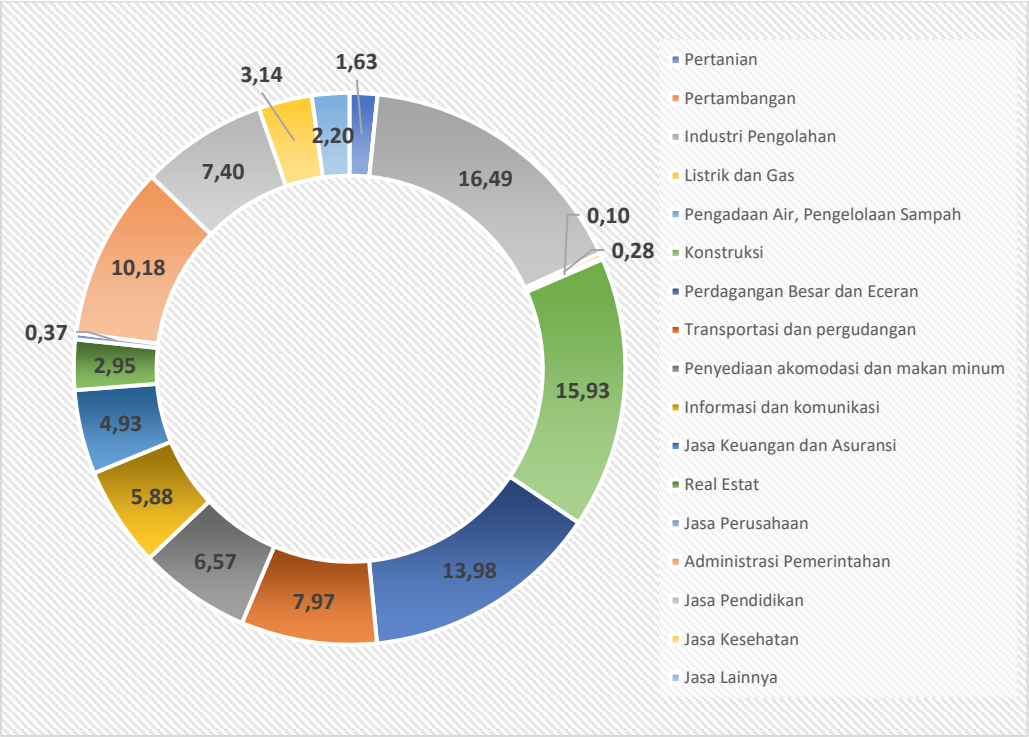


*Gambar 3.2 Struktur Perekonomian Kota Magelang Menurut Lapangan Usaha, 2024*

*Sumber: BPS Kota Magelang, 2024*

Sebanyak 47,91 persen dari nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di Kota Magelang digunakan untuk investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.663,96 milliar. Sementara itu nilai tambah perekonomian yang digunakan untuk memenuhi konsumsi pemerintah tercatat sebesar 15,17 persen atau sebesar Rp. 1.792,83 milliar. Struktur dari net ekspor barang dan jasa yang bernilai negatif menunjukkan bahwa impor barang dan jasa dari luar daerah Kota Magelang masih lebih dominan.

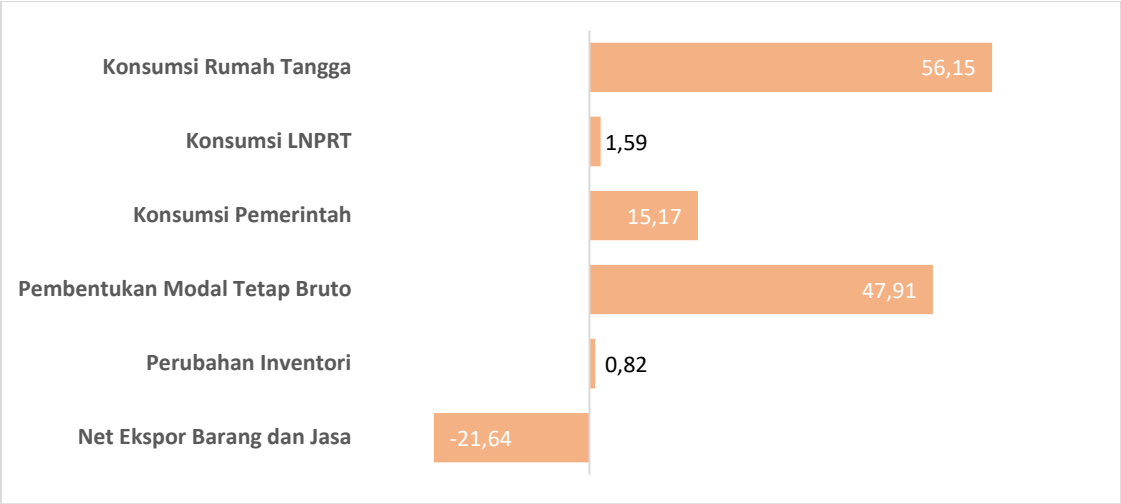


*Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Kota Magelang Menurut Pengeluaran, 2024*

*Sumber: BPS Kota Magelang, 2024*

### 3.1.8 PDRB per Kapita

Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah dapat diproksi dengan indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Magelang di tahun 2024 mencapai angka Rp. 96,56 juta/tahun. Angka ini meningkat 7,34 persen dibanding kondisi tahun 2023 lalu yang mencapai Rp. 89,96 Juta/tahun. Peningkatan nilai PDRB per kapita tahun 2024 seiring dengan semakin kuatnya kondisi perekonomian pasca Covid-19.

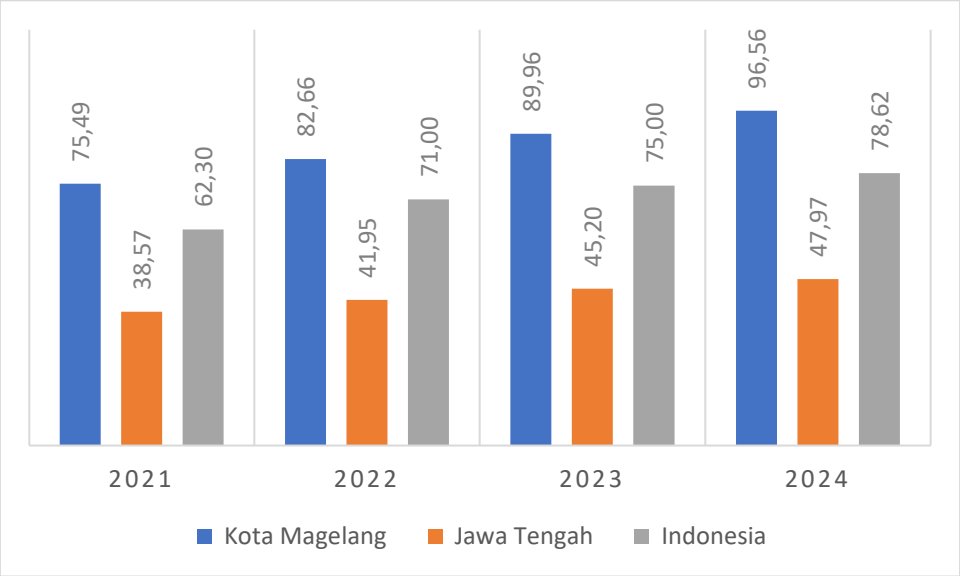


*Gambar 3.4 PDRB per kapita (ADHB) Kota Magelang, Jawa Tengah dan Indonesia (Juta Rupiah/tahun), 2021-2024*
*Sumber: BPS, 2024*

Perkembangan PDRB per kapita Kota Magelang memiliki pola yang serupa dengan Jawa Tengah dan Nasional. Atas dasar harga berlaku PDRB Per Kapita Kota Magelang tercatat selalu lebih tinggi dibanding PDRB per kapita Jawa Tengah maupun Indonesia, bahkan PDRB Per Kapita Kota Magelang nilainya mencapai hampir dua kali lipat dari capaian Jawa Tengah. Dari sisi pertumbuhan dibanding tahun lalu, pertumbuhan PDRB Per Kapita (adhb) Kota Magelang juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan Jawa Tengah (6,13 persen) maupun Indonesia (4,83 persen). Berikut perkembangan PDRB Per Kapita Kota Magelang dalam lima tahun terakhir.

*Tabel 3.5 PDRB per Kapita Kota Magelang, 2019-2023*

| Indikator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| PDRB per Kapita ADHB (Juta Rp/tahun) | 71,70 | 75,49 | 82,66 | 89,96 | 96,56 |
| PDRB per Kapita ADHK (Juta Rp/tahun) | 51,94 | 53,58 | 56,53 | 59,48 | 62,64 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024*
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Peningkatan PDRB perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
b. Meningkatkan program kewirausahaan / pengembangan UMKM /pengembangan ekonomi kreatif;
c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

### 3.1.9 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK). Kota Magelang tidak termasuk dalam 90 kota yang inflasinya dihitung oleh BPS. Oleh karena itu inflasi Kota Magelang didapatkan dari perkembangan harga komoditas di *sister city* (Kota Tegal) yang diasumsikan memiliki pola konsumsi yang identik dengan Kota Magelang.

Inflasi akhir tahun 2024 dicapai pada angka 2,19 persen. Dibandingkan inflasi tahun lalu (3,28 persen), inflasi tahun ini jauh lebih baik dan lebih terkendali. Dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah angka ini termasuk yang paling tinggi. Kendati demikian, angka ini masih dalam rentang target inflasi yang ditetapkan secara nasional sebesar 3% ±1. Hal ini menunjukkan bahwa harga komoditas barang/jasa di Kota Magelang relatif masih terkendali. Inflasi utamanya disebabkan karena naiknya harga emas perhiasan, beras, minyak goreng, kopi bubuk dan sigaret kretek mesin (SKM). Kenaikan harga beras merupakan fenomena umum yang terjadi pada tahun 2024 secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

### 3.1.10 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2025

Perekonomian Kota Magelang sampai akhir tahun 2025 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh pandemi, aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perekonomian yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

1. Pemulihan sektor primer pasca pandemi.
2. Reformasi jaring pengaman sosial pasca pandemi.
3. Perumusan inovasi kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang efektif.
4. Pemulihan geliat investasi.
5. Pengelolaan inflasi pada batas wajar untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.
6. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
7. Peningkatan pemanfaatan satu data dalam mengoptimalkan evidence-based policy making.
8. Peningkatan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Tengah seperti pembangunan kawasan agropolitan Semar Boyong (Semarang-Boyolali-Magelang), pengaktifan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta, pembangunan jalur tol dengan exit tol yang melewati Kota Magelang, pengembangan Candi Borobudur yang merupakan salah satu prioritas destinasi pariwisata nasional dan sebagainya.
9. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas dengan konsep universal design.
10. Peningkatan daya saing ekonomi, daya saing tenaga kerja dan produksi ekspor daerah.
11. Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dan promosi daerah dengan pemantapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
12. Pengembangan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro termasuk diantaranya digitalisasi UMKM.
13. Pemantapan peran koperasi.
14. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjaringan riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.
15. Optimalisasi nilai tambah ekonomi dari potensi ekonomi kreatif dan start up.
16. Penguatan kapasitas fiskal.

Berdasar kondisi eksisting perekonomian Kota Magelang tahun 2023 dan prediksi tahun 2024, dan tren outlook perekonomian pada skala regional dan nasional, maka perekonomian makro Kota Magelang diprediksi makin membaik di tahun 2025. Prospek perekonomian makro Kota Magelang sampai akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diprediksi berada pada rentang 5,5% - 6,20%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksi pada rentang 4,40% - 4,25%.
3. Persentase penduduk miskin diprediksi pada rentang 5,7% - 5,0%.
4. IPM diprediksi pada rentang 82,05-82,23.

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

## 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada periode semester I pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 15 April 2025.

Adapun pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan dengan perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 di antaranya untuk menindaklanjuti beberapa kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang isinya antara lain mengamanatkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk:
   a. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kejadian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar / FGD;
   b. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
   c. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional;
   d. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
   e. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
   f. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian / Lembaga;
   g. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 3 Februari 2025, yang mengakibatkan perlunya penyesuaian pendapatan karena terjadi pengurangan dana transfer dari Pemerintah.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 1 Tahun 2025, yang isinya antara lain mengamanatkan bahwa hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/398/2025 tanggal 19 Maret 2025 Perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan pendapatan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi untuk Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.217.000.000, yang selanjutnya digunakan untuk:
   a. TNI Manunggal Membangun Desa sebesar Rp717.000.000,00;
   b. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kota Magelang sebesar Rp500.000.000,00;
   c. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Ruang PONEK RSUD Budi Rahayu Kota Magelang sebesar Rp5.000.000.000,00.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah maka Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Mengacu ketentuan PP No. 12 Tahun 2019, maka ada beberapa kondisi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menyebabkan perlunya dilakukan Perubahan APBD, secara umum di antaranya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Di samping hal tersebut, Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, maka perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan keuangan daerah baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan guna selanjutnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang akan ditetapkan sebagai perubahan kebijakan keuangan daerah.

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya perubahan arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD maupun Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta guna menyinergikan program Asta cita Presiden dan Wakil Presiden.
2. Penyesuaian terhadap pelampauan dan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Penghitungan alokasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah berkenaan dengan telah ditetapkannya SiLPA Lebih Tahun Anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kebutuhan-kebutuhan yang harus didanai pada Perubahan APBD 2025 berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan baik ketentuan pusat maupun ketentuan di daerah.
4. Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar rincian obyek belanja, antar obyek belanja, antar unit organisasi, antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro Kota Magelang dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan perubahan kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan target pendapatan asli daerah dengan memperhatikan kondisi yang berkembang dan realisasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2025 di semester I.
2. Menyesuaikan target pendapatan dari dana transfer dengan menyesuaikan alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam :
   a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025;
   b. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/398/2025 tanggal 19 Maret 2025 Perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
   c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/14 Tahun 2025 tentang alokasi bagi hasil penerimaan pajak daerah kepada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
3. Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah khususnya elektronifikasi transaksi pendapatan daerah yang terdiri dari transaksi pajak daerah, transaksi retribusi daerah dan transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah melalui instrumen pembayaran nontunai dan kanal pembayaran nontunai.

Adapun rencana perubahan Pendapatan Daerah Kota Magelang untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 dan bahan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 3.5 Pendapatan Daerah Kota Magelang Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025*

| NO | URAIAN | APBD T.A 2025 | Perubahan RKPD Tahun 2025 | Lebih / Kurang |
|---|---|---|---|---|
| | **PENDAPATAN DAERAH** | **999,846,001,295** | **1.027.395.023.868** | **27.549.022.573** |
| **1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **360,082,774,871** | **388.120.258.336** | **28.037.483.465** |
| **1.1** | Pendapatan Pajak Daerah | 96,670,100,000 | 92.170.139.000 | (4.499.961.000) |
| **1.2** | Hasil Retribusi Daerah | 242,366,051,800 | 275.317.147.506 | 32.951.095.706 |
| **1.3** | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 12,386,623,071 | 9.928.041.573 | (2.458.581.498) |
| **1.4** | Lain-lain PAD yang Sah | 8,660,000,000 | 10.704.930.257 | 2.044.930.257 |
| | | | | |
| **2** | **Pendapatan Transfer** | **639,763,226,424** | **638.689.277.412** | **(1.073.949.012)** |
| **2.1** | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 603,707,731,000 | 596.530.644.412 | (7.177.086.588) |
| **2.2** | Transfer Antar Daerah | 36,055,495,424 | 42.158.633.000 | 6.103.137.576 |
| | | | | |
| **3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** | **0** | **585.488.120** | **585.488.120** |
| **3.1** | Pendapatan Hibah | 0 | 585.488.120 | 585.488.120 |
| **3.2** | Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan | 0 | 0 | 0 |

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD 2025 difokuskan untuk:

1. Memprioritaskan belanja daerah yang mendukung visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta guna menyinergikan program Asta cita Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menyesuaikan kebijakan belanja daerah dengan kebijakan belanja Pemerintah Pusat khususnya yang bersumber dana dari dana transfer.
3. Meninjau ulang kegiatan-kegiatan yang memberikan efek positif terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.
4. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja serta alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang dipertimbangkan masih diperlukan penyesuaian demi pencapaian indikator kinerja yang lebih tepat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai tahun pentahapannya.
5. Menyesuaian alokasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah berkenaan dengan telah ditetapkannya Silpa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya.
6. Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah khususnya elektronifikasi transaksi belanja daerah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Gambaran alokasi anggaran belanja dalam APBD 2025 dan rencana alokasi anggaran belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3.6 Anggaran Belanja Dalam APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025*

| No | Uraian | APBD Tahun 2025 | Perubahan RKPD Tahun 2025 | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **BELANJA DAERAH** | **1,115,098,216,295** | **1.114.209.134.178** | **(889.082.117)** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **945,950,568,920** | **968.309.463.107** | **22.358.894.187** |
| **2.1.1** | Belanja Pegawai | 449,685,709,147 | 443.892.145.395 | (5.793.563.752) |
| **2.1.2** | Belanja Barang dan Jasa | 475,338,500,970 | 502.546.458.909 | 27.207.957.939 |
| **2.1.3** | Belanja Bunga | - | - | - |
| **2.1.4** | Belanja Subsidi | - | - | - |
| **2.1.5** | Belanja Hibah | 18,635,244,003 | 19.654.744.003 | 1.019.500.000 |
| **2.1.6** | Belanja Bantuan Sosial | 2,291,114,800 | 2.216.114.800 | -75.000.000 |
| | | | | |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **147,647,647,375** | **142.911.900.509** | **(4.735.746.866)** |
| **2.2.1** | Belanja Modal Tanah | 2,573,883,850 | 2.808.783.850 | 234.900.000 |
| **2.2.2** | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48,475,342,549 | 53.657.833.152 | 5.182.490.603 |
| **2.2.3** | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 66,770,916,800 | 57.624.453.331 | (9.146.463.469) |
| **2.2.4** | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 27,739,279,376 | 26.851.228.976 | (888.050.400) |
| **2.2.5** | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1,096,255,500 | 933.531.900 | (162.723.600) |
| **2.2.6** | Belanja Modal Aset Lainnya | 991,969,300 | 1.036.069.300 | 44.100.000 |
| | | | | |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **21,500,000,000** | **2.987.770.562** | **(18.512.229.438)** |
| **2.3.1** | Belanja Tidak Terduga | 21,500,000,000 | 2.987.770.562 | (18.512.229.438) |

| No | Uraian | APBD Tahun 2025 | Perubahan RKPD Tahun 2025 | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **-** | **-** | **-** |
| **2.4.1** | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | - | - | - |
| **2.4.2** | Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - |
| **2.4.3** | Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa | - | - | - |

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu :

a. Menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan data hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta mengalokasikan penggunaan SiLPA, khususnya SiLPA terikat, baik pada pendapatan daerah maupun belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Menunda pencairan dana cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota, dikarenakan perubahan teknis pelaksanaan pembangunan sehingga perlu penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja dan pembiayaan APBD.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan diusulkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 yaitu bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota Magelang Tahun 2025-2027, mengamanatkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Magelang membentuk dana cadangan sebesar Rp18.603.750.000,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya gambaran Pembiayaan Daerah pada APBD tahun Anggaran 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.7 Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025*

| No | Uraian | APBD Tahun 2025 | Perubahan RKPD Tahun 2025 | Lebih/ Kurang |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **3.1** | **Penerimaan pembiayaan daerah** | **117,752,215,000** | **110.396.642.310** | **(7.355.572.690)** |
| **3.1.1** | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 70,747,215,000 | 110.391.642.310 | 39.644.427.310 |
| **3.1.2** | Pencairan Dana Cadangan | 47,000,000,000 | 0 | (47.000.000.000) |
| **3.1.3** | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - |
| **3.1.4** | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - |
| **3.1.5** | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 5,000,000 | 5.000.000 | 0 |
| **3.1.6** | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - |
| **3.1.7** | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | - | - | - |
| | | | | |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | **2,500,000,000** | **23.582.532.000** | **21.082.532.000** |
| **3.2.1** | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo | - | - | - |
| **3.2.2** | Penyertaan Modal Daerah | 2,500,000,000 | 4.978.782.000 | 2.478.782.000 |

| No | Uraian | APBD Tahun 2025 | Perubahan RKPD Tahun 2025 | Lebih/ Kurang |
|---|---|---|---|---|
| **3.2.3** | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 18.603.750.000 | 18.603.750.000 |
| **3.2.4** | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - |
| **3.2.5** | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | - | - | - |
| | | | | |
| | **Pembiayaan netto** | **115,252,215,000** | **86.814.110.310** | **(28.438.104.690)** |
| | | | | |
| **3.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** | **0** | **0** | **0** |

# BAB 4
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2025. Prioritas Daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Magelang tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
3. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026; dan
4. Pokok-pokok pikiran DPRD.

Substansi yang akan diuraikan dalam bab ini secara garis besar terdiri dari:

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025;
C. Arah Pengembangan Wilayah Terpadu Kota Magelang;
D. Kontribusi Kota Magelang dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2025;
E. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025;
F. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDG's Kota Magelang;
G. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG);
H. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim;
I. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
J. Inovasi Pembangunan Daerah.

Secara detail diuraikan sebagai berikut:

## 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Penyusunan RKPD Tahun 2025 masih dalam masa transisi dan milestone penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, dengan mengusung Visi : Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan dengan melibatkan 6 misi, 4 klaster program, 19 program unggulan dan 11 program prioritas. Oleh karena itu sampai dengan tahapan Rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2025, mengingat RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 baru dalam tahapan draft rancangan awal, maka referensi yang digunakan masih menggunakan RPJDM Kota Magelang versi Tahun 2021-2026.

Namun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyusunan Perubahan RKPD 2025 sudah mulai menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita.

### 4.1.1 Visi Pembangunan Daerah

RKPD Kota Magelang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Tahun perencanaan 2025 merupakan tahun empat pelaksanaan RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang tahun 2025 disusun berdasarkan pada: (1) visi dan misi RPJMD beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan; (2) hasil evaluasi RKPD tahun 2023; (3) Isu strategis Daerah; (4) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (5) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Visi menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun visi pembangunan daerah adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam periode masa jabatannya. Visi pembangunan daerah Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu:

**"KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA"**

Penjabaran masing-masing unsur dari Visi tersebut sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1.

*Tabel 4.1 Penjelasan Visi*

| UNSUR VISI | PENJELASAN |
|---|---|
| **Magelang** | Magelang adalah suatu wilayah dibawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah ± 18,56 km$^2$ dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan. |
| **Maju** | Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan. |
| **Sehat** | Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.<br>Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta lingkungan yang sehat. |
| **Bahagia** | Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.<br>Masyarakat yang bahagia ditandai dengan keadaan masyarakat Kota Magelang yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya. |

*Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026*

### 4.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia, diterjemahkan ke dalam misi pembangunan sebagai berikut:

1. Menciptakan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran dan berlandaskan imtaq;

   Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Masyarakat Kota Magelang yang relijius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani.

2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

   Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi Kota dan masyarakat Magelang yang sehat, serta masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

   Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan

masyarakat. Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip universal design harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif;

   Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan:

   Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih bahagia. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi infklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

   Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

5. Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan tata ruang dan infrastruktur.

   Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewadahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Di dalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya pertukaran informasi secara masal.

   Kinerja penataan ruang akan menjadi "panglima" dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewadahi kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan melalui tema RKPD tahun 2025, yaitu PEMANTAPAN UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA. Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan sebagaimana Tabel 4.2 berikut.

*Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Magelang dalam Visi Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025*

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Menciptakan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran dan berlandaskan keimanan dan ketakwaan** | | | | |
| | | | Nilai pembangunan masyarakat | 81,09 | **85,67*)** |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter | Meningkatnya penguatan toleransi | Nilai penguatan toleransi | 63,00 | **100,00*)** |
| | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Nilai penguatan ketentraman dan ketertiban umum | 94,61 | **94,61** |
| | | Meningkatnya stabilitas daerah | Nilai stabilitas daerah | 93,98 | **96,29*)** |
| | | Meningkatnya penguatan kebudayaan | Nilai pemajuan kebudayaan | 66,36 | **66,36** |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Nilai partisipasi masyarakat | 88,00 | **92,19*)** |
| **2** | **Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia** | | | | |
| | Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia | | Indeks Pembangunan Manusia | 82,64 | **82,05**)** |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing | Indeks Pendidikan | 0,782 | **0,782** |
| | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 17,00 | **17,00** |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 0,878 | **0,88*)** |
| | | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Ribu Rp) | 12.987,00 | **13.175,00*)** |
| | | Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan | Indeks Pembangunan Gender | 96,00 | **96,43*)** |
| **3** | **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif** | | | | |
| | Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif | | Indeks Reformasi Birokrasi | 83,10 | **83,10** |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85,41 | **88,90*)** |
| | | Terciptanya birokrasi yang kapabel | Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) | 30,80 | **37,11*)** |
| | | | Indeks Sistem Merit | 0,730 | **0,8232*)** |
| | | | Indeks SPBE | 2,975 | **2,98** |
| | | Terciptanya birokrasi yang bersih dam akuntabel | Maturitas SPIP | 3.921 | **3.921** |
| | | | Nilai SAKIP | A | **A** |
| | | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 93,60 | **93,60** |
| **4** | **Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan** | | | | |
| | Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,18- 5,43 | **5,50-6,20**)** |
| | | | Persentase penduduk miskin | 6,12-6,76 | **5.70**)** |
| | | | Ketimpangan Pendapatan | 16,46 sedang | **16,46 sedang** |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan | Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan (%) | 29,85 | **30,56*)** |
| | | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase pertumbuhan investasi | 16,00 | **16,29*)** |
| | | Meningkatnya angka kunjungan wisatawan | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 3,18 | **12,64*)** |
| | | Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial | Persentase PMKS | 9,18 | **4,72*)** |
| | | Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,3-6,3 | **5,02**)** |
| | | Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | Persentase Pertumbuhan UMKM | 4,5 | **4,5** |
| **5** | **Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan tata ruang dan infrastruktur** | | | | |
| | Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan | | Indeks Kualitas Ruang Kota | 68,64 | **68,64** |
| | | Meningkatnya kualitas infrastruktur kota | Indeks infrastruktur wilayah | 91,86 | **91,86** |
| | | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 78,00 | **83,40*)** |
| | | Meningkatnya aksesibilitas perkotaan | Indeks aksesibilitas perkotaan | 73,80 | **73,80** |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase luas kawasan kumuh | 0,00 | **0,00** |
| | | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 51,00 | **64,80*)** |
| | | | Persentase ruang terbuka hijau publik | 17,50 | **17,50** |
| | Meningkatnya ketahanan daerah | | Indeks Resiliensi Daerah | 71,94 | **71,94** |
| | | Meningkatnya ketahanan terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 57,40 | **57,40** |
| | | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Skor PPH | 92,74 | **92,74** |

*Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026*
**) : Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022-2023. **) : Hasil Rakortekbang*

Adapun strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada setiap misi disampaikan sebagai berikut:

**Misi 1: Menciptakan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran dan Berlandasakan Imtaq**

Misi ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kota Magelang dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang relijius, berbudaya, beradab dan toleran dan berlandaskan imtaq. Penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan akan

tercermin dalam kehidupan masyarakat yang aman, bertenggang rasa, dan bergotong-royong sebagai modal sosial pembangunan.

Ukuran keberhasilan misi ini adalah tercapainya tujuan terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter dengan sasaran meningkatnya penguatan toleransi, meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatnya stabilitas daerah, meningkatnya penguatan kebudayaan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Strategi dalam upaya pencapaian tujuan sasaran pada misi ini adalah:

a. Penguatan penegakan Perda
b. Peningkatan kapasitas SDM trantibumnas
c. Fasilitas dialog antar kelompok dan antar umat beragama
d. Peningkatan wawasan kebangsaan
e. Deteksi dini gangguan keamanan
f. Pengembangan seni budaya lokal
g. Pelestarian cagar budaya
h. Pendampingan keberdayaan masyarakat
i. Peningkatan peran LKM

Program unggulan yang mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah program pelayanan pendidikan gratis mulai PAUD, SD, SMP, Program peningkatan kesejahteraan guru honorer, Program jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, Program pelayanan kesehatan paripurna, Program *Homecare* bagi balita dan lansia.

**Misi 2: Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Misi kedua ini bertitik berat pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas SDM. Nilai IPM Kota Magelang tahun 2020 mencapai 78,99 dan berada pada posisi nomor 4 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Aspek pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen IPM erat kaitannya dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Kondisi rata-rata lama sekolah di Kota Magelang pada tahun 2020 mencapai 10,39 dan naik hingga tahun 2023 menjadi 11,20; angka harapan lama sekolah mencapai 14,14 pada tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 14,40 dan angka harapan hidup mencapai 76,85 pada tahun 2020 meningkat pada tahun 2023 menjadi 77,22. Sedangkan jika dilihat dari kesetaraan gender, meskipun sudah termasuk dalam kategori baik tetapi masih belum ideal dan terjadi ketimpangan yang ditunjukkan dengan nilai IPG tahun 2020 sebesar 95,27 atau menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 95,51 sementara pada tahun 2023 naik menjadi 96,43.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi kedua ini adalah meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing; meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; meningkatnya daya beli masyarakat; dan meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan. Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah:

a. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing
b. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
c. Peningkatan literasi masyarakat
d. Pembinaan pemuda
e. Pembinaan olahraga
f. Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat
g. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
h. Perluasan akses pelayanan Kesehatan
i. Peningkatan pemahaman terkait Kesehatan reproduksi untuk pengendalian penduduk
j. Pemasyarakatan olahraga
k. Pengarustamaan gender
l. Pemberdayaan perempuan

m. Perlindungan perempuan dan anak
n. Peningkatan kualitas keluarga

Pencapaian tujuan sasaran misi kedua ini juga dilakukan melalui beberapa program unggulan, yaitu:

a. Pelayanan pendidikan gratis jenjang PAUD, SD, SMP;
b. Peningkatan kesejahteraan guru honorer;
c. Jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu;
d. *Home care* bagi lansia dan balita;
e. Memaksimalkan pelayanan kesehatan paripurna.

**Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif**

Komponen utama misi ketiga ini adalah reformasi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik; menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan menciptakan birokrasi yang kapabel. Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, inovasi perlu dilakukan agar birokrasi lebih efektif dan efisien. Komponen inovatif dalam misi tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, sehingga komponen ini tidak menjadi sasaran.

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ini adalah:

a. Integrasi sistem pelayanan berbasis IT
b. Pelayanan publik
c. Peningkatan kualitas pengawasan
d. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
e. Optimalisasi PAD
f. Peningkatan kualitas perencanaan
g. Peningkatan kualitas inovasi daerah
h. Penerapan sistem merit

Program unggulan dalam mewujudkan tujuan sasaran pada misi ketiga ini adalah reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi. Program ini menekankan pada integrasi sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi pendekatan yang perlu diterapkan dengan cakupan layanan administrasi pemerintahan (internal) maupun layanan publik (eksternal).

**Misi 4: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan**

Fokus dari misi keempat ini adalah penguatan ekonomi daerah berbasis masyarakat. Terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini yaitu meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat pada mengejar pertumbuhan tetapi juga memperhatikan pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat sehingga gap ketimpangan tidak semakin lebar. Peran Kota Magelang sebagai pusat kegiatan wilayah dengan tumpuan kegiatan ekonomi pelayanan jasa juga perlu dimantabkan. Kontribusi ekonomi dari peran Kota Magelang ini perlu didorong untuk terus ditingkatkan.

Sasaran dalam pencapaian tujuan dari visi ini adalah meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan; meningkatnya pertumbuhan investasi; meningkatnya angka kunjungan wisatawan; meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; meningktanya penyerapan tenaga kerja daerah; meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah:

a. Perbaikan data dan ketetapan sasaran program
b. Peningkatan kompetensi Angkatan kerja
c. Penguatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM
d. Peningkatan akses modal UMKM

e. Perluasan pasar perdagangan
f. Promosi pariwisata
g. Peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kota Magelang
h. Peningkatan transparansi, kemudahan dan kecepatan pelayanan perijinan

Program unggulan yang dirumuskan dalam pencapaian misi ini adalah:

a. Pengalokasian APBD untuk anggaran dana RT sebesar 30 juta setiap RT untuk pemberdayaan masyarakat
b. Program pelatihan dan pembentukan 1.500 Wirausaha Muda (*Start Up*) dan ruang usaha baru
c. Pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal

**Misi 5: Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur**

Misi mewujudkan Kota Magelang yang modern dan maju dimaknai dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Prinsip inklusifitas akses infrastruktur diterapkan selaras dengan upaya pengarusutamaan keberlanjutan. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan dan meningkatnya ketahanan daerah. Sasaran yang dirumuskan adalah meningkatnya kualitas infrastruktur kota; meningkatnya kesesuaiam pemanfaatan ruang; meningkatnya aksesibilitas perkotaan; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; terwujudnya linkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan; meningkatnya ketahanan terhadap bencana; meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan sasaran pada misi ini adalah:

a. Pembangunan dan perbaikan infarastruktur kota
b. Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang
c. Perluasan media info dan komunikasi penataan ruang
d. Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif
e. Penyediaan angkutan umum terintegrasi
f. Peningkatan akses rumah layak huni
g. Peningkatan akses sanitasi aman
h. Peningkatan akses air bersih
i. Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan
j. Rehabilitasi lingkungan
k. Penataan dan penambahan RTH publik
l. Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana
m. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
n. Urban farming
o. Pemenuhan cadangan pangan

Dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang telah diterjemahkan kedalam beberapa strategi pembangunan, diperlukan arah kebijakan tahunan agar lebih fokus dalam setiap tahapan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Pentahapan yang dibuat juga dilakukan dengan sinkronisasi terhadap arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Arah kebijakan pembangunan Kota Magelang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

*Gambar 4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026*

*Sumber : RPJMD Kota Magelang 2021 – 2026*

### 4.1.4 Keselarasan dengan RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045

Pelaksanaan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode pertama tahapan RPJPD Kota Magelang tahun 2025-2045. RPJPD Kota Magelang tahun 2025-2045 memiliki visi **"Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Berkelanjutan".** Keberhasilan pencapaian visi tersebut ditandai dengan sasaran utama visi diantaranya peningkatan pendapatan per Kapita, Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, Pusat perdagangan dan jasa regional, Peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan Penurunan emisi GRK menuju net zero emission.

Dalam upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, ditandai dengan sasaran utama diantaranya peningkatan pendapatan per Kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan PDRB sektor perdagangan dan jasa serta indeks daya saing daerah, dan penurunan emisi GRK. Perwujudan visi jangka panjang Kota Magelang melalui perumusan lima misi, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, tangguh dan berdaya saing;
3. Meningkatkan ketahanan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan infrastruktur yang adaptif dan berwawasan lingkungan; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada fase I (tahun 2025-2029) RPJPD Kota Magelang diarahkan untuk **pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan**. Tahap ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat didukung penguatan reformasi birokrasi, peningkatan ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan kondusifitas daerah, dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam kaitannya dengan arah kebijakan pembangunan RKPD Kota Magelang tahun 2025 juga berfokus pada **Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya**, dimana kebijakan tersebut sejalan dengan arah fase pertama RPJPD yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fokus sumber daya manusia menjadi prioritas pertama pembangunan pada tahap 5 tahun pertama dikarenakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah yang berdaya saing maka perlu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya terlebih dahulu termasuk penguatan kapasitas aparatur daerah untuk penguatan reformasi birokrasi. Selanjutnya fokus perdagangan, jasa dan UMKM diarahkan pada optimalisasi pelaku usaha dan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan jasa. Sumber Daya Manusia yang Unggul diarahkan pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap jenjang pendidikan, termasuk pencapaian wajib belajar tiga belas tahun, dan peningkatan

kapasitas dan keahlian lulusan SMA/SMK untuk meningkatkan penyerapan angkatan kerja khususnya untuk lulusan SMA/SMK. Selain itu upaya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata juga menjadi perhatian pada tahap ini sebagai bagian dari kesiapan untuk menangkap potensi KSPN Borobudur bagi Kota Magelang. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas baik individu maupun daerah.

Pada prioritas pembangunan tahun 2025 Kota Magelang diwujudkan dengan adanya program prioritas yang mendukung pemantapan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya diantaanya Pemantapan kesejahteraan masyarakat, Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra, Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin, Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekoonmian daerah, Penguatan perwujudan ruang kota layak huni, Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat, Pemantapan layanan publik prima dan Pemantapan daya saing daerah.

## 4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

### 4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2025

Rencana pembangunan tahun 2025 merupakan rencana pembangunan yang berpedoman pada RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen Rancangan RPJPD Kota Magelang 2025-2045. Arah kebijakan tahap I RPJPD diarahkan pada **pembangunan sumber daya manusia modern, inovatif dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan**. Tahap ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat didukung penguatan reformasi birokrasi, peningkatan ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan kondusifitas daerah, dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Arah kebijakan tersebut masih sejalan dengan tema pembangunan Kota Magelang tahun 2025 yang juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup msayarakat. Sesuai dengan RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026, tema pembangunan Kota Magelang tahun 2025 adalah **Pemantapan Untuk Maju, Sehat dan Bahagia,** dengan arah kebijakan **Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya.** Tema pembangunan Kota Magelang tahun 2025 diselaraskan dan mendukung tema RKP Nasional dan Provinsi, seperti termuat pada Tabel 4.3 berikut ini.

*Tabel 4.3 Keterkaitan antara Tema Pembangunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025*

| Tema RKP 2025 | Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 | Tema RKPD Kota Magelang Tahun 2025 |
|---|---|---|
| Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan | Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter | Pemantapan Untuk Maju, Sehat Dan Bahagia |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

#### 4.2.2.1 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029 yaitu Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun penekanan tema RKP 2025 diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. **Sumber Daya Manusia Berkualitas** melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Agenda Pembangunan, yang terdiri atas:
   b. Transformasi Sosial
      - Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun.
      - Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan.

- Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.
- Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif.
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas.
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system.*

c. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti).

2. **Infrastruktur berkualitas** yang diarahkan antara lain, melalui peningkatan infrastruktur konektivitas yang menunjang Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Pariwisata, serta infrastruktur layanan dasar (antara lain infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, dan irigasi), pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, penguatan infrastruktur digital hingga reformasi pengelolaan sampah. Agenda Pembangunan, yang terdiri atas:

a. Transformasi Ekonomi

- Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- Penguatan infrastruktur digital.
- Pengembangan infrastruktur transisi energi.
- Percepatan infrastruktur IKN.

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penetapan Reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3. **Ekonomi Inklusi dan Berkelanjutan** yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, antara lain melalui penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengembangan skema graduasi bantuan sosial, peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya, percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan, serta peningkatan produksi industri pengolahan. Agenda Pembangunan, yang terdiri atas:

a. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

- Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Pengembangan skema graduasi bansos.
- Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
- Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat.
- Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja.
- Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- Peningkatan produksi industri pengolahan.
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Sasaran pembangunan RKP 2025 antara lain meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju, mengurangi kemiskinan menuju nol persen, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pengaruh internasional. Adapun sasaran RKP 2025 berserta targetnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

*Tabel 4.4 Sasaran dan Target Indikator Makro Nasional Tahun 2025*

| No | Sasaran Pembangunan | Target |
|---|---|---|
| **1** | Pertumbuhan Ekonomi | 5,3-5,6 % |
| **2** | Rasio Gini (nilai) | 0,379-0,382 |

| No | Sasaran Pembangunan | Target |
|---|---|---|
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,5-5,0 % |
| 4 | Indeks Modal Manusia (nilai) | 0,56 |
| 5 | Tingkat Kemiskinan | 7,0-8,0 % |
| 6 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | 38,6 % |
| 7 | Nilai Tukar Petani (kumulatif) | 115-120 |
| 8 | Nilai Tukar Nelayani (kumulatif) | 105-108 |

*Sumber: Rancangan RKP 2025*

Adapun kebijakan di tahun 2025 diarahkan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 8 prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RKP 2025. Prioritas nasional dan program pembangunan nasional tahun 2025 tercantum dalam tabel berikut.

*Tabel 4.5 Prioritas Nasional Tahun 2025*

| No | Prioritas Nasional (PN) | Sasaran Utama | Program Pembangunan (PP) Nasional |
|---|---|---|---|
| 1 | PN.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia | - Memperkokoh ideologi pancasila<br>- Penguatan Demokrasi<br>- Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik<br>- Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia<br>- Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia. |
| 2 | PN.2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. | Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan | - Penguatan pertahanan negara<br>- Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan<br>- Penguatan sistem keamanan negara<br>- Profesionalisme pelayanan kepolisian<br>- Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi<br>- Keamanan siber, sandi dan sinyal<br>- Penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy*<br>- Diplomasi ekonomi<br>- Hubungan internasional yang kondusif |
| | | Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air secara berkelanjutan | - Swasembada pangan<br>- Swasembada energi<br>- Swasembada air<br>- Pemenuhan akses air minum aman<br>- Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat |
| | | Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan | - Ekonomi Syariah<br>- Ekonomi digital<br>- Ekonomi sirkular industri<br>- Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik<br>- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang |

| No | Prioritas Nasional (PN) | Sasaran Utama | Program Pembangunan (PP) Nasional |
|---|---|---|---|
| | | | - Penerapan ekonomi sirkular dari seumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga secara partisiatif (hulu)<br>- Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (hilir)<br>- Pembangunan rendah karbon<br>- Tenaga kerja hijau<br>- Pengelolaan hutan lestari<br>- Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru |
| 3 | PN.3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. | Melanjutkan pengembangan infrastruktur | - Penguatan konektivitas dan layanan transportasi<br>- Penguatan konektivitas dan transisi energi listrik<br>- Penguatan konektivitas dan ekosistem digital serta pengembangan pengairan dan irigasi. |
| | | Meningkatnya Tital Aset Sektor Keuangan terhadap PDB | - Pendalaman sektor keuangan |
| | | Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas | - Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. |
| | | Meningkatnya nilai tambah pariwisata | - Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan |
| | | Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi kreatif | - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual |
| 4 | PN.4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas. | Pendidikan berkualitas yang merata | - Percepatan wajib belajar 13 tahun<br>- Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran<br>- Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas<br>- Penguatan sistem tata kelola pendidikan<br>- Penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang science technology, engineering, art, and mathematic<br>- Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi |
| | | Kesehatan untuk semua | - Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat<br>- Pengendlaian penyakit dan pembudayaan hidup sehat<br>- Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan<br>- Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola yang komprehensif |
| | | Keluarga berkualitas, keteraan gender dan masyarakat inklusif | - Peningkatan ketangguhan keluarga<br>- Peningkatan kualitas perlindungan anak<br>- Peningkatan kualitas pemuda<br>- Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan |

| No | Prioritas Nasional (PN) | Sasaran Utama | Program Pembangunan (PP) Nasional |
|---|---|---|---|
| | | | - Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia |
| | | Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi | - Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja<br>- Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional<br>- Pengembangan manajemen talenta nasional<br>- Peningkatan prestasi olahraga |
| 5 | PN.5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. | Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan | - Pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termsuk didalamnya penguatan industri dasar<br>- Pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru |
| | | Integrasi ekonomi domestik dan global | - Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional<br>- Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global<br>- Peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global |
| 6 | PN.6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Perlindungan sosial yang adaptif | - Satu sistem registrasi sosial ekonomi<br>- Reformasi sistem jaminan sosial nasional<br>- Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dam pemberdayaan masyarakat yang adaptif<br>- Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) untuk perluasan perlindungsn sosial dan kesejahteraan<br>- Inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan |
| | | Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | - Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman |
| | | Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | - Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan |
| | | Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | - Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitas dan pembangunan ibu kota nusantara |
| 7 | PN.7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. | Terwujudnya supremasi hukumyang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi | - reformasi politik<br>- reformasi hukum<br>- pencegahan dan pemberantasan korupsi<br>- penguatan kelembagaan hukum |

| No | Prioritas Nasional (PN) | Sasaran Utama | Program Pembangunan (PP) Nasional |
|---|---|---|---|
| | | | - transformasi sistem penuntutan dan aduocaat genemal |
| | | Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani | - reformasi tata kelola pemerintahan<br>- inklusivitas dan transformasi digital layanan publik<br>- pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani |
| | | Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba | - pencegahan dan pemberantasan narkoba |
| | | Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan | - Penanggulangan judi dan penyelundupan |
| | | Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan | - peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara |
| | | Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi | - Optimalisasi pendapatan negara yang sejalan denga.n upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif, melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan |
| | | Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas sefta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan | - Pengendalian komponen inflasi harga bergejolak |
| **8** | PN.8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. | Beragama masalah dan berkebudayaan maju | - Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat<br>- Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa |
| | | Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim | - Pembangunan berketahanan iklim<br>- Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna |

Sumber: RKP 2025

Pada tahun 2025 perlu dilakukan transisi estafet pembangunan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan pembangunan. RKP Tahun 2025 di dalamnya dirumuskan 8 Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memberikan makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan limbung pangan desa, daerah dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/POLRI.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Optimalisasi penerimaan negara.

#### 4.2.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 merupakan tahun kedua RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan sekaligus merupakan tahun pertama dalam RPJMD tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang saat ini sedang disusun. Tujuan pembangunan daerah dalam RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari, dengan sasaran pembangunan daerah meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahan SDA dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
   a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
   b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
   c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
   d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
   e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:
   a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *softskill* dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos

kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;

b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.

d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;

e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;

f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai *platform* termasuk *platform digital*;

g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;

h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:

a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;

c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;

d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:

a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;

b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. PDRB per Kapita sebesar 47,60 juta rupiah;
2. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,362;
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60 persen;
5. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20-4,60 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,52 persen;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 60,24;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,56;
13. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

#### 4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025

Proses penyusunan RKPD Kota Magelang menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Wujud pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2025 antara lain dimulai dari penjaringan usulan perencanaan dari masyarakat melalui rembug warga dan pelaksanaan Musrenbang baik tingkat kelurahan-kecamatan maupun kota, Konsultasi Publik serta *Focused Group Discussion* (FGD). Konsultasi publik atas rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dalam segmen umum dan segmen khusus (anak-anak dan lansia). Sedangkan FGD yang dilakukan dengan mengambil tema i) Kepariwisataan; ii) Penguatan Perwujudan Ruang Kota Layak Huni; iii) Penguatan Ketahanan Pangan dan Adaptasi Perubahan Iklim; serta iv) Pembangunan Daerah Berbasis Inklusivitas.

Disamping itu juga dilakukan proses verifikasi terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Hasil musrenbang maupun forum khusus dan verifikasi pokok-pokok pikiran DPRD kemudian ditindaklanjuti dalam program di masing-masing perangkat daerah terkait.

Dalam penyusunan substansi RKPD Kota Magelang Tahun 2025 juga menerapkan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial (THIS). Dimana prioritas pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 yang termuat dalam RKPD Tahun 2025 telah sesuai dengan tema pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2021-2026 untuk tahun 2025. Dari prioritas pembangunan tersebut serta memperhatikan potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2023 kemudian ditentukan strategi untuk mewujudkannya dan kemudian dijabarkan pelaksanaannya dalam bentuk program dan kegiatan. Baik dalam proses perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan prioritas pembangunan juga telah melibatkan semua unsur pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, komunitas/masyarakat dan media (kolaborasi pentahelix-ABCGM). Selanjutnya lokasi pelaksanaan dari prioritas pembangunan juga telah mempertimbangkan dimensi keruangan yang jelas, terutama untuk prioritas pembangunan yang melibatkan beberapa lokasi.

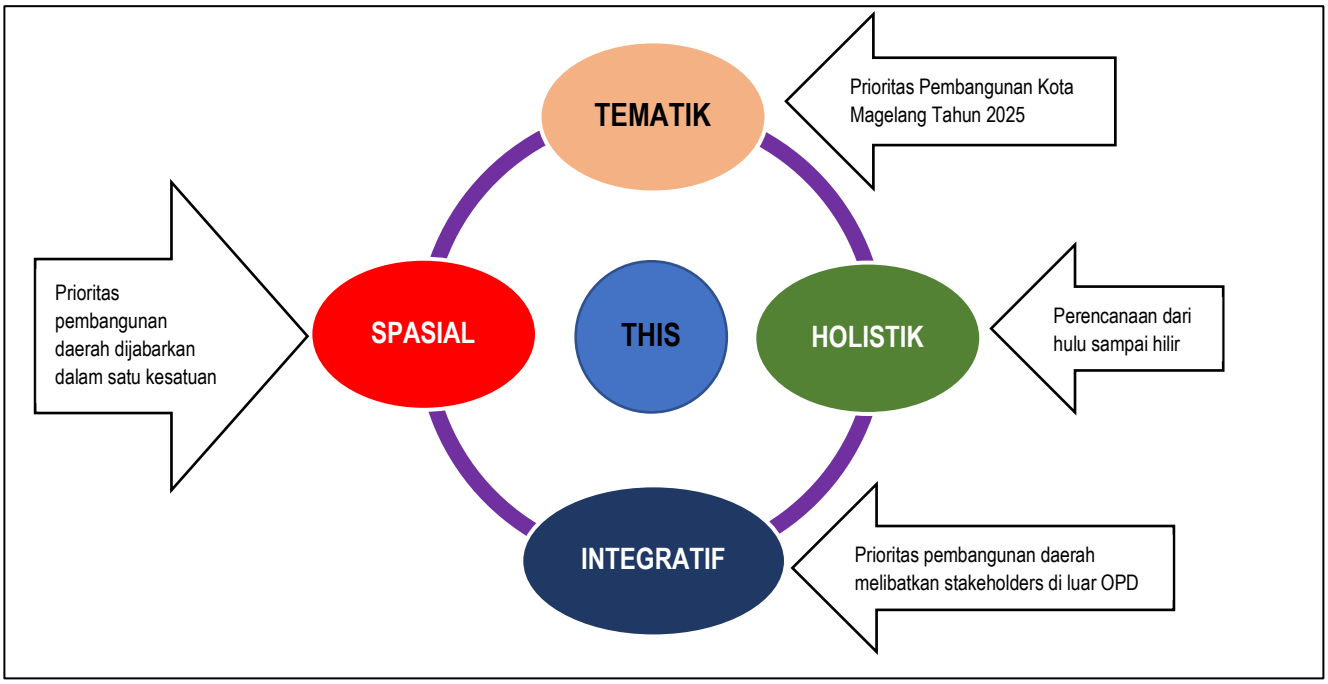


*Gambar 4.2 Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025*

*Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

#### 4.2.2.3.1 Prioritas Pembangunan

Prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2025 disusun berdasar permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 2023 dan Isu strategis. Isu strategis menjadi pertimbangan perumusan prioritas RKPD 2025 yang disusun berdasar: (1) isu strategis daerah 2021-2026; (2) evaluasi pencapaian kinerja RKPD 2023; (3) tantangan global, nasional dan regional SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) termasuk juga standar pelayanan minimal serta isu sektoral yang dirumuskan dalam RKP 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2025. Berdasarkan RPJMD Kota Magelang 2021-2026, terdapat tujuh prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu:

*Tabel 4.6 Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025*

| No | Prioritas Pembangunan Tahun 2025 | Indikator Kinerja Utama Daerah | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat | Indeks infrastruktur wilayah | 91,86 | **91,86** |
| | | Indeks aksesibilitas perkotaan | 73,80 | **73,80** |
| | | Persentase luas kawasan kumuh | 0,00 | **0,00** |
| | | Persentase ruang terbuka hijau publik | 17,5 | **17,5** |
| | | Indeks Pendidikan | 0,782 | **0,782** |

| No | Prioritas Pembangunan Tahun 2025 | Indikator Kinerja Utama Daerah | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 17 | **17** |
| | | Indeks Kesehatan | 0,878 | **0,880*)** |
| | | Indeks Pembangunan Gender | 96,00 | **96,43*)** |
| **2.** | Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | Nilai partisipasi masyarakat | 88 | **92,19*)** |
| | | Nilai SAKIP | A | **A** |
| **3.** | Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin | Persentase PMKS | 9,18 | **4,72*)** |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,3-6,3 | **5,02**)** |
| | | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Ribu Rp) | 12.987 | **13.175*)** |
| **4.** | Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah | Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan (%) | 29,85 | **30,56*)** |
| | | Persentase pertumbuhan investasi | 16 | **16,29*)** |
| | | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 3,18 | **12,64*)** |
| | | Persentase Pertumbuhan UMKM | 4,5 | **4,5** |
| **5.** | Penguatan perwujudan ruang kota layak huni | Persentase ruang terbuka hijau publik | 17,5 | **17,5** |
| | | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 78 | **83,40*)** |
| | | Indeks SPBE | 2,975 | **2,98*)** |
| | | Indeks Kualitas Ruang Kota | 68,64 | **68,64** |
| | | Indek Infrastruktur Wilayah | 91,86 | **91,86** |
| | | Indeks Aksesibilitas Perkotaan | 73,80 | **73,80** |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 51,00 | **68,40*)** |
| **6.** | Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat | Nilai penguatan toleransi | 63 | **100*)** |
| | | Nilai penguatan ketentraman dan ketertiban umum | 94,61 | **94,61** |
| | | Nilai stabilitas daerah | 93,98 | **96,29*)** |
| | | Nilai pemajuan kebudayaan | 66,36 | **66,36** |
| | | Indeks Ketahanan Daerah | 57,40 | **57,40** |
| | | Skor PPH | 92,74 | **92,74** |
| **7.** | Pemantapan Layanan Publik Prima | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85,41 | **88,90*)** |
| | | Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) | 30,8 | **37,11*)** |
| | | Indeks Sistem Merit | 0,73 | **0,8232*)** |
| | | Maturitas SPIP | 3,921 | **3,921** |
| | | Nilai SAKIP | A | **A** |
| | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 93,60 | **93,60** |

| No | Prioritas Pembangunan Tahun 2025 | Indikator Kinerja Utama Daerah | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **8.** | Pemantapan daya saing daerah | Persentase Pertumbuhan UMKM | 4,5 | **4,5** |
| | | Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan (%) | 29,85 | **30,56*)** |
| | | Persentase pertumbuhan investasi | 16 | **16,29*)** |
| | | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 3,10 | **12,64*)** |

*Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026*
**) : Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2023*

#### 4.2.2.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Prioritas pembangunan tersebut selaras dengan permasalahan dan isu strategis daerah dan kemudian dilaksanakan melalui berbagai strategi sesuai arah kebijakan pembangunan tahun 2025**,** yaitu "Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya". Strategi yang akan dilakukan untuk melakukan intervensi terhadap isu strategis dan permasalahan yang ada diantaranya:

**1. Kemiskinan**

Upaya penanggulangan kemiskinan secara umum dibagi menjadi dua yaitu pengurangan beban pengeluaran serta peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat. Dalam upaya pengurangan beban pengeluaran, terdapat dua upaya yaitu (1) langsung, melalui perlindungan sosial dan (2) tidak langsung, melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (pengurangan kantong kemiskinan).

Upaya perlindungan sosial yang akan dilakukan diantaranya adalah bantuan permakanan untuk lansia, beras stunting, dan perlindungan sosial dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, pembangunan shelter untuk memberikan perlindungan sosial bagi PPKS akan dilaksanakan.

Sedangkan upaya tidak langsung yang akan dilakukan di tahun 2025 diantaranya adalah:

**a. Dimensi Pendidikan**

Peningkatan akses pendidikan dilakukan melalui pengalokasian BOS dan BOSDA agar semua penduduk usia sekolah dapat mengakses pendidikan formal melalui sekolah gratis melalui Sekolah Negeri. Selain itu, untuk menjaring anak putus/tidak sekolah, dilakukan pendataan terhadap anak putus/tidak sekolah oleh Pamong Balai Belajar. Pamong Balai Belajar sudah dimulai perekrutan pada bulan April 2023 dan akan ada 2 orang pamong Balai Belajar di tiap kelurahan. Pamong Balai Belajar selain melakukan pendataan juga akan melakukan pendampingan kepada anak-anak sekolah agar lebih mampu dan mau dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga akan berkontribusi juga dalam meminimalisir angka putus sekolah.

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, rintisan wajib belajar 13 tahun akan dilaksanakan salah satunya dengan bantuan kepada anak-anak kurang mampu untuk melanjutkan sekolah yang akan diwujudkan dalam bentuk penyediaan buku, seragam dan alat-alat sekolah.

Selain itu, terdapat program beasiswa subsidi kuliah yang diampu oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang. Beasiswa diberikan kepada 100 mahasiswa warga Kota Magelang melalui proses seleksi melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik.

**b. Dimensi Kesehatan**

Dalam rangka peningkatan kualitas Kesehatan, perluasan jangkauan jaminan kesehatan menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan. Pada awal tahun 2023, *Universal Health Coverage* (UHC) Kota Magelang mencapai 99,97%. Jaminan Kesehatan-PBI menjadi salah satu komponen pendorong perluasan UHC dan diharapkan dapat memperluas akses layanan Kesehatan.

Selain jaminan Kesehatan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas Kesehatan. PMT dilakukan melalui pemberian beras stunting untuk keluarga berisiko stunting. Terdapat juga

program CETING EMAS (Cegah Stunting melalui Emak-Emak Magelang Sehat) dimana dilakukan intervensi kepada baduta stunting keluarga miskin melalui pemberian makanan tambahan. PMT yang dilakukan juga dilakukan pengawasan terhadap konsumsinya, sehingga dipastikan PMT dikonsumsi oleh balita stunting yang menjadi target sasaran. Pengawasan tumbuh kembang anak dan pemantauan program stunting juga dilakukan melalui posyandu. Audit Kasus Stunting (AKS) sebagai salah satu cara penentuan intervensi penanganan terhadap kasus stunting dilanjutkan pelaksanaannya di tahun 2024.

**c. Dimensi Infrastruktur**

Intervensi terkait penanggulangan kemiskinan juga dilakukan pada dimensi infrastruktur dengan strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Intervensi yang dilakukan salah satunya dengan intervensi terhadap rumah tidak layak huni. Pada tahun 2025, direncanakan akan dilakukan intervensi sebanyak ±300 RTLH. Selain itu, peningkatan akses sanitasi dan air bersih juga akan diintervensi. Perbaikan kondisi ini diharapkan juga akan mempengaruhi prevalensi stunting dimana akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu komponen intervensi gizi sensitif.

Selain pengurangan beban pengeluaran, upaya peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat juga terus dilakukan. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat dapat dilakukan melalui dua dimensi yaitu ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun 2025 diantaranya adalah:

a. Pelatihan kerja diampu oleh Dinas Tenaga Kerja. Terdapat dua jenis pelatihan kerja yang diberikan yaitu pelatihan kompetensi dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kompetensi dilakukan untuk memfasilitasi angkatan kerja agar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pasar kerja. Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan peserta pelatihan dapat diterima kerja. Sementara itu, untuk pelatihan kewirausahaan diberikan sesuai dengan minat pencari kerja. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan para peserta pelatihan dapat memperoleh penghasilan.

b. Pelatihan UMKM diampu oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro. Target sasaran pelatihan adalah warga masyarakat yag sudah memiliki usaha. Pelatihan ini juga menindaklanjuti dari hasil pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Pelatihan Kepala Keluarga Perempuan/Rentan yang dilaksanakan DPMP4KB yang telah memenuhi syarat untuk pendampingan lebih lanjut. Pelatihan ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM, peningkatan akses modal bagi UMKM, perluasan pasar perdagangan.

c. Pelatihan kewirausahaan pemuda diampu oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Pelatihan wirausaha muda ini menyasar kelompok usia pemuda agar mampu membuka usaha jasa kepariwisataan. Pelatihan ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui penguatan kemampuan generasi kedua.

d. Pelatihan bagi Kepala Keluarga Perempuan/rentan difasilitasi oleh DPMP4KB. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Kepala Keluarga Perempuan/Rentan agar lebih berdaya, salah satunya diharapkan dapat memiliki penghasilan.

e. Pelatihan bagi disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Kelompok dissabilitas yang masih mampu beraktivitas diharapkan dapat lebih mengoptimalkan keterampilan/keahlian yang dimiliki, sehingga dapat lebih berdaya dan mampu.

f. Urban Farming. Keterbatasan lahan di Kota Magelang menjadi tantangan dalam pelaksanaan urban farming. Budidaya dilakukan dengan memanfaatkan polybag untuk tanaman sayur atau buah, sesuai dengan usulan masyarakat dalam Program Rodanya Mas Bagia (Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia). Pendampingan juga dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk keberlanjutan urban farming.

Salah satu upaya intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Magelang pada tahun 2023 adalah verifikasi dan validasi data P3KE pada Desil 1 Persentil 2. Untuk memfokuskan intervensi, dilakukan skoring terhadap data KK Persentil 2 P3KE Kota Magelang. Hasil skoring diperoleh 60 KK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan survei kunjungan ke lapangan. Hasil verval kemudian dibuat profil per KK dan disampaikan kepada OPD terkait. Kemudian, OPD terkait melakukan survei gabungan untuk menawarkan intervensi yang akan dilakukan, seperti intervensi Pendidikan non formal kepada warga yang belum tamat SMA yang berusia lebih dari 25 tahun, atau bantuan pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh pengangguran/setengah pengangguran. Berdasarkan kegiatan tersebut, proses verifikasi dan validasi data akan terus dilakukan setiap tahunnya. Untuk menyusun langkah

pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran juga dilakukan peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengentasan kemiskinan serta identifikasi dan verifikasi data PPKS dan DTKS yang dilakukan secara rutin.

**2. Kualitas SDM**

Intervensi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia selaras dengan peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi outcome dalam pembangunan manusia. Salah satu poin penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah kondisi ekonomi yang baik. Penanganan masalah kemiskinan menjadi prioritas dalam upaya peningkatan SDM di Kota Magelang.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, upaya intervensi yang dilakukan antara lain dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, peningkatan literasi masyarakat, pembinaan pemuda, serta pembinaan olahraga. Hal yang menjadi perhatian dalam pendidikan adalah terkait Anak putus/tidak sekolah. Untuk mendukung program nasional juga diupayakan untuk percepatan wajib belajar 13 tahun dan revitalisasi pendidikan non formal. Peningkatan peran masyarakat dalam mendorong anak dan dewasa untuk bersekolah lagi melalui pendidikaan non formal/kesetaraan sangat penting untuk peningkatan rata-rata lama sekolah. Revilatisasi pendidikan non formal juga dilakukan sebagai upaya peningkatan *life skill* serta pendidikan berbasis komunitas. Dalam hal pemajuan kebudayaan dilakukan dengan penguatan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti dalam proses pembelajaran. Perlindungan dan pengembangan potensi budaya juga terus dilakukan dengan upaya pelestarian dan revitalisasi bangunan cagar budaya.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat dilakukan intervensi melalui pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM Kesehatan, perluasan akses pelayanan Kesehatan, peningkatan pemahaman terkait kesehatan reproduksi untuk pengendalian penduduk, pemasyarakatan olahraga, pengarustamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Selain itu, perluasan jangkauan pelayanan Kesehatan dilakukan melalui homecare dan layanan jemput sakit antar sehat yang merupakan program unggulan Kota Magelang. Kegiatan ini juga menjangkau layanan Kesehatan ibu hamil sehingga mendukung pengurangan kasus kematian ibu (Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting).

Stunting yang menjadi salah satu prioritas penanganan masalah Kesehatan tingkat nasional (Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting), membutuhkan intervensi program kegiatan lintas OPD. Dinas Kesehatan melakukan intervensi terkait pemberian tambahan gizi dan tablet tambah darah bagi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemantauan dan pemberian tambahan gizi bagi balita melalui kegiatan posyandu, serta KIE terkait ASI Eksklusif dan imunisasi. Selain Dinas Kesehatan, DPMP4KB juga melakukan intervensi terkait kesehatan reproduksi, salah satunya adalah KIE Keluarga Berencana. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga berperan dalam intervensi penurunan stunting. Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi menjadi salah satu faktor pendorong untuk dapat mengurangi resiko stunting. Selain itu, untuk peningkatan kualitas gizi, Dinas Pertanian dan Pangan berperan dalam penyediaan pangan local yang bervariasi, salah satunya dengan pemanfaatan pekarangan rumah. Pemanfaatan pekarangan rumah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang dapat mengurangi resiko stunting.

**3. Sarana Prasarana Perkotaan Berkelanjutan**

Arah pembangunan kota saat ini dipengaruhi isu pembangunan berkelanjutan yang mendorong pembangunan untuk lebih menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Infrastruktur masih menjadi isu di Kota Magelang yang memiliki peran penting sebagai pendukung pembangunan kota. Strategi penguatan infrastruktur berkelanjutan tahun 2025 di Kota Magelang dilakukan melalui:

**a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota**

Fokus peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Magelang adalah pada peningkatan sarana irigasi dan drainase dalam kondisi baik. Untuk kondisi jalan di Kota Magelang mayoritas sudah dalam kondisi mantap (baik dan sedang). Dari total panjang jalan kota 116,52 km, sepanjang 72,91 km dalam kondisi baik, dan 32,53 km dalam kondisi

sedang; sehingga fokus penanganan jalan pada tahun 2025 pada pemeliharaan dan perawatan jalan baik bersumber dari DAK, banprov maupun APBD Kota.

Strategi peningkatan sarana irigasi dan drainase di Kota Magelang tahun 2025 melalui peningkatan kualitas saluran menjadi baik dengan kualifikasi berupa:

1) Bangunan berupa beton tulangan;
2) Saluran terbuka dan mudah diakses untuk dilakukan pemeliharaan;
3) Bangunan berupa pasangan batu dalam kondisi bagus.

Pada tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian SK kewenangan saluran drainase yang semula meliputi saluran primer dan sekunder sepanjang 237,83 km menjadi saluran primer saja sepanjang 20,23 km. Saluran sekunder tidak diperhitungkan karena merupakan bagian pelengkap jalan yang program penanganannya jadi satu dengan penanganan jalan. Capaian pada tahun 2023, panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 6,55 km (32,40%). Sedangkan untuk saluran irigasi yang sebelumnya hanya meliputi Saluran Kali Kota sepanjang 5 km, sesuai kewenangannya direncanakan untuk ditambah menjadi 16,55 km dengan kondisi saluran yang baik baru mencapai 9,35 km (56,47%) pada tahun 2023. Upaya peningkatan kualitas jaringan irigasi dan drainase pada tahun 2025 difokuskan untuk meningkatkan kualitas saluran yang saat ini masih rusak dan sedang menjadi baik.

**b. Penguatan penyelenggaraan penataan ruang**

Penyelenggaraan penataan ruang di Kota Magelang hingga tahun 2023 masih menyisakan beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan. Dokumen rencana rinci baik berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota maupun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) masih belum seluruhnya tersedia di Kota Magelang. Penyusunan RDTR Kota Magelang hingga tahun 2023 masih pada tahap penyediaan materi teknis, sehingga pada tahun 2024 ditargetkan sudah dapat berproses untuk penetapan peraturan walikota dan pada tahun 2025 sudah dapat dioperasionalkan dan disosialisasikan.

Dari delapan kawasan strategis kota yang tercantum dalam Perda RTRW Kota Magelang, kawasan yang sudah memiliki dokumen RTBL baru tiga yaitu, kawasan Lembah Tidar, Kawasan Aloon-aloon dan Kawasan Sidotopo. Sedangkan kawasan lainnya, yaitu Kawasan *Sport Center* Sanden, Kawasan Mantyasih, Kawasan Kyai Langgeng, Kawasan Kebonpolo dan Kawasan Soekarno Hatta belum memiliki dokumen RTBL. Namun demikian pada tahun 2024 akan disusun RTBL untuk dua Kawasan yaitu Kawasan Kebonpolo dan Kawasan Soekarno Hatta. Sehingga strategi tahun 2025 yang perlu dilakukan adalah pemenuhan penyediaan RTBL di tiga kawasan strategis yang belum memiliki dan penetapan dokumen RTBL yang sudah disusun menjadi produk hukum berupa peraturan wali kota.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang juga masih perlu mendapat perhatian pada tahun 2025. Peran serta masyarakat diperlukan agar pengendalian dan pemanfaatan ruang dapat lebih dioptimalkan dalam upaya mewujudkan ruang Kota Magelang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

**c. Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif**

Komponen pendukung untuk mewujudkan kualitas infrastruktur ruang kota selain dari aspek infrastruktur juga pada penyediaan sarana perkotaan yang inklusif memenuhi kaidah *universal design*. Pada tahun 2025, penyediaan sarana perkotaan yang inklusif masih perlu mendapat perhatian karena capaian rata-rata hingga tahun 2023 baru mencapai sebesar 56,25%. Fungsi koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan penyediaan sarana perkotaan melibatkan OPD lain, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyediaan sarana pendidikan dasar, DPPKUM dalam penyediaan sarana perdagangan, dinporapar dalam penyediaan sarana pariwisata, serta dinas kesehatan dalam penyediaan sarana kesehatan.

**d. Peningkatan angkutan umum perkotaan**

Peningkatan kualitas dan akses terhadap angkutan umum perkotaan perlu menjadi perhatian di tahun 2024. Nilai *load factor* pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dari semula 33,04 menjadi 37,05 karena jumlah angkutan kota yang berkurang. Kedepannya layanan angkutan umum bagi masyarakat Kota Magelang perlu terus ditingkatkan, dari 186 angkutan umum perkotaan yang beroperasi, sebagian besar belum mengalami peremajaan. Pelayanan angkutan umum juga belum memiliki SOP dalam melayani penumpang. Pada tahun 2023 nilai VC ratio di Kota Magelang sebesar 0,61 nilai ini lebih baik dibandingkan nilai VC ratio tahun 2022

0,79. Akan tetapi dengan kondisi lahan terbatas maka perlu alternatif penyediaan angkutan umum perkotaan yang baik menjadi solusi untuk mencegah semakin bertambahnya kendaraan pribadi yang mempengaruhi kemacetan jalan raya. Untuk memperbaiki mengoptimalkan layanan angkutan umum di tahun 2025 diperlukan kajian evaluasi trayek dan peremajaan armada angkutan umum yang sudah tua oleh Dinas Perhubungan.

**e. Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan dan permukiman**

Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan dan permukiman terdiri dari peningkatan akses sanitasi dan air minum baik yang layak dan aman. Hal ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan yang harus tuntas pada tahun 2030. Hal-hal yang menjadi strategi peningkatan layanan akses sanitasi dan air minum pada tahun 2025 adalah pembangunan fasilitas sanitasi dan air minum layak dan aman serta penanganan RTLH melalui sumber pembiayaan APBD dan non APBD, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai sanitasi aman dengan melibatkan kader-kader kesehatan dan pembinaan KB, peningkatan promosi kesehatan dan PBHS, kampanye layanan L2T2 melalui berbagai media komunikasi, kolaborasi dalam kampanye sanitasi dengan lembaga kemasyarakatan (Forum Tembang Tidar), perbaikan dan pencegahan kawasan kumuh melalui program kampung tematik dan kampung iklim (lintas sektor antara DPUPR, Disperkim, Dinas Kesehatan, DPMP4KB, Disnaker).

**4. Kualitas lingkungan hidup**

**a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Nilai IKLH ini ditentukan oleh Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Ketiga penilaian itu diperoleh melalui observasi langsung dilapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Akan tetapi faktor-faktor yang mendukung ketiga unsur ini diperoleh berdasarkan dari kebijakan di lintas sektoral.

**1) Indeks Kualitas Air**

Indeks Kualitas Air ini diperoleh melalui pengukuran kualitas air sungai berdasarkan pH, TSS, NO3-N, DO, BOD, COD, Total Fosfat dan Fecal E Coli. Kota Magelang merupakan Kota Sedang dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi memungkinkan tingginya pencemaran oleh bakteri E Coli. Pencemaran Bakteri E Coli pada badan Air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tingkat ODF (*Open Defecation Free*) dan Pembuangan Limbah Rumah Tangga yang langsung dibuang ke Sungai (tidak memiliki Septic tank dan atau resapan sesuai standar). Kota Magelang yang tidak memiliki Kawasan Industri memungkinkan minimnya pencemaran air sungai oleh limbah Industri meskipun terkadang ada perusahaan yang sedikit teledor sehingga terjadi pencemaran sungai oleh limbah Industri. Kota Magelang yang didominasi didominasi oleh Kawasan Terbangun (Kawasan Non Pertanian) memungkinkan pencemaran oleh Nitrat dan Fosfat yang cukup sedikit, selain itu, sistem pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang sudah jarang digunakan. Itu artinya bahwa Indeks Kualitas Air di Kota Magelang sangat bergantung kepada Kebijakan dari Dinas Perumahan dan Permukiman terkait dengan pengaturan pengelolaan limbah rumah tangga, selain itu bergantung kepada kebijakan Dinas Kesehatan terkait dengan konsep Penyehatan Lingkungan.

Adapun kebijakan yang dapat diambil dalam rangka peningkatan Indeks Kualitas Air ini adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem pengelolaan limbah Rumah Tangga melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat dan Terpusat (SPAL DT dan SPAL DS) berikut juga pengelolaan terhadap limbah yang akan dibuang dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) menuju sungai.

b) Pengawasan terhadap potensi pencemaran melalui pengukuran kualitas air sungai (dan air tanah secara berkala jika diperlukan)

c) Kampanye dan sosialiasi terkait dengan Anti Buang Air Besar Sembarangan (Anti ODF)

d) Identifikasi penyakit menular yang disebabkan oleh buruknya sanitasi lingkungan dan kualitas air yang buruk (diare, kolera, disentri). Karena ini hal ini merupakan indikator outcome dari kualitas penyehatan lingkungan dan kualitas air tanah.

**2) Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara di kota Magelang mengalami Penurunan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 menjadi 81,16 sementara pada tahun 2023 naik menjadi 83,05. Indeks Kualitas Udara ini dihitung berdasarkan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO2) dan Sulfur Dioksida (SO2). Mengingat bahwa Kota Magelang tidak memiliki Kawasan Industri besar sementara pergerakan kendaraan bermotor cukup tinggi di Kota Magelang, sangat mungkin bahwa cemaran NO2 dan SO2 ini dihasilkan oleh unsur transportasi sehingga pencemaran udara sangat bergantung dari kebijakan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas lingkungan Hidup

Adapun kebijakan yang dapat diambil dalam rangka peningkatan Indeks Kualitas Udara ini adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan penurunan emisi lingkungan melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi secara periodik (pada hari-hari tertentu)
b) Uji emisi untuk kendaraan pribadi sebagi syarat untuk bisa memasuki Kawasan tertentu dari Wilayah Kota
c) Kampanye kepada Masyarakat untuk mengendarai kendaraan umum melalui pembentukan image yang baik dan keren terhadap Kendaraan Umum
d) Bekerjasama dengan Organisasi serikat Kendaraan Umum terkait dengan Peningkatan Kualitas Layanan, terutama adalah pegaturan Jadwal/ ketepatan jam operasi dan suasana berkendara.
e) Pengawasan dan penghitungan kualitas Udara setiap saat (seperti di Kota Besar, bila ada dananya)
f) Peningkatan Vegetasi yang kuat dalam menyerap karbon dan Pencemaran Lingkungan
g) Pengawasan dan pelestarian Vegetasi, terutama pohon – pohon besar dipinggir jalan dan sanki bagi pelakunya, terutama pelaku usaha
h) Alternative desain Kawasan Kota beserta jenis Vegetasi yang ditanam melalui kebijakan Tata Ruang (RTBL)

**3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Indeks Tutupan Lahan pada dasarnya terbagi berdasarkan kewenangan lintas sektoral. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan unsur yang dinilai sebagai indikator indeks Tutupan Lahan terbagi atas beberapa jenis, diantaraya adalah sempadan sungai/ irigasi, jalur hijau, areal pertanian, areal perkebunan, taman kota, areal pemakaman, pekarangan, dan hutan Kota. Saat ini DLH hanya mengelola 32,41% dari total RTH. Artinya adalah bahwa kewenangan pada masing – masing sektor belum teridentifikasi atau terlaporkan secara periodik kecuali DLH. Oleh karena perlu adanya koordinasi antar sektor yang berkaitan dengan pengelolaan RTH ini oleh beberapa OPD, diantaranya adalah Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun kebijakan yang dapat diambil dalam rangka peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah sebagai berikut:

a) Koordinasi lintas sektoral terkiat dengan pembagian kewenangan
b) Pengalokasian dana APBD untuk pembelian Tanah milik Pribadi untuk penanaman Vegetasi untuk dijadikan sebagai RTH Publik, untuk menyelamatkan Kota Dari area terbangun yang semakin solid (jika diperlukan)
c) Pengintegrasian berbagai program yang senada dengan peningkatan RTH, contohnya adalah *Urban Farming*
d) Alternatif desain Bangunan, *furniture street* dan *pedestrian ways* yang mendukung peningkatan RTH melalui kebijakan Tata Ruang RTBL
e) Kontrol dan pengawasan terkait dengan alih fungsi lahan
f) Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Publik Kawasan Permukiman melalui peningkatan kuantitas dan kualitas vegetasi
g) Ambil bagian dalam program *Green Infrastructure* dimana Kabupaten/ Kota merupakan bagian dari Anggota Pokja Jawa Tengah.

**5. Perubahan Iklim**

Perubahan Iklim merupakan isu global yang kemudian telah diupayakan baik mitigasi maupun adaptasi oleh Sebagian besar Negara di Dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Lingkungan Hidup telah berupaya untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten melalui aplikasi Aksara. Aplikasi Aksara ini memuat beberapa kegiatan terkait dengan pola mitigasi, adaptasi dan kampung proklim oleh beberapa OPD pengampu kegiatan, Kota Magelang pada dasarnya juga telah mengupayakan pola mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Implementasi kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

1) Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan sampah dari Rumah Tangga melalui pembentukan Bank Sampah dimana hal ini akan mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, sehingga mengurangi cemaran gas metana yang memicu timbulnya pemanasan global, selain itu juga perawatan tanaman besar oleh DLH yang notabene sangat kuat menyerap karbon juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap mitigasi perubahan iklim. Selain itu, Kampung Organik dan Bank Sampah mengembangkan penggunaan pupuk kompos dimana cukup aman untuk tanaman dan tidak berpengaruh kepada emisi lingkungan.

2) Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui beberapa kegiatan seperti *Car Free Day*, Peremajaan angkutan dan pengujian emisi kendaraan umum.

3) Dinas Pertanian

Dinas Pertanian berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan jumlah vegetasi, selain itu penggunaan kompos pada kelompok petani Kota juga merupakan bagian dari mitigasi perubahan iklim. Adapun sektor pertanian dengan skala besar memang kurang terlihat eksistensinya karena Ruang Kota didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa.

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan air limbah domestik SPALDT dan SPALDS (Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat). Terkait pengurusan aspek air limbah domestik sejak tahun 2021 berpindah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Saat ini masih dalam proses pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan.

b. Implementasi kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi Perubahan Iklim ini diupayakan melalui pembuatan kajian resiko perubahan iklim yang dianggarkan pada tahun 2024 oleh Bidang Riset dan Inovasi, Bapperida Kota Magelang.

c. Implementasi Kampung Pro Iklim

Selain itu, sebagai upaya untuk memberikan apreasiasi kepada Masyarakat, sekaligus dalam rangka menginternalisasikan kepada Masyarakat terkait dengan konsep adaptasi perubahan iklim, maka dilakukan pembentukan Program Kampung Iklim. Saat ini Kota Magelang baru memiliki 1 Kampung Iklim. Adapun kegiatan yang dilakukan pada Kampung Iklim secara umum adalah sebagai berikut:

d. Kerja bakti kampung secara rutin.

e. Penanganan Sampah dengan pilah sampah dari Rumah Tangga, Pembentukan Bank Sampah dan Budidaya magot.

f. Penanaman tanaman buah, sayuran, dll pada lahan kosong (area Publik) dan halaman kosong (area privat).

g. Penanggulangan penyakit yang terkait dengan iklim dan pandemi.

h. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan perikanan, pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa secara umum, kegiatan pada Kampung Iklim ini adalah lebih menekankan pada hal-hal yang mampu dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penekanan emisi lingkungan, penyehatan lingkungan dan kewaspadaan terhadap penyakit yang disebabkan oleh iklim, dan penguatan ketahanan pangan dan gizi.

**6. Ketahanan daerah (ketahanan terhadap pangan dan bencana)**

Ketahanan daerah terhadap bencana yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur kesiapan daerah dalam menghadapi resiko bencana. Dengan terbentuknya BPBD di awal tahun 2022, penanganan bencana dapat dilakukan lebih optimal. Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana menjadi prioritas, salah satu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 adalah penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB). Selain itu, peningkatan keberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui kelurahan tangguh bencana, yang direncanakan setiap tahun bertambah 1 kelurahan. Selain itu, untuk meningkatkan mitigasi kebakaran, pemberian sarana prasarana kebencanaan kepada masyarakat, seperti APAR, akan ditambahkan ketika cakupan pemenuhan kebutuhan untuk penanggulangan kebakaran. Pada tahun 2025 juga fokus pada peningkatan kapasitas SDM kebencanaan, juga akan dilakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana serta kajian pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Selain ketahanan terhadap bencana, ketahanan pangan juga menjadi perhatian mengingat produksi pangan Kota Magelang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, sehingga masih mengandalkan dari daerah sekitar. Untuk itu, salah satu intervensi kegiatan yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan *urban farming*. *Urban farming* difokuskan pada pemanfaatan pekarangan dari masing-masing rumah. Intervensi kegiatan ini selaras dengan pelaksanaan program unggulan "Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, Bahagia (Rodanya Masbagia) dan "Magelang Cinta Organik (Cantik)". Dalam pelaksanaan Program Rodanya Masbagia, masyarakat dapat mengusulkan paket tanaman untuk *urban farming* lengkap dengan paket pelatihannya. Kondisi ini diharapkan urban farming yang dilaksanakan oleh masyarakat akan berlanjut. Upaya lainnya dengan pemenuhan cadangan beras Kota Magelang juga akan dilakukan pada tahun 2025. Cadangan beras yang akan dilakukan penambahan 10 Ton pada tahun 2025. Pemenuhan cadangan beras di Kota Magelang sudah mencapai 24,9 Ton di tahun 2023. Hal ini juga akan didukung dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam hal stabilisasi harga pangan dan distribusi pangan.

**7. Daya saing ekonomi**

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan di tahun 2025 untuk peningkatan daya saing ekonomi adalah dengan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk pengembangan usaha. Intervensi ini sejalan dengan program unggulan "Program Magelang Keren (Kelurahan Entrepreneur)" dimana akan ada pendampingan dan inkubasi bagi para pelaku UMKM. Pengembangan UMKM tidak hanya terbatas pada UMKM yang ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Intervensi juga dilakukan terhadap para pelaku industri pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Pelatihan tour guide atau pelaku pariwisata yang lain diharapkan akan meningkatkan kualitas sektor pariwisata selain peningkatan kualitas objek dan sarana prasarana pendukung wisata.

Selain pelatihan bagi UMKM dan pelaku industri pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pencari kerja juga akan diintervensi melalui pelatihan-pelatihan kerja. Pelatihan ini selaras dengan program penciptaan 1.500 wirausaha baru. Pelatihan kerja tidak hanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk pelatihan pemuda; serta DPMP4KB untuk pelatihan bagi perempuan. Kegiatan pelatihan kerja ini selain sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi juga mendukung upaya pengurangan kemiskinan.

Peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi publik juga dapat menjadi intervensi dalam peningkatan daya saing ekonomi. Adanya infrastruktur yang baik akan mempermudah akses distribusi dan pemasaran produk bagi UMKM. Kondisi infrastruktur yang baik dan kemudahan akses dari dan ke Kota Magelang juga akan menarik kunjungan wisata.

Selain itu, untuk meningkatkan investasi di Kota Magelang, kemudahan pelayanan perijinan juga terus ditingkatkan. Sosialisasi terkait kemudahan perijinan melalui media cetak maupun media social terus dilakukan untuk menarik lebih banyak investor. Selain itu, penggunaan aplikasi OSS untuk perijinan juga akan mempercepat proses perijinan yang akan semakin menarik investor. Kesiapan yang perlu dilakukan adalah menyiapkan lahan yang siap diinvestasi dengan status clean & clear. Penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) juga mendukung kemudahan dalam perijinan, apalagi ketika sudah terintegrasi dengan OSS. Pada tahun 2024, RDTR ditargetkan untuk penyelesainnya sampai dengan penetapan agar dapat segera diintegrasikan dengan OSS.

**8. Reformasi birokrasi**

Penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Magelang tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022. Komponen pengungkit sudah menunjukkan perbaikan dengan peningkatan nilai dari 35,90 menjadi 35,11 namun komponen hasil justru menunjukkan penurunan dari 31,39 menjadi 31,21. Melihat hasil antara area perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Magelang tahun 2020 dan 2021, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi membutuhkan sinergitas seluruh perangkat daerah, utamanya BKPSDM, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, kecamatan, kelurahan, Inspektorat, Dinas Perpustakaan Kearsipan.

Secara umum upaya pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025 diarahkan untuk perbaikan manajemen ASN dan peningkatan manajemen kinerja didukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sesuai RPJMD Kota Magelang 2021-2026, perbaikan manajemen ASN dilakukan melalui penerapan sistem merit. Strategi pencapaian target sistem merit pada tahun 2025 adalah:

a. Penyelenggaraan rekrutmen, rotasi, promosi, dan mutasi ASN secara obyektif dan kompetitif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan tanpa diskriminasi. Upaya penting yang akan dilakukan adalah pengadaan PNS dan PPPK untuk memenuhi berbagai formasi jabatan yang masih kosong, sesuai dokumen rencana kebutuhan yang disusun.
b. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian
c. Pada tahun 2025 ditargetkan untuk pemutakhiran 3.100 dokumen yang kemudian menjadi *input* dalam sistem informasi kepegawaian.
d. Pengembangan kompetensi ASN serta pemenuhan ketentuan minimal pembelajaran bagi ASN. Pada tahun 2025 direncanakan pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, maupun pelatihan fungsional. Pelatihan yang akan dilaksanakan yaitu untuk pelatihan dasar CPNS, pendidikan dan pelatihan dasar manajemen kebencanaan, pendidikan dan pelatihan dasar fungsional analis kebijakan, dan pendidikan dan pelatihan SAKIP.

Selain untuk pengembangan kompetensi ASN, pendidikan dan pelatihan SAKIP juga menjadi upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Magelang di tahun 2025. Salah satu temuan dalam penilaian tahun 2023 yang membutuhkan tindak lanjut adalah masih ada rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan belum menjawab isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Sehingga pengembangan kompetensi ini akan memberikan dampak tidak hanya pada peningkatan profesionalitas ASN namun juga perbaikan manajemen kinerja.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari Indeks SPBE, yang selaras dengan *Major Project Transformasi Digital*. Hasil evaluasi SPBE 2023 menunjukkan manajemen SPBE sebagai domain dengan capaian paling rendah, maka kebijakan pada tahun 2025 diarahkan untuk:

a. Perbaikan kompetensi sumber daya manusia,
b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik,
c. Peningkatan kapasitas sistem jaringan intra pemerintah daerah
d. Peningkatan layanan berbagi pakai data dan pemanfaatan sertifikat elektronik
e. Integrasi layanan publik

Pengadaan barang secara elektronik, melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), juga menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Peningkatan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan penggunaan *e-procurement* dan peningkatan pemahaman dan kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa, dengan target persentase penggunaan *e-procurement* mencapai 50%.

Berdasarkan penjelasan diatas, ringkasan strategi intervensi terhadap isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

*Tabel 4.7 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Strategi sesuai Arah Kebijakan Kota Magelang Tahun 2025*

| No | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemiskinan | Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin | • Perbaikan data dan ketetapan sasaran program<br>• Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing<br>• Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat<br>• Peningkatan kompetensi angkatan kerja<br>• Penguatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM<br>• Peningkatan akses pasar dan permodalan UMKM<br>• Peningkatan nilai investasi padat karya<br>• Peningkatan akses rumah layak huni<br>• Peningkatan akses sanitasi aman<br>• Peningkatan akses air bersih | • Dinas Sosial<br>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>• Dinas Kesehatan<br>• DPPKUM<br>• Dinas Tenaga Kerja<br>• Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata<br>• DPMPTSP<br>• Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik<br>• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>• Bapperida |
| 2 | Kualitas SDM | • Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>• Pemantapan Daya saing daerah | • Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing<br>• Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan<br>• Pemenuhan WAJAR 13 tahun dan perluasan dan mutu pendidikan<br>• Pembinaan pemuda dan olahraga<br>• Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat<br>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan<br>• Perluasan akses pelayanan kesehatan<br>• Peningkatan pemahaman terkait kesehatan reproduksi untuk pengendalian penduduk<br>• Pemasyarakatan olahraga<br>• Pengarustamaan gender<br>• Pemberdayaan perempuan<br>• Perlindungan perempuan dan anak<br>• Peningkatan kualitas keluarga<br>• Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)<br>• Peningkatan penyediaan dan penyerapan tenaga kerja<br>• Peningkatan program perlindungan sosial (baik tenaga kerja formal dan informal)<br>• Peningkatan kualitas tenaga kerja dan lapangan kerja<br>• Peningkatan pembinaan sejarah dan pelestarian cagar budaya<br>• Pengembangan kesenian daerah | • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>• Dinas Perpustakaan dan Arsip<br>• Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata<br>• Badan Kesbangpol<br>• Dinas Kesehatan<br>• DPMP4KB<br>• Bapperida |

| No | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan | Penguatan perwujudan ruang kota layak huni | • Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kota<br>• Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang<br>• Perluasan media informasi dan komunikasi penataan ruang<br>• Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif<br>• Penyediaan angkutan umum terintegrasi<br>• Peningkatan akses rumah layak huni<br>• Peningkatan akses sanitasi aman<br>• Peningkatan akses air bersih<br>• Peningkatan jaringan drainase | • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>• Dinas Perhubungan<br>• Bapperida |
| 4 | Kualitas lingkungan hidup | • Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>• Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>• Pemantapan daya saing daerah<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | • Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan<br>• Rehabilitasi lingkungan<br>• Penataan dan penambahan RTH publik<br>• Peningkatan pemberdayaan masyarakat<br>• Peningkatan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat terkait dengan pengolahan sampah.<br>• Fasilitasi pembelian produk-produk pengolahan sampah<br>• Perumusan regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas.<br>• Pendampingan terhadap pelaku usaha yang belum paham serta yang belum memiliki fasilitas terkait<br>• Perluasan sasaran keikutsertaan dalam perlombaan lingkungan hidup. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran dalam masyarakat | • Dinas Lingkungan Hidup<br>• DPMP4KB<br>• Bapperida<br>• Kecamatan |
| 5 | Ketahanan daerah | • Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | • Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana<br>• Peningkatan pemberdayaan masyarakat<br>• Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan rencana kontigensi bencana. Penguatan mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana<br>• Mengupayakan koordinasi dengan daerah lain untuk menjaga pasokan dan harga. Menjaga Cadangan Pangan Daerah. Peningkatan jumlah urban farming<br>• Peningkatan pengawasan pangan segar. Pembinaan tindak lanjut dari temuan-temuan. Pengadaan alat uji keamanan pangan | • BPBD<br>• Dinas Kesehatan<br>• Dinas Pertanian dan Pangan<br>• Bapperida |
| 6 | Daya saing ekonomi | • Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>• Pemantapan layanan publik prima<br>• Pemantapan daya saing daerah | • Peningkatan kompetensi Angkatan Kerja<br>• Penguatan kapasitas dan kualitas produksi serta distribusi produk UMKM<br>• Peningkatan akses modal UMKM<br>• Perluasan pasar perdagangan<br>• Promosi pariwisata | • Dinas Tenaga Kerja<br>• DPPKUM<br>• Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| No | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | • Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>• Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>• Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah | • Peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kota Magelang<br>• Pengadaan sarana prasarana pendukung pelatihan. Sewa sarana prasarana pendukung pelatihan<br>• Melaksanakan pelatihan baik untuk kewirausahaan danpelatihan berbasis kompetensi. melaksanakan penempatan kerja bekerjasama dengan SMK melalui bursa kerja khusus. Bekerjasama dengan perusahaan untuk melakukan jobfair<br>• Fasilitasi akses pasar dan permodalan kepada wirausaha baru<br>• Penguatan awareness bagi perusahaan<br>• Melaksanakan pendampingan bagi KSP/USP yang belum sehat<br>• melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan perizinan usaha<br>• Melaksanakan koordinasi baik antar OPD ataupun dengan instansi lain<br>• Penguatan awareness bagi perusahaan<br>• Pengalihan sistem kolam tradisional menjadi kolam terpal untuk penghematan air. Mendorong teknologi hasil perikanan<br>• Melakukan rapat koordinasi dan pendampingan serta failitasi pada masyarakat dan pelaku usaha<br>• Melaksanakan pendataan pelaku ekraf dan pariwisata<br>• Pelaksanaan pelatihan bagi SDM pariwisata<br>• Pemberian akses terhadap sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan<br>• Pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian<br>• Mengalokasikan sumber dana untuk melakukan pemeliharaan sarana perdagangan<br>• Melaksanakan stabilisasi harga dengan mengadakan pasar murah. Melaksanakan pengawasan di pasar<br>• Penguatan awareness kepada pelaku usaha dalam memiliki ijin usaha<br>• Sosialisasi dan pameran potensi ekspor<br>• Fasilitasi terhadap kemudahan akses pasar dan permodalan<br>• Penguatan awareness kepada IKM<br>• Memberikan sosialisasi dan pendampingan pada IKM<br>• Melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan peralatan produksi ber TTG guna peningkatan kualitas dan kapasitas produksi IKM<br>• | • DPMPTSP<br>• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>• Dinas Perhubungan<br>• Bapperida |
| 7 | Reformasi birokrasi | • Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | • Integrasi sistem pelayanan berbasis IT<br>• Peningkatan kualitas pengawasan<br>• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik<br>• BPKAD |

| No | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | • Pemantapan layanan publik prima<br>• Pemantapan daya saing daerah<br>• Pemantapan kesejahteraan masyarakat | • Optimalisasi PAD<br>• Penerapan sistem merit<br>• Optimalisasi sistem OSS<br>• Jemput bola aktivasi IKD. KIE terkait keamanan data IKD<br>• Pemetaan kebutuhan pemenuhan ISO 27001<br>• Pengawalan arsitektur SPBE<br>• Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pengawasan<br>• Pendampingan statistik sektoral kepada OPD prioritas oleh wali data dan Pembina data<br>• Menyusun SOP. Melakukan audit. Menindaklanjuti hasil audit. Melakukan uji coba sistem keamanan informasi<br>• Pembuatan daftar arsip secara menyeluruh<br>• Pengawalan perencanaan-penganggaran. Pemenuhan proporsi anggaran wajib dan pemenuhan SPM.<br>• Penyelesaian sengketa dan masalah aset tanah<br>• Pemetaan potensi pendapatan. Peningkatan beberapa tarif pajak/retribusi<br>• Optimalisasi penggunaan sistem manajemen talenta, rencana pengembangan kompetensi, talent pool, sistem informasi, dan e-office<br>• Melanjutkan kegiatan assessment kompetensi<br>• Konsultasi dan koordinasi dengan instansi pembina<br>• Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian dengan pengintegrasian beberapa sistem yaitu e-kinerja, simpresso, layanan psikolohi, e-learning<br>• Menentukan area of improvement pada masing-masing variable penilaian<br>• Melanjutkan harmonisasi regulasi dan meningkatkan kualitas produk hukum<br>• Penyelesaian penetapan pedoman evaluasi internal.<br>• Menekankan kedalaman kualitas data dan analisis evaluasi.<br>• Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan inovasi daerah. | • Bapperida<br>• BKPSDM<br>• Sekretariat Daerah<br>• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>• Dinas Perpustakaan dan Arsip<br>• Kecamatan |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

#### 4.2.2.3.3 Keselarasan dan Keterkaitan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Prioritas dan arah pembangunan Kota Magelang tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target sasaran indikator makro pembangunan. Target pembangunan Kota Magelang juga selaras dan terkait dengan target nasional dan provinsi seperti termuat pada Tabel 4.8 berikut.

*Tabel 4.8 Keselarasan Sasaran Makro RKPD Kota Magelang dengan RKP 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2025*

| Sasaran | RKP 2025 | RKPD Provinsi Jateng 2025 | RKPD Kota Magelang 2025 |
|---|---|---|---|
| **Pertumbuhan ekonomi** | 5,3–5,6% | 4,8-5,6% | 5,50-6,20% |

| Sasaran | RKP 2025 | RKPD Provinsi Jateng 2025 | RKPD Kota Magelang 2025 |
|---|---|---|---|
| **Angka Kemiskinan** | 7-8% | 9,28-8,08% | 5,00-5,70% |
| **Indeks Pembangunan Manusia** | 73,99–74,02 (IMM 0,56) | 73,99 (IMM 0,58) | 82,05-82,23 |
| **Tingkat Pengangguran Terbuka** | 4,5-5,0% | 5,20-4,60% | 5,02-4,72% |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

Dalam RKP 2025 terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industridi Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Adapun keselarasan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

*Tabel 4.9 Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD pada RKPD Kota Magelang Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025*

| No | Sasaran Utama RKP | Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang | Indikator Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang |
|---|---|---|---|
| **PN 1** | **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)** | | |
| | - Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia | Meningkatnya Penguatan toleransi | Nilai penguatan toleransi |
| | | Meningkatnya stabilitas daerah | Nilai stabilitas daerah |
| | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum |
| **PN 2** | **Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru** | | |
| | - Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan<br>- Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air secara berkelanjutan<br>- Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum |
| | | Meningkatnya stabilitas daerah | Nilai stabilitas daerah |
| | | Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan | Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Investasi | Persentase pertumbuhan investasi |
| | | Meningkatnya angka kunjungan wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan |
| | | Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | Persentase pertumbuhan UMKM |
| | | Meningkatnya daya beli masyarakat | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan |
| **PN 3** | **Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industridi Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi** | | |
| | - Melanjutkan pengembangan infrastruktur<br>- Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB<br>- Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas<br>- Meningkatnya nilai tambah pariwisata<br>- Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi kreatif | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah | Tingkat pengangguran terbuka |
| | | Meningkatnya kualitas infrastruktur kota | Indeks infrastruktur wilayah |
| | | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang |
| | | Meningkatnya aksesibilitas perkotaan | Indeks aksesibilitas perkotaan |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase luas kawasan kumuh |
| | | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>Persentase Ruang Terbuka Publik Hijau |

| No | Sasaran Utama RKP | Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang | Indikator Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang |
|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan | Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Investasi | Persentase pertumbuhan investasi |
| | | Meningkatnya angka kunjungan wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan |
| | | Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | Persentase pertumbuhan UMKM |
| **PN 4** | **Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Penyandang Disabilitas** | | |
| | - Pendidikan berkualitas yang merata<br>- Kesehatan untuk semua<br>- Keluarga berkualitas, keteraan gender dan masyarakat inklusif<br>- Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi | Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing | Indeks Pendidikan<br>Indeks pembangunan literasi masyarakat |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan |
| | | Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan | Indeks pembangunan gender |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat | Nilai partisipasi masyarakat |
| | | Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan | Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Investasi | Persentase pertumbuhan investasi |
| | | Meningkatnya angka kunjungan wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan |
| | | Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | Persentase pertumbuhan UMKM |
| **PN 5** | **Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri** | | |
| | - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan<br>- Integrasi ekonomi domestik dan global | Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan | Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Investasi | Persentase pertumbuhan investasi |
| | | Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | Persentase pertumbuhan UMKM |

| No | Sasaran Utama RKP | Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang | Indikator Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang |
|---|---|---|---|
| **PN 6** | **Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan** | | |
| | - Perlindungan sosial yang adaptif<br>- Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan<br>- Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial | Persentase PPKS |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat | Nilai partisipasi masyarakat |
| | | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah | Tingkat pengangguran terbuka |
| | | Meningkatnya kualitas infrastruktur kota | Indeks infrastruktur wilayah |
| | | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang |
| | | Meningkatnya aksesibilitas perkotaan | Indeks aksesibilitas perkotaan |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase luas kawasan kumuh |
| | | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>Persentase Ruang Terbuka Publik Hijau |
| **PN 7** | **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan** | | |
| | - Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi<br>- Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani<br>- Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba<br>- Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan<br>- Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan<br>- Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi<br>- Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Nilai penguatan ketenteraman dan ketertiban umum |
| | | Meningkatnya stabilitas daerah | Nilai stabilitas daerah |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks kepuasan masyarakat |
| | | Menciptakan birokrasi yang kapabel | Tingkat kematangan organisasi<br>Indeks sistem merit<br>Indeks SPBE |
| | | Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel | Maturitas SPIP<br>Nilai SAKIP<br>Indeks pengelolaan keuangan daerah |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Investasi | Persentase pertumbuhan investasi |
| **PN 8** | **Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur** | | |
| | - Beragama maslahat dan berkebudayaan maju<br>- Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim | Meningkatnya Penguatan Toleransi | Nilai penguatan toleransi |
| | | Meningkatnya penguatan kebudayaan | Nilai pemajuan kebudayaan |

| No | Sasaran Utama RKP | Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang | Indikator Sasaran RPJMD-RKPD Kota Magelang |
|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat | Nilai partisipasi masyarakat |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing; | Indeks Pendidikan<br>Indeks pembangunan literasi masyarakat |
| | | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>Persentase Ruang Terbuka Publik Hijau |

*Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2024*

Berdasarkan tabel 4.9 Keterkaitan Sasaran dan Indikator Sasaran pada RKPD Kota Magelang Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025 terdapat 28 (dua puluh delapan) sasaran pada delapan prioritas nasional dalam RKP 2025, bahwa secara keseluruhan 25 (dua puluh lima) sasaran daerah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 telah mendukung dan selaras dengan sasaran PN RKP Tahun 2025, sehingga jika dipersentase maka tingkat keterkaitannya sebesar 100%.

Adapun persandingan sinergitas antara prioritas pembangunan Nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Kota Magelang disajikan dalam Tabel 4.10 berikut ini.

*Tabel 4.10 Keselarasan dan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota MAgelang Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025*

| Prioritas Nasional Tahun 2025 | | Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 | | Prioritas Kota Magelang Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 4 | Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | • Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>• Perwiujudan layanan publik prima<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra |
| 2 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru | | **Prioritas Provinsi ke 1**:<br>Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merta berbasis sektor unggulan didukung pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas | • Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>• Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>• Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah<br>• Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>• Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>• Pemantapan layanan publik prima<br>• Pemantapan daya saing daerah |
| | | 2 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | |
| | | 3 | Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung | |
| | | 4 | Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | |
| 3 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industridi Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 1 | Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merta berbasis sector unggulan didukung pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas | • Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>• Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah<br>• Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>• Pemantapan daya saing daerah |
| | | 2 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan Penyandang Disabilitas | 2 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | • Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>• Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>• Pemantapan layanan publik prima |
| 5 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 1 | Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merta berbasis sector unggulan didukung pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas | • Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah |
| 6 | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan | 1 | Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merta berbasis sector unggulan didukung pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas | • Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah<br>• Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>• Pemantapan layanan publik prima |
| | | 2 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | |
| 7 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | 2 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | • Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>• Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>• Pemantapan layanan publik prima<br>• Pemantapan daya saing daerah |
| | | 4 | Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | |
| 8 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | 2 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | • Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>• Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>• Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>• Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat |
| | | 3 | Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung | |

*Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2024*

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2025 yang berjumlah 7 prioritas selaras dengan 8 prioritas nasional dan 4 prioritas provinsi, dengan tingkat keselarasan prioritas pembangunan dapat dikatakan 100%.

Pada dasarnya, program kegiatan yang disusun pada level kota mengacu pada program yang disusun pada level nasional dan provinsi. Adapun program kegiatan secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 4.11 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah*

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| **1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia** | - Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>- Perwiujudan layanan publik prima<br>- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS) |
| | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU) |
| | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT) |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
| | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| | | Program Perlindungan Perempuan | Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |
| | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar |
| | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| **2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru** | - Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>- Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>- Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah<br>- Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>- Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>- Pemantapan layanan publik prima<br>- Pemantapan daya saing daerah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |
| | | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |
| | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | Pembangunan Prasarana Pertanian |
| | | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota |
| | | Program Perizinan Usaha Pertanian | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penyuluhan Pertanian | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |
| | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
| | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota |
| | | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
| | | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Sampah |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS) |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU) |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT) |
| | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian |
| | | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam |
| **3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industridi Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi** | - Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>- Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah<br>- Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>- Pemantapan daya saing daerah | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
| | | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
| | | Program perencanaan tenaga kerja | Jumlah rencana tenaga kerja |
| | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |
| | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |
| | | Program Hubungan Industrial | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
| | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil |
| | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |
| | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
| | | Program Pemasaran Pariwisata | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |
| | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | Pembangunan Prasarana Pertanian |
| | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan |
| | | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota |
| | | Program Perizinan Usaha Pertanian | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penyuluhan Pertanian | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |
| | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengembangan Ekspor | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |
| | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penatagunaan Tanah | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
| | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C |
| | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir |
| | | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
| | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan |
| | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| **4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas** | - Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>- Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>- Pemantapan layanan publik prima | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS) |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU) |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT) |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMS) |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMU) |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMT) |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |
| | | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pembinaan Perpustakaan | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |
| | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar |
| | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | Program Perlindungan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi |
| | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |
| | | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota |
| | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| | | Program Pengembangan Kurikulum | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar |
| | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
| **5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri** | Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
| | | Program perencanaan tenaga kerja | Jumlah rencana tenaga kerja |
| | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |
| | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |
| | | Program Hubungan Industrial | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
| | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemasaran Pariwisata | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |
| | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |
| **6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan** | - Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar |
| | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | perekonomian daerah<br>- Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>- Pemantapan layanan publik prima | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| | | Program Pengembangan Kurikulum | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar |
| | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |
| | | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota |
| | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |
| | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMS) |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMU) |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMT) |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMS) |
| | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMU) |
| | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMT) |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMU) |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMS) |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMT) |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS) |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU) |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT) |
| | | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha |
| | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan peruhanan dan kaswasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan |
| **7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan** | - Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>- Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>- Pemantapan layanan publik prima<br>- Pemantapan daya saing daerah | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
| | | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota |
| | | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Aplikasi Informatika | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
| | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
| | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
| | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |
| | | | Pendampingan dan Asistensi |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS) |
| | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU) |
| | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT) |
| **8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur** | - Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>- Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>- Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>- Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS) |
| | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU) |
| | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT) |
| | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Penyimpanan Sementara Limbah B3 |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan sampah |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |

| Prioritas RKP 2025 (PN) | Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
| | | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
| | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| | | Program Pengembangan Kebudayaan | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pembinaan Sejarah | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Permuseuman | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota |
| | | | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
| | | | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
| | | | Penataan sistem dasar penamggulangan bencana |

*Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2024*

Prioritas RKPD dicapai melalui instrumen program prioritas. Program prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2025 dikelompokkan mengikuti kluster isu strategis. Deskripsi program prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.12 Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas pada RKPD Kota Magelang Tahun 2025 berikut ini.

*Tabel 4.12 Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas pada RKPD Kota Magelang Tahun 2025*

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target RPJMD 2025 | Target Penyesuaian*) | Prioritas RKPD 2025 | | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial | Persentase PMKS | 9,18% | 4,72%*) | Klaster Pemantapan Daya Saing Daerah | Pemantapan layanan publik prima | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi | Dinas Sosial |
| Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 0,878 | 0,880*) | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | Indeks Keluarga Sehat | |
| Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing | Indeks Pendidikan | 0,782 | 0,782 | | Pemantapan daya saing daerah | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | | | APM SD/ MI | |
| | | | | | | | APK SD/ MI | |
| | | | | | | | Angka Putus Sekolah SD/MI | |
| | | | | | | | APM SMP/MTs | |
| | | | | | | | APK SMP/MTs | |
| | | | | | | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | |
| | | | | | | | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | |
| | | | | | | | Persentase SD Terakreditasi | |
| | | | | | | | Persentase SMP Terakreditasi | |
| | | | | | | | Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi | |
| Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing | Indeks Pendidikan | 0,782 | 0,782 | | | Program Pembinaan Perpustakaan | Presentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan | |
| | | | | | | | Persentase Perpustakaan ber-SNP | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 0,878 | 0,880*) | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | Indeks Keluarga Sehat | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,41 | 88,90*) | | | Program Pendaftaran Penduduk | Presentase penduduk usia wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | Presentase kepemilikan KK | |
| | | | | | | | Presentase kepemilikan KIA | |
| | | | | | | Program Pencatatan Sipil | Persentase pasangan yang memiliki Akta Perkawinan | |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target RPJMD 2025 | Target Penyesuaian*) | Prioritas RKPD 2025 | | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki memiliki Akta kelahiran | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | Persentase penerbitan Akta kematian | |
| | | | | | | | Persentase penerbitan Akta Perceraian | |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur kota | Indeeks Infrastruktur wilayah | 92,36 | 92,36 | | Penguatan perwujudan ruang kota layak huni | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase panjang jaringan irigasi yang kondisi baik | DPUPR |
| | | | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang memiliki askes terhadap pelayanan sumber air minum layak* | DPUPR |
| | | | | | | | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan | |
| | | | | | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Pembangunan TPST/3R | DPUPR |
| | | | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak* | DPUPR |
| | | | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik | DPUPR |
| | | | | | | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase kawasan strategis yang ditata | DPUPR |
| | | | | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang memiliki PBG | DPUPR |
| | | | | | | | Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota | |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab | DPUPR |
| | | | | | | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | DPUPR |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Presentase perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang | DPUPR |
| Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan | Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik | 17,50 | 17,50 | | | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | DLH |
| | | | | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati | DLH |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target RPJMD 2025 | Target Penyesuaian*) | Prioritas RKPD 2025 | | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas infrastruktur kota | Indeks Infrastruktur Wilayah | 92,36 | 92,36 | | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3 | DLH |
| | | | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | DLH |
| | | | | | | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | DLH |
| | | | | | | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan presentase sampah yang terkelola | DLH |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Kinerja Lalu Lintas Kota (Vc Ratio) | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Pengguna moda transportasi umum di perkotaaan (PPTUK)* | |
| Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum | Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 94,61 | 94,61 | Klaster Penguatan Kesejahteraan Masyarakat | Penguatan Ketahanan Daerah dan Sosial Budaya Masyarakat | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelesaian pelanggaran perda | Satpol PP |
| | | | | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan | Kesbangpol |
| Meningkatnya stabilitas daerah | Nilai stabilitas daerah | 93,98 | 96,98 | | Penguatan Ketahanan daerah dan sosial budaya Masyarakat | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Presentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan<br>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Kesbangpol |
| | | | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kesbangpol |
| | | | | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Jumlah konflik sosial | Kesbangpol |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,41 | 88,90*) | | Pemantapan layanan publik prima | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase pemanfaatan aplikasi informatika | Dinkominsta |
| | | | | | | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan | Bapperida |
| | | | | | | | Persentase pemanfaatan hasil inovasi | |
| Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai SAKIP | 80,25 | 80,25 | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Berkualitas | Bapperida |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target RPJMD 2025 | Target Penyesuaian*) | Prioritas RKPD 2025 | | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Presentase peningkatan pendapatan asli daerah | BPKAD |
| | | | | | | Program Pengelolaan BMD | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKAD |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase penyelenggaraan pengawasan | Inspektorat |
| | | | | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Presentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi | Inspektorat |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Perkembangan Publikasi Data Sektoral Dalam Portal Open Data | Diskominsta |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi | Diskominsta |
| | | | | | | | Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi | |
| | | | | | | | Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi | |
| | | | | | | | Nilai Pengelolaan Aset Informasi | |
| | | | | | | | Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi | |
| Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase pertumbuhan investasi | 16% | 16,29%*) | Klaster Pemantapan Daya Saing Daerah | Pemantapan daya saing daerah | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Investor PMA/PMDN | DPMPTSP |
| | | | | | | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase LoI Yang Ditindaklanjuti | DPMPTSP |
| | | | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Prosentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP | DPMPTSP |
| | | | | | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Prosentase Pertumbuhan Pemanfaatan Data, Informasi dan Sistem Informasi PM | DPMPTSP |
| | | | | | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku | DPMPTSP |
| Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | Persentase Pertumbuhan UMKM | 4,5% | 4,5% | | | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan | DPPKUM |
| | | | | | | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya | DPPKUM |
| | | | | | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi berkualitas | DPPKUM |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan | DPPKUM |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target RPJMD 2025 | Target Penyesuaian*) | Prioritas RKPD 2025 | | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro | DPPKUM |
| Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan | Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan | 29,85% | 30,49% | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Prosentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik | DPPKUM |
| | | | | | Pemantapan daya saing daerah | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu | DPPKUM |
| | | | | | | Program Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor | DPPKUM |
| Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | Persentase Pertumbuhan UMKM | 4,5% | 4,5% | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | DPPKUM |
| | | | | | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap | DPPKUM |
| | | | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | BPKAD |
| Meningkatnya angka kunjungan wisatawan | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 3,18 | 12,64*) | | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Presentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik | Disporapar |
| | | | | | | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara | Disporapar |
| | | | | | | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datan ke kota | |
| Meningkatnya penguatan kebudayaan | Nilai pemajuan kebudayaan | 66,36 | 66,36 | | | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase peningkatan kunjungan museum | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing | Indeks Pendidikan | 0,782 | 0,782 | Klaster Penguatan Kesejahteraan Masyarakat | Pemantapan kesejahteraan masyarakat | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | | | APM SD/ MI | |
| | | | | | | | APK SD/ MI | |
| | | | | | | | Angka Putus Sekolah SD/MI | |
| | | | | | | | APM SMP/MTs | |
| | | | | | | | APK SMP/MTs | |
| | | | | | | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | |
| | | | | | | | Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan | |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target RPJMD 2025 | Target Penyesuaian*) | Prioritas RKPD 2025 | | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | |
| | | | | | | | Persentase SD Terakreditasi | |
| | | | | | | | Persentase SMP Terakreditasi | |
| | | | | | | | Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 0,878 | 0,880*) | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular | |
| | | | | | | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | |
| | | | | | | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | |
| | | | | | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | |
| | | | | | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | |
| | | | | | | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | |
| | | | | | | | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar | |
| | | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | |
| | | | | | | | Indeks Keluarga Sehat | |
| | | | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Presentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan | Disporapar |
| | | | | | | | Persentase peningkatan pemuda yang dibina | |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya | Disporapar |
| | | | | | | | Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | |
| Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing | Indeks Pendidikan | 0,782 | 0,782 | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga | Disporapar |
| | | | | | | | Persentase peningkatan atlet yang dibina | |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target RPJMD 2025 | Target Penyesuaian*) | Prioritas RKPD 2025 | | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Persentase pelatih yang bersertifikat | |
| Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah | Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,30 | 5,25*) | | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | | | Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja | |
| | | | | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | | | Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha | |
| | | | | | | Program perencanaan tenaga kerja | Persentase jumlah rencana tenaga kerja | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | | Program Kepegawaian Daerah | Persentase capaian target aspek sistem merit | BKPSDM |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi | BKPSDM |
| Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Nilai partisipasi masyarakat | 88 | 92,19*) | | Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Presentase kelurahan yang lembaga kemasyarakatan diberdayakan | DPMP4KB |
| | | | | | | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase program perangkat daerah yang responsif gender | DPMP4KB |
| | | | | | | | Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga | |
| | | | | | | | Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | |
| | | | | | | | Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan | |
| | | | | | | Program Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)* | DPMP4KB |
| | | | | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Keluarga Berkualitas | DPMP4KB |
| Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan | Indeks Pembangunan Gender | 96 | 96 | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase PD yang mengelola data gender dan anak | DPMP4KB |
| | | | | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Presentase capaian 4 kluster pemenuhan hak anak | DPMP4KB |
| | | | | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB | DPMP4KB |
| | | | | | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi | Setda |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target RPJMD 2025 | Target Penyesuaian*) | Prioritas RKPD 2025 | | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan | |
| Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Persentase luas kawasan kumuh | 0 | 0 | | | Program Kawasan Permukiman | Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata | Dinas Perkim |
| Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Nilai partisipasi masyarakat | 88 | 92,19*) | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan | DPMP4KB |
| Meningkatnya ketahanan terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 57,40 | 57,40 | | Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Persentase layanan penanggulangan bencana | BPBD |
| | | | | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Satpol PP |
| | | | | | | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran* | |
| | | | | | | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani | Dinas Sosial |
| Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Skor PPH | 92,74 | 92,74*) | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Pangan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pangan Segar yang Aman | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase sarana pembibitan yang terpelihara | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | Persentase Peningkatan sarana Peternakan | |
| | | | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | Persentase Peningkatan prasarana Peternakan | |
| | | | | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | | Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH | |
| | | | | | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya | Dinas Pertanian dan Pangan |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target RPJMD 2025 | Target Penyesuaian*) | Prioritas RKPD 2025 | | Program Prioritas | Indikator Kinerja Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Persentase kelompok tani yang naik kelas | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah total produksi olahan perikanan (ton) | Dinas Pertanian dan Pangan |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

#### 4.2.2.3.4 Konsistensi dengan Permasalahan/Isu Strategis

Identifikasi permasalahan pembangunan didapatkan dari hasil evaluasi yang menyandingkan kondisi yang ada dengan standar yang berlaku. Permasalahan pembangunan juga didapatkan melalui identifikasi gap atau celah antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Adapun isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Kondisi yang belum menjadi masalah saat ini tetapi berpotensi akan menjadi masalah daerah dalam kurun waktu mendatang dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola. Potensi ini jika dapat dikelola dengan tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Berdasarkan kondisi yang disajikan pada Bab II, maka identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna melihat konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, sebagaimana tabel 4.13 berikut ini:

*Tabel 4.13 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, dan Strategi sesuai Arah Kebijakan Kota Magelang Tahun 2025*

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Masih adanya kemiskinan (penduduk kategori miskin)<br>- Belum optimalnya peran PSKS karena belum semua jenis PSKS ada di Kota Magelang<br>- Menurunnya angka APM SMP/MTS<br>- Masih rendahnya kinerja indeks keluarga sehat<br>- Capaian indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang belum optimal<br>- Akses sanitasi layak dan aman belum mencapai 100%<br>- Akses air minum aman belum mencapai 100%<br>- Masih ada kawasan kumuh<br>- Penanganan RTLH baru mencapai 50% | Kemiskinan | Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin | - Perbaikan data dan ketetapan sasaran program<br>- Pelatihan. Pemberian bantuan sosial<br>- Melakukan identifikasi potensi keluarga prioritas dan/atau Wanita pemimpin kesejahteraan sosial. Melakukan pelatihan bagi keluarga dan atau warga yang telah teridentifikasi sebagai keluarga prioritas dan/atau Wanita pemimpin kesejahteraan sosial<br>- *Cross-check* kondisi di lapangan khususnya untuk menemukan kondisi riil anak tidak sekolah<br>- Pelayanan sedot sumur tinja. Fasilitasi pengujian kualitas air di SPAL D. Pembanguan toilet tanki septic yang standar. Penyusunan masterplan ALD dan Jakstrada ALD. Pembinaan dan pemberdayaan masyaraakat dalam SPAL D. Peningkaatan kapasita KPP SPAL D. Pemeliharaan SPAL DT skala permukiman. | Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Belum optimalnya serapan tenaga kerja Kota Magelang<br>- Tingkat keberhasilan peserta pelatihan kewirausahaan menjadi wirausaha baru perlu ditingkatkan<br>- Belum semua pekerja/buruh menjadi peserta Jamsostek<br>- Harga komoditas pangan kurang stabil<br>- Belum optimalnya pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | | | - Fasilitasi pengujian sumber air minum. Peningkatan Kapasitas KPPSPAM. Pembangunan Sarpras pendukung di mata air Sri Punganten. Penyambungan SR SPAM. Pemeliharaan SPAM yang sudah beroperasi. Penyusunan Jaksrada air minum. Pengembangan pemanfaatan hidrodoser bagi KPP SPAM.<br>- Pembangunan RTLH dan Rusunami. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan dan saluran drainase. Peningkatan kses air minum dan sanitasi. Peningkatan layanan dan pengolahan persampahan. Layanan kesiapsagaan terhadap bencana kebakaran. Layanan PBG.<br>- Pembangunan RTLH<br>- Melaksanakan pelatihan baik untuk kewirausahaan danpelatihan berbasis kompetensi. melaksanakan penempatan kerja bekerjasama dengan SMK melalui bursa kerja khusus. Bekerjasama dengan perusahaan untuk melakukan jobfair.<br>- Fasilitasi akses pasar dan permodalan kepada wirausaha baru.<br>- Penguatan awareness bagi perusahaan.<br>- Fasilitasi terhadap kemudahan akses pasar dan permodalan. | |
| **2** | - Belum tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Standar Sarana Prasarana (Sarpras)<br>- Menurunnya angka APM SMP/MTS<br>- Masih rendahnya pendidik pada satuan pendidikan dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku<br>- Cakupan imunisasi belum memenuhi target<br>- Masih ditemukan sampel makanan yang diperiksa tidak memenuhi syarat kesehatan<br>- Masih terdapat tiga kelurahan (Kemirirejo, Panjang dan Rejowinangun Utara) yang belum memenuhi persyaratan menjadi kelurahan siaga aktif mandiri<br>- Masih rendahnya kinerja indeks keluarga sehat<br>- Belum semua fasilitas kesehatan sesuai standar | Kualitas SDM | - Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>- Pemantapan Daya saing daerah | - Secara bertahap membangun ruang kelas bertingkat, sehingga ada lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan sarpras lainnya (kamar mandi siswa). Mengusulkan DAK Bidang Pendidikan<br>- *Cross-check* kondisi di lapangan khususnya untuk menemukan kondisi riil anak tidak sekolah<br>- Melanjutkan kebijakan terkait kewajiban publikasi buku atau kegiatan pelatihan dengan output buku<br>- Peningkatan kesadaran pada masyarakat untuk mengikuti program imunisasi melalui bantuan kader kesehatan di masyarakat dan sekolah<br>- Peningkatan kesadaran dan penggalangan komitmen pengusaha pemilik industri rumah tangga pangan<br>- Peningkatan advokasi para stakeholder untuk mewujudkan kelurahan siaga aktif mandiri pada 3 kelurahan yang belum | Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan<br>- Belum optimalya kinerja capaian keluarga berkualitas<br>- Capaian indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang belum optimal<br>- Masih adanya kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun<br>- Belum adanya pusat pembinaan dan pengembangan olah raga pada jenjang pendidikan usia dini<br>- Belum adanya penghargaan untuk atlet berprestasi khususnya pelajar Kota Magelang yang telah berprestasi pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional maupun internasional<br>- Atlet yang mengalami cedera pada saat mengikuti kejuaraan tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan karena atlet dianggap sebagai profesi<br>- Belum ada jaminan sosial bagi atlet yang mengalami cedera saat mengikuti pertandingan<br>- Besaran honor wasit/juri dalam penyelenggaraan kejuaraan dirasa kurang dan belum sesuai dengan standar yang ada pada masing-masing cabang olah raga | | | - Memaksimalkan kegiatan PIS-PK, sehingga derajat kesehatan masyarakat bias terpantau dengan lebih baik<br>- Menghimbau kepada fasilitas kesehatan baru yang ada di Kota Magelang untuk melapor pada Dinas Kesehatan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan<br>- Pemahaman terkait manajemen emosi, kesehatan mental, dan kesetaraan gender<br>- Memperluas sasaran/target dari keluarga berkualitas<br>- Peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan<br>- Sosialisasi kesehatan reproduksi, edukasi bahaya seks bebas, pencegahan perkawinan anak, penguatan bina keluarga remaja<br>- Pembentukan kelas khusus olah raga pada jenjang pendidikan SMP di Kota Magelang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekolah yang ditunjuk untuk membuka kelas khusus olah raga<br>- Menyusun Peraturan Wali Kota tentang Penghargaan Olahraga dan mengusulkan standarisasi terkait besaran penghargaan<br>- Mengusulkan standarisasi terkait asuransi kesehatan khusus untuk atlet oleh raga yang hanya bisa masuk pada BPJS Ketenagakerjaan<br>- Mengusulkan standarisasi untuk mengakomodasi jaminan sosial bagi atlit yang cedera saat mengalami pertandingan<br>- Mengusulkan penambahan besaran honor wasit/juri pada standarisasi dan disesuaikan dengan besaran honor yang berbeda-beda pada tiap-tiap cabang olahraga | |
| 3 | - Kondisi jalan mantap belum mencapai 100%<br>- Drainase dalam kondisi baik hanya sekitar 30%<br>- Irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 56%<br>- Akses sanitasi layak dan aman belum mencapai 100%<br>- Akses air minum aman belum mencapai 100%<br>- Masih ada kawasan kumuh | Sarana prasarana perkotaan yang berkelanjutan | Penguatan perwujudan ruang kota layak huni | - Peningkatan dan pemeliharan jalan kota<br>- Peningkatan dan pemeliharan drainase primer<br>- Peningkatan dan pemeliharaan irigasi Kota<br>- Pelayanan sedot sumur tinja. Fasilitasi pengujian kualitas air di SPAL D. Pembanguan toilet tanki septic yang standar. Penyusunan masterplan ALD dan Jakstrada ALD. Pembinaan dan pemberdayaan masyaraakat dalam SPAL D. | Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Penanganan RTLH baru mencapai 50%<br>- Belum semua kebutuhan fasilitas pelengkap jalan terpenuhi<br>- Persentase pengguna transportasi umum masih di bawah 10% | | | Peningkaatan kapasita KPP SPAL D. Pemeliharaan SPAL D T skala permukiman<br>- Fasilitasi pengujian sumber air minum. Peningkatan Kapasitas KPPSPAM. Pembangunan Sarpras pendukung di mata air Sri Punganten. Penyambungan SR SPAM. Pemeliharaan SPAM yang sudah beroperasi. Penyusunan Jaksrada air minum. Pengembangan pemanfaatan hidrodoser bagi KPP SPAM<br>- Pembangunan RTLH dan Rusunami. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan dan saluran drainase. Peningkatan kses air minum dan sanitasi. Peningkatan layanan dan pengolahan persampahan. Layanan kesiapsagaan terhadap bencana kebakaran. Layanan PBG<br>- Pembangunan RTLH<br>- Pemenuhan fasilitas pelengkap jalan<br>- Pembentukan awareness gaya hidup ramah lingkungan, peningkatan kualitas transportasi publik | |
| **4** | - Menurunnya kinerja pengurangan sampah<br>- Belum seluruh usaha dan/atau kegiatan memiliki rincian teknis penyimpanan sementara LB3<br>- Kinerja cakupan penghargaan yang diterima masyarakat masih perlu ditingkatkan | Kualitas lingkungan hidup | - Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | - Peningkatan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat terkait dengan pengolahan sampah. Fasilitasi pembelian produk-produk pengolahan sampah<br>- Perumusan regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas.<br>- Pendampingan terhadap pelaku usaha yang belum paham serta yang belum memiliki fasilitas terkait<br>- Perluasan sasaran keikutsertaan dalam perlombaan lingkungan hidup. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran dalam masyarakat | Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya |
| **5** | - Ketahanan Daerah Tahun 2023 Kota Magelang masuk kategori rendah<br>- Tingginya ketergantungan pangan dari daerah lain<br>- Masih ditemukan pangan segar yang tidak aman<br>- Beberapa wilayah kelurahan tidak mengalami perkembangan dibandingkan tahun sebelumnya<br>- Belum seluruh kesenian tradisional dikembangkan<br>- Belum seluruh kebudayaan lokal dikembangkan | Ketahanan daerah (ketahanan terhadap pangan dan bencana) | - Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>- Pemantapan daya saing daerah | - Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan rencana kontigensi bencana. Penguatan mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana<br>- Mengupayakan koordinasi dengan daerah lain untuk menjaga pasokan dan harga. Menjaga Cadangan Pangan Daerah. Peningkatan jumlah urban farming<br>- Peningkatan pengawasan pangan segar. Pembinaan tindak lanjut dari temuan-temuan. Pengadaan alat uji keamanan pangan | Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Cakupan pembinaan sejarah masih perlu ditingkatkan/ pengembangan kebudayaan lokal dan pembinaan sejarah stagnan | | | - Pelaksanaan bimtek pengisian epdeskel<br>- Integrasi ke dalam Pendidikan: Memasukkan materi kesenian tradisional ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal.<br>- Promosi yang Kreatif: Melakukan promosi kesenian tradisional melalui berbagai media, seperti media sosial, acara-acara budaya, dan festival.<br>- Pengembangan Produk Kreatif: Menciptakan produk-produk kreatif berbasis kesenian tradisional, seperti batik, kerajinan tangan, dan kuliner.<br>- Kerjasama Antar Sektor: Membangun kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mendukung pelestarian kesenian tradisional.<br>- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan bagi seniman tradisional dan para ahli warisan budaya.<br>- Integrasi ke dalam Kurikulum: Memasukkan permainan tradisional ke dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari pembelajaran budaya dan ketrampilan sosial.<br>- Promosi yang Kreatif: Melakukan promosi permainan tradisional melalui berbagai media, seperti media sosial, acara-acara budaya, dan kampanye publik.<br>- Pengembangan Permainan Tradisional Modern: Menyesuaikan permainan tradisional dengan tren zaman sekarang, misalnya dengan menambahkan elemen digital atau membuat turnamen.<br>- Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, dalam pelestarian permainan tradisional melalui pelatihan, workshop, dan lomba.<br>- Kerjasama dengan Pemerintah dan Swasta: Membangun kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan permainan tradisional.<br>- Mengadakan event-event pembinaan sejarah khususnya pada kegiatan yang belum dilaksanakan | |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - Belum optimalnya daya dukung untuk pelatihan<br>- Belum optimalnya serapan tenaga kerja Kota Magelang<br>- Tingkat keberhasilan peserta pelatihan kewirausahaan menjadi wirausaha baru perlu ditingkatkan<br>- Belum semua pekerja/buruh menjadi peserta Jamsostek<br>- Belum semua perusahaan menerapkan tata kelola yang layak<br>- Belum seluruh lahan aset pemerintah bersertifikat<br>- Masih sedikitnya KSP/USP yang memiliki perizinan<br>- Belum optimalnya peningkatan KSP/USP yang meningkat status kesehatannya<br>- Belum semua UMKM memiliki izin berusaha<br>- Potensi investasi yang bisa ditawarkan ke investor masih terbatas<br>- Belum optimalnya pelayanan perizinan melalui system OSS<br>- Belum optimalnya pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku<br>- Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya<br>- Belum semua destinasi wisata terkelola dengan baik<br>- Belum adanya paket *pattern*<br>- Belum optimalnya pengembangan potensi ekraf di Kota Magelang<br>- Peningkatan kapasitas SDM pariwisata belum optimal<br>- Belum optimalnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana pertanian<br>- Peningkatan kelompok tani yang naik kelas yang belum optimal | Daya saing ekonomi | - Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>- Pemantapan layanan publik prima<br>- Pemantapan daya saing daerah<br>- Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | - Pengadaan sarana prasarana pendukung pelatihan. Sewa sarana prasarana pendukung pelatihan<br>- Melaksanakan pelatihan baik untuk kewirausahaan danpelatihan berbasis kompetensi. melaksanakan penempatan kerja bekerjasama dengan SMK melalui bursa kerja khusus. Bekerjasama dengan perusahaan untuk melakukan jobfair<br>- Fasilitasi akses pasar dan permodalan kepada wirausaha baru<br>- Penguatan awareness bagi perusahaan<br>- Penguatan awareness bagi perusahaan<br>- Melanjutkan proses pensertifikatan lahan aset pemerintah yang belum bersertifikat<br>- Melaksanakan sosialisasi untuk mendorong KSP/USP mengajukan izin usaha<br>- Melaksanakan pendampingan bagi KSP/USP yang belum sehat<br>- melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan perizinan usaha<br>- Melaksanakan koordinasi baik antar OPD ataupun dengan instansi lain<br>- Membantu pengaju izin untuk menyiapkan persyaratan terlebih dahulu sebelum berkoordinasi dengan pemerintah pusat<br>- Penguatan awareness bagi perusahaan<br>- Pengalihan sistem kolam tradisional menjadi kolam terpal untuk penghematan air. Mendorong teknologi hasil perikanan<br>- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait<br>- Melakukan rapat koordinasi dan pendampingan serta failitasi pada masyarakat dan pelaku usaha<br>- Melaksanakan pendataan pelaku ekraf dan pariwisata dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP dan komunitas<br>- Pelaksanaan pelatihan bagi SDM pariwisata<br>- Pemberian akses terhadap sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan (alokasi anggaran dan Kerjasama dengan stakeholders)<br>- Pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian | Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Belum semua sarana perdagangan dalam kondisi baik namun Pemerintah Kota Magelang tidak bisa melakukan pemeliharaan<br>- Harga komoditas pangan kurang stabil<br>- Menurunnya realisasi indikator persentase UTTP bertanda tera sah<br>- Belum semua usaha memiliki ijin usaha<br>- Menurunnya nilai ekspor<br>- Belum optimalnya pertambahan jumlah industri kecil dan menengah<br>- Masih rendahnya IKM yang mengurus legalitas usaha<br>- Rendahnya jumlah IKM yang memilki sertifikasi manajemen mutu<br>- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi oleh IKM | | | - Mendorong para pelaku usaha yang berada di sarana perdagangan yang bukan milik Pemerintah Kota Magelang untuk bisa mandiri dalam pemeliharaan sederhana sarana perdagangan. Mengalokasikan sumber dana untuk melakukan pemeliharaan sarana perdagangan<br>- Melaksanakan stabilisasi harga dengan mengadakan pasar murah. Melaksanakan pengawasan di pasar<br>- Melaksanakan survey di lapangan bagi pelaku usaha yang memiliki alat timbang tapi belum di lakukan tera ulang<br>- Penguatan awareness kepada pelaku usaha dalam memiliki ijin usaha<br>- Sosialisasi dan pameran potensi ekspor<br>- Fasilitasi terhadap kemudahan akses pasar dan permodalan<br>- Penguatan awareness kepada IKM<br>- Memberikan sosialisasi dan pendampingan pada IKM<br>- Melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan peralatan produksi ber TTG guna peningkatan kualitas dan kapasitas produksi IKM | |
| 7 | - Belum optimalnya kinerja penyelesaian ganti/rugi santunan tanah dalam kasus permasalahan pengadaaan tanah<br>- Belum semua penduduk menggunakan IKD<br>- OPD yang sudah ber-PKS dengan Ditjendukcapil tidak bisa mengakses data penduduk untuk keperluan verifikasi<br>- Banyak aplikasi yang belum terintegrasi/ integrasi program/ sistem informasi belum sepenuhnya terwujud<br>- Belum semua rekomendasi dalam pengendalian dan evaluasi ditindaklanjuti<br>- Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi belum optimal<br>- Pengelolaan statistik sektoral masih perlu ditingkatkan | Reformasi birokrasi | - Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>- Perwujudan layanan publik prima<br>- Pemantapan daya saing daerah<br>- Pemantapan kesejahteraan masyarakat | - Melanjutkan proses ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah<br>- Jemput bola aktivasi IKD.<br>- KIE terkait keamanan data IKD<br>- Pemetaan kebutuhan pemenuhan ISO 27001<br>- Pengawalan arsitektur SPBE<br>- Menindaklanjuti rekomendasi<br>- Pembuatan policy paper terhadap hasil penelitian dan pengembangan agar dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan<br>- Pendampingan statistik sektoral kepada OPD prioritas oleh wali data dan Pembina data<br>- Menyusun SOP. Melakukan audit. Menindaklanjuti hasil audit. Melakukan uji coba sistem keamanan informasi<br>- Penambahan jumlah titik layanan perpustakaan<br>- Penambahan jumlah koleksi perpustakaan | Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Keamanan informasi masih belum memenuhi standar ISO 27001<br>- Layanan perpustakaan belum merata<br>- Koleksi perpustakaan masih terbatas<br>- Belum seluruh perpustakaan ber-SNP<br>- Belum seluruh arsip inaktif dibuatkan daftar arsip<br>- Belum semua rancangan peraturan daerah disahkan tepat waktu<br>- Penurunan IPKD Kota Magelang<br>- Masih adanya tanah Pemerintah Kota yang belum bersertifikat<br>- Keuangan Kota Magelang masih tergantung pembiayaan dari Pusat<br>- Belum optimalnya aspek pengembangan karir, aspek perlindugan dan pelayanan, serta sistem informasi dalam capaian sistem merit<br>- Belum adanya pedoman teknis dari instansi Pembina tentang pengelolaan jabatan fungsional hasil penyetaraan khususnya yang berkaitan dengan tim penilai angka kredit<br>- Belum optimalnya integrasi sistem informasi kepegawaian<br>- Belum semua pejabat Pimpinan Pratama dan Pejabat administrator/pengawas mengikuti pelatihan kepemimpinan<br>- Target Maturitas SPIP belum bisa tercapai<br>- Belum optimalnya entitas yang mendapatkan pendampingan dan asistensi<br>- Keterbatasan SDM APIP<br>- Belum optimalnya kinerja pembinaan wawasan kebangsaan<br>- Organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan belum maksimal<br>- Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu ditingkatkan | | | - Pembinaan intensif terhadap perpustakaan yang belum ber-SNP<br>- Pembuatan daftar arsip secara menyeluruh<br>- Eksekutif untuk dapat menepati jadwal pengiriman draf Raperda Propemperda. Koordinasi dengan Bagian Hukum. Penyesuaian Rencana Kerja<br>- Pengawalan perencanaan-penganggaran. Pemenuhan proporsi anggaran wajib dan pemenuhan SPM. Peningkatan pendapatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana Pusat<br>- Penyelesaian sengketa dan masalah aset tanah<br>- Pemetaan potensi pendapatan. Peningkatan beberapa tarif pajak/retribusi<br>- Optimalisasi penggunaan sistem manajemen talenta, rencana pengembangan kompetensi, talent pool, sistem informasi, dan e-office<br>- Melanjutkan kegiatan assessment kompetensi<br>- Penyusunan kebijakan internal tentang perlindungan/bantuan kepada pegawai<br>- Konsultasi dan koordinasi dengan instansi pembina<br>- Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian dengan pengintegrasian beberapa sistem yaitu e-kinerja, simpresso, layanan psikolohi, e-learning<br>- Menyediakan anggaran diklat kepemimpinan sesuai dengan jumlah pejabat yang belum mengikuti diklat<br>- Menentukan area of improvement pada masing-masing variable penilaian<br>- Pendampingan dan asistensi terus dilakukan secara berkelanjutan dengan peningkatan jumlah pendampingan<br>- Usulan penambahan formasi APIP<br>- Perluasan sasaran pembinaan wawasan kebangsaan<br>- Pembentukan forum ormas<br>- Perluasan sasaran pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya<br>- Pembinaan dan sosialisasi kepada calon pemilih pemula | |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | Prioritas Pembangunan | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Penduduk usia pemilih pemula yang berpartisipasi dalam agenda politik yang masih perlu ditingkatkan<br>- Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi<br>- Belum optimalnya pengelolaan asset BUMD<br>- Capaian nilai SAKIP yang masih bisa dioptimalkan | | | - Melanjutkan harmonisasi regulasi dan meningkatkan kualitas produk hukum<br>- Melakukan diversifikasi produk dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait.<br>- Penyelesaian penetapan pedoman evaluasi internal yang masih dalam proses.<br>- Menekankan kedalaman kualitas data dan analisis evaluasi.<br>- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menginternalisasikan pohon kinerja yang disusun. | |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

#### 4.2.2.3.5 Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Rekomendasi DPRD terhadap RKPD Kota Magelang Tahun 2025 yaitu agar penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan didasarkan pada penyelesaian isu-isu strategis sesuai RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, sedangkan untuk penyusunan program dan kegiatan harus memperhatikan permasalahan di setiap urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Secara umum aspirasi yang tercatat untuk ditindaklanjuti meliputi:

a. Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan dan drainase
b. Penyediaan dan perbaikan PSU Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian
c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, dan kesenian
d. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
e. Bantuan bagi siswa kurang mampu
f. Bantuan jaminan kesehatan masyarakat
g. Bimbingan sosial keluarga penyendang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang masuk data PPKS/PMKS
h. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
i. Pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan jalan dan trasnportasi
j. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
k. Pelatihan dan sertifikasi pelaku wisata dan ekonomi kreatif
l. Pelatihan Olahan Pangan Lokal dan Urban Farming
m. Bantuan modal, pelatihan dan fasiltasi kemitraan UMKM
n. Peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemuda
o. Penataan bangunan di kawasan strategis

Keterkaitan antara program prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2025 dengan isu strategis daerah, prioritas RKPD tahun 2025, janji tahunan kepala daerah dan Pokok Pikiran DPRD disajikan dalam tabel 4.14 berikut ini:

*Tabel 4.14 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok Pikiran Tahunan DPRD*

| No | Isu Strategis | Klaster Prioritas RKPD Tahun 2025 | Pokok Pikiran DPRD | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemiskinan | - Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin | - Bantuan jaminan kesehatan masyarakat<br>- Bantuan untuk warga lanjut usia miskin<br>- Bimbingan sosial keluarga penyendang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang masuk data PPKS/PMKS<br>- Bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM<br>- Bantuan bagi siswa kurang mampu<br>- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | Program Pembinaan Perpustakaan |
| | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air minum |
| | | | | Program Pengembangan Perumahan |
| | | | | Program Kawasan Permukiman |
| | | | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh |

| No | Isu Strategis | Klaster Prioritas RKPD Tahun 2025 | Pokok Pikiran DPRD | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| 2 | Kualitas SDM | - Pemantapan Layanan Publik Prima<br>- Pemantapan daya saing daerah | - Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan<br>- Perbaikan fasilitas pelayanan publik<br>- Pemenuhan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi<br>- Pelatihan dan sertifikasi pelaku wisata dan ekonomi kreatif<br>- Pelatihan Olahan Pangan Lokal dan Urban Farming<br>- Bantuan modal, pelatihan dan fasiltasi kemitraan UMKM<br>- Peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemuda | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | Program Pembinaan Perpustakaan |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 3 | Sarana Prasarana Perkotaan yang Berkelanjutan | Penguatan perwujudan ruang kota layak huni | - Peningkatan akses air bersih<br>- Perbaikan dan pembangunan jalan dan drainase<br>- Pemenuhan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi<br>- Penanganan limbah perkotaan<br>- Pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan jalan<br>- Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah<br>- Perbaikan fasilitas pelayanan publik<br>- Penataan bangunan di kawasan strategis<br>- Penyediaan dan perbaikan PSU Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian<br>- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, dan kesenian<br>- Pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan jalan dan transportasi | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional |
| | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| | | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |
| | | | | Program Kawasan Permukiman |
| | | | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh |
| | | | | Program Penataan Bangunan Gedung |
| | | | | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya |
| | | | | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | | | Program Pengembangan Jasa Konstruksi |
| | | | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) |
| | | | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) |

| No | Isu Strategis | Klaster Prioritas RKPD Tahun 2025 | Pokok Pikiran DPRD | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat |
| | | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pengelolaan Persampahan |
| | | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| **4** | Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana | - Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>- Pemantapan daya saing daerah | - Penanganan limbah perkotaan<br>- Pengembangan kampung organik<br>- Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah<br>- Pelatihan Olahan Pangan Lokal dan Urban Farming | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | | Program Penanganan Bencana |
| | | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan |
| | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| | | | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| | | | | Program Penyuluhan Pertanian |
| | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| | | Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | Program Kawasan Permukiman |
| | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |
| **5** | Ketahanan Daerah | - Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| | | | | Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik |
| | | | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |

| No | Isu Strategis | Klaster Prioritas RKPD Tahun 2025 | Pokok Pikiran DPRD | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| 6 | Daya Saing Ekonomi | - Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>- Pemantapan layanan publik prima<br>- Pemantapan daya saing daerah<br>- Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>- Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>- Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah | • Pelatihan dan sertifikasi pelaku wisata dan ekonomi kreatif<br>• Pelatihan Olahan Pangan Lokal dan Urban Farming<br>• Bantuan modal, pelatihan dan fasiltasi kemitraan UMKM<br>• Peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemuda<br>• Penataan bangunan di kawasan strategis<br>• Pelatihan ketenagakerjaan | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | | | Program Promosi Penanaman Modal |
| | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| | | | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi |
| | | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |
| | | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| | | | | Program Pengembangan Ekspor |
| | | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | | Program Pemasaran Pariwisata |
| | | | | Program Pengembangan Kebudayaan |
| | | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional |
| | | | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya |
| | | | | Program Pengelolaan Permuseuman |
| 7 | Reformasi Birokrasi | - Pemantapan daya saing daerah<br>- Pemantapan kesejahteraan masyarakat | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |

| No | Isu Strategis | Klaster Prioritas RKPD Tahun 2025 | Pokok Pikiran DPRD | Program Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |
| | | Pemantapan Layanan Publik Prima | | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
| | | | | Program perencanaan tenaga kerja |
| | | | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | Program Penempatan Tenaga Kerja |
| | | | | Program Kepegawaian Daerah |
| | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | Program Perlindungan Perempuan |
| | | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak |
| | | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| | | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

#### 4.2.2.3.6 Tindak Lanjut Hasil FGD dan Konsultasi Publik

Wujud pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 salah satunya adalah dalam pelaksanaan konsultasi publik dan *Focussed Group Discussion* (FGD). Konsultasi publik atas rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dalam segmen umum dan segmen khusus (anak-anak dan lansia). Sedangkan FGD yang dilakukan dengan mengambil tema tema i) Kepariwisataan; ii) Penguatan Perwujudan Ruang Kota Layak Huni; iii) Penguatan Ketahanan Pangan dan Adaptasi Perubahan Iklim; serta iv) Pembangunan Daerah Berbasis Inklusivitas. Hasil FGD kemudian ditindaklanjuti dalam program di masing-masing perangkat daerah terkait baik melalui kerangka kebijakan maupun kerangka anggaran.

#### 4.2.2.3.7 Tindak Lanjut Hasil Musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu perwujudan model pendekatan penyusunan perencanaan yang berorientasi pada proses karena melibatkan masyarakat sabagai salah satu unsur pemangku kepentingan dan perencanaan yang diselaraskan dengan musyawarah yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kota. Melalui Musrenbang, yang juga merupakan pengejawantahan pendekatan perencanaan dari segi *bottom up*, teridentifikasi saran, masukan, serta usulan para pemangku kepentingan untuk pelaksanaan pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2025 juga memuat akomodasi terhadap Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), yang merupakan bagian dari pelaksanaan program unggulan Rodanya Masbagia, dengan alokasi anggaran pembangunan di masing-masing RT sebesar 30 juta rupiah. Penyusunan RKM harus merujuk pada hasil identifikasi permasalahan yang ada dalam profil RT, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia serta Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKM Program Rodanya Masbagia. Verifikasi terhadap RKM dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, dan kota.

## 4.3 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU KOTA MAGELANG

Letak Kota Magelang sangat strategis, berada pada persimpangan jalur transportasi dan jalur pariwisata utama di Jawa Tengah. Karena lokasinya yang sangat strategis tersebut, maka Kota Magelang mempunyai peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi daerah sekitarnya. Pentingnya peran tersebut telah dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menyebutkan Kota Magelang sebagai sebuah sistem perkotaan ditetapkan sebagai PKW Purwomanggung (Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, dan Kab. Temanggung). Dengan ditetapkannya Kota Magelang sebagai PKW Kawasan Purwomanggung, maka diperlukan sarana prasarana yang tidak hanya melayani masyarakat dalam kota tetapi juga melayani masyarakat dalam skala regional Purwomanggung. Kota Magelang sebagai PKW Purwomanggung memiliki fungsi beragam, diantaranya:

a. Pusat pelayanan keuangan/ bank yang melayani beberapa kabupaten.
b. Pusat pengolahan/ pengumpul barang yang melayani beberapa kabupaten.
c. Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten
d. Pusat pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten
e. Pusat pendidikan yang melayani beberapa kabupaten
f. Pusat kesehatan yang melayani beberapa kabupaten.
g. Pusat perdagangan dan jasa umum lain yang melayani beberapa kabupaten.

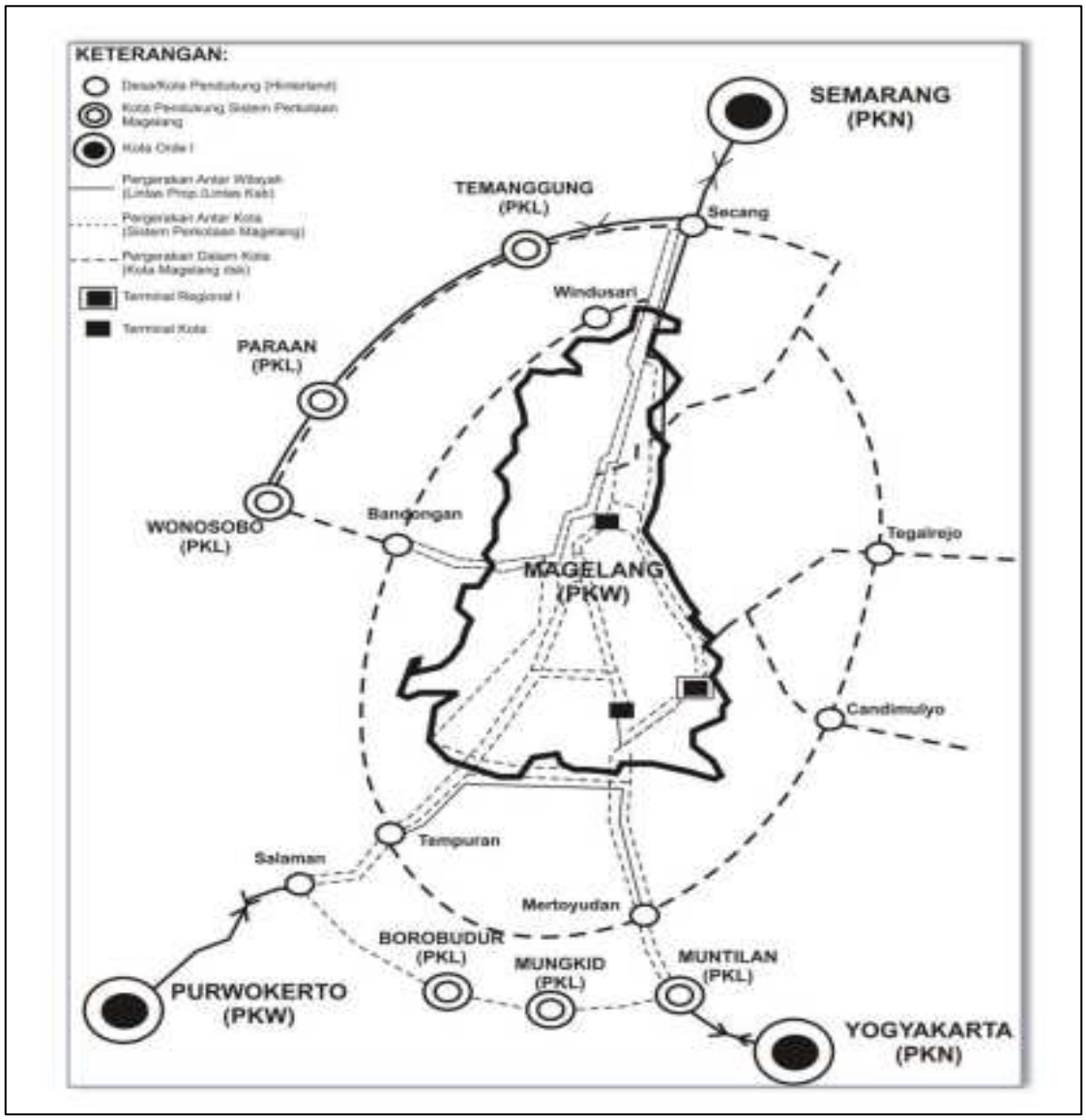


*Gambar 4.3 Konstelasi Kota Magelang dengan wilayah sekitarnya*

Berdasarkan perkembangannya, dalam Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang masuk dalam WP Gelangmanggung yang terdiri dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang. Pengembangan wilayah Gelangmanggung terutama untuk Melestarikan kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam.

### 4.3.1 Arah Pengembangan Internal Wilayah

Pengembangan Internal Wilayah ditinjau dari muatan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berupa Penetapan Pengembangan Struktur Ruang dan Pengembangan Pola Ruang. Tujuan Penataan Ruang Kota Magelang adalah "mewujudkan ruang Daerah sebagai Kota Jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan". Perencanaan tata ruang Kota Magelang bertemakan *"A FRIENDLY CITY OF EXCELLENCE".* Dasar pengembangan tema tersebut adalah "Bagaimana Membangkitkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang *Friendly* (ramah-bersahabat) dan *Excellence* (Pelayanan Prima di segala bidang) Bagi Kawasan Sekitarnya". Untuk menciptakan kondisi tersebut, Kota Magelang harus mempunyai daya tarik dan mampu meningkatkan pamornya dengan mengangkat berbagai kelebihan/ keunggulan yang dimiliki. Sebagai Kota Jasa yang menjadi kota tujuan bagi daerah sekitar maka Kota Magelang harus *Friendly* dalam memberikan pelayanan bagi kabupaten disekitarnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan disegala bidang seperti dibidang kesehatan, pendidikan, wisata, pelayanan publik, dan sebagainya.

Misi penataan ruang Kota Magelang dalam mendukung tercapainya *"A Friendly City of Excellence"* adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai.
2. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional dan berwawasan lingkungan serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif didukung oleh penguasaan IPTEK dan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Mengembangkan perekonomian Kota Magelang dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani *(civil society*).

Kebijakan pengembangan wilayah di Kota Magelang secara keruangan ditujukan untuk mewujudkan rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan rencana strategis kawasan sebagaimana tertuang dalam pembahasan di bawah ini.

#### 4.3.1.1 Kebijakan Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kota Magelang tahun 2024

Struktur ruang kota dibagi ke dalam penentuan pusat kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana kota. Arah kebijakan untuk mewujudkan struktur ruang Kota Magelang pada tahun 2024 sesuai yang tertuang dalam RTRW Kota Magelang tahun 2011-2031 adalah:

1. Perwujudan sistem perkotaan dengan strategi penyusunan perda rencana detail tata ruang (RDTR), pengesahan 3 dokumen RTBL dalam bentuk perwal, pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) maupun perizinan (Perizinan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi).
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota dengan penyusunan masterplan sektoral jaringan prasarana kota (RISPAM, RAD AMPL, Masterplan Air Limbah Domestik), pembangunan *flyover* Canguk, pembangunan *exit tol* Magelang, pembangunan dan pemeliharaan jaringan prasarana kota, peningkatan sistem transportasi terintegrasi, pemeliharaan terminal tipe C, penyediaan fasilitas kelengkapan jalan, studi kelayakan pengembangan terminal angkutan barang, pembangunan TPST Regional Magelang, peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan aman, peningkatan konservasi air tanah, peningkatan pengelolaan sampah dari level sumber, serta pengembangan kota ramah sepeda dan pejalan kaki.

#### 4.3.1.2 Kebijakan Perwujudan Rencana Pola Ruang Kota Magelang tahun 2024

Perwujudan polar uang kota terbagi menjadi peruntukan lindung dan budidaya. Arah kebijakan untuk mewujudkan pola ruang Kota Magelang pada tahun 2024 sesuai yang tertuang dalam RTRW Kota Magelang tahun 2011-2031 adalah:

1. Perwujudan kawasan lindung melalui koordinasi perlindungan daerah sempadan sungai dengan BBWS Serayu Opak Kementerian Pekerjaan Umum, pengembangan RTH untuk fungsi kehati, koordinasi perlindungan sempadan irigasi dengan Balai PSDA Probolo Provinsi Jateng, pengoptimalan fungsi TPU Giriloyo sebagai RTH, pengadaan tanah untuk RTH di Canguk Jl. Urip Sumohardjo, penataan RTH publik berupa taman kota, pemeliharaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar, pembangunan biopori dan sumur resapan, serta pemeliharaan kawasan lindung budidaya Mantyasih.
2. Perwujudan kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan untuk investasi dan pemanfataan ruang, penyelesaian proses sertifikat tanah PSU yang diserahkan kepada Pemerintah Daeerah, pembangunan dan perbaikan RTLH, pembangunan Rusunawa dan Rusus, kolaborasi penyelesaian masalah permukiman di *squatter area* dengan stakeholder terkait, pengembangan kawasan pendidikan di Sidotopo, pembangunan Gedung kantor pemerintah, pemeliharaan terminal tipe C dan pemenuhan sarana prasarana kelengkapan jalan, kajian pengembangan RS tipe C, pemeliharanaan sarana prasarana pendukung kawasan olahraga, pengembangan obyek wisata dan atraksi wisata, perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan *urban fisheries*, serta pengembangan *integrated urban farming*.

### 4.3.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Dalam rangka mendukung peran Kota Magelang sebagai PKW Purwomanggung, maka kebijakan pengembangan struktur ruang daerah diarahkan untuk:

a. Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung.
b. Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah yang merata dan berhierarki, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
c. Pengembangan system prasarana dan sarana yang terintegrasi dengan system regional, Provinsi, dan Nasional
d. Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem Prasarana dan Sarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Magelang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031, Kota Magelang terbagi menjadi pusat pelayanan dan subpusat pelayanan. Pusat pelayanan Kota Magelang terletak di Kawasan Alun-Alun atau disebut sebagai BWP I. BWP I mempunyai luas kurang lebih 245 ha dengan fungsi utama sebagai Kawasan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kota rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi. Subpusat pelayanan merupakan pusat pelayanan skala kota atau fungsi Kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masing-masing bagian wilayah kota atau fungsi pelayanan internal.

Sub pusat pelayanan di Kota Magelang yaitu:

a. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada BWP I yaitu Kawasan Pasar Rejowinangun sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa
b. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada BWK II yaitu Kawasan Kebonpolo dengan fungsi utama pusat pelayanan permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perdagangan, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat.
c. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada BWK III yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan permukiman dengan kepadatan sedang
d. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada BWK IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, pengembangan perdagangan dan jasa, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan permukiman kepadatan tinggi
e. Sub Pusat pelayanan kota berada pada BWK V yaitu Kawasan Sidotopo dengan fungsi pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial budaya, olahraga, dan rekreasi, Permukiman kepadatan sedang.

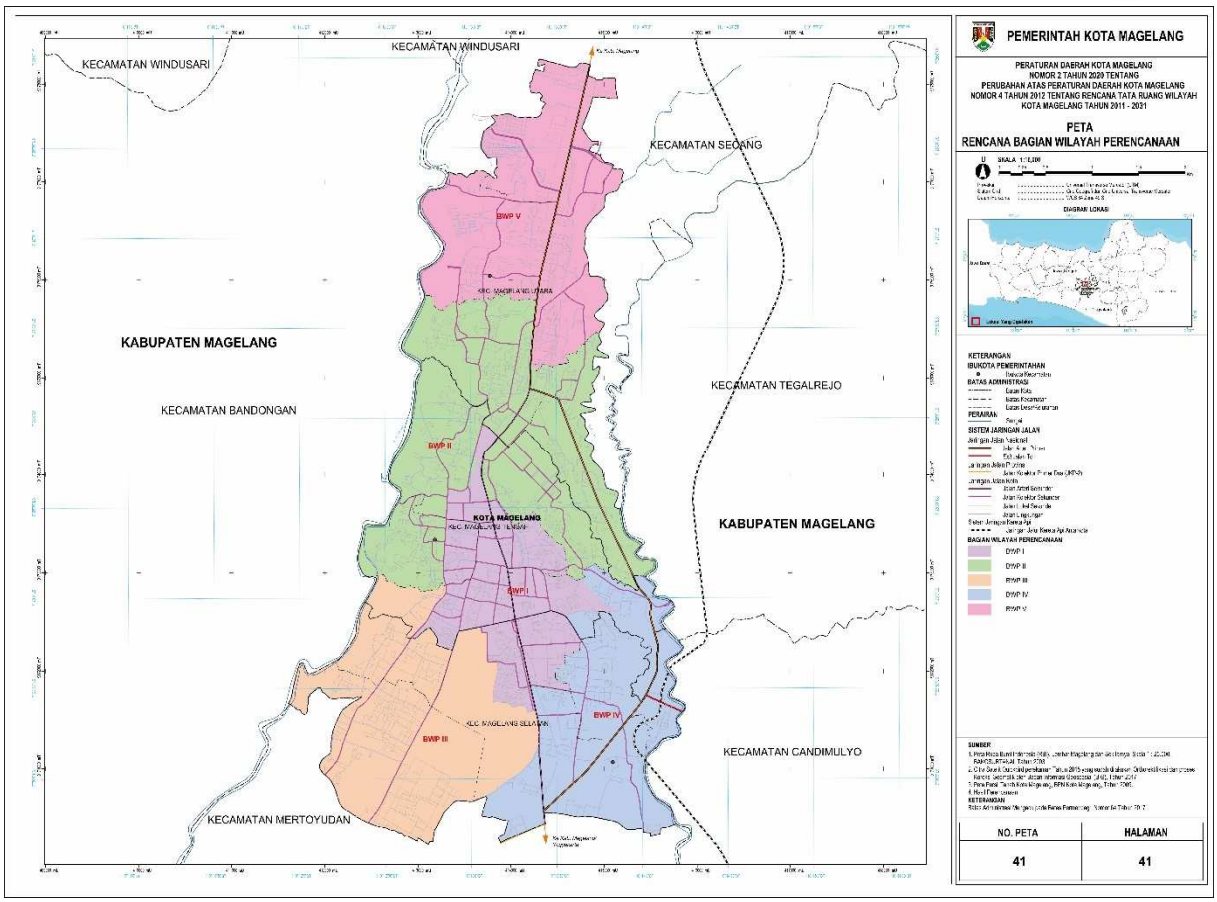


*Gambar 4.4 Rencana Bagian Wilayah Perencanaan Kota Magelang*

*Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031*

### 4.3.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

**1. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung di Kota Magelang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan RTH, kawasan lindung geologi, dan kawasan cagar budaya.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung Kota Magelang meliputi:

a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup:
   - Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang udara, dan ruang didalam bumi yang meliputi kawasan perlindungan setempat, RTH kota, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung geologi
   - Mengembangkan RTH kota untuk mencapai luasan 30% dari luas Kota Magelang.
   - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkaan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
   - Mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/ atau meningkatkan kualitas cagar budaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pariwisata Kota Magelang.

b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup:
   - Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
   - Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan
   - melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang kedalamnya;

- mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
- mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana

**2. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya meliputi kawasan permukiman, kawasan peruntukan industry, kawasan paariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan perikanan dan kawasan hutan rakyat.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya Kota Magelang sebagai berikut:

a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antara kegiatan budidaya, kawasan budidaya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lainnya, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
   - Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi secara sinergis.
   - mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
   - mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
   - mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Kota Magelang dan/atau provinsi, serta nasional; dan
   - mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan* untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan hutan rakyat

b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup:
   - mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
   - mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan kawasan dengan potensi kerawanan terhadap bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
   - mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
   - penataan perkembangan kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan tidak sporadis;
   - mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
   - mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana.

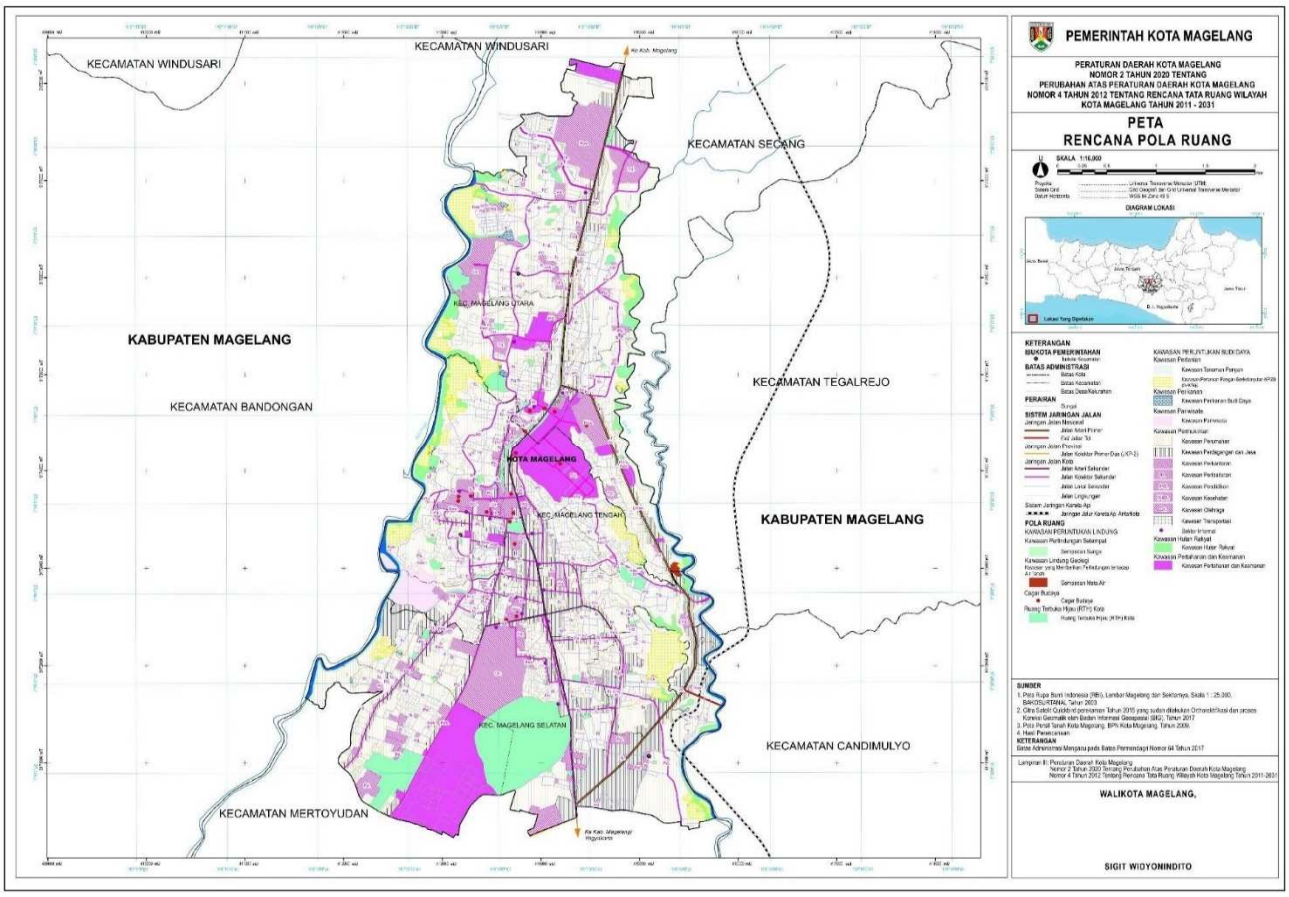


*Gambar 4.5 Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang*

*Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031*

### 4.3.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Skenario pengembangan Kota Magelang adalah dengan menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang berfungsi sebagai generator pertumbuhan ekonomi dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota/ regional. Sesuai dengan hasil identifikasi dalam RTRW, Kota Magelang terdapat 8 (delapan) kawasan strategis dengan kebijakan dan strategi pengembangannya adalah:

a. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk mewadahi pendirian perguruan tinggi negeri dan kawasan perdagangan dan jasa.

   Strategi yang dikembangkan dengan peningkatan penataan sistem transportasi menuju kawasan Sidotopo seperti pengembangan jaringan jalan baru, penambahan trayek, dan sebagainya, serta peningkatan penataan peruntukan lahan di jalur strategis (koridor arteri primer Semarang-Magelang-Yogyakarta).

b. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga skala regional. Kawasan ini telah memiliki kelengkapan sarana seperti lapangan tennis *indoor* dan *outdoor*, *samapta aquatic stadium*, Stadion Moch. Soebroto, GOR samapta. Fasilitas kawasan ini ke depan akan semakin dilengkapi dengan Masjid Kawasan, Kantor Kepemudaan dan Olahraga, BMX dan skater track dan rencana pelengkap kawasan termasuk RTH Publik, dan sebagainya.

   Strategi yang dikembangkan dengan peningkatan sistem transportasi menuju Kawasan GOR Samapta dan peningkatan jalan menuju GOR Samapta serta peningkatan untuk investasi pengembangan kawasan.

c. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa skala regional serta sarana perpindahan moda angkutan antar regional antar provinsi, serta terdapatnya kawasan yang disiapkan untuk pasar induk. Pada kawasan ini bersinggungan dengan proyek nasional pembangunan *fly over* canguk, exit jalan tol Yogyakarta Bawen dan pengembangan jalur kereta api Ambarawa-Yogyakarta.

Strategi yang dikembangkan dengan peningkatan penataan sistem transportasi yang melalui jalur koridor arteri primer dan peningkatan penataan lahan di jalur strategis (koridor arteri primer Semarang-Yogyakarta).

d. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan perdagangan dengan memadukan antara kegiatan perdagangan dan transportasi. Strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan skala pelayanan Pasar Kebonpolo menjadi pelayanan perdagangan skala regional (perdagangan modern) untuk membangkitkan perkembangan di kawasan utara Kota Magelang. Selain itu juga perlu ditingkatkan pemeliharaan fisik pasar Kebonpolo.

e. Kawasan Alun-alun, merupakan Kawasan pusat Kota (CBD) sebagai aktivitas bisnis utama di Kota Magelang. Dengan strategi pengembangan adalah meningkatkan sarana prasarna pendukung kegiatan seperti penyediaan parker bersama, penghijauan di sepanjang kawasan alun-alun kota, dan peningkatan pelayanan system transportasi dan pengaturan traffic lalu lintas pada kawasan CBD;

f. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan modern dan tradisional skala regional. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan untuk pendukung pengembangan wisata Kebun Raya Gunung Tidar dengan pembangunan IKM Center. Strategi yang dikembangkan adalah dengan peningkatan penataan lokasi Pasar Rejowinangun, *Shopping Center*, Pasar Gotong Royong, penyediaan ruang bongkar muat, penyediaan ruang parkir yang aman, nyaman, dan pengembangan sub terminal pada Kawasan Shoping Center. Strategi selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan peluang investasi di kawasan ini sehingga bisa lebih komprehensif dalam penataannya.

g. Kawasan Mantyasih, sebagai kawasan wisata heritage sebagai alternatif pengembangan sektor jasa untuk mendukung peran Kota Magelang. Strategi yang dikembangkan dengan merehabilitasi dan penataan kawasan bangunan kuno dengan tidak mengurangi bentuk aslinya, serta pengembangan event-event khusus seperti lomba-lomba terkait pengenalan seni budaya yang ada di Kota Magelang seperti jatilan, kethoprak, keroncong, dan lain sebagainya di kawasan Mantyasih.

h. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan pariwisata untuk wisata religi dan objek studi ilmu pengetahuan. Strategi yang dikembangkan meliputi: peningkatan sistem transportasi, peningkatan sarana penunjang wisata seperti rumah makan (pusat kuliner), pusat oleh-oleh, penginapan; pengembangan kawasan rekreasi alam di sekitar Sungai Progo seperti Arung jeram, *outbond* serta dilengkapi dengan fasilitas home stay, villa, hotel dan lain sebagainya. Strategi selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan peluang investasi di kawasan ini sehingga bisa lebih komprehensif dalam penataannya

Beberapa potensi internal Kota Magelang yang menjadi generator perkembangan kota, diantaranya yaitu keberadaan Akademi Militer yang merupakan pusat pendidikan kemiliteran dengan layanan nasional sudah banyak dikenal dari seluruh penjuru wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada kunjungan ke Kota Magelang semakin meningkat. Kebutuhan akomodasi menjadi daya tarik investor untuk mengembangkan usaha perhotelan dan restoran di Kota Magelang.

Sebagaimana halnya Akademi Militer sebagai pusat pendidikan militer skala nasional di Kota Magelang, dengan ditetapkannya Universitas Tidar sebagai universitas negeri di Indonesia juga menjadi daya tarik bagi warga sekitar Kota Magelang untuk mengenyam pendidikan di Kota Magelang. Kondisi ini menyebabkan semakin banyaknya pendatang mahasiswa yang belajar di Universitas Tidar yang berakibat semakin banyaknya tempat kos mahasiswa, semakin menjamurnya tempat usaha yang melayani kebutuhan mahasiswa seperti foto copy, kuliner, laundry, dan lain-lain. Keberadaan Universitas Tidar sebagai universitas negeri akan menjadi tarikan bagi masyarakat dari luar Magelang yang menyebabkan Kota Magelang menjadi semakin padat. Berkembangnya Kawasan Universitas Negeri Tidar akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kepadatan permukiman, sehingga berpotensi terjadinya penurunan kualitas permukiman bila tidak diantisipasi dengan baik.

Pengembangan Kawasan Universitas Negeri Tidar sudah diatur di dalam tata ruang BWP V yaitu Kawasan Sidotopo. Kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan nantinya akan terbagi menjadi kawasan pendidikan dan kawasan perdagangan dan jasa. Di sekitar Kawasan Sidotopo juga dikembangkan kawasan permukiman untuk mendukung kegiatan pendidikan disana.

Gunung Tidar saat ini dikembangkan menjadi Kebun Raya. Dengan perubahan status menjadi Kebun Raya, Gunung Tidar yang saat ini sebagai destinasi wisata religius dan juga sebagai kawasan lindung, fungsinya akan meningkat yaitu untuk konservasi, pendidikan, penelitian, wisata dan jasa lingkungan. Dengan perubahan status ini, Gunung Tidar ke depan akan menjadi daya tarik dan destinasi utama di Kota Magelang yang mampu menggenerate perekonomian Kota Magelang.

Kawasan Soekarno Hatta, sebagai salah satu kawasan strategis Kota Magelang bersinggungan dengan program strategis nasional yaitu rencana exit tol Tol Bawen-Yogyakarta dan stasiun terintegrasi reaktivasi Jalur Kereta Api Semarang-Borobudur-Yogjakarta. Untuk mengurai kemacetan di kawasan Canguk, maka sesuai dengan usulan Pemerintah Kota Magelang, maka direncanakan akan dibangun Fly-Over Canguk di kawasan Soekarno Hatta.

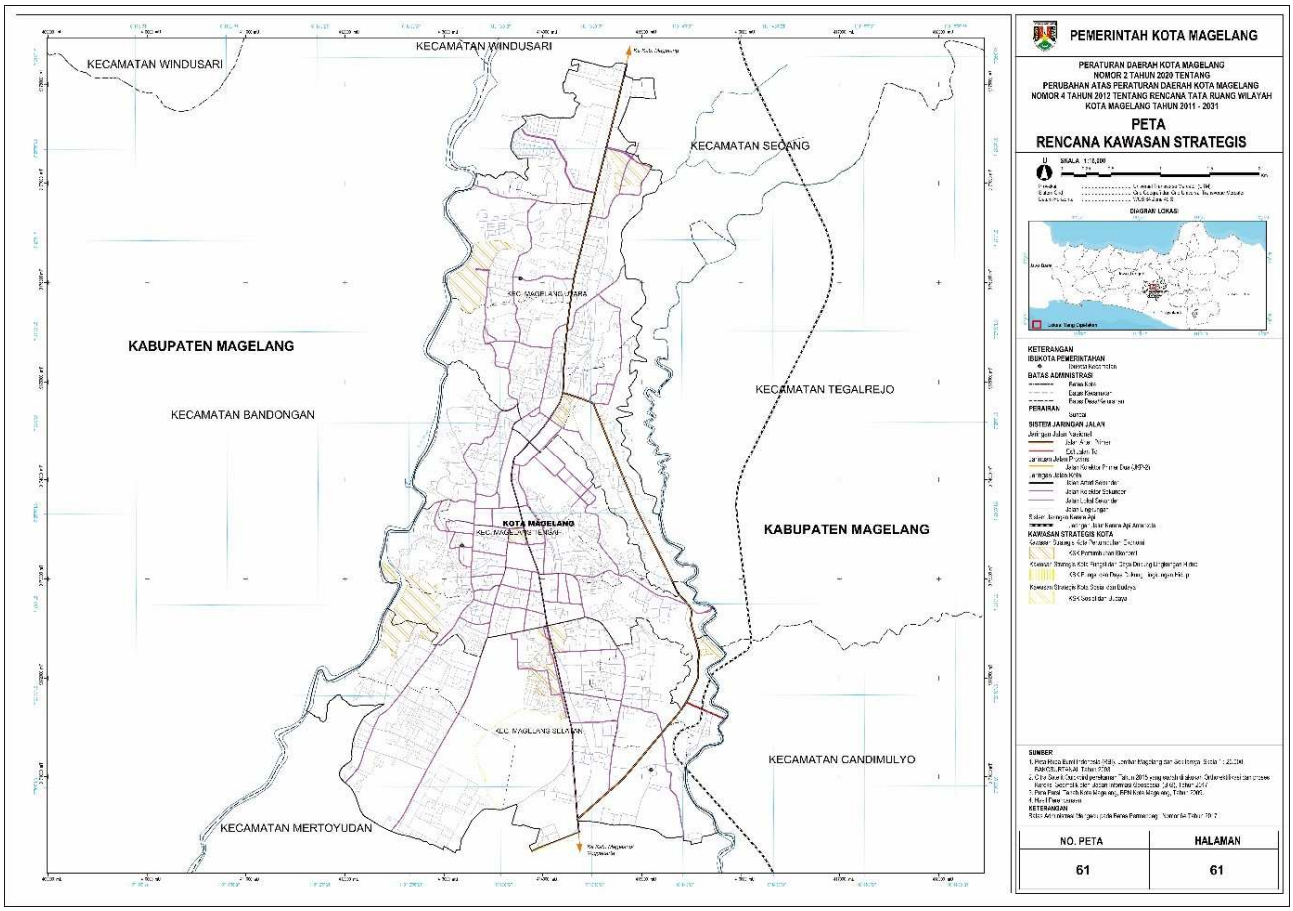


*Gambar 4.6 Rencana Kawasan Strategis Kota Magelang*

*Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031*

### 4.3.5 Arah Pengembangan Eksternal Wilayah

Kota Magelang merupakan kota jasa yang memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi daerah sekitarnya. Penetapan peran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menyebutkan Kota Magelang sebagai sebuah sistem perkotaan ditetapkan sebagai PKW Purwomanggung (Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, dan Kab. Temanggung). Implikasinya adalah diperlukannya sarana prasarana yang tidak hanya melayani masyarakat dalam kota tetapi juga melayani masyarakat dalam skala regional Purwomanggung.

Dalam konteks percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019, Kota Magelang menjadi bagian Kawasan Pendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Sekitarnya. Kota Magelang didorong untuk ikut serta dalam pembangunan koridor Pariwisata KSPN Borobudur melalui pengembangan wisata perkotaan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta pembangunan sektor jasa pendukung aktivitas masyarakat di kawasan Purwomanggung, serta memberikan dukungan konektivitas pergerakan antar Pulau Jawa bagian Utara dan Selatan. Peran Kota Magelang untuk dapat memberikan pelayanan perkotaan skala regional ini perlu terus dikuatkan.

Terdapat beberapa proyek yang berlokasi di Kota Magelang yang merupakan amanah dari Perpres 79 tahun 2019 dengan status proyek hingga tahun 2024 sebagai berikut.

*Tabel 4.16 Status Proyek Perpres 79 Tahun 2019 Hingga Tahun 2024*

| No | No Urut Lamp Perpes | Program/Proyek | Kabupaten/Kota | Nilai Investasi (Rp Miliar) | Sumber dana | Status Proyek | Sektor | Hasil Review BPKP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 4 | Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang | Kota Magelang dan Kab. Magelang | 30.000,00 | KPBU | Konstruksi | Jalan dan Jembatan | Dipertimbangkan tetap **dilanjutkan** |
| **2** | 28 | Pembangunan RSUD Tipe C, Kota Magelang | Kota Magelang | 50 | KPBU | Persiapan | Kesehatan | Dipertimbangkan tetap **dilanjutkan** |
| **3** | 29 | Pembangunan RSUD Rujukan Kanker, Kota Magelang | Kota Magelang | 900 | KPBU | Persiapan | Kesehatan | Diusulkan **dikeluarkan** |
| **4** | 18 | Pembangunan TPA / TPST Regional, Kab. Magelang | Kab. Magelang | 200 | KPBU | Perencanaan | Persampahan | Dipertimbangkan tetap **dilanjutkan** |
| **5** | 2 | Revitalisasi Sempadan S. Progo (*river amenity*) | Kab. Magelang dan Kota Magelang | 50 | APBN | Persiapan | Sumber Daya Air (SDA) | Dipertimbangkan tetap **dilanjutkan** |
| **6** | 23 | Peningkatan Terminal Tipe A Tidar | Kota Magelang | 50 | APBN | Konstruksi | Transportasi | **Selesai** |
| **7** | 5 | Reaktivasi pembangunan jalur KA Semarang- Ambarawa-Magelang-Borobudur, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Magelang dan Kota Magelang | Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Magelang dan Kota Magelang | 11.093,00 | KPBU | Perencanaan | Transportasi | Dipertimbangkan tetap **dilanjutkan** |

*Sumber: Rakor Percepatan Pelaksanaan dan Keberlanjutan Proyek Prioritas Nasional 2024*

Progres kesiapan proyek-proyek nasional yang berlokasi di Kota Magelang dan masih memerlukan dukungan dalam RKPD 2025 adalah:

1. Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang

   Kewenangan proyek ini berada di Pemerintah Pusat dengan progres hingga akhir tahun 20232 telah dilaksanakan pembebasan lahan di Kota Magelang. Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Bawen-Jogja terdiri dari 6 seksi yaitu seksi 1 ruas Ruas Sleman-Banyurejo, seksi 2 ruas Banyurejo-Borobudur, seksi 3 ruas Borobudur-Magelang, seksi 4 ruas Magelang-Temanggung, seksi 5 ruas Temanggung-Ambarawa, serta seksi 6 ruas Ambarawa Bawen.

   Untuk progres pembangunan fisik Jalan Tol Bawen-Jogja secara keseluruhan hingga tahun 2023 sudah dilakukan pembangunan fisik pada seksi 1 dan seksi 6 yang ditargetkan akhir kuartal IV tahun 2024 selesai untuk kedua ruas seksi tersebut dan dilanjutkan pembangunan fisik pada seksi 2. Sementara Exit Jalan Tol di Kota Magelang masuk Seksi 3 dan 4 yang pembangunan fisik diperkirakan setelah seksi 2. Pembangunan yang berada di dalam wilayah administrasi Kota Magelang berupa exit jalan tol. Dimana kewenangan berada pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini terlibat melalui DPUPR terlibat dalam pendataan bangunan yang terdampak untuk pembebasan lahan dengan koordinator di BPN Kantah Magelang. Progres hingga 2023 sudah dilakukan penetapan lokasi exit jalan tol serta penetapan dan pembebasan lahan milik warga yang terdampak.
2. Pembangunan RSUD Tipe C, Kota Magelang yang hingga tahun 2023 belum didukung persiapan pelaksanaan proyek. Pada tahun 2024 perlu dilakukan kajian keberlanjutan rencana proyek apakah memang layak dilanjutkan pada lokasi di eks Gedung Kantor Disporapar Kota Magelang di Jl. Jend. Gatot Soebroto Magelang.
3. Pembangunan RSUD Rujukan Kanker Kota Magelang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan hingga 2023 belum ada perencanaan dan persiapan proyek. Berdasarkan hasil reviu BKPK dipertimpangkan untuk dikeluarkan dari proyrk prioritas.
4. Pembangunan TPA/TPST Regional berada di Kabupaten Magelang. Dukungan Pemerintah Kota Magelang untuk pembangunan TPST Regional Magelang adalah pengadaan lahan untuk akses jalan dan jembatan ke lokasi proyek. Progres yang sudah dilakukan hingga tahun 2023 adalah penyelesaian pengadaan lahan untuk abuntment Jembatan Rejosari/Kramat Utara dan persiapan pengadaan tanah pelebaran Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jl. Rambutan dengan pembangunan fisik dilakukan tahun 2024.

5. Revitalisasi Sempadan S. Progo (*river amenity*) yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan hingga tahun 2023 belum dilakukan persiapan namun berdasakan hasil rekomendai BPKP dipertimbangkan untuk tetap dilanjutkan.
6. Peningkatan Terminal Tipe A Tidar Magelang yang pada tahun 2023 sudah mulai dilaksanakan pembangunan fisik. Pembangunan dilakukan hingga tahun 2024 sudah selesai dan beroperasi.
7. Reaktivasi pembangunan jalur KA Semarang- Ambarawa-Magelang-Borobudur, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Magelang dan Kota Magelang dengan catatan pelaksanaan:
   a. Merupakan program dalam RIPNAS Nomor KP 2028/2018 Yogya-Magelang-Ambarawa dan Kedungjati-Ambarawa.
   b. Studi Investigasi desain dan Studi Kelayakan jalur Yogya-Magelang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
   c. Reaktivasi pembangunan jalur KA belum dapat dilaksanakan dikarenakan dalam jangka pendek belum menjadi prioritas.

Selain proyek nasional yang tertuang dalam Perpres 79 tahun 2019, Kota Magelang juga menjadi lokus proyek strategis nasional pembangunan *Flyover* Canguk yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 melalui Perpres RI Nomor 18 Tahun 2020. Target dalam RPJMN pelaksanaan di tahun 2024 dan 2024 (selesai) sebesar Rp. 53.900.000.000,00 (Lima PuluhTiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) melalui proyek prioritas pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan dengan pelaksana Kementerian PUPR. Pembiayaan pembangunan Flyover Canguk menggunakan dana LOAN ADB melalui program Indonesia *Tourism Development Project* (ITDP). Proyek *Flyover* Canguk bertujuan mendukung pengembangan pariwisata di KSPN Borobudur sejalan dengan tujuan dari program ITDP adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata;
2. Memperkuat keterkaitan perekonomian lokal dengan pariwisata;
3. Mendorong investasi swasta di wilayah destinasi wisata prioritas.

Pembebasan lahan dilakukan mulai tahun 2022 melalui APBN dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp. 64.395.000.000,00 dan konstruksi direncanakan tahun 2024 dengan estimasi anggaran Rp. 94.000.000.000,00. Fisik pembangunan ditargetkan selesai tahun 2024 sejalan dengan perjanjian *loan* program ITDP dari ADB yang berakhir pada tahun 2024.

## 4.4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2025

Sesuai dengan pokok-pokok intervensi kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana yang tertuang dalam RKP 2025, arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah dilakukan dengan strategi:

- Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang dengan sistem *Online Single Submission* (OSS).
- Optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah) Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
- Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya
- Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah
- Percepatan reforma agraria, penuntasan sertifikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital

Pemenuhan Infrastruktur dan pelayanan dasar dilakukan melalui strategi:

- Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA) dan akses SMP/MTs/sederajat, atau SMA/MA/sederajat bagi provinsi dengan capaian PAUD yang cukup tinggi;
- Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat, dan Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola;
- Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
- Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran;
- Pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi;
- Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (*nature-based solution*) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air;
- Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana;
- Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital;
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular;
- Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim.

Pada tahun 2025 perencanaan pembangunan infrastruktur di Kota Magelang dilakukan untuk mendukung terwujudnya Kota Magelang yang Maju dan Masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya. Pembangunan infrastruktur Kota Magelang diarahkan pada seluruh urusan pembangunan terutama yang terkait dengan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan untuk memenuhi *mandatory spending* bidang infrastruktur pelayanan publik sebesar 40%. Pembangunan infrastruktur direncanakan pada urusan yang berdampak langsung pada masyarakat diantaranya pengembangan jaringan jalan baik jalan kota maupun jalan lingkungan untuk mendukung konektivitas antar kawasan maupun keluar wilayah.

Pengembangan infrastruktur pada urusan perumahan dan permukiman dilakukan dengan perbaikan pada rumah tidak layak huni yang berada pada kawasan kumuh. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal di Kota Magelang yang memiliki lahan terbatas dilakukan dengan pembangunan RUSUNAMI. Pengembangan infastruktur pengelolaan sampah direncanakan dengan pengembangan TPST 3R Bojong menggunakan pendanaan non APBD. Selain itu dalam rangka mendukung program prioritas provinsi yaitu pengembangan sarana TPST Regional di Kabupaten Magelang, Kota Magelang berkontribusi dalam peningkatan akses jalan menuju Jembatan Rejosari dengan melakukan pelebaran pada Jalan Rambutan dan Jalan Perintis Kemerdekaan yang dilakukan pada tahun 2024.

Dalam mendukung pemenuhan SPM juga direncanakan pengembangan sarana sanitasi dan peningkatan akses air minum. Pengembangan sarana sanitasi dilakukan dengan pembangungan SPALDS dan SPALDT terutama pada lingkungan permukiman padat penduduk. Peningkatan akses air minum dilakukan dengan pengembangan sambungan perpipaan mapun SPAM berbasis masyarakat. Selain itu untuk mendukung sumber air bersih di dalam kota juga mulai dikembangkan pembangunan sarana prasarana pada lokasi mata air Sir Punganten.

Pada tahun 2025 juga akan dimulai pembangunan Gedung Balaikota yang baru yang dilaksanakan secara *multiyears* dimana dalam pembiayaannya pemerintah Kota Magelang telah membentuk dana cadangan setiap tahun selama lima tahun.

## 4.5 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim;

(14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Target dari masing-masing tujuan juga telah diinternalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dukungan terhadap pencapaian TPB ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang, meskipun tidak semua tujuan (Tujuan 7, Tujuan 14, Tujuan 15, dan Tujuan 17) dapat didukung karena tidak ada dalam lingkup Kota Magelang. Pemerintah berupaya mendorong, memfasilitasi dan bekerja sama dengan aktor nonpemerintah yaitu masyarakat sipil, mitra pembangunan, filantropi, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keterkaitan sasaran, prioritas, termasuk program terhadap pencapaian TPB disajikan pada tabel berikut.

*Tabel 4.17 Keterkaitan Sasaran, Prioritas terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 di Kota Magelang*

| No | Sasaran Kota Magelang | Prioritas Tahun 2025 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1** | Meningkatnya toleransi | Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat | Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh | • Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan<br>• Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br>• Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya<br>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesbangpol |
| **1.1.2** | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum | | | • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satpol PP |
| **1.1.3** | Meningkatnya stabilitas daerah | | | • Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya<br>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesbangpol |
| **1.1.4** | Meningkatnya penguatan kebudayaan | | | • Program Pengembangan Kebudayaan<br>• Program Pengembangan Kesenian Tradisional<br>• Program Pembinaan Sejarah<br>• Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya<br>• Program Pengelolaan Permuseuman | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| **1.1.5** | Meningkatkan partisipasi | Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | | • Program Peningkatan Kerja Sama Desa | DPMP4KB |

| No | Sasaran Kota Magelang | Prioritas Tahun 2025 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | masyarakat dalam pembangunan | | | • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | |
| **2.1.1** | Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing | Pemantapan kesejahteraan masyarakat | Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas | • Pogram Pengelolaan Pendidikan<br>• Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| | | | | • Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan & Arsip |
| **2.1.2** | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | | Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera | • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman<br>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | | • Program Pengendalian Penduduk<br>• Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)<br>• Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | DPMP4KB |
| **2.1.3** | Meningkatnya daya beli masyarakat | | Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | • Program perencanaan tenaga kerja<br>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>• Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | • Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | DPMP4KB |
| | | | | • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)<br>• Program Pengembangan Umkm | DPPKUM |
| | | | | • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Disporapar |

| No | Sasaran Kota Magelang | Prioritas Tahun 2025 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | |
| **2.1.4** | Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan | | Tujuan 5 Kesetaraan Gender | • Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan<br>• Program Perlindungan Perempuan<br>• Program Peningkatan Kualitas Keluarga<br>• Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak<br>• Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | DPMP4KB |
| **3.1.1** | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Pemantapan layanan publik prima | Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh | • Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesbangpol |
| **3.1.2** | Menciptakan birokrasi yang kapabel | | | • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Sekretariat Daerah |
| **3.1.3** | Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel | | | • Program Penyelenggaraan Pengawasan<br>• Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Inspektorat |
| | | | | • Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | BPKAD |
| | | | | • Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>• Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bapperida |
| | | | | • Program Pengelolaan Arsip<br>• Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Dinas Perpustakaan & Arsip |
| | | | | • Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Kominsta |
| **4.1.1** | Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan | Percepatan peningkatan kontribusi sektor | Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha | DPPKUM |

| No | Sasaran Kota Magelang | Prioritas Tahun 2025 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | unggulan dalam perekonomian daerah | | Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)<br>• Program Pengembangan Umkm | |
| **4.1.2** | Meningkatnya pertumbuhan investasi | | | • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal<br>• Program Promosi Penanaman Modal<br>• Program Pelayanan Penanaman Modal | DPMPTSP |
| **4.1.3** | Meningkatnya angka kunjungan wisatawan | | | • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>• Program Pemasaran Pariwisata<br>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Disporapar |
| **4.1.4** | Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial | Pemantapan kesejahteraan masyarakat | Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan | • Program Pemberdayaan Sosial<br>• Program Rehabilitasi Sosial<br>• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin | Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan | • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | DPUPR |
| | | | | • Program perencanaan tenaga kerja<br>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>• Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja |
| **4.1.5** | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah | Pemantapan daya saing daerah | Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | • Program perencanaan tenaga kerja<br>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>• Program Penempatan Tenaga Kerja<br>• Program Hubungan Industrial | Dinas Tenaga Kerja |

| No | Sasaran Kota Magelang | Prioritas Tahun 2025 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.5** | Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro | | | • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>• Program Pemasaran Pariwisata<br>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Disporapar |
| | | | | • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)<br>• Program Pengembangan Umkm | DPPKUM |
| **5.1.1** | Meningkatnya kualitas infrastruktur kota | Penguatan perwujudan ruang kota layak huni | Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur | • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)<br>• Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional<br>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase<br>• Program Penyelenggaraan Jalan<br>• Program Pengembangan Jasa Konstruksi | DPUPR |
| **5.1.2** | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | | Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | DPUPR |
| **5.1.3** | Meningkatnya aksesibilitas perkotaan | | Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur | • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Dinas Perhubungan |
| **5.1.4** | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | | Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak | • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | DPUPR |
| | | | | • Program Pengembangan Perumahan<br>• Program Kawasan Permukiman<br>• Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman |
| **5.1.5** | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan | | Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan | • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)<br>• Program Pengelolaan Persampahan | DLH |

| No | Sasaran Kota Magelang | Prioritas Tahun 2025 | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.2.1** | Meningkatnya ketahanan terhadap bencana | Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat | Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim | • Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | | | | • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)<br>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase<br>• Program Penataan Bangunan Gedung<br>• Program Pengembangan Jasa Konstruksi<br>• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | DPUPR |
| | | | | • Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)<br>• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)<br>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | DLH |
| **5.2.2** | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | | Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab | • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat<br>• Program Penanganan Kerawanan Pangan<br>• Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Pertanian & Pangan |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

## 4.6 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG TARGET PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Magelang tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses dan kontrol agar mampu berpartisipasi secara bermakna, dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah dimandatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS). Pengarusutamaan gender dan inklusi

sosial dilaksanakan sejalan dengan etika, moral, nilai budaya yang positif, serta norma agama, yang berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pengintegrasian dalam pelaksanaan program untuk mendukung pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah, dimana setiap perangkat daerah menyiapkan program kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender dan inklusi sosial yang didukung dengan menyusun *Gender Budget Statement* (GBS).

Berikut disampaikan sasaran dan prioritas serta program yang mendukung pengarusutamaan gender di Kota Magelang Tahun 2025.

*Tabel 4.18 Dukungan Program terhadap Pengarusutamaan Gender di Kota Magelang*

| No | Sasaran | Prioritas | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.4** | Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan | Pemantapan kesejahteraan masyarakat | Indeks Pembangunan Gender | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | DPUPR |
| | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | DPUPR |
| | | | | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman |
| | | | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satpol PP |
| | | | | Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Satpol PP |
| | | | | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial |
| | | | | Program perencanaan tenaga kerja | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | DPMP4KB |
| | | | | Program Perlindungan Perempuan | DPMP4KB |
| | | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | DPMP4KB |

| No | Sasaran | Prioritas | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | DPMP4KB |
| | | | | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | DPMP4KB |
| | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Pertanian & Pangan |
| | | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Program Pendaftaran Penduduk | Disdukcapil |
| | | | | Program Pencatatan Sipil | Disdukcapil |
| | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | DPMP4KB |
| | | | | Program Pengendalian Penduduk | DPMP4KB |
| | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | DPMP4KB |
| | | | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | DPMP4KB |
| | | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Dinas Perhubungan |
| | | | | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Kominsta |
| | | | | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | DPPKUM |
| | | | | Program Pengembangan Umkm | DPPKUM |
| | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Disporapar |
| | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Disporapar |
| | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Diskominsta |
| | | | | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| | | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| | | | | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan & Arsip |

| No | Sasaran | Prioritas | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Pertanian & Pangan |
| | | | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Pertanian & Pangan |
| | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Disporapar |
| | | | | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian & Pangan |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

## 4.7 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN KERENTANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Penanggulangan bencana menjadi salah satu isu strategis dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan Metadata Indikator TPB Edisi II Tahun 2023, pengurangan risiko bencana termuat dalam Tujuan 1, Tujuan 11, dan Tujuan 13. Pada tujuan 13 langsung berfokus pada penanganan perubahan iklim. Sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim disajikan pada Tabel 4.19.

*Tabel 4.19 Dukungan Program terhadap Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim*

| No | Sasaran | Prioritas | Indikator | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.2.1** | Meningkatnya ketahanan terhadap bencana | Penguatan ketahanan daerah | Indeks Ketahanan Daerah | Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Satpol PP |
| | | | | Program Penataan Bangunan Gedung | DPUPR |
| | | | | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | DPUPR |
| | | | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | DPUPR |
| | | | | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perkim |
| | | | | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas Perkim |
| | | | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Dinas Perkim |
| | | | | Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial |
| | | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | DLH |
| | | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | DLH |
| | | | | Program Pengelolaan Persampahan | DLH |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, peningkatan ketahanan daerah terus diupayakan untuk ditingkatkan. Beberapa kondisi terkait peningkatan ketahanan daerah sampai dengan tahun 2024 diantaranya:

- Kajian Risiko Bencana telah disusun tetapi masih ada proses revisi;
- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan periode 2019-2023 belum dilakukan pembaruan di tahun 2024;
- Rencana kontingensi telah disusun untuk cuaca ekstrem dan tanah longsor di tahun 2023, dan tahun 2025 dilakukan penyusunan rencana kontingensi sebanyak 2 dokumen;
- Pembinaan kelurahan Tangguh bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.

## 4.8 SASARAN DAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat menerima pelayanan dasar dengan mutu tertentu, menjadi salah satu dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dan menentukan anggaran berbasis kinerja serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum;
4. Bidang Perumahan Rakyat;
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Bidang Sosial.

Upaya pemenuhan SPM dilaksanakan melalui beberapa program di perangkat daerah. Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

*Tabel 4.20 Dukungan Program terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal*

| No | Bidang SPM/ Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Bidang Pendidikan** | | | | |
| **1.1** | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | • Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing | • Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>• Pemantapan layanan publik prima<br>• Pemantapan daya saing daerah | • Program Pengelolaan Pendidikan<br>• Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |
| **1.2** | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar | | | |
| **1.3** | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | | | |
| **2** | **Bidang Kesehatan** | | | | |
| **2.1** | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | • Meningkatnya kualitas | | • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan |

| No | Bidang SPM/ Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.2** | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | kesehatan masyarakat | • Pemantapan kesejahteraan masyarakat<br>• Pemantapan layanan publik prima<br>• Pemantapan daya saing daerah | Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| **2.3** | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **2.4** | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **2.5** | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **2.6** | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **2.7** | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **2.8** | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **2.9** | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **2.10** | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **2.11** | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **2.12** | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) | Jumlah warga negara dengan Risiko Terinveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| **3** | **Bidang Pekerjaan Umum** | | | | |
| **3.1** | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | • Meningkatnya kualitas infrastruktur kota | • Penguatan perwujudan | • Program Pengelolaan Dan Pengembangan |

| No | Bidang SPM/ Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | | ruang kota layak huni<br>• Pemantapan layanan publik prima | Sistem Penyediaan Air Minum<br>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah |
| 4 | **Bidang Perumahan Rakyat** | | | | |
| 4.1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | • Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | • Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>• Pemantapan layanan publik prima | • Program Pengembangan Perumahan<br>• Program Kawasan Permukiman |
| 4.2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | | | |
| 5 | **Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | |
| 5.1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | • Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum<br>• Meningkatnya ketahanan terhadap bencana | • Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>• Pemantapan layanan publik prima | • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum<br>• Program Penanggulangan Bencana<br>• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| 5.2 | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | |
| 5.3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | |
| 5.4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | |
| 5.5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | | |
| 6 | **Bidang Sosial** | | | | |
| 6.1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | • Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan | • Pemantapan perlindungan sosial dalam | • Program Rehabilitasi Sosial |

| No | Bidang SPM/ Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Sasaran | Prioritas Pembangunan | Program |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.2** | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | kesejahteraan sosial | penanganan fakir miskin<br>• Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>• Pemantapan layanan publik prima | • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial<br>• Program Pemberdayaan Sosial<br>• Program Penanganan Bencana |
| **6.3** | Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | | | |
| **6.4** | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | | | |
| **6.5** | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | | | |

*Sumber: Tim Penyusun, 2024*

# BAB 5
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mempedomani regulasi yang mengikat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai Visi Misi Kepala Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Mendasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 beserta permasalahan yang dijumpai maka dengan mangacu pada analisis serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, nampaknya memberikan pengaruh pada rencana kerja dan pendanaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini. Perubahan dimaksud secara optimis tidak akan mempengaruhi negative pencapaian indicator kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2025.

## 5.1 RENCANA KERJA

Dengan mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terahir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 sudah harus disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur tersebut. Namun demikian, sehubungan tindak lanjut penyesuaian tugas fungsi perangkat daerah masih dalam proses pembahasan dan tindak lanjut penyesuaian kotak jabatan juga belum dapat dilaksanakan, maka program dan kegiatan rencana kerja perangkat daerah akan disesuaikan setelah tindak lanjut penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur ditetapkan.

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah dengan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga penjabaran program dibedakan menjadi tiga prioritas, yaitu:

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun kelima RPJMD Tahun 2021-2026, yang dalam hal tahun 2025 merupakan tahun transisi yang pada RKPD P 2025 sudah harus mengakomodir program unggulan kepala daerah terpilih, kesepakatan hasil musrenbang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, hasil telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Forum Konsultasi Publik, Program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, dan hasil hasil Konsultasi Publik serta Focus Group Discussion (FGD).
2. Prioritas II, Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana tertuang RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.
3. Prioritas III, Merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

### 5.1.1 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2025

Tema RKP pada 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Bekelanjutan. Dukungan program RKPD terhadap Arah kebijakan RKP tertuang dalam program daerah beserta penganggarannya. Pemerintah Kota Magelang

sesuai kewenangannya berkomitmen untuk menyusun program yang selaras dengan prioritas nasional pada RKP 2025 sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Terhadap delapan arah kebijakan RKP 2025, Pemerintah Kota Magelang melalui program RKPD 2025 fokus mendukung tujuh Prioritas Nasional sesuai kewenangannya. Untuk mendukung relevansi tersebut RKPD Kota Magelang Tahun 2025 memiliki 134 (seratus dua puluh tiga) program yang mendukung. Rekapitulasi dukungan program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 terhadap Arah Kebijakan RKP 20245tersaji dalam tabel 5.1 berikut ini.

*Tabel 5.1 Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kota Magelang terhadap Arah Kebijakan dalam RKP Tahun 2025*

| No | Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 | Arah Kebijakan | Jumlah Program Mendukung | Presentase Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara | 12 | 4.45 | Kecamatan, Kesbangpol. Dinsos, DPM4KB |
| | | Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme | | | |
| | | Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku | | | |
| | | memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya | | | |
| | | Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya | | | |
| | | Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan | | | |
| 2 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru | Penguatan keamanan negara | 23 | 16.82 | Disperta, DLH, DPUPR, Satpol PP, Kecamatan, Kesbangpol Bapperida. |
| | | Swasembada pangan | | | |
| | | Pekerjaan Hijau | | | |
| 3 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industridi Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pembangunan infrastruktur | 28 | 8.07 | DPPKUM, Disnaker, DPMPTSP, Disperta, Disporapar, DPUPR, Disperkim, Dishub. |
| | | Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya | | | |
| | | Mengembangkan industri kreatif | | | |
| | | Penguatan Koperasi | | | |

| No | Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 | Arah Kebijakan | Jumlah Program Mendukung | Presentase Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 17 | 24.04 | Kecamatan, Disporapar, Disperpusip, DPMP4KB, Dinsos, Dinkes, Disdikbud |
| | | Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi | | | |
| | | Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional | | | |
| | | Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | | | |
| | | Meningkatkan Prestasi Olahraga | | | |
| 5 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru | 13 | 3.89 | DPPKUM, Disnaker, DPMPTSP, Disporapar, DPPKUM |
| | | Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional | | | |
| | | Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global | | | |
| 6 | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pembebasan Kemiskinan | Membangun desa dan membangun dari desa; | 13 | 27.80 | Disdikbud, Dinsos, Dinkes, Kecamatan, DPMP4KB, Disperkim |
| | | Pemerataan ekonomi | | | |
| | | Memberantas kemiskinan | | | |
| 7 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembeantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | Reformasi hukum | 9 | 6.56 | Satpol PP, Diskominsta, BPKAD, Inspektorat |
| | | Reformasi tata kelola pemerintahan | | | |
| 8 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | Masyarakat adil, makmur, dan harmonis | 19 | 8.38 | Kecamatan, DLH, DPUPR, Kesbangpol, Disdikbud, DPM4KB, BPBD |
| | | Melestarikan budaya | | | |
| | | Penanganan bencana | | | |
| | **Jumlah** | | **123** | **100** | |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2024*

Rincian program, kegiatan dan pagu anggaran dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2025 yang mendukung masing-masing Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025, sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut ini.:

*Tabel 5.2 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| • Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya Masyarakat<br>• Perwujudan layanan publik prima<br>• Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100% | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS) | Kecamatan |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU) | Kecamatan |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT) | Kecamatan |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Konflik Sosial | 0 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesbangpol |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 60.38% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesbangpol |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik | 51.18% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Badan Kesbangpol |
| | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Oganisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan | 65,04% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Badan Kesbangpol |
| | | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | 86,99% | | |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 10.06% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Badan Kesbangpol |
| | Program Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)* | 0,01% | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | DPM4KB |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak | 61.29% | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | DPM4KB |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 17,54 % | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | DPM4KB |
| | | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | 23,03 % | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | DPM4KB |
| | | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | 24% | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | DPM4KB |
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang menerima bantuan | 100% | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS yang diberdayakan | 83,33% | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi | 100,00% | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | DINSOS |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.3 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.*

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| • Pemantapan kesejahteraan Masyarakat | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 10.06% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Badan Kesbangpol |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| • Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>• Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>• Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah<br>• Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>• Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya Masyarakat<br>• Pemantapan layanan publik prima<br>• Pemantapan daya saing daerah | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah total produksi olahan perikanan (ton) | 238 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian | 57.50% | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Persentase Peningkatan prasarana Peternakan | 14.29% | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian | 57.50% | Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Persentase Peningkatan prasarana Peternakan | 14.29% | Pembangunan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani | 100.00% | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala | 100.00% | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya | 12,00% | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Persentase kelompok tani yang naik kelas | 24,00% | | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Presentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik | 85% | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | DPPKUM |
| | | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase koefisien variasi harga antar waktu | 8% | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | DPPKUM |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Preentase Ketersediaan Pangan | 100% | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan | 66.67% | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pangan Segar yang Aman | 95.51% | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | 100% | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | 44.67% | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Lingkungan Hidup |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 24,14% | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat | 11.98% | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan | 100.00% | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan persentase sampah yang terkelola | 3.00% | Pengelolaan Sampah | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik | 81.00% | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | DPUPR |
| | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase penyelesaian pelanggaran perda | 100.00% | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Satpol PP |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100.00% | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS) | Kecamatan |
| | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU) | |
| | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT) | |
| | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100.00% | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bapperida |
| | | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 100.00% | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100.00% | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase progres fisik seluruh OPD | 99.60% | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Setda |
| | | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan | 100.00% | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | |
| | | Tingkat kematangan UKPBJ | 3 | | |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD 2025*

*Tabel 5.4 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastuktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi*

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| • Pemantapan kesejahteraan Masyarakat<br>• Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah<br>• Penguatan perwujudan ruang kota layak huni<br>• Pemantapan daya saing daerah | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan | 55.00% | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | DPPKUM |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan | 52,82% | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | DPPKUM |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 75,83% | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Dinas Tenaga kerja |
| | | Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja | 82,53% | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja | 84,45% | Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Tenaga kerja |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha | 70,00% | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Dinas Tenaga kerja |
| | Program Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 45.00% | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Tenaga kerja |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Investor PMA/PMDN | 100.00% | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | |
| | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase LOI yang ditindaklanjuti | 100.00% | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP | 96.38% | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | DPMPTSP |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku | 30.00% | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, informasi, dan Sistem Informasi PM | 10.60% | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 1 | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | |
| | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah total produkso olahan perikanan | 238 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara | 11,11% | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota | 13,33% | | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Presentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya | 9.35% | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Disporapar |
| | | Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | 33.33% | | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Presentase sarana pembibitan yang terpelihara | 73.51% | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Presentase peningkatan sarana peternakan | 14.29% | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian | 57,50% | Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Persentase Peningkatan prasarana Peternakan | 14,29% | Pembangunan Prasarana Pertanian | |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Presentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan | 7% | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | Presentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH | 3.36% | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Presentase luasan lahan bencana petanian yang tertangani | 100.00% | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala | 100.00% | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Presentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya | 12.00% | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian dan Pangan |
| | | Presentasi kelompok tani yang naik kelas | 24.00% | | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Presentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik | 85.19% | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | DPPKUM |
| | | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase koefisien variasi harga antar waktu | 8.00% | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | DPPKUM |
| | Program Pengembangan Ekspor | Nilai ekspor | 3.421.982 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | DPPKUM |
| | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase Alat-alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 94.42% | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | DPPKUM |
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | 1.99% | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | DPPKUM |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 83.40% | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | DPUPR |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Program Penatagunaan Tanah | Presentase luas lahan bersertifikat | 99.00% | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) | 0.76 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Dinas Perhubungan |
| | | Pengguna moda transportasi umum perkotaan (PPTUK) | 6.81 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | |
| | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | |
| | | | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | |
| | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.5 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas*

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| • Pemantapan kesejahteraan Masyarakat<br>• Pemantapan peran Masyarakat sebagai mitra<br>• Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin<br>• Pemantapan pelayanan publik | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100.00% | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS) | Kecamatan |
| | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU) | |
| | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT) | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100.00% | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMS) | Kecamatan |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMU) | |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMT) | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan | 85.11% | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | | Persentase peningkatan pemuda yang dibina | 29.71% | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase pemerataan layanan perpustakaan | 60,00% | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Disperpusip |
| | | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan | 51,00% | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan | 70,41% | | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan | 0 | | |
| | | Persentase Perpustakaan ber-SNP | 50,00% | | |
| | | Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan | 25,69% | | |
| | | Persentase peningkatan anggota perpustakaan | 31,61% | | |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB | 73.00% | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | DPMP4KB |
| | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak | 61.29% | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | DPMP4KB |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan | 100% | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | DPMP4KB |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Presentase PSKS yang diberdayakan | 83.33% | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Dinsos |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi | 100% | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Dinsos |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| | | | 100% | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Dinsos |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Presentase PSKS yang menerima bantuan | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase program perangkat daerah yang responsif gender | 17,54 % | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | DPMP4KB |
| | | Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga | 23,03 % | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | 24% | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan | 22,22% | | |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Persentase PD yang mengelola data gender dan anak | 28,57% | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DPMP4KB |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri | 94% | Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dinkes |
| | | | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular | 100% | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Dinkes |
| | | Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular | 100% | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100% | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100% | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100% | | |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% | | |
| | | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar | 100% | | |
| | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | 100% | | |
| | | Indeks Keluarga Sehat | 100% | | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi) | 100.00% | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Dinkes |
| | | | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD | 98,00% | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| | | APM SD/ MI | 100,00% | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | APK SD/ MI | 100,00% | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,00% | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | | APM SMP/MTs | 100,00% | | |
| | | APK SMP/MTs | 100,00% | | |
| | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,00% | | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan | 100,00% | | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | 95,24% | | |
| | | Persentase SD Terakreditasi | 100,00% | | |
| | | Persentase SMP Terakreditasi | 100,00% | | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi | 100,00% | | |
| | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum | 100.00% | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.6 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri*

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan | 52,82% | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | DPPKUM |
| | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 75,83% | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja | 82,53% | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja | 84,45% | Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha | 70,00% | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 45.00% | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Tenaga Kerja |
| | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Investor PMA/PMDN | 100.00% | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | |
| | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase LOI yang ditindaklanjuti | 100.00% | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP | 96.38% | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | DPMPTSP |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku | 30.00% | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, informasi, dan Sistem Informasi PM | 10.60% | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara | 11,11% | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota | 13,33% | | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Presentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya | 9.35% | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Disporapar |
| | | Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | 33.33% | | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Presentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik | 85.19% | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | DPPKUM |
| | | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | 1.99% | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | DPPKUM |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.7 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan*

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| • Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah<br>• Pemantapan perlindungan social dalam penanganan fakir miskin<br>• Pemantapan layanan public prima | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Presentase PSKS yang menerima bantuan | 200% | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Dinsos |
| | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD | 98,00% | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | APM SD/ MI | 100,00% | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | APK SD/ MI | 100,00% | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,00% | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | |
| | | APM SMP/MTs | 100,00% | | |
| | | APK SMP/MTs | 100,00% | | |
| | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,00% | | |
| | | Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan | 100,00% | | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | 95,24% | | |
| | | Persentase SD Terakreditasi | 100,00% | | |
| | | Persentase SMP Terakreditasi | 100,00% | | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi | 100,00% | | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum | 100.00% | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular | 100% | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Dinkes |
| | | Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular | 100% | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100% | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100% | | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100% | | |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% | | |
| | | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar | 100% | | |
| | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | 100% | | |
| | | Indeks Keluarga Sehat | 100% | | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi) | 100.00% | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Dinkes |
| | | | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Pemberdayaan Sosial | Presentase PSKS yang diberdayakan | 83.33% | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Dinsos |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi | 100% | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Dinsos |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB | 73.00% | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | DPMP4KB |
| | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100.00% | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMS) | Kecamatan |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMU) | |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KMT) | |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMS) | |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMU) | |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (KMT) | |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMU) | |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMS) | |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (KMT) | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100.00% | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMS) | Kecamatan |
| | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMU) | |
| | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (KMT) | |
| | Program Kawasan Permukiman | Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditata | 100% | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | DISPERKIM |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani | 80,41% | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | DISPERKIM |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 99,03% | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | DISPERKIM |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.8 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan*

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| • Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra<br>• penguatan ketahanan daerah dan sosial bud social rakat<br>• pemantapan layanan public prima | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase penyelesaian pelanggaran perda | 100.00% | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Satpol PP |
| | | | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | |
| | | | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | |
| | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Tingkat keterbukaan Informasi Publik | 5 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Diskominsta |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| • pemantapan daya saing daerah | Program Aplikasi Informatika | Presentase pemanfaatan aplikasi informatika | 100% | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Diskominsta |
| | | | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi | 109 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Diskominsta |
| | | Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi | 61 | | |
| | | Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi | 61 | | |
| | | Nilai Pengelolaan Aset Informasi | 138 | | |
| | | Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi | 72 | | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran | 100% | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | BPKAD |
| | | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan | 100% | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | |
| | | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi | 100% | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Cakupan pengelolaan barang milik daerah | 100% | Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKAD |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Presentase penyelenggaraan pengawasan | 96% | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Inspektorat |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Presentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi | 85% | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Inspektorat |
| | | | | Pendampingan dan Asistensi | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100% | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS) | Kecamatan |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU) | |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT) | |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.9 Dukungan Program-Kegiatan Pemerintah Kota Magelang terhadap Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur*

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100% | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMS) | Kecamatan |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMU) | |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KMT) | |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati | 31.33% | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | DLH |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3 | 83,33% | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | DLH |
| | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | 46.67% | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | DLH |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 24.14% | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DLH |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Presentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat | 11.98% | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DLH |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan | 100% | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | DLH |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan persentase sampah yang terkelola | 3.00% | Pengelolaan Sampah | DLH |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik | 81.00% | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | DLH |
| | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | 100% | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | DLH |
| | | | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 10.06% | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | DLH |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | 100% | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 92% | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Prioritas RKPD Kota Magelang 2025 | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Pembinaan Sejarah | Cakupan pembinaan sejarah | 77.78% | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 24% | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase peningkatan kunjungan museum | 54.13% | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan | 100% | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | DPM4KB |
| | Program Penanggulangan Bencana | Persentase layanan penanggulangan bencana | 100% | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD |
| | | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | |
| | | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | |
| | | | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

### 5.1.2 Program Prioritas I

#### 5.1.2.1 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2024 Terhadap Program Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025

Pelaksanaan program-program prioritas yang merupakan penerjemahan Visi Misi RPJMD tahun 2021-2026, harus sudah direncanakan secara utuh dalam RKPD Kota Magelang sesuai dengan pentahapan tahun 2024 untuk mencapai Visi *Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia*. Dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait agar program dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah isu global yang harus dipastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sudah diintegrasikan ke dokumen perencanaan sudah ditindak lanjuti dengan program kegiatan dalam rangka upaya mencapai target tahunan menuju target akhirnya di tahun 2030. Demikian pula dengan program dan kegiatan untuk melaksanakan amanat PP 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan Kota Magelang, dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut guna mendapatkan hasil pembangunan yang implementatif dan tepat sasaran serta langsung berdampak pada masyarakat. Pihak yang terlibat diantaranya segenap Perangkat Daerah, lembaga non pemerintahan, Swasta, Akademisi, maupun masyarakat dan komunitas yang ada di Kota Magelang serta media massa.

Prioritas pembangunan Kota Magelang tahun 2024 berfokus pada Penguatan peran masyarakat sebagai mitra, Perluasan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin, Penguatan daya saing daerah, Penguatan daya saing daerah, Pemantapan ketahanan sosial budaya dan toleransi masyarakat, Perwujudan layanan publik prima, Penguatan dan pengembangan kawasan strategis serta Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM. Gambaran prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

*Tabel 5.10 Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025*

| No | Prioritas Kota Magelang Tahun 2025 | Jumlah Program Mendukung | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat | 6 | Disnaker, DPMP4KB, DKK, DPPKUM, DPPKUM |
| 2 | Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra | 7 | DPMP4KB, Disperkim, Setda (Bagian Kesra) |
| 3 | Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin | 9 | Disperkim, Dinsos, Bapperida |
| 4 | Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan | 13 | DPPKUM, Disporapar, Dishub, DPUPR, DLH, Bapperida, DMPM4KB |
| 5 | Penguatan perwujudan ruang kota layak huni | 5 | Disperkim, DPUPR, DLH, Satpol PP |
| 6 | Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat | 6 | Satpol PP, Kesbangpol |
| 7 | Pemantapan Layanan Publik Prima | 11 | Dinsos, DKK, Diskominsta, Bapperida, BPKAD, Inspektorat |
| 8 | Pemantapan daya saing daerah | 16 | Disperindag, BPKAD, Disporapar, Disdikbud, DPMPTSP |
| | **JUMLAH** | **73** | |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.11 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 1 : Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat*

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | |
| | | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | |
| | | | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasu Layanan ULD | |
| | | | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | |
| | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | |
| | | | Job Fair/ Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | |
| 2 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Peatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | |
| | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | |
| | | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas | |
| 3 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembnagan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | DPPKUM |
| | | | Pemulihan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | |
| 4 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antar Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | DPMPTSP |
| | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | |
| 5 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | DINAS KESEHATAN |
| | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | |
| | | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | |
| | | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | |
| | | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenagan Kabupaten/Kota | DPMP4KB |
| | | | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kkebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota | |
| | | | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota | |
| | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota | |
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.12 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 2: Pemantapan Peran Masyarakat Sebagai Mitra*

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | DP4KB |
| | | | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat Kabupaten / Kota | DP4KB |
| | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | DP4KB |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | DP4KB |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | DP4KB |
| | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | DP4KB |
| 2 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | DP4KB |
| 3 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | DP4KB |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | DP4KB |
| 4 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan d | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | DP4KB |
| | | | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | DP4KB |
| 5 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | DP4KB |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | DP4KB |
| 6 | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian | Dinperkim |
| | | | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | Dinperkim |
| 7 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Bagian Kesra Sekda |
| | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Bagian Kesra Sekda |
| | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Bagian Kesra Sekda |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.13 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 3 : Pemantapan Perlindungan Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin*

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengembangan Perumahan | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | |
| 2 | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian | |
| | | | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 3 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 4 | Program Pengembangan Perumahan | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 5 | Program Pemberdayaan Sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| 6 | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase layanan Reh | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| 7 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | | Rujukan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Dinas Sosial |
| | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| 8 | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.14 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 4 : Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam Perekonomian daerah*

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | DPPKUM |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | DPPKUM |
| | | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | DPPKUM |
| 2 | Program Pemberdayaan Umkm | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | DPPKUM |
| | | | Pemulihan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | DPPKUM |
| | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | DPPKUM |
| 3 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | DPPKUM |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | DPPKUM |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | DPPKUM |
| | | | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | DPPKUM |
| 4 | Program Pengembangan Ekspor | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | DPPKUM |
| 5 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | DISPORAPAR |
| | | | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | DISPORAPAR |
| | | | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | DISPORAPAR |
| 6 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | DISPORAPAR |
| | | | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota | DISPORAPAR |
| 7 | Program Pemasaran Pariwisata | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | DISPORAPAR |
| | | | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | DISPORAPAR |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | DISPORAPAR |
| | | | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | DISPORAPAR |
| 8 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | DISHUB |
| | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | DISHUB |
| 9 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | DPUPR |
| 10 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | DLH |
| | | | Pengelolaan Kebun Raya | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | DLH |
| 11 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | BAPPERIDA |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | DMPM4KB |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | DMPM4KB |
| 13 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | DMPM4KB |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.15 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 5 : Penguatan Perwujudan Ruang Kota Layak Huni*

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2 | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4 | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Satpol PP |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkai | Satpol PP |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | Satpol PP |
| | | | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | Satpol PP |
| | | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | Satpol PP |
| 5 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Pengelolaan Keanekaragaman | Pengelolaan Kebun Raya | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Lingkungan Hidup |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.16 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 6 : Penguatan Ketahanan Derah dan Sosial Budaya Masyarakat*

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | SATPOL PP |
| | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | SATPOL PP |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | SATPOL PP |
| | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | SATPOL PP |
| | | | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | SATPOL PP |
| | | | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | SATPOL PP |
| | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | SATPOL PP |
| | | | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | SATPOL PP |
| | | | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | SATPOL PP |
| **2** | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | KESBANGPOL |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | KESBANGPOL |
| | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | KESBANGPOL |
| 3 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | KESBANGPOL |
| | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | KESBANGPOL |
| 4 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | KESBANGPOL |
| | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | KESBANGPOL |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | KESBANGPOL |
| | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | KESBANGPOL |
| | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | KESBANGPOL |
| | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | KESBANGPOL |
| 6 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosia | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | KESBANGPOL |
| | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, | KESBANGPOL |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | |
| | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | KESBANGPOL |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.17 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 7 : Pemantapan Layanan Publik Prima*

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Dinas Kesehatan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Dinas Kesehatan |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dinas Kesehatan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | Dinas Kesehatan |
| | | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Dinas Kesehatan |
| | | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Dinas Kesehatan |
| | | | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan,Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | Dinas Kesehatan |
| | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Dinas Kesehatan |
| | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Dinas Kesehatan |
| 3 | Prorgram Pengelolaan Aplikasi Informatika | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | Diskominsta |
| | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | Diskominsta |
| | | | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Diskominsta |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Diskominsta |
| | | | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | Diskominsta |
| 4 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | Bappeda |
| | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Bappeda |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Bappeda |
| | | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Bappeda |
| | | | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Bappeda |
| 5 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Bappeda |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Bappeda |
| | | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Bappeda |
| | | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Bappeda |
| | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Bappeda |
| | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Bappeda |
| 6 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | BPKAD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | BPKAD |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | BPKAD |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | BPKAD |
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | BPKAD |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | BPKAD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | BPKAD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BPKAD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | BPKAD |
| | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | BPKAD |
| | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | BPKAD |
| | | | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | BPKAD |
| | | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | BPKAD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | BPKAD |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | BPKAD |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | BPKAD |
| | | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | BPKAD |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | BPKAD |
| | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | BPKAD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | BPKAD |
| | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | BPKAD |
| | | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | BPKAD |
| | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | BPKAD |
| 7 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | BPKAD |
| | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | BPKAD |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | BPKAD |
| | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | BPKAD |
| | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | BPKAD |
| | | | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | BPKAD |
| | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BPKAD |
| | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | BPKAD |
| | | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | BPKAD |
| 8 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Inspektorat |
| | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Inspektorat |
| | | | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Inspektorat |
| | | | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Inspektorat |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Inspektorat |
| | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Inspektorat |
| 9 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Inspektorat |
| | | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat |
| | | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Inspektorat |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Inspektorat |
| | | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Inspektorat |
| 10 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | Diskominsta |
| | | | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | Presentase kegiatan statistic sectoral yang rilis tepat waktu | Diskominsta |
| | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistic sectoral yang telah dilengkapi metadata | Diskominsta |
| 11 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Diskominsta |
| | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | Diskominsta |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.18 Dukungan Program Kota Magelang Terhadap Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025 Prioritas 8 : Pemantapan Daya Saing Daerah*

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Disperindag |
| | | | Pemulihan Usaha Mikro | Jasa Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Disperindag |
| | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Disperindag |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Program Pengembangan Umkm | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Disperindag |
| 3 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Disperindag |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Disperindag |
| | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Disperindag |
| | | | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Disperindag |
| 4 | Program Pengembangan Ekspor | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | Disperindag |
| 5 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Disperindag |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Disperindag |
| | | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Disperindag |
| 6 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | BPKAD |
| | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | BPKAD |
| | | | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | BPKAD |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | BPKAD |
| | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | BPKAD |
| | | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | BPKAD |
| | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | BPKAD |
| | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | BPKAD |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | BPKAD |
| | | | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | BPKAD |
| 7 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| 8 | Program Pemasaran Pariwisata | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | | | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | | | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Program Pengembangan Kebudayaan | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Disdikbud |
| 10 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Disdikbud |
| | | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Disdikbud |
| 11 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | Disdikbud |
| | | | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Disdikbud |
| 12 | Program Pengelolaan Permuseuman | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Disdikbud |
| 13 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | DPMPTSP |
| | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| 14 | Program Promosi Penanaman Modal | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| 15 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | DPMPTSP |
| | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | DPMPTSP |
| | | | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | DPMPTSP |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | DPMPTSP |
| **16** | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | DPMPTSP |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

#### 5.1.2.2 Akomodasi Hasil Musrenbang

Hasil musrenbang yang dituangkan ke dalam Berita Acara menggambarkan kebutuhan masyarakat yang disepakati untuk ditindaklanjuti. Perangkat Daerah mengakomodir usulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sesuai dengan batasan dan kriteria kewenangan Perangkat Daerah dan menjadikannya sebagai prioritas usulan yang harus ditindaklanjuti. Adapun hasil Musrenbang Nampak sebagai berikut:

*Tabel 5.19 Akomodasi Hasil Musrenbang*

| Perangkat Daerah | Usulan disetujui | Usulan Ditolak | Grand Total |
|---|---|---|---|
| Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata | 3 | 1 | 4 |
| Dinas Kesehatan | 12 | 13 | 25 |
| Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 24 | 1 | 25 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 2 | - | 2 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 66 | 32 | 98 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 | 3 | 4 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7 | - | 7 |
| Dinas Perhubungan | 34 | 4 | 38 |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 19 | - | 19 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 40 | 52 | 92 |
| Dinas Sosial | 11 | 6 | 17 |
| Dinas Tenaga Kerja | 24 | - | 24 |
| Kecamatan Magelang Selatan | 36 | 1 | 37 |
| Kecamatan Magelang Tengah | 46 | 2 | 48 |
| Kecamatan Magelang Utara | 24 | - | 24 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 10 | - | 10 |
| **Grand Total** | **359** | **115** | **474** |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

*Tabel 5.20 Akomodasi Musrenbang per Kelurahan*

| Nama Kecamatan/Kelurahan | Usulan disetujui | Usulan ditolak | Grand Total |
|---|---|---|---|
| **Magelang Selatan** | **122** | **20** | **142** |
| Jurangombo Selatan | 15 | 8 | **23** |
| Jurangombo Utara | 10 | 6 | **16** |
| Magersari | 23 | 4 | **27** |
| Rejowinangun Selatan | 17 | 2 | **19** |
| Tidar Selatan | 27 | - | **27** |
| Tidar Utara | 30 | - | **30** |
| **Magelang Tengah** | **142** | **54** | **196** |
| Cacaban | 29 | 19 | **48** |
| Gelangan | 24 | 5 | **29** |

| Nama Kecamatan/Kelurahan | Usulan disetujui | Usulan ditolak | Grand Total |
|---|---|---|---|
| Kemirirejo | 31 | 11 | **42** |
| Magelang | 26 | 5 | **31** |
| Panjang | 11 | 8 | **19** |
| Rejowinangun Utara | 21 | 6 | **27** |
| **Magelang Utara** | **95** | **41** | **136** |
| Kedungsari | 18 | 5 | **24** |
| Kramat Selatan | 19 | 19 | **39** |
| Kramat Utara | 17 | 6 | **23** |
| Potrobangsan | 16 | 11 | **27** |
| Wates | 25 | - | **25** |
| **Grand Total** | **359** | **115** | **474** |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

#### 5.1.2.3 Telaahan terhadap Pokok Pokok Pikiran DPRD

DPRD menyampaikan saran dan pendapatnya berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2024. Telaahan dalam hal ini merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta kemampuan kapasitas riil anggaran. Pokok-pokok pikiran DPRD diterjemahkan oleh perangkat daerah terkait sesuai batasan dan kriterianya dengan menjadikannya sebagai bagian rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

*Tabel 5.21 Akomodasi Pokok Pikiran DPRD*

| OPD | Disetujui | Ditolak/ Dikembalikan | Total |
|---|---|---|---|
| Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata | 2 | 10 | **12** |
| Dinas Kesehatan | 2 | 3 | **5** |
| Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 2 | 0 | **2** |
| Dinas Lingkungan Hidup | 19 | 2 | **21** |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 46 | 1 | **47** |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 1 | **1** |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 51 | 0 | **51** |
| Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro | 74 | 3 | **77** |
| Dinas Perhubungan | 33 | 2 | **35** |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 34 | 1 | **35** |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 86 | 133 | **219** |
| Dinas Sosial | 1 | 1 | **2** |
| Dinas Tenaga Kerja | 28 | 1 | **29** |
| Kecamatan Magelang Selatan | 14 | 1 | **15** |
| Kecamatan Magelang Tengah | 16 | 3 | **19** |
| Kecamatan Magelang Utara | 5 | 0 | **5** |

| OPD | Disetujui | Ditolak/ Dikembalikan | Total |
|---|---|---|---|
| **Grand Total** | **413** | **162** | **575** |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

Adapun jumlah pokok pikiran yang diakomodasi berdasarkan fraksi pengusul sebagaimana tabel 5.22 berikut:

*Tabel 5.22 Akomodasi Pokir per Fraksi Pengusul*

| Nama Fraksi | Jumlah Usulan disetujui |
|---|---|
| **Demokrat** | 78 |
| **Gerindra** | 1 |
| **Golkar** | 71 |
| **Hanura** | 40 |
| **Perindro** | 10 |
| **PDIP** | 154 |
| **PKB** | 26 |
| **PKS** | 15 |
| **Grand Total** | **395** |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2024*

#### 5.1.2.4 Forum Konsultasi Publik

Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh saran masukan, aspirasi atau harapan pemangku kepentingan terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya, saran, masukan, dan aspirasi. dimaksud menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal untuk menjadi Rancangan RKPD. Saran masukan yang dapat ditindak lanjuti oleh perangkat daerah menjadi prioritas rencana kerja pemerintah daerah.

*Tabel 5.23 Akomodasi Forum Konsultasi Publik*

| Usulan Konblik | Diakomodasi | | Tidak Diakomodasi | Jumlah Usulan | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Kebijakan | | | |
| ANAK | 13 | 11 | 11 | 35 | 133.370.704.610,00 |
| LANSIA | 14 | 17 | 8 | 39 | 79.570.476.016,00 |
| UMUM | 5 | 3 | 7 | 15 | 3.212.936.100,00 |
| **JUMLAH** | **32** | **31** | **26** | **89** | **216.154.116.726,00** |

Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025

#### 5.1.2.5 Program Prioritas Hasil FGD

Untuk lebih menggali saran, masukan, dan kebutuhan stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan untuk bersama sama pemerintah membangun Kota Magelang, serta untuk lebih memperluas pendekatan perencanaan yang berorientasi pada proses, maka rangkaian proses penyusunan RKPD Kota Magelang tahun 2025 didukung juga dengan pelaksanaan FGD (Focussed Group Discussion). Proses tersebut menghasilkan saran dan masukan stakeholder yang disampaikan sesuai dengan tema FGD yang dibahas dengan menyesuaikan kebutuhan prioritas pembangunan, dan tentu terkait dengan Visi Misi Walikota Magelang. Adapun tema FGD sebagaimana tabel berikut:

1. Inklusivitas
2. Pariwisata
3. Kota Layak Huni
4. Ketahanan Pangan

*Tabel 5.24 Akomodasi Focussed Group Discussion*

| No | Jenis Usulan | Jumlah Usulan | % Usulan | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMLAH USULAN DIAKOMODASI VIA ANGGARAN | 19 | 25,33 | 25.660.896.738 |
| 2 | JUMLAH USULAN DIAKOMODASI VIA KEBIJAKAN/KOLABORATIF | 25 | 33,33 | - |
| 3 | JUMLAH USULAN BELUM DITANGGAPI | 31 | 41.33 | - |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

### 5.1.2.6 Program Prioritas Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sarana prasarana perkotaan berkembang sebagai respon terhadap amanat tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya konkrit Pemerintah Kota Magelang dalam RKPD 2025 terwujud dalam tabel di bawah ini:

*Tabel 5.25 Program Daerah yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| **Tujuan 1** | **TANPA KEMISKINAN** | |
| **1.1.1*** | **Tingkat kemiskinan ekstrim** | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | |
| | Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | DINSOS |
| | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | DINSOS |
| | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | DINSOS |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan | DINSOS |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | |
| | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | DINSOS |
| | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | |
| | Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | DISPERKIM |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | DISPERKIM |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | DISPERKIM |
| | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | |
| | Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | DISPERKIM |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | DKK |
| **1.2.1*** | **Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur** | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | |
| | Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | DINSOS |
| | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | DINSOS |
| | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | DINSOS |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan | DINSOS |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | |
| | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | DINSOS |
| **1.3.1*** | **Indikator 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan** | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | |
| | Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | DINAS SOSIAL |
| | Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar | DINAS SOSIAL |
| | Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | DINAS SOSIAL |
| | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | DINAS SOSIAL |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | DINAS SOSIAL |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | DINAS SOSIAL |
| **1.3.1 (a)*** | **Indikator 1.3.1 (a)* Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | DKK |
| **1.3.1 (b)*** | **Indikator 1.3.1 (b)* Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan** | |
| | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | |
| | Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | DISNAKER |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| **1.4.1*** | **Indikator 1.4.1* Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar** | |
| | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | DISPERKIM |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | DISPERKIM |
| | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | |
| | Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | DISPERKIM |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | DPUPR |
| | ***PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*** | |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | DPUPR |
| | *Sampah* | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Sampah | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | DLH |
| | Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan | DLH |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | DLH |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | DISHUB |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | DISHUB |
| | Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | DISHUB |
| | Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | DISHUB |
| | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | DISHUB |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | DISDIKBUD |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | DISDIKBUD |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | DISDIKBUD |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | DINKES |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | DINKES |
| | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | DINKES |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | DINKES |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Rumah SakitKelas C, D dan Fasilitas Pelayanan KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | DINKES |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | DINKES |
| **1.a.2*** | **Indikator 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlingungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah** | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | DISDIKBUD |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | DISDIKBUD |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | DISDIKBUD |
| | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | DISDIKBUD |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Materia | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DISDIKBUD |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | DISDIKBUD |
| | Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DISDIKBUD |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | DISDIKBUD |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Pertama | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | DISDIKBUD |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan 2 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | DISDIKBUD |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | |
| | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | |
| | Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | DISDIKBUD |
| | Sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | DISDIKBUD |
| | *Kesehatan selain gaji* | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | DINKES |
| | Kegaiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINKES |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | DINKES |
| | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | DINKES |
| | Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | DINKES |
| | Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | DINKES |
| | Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | DINKES |
| | Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas | DINKES |
| | Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | DINKES |
| | Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | DINKES |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | DINKES |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | DINKES |
| | Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | DINKES |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | |
| | Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | DINKES |
| | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | DINKES |
| | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DINKES |
| | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | |
| | Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | |
| | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | DINKES |
| | Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | |
| | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | DINKES |
| | Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | |
| | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | DINKES |
| | Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | |
| | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | DINKES |
| | Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | |
| | Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | DINKES |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | |
| | Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | DINKES |
| | Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | DINKES |
| | Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | DINKES |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | DINSOS |
| | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | DINSOS |
| **Tujuan 2** | **TANPA KELAPARAN** | |
| **2.1.1*** | **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | DINKES |
| **2.1.2*** | **Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan** | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | DISPERPA |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | DISPERPA |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | DISPERPA |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | DISPERPA |
| | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | DISPERPA |
| **2.2.1*** | **Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | DKK |
| **2.2.2*** | **Indikator 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | DKK |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| **2.2.2(a)*** | **Indikator 2.2.2(a)* Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)** | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | DISPERPA |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | DISPERPA |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | DISPERPA |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | DISPERPA |
| | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | DISPERPA |
| **2.2.3** | **Indikator 2.2.3 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DKK |
| **Tujuan 3** | **KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA** | |
| **3.1.1*** | **Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINKES |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | DINKES |
| **3.1.2*** | **Indikator 3.1.2 * Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (b) di fasilitas kesehatan;** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | DINKES |
| **3.2.1*** | **Indikator 3.2.1.(a)* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | DINKES |
| | **Indikator 3.2.1 (b)* Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.** | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINKES |
| **3.2.2*** | **Indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINKES |
| **3.3.1*** | **Indikator 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Teriynfeksi HIV | DINKES |
| **3.3.2*** | **Indikator 3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | DINKES |
| **3.3.3*** | **Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untk UKM dan UKO Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | DINKES |
| **3.4.1.(b)** | **Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untk UKM dan UKO Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | DINKES |
| **3.4.1 (c) *** | **Indikator 3.4.1 (c) * Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | DINKES |
| **3.6.1** | Indikator kematian akibat kecelakan lalu lintas | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | DISHUB |
| **3.7.1*** | **Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-19 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern** | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN KB** | |
| | *Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal* | |
| | *Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal* | DPMP4KB |
| | *Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK* | DPMP4KB |
| | *Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)* | |
| | *Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota* | DPMP4KB |
| | *Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | DPMP4KB |
| **3.7.2** | ***Mencegah pernikahan dini*** | |
| **3.7.2.(a)** | **Indikator 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)** | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN KB** | |
| | *Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal* | |
| | *Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal* | DPMP4KB |
| | *Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK* | DPMP4KB |
| | *Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)* | |
| | *Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota* | DPMP4KB |
| | *Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | DPMP4KB |
| **3.8.2.(a)** | **Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | DINKES |
| **3.b.1*** | **Indikator 3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | DINKES |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin | DINKES |
| **3.b.3*** | **Indikator 3.b.3* Proprosi fasilitas kesehatan dengan paket obat sessensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan** | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin | DINKES |
| **Tujuan 4** | **PENDIDIKAN BERKUALITAS** | |
| **4.1.1.(a)** | **Indikator 4.1.1.(a) proporsi anak-anak dan remaja di (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) memcana, (ii) matematika** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | DISDIKBUD |
| **4.1.2.(a)** | **Indikator 4.1.2.(a) angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | DISDIKBUD |
| **4.5.1*** | **Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| **4.6.1.(a)** | **Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | DISDIKBUD |
| **4.c.1*** | **4.c.1* Indikator persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | DISDIKBUD |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | DISDIKBUD |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | DISDIKBUD |
| | **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | DISDIKBUD |
| **Tujuan 5** | **KESETARAAN GENDER** | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| **5.2.1*** | **Indikator 5.2.1* proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir** | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | DPMP4KB |
| | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | DPMP4KB |
| **Tujuan 6** | **AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK** | |
| **6.1.1*** | **Indikator 6.1.1* persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | DPUPR |
| **6.3.2.(a)** | **Indikator 6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air (IKA)** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | DPUPR |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | DPUPR |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | |
| | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | DLH |
| | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | DLH |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| **Tujuan 8** | **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA** | |
| **8.1.1*** | **Indikator 8.1.1* laju pertumbuhan PDB per kapita** | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, USAHA MIKRO (UMKM)** | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan | |
| | Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro | DPPKUM |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | DPPKUM |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga rekreasi | |
| | Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | |
| | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Disporapar |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | |
| | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | DPMPTSP |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP |
| **8.5.2*** | **Indikator 8.5.2* tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur** | |
| | ***Disnaker*** | |
| | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | |
| | Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | DISNAKER |
| | Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | DISNAKER |
| | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | |
| | Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | DISNAKER |
| | Kegiatan Pelayanan antar Kerja | |
| | Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | DISNAKER |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | DISNAKER |
| | Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja | DISNAKER |
| | Sub kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | DISNAKER |
| | Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja | DISNAKER |
| | Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | DISNAKER |
| **8.9.1.(a)** | **Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.** | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | |
| | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| **8.9.1.(b)** | **Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.** | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | |
| | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Disporapar |
| **Tujuan 9** | **MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI** | |
| **9.1.2** | **Indikator 9.1.2 Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi** | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | DISHUB |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | DISHUB |
| | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | DISHUB |
| **Tujuan 10** | **MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA** | |
| **10.1.1.(b)** | **Indikator 10.1.1.(b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur** | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | |
| | Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | DINSOS |
| | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | DINSOS |
| | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | DINSOS |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan | DINSOS |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | |
| | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | DINSOS |
| **10.4.1.(b)** | **Indikator 10.4.1.(b) Proporsi perserta Program Jaminan Sosial Bidang Kesejahteraan** | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL** | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | |
| | Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar | DINSOS |
| | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | DINSOS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | DINSOS |
| **Tujuan 11** | **KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN** | |
| **11.1.1.(a)** | **Indikator 11.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau** | |
| | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | |
| | Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | DISPERKIM |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | DISPERKIM |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | DISPERKIM |
| | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | |
| | Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | DISPERKIM |
| **11.2.1.(a)** | **Indikator 11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik** | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | DISHUB |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | DISHUB |
| | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | DISHUB |
| **11.2.1.(b)** | **Indikator 11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum** | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | |
| | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| **11.5.1*** | **Indikator 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang** | |
| | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | BPBD |
| | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | BPBD |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi | BPBD |
| | Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | BPBD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | BPBD |
| | Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | BPBD |
| | Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | BPBD |
| | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | |
| | Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | BPBD |
| | Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | BPBD |
| | Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | BPBD |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | BPBD |
| | Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | BPBD |
| | Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | BPBD |
| | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | |
| | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | SATPOL PP (DAMKAR) |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | SATPOL PP (DAMKAR) |
| **11.6.1.(b)** | **Indikator 11.6.1.(b) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan sampah** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Sampah | |
| | Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan | DLH |
| | Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | DLH |
| **11.6.2.(b)** | **Indikator 11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara** | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | |
| | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | DLH |
| | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | DLH |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | DLH |
| **11.7.1.(a)** | **Indikator 11.7.1(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | DLH |
| **Tujuan 12** | **KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB** | |
| **12.4.2*** | **Indikator 12.4.2* (a) Limbah B3 per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya** | |
| | Ada tidak di DLH? | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | |
| | Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 | |
| | Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | DLH |
| **12.5.1.(a)** | **Indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Sampah | |
| | Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | DLH |
| **Tujuan 13** | **PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM** | |
| **13.2.2.(b)** | **Indikator 13.2.2.(b) Intessitas emisi gas rumah kaca (GRK)** | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | DLH |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Sampah | |
| | Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | DLH |
| | Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | DLH |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | |
| | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | DLH |
| | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | DLH |
| **Tujuan 16** | **PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH** | |
| **16.2.1.(b)** | **Indikator 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sempanjang hidupnua** | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK** | DPMP4KB |
| | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | DPMP4KB |
| **16.5.1.(a)** | **Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)** | |
| | Inspektorat | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Inspektorat |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Inspektorat |
| | Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja | Inspektorat |
| | Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan | Inspektorat |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Inspektorat |
| **16.6.1.(a)** | **Target 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian** | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Inspektorat |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Inspektorat |
| | Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja | Inspektorat |
| | Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan | Inspektorat |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Inspektorat |
| **16.6.1.(b)** | **Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥B** | |
| | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | |
| | Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD | BAPPERIDA |
| | Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | BAPPERIDA |
| | Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | BAPPERIDA |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | BAPPERIDA |
| | Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | BAPPERIDA |
| | Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | BAPPERIDA |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | BAPPERIDA |
| | Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | BAPPERIDA |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | BAPPERIDA |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | BAPPERIDA |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | BAPPERIDA |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | BAPPERIDA |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | |
| | Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | BAPPERIDA |
| | Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | BAPPERIDA |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | BAPPERIDA |
| | Bagian Organisasi | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SETDA |
| | Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | SETDA |
| **16.9.1*** | **Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur** | |
| | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | |
| | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | |
| | Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | DISDUKCAPIL |
| | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | |
| | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | |
| | Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | DISDUKCAPIL |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | |
| | Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | DISDUKCAPIL |
| **16.9.1.(a)** | **Indikator 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah** | |
| | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | |
| | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | |
| | Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | DISDUKCAPIL |
| | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | |
| | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | |

| Tujuan | PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | DISDUKCAPIL |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | |
| | Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | DISDUKCAPIL |
| **16.9.1.(b)** | **Indikator 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun** | |
| | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | |
| | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | |
| | Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | DISDUKCAPIL |
| | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | |
| | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | |
| | Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | DISDUKCAPIL |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | |
| | Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | DISDUKCAPIL |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

### 5.1.2.7 Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Dalam upaya memaksimalkan efektivitas kolaboratif pencapaian target prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kota Magelang menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

- **Konsep Tematik**

  Dalam perencanaan pembangunan, konsep tematik diskenariokan secara lima tahunan dan di-*breakdown* tiap tahunnya. Lebih lanjut dijabarkan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah. Konsep tematik dalam arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

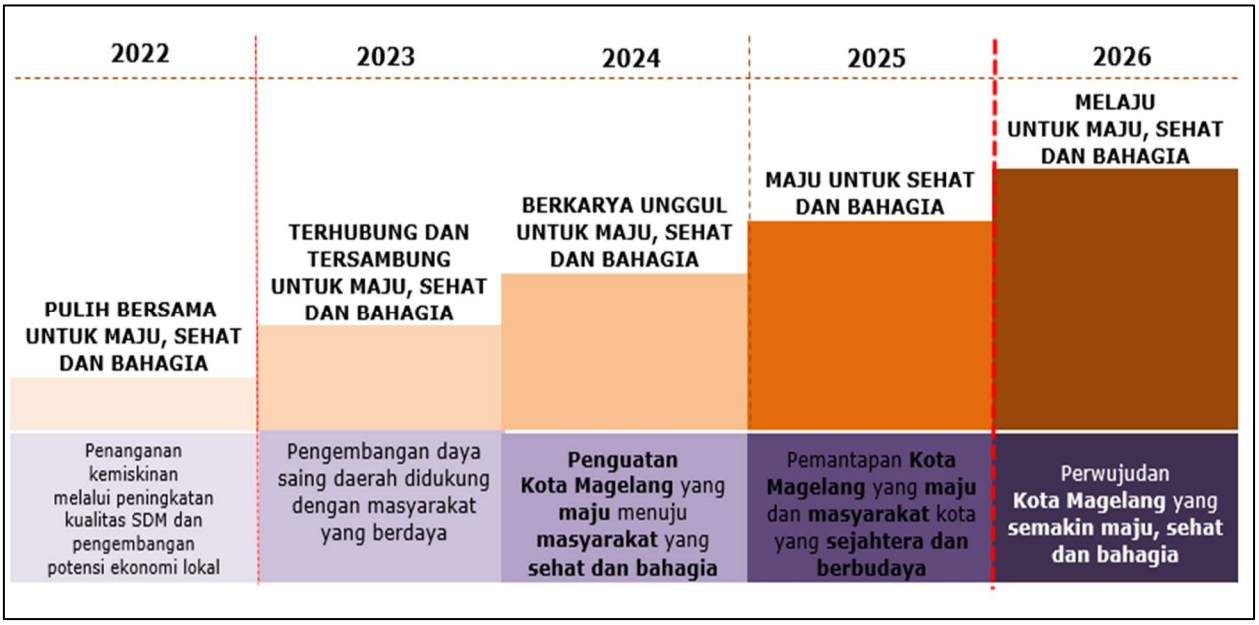


*Gambar 5.1 Tema dan arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang*

*Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2021 - 2026*

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kota Magelang pada tahun 2025 adalah:

1. Pemantapan kesejahteraan masyarakat
2. Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra
3. Pemantapan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin
4. Percepatan peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian daerah
5. Penguatan perwujudan ruang kota layak huni
6. Penguatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat
7. Pemantapan layanan publik prima
8. Pemantapan daya saing daerah

- **Konsep Holistik**

  Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Magelang menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain, gerakan penanganan kemiskinan, gerakan penanganan stunting.

- **Konsep Integratif**

  Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain penanganan kemiskinan stunting dan dalam upaya mengatasi kekumuhan.

  Selain itu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kota Magelang berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, TMMD dan sebagainya.

  Dari sisi pentahelix non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amil zakat, BAZNAS, Mitra Perangkat Daerah, kelompok masyarakat, media massa, Forum CSR dan lainnya.

- **Konsep Spasial**

  Konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kota Magelang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Secara spasial dapat diakses pada: https://geoportal.magelangkota.go.id

*Tabel 5.26 Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang Menerapkan Konsep,Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)*

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 90% | 100% | DISPERKIM |
| | | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota | 35,09% | 100% | DISPERKIM |
| 2 | Program Kawasan Permukiman | Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditata | 100% | 100% | DISPERKIM |

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani | 80,41% | 80,41% | DISPERKIM |
| 4 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 100,00% | 99,03% | DISPERKIM |
| 5 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak | 92,82% | 98,81% | DPUPR |
| 6 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang memiliki askes terhadap pelayanan sumber air minum layak | 98,50% | 98,50% | DPUPR |
| | | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan | 30,00% | 88,05% | |
| 7 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan | 100% | 100% | SATPOL PP |
| | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | 15 menit (SPM) | 15 menit (SPM) | |
| 8 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 11,84% | 24,14% | DLH |
| 9 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan | 100% | 100% | DLH |
| 10 | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan persentase sampah yang terkelola | 3,50% | 3% | DLH |
| 11 | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD | 98,00% | 98,00% | DISDIKBUD |
| | | APM SD/MI | 100% | 100% | |
| | | APK SD/MI | 100% | 100% | |
| | | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0% | 0% | |
| | | APM SMP/MTs | 100% | 100% | |
| | | APK SMP/MTs | 100% | 100% | |
| | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0% | 0% | |
| | | Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan | 97,00% | 100% | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | 72,51% | 95,24% | |
| | | Persentase SD Terakreditasi | 100% | 100% | |
| | | Persentase SMP Terakreditasi | 100% | 100% | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi | 100% | 100% | |
| 12 | | Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit Menular | 67% | 100% | DKK |

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Penemuan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 77% | 100% | |
| | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100% | 100% | |
| | | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan | 100% | 100% | |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | 100% | 100% | |
| | | Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100% | 100% | |
| | | Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 100% | 100% | |
| | | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar | 100% | 100% | |
| | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | 100% | 100% | |
| | | Indeks Keluarga Sehat | 0,80 | 0,80 | |
| **13** | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri | 94,12% | 94,12% | DKK |
| **14** | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS yang diberdayakan | 83,33% | 83,33% | DINSOS |
| **15** | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi | 100% | 100% | DINSOS |
| **16** | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang menerima bantuan | 100% | 100% | DINSOS |
| **17** | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani | 100% | 100% | DINSOS |
| **18** | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 70,00% | 75,83% | DISNAKER |
| | | Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja | 75,00% | 82,53% | |
| **19** | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja | 75,00% | 84,45% | DISNAKER |
| | | Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha | 70,00% | 70,00% | |
| **20** | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan | 77,27% | 85,11% | DISPORAPAR |
| | | Persentase peningkatan pemuda yang dibina | 6,15% | 29,71% | |
| **21** | | Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya | 4,72% | 9,35% | DISPORAPAR |

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | 33,33% | 33,33% | |
| 22 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan | 20% | 52,82% | DISPERINDAG |
| 23 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB | 73% | 75% | DPMP4KB |
| 24 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 1,00 | 1,00 | DISPERPA |
| 25 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Pangan | 100,00% | 100% | DISPERPA |
| 26 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pangan Segar yang Aman | 86,00% | 96,51% | DISPERPA |
| 27 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan | 88% | 100% | DPMP4KB |
| 28 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 5 | 5 | DISKOMINSTA |
| 29 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th) | 23,00% | 23,00% | DPMP4KB |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

#### 5.1.2.8 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Dalam rangka optimalisasi pariwisata Borobudur dan meningkatkan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Perpres No 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, maka diperlukan pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur dengan target 2 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 55 juta pergerakan wisatawan nusantara dimulai tahun 2019. Adapun fungsi koordinatif dan otoritatif dikelola oleh Badan Otorita Borobudur dengan kawasan 3 destinasi wisata nasional yaitu Borobudur dan sekitarnya, Solo Sangiran dan Semarang-Karimun Jawa.

Kota Magelang berada di kawasan destinasi nasional Borobudur-Yogya dan Borobudur-Dieng yang dikembangkan pada tahun 2021. Dalam mewujudkan pengembangan destinasi Super Prioritas Borobudur menjadi destinasi *nomedic tourism* yang berkelas, Kota Magelang menjadi bagian dari salah satu kawasan destinasi pariwisata. Adapun dukungan Pemerintah Kota Magelang terhadap destinasi pariwisata super prioritas Borobudur sebagaimana terlihat pada program-program yang terdapat dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 5.27 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur*

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik | 86,67% | 86,67% | DISPORAPAR |
| 2 | Program pemasaran pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara | 11,11% | 11,11% | DISPORAPAR |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datan ke kota | 13,33% | 13,33% | |
| 3 | Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya | 4,72% | 9,35 % | DISPORAPAR |
| | | Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | 33,33% | 33,33% | |
| 4 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan yang sesuai | 95,00% | 96,38% | DPMPTSP |
| 5 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi | Persentase pertumbuhan pemanfataan data, informasi dan Sistem Informasi PM | 10% | 10,60% | DPMPTSP |
| 6 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Investor PMA/PMDN | 100% | 100% | DPMPTSP |
| 7 | Program Promosi Penanaman Modal | Presentasi LOI yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | DPMPTSP |
| 8 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan | 30,00% | 30,00% | DPMPTSP |
| 9 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati | 31,33% | 31,33% | DLH |
| 10 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) | 0,76 | 0,61 | DISHUB |
| | | Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK) | 6,81 | 7,84 | |
| 11 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan | 20,00% | 52,82% | DISPERINDAG |
| 12 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 17,00% | 23,53% | DISDIKBUD |
| 13 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | 100% | 100% | DISDIKBUD |
| 14 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab | 94,88% | 94,88% | DPUPR |
| 15 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang | 75,00% | 83,40% | DPUPR |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

Pada tahun 2024, direncanakan pengembangan pola *travel pattern* wisata Kota Magelang menjadi *travel pattern* menu paket wisata Kawasan Borobudur. Pengembangan sumber daya dan pelaku usaha pariwisata di Kota Magelang salah satunya

adalah dengan pembentukan ASITA (*Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies*) dimana pada tahun 2023 sudah ada rincian Perjanjian Kerja Sama dg ASITA Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Beberapa *event* kegiatan direncanakan dilaksanakan untuk mendukung *event* pariwisata di Borobudur dan sekitarnya. Selain itu direncanakan pada tahun 2025 telah terjalin kerja sama transportasi terintegrasi antar destinasi wisata di kawasan Provinsi Jawa Tengah. Dalam mengintegrasikan kegiatan wisata yang ada di Kota Magelang disusun rintisan *calendar event* untuk tahun 2025. Sedangkan program dan kegiatan lain seperti infrastruktur, sarana prasarana, kesiapan destinasi kawasan direncanakan dibeberapa urusan yang terkait.

#### 5.1.2.9 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Adapun di Kota Magelang, melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, terdapat rencana exit jalan tol, yang terletak di Kelurahan Tidar Utara. Pada tahun 2023, pembangunan exit jalan tol di Kota Magelang sedang dalam proses pengadaan tanah. Pembangunan exit jalan tol di Kota Magelang diharapkan dapat menjadi akselerasi lalu lintas masuk ke kota. Lokasi exit jalan tol pada kawasan Soekarno Hatta harus selaras dengan fungsi kawasan sebagai salah satu kawasan strategis kota dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa. Ketika exit jalan tol berfungsi nantinya, kawasan Soekarno Hatta menjadi titik koneksi sebagai simpul pengungkit pembangunan kota di sisi sebelah Tenggara. Untuk mendorong hal tersebut, akan dilakukan penyusunan RTBL kawasan strategis Soekarno Hatta untuk mengatur penataan kawasan agar dapat berfungsi sebagai simpul akselerasi dengan maksimal. Adapun dukungan program Pemerintah Kota Magelang terhadap pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen adalah sebagai berikut:

*Tabel 5.28 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen*

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2024 | Penyesuaian Target Tahun 2024 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase Kawasan strategis yang ditata | 100% | 100% | DPUPR |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

#### 5.1.2.10 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai program prioritas nasional, mengingat dampaknya yang luas terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Stunting bukan hanya masalah perawakan tubuh yang pendek, tetapi merupakan akibat dari kurangnya asupan gizi yang berkepanjangan serta penyakit infeksi kronis yang berulang. Dampak jangka panjangnya dapat memengaruhi daya saing dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian target pembangunan kesehatan melalui percepatan penurunan stunting menjadi salah satu investasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Komitmen pemerintah dalam menangani stunting diwujudkan dengan memasukkan program ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target penurunan stunting yang cukup signifikan telah ditetapkan, dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. Presiden bahkan menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya percepatan lintas program dan lintas sektor melalui penguatan deteksi dini serta intervensi yang tepat, baik secara spesifik maupun sensitif, dengan pendekatan kolaboratif.

Sebagai pedoman nasional, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). Regulasi ini menjadi dasar bagi berbagai upaya di tingkat daerah, termasuk di Kota Magelang. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting di Kota Magelang tercatat sebesar 13,9 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan sebesar 3,5 persen per tahun untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Magelang didukung oleh ketersediaan regulasi yang menunjang aksi konvergensi dan intervensi yang efektif. Berbagai peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota telah disusun agar selaras dengan regulasi nasional. Saat ini, terdapat tiga Peraturan Daerah (Perda), delapan Peraturan Wali Kota, dan empat Keputusan Wali Kota yang mendukung program percepatan penurunan stunting. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat, diharapkan Kota Magelang dapat mencapai target penurunan stunting secara optimal.

*Tabel 5.29 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting*

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit Menular | 67% | 100% | DKK |
| | | Cakupan Penemuan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 77% | 100% | |
| | | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100% | 100% | |
| | | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan | 100% | 100% | |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | 100% | 100% | |
| | | Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 100% | 100% | |
| | | Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 100% | 100% | |
| | | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar | 100% | 100% | |
| | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | 100% | 100% | |
| | | Indeks Keluarga Sehat | 0,80 | 0,80 | |
| 2 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 1,00 | 1,00 | DISPERPA |
| 3 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Pangan | 100% | 100% | DISPERPA |
| 4 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang memiliki askes terhadap pelayanan sumber air minum layak | 98,50% | 98,50% | DPUPR |
| | | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan | 30,00% | 88,05% | |
| 5 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak | 92,82% | 98,81% | DPUPR |

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang menerima bantuan | 100% | 100% | DINSOS |
| 7 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pangan Segar yang Aman | 86,00% | 96,51% | DISPERPA |
| 8 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri | 94,12% | 94,12% | DKK |
| 9 | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan | 88% | 100% | DPMP4KB |
| 10 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th) | 23% | 23% | DPMP4KB |
| 11 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera | Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB | 73% | 75% | DPMP4KB |
| 12 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 5 | 5 | DISKOMINSTA |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

#### 5.1.2.11 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pada tahun 2024, dilaksanakan kajian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yg dielaborasikan dengan dokumen perencanaan kota. Salah satu kegiatan yang mendukung mitigasi perubahan iklim adalah dengan pembentukan kampung iklim baru dimana pada tahun 2024 terdapat 31 kampung iklim. Selain itu di 2023 disusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang rencana aksinya pada tahun 2024 sebagai pendukung strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan dukungan program Pemerintah Kota Magelang terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tersaji dalam tabel berikut ini.

*Tabel 5.30 Dukungan Program RKPD Kota Magelang Tahun 2025 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim*

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2026 | Penyesuaian Target Tahun 2026 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | 100% | 100% | DLH |
| 2 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | 100% | 100% | DLH |
| 3 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) | Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3 | 100% | 100% | DLH |
| 4 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | 50,00% | 50,00% | DLH |
| 5 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan | 75% | 100% | DLH |

| No. | Program | Indikator Program | Target RPJMD Tahun 2026 | Penyesuaian Target Tahun 2026 | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 10,59% | 22,22% | DLH |
| 7 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat | 18,23% | 18,23% | DLH |
| 8 | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan persentase sampah yang terkelola | 2,50% | 2,50% | DLH |
| 9 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Proporsi RTH public untuk pengelolaan keanekaragaman hayati | 32,41% | 32,41% | DLH |
| 10 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 1,25 | 1,25 | DISPERPA |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

### 5.1.3 Program Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah dan indikator kinerja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran Visi Misi Walikota, untuk menjadi bagian dari RPJMD tahun 2021-2026. Indikator yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan yang menjadi dasar penilaian kinerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil pelaksanaan perencanaan yang menggambarkan progres dalam mencapai target kinerja akhir tahun perencanaan jangka menengah yang terwujud sebagai pencapaian Visi Kota Magelang di tahun 2025.

Indikator kinerja daerah terdiri dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Masing masing memiliki target kinerja yang pencapaiannya dapat diukur secara kumulatif maupun kuantitif berdasarkan perhitungan definisi operasional, atau alat ukur tersendiri yang berpedoman kepada Permendagri 86 tahun 2017. Upaya pencapaian indikator yang menjadi program prioritas tersebut dilaksanakan dengan program-kegiatan-sub kegiatan oleh perangkat daerah.

### 5.1.4 Program Prioritas III

Program prioritas III merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan dan bidang urusannya, yang meliputi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, urusan pendukung, dan urusan penunjang pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterkaitan kebijakan dan/atau pembangunan nasional, pembangunan regional provinsi, dan Kota Magelang. Kebijakan sektoral yang bersumber dari kementerian sesuai urusan masing masing dan/atau dinas terkait pada provinsi Jawa Tengah. Demikian pula dengan rencana program yang dilaksanakan berdasarkan kajian sektoral sesuai urusan yang dilaksanakan di tahun 2025.

## 5.2 PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan RKPD Kota Magelang tahun 2025 disusun untuk menjalankan program kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Program prioritas RKPD Kota Magelang tahun 2025 merupakan penjabaran dari prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 serta sinergis dengan prioritas nasional dan provinsi. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan sudah menyesuaikan dengan tema pembangunan Kota Magelang tahun 2025 yaitu Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya serta berdasarkan identifikasi permasalahan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Selain itu pada masa transisi RKPD 2025 juga mengakomodir program unggulan Walikota terpilih.

### 5.2.1 Indikator Kinerja per Program berdasarkan Urusan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Magelang tahun 2025, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana seperti DAU, DBHCHT, DBH Pajak Rokok, dan lain lain pendapatan yang sah. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Visi Misi Walikota dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2025, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per program sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 5.31 Hubungan Program Prioritas dan Dukungan ke Pusat dan Provinsi*

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| **A** | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **1-1** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - APK PAUD<br>- APM SD/MI<br>- APK SD/MI<br>- APS SD/MI<br>- APM SMP/MTs<br>- APK SMP/MTs<br>- APS SMP/MTs<br>- Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan<br>- Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi<br>- Persentase SD Terakreditasi<br>- Persentase SMP Terakreditasi<br>- Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi | Ya | Ya | DISDIKBUD |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum | Ya | Ya | DISDIKBUD |
| 3 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | - Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1<br>- Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1 | Tidak | Tidak | DISDIKBUD |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | - Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan) | Tidak | Tidak | DISDIKBUD |
| 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA | - Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku) | Tidak | Tidak | DISDIKBUD |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| **1-2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular<br>- Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular<br>- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil<br>- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan<br>- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar<br>- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>- Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar<br>- Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar<br>- Indeks Keluarga Sehat | Ya | Ya | Dinas Kesehatan |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi) | Ya | Ya | Dinas Kesehatan |
| 3 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | - Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman<br>- Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene | Tidak | Ya | Dinas Kesehatan |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri | Ya | Ya | Dinas Kesehatan |
| | | | | | |
| **1-3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | - Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik | Tidak | Ya | DPUPR |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | - Persentase rumah tangga yang memiliki askes terhadap pelayanan sumber air minum layak<br>- Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan | Tidak | Ya | DPUPR |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | - Persentase Pembangunan TPST/3R | Tidak | Tidak | DPUPR |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | - Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak | Tidak | Ya | DPUPR |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | - Persentase drainase dalam kondisi baik | Tidak | Ya | DPUPR |
| 6 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | - Persentase bangunan yang memiliki PBG<br>- Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota | Tidak | Tidak | DPUPR |
| 7 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | - Persentase kawasan strategis yang ditata | Tidak | Ya | DPUPR |
| 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | - Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap | Tidak | Tidak | DPUPR |
| 9 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | - Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Tidak | Tidak | DPUPR |
| 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | - Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Ya | Ya | DPUPR |
| | | | | | |
| **1-4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | - Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana<br>- Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/ kota | Ya | Ya | DISPERKIM |
| 2 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | - Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata | Tidak | Ya | DISPERKIM |
| 3 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | - Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani | Tidak | Ya | DISPERKIM |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | - Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | Tidak | Ya | DISPERKIM |
| | | | | | |
| **1-5** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | Tidak | Ya | SATPOLPP |
| 2 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | - Persentase layanan penanggulangan bencana | Tidak | Tidak | SATPOLPP |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 3 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | - Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran<br>- Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran* | Tidak | Ya | SATPOLPP |
| | | | | | |
| **1-6** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | |
| 1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | - Persentase PSKS yang diberdayakan | Ya | Ya | Dinas Sosial |
| 2 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi) | Ya | Ya | Dinas Sosial |
| 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | - Persentase PMKS yang menerima bantuan | Ya | Ya | Dinas Sosial |
| 4 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | - Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani | Tidak | Ya | Dinas Sosial |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | - Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara | Tidak | Tidak | Dinas Sosial |
| | | | | | |
| **B** | **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **2-7** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | |
| 1 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | - Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi<br>- Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja | Ya | Ya | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | - Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja<br>- Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha | Ya | Ya | Dinas Tenaga Kerja |
| 3 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | - Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Ya | Ya | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | |
| **2-8** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 1 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | - Persentase program perangkat daerah yang responsif gender<br>- Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga<br>- Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD<br>- Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan | Ya | Ya | DPMP4KB |
| 2 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)* | Ya | Ya | DPMP4KB |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | - Persentase Keluarga Berkualitas | Tidak | Ya | DPMP4KB |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | - Persentase PD yang mengelola data gender dan anak | Ya | Ya | DPMP4KB |
| 5 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | - Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak | Ya | Tidak | DPMP4KB |
| | | | | | |
| **2-9** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | - Persentase Ketersediaan Pangan | Ya | Tidak | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| 2 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | - Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan | Ya | Tidak | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| 3 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | - Persentase Pangan Segar yang Aman | Ya | TIdak | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| | | | | | |
| **2-10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | - Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani | Tidak | Tidak | Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | - Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan | Tidak | Tidak | Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman |
| 3 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | - Persentase luas lahan bersertifikat | Ya | Tidak | Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman |
| 4 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | - Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah | Tidak | Tidak | Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman |
| | | | | | |
| **2-11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | - Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | Tidak | Ya | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | - Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | Ya | Ya | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | - Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati | Ya | Ya | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | - Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3 | Ya | Tidak | Dinas Lingkungan Hidup |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | - Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | Ya | Ya | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | - Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | Ya | Ya | Dinas Lingkungan Hidup |
| 7 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | - Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat | Ya | Ya | Dinas Lingkungan Hidup |
| 8 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | - Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan | Ya | Ya | Dinas Lingkungan Hidup |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | - Peningkatan persentase sampah yang terkelola | Ya | Ya | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | |
| **2-12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | - Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL<br>- Persentase Kepemilikan KK<br>- Persentase Kepemilikan KIA | Tidak | Tidak | DISDUKCAPIL |
| 2 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | - Persentase pasangan yang memiliki akta Perkawinan<br>- Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran<br>- Persentase penerbitan akta kematian<br>- Persentase penerbitan akta perceraian | Tidak | Tidak | DISDUKCAPIL |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | - Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis Teknologi Informasi | Ya | Ya | DISDUKCAPIL |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | - Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan | | | |
| | | | | | |
| **2-13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | - Persentase Kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat | Tidak | Ya | DPMP4KB |
| 2 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | - Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi | Tidak | Tidak | DPMP4KB |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | - Persentase kelurahan yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan | Ya | Ya | DPMP4KB |
| | | | | | |
| **2-14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | - Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)* | Ya | Ya | DPMP4KB |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | - Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB | Ya | Ya | DPMP4KB |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | - Contraceptive Prevalence Rate (CPR) | Tidak | Tidak | DPMP4KB |
| | | | | | |
| **2-15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | - Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)*<br>- Pengguna moda transportasi umum di perkotaaan (PPTUK) | Ya | Ya | Dinas Perhubungan |
| | | | | | |
| **2-16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | |
| 1 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | - Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Ya | Tidak | DISKOMINSTA |
| 2 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | - Persentase pemanfaatan aplikasi informatika | Ya | Tidak | DISKOMINSTA |
| | | | | | |
| **2-17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | - Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam | Tidak | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 2 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | - Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan | Ya | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 3 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | - Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya | Tidak | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 4 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | - Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya | Tidak | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | - Persentase koperasi berkualitas | Tidak | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | - Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan | Ya | Ya | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | - Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro | Tidak | Ya | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | | | | | |
| **2-18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | - Persentase Investor PMA/PMDN | Ya | Ya | DPMPTSP |
| 2 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | - Persentase LOI yang ditindaklanjuti | Ya | Ya | DPMPTSP |
| 3 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | - Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai dengan SOP | Ya | Ya | DPMPTSP |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | - Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku | Ya | Ya | DPMPTSP |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | - Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM | Ya | Ya | DPMPTSP |
| | | | | | |
| **2-19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | - Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan<br>- Persentase peningkatan pemuda yang dibina | Ya | Ya | Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | - Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga<br>- Persentase peningkatan atlet yang dibina<br>- Persentase pelatih yang bersertifikat | Tidak | Ya | Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - Persentase organisasi kepramukaan yang dibina | Tidak | Tidak | Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata |
| | | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| **2-20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | - Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data | Tidak | Ya | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik |
| | | | | | |
| **2-21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | - Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi<br>- Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi<br>- Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi<br>- Nilai Pengelolaan Aset Informasi<br>- Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi | Ya | Ya | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik |
| | | | | | |
| **2-22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | - Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | Ya | Ya | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | - Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | Ya | Ya | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | - Persentase peningkatan kunjungan museum | Ya | Ya | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 4 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | - Cakupan pembinaan sejarah | Ya | Tidak | Dinas pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | - Persentase cagar budaya yang dilestarikan | Ya | Ya | Dinas pendidikan dan Kebudayaan |
| **2-23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | - Persentase pemerataan layanan perpustakaan<br>- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan<br>- Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan<br>- Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan<br>- Persentase Perpustakaan ber-SNP<br>- Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan<br>- Persentase peningkatan anggota perpustakaan | Tidak | Tidak | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | | | |
| **2-24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | - Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan | Tidak | Tidak | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 2 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | - Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan | Tidak | Tidak | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | | | |
| **C** | **URUSAN PILIHAN** | | | | |
| **3-25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | Ya | Ya | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| 2 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | - Jumlah total produksi olahan perikanan (ton) | Ya | Tidak | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| | | | | | |
| **3-26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - Presentase Destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik | Tidak | Ya | Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata |
| 2 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara<br>- Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota | Ya | Ya | Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kapasitasnya<br>- Persentase peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | Ya | Ya | Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata |
| | | | | | |
| **3-27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - Persentase sarana pembibitan yang terpelihara<br>- Persentase Peningkatan sarana Peternakan | Ya | Tidak | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| 2 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | - Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan<br>- Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH | Ya | Tidak | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| 3 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | - Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani | Ya | Tidak | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| 4 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | - Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala | Ya | Tidak | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| 5 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | - Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya | Ya | Tidak | Dinas Pertanian Dan Pangan |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 6 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | - Persentase Prasarana Pertanian<br>- Persentase Peningkatan prasarana Peternakan | Ya | Tidak | Dinas Pertanian Dan Pangan |
| | | | | | |
| **3-30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | - Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha | Tidak | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | - Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik | Ya | Ya | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 3 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | - Persentase koefisien variasi harga antar waktu* | Ya | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | - Nilai ekspor | Ya | Ya | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 5 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | - Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Tidak | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | | | | | |
| **3-31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | - Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | Ya | Ya | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 2 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA | - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait<br>- Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha | Tidak | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | - Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap | Tidak | Tidak | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| | | | | | |
| **D** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **4-1** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | |
| 1 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | - Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi<br>- Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi<br>- Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan<br>- Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi | Tidak | Ya | Sekretariat Daerah |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 2 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | - Persentase progres fisik seluruh OPD<br>- Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan<br>- Tingkat kematangan UKPBJ | Ya | Tidak | Sekretariat Daerah |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | - Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang<br>- Indeks Kepuasan Pimpinan (Prokompim)<br>- Indeks Kepuasan Pimpinan (Umum) | Tidak | Tidak | Sekretariat Daerah |
| | | | | | |
| **4-2** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | |
| 1 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | - Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang terlaksana | Tidak | Tidak | Sekretariat DPRD |
| | | | | | |
| **E** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **5-1** | **PERENCANAAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | - Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas | Tidak | Ya | BAPPEDA |
| 2 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | - Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia<br>- Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA<br>- Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Ya | Ya | BAPPEDA |
| | | - | | | |
| **5-2** | **KEUANGAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran<br>- Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan<br>- Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi | Ya | Ya | BPKAD |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | - Cakupan pengelolaan barang milik daerah | Ya | Ya | BPKAD |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | - Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Tidak | Ya | BPKAD |
| | | | | | |
| **5-3** | **KEPEGAWAIAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | - Persentase capaian target aspek sistem merit | Tidak | Tidak | BKPSDM |
| | | | | | |
| **5-4** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | - Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya | Tidak | Tidak | BKPSDM |
| | | | | | |
| **5-5** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan<br>- Persentase pemanfaatan hasil inovasi | Tidak | Ya | BAPPEDA |
| | | | | | |
| **F** | **UNSUR PENGAWASAN** | | | | |
| **6-1** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | - Persentase penyelenggaraan pengawasan | Ya | Ya | Inspektorat |
| 2 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | - Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi | Ya | Ya | Inspektorat |
| | | | | | |
| **G** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| **7-1.1** | **KECAMATAN MAGELANG SELATAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Ya | Tidak | Kecamatan Magelang Selatan |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Ya | Tidak | Kecamatan Magelang Selatan |
| 3 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Ya | Tidak | Kecamatan Magelang Selatan |
| | | | | | |
| **7-1.2** | **KECAMATAN MAGELANG TENGAH** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Ya | Tidak | Kecamatan Magelang Tengah |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Ya | Tidak | Kecamatan Magelang Tengah |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program | Indikator Program | Prioritas | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nasional | Daerah | |
| 3 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Ya | Tidak | Kecamatan Magelang Tengah |
| | | | | | |
| **7-1.3** | **KECAMATAN MAGELANG UTARA** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Ya | Tidak | Kecamatan Magelang Utara |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Ya | Tidak | Kecamatan Magelang Utara |
| 3 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Ya | Tidak | Kecamatan Magelang Utara |
| | | | | | |
| **H** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | |
| **8-1** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | - Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan | Ya | Ya | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | - Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik | Ya | Ya | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | - Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan<br>- Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Ya | Ya | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat |
| 4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | - Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Ya | Ya | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat |
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | - Jumlah Konflik Sosial* | Ya | Ya | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pada RKPD Tahun 2025 dilakukan penyesuaian beberapa target indikator program tahun 2025 pada masing-masing urusan dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023 sebagaimana tersaji pada data berikut ini.

*Tabel 5.32 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD | 100% | 84,58% | 98,00% | 98,00% |
| | | APM SD/ MI | 100% | 99,48% | 100,00% | 100,00% |
| | | APK SD/ MI | 100% | 120,11% | 100,00% | 100,00% |
| | | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | APM SMP/MTs | 100% | 99,48% | 100,00% | 100,00% |
| | | APK SMP/MTs | 100% | 183,74% | 100,00% | 100,00% |
| | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan | 97,50% | 100,00% | 97,00% | 100,00% |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | 72,51% | 95,24% | 72,51% | 95,24% |
| | | Persentase SD Terakreditasi | 100% | 98,65% | 100,00% | 100,00% |
| | | Persentase SMP Terakreditasi | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1 | 100% | 98,95% | 99,50% | 99,50% |
| | | Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1 | 80% | 65,92% | 77,50% | 96,63% |
| 4 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra | Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku) | 35% | 20,90% | 30,00% | 30,00% |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.33 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular | 70% | 100,00% | 67,00% | 100,00% |
| | | Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular | 80% | 100,00% | 77,00% | 100,00% |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100,00% | 97,37% | 100 % | 100,00% |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100,00% | 125,77% | 100 % | 100,00% |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100,00% | 100 % | 100% | 100% |
| | | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | 100,00% | 96,51% | 100 % | 100,00% |
| | | Indeks Keluarga Sehat | 0,80 | 0,41 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi) | 100% | 98,05% | 100 % | 100,00% |
| 3 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 100,00% | 97,54% | 100% | 100,00% |
| | | Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% |
| 4 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri | 100% | 82,35% | 94,12% | 94,12% |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.34 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik | 81% | 56,47% | 81,00% | 81,00% |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik | 65% | 32,40% | 64,00% | 64,00% |
| 3 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang memiliki PBG | 27,50% | 26,97% | 27,25% | 27,25% |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota | 4% | 0% | 100% | 100,00% |
| 4 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase kawasan strategis yang ditata | 100% | 68,75% | 100% | 100,00% |
| 5 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab | 95% | 85,41% | 94,88% | 94,88% |
| 6 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% |
| 7 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 80% | 83,40% | 75,00% | 83,40% |
| 8 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak* | 93,49% | 98,81% | 92,82% | 98,81% |
| 9 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang memiliki askes terhadap pelayanan sumber air minum layak* | 98,65% | 98,32% | 98,50% | 98,50% |
| | | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan | 35% | 88,05% | 30,00% | 88,05% |
| 10 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Pembangunan TPST/3R | 80% | 29,73% | 70,00% | 70,00% |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.35 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program pengembangan perumahan | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 90% | 100,00% | 90,00% | 100,00% |
| | | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota | 46,78% | 89,47% | 35,09% | 100% |
| 2. | Program Kawasan Permukiman | Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata | 100,00% | 63,77% | 100% | 100,00% |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani | 100,00% | 59,68% | 80,41% | 80,41% |
| 4. | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 100,00% | 95,54% | 100% | 99,03% |
| 5. | Program Penatagunaan tanah | Presentase luas lahan bersertifikat | 100,00% | 61,23% | 99% | 99% |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.36 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelesaian pelanggaran perda | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana | Persentase layanan penanggulangan bencana | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran* | 15 menit | 4,34 menit | 15 menit (SPM) | 15 menit (SPM) |

*Sumber: Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.37 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial*

| No | Program Prioritas | Indikator | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |
| 2 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang menerima bantuan | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |
| 3 | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |
| 4 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS yang diberdayakan | 91,67% | 83,33% | 83,33% | 83,33% |

| No | Program Prioritas | Indikator | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.38 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 75% | 75,83% | 70% | 75,83% |
| | | Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja | 80% | 82,53% | 75,00% | 82,53% |
| 2 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja | 80% | 84,45% | 75,00% | 84,45% |
| | | Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha | 75% | 54,89% | 70,00% | 70,00% |
| 3 | Program Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 50% | 37,46% | 45,00% | 45,00% |

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.39 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase program perangkat daerah yang responsif gender | 17,34% | 17,54 % | 17,34% | 17,54 % |
| | | Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga | 20% | 23,03 % | 20,00% | 23,03 % |
| | | Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | 20% | 24% | 20,00% | 24% |
| | | Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan | 20,90% | 22,22% | 20,90% | 22,22% |
| 2 | Program Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)* | 0,04% | 63,16% | 0,04% | 0,01% |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Keluarga Berkualitas | 16,57% | 8,54% | 14,29% | 14,29% |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase PD yang mengelola data gender dan anak | 17,24% | 28,57% | 17,24% | 28,57% |
| 5 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak | 13,79% | 61,29% | 17,24% | 61,29% |

*Sumber: DP4KB Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.40 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Pangan | 100% | 133,37% | 100% | 100% |
| 2 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan | 100% | 66,67% | 60,00% | 66,67% |
| 3 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pangan Segar yang Aman | 88% | 96,51% | 86,00% | 96,51% |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.41 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani | 100% | 73,91% | 80,00% | 80,00% |
| 2 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah | 100% | 44,19% | 80,00% | 80,00% |
| 3 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan | 100% | 100,00% | 80,00% | 100,00% |
| 4 | Program Penatagunaan Tanah | Persentase luas lahan bersertifikat | 100% | 61,23% | 99,00% | 99,00% |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Tahun 2025*

*Tabel 5.42 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | 100% | 80% | 80% | 80% |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan | Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3 | 100% | 50% | 83,33% | 83,33% |
| 4 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | 50% | 40,00% | 46,67% | 46,67% |
| 5 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan | 75% | 100,00% | 75,00% | 100,00% |
| 6 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 10,59% | 24,14% | 11,84% | 24,14% |
| 7 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat | 18,23% | 10,42% | 6,25% | 11,98% |
| 8 | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan persentase sampah yang terkelola | 2,50% | 0,00% | 3,50% | 3% |
| 9 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati | 32,41% | 29,17% | 31,33% | 31,33% |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.43 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pendaftaran Penduduk. | Persentase penduduk usia wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el | 100% | 100% | 99,95% | 100,00% |
| | | Persentase kepemilikan KK | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| | | Persentase kepemilikan KIA | 99% | 100% | 98,00% | 100,00% |
| 2 | Program Pencatatan Sipil | Persentase pasangan yang memiliki Akta Perkawinan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki memiliki Akta kelahiran | 100% | 100,00% | 99,40% | 100,00% |
| | | Persentase penerbitan Akta kematian | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase penerbitan Akta Perceraian | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% |
| 3 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasi TI | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% |
| 4 | Program pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase Jenis Data yang tersaji dalam Profil Kependudukan | 100% | 100,00% | 95,00% | 100,00% |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.44 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

| No | Program Prioritas | Kinerja Indikator | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program peningkatan kerja sama desa | Persentase kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat | 94% | 100,00% | 88,00% | 100,00% |
| 2 | Program administrasi pemerintahan desa | Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi | 94% | 100,00% | 84,00% | 100,00% |
| 3 | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan | 94% | 100,00% | 88,00% | 100,00% |

*Sumber: DP4KB Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.45 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengendalian penduduk | Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th) | 22% | 6,64 | 23,00% | 23,00% |
| 2 | Program pembinaan keluarga berencana | *Persentase Contraceptive Prevelance Rate (CPR)* | 59,25% | 70,09% | 58,45% | 70,09% |
| 3 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera | Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB | 73,50% | 74,73% | 73,00% | 75,00% |

*Sumber: DP4KB Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.46 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) | 0,75 | 0,61 | 0,76 | 0,61 |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengguna moda transportasi umum di perkotaaan (PPTUK)* | 6,86 | 7,84 | 6,81 | 7,84 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.47 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Aplikasi Informatika | Persentase pemanfaatan aplikasi informatika | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 5 | 5 | 5 | 5 |

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.48 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam | 63,52% | 38,22% | 58,87% | 58,87% |
| 2 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan | 43,37% | 55,00% | 42,91% | 55,00% |
| 3 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya | 27,87% | 10,22% | 27,55% | 27,55% |
| 4 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya | 29,81% | 39,57% | 26,18% | 39,57% |
| 5 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi berkualitas | 50% | 36,67% | 46,00% | 46,00% |
| 6 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan | 20% | 52,82% | 20,00% | 52,82% |
| 7 | Program Pengembangan Umkm | Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro | 3% | 2,85% | 2,00% | 2,85% |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.49 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP | 95,50% | 96,38% | 95,00% | 96,38% |
| 2 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, informasi, dan Sistem Informasi PM | 10% | 10,60% | 10,00% | 10,60% |
| 3 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Investor PMA/PMDN | 100% | 127,53% | 100% | 100,00% |
| 4 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase LOI yang ditindaklanjuti | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% |
| 5 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku | 35% | 20,35% | 30,00% | 30,00% |

*Sumber: DPMPTSP Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.50 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan | 88,64 | 85,11% | 77,27% | 85,11% |
| | | Persentase peningkatan pemuda yang dibina | 8,70 | 29,71% | 6,15% | 29,71% |
| 2 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga | 25 | 36,29% | 17,65% | 36,29% |
| | | Persentase peningkatan atlet yang dibina | 10,53 | 391,89% | 11,76% | 0000 |
| | | Persentase pelatih yang bersertifikat | 87,10 | 77,42% | 83,87% | 83,87% |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase organisasi kepramukaan yang dibina | 100 | 100,00% | 97,14% | 100,00% |

*Sumber: Disporapar Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.51 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data | 45% | 24,50% | 39,00% | 39,00% |

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.52 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi | 84 | 109 | 84 | 109 |
| | | Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi | 48 | 61 | 48 | 61 |
| | | Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi | 106 | 61 | 47 | 61 |
| | | Nilai Pengelolaan Aset Informasi | 88 | 138 | 81 | 138 |
| | | Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi | 80 | 72 | 65 | 72 |

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.53 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | 100,00% | 88,89% | 100% | 100,00% |
| 2 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 100,00% | 75,00% | 92,00% | 92,00% |
| 3 | Program Pembinaan Sejarah | Cakupan pembinaan sejarah | 67,00% | 77,78% | 67,00% | 77,78% |
| 4 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 19,00% | 23,53% | 17,00% | 23,53% |
| 5 | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase peningkatan kunjungan museum | 20,00% | 54,13% | 20,00% | 54,13% |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.54 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan*

| No | Program Prioritas | Indikator kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase pemerataan layanan perpustakaan | 61,00% | 59,38% | 60,00% | 60,00% |
| | | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan | 51,25% | 50,76% | 51,00% | 51,00% |
| | | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan | 72,91% | 65,91% | 70,41% | 70,41% |
| | | Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan | 25,02% | 136,17% | 24,02% | 0000 |
| | | Persentase Perpustakaan ber-SNP | 55,00% | 40,19% | 50,00% | 50,00% |

| No | Program Prioritas | Indikator kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan | 21,36% | 25,69% | 21,21% | 25,69% |
| | | Persentase peningkatan anggota perpustakaan | 28,37% | 31,61% | 28,30% | 31,61% |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.55 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengelolaan Arsip | Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.56 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 1,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah total produksi olahan perikanan (ton) | 240 | 236,00 | 238 | 238 |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.57 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata | Persentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik | 93,33% | 80,00% | 86,67% | 86,67% |
| 2 | Program pemasaran pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara | 12,50% | 147,76% | 11,11% | 11,11% |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota | 14,71% | 12,55% | 13,33% | 13,33% |
| 3 | Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya | 4,72% | 9,35% | 4,72% | 9,35% |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | 33,33% | 0,00% | 33,33% | 33,33% |

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.58 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase sarana pembibitan yang terpelihara | 66,89% | 73,51% | 66,89% | 73,51% |
| | | Persentase Peningkatan sarana Peternakan | 10% | 14,29% | 10,00% | 14,29% |
| 2 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian | 70,83% | 29,17% | 57,50% | 57,50% |
| | | Persentase Peningkatan prasarana Peternakan | 9,09% | 14,29% | 10,00% | 14,29% |
| 3 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan | 4% | 6,62% | 5,00% | 6,62% |
| | | Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH | 2% | 3,36% | 2,00% | 3,36% |
| 4 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani | 86% | 100,00% | 84,00% | 100,00% |
| 5 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala | 10% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 6 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya | 13,33% | 12,00% | 10,00% | 12,00% |
| | | Persentase kelompok tani yang naik kelas | 28% | 8,00% | 24,00% | 24,00% |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.59 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik | 60% | 85,19% | 55,00% | 85,19% |
| 2 | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang | Persentase koofisien variasi harga antar waktu | 8% | 4,88% | 8,00% | 8% |
| 3 | Program pengembangan ekspor | Nilai ekspor | 3.113.000 | 2.812.621 | 2.707.000 | 3.421.982 |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase Alat-alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 79,17% | 91,91% | 79,17% | 94,42% |
| 5 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha | 96% | 94,12% | 96,00% | 95,92% |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.60 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Perencana dan Pembangunan Industri | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | 3,35% | 1,87% | 1,99% | 4,90% |
| 2 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 90% | 100% | 85,00% | 100,00% |
| | | Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha | 87% | 7,19% | 0,84% | 17,20% |
| 3 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap | 95% | 100% | 90,00% | 100,00% |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.61 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang | 31,00% | 100,00% | 30,80% | 100,00% |
| | | Indeks Kepuasan Pimpinan (Prokompim) | 86,00 | 92,16 | 85,00% | 92,16% |
| | | Indeks Kepuasan Pimpinan (Umum) | 86,00 | 82,41 | 85,00% | 85,00% |
| 2 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase progres fisik seluruh OPD | 99,20% | 98,85% | 99,00% | 99,60% |
| | | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | Tingkat kematangan UKPBJ | 3 | 3 | 2 | 3 |

*Sumber: Sekretariat Daerah Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.62 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat DPRD*

| No | Program | Indikator | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.63 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan*

| No | Program | Indikator | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas | 95,89% | 81,74% | 68,49% | 81,74% |
| 2 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100% | 90,58% | 100 % | 100,00% |
| | | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 100% | 90,63% | 100% | 100,00% |
| | | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100% | 70,83% | 100% | 100,00% |

*Sumber: Bappeda Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.64 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Keuangan*

| No | Program | Indikator | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| No | Program | Indikator | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Cakupan pengelolaan barang milik daerah | 89,29% | 100,00% | 89,29% | 100,00% |
| 3 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 124,37% | 151,57% | 121,15% | 165,48% |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.65 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Kepegawaian*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase capaian target aspek sistem merit | 95% | 125,09% | 95,00% | 100,00% |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.66 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Pendidikan dan Pelatihan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi | 37% | 48,70% | 35,00% | 48,70% |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.67 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Penelitian dan Pengembangan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan | 44,44 | 37,50% | 42,31% | 42,31% |
| | | Persentase pemanfaatan hasil inovasi | 24 | 27,78% | 24,00% | 27,78% |

*Sumber: Bappeda Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.68 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase penyelenggaraan pengawasan | 97,50% | 130,92% | 96,00% | 96,00% |

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan | 100% | 60,00% | 85,00% | 85,00% |

*Sumber: Inspektorat Daerah Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.69 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Kewilayahan - Kecamatan*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber: Kecamatan se-Kota Magelang, 2025*

*Tabel 5.70 Penyesuaian Target Program Tahun 2025 Unsur Pemerintahan Umum - Kesatuan Bangsa dan Politik*

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja | Target RPJMD s.d. Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 75,47% | 37,00% | 60,38% | 60,38% |
| 2 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Oganisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan | 81,30% | 38,82% | 65,04% | 65,04% |
| | | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | 88,62% | 85,10% | 86,99% | 86,99% |
| 3 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 12,23% | 5,82% | 10,06% | 10,06% |
| 4 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Konflik Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik | 6,50% | 2,43% | 5,18% | 5,18% |

*Sumber: Badan Kesbangpol Kota Magelang, 2025*

### 5.2.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Adapun rekapitulasi renja perubahan setiap Perangkat Daerah Tahun 2025 nampak sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 5.71 Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025*

| NO | Perangkat Daerah | RKPD 2025 | APBD 2025 | APBD 2025 Efisiensi | Renja Perubahan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 127,273,947,629.00 | 206.835.377.468,00 | 208.024.559.368,00 | 205,276,522,302.00 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan | 354,837,155,337.00 | 369.744.696.797,00 | 375.659.567.800,00 | 441,444,109,934.00 |
| 1.03.0.00.0.00.03.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 76,409,935,179.00 | 78.227.189.801,00 | 93.266.425.390,00 | 48,275,327,271.00 |
| 1.04.2.10.0.00.04.0000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 23,455,074,706.00 | 23.567.145.677,00 | 23.986.635.425,00 | 23,995,563,267.00 |
| 1.05.0.00.0.00.05.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja | 12,468,649,271.00 | 11.925.394.980,00 | 11.674.220.709,00 | 12,628,480,972.00 |
| 1.05.0.00.0.00.23.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4,842,786,611.00 | 5.134.501.423,00 | 4.928.536.185,00 | 5,128,653,933.00 |
| 1.06.0.00.0.00.06.0000 | Dinas Sosial | 13,527,624,400.00 | 10.872.868.306,00 | 10.564.439.021,00 | 10,732,873,772.00 |
| 2.07.3.32.0.00.07.0000 | Dinas Tenaga Kerja | 10,528,484,461.00 | 11.116.341.018,00 | 10.733.895.353,00 | 10,911,021,471.00 |
| 2.11.0.00.0.00.08.0000 | Dinas Lingkungan Hidup | 31,756,552,717.00 | 30.491.665.904,00 | 33.272.302.331,00 | 35,128,999,183.00 |
| 2.12.0.00.0.00.09.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6,207,709,428.00 | 6.476.399.434,00 | 6.281.302.112,00 | 6,651,755,833.00 |
| 2.13.2.08.2.14.10.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 9,921,311,240.00 | 11.699.517.417,00 | 11.843.399.906,00 | 13,274,354,590.00 |
| 2.15.0.00.0.00.11.0000 | Dinas Perhubungan | 16,756,697,611.00 | 17.306.452.430,00 | 17.641.007.733,00 | 18,229,769,516.00 |
| 2.16.2.20.2.21.12.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 16,313,193,050.00 | 15.389.101.169,00 | 14.973.475.700,00 | 15,531,130,795.00 |
| 2.18.0.00.0.00.13.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6,032,437,085.00 | 5.910.487.589,00 | 5.759.817.677,00 | 5,721,918,727.00 |
| 2.19.3.26.0.00.14.0000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata | 15,413,462,168.00 | 16.342.153.821,00 | 15.234.361.106,00 | 17,722,435,577.00 |
| 2.23.2.24.0.00.15.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7,065,394,411.00 | 7.422.113.936,00 | 7.164.274.736,00 | 6,984,624,609.00 |
| 3.27.2.09.3.25.16.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan | 9,253,223,143.00 | 9.752.193.315,00 | 9.392.224.398,00 | 9,880,011,406.00 |
| 3.31.3.30.2.17.17.0000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan usaha Mikro | 19,270,990,015.00 | 19.416.890.904,00 | 19.324.197.969,00 | 20,426,626,888.00 |
| 4.01.0.00.0.00.18.0000 | Sekretariat Daerah | 40,570,167,100.00 | 41.086.182.501,00 | 38.892.333.111,00 | 43,790,828,626.00 |
| 4.02.0.00.0.00.19.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 31,307,000,729.00 | 53.338.121.120,00 | 42.434.823.885,00 | 41,852,282,980.00 |
| 5.01.5.05.0.00.20.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 9,526,367,877.00 | 9.561.516.393,00 | 9.616.914.463,00 | 9,913,029,828.00 |
| 5.02.0.00.0.00.21.0000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 24,152,237,256.00 | 41.418.904.450,00 | 40.812.921.901,00 | 24,603,717,875.00 |

| NO | Perangkat Daerah | RKPD 2025 | APBD 2025 | APBD 2025 Efisiensi | Renja Perubahan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.0.00.22.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 28,415,527,906.00 | 10.361.785.141,00 | 9.620.235.171,00 | 9,903,356,066.00 |
| 6.01.0.00.0.00.24.0000 | Inspektorat | 14,436,756,946.00 | 17.774.539.930,00 | 16.653.323.830,00 | 16,282,352,465.00 |
| 7.01.0.00.0.00.25.0000 | Kecamatan Magelang Selatan | 23,748,471,369.00 | 24.435.809.515,00 | 23.872.079.148,00 | 18,189,038,490.00 |
| 7.01.0.00.0.00.26.0000 | Kecamatan Magelang Tengah | 27,715,477,060.00 | 25.873.422.240,00 | 25.403.659.315,00 | 18,837,315,192.00 |
| 7.01.0.00.0.00.27.0000 | Kecamatan Magelang Utara | 22,850,091,112.00 | 21.403.902.494,00 | 20.975.821.890,00 | 15,092,667,311.00 |
| 8.01.0.00.0.00.28.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8,776,650,717.00 | 8.657.226.088,00 | 7.793.436.138,00 | 7,800,365,299.00 |
| | **Jumlah** | **992,833,376,534.00** | **1.111.541.901.261,00** | **1.115.800.191.771,00** | **1,114,209,134,178.00** |

*Sumber : SIPD-RI, 2025*

## 5.3 DUKUNGAN PROGRAM RKPD KOTA MAGELANG TAHUN 2025 TERHADAP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pembangunan, maka perencanaan pembangunan harus didukung dengan kegiatan riset dan inovasi yang cukup. Bentuk dukungan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2025 tampak dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 5.72 Dukungan Program Terhadap Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025*

| No | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|
| 1 | Penanggulangan Bencana | BPBD |
| 2 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | BAPPERIDA |
| 3 | Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | DISHUB |
| 4 | Perencanaan Lingkungan Hidup | DLH |
| 5 | Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan | DLH |
| 6 | Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) | DLH |
| 7 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | DIISPERKIM |
| 8 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | DISDUKCAPIL |
| 9 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | DPMP4KB |
| 10 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | DPMP4KB |
| 11 | Program Perlindungan Khusus Anak | DPMP4KB |
| 12 | Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | SETWAN |
| 13 | Penataan Bangunan dan lingkungannya | DPU |
| 14 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | DPU |
| 15 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air | DPU |

*Sumber: diolah tim penyusun RKPD, 2025*

## 5.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mewujudkan program yang sudah disusun dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2025 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. BAPPERIDA Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja indikator kinerja sasaran maupun program secara rutin dan berkala.
2. BAPPERIDA Kota Magelang berkewajiban melakukan analisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2025 ke dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 beserta prioritas dan pagu indikatif.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
4. Melibatkan semua unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media) untuk mendukung pembangunan daerah.

*Tabel 5.73 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KOTA MAGELANG TAHUN 2025*

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas (DISDIKBUD)** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **111.297.961.733,00** | **155.753.759.511,00** | **152.548.145.493,00** | **-9.303.429.566,00** | | | | | | | **101.994.532.167,00** | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD* | | | | 100 % | 100 % | 70.762.800,00 | 70.762.800,00 | 53.068.900,00 | -17.693.900,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 275.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.368.300,00 | 19.368.300,00 | 7.632.400,00 | -11.735.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 130.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.658.000,00 | 25.658.000,00 | 23.153.500,00 | -2.504.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.160.800,00 | 5.160.800,00 | 5.160.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.104.000,00 | 8.104.000,00 | 8.104.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.198.800,00 | 8.198.800,00 | 4.745.300,00 | -3.453.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.272.900,00 | 4.272.900,00 | 4.272.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 108.984.571.503,00 | 153.565.737.923,00 | 150.440.645.559,00 | 41.456.074.056,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 99.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1089 Orang /bulan | 1089 Orang /bulan | 108.834.513.433,00 | 153.420.546.454,00 | 150.299.284.867,00 | 41.464.771.434,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD<br>DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD | - | -<br>- | | | 99.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 113.158.070,00 | 112.347.069,00 | 117.067.792,00 | 3.909.722,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.800.000,00 | 13.094.800,00 | 9.856.200,00 | -5.943.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 21.100.000,00 | 19.749.600,00 | 14.436.700,00 | -6.663.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan (CK) administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 56.581.630,00 | 59.674.429,00 | 76.353.432,00 | 19.771.802,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 80.208.977,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 56.581.630,00 | 59.674.429,00 | 76.353.432,00 | 19.771.802,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 80.208.977,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 159.540.830,00 | 159.757.361,00 | 193.761.748,00 | 34.220.918,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 159.540.830,00 | 159.757.361,00 | 193.761.748,00 | 34.220.918,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 484.545.750,00 | 429.182.150,00 | 360.868.150,00 | -123.677.600,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 395.754.740,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 83.699.850,00 | 13.699.850,00 | 13.699.850,00 | -70.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 85.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 18 Paket | 18 Paket | 164.408.300,00 | 180.544.700,00 | 180.544.700,00 | 16.136.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.085.200,00 | 3.085.200,00 | 3.085.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.095.510,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 31.030.300,00 | 29.530.300,00 | 29.530.300,00 | -1.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.080.000,00 | 7.080.000,00 | 7.080.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.260.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.398.100,00 | 15.398.100,00 | 15.398.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 15.399.230,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 84.040.000,00 | 84.040.000,00 | 63.640.000,00 | -20.400.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 115.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 95.804.000,00 | 95.804.000,00 | 47.890.000,00 | -47.914.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 135.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 295.422.700,00 | 153.083.400,00 | 153.083.400,00 | -142.339.300,00 | | | - | -<br>- | - | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 295.422.700,00 | 0,00 | 0,00 | -295.422.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 9 Unit | 0,00 | 153.083.400,00 | 153.083.400,00 | 153.083.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah pegawai Non ASN yang dibayarkan upah dan tunjangannya (dalam 1 tahun)* | | | | 60 orang | 60 orang | 613.763.020,00 | 612.787.948,00 | 706.492.804,00 | 92.729.784,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 607.034.745,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.517.200,00 | 2.517.200,00 | 2.517.200,00 | 0,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 244.090.280,00 | 244.090.280,00 | 244.090.280,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 244.156.605,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 367.155.540,00 | 366.180.468,00 | 459.885.324,00 | 92.729.784,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 359.378.140,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 632.773.500,00 | 702.773.500,00 | 563.871.500,00 | -68.902.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 736.533.705,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 185.191.500,00 | 185.191.500,00 | 175.941.500,00 | -9.250.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 236.603.400,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 116 Unit | 141.590.000,00 | 141.590.000,00 | 83.938.000,00 | -57.652.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 160.017.605,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 80.572.000,00 | 80.572.000,00 | 80.572.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 80.912.700,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 66.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 192.420.000,00 | 262.420.000,00 | 190.420.000,00 | -2.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 193.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Prosentase pengelolaan pendidikan**<br>**Rata-rata Lama Sekolah**<br>**Nilai Literasi Masyarakat** | | | | **99,5 %**<br>**100 %**<br>**10,65 tahun** | **100 %**<br>**10,65 %**<br>**99,5 tahun** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | 100 % | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 183.101.700,00 | 183.101.700,00 | 183.101.700,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | - | 1 Ruang | 0,00 | 159.840.000,00 | 159.840.000,00 | 159.840.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 175.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | 280 Paket | 44 Paket | 28.000.000,00 | 78.009.000,00 | 78.009.000,00 | 50.009.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 270.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | - | 59 Unit | 0,00 | 708.000.000,00 | 708.000.000,00 | 708.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 1344 Peserta Didik | 1344 Peserta Didik | 633.051.000,00 | 633.051.000,00 | 542.046.000,00 | -91.005.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* | | | | 144 Orang | 144 Orang | 2.023.872.480,00 | 2.606.576.112,00 | 3.486.360.960,00 | 1.462.488.480,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 74 Orang | 74 Orang | 8.230.500,00 | 8.230.500,00 | 8.230.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | 74 Satuan Pendidikan | 74 Satuan Pendidikan | 39.977.780,00 | 4.195.211.246,00 | 4.207.430.480,00 | 4.167.452.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER<br>DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 90.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 76 Orang | 76 Orang | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 76 Orang | 76 Orang | 2.047.200,00 | 2.047.200,00 | 2.047.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.597.800,00 | 39.597.800,00 | 39.597.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 123.897.454,00 | 124.083.538,00 | 160.741.240,00 | 36.843.786,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 5 Komunitas | 5 Komunitas | 300.642.900,00 | 244.652.900,00 | 231.157.600,00 | -69.485.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 381.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 19.511.600,00 | 19.511.600,00 | 19.511.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 22.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 20 Paket | 22 Paket | 5.000.000,00 | 229.996.500,00 | 229.996.500,00 | 224.996.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 7.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 76 Orang | 76 Orang | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 12971 Peserta Didik | 12971 Peserta Didik | 558.600.000,00 | 529.100.000,00 | 529.100.000,00 | -29.500.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.701.205.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | - | 28 Paket | 0,00 | 2.759.485.000,00 | 2.759.485.000,00 | 2.759.485.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | -<br>- | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | 100 % | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 164.550.000,00 | 271.110.000,00 | 271.110.000,00 | 106.560.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | - | 3 Unit | 0,00 | 133.200.000,00 | 133.200.000,00 | 133.200.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 832 Paket | 32 Paket | 85.952.000,00 | 85.952.000,00 | 85.952.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | - | 12 Paket | 0,00 | 90.240.000,00 | 90.240.000,00 | 90.240.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | - | 13 Unit | 0,00 | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 450.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 11176 Peserta Didik | 11176 Peserta Didik | 437.250.000,00 | 437.250.000,00 | 437.250.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.155.330.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 989 Peserta Didik | 989 Peserta Didik | 345.955.100,00 | 345.955.100,00 | 309.220.100,00 | -36.735.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | | | | 95 Orang | 95 Orang | 1.321.138.980,00 | 1.701.514.962,00 | 2.275.818.960,00 | 954.679.980,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 54.202.600,00 | 54.101.500,00 | 54.101.500,00 | -101.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 67.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | | | | 220 Satuan Pendidikan | 220 Satuan Pendidikan | 209.932.200,00 | 209.932.200,00 | 209.932.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | 20 Satuan Pendidikan | 20 Satuan Pendidikan | 39.609.780,00 | 1.639.245.946,00 | 1.651.455.124,00 | 1.611.845.344,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 1.996.700,00 | 1.996.700,00 | 1.996.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 1.901.700,00 | 1.901.700,00 | 1.901.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.564.400,00 | 5.564.400,00 | 5.564.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 98.871.550,00 | 98.848.715,00 | 127.476.800,00 | 28.605.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 140.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 13 Komunitas | 13 Komunitas | 14.764.100,00 | 14.764.100,00 | 11.072.600,00 | -3.691.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4.991.000,00 | 4.991.000,00 | 4.991.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 7.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 1.901.700,00 | 1.945.400,00 | 1.945.400,00 | 43.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 20 Paket | 20 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 7.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | - | 4 Paket | 0,00 | 228.000.000,00 | 228.000.000,00 | 228.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Persentase PAUD yang dikelola* | | | | 100 % | 100 % | 2.406.948.430,00 | 6.547.259.493,00 | 6.609.238.780,00 | 4.202.290.350,00 | | | - | -<br>- | Siswa dan Pendidik PAUD | | 4.403.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 108.421.740,00 | 108.607.338,00 | 1.999.865.040,00 | 1.891.443.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 125 Satuan Pendidikan | 125 Satuan Pendidikan | 30.903.000,00 | 30.903.000,00 | 30.903.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | | | | 125 Satuan Pendidikan | 125 Satuan Pendidikan | 115.904.150,00 | 2.783.658.815,00 | 2.814.206.900,00 | 2.698.302.750,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER<br>DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 1.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 2.253.400,00 | 2.253.400,00 | 2.253.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.111.000,00 | 7.111.000,00 | 7.111.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.253.800,00 | 7.251.600,00 | 5.971.600,00 | -1.282.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 9.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 4 Komunitas | 4 Komunitas | 11.349.600,00 | 11.349.600,00 | 9.253.100,00 | -2.096.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 2.503.400,00 | 2.503.400,00 | 2.503.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.240.000,00 | 39.240.000,00 | 39.240.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 42.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia* | | | | - | 31 Paket | 0,00 | 1.472.373.000,00 | 1.472.373.000,00 | 1.472.373.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | -<br>- | | | 1.700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 505 Satuan Pendidikan | 505 Satuan Pendidikan | 2.076.258.340,00 | 2.076.258.340,00 | 219.808.340,00 | -1.856.450.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 2.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | *Persentase Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang dikelola* | | | | 100 % | 100 % | 557.490.810,00 | 2.707.844.977,00 | 2.979.104.216,00 | 2.421.613.406,00 | | | - | -<br>- | Siswa dan Pendidik Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | | 3.954.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 20 Satuan Pendidikan | 20 Satuan Pendidikan | 119.402.400,00 | 119.402.400,00 | 119.376.600,00 | -25.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 170.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | - | 4 Satuan Pendidikan | 0,00 | 2.156.100.000,00 | 2.156.100.000,00 | 2.156.100.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER<br>DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA | - | -<br>- | | | 2.400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 1.903.400,00 | 1.903.400,00 | 1.903.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 1 Konten Digital | 1 Konten Digital | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 1.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.529.800,00 | 7.529.800,00 | 7.529.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | 1 Komunitas | 1 Komunitas | 10.254.300,00 | 10.254.300,00 | 8.568.100,00 | -1.686.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 1.903.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.903.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 1000 Peserta Didik | 1000 Peserta Didik | 411.247.510,00 | 407.405.077,00 | 680.376.316,00 | 269.128.806,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 1.350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum** | | | | **100 %** | **100 %** | **94.814.800,00** | **94.814.800,00** | **94.334.800,00** | **80.185.200,00** | | | | | | | **175.000.000,00** | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Persentase satuan pendidikan dasar yang menetapkan kurikulum* | | | | 100 % | 100 % | 94.814.800,00 | 94.814.800,00 | 94.334.800,00 | -480.000,00 | | | - | -<br>- | Pendidik Pendidikan Dasar | | 175.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya* | | | | 570 Orang | 570 Orang | 94.814.800,00 | 94.814.800,00 | 94.334.800,00 | -480.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 175.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase Guru dan tenaga kependidikan Berkualifikasi sesuai standar** | | | | **-** | **99 %** | **7.006.800,00** | **7.006.800,00** | **7.006.800,00** | **7.993.200,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | *Persentase Guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar* | | | | - | 100 % | 7.006.800,00 | 7.006.800,00 | 7.006.800,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.503.400,00 | 3.503.400,00 | 3.503.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 7.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.503.400,00 | 3.503.400,00 | 3.503.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 7.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.032.009.084,00** | **5.144.178.620,00** | **4.874.409.548,00** | **-157.599.536,00** | | | | | | | **8.010.000.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **5.032.009.084,00** | **5.144.178.620,00** | **4.874.409.548,00** | **-157.599.536,00** | | | | | | | **8.010.000.000,00** | |
| 1. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Persentase budaya lokal yang dikembangkan**<br>**Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan** | | | | **100 %**<br>**100,00 %** | **100 %**<br>**100,00 %** | **3.687.151.100,00** | **3.344.465.836,00** | **3.057.886.836,00** | **2.412.848.900,00** | | | | | | | **6.100.000.000,00** | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase kebudayaan yang dikelola* | | | | 82 % | 82 % | 3.597.151.100,00 | 2.143.787.736,00 | 1.860.208.736,00 | -1.736.942.364,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 6.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 10 Objek | 10 Objek | 3.597.151.100,00 | 2.143.787.736,00 | 1.860.208.736,00 | -1.736.942.364,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 6.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan* | | | | 92 % | 92 % | 90.000.000,00 | 1.200.678.100,00 | 1.197.678.100,00 | 1.107.678.100,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan* | | | | 3 Objek | 3 Objek | 90.000.000,00 | 1.200.678.100,00 | 1.197.678.100,00 | 1.107.678.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Persentase pelaku seni yang dibina** | | | | **92 %** | **92 %** | **498.855.300,00** | **863.461.700,00** | **840.271.700,00** | **101.144.700,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pelaku seni yang dibina* | | | | 24 % | 24 % | 498.855.300,00 | 863.461.700,00 | 840.271.700,00 | 341.416.400,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)* | | | | 70 Orang | 70 Orang | 101.783.400,00 | 466.389.800,00 | 443.199.800,00 | 341.416.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 397.071.900,00 | 397.071.900,00 | 397.071.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **Cakupan pembinaan sejarah** | | | | **67,00 %** | **67,00 %** | **204.290.600,00** | **294.290.600,00** | **290.610.600,00** | **105.709.400,00** | | | | | | | **310.000.000,00** | |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase sejarah/legenda kota/kampung yang didokumentasikan* | | | | 47 % | 47 % | 204.290.600,00 | 294.290.600,00 | 290.610.600,00 | 86.320.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 310.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.2.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 159.255.900,00 | 159.255.900,00 | 155.575.900,00 | -3.680.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.2.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.034.700,00 | 135.034.700,00 | 135.034.700,00 | 90.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Persentase cagar budaya yang dilestarikan** | | | | **17,00 %** | **17,00 %** | **233.395.000,00** | **233.395.000,00** | **228.805.000,00** | **166.605.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Persentase cagar budaya yang ditetapkan* | | | | 46 % | 46 % | 233.395.000,00 | 233.395.000,00 | 228.805.000,00 | -4.590.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan* | | | | 10 Objek | 10 Objek | 120.524.800,00 | 120.524.800,00 | 115.934.800,00 | -4.590.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | | | | 28 Objek | 28 Objek | 112.870.200,00 | 112.870.200,00 | 112.870.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **Persentase peningkatan kunjungan museum** | | | | **20,00 %** | **20,00 %** | **408.317.084,00** | **408.565.484,00** | **456.835.412,00** | **191.682.916,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | *Persentase pencapaian standardisasi museum* | | | | 100 % | 100 % | 408.317.084,00 | 408.565.484,00 | 456.835.412,00 | 48.518.328,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 408.317.084,00 | 408.565.484,00 | 456.835.412,00 | 48.518.328,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI JURANGOMBO 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 145.800.000,00 | 145.800.000,00 | 145.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 163 Peserta Didik | 163 Peserta Didik | 8.149.200,00 | 8.149.200,00 | 8.149.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 17.930.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI JURANGOMBO 2** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 120.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 127 Peserta Didik | 127 Peserta Didik | 6.349.100,00 | 6.349.100,00 | 6.349.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 13.970.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI JURANGOMBO 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 149.400.000,00 | 149.400.000,00 | 149.400.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 168 Peserta Didik | 168 Peserta Didik | 8.397.800,00 | 8.397.800,00 | 8.397.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 18.480.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI JURANGOMBO 5** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 141.300.000,00 | 141.300.000,00 | 141.300.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 157 Peserta Didik | 157 Peserta Didik | 7.850.000,00 | 7.850.000,00 | 7.850.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 17.270.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI MAGERSARI 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 63.000.000,00 | 63.077.978,00 | 63.077.978,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 65.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 86 Peserta Didik | 86 Peserta Didik | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 9.460.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI MAGERSARI 2** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 143.100.000,00 | 143.100.000,00 | 143.100.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 161 Peserta Didik | 161 Peserta Didik | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.710.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI MAGERSARI 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 57.600.000,00 | 61.175.788,00 | 61.175.788,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 82 Peserta Didik | 82 Peserta Didik | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang<br>Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 9.020.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 146.700.000,00 | 146.700.000,00 | 146.700.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 162 Peserta Didik | 162 Peserta Didik | 8.096.200,00 | 8.096.200,00 | 8.096.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.820.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 2** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 145.800.000,00 | 160.859.981,00 | 160.859.981,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 164 Peserta Didik | 164 Peserta Didik | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 18.040.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 107.100.000,00 | 107.100.000,00 | 107.100.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 122 Peserta Didik | 122 Peserta Didik | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang<br>Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 13.420.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 107.100.000,00 | 107.100.000,00 | 107.100.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 119 Peserta Didik | 119 Peserta Didik | 5.946.000,00 | 5.946.000,00 | 5.946.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 13.090.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 5** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 101.700.000,00 | 101.702.430,00 | 101.702.430,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 105.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 116 Peserta Didik | 116 Peserta Didik | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 12.760.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI TIDAR 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | 151.200.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 155.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 169 Peserta Didik | 169 Peserta Didik | 8.451.600,00 | 8.451.600,00 | 8.451.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 18.590.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI TIDAR 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 150.300.000,00 | 150.325.139,00 | 150.325.139,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 155.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 164 Peserta Didik | 164 Peserta Didik | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 18.040.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI TIDAR 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 144.900.000,00 | 145.382.763,00 | 145.382.763,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 145.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 162 Peserta Didik | 162 Peserta Didik | 8.093.700,00 | 8.093.700,00 | 8.093.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.820.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI TIDAR 5** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 146.700.000,00 | 146.700.000,00 | 146.700.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 156 Peserta Didik | 156 Peserta Didik | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.160.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI TIDAR 6** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 107.100.000,00 | 107.100.000,00 | 107.100.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 128 Peserta Didik | 128 Peserta Didik | 6.399.600,00 | 6.399.600,00 | 6.399.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 14.080.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI TIDAR 7** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Prosentase pengelolaan pendidikan**<br>**Rata-rata Lama Sekolah**<br>**Nilai Literasi Masyarakat** | | | | **-** | **100 %**<br>**10,65 tahun**<br>**99,5 %** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 105.300.000,00 | 105.306.544,00 | 105.306.544,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 116 Peserta Didik | 116 Peserta Didik | 5.799.000,00 | 5.799.000,00 | 5.799.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 12.760.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI CACABAN 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 93.600.000,00 | 102.832.046,00 | 102.832.046,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 120 Peserta Didik | 120 Peserta Didik | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 13.200.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI CACABAN 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 148.500.000,00 | 148.500.000,00 | 148.500.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 167 Peserta Didik | 167 Peserta Didik | 8.350.000,00 | 8.350.000,00 | 8.350.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 18.370.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI CACABAN 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 163 Peserta Didik | 163 Peserta Didik | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.930.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI CACABAN 5** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 108.900.000,00 | 108.900.044,00 | 108.900.044,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 130 Peserta Didik | 130 Peserta Didik | 6.452.500,00 | 6.452.500,00 | 6.452.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 14.300.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI CACABAN 6** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 101.700.000,00 | 101.778.501,00 | 101.778.501,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 105.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 108 Peserta Didik | 108 Peserta Didik | 5.399.800,00 | 5.399.800,00 | 5.399.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 11.880.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI GELANGAN 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 86.400.000,00 | 86.991.599,00 | 86.991.599,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 90.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 103 Peserta Didik | 103 Peserta Didik | 5.139.400,00 | 5.139.400,00 | 5.139.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 11.330.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI GELANGAN 2** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 99.900.000,00 | 99.949.081,00 | 99.949.081,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 119 Peserta Didik | 119 Peserta Didik | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 13.090.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI GELANGAN 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 76.500.000,00 | 76.936.434,00 | 76.936.434,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 89 Peserta Didik | 89 Peserta Didik | 4.227.700,00 | 4.227.700,00 | 4.227.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 9.790.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI GELANGAN 5** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 136.800.000,00 | 136.800.000,00 | 136.800.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 140.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 150 Peserta Didik | 150 Peserta Didik | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 16.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI GELANGAN 6** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 131.400.000,00 | 131.400.000,00 | 131.400.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 135.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 145 Peserta Didik | 145 Peserta Didik | 7.249.950,00 | 7.249.950,00 | 7.249.950,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 15.950.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI MAGELANG 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 132.300.000,00 | 132.300.000,00 | 132.300.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 135.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 147 Peserta Didik | 147 Peserta Didik | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 16.170.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI MAGELANG 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 101.700.000,00 | 101.700.000,00 | 101.700.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 105.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 113 Peserta Didik | 113 Peserta Didik | 5.642.000,00 | 5.642.000,00 | 5.642.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 12.430.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI MAGELANG 5** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 90.900.000,00 | 90.900.000,00 | 90.900.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 96 Peserta Didik | 96 Peserta Didik | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 10.560.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI MAGELANG 6** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 285.300.000,00 | 285.300.000,00 | 285.300.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 290.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 314 Peserta Didik | 314 Peserta Didik | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 34.540.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI MAGELANG 7** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 292.500.000,00 | 293.111.500,00 | 293.111.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 326 Peserta Didik | 326 Peserta Didik | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 35.860.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KEMIRIREJO 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 296.100.000,00 | 296.380.015,00 | 296.380.015,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 329 Peserta Didik | 329 Peserta Didik | 16.446.300,00 | 16.446.300,00 | 16.446.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 36.190.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KEMIRIREJO 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 297.900.000,00 | 397.183.158,00 | 397.183.158,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 337 Peserta Didik | 337 Peserta Didik | 16.850.000,00 | 16.850.000,00 | 16.850.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 37.070.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 98.100.000,00 | 98.100.000,00 | 98.100.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 115 Peserta Didik | 115 Peserta Didik | 5.716.000,00 | 5.716.000,00 | 5.716.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 12.650.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 2** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 61.200.000,00 | 61.200.123,00 | 61.200.123,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 65.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 66 Peserta Didik | 66 Peserta Didik | 3.289.800,00 | 3.289.800,00 | 3.289.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang<br>Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 7.260.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 55.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 66 Peserta Didik | 66 Peserta Didik | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 7.260.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 94.500.000,00 | 94.500.016,00 | 94.500.016,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 95.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 100 Peserta Didik | 100 Peserta Didik | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 11.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 5** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 145.800.000,00 | 145.800.000,00 | 145.800.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 160 Peserta Didik | 160 Peserta Didik | 7.999.100,00 | 7.999.100,00 | 7.999.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 6** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 129.600.000,00 | 129.600.143,00 | 129.600.143,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 130.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 144 Peserta Didik | 144 Peserta Didik | 7.199.400,00 | 7.199.400,00 | 7.199.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 15.840.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KEDUNGSARI 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 144.000.000,00 | 155.315.000,00 | 155.315.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 145.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 161 Peserta Didik | 161 Peserta Didik | 8.043.400,00 | 8.043.400,00 | 8.043.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.710.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KEDUNGSARI 2** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 103.500.000,00 | 103.500.000,00 | 103.500.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 103 Peserta Didik | 103 Peserta Didik | 5.146.000,00 | 5.146.000,00 | 5.146.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 11.330.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KEDUNGSARI 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 139.500.000,00 | 139.500.000,00 | 139.500.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 140.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 152 Peserta Didik | 152 Peserta Didik | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 16.720.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KEDUNGSARI 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 149.400.000,00 | 149.400.000,00 | 149.400.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 160.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 164 Peserta Didik | 164 Peserta Didik | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 18.040.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KEDUNGSARI 5** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 276.300.000,00 | 294.995.759,00 | 294.995.759,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 280.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 302 Peserta Didik | 302 Peserta Didik | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 33.220.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KRAMAT 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 136.800.000,00 | 136.800.000,00 | 136.800.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 140.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 155 Peserta Didik | 155 Peserta Didik | 7.748.900,00 | 7.748.900,00 | 7.748.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.050.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KRAMAT 2** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 96.300.000,00 | 97.055.200,00 | 97.055.200,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 93 Peserta Didik | 93 Peserta Didik | 4.649.100,00 | 4.649.100,00 | 4.649.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 10.230.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KRAMAT 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 105.300.000,00 | 105.300.000,00 | 105.300.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 107 Peserta Didik | 107 Peserta Didik | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 11.770.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KRAMAT 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 108.900.000,00 | 108.900.138,00 | 108.900.138,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 123 Peserta Didik | 123 Peserta Didik | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 13.530.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI KRAMAT 5** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 65.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 86 Peserta Didik | 86 Peserta Didik | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 9.460.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI POTROBANGSAN 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 89.100.000,00 | 89.100.096,00 | 89.100.096,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 90.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 95 Peserta Didik | 95 Peserta Didik | 4.748.200,00 | 4.748.200,00 | 4.748.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 10.450.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI POTROBANGSAN 2** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 145.800.000,00 | 145.806.139,00 | 145.806.139,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 163 Peserta Didik | 163 Peserta Didik | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.930.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI POTROBANGSAN 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 135.900.000,00 | 136.014.500,00 | 136.014.500,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 140.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 147 Peserta Didik | 147 Peserta Didik | 4.398.800,00 | 4.398.800,00 | 4.398.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 16.170.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI POTROBANGSAN 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 88 Peserta Didik | 88 Peserta Didik | 4.398.800,00 | 4.398.800,00 | 4.398.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 9.680.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI WATES 1** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 95.400.000,00 | 95.400.000,00 | 95.400.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 115 Peserta Didik | 115 Peserta Didik | 5.648.000,00 | 5.648.000,00 | 5.648.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 12.650.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI WATES 2** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 113.400.000,00 | 113.400.000,00 | 113.400.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 115.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 133 Peserta Didik | 133 Peserta Didik | 6.648.600,00 | 6.648.600,00 | 6.648.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 14.630.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI WATES 3** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Rata-rata Lama Sekolah**<br>**Prosentase pengelolaan pendidikan**<br>**Nilai Literasi Masyarakat** | | | | **-** | **10,65 tahun**<br>**100 %**<br>**99,5 %** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 70 Peserta Didik | 70 Peserta Didik | 3.498.300,00 | 3.498.300,00 | 3.498.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 7.700.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SD NEGERI WATES 4** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Rata-rata Lama Sekolah**<br>**Prosentase pengelolaan pendidikan**<br>**Nilai Literasi Masyarakat** | | | | **-** | **10,65 tahun**<br>**100 %**<br>**99,5 %** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola* | | | | - | 100 % | 4.208.220.964,00 | 20.529.686.346,00 | 21.520.088.545,00 | 17.311.867.581,00 | | | - | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Dasar | | 18.239.195.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 108.900.000,00 | 114.460.600,00 | 114.460.600,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 123 Peserta Didik | 123 Peserta Didik | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 13.530.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 1 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 763 Peserta Didik | 763 Peserta Didik | 67.900.000,00 | 67.900.000,00 | 67.900.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 125.895.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 841.500.000,00 | 845.340.500,00 | 845.340.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 850.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 2 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 766 Peserta Didik | 766 Peserta Didik | 76.575.500,00 | 76.575.500,00 | 76.575.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 126.390.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 870.100.000,00 | 870.100.000,00 | 870.100.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 871.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 3 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 756 Peserta Didik | 756 Peserta Didik | 75.600.000,00 | 75.600.000,00 | 75.600.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 124.740.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 822.800.000,00 | 822.800.000,00 | 822.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 4 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 548 Peserta Didik | 548 Peserta Didik | 54.800.000,00 | 54.800.000,00 | 54.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 90.420.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 612.700.000,00 | 612.700.000,00 | 612.700.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 5 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 738 Peserta Didik | 738 Peserta Didik | 73.800.000,00 | 73.800.000,00 | 73.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 121.770.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 806.300.000,00 | 806.300.407,00 | 806.300.407,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 6 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 564 Peserta Didik | 564 Peserta Didik | 56.399.798,00 | 56.399.798,00 | 56.399.798,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang<br>Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 93.060.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 627.000.000,00 | 627.000.000,00 | 627.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 7 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 571 Peserta Didik | 571 Peserta Didik | 85.650.000,00 | 85.650.000,00 | 85.650.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 94.215.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 631.400.000,00 | 631.796.286,00 | 631.796.286,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 8 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 677 Peserta Didik | 677 Peserta Didik | 67.700.000,00 | 67.700.000,00 | 67.700.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 111.705.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 759.000.000,00 | 759.000.000,00 | 759.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 9 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 620 Peserta Didik | 620 Peserta Didik | 61.999.900,00 | 61.999.900,00 | 61.999.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 102.300.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 689.700.000,00 | 703.373.619,00 | 703.373.619,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 690.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 10 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 654 Peserta Didik | 654 Peserta Didik | 65.400.000,00 | 65.400.000,00 | 65.400.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 107.910.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 713.900.000,00 | 713.900.000,00 | 713.900.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 11 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 605 Peserta Didik | 605 Peserta Didik | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 99.825.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 691.900.000,00 | 691.900.000,00 | 691.900.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | - - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 12 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 554 Peserta Didik | 554 Peserta Didik | 55.400.000,00 | 55.400.000,00 | 55.400.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 91.410.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 614.900.000,00 | 615.293.526,00 | 615.293.526,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **SMP NEGERI 13 MAGELANG** | | | | | | | **127.273.947.629,00** | **206.835.377.468,00** | **205.276.522.302,00** | **78.002.574.673,00** | | | | | | | **145.698.147.167,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **122.241.938.545,00** | **201.691.198.848,00** | **200.402.112.754,00** | **78.160.174.209,00** | | | | | | | **137.688.147.167,00** | |
| 1. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Prosentase pengelolaan pendidikan**<br>**Rata-rata Lama Sekolah**<br>**Nilai Literasi Masyarakat** | | | | **-** | **100 %**<br>**10,65 tahun**<br>**99,5 %** | **10.842.155.212,00** | **45.835.617.737,00** | **47.752.625.661,00** | **24.661.459.788,00** | | | | | | | **35.503.615.000,00** | |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola* | | | | - | 100 % | 3.669.495.008,00 | 16.050.826.921,00 | 16.644.194.120,00 | 12.974.699.112,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Siswa dan Pendidik Sekolah Menengah Pertama | | 8.906.920.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 730 Peserta Didik | 730 Peserta Didik | 72.938.000,00 | 72.938.000,00 | 72.938.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 120.450.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | - | 1 Satuan Pendidikan | 0,00 | 772.200.000,00 | 772.548.100,00 | 772.548.100,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah** | | | | **-** | **100 %** | **330.315.377.252,00** | **331.071.034.299,00** | **393.903.857.781,00** | **-<br>231.295.261.318,00** | | | | | | | **99.020.115.934,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 37.022.970,00 | 66.122.773,00 | 50.892.328,00 | 13.869.358,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Dinas Kesehatan dan UPT | | 51.757.050,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.749.200,00 | 5.749.200,00 | 4.549.200,00 | -1.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 7.646.980,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.637.700,00 | 1.637.700,00 | 1.192.200,00 | -445.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 4.441.800,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.904.400,00 | 1.904.400,00 | 1.348.400,00 | -556.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 4.735.060,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.579.400,00 | 2.579.400,00 | 1.874.700,00 | -704.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 2.837.560,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.231.400,00 | 2.231.400,00 | 2.231.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 2.465.320,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 22.920.870,00 | 52.020.673,00 | 39.696.428,00 | 16.775.558,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 29.630.330,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pelaksanaan Pengadministrasian keuangan* | | | | - | 100 % | 99.291.534.692,00 | 97.213.558.201,00 | 91.234.226.629,00 | -8.057.308.063,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Kesehatan dan UPT | | 84.196.300.872,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 869 Orang/ bulan | 869 Orang/ bulan | 99.257.137.792,00 | 97.179.161.301,00 | 91.215.493.429,00 | -8.041.644.363,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 84.140.791.022,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 34.396.900,00 | 34.396.900,00 | 18.733.200,00 | -15.663.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 55.509.850,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah* | | | | - | 100 % | 1.792.400,00 | 1.792.400,00 | 1.344.200,00 | -448.200,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Kesehatan dan UPT | | 3.352.140,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 19 Laporan | 19 Laporan | 1.792.400,00 | 1.792.400,00 | 1.344.200,00 | -448.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 3.352.140,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Perentase pelaksanaan Pengadministrasian kepegawaian* | | | | - | 100 % | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 | 1.411.500,00 | -496.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Kesehatan dan UPT | | 3.352.140,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 | 1.411.500,00 | -496.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 3.352.140,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Pengadministrasian umum dengan lancar* | | | | - | 100 % | 194.872.000,00 | 164.186.400,00 | 111.464.600,00 | -83.407.400,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Kesehatan dan UPT | | 339.430.370,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 6.593.000,00 | 3.718.600,00 | 3.718.600,00 | -2.874.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 9.025.170,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 32.649.600,00 | 9.940.500,00 | 9.940.500,00 | -22.709.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 45.420.760,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 6.412.000,00 | 6.412.000,00 | 4.809.000,00 | -1.603.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 7.053.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.400.000,00 | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | -2.580.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 7.920.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 7.188.800,00 | 4.666.900,00 | 4.666.900,00 | -2.521.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 19.484.740,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 840.000,00 | -360.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 3.009.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 80.471.000,00 | 80.471.000,00 | 30.360.000,00 | -50.111.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 177.516.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.498.500,00 | 2.498.300,00 | 1.850.500,00 | -648.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | - | 100 % | 1.173.771.690,00 | 820.470.025,00 | 899.660.360,00 | -274.111.330,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Kesehatan dan UPT | | 1.343.025.026,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.592.200,00 | 4.128.200,00 | 4.128.200,00 | -464.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 5.056.590,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 403.138.560,00 | 140.651.760,00 | 140.651.760,00 | -262.486.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 445.135.416,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 199.613.030,00 | 109.262.165,00 | 136.406.860,00 | -63.206.170,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 285.833.020,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah* | | | | - | 100 % | 651.475.500,00 | 439.996.500,00 | 390.475.250,00 | -261.000.250,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Kesehatan dan UPT | | 982.898.336,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 70.850.000,00 | 70.850.000,00 | 58.500.000,00 | -12.350.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 101.090.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 45 Unit | 45 Unit | 179.694.000,00 | 123.130.000,00 | 114.812.750,00 | -64.881.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 302.376.800,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 71 Unit | 71 Unit | 136.220.000,00 | 17.284.000,00 | 19.884.000,00 | -116.336.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 196.933.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 91.630.500,00 | 55.651.500,00 | 51.672.500,00 | -39.958.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 182.498.536,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular**<br>**Indeks Keluarga Sehat**<br>**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar**<br>**Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular** | | | | **0,80**<br>**100 %**<br>**67 %**<br>**77 %** | **67**<br>**0,80 %**<br>**100 %**<br>**77 %** | **24.192.864.215,00** | **37.249.770.843,00** | **45.892.523.943,00** | **6.463.028.349,00** | | | | | | | **30.655.892.564,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP*<br>*Cakupan pembantu puskesmas*<br>*Cakupan puskesmas*<br>*Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan*<br>*Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk*<br>*Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk*<br>*Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk* | | | | 0.05<br>0.20<br>1<br>100<br>70 | 0.05<br>0.30<br>1<br>100<br>70 | 5.272.045.750,00 | 11.150.439.850,00 | 16.310.041.788,00 | 11.037.996.038,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat Kota Magelang | | 2.900.068.620,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.890.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.890.425.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 109.575.000,00 | 3.132.384.300,00 | 3.132.384.300,00 | 3.022.809.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 296.480.700,00 | 4.539.786.700,00 | 4.539.388.638,00 | 4.242.907.938,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.519.755.710,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB semua kasus*<br>*Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Treatment Success Rate / TSR)*<br>*Angka Kelangsungan Hidup Bayi*<br>*Angka notifikasi semua kasus TB yang diobati (Case Notification Rate/CNR)*<br>*Angka notifikasi semua kasus TB yang diobati (Case Notification Rate/CNR) per 100.000 penduduk*<br>*Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan*<br>*Cakupan balita pneumonia yang ditangani*<br>*Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam*<br>*Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)*<br>*Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*<br>*Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani*<br>*Cakupan kunjungan bayi*<br>*Cakupan kunjungan Ibu hamil K4*<br>*Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani*<br>*Cakupan pelayanan anak Balita*<br>*Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)*<br>*Cakupan pelayanan nifas* | | | | - | 0<br>0.18<br>0,21<br>0.5<br>1<br>100<br><15<br>17<br>2<br>3.5<br><4,5<br>465<br>474<br><50<br>90<br>95<br>96<br>988 | 18.412.099.165,00 | 25.700.756.593,00 | 29.182.872.455,00 | 10.770.773.290,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat Kota Magelang | | 27.034.136.274,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD*<br>*Cakupan pengobatan semua kasus TB) yang diobati (Case Detection Rate/CDR)*<br>*Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk*<br>*Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi*<br>*Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta*<br>*Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria*<br>*Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta*<br>*Kejadian malaria per 1.000 orang*<br>*Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun*<br>*Penderita diare yang ditangani*<br>*Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak*<br>*Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP*<br>*Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar*<br>*Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar"*<br>*Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*<br>*Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*<br>*Persentase Warga Negara usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan*<br>*Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun*<br>*Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi*<br>*Prevalensi obesitas pada penduduk*<br>*Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita*<br>*Prevalensi tekanan darah tinggi*<br>*Proporsi jumlah penduduk usia 15-20 memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS "*<br>*Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS*<br>*Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan*<br>*Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan*<br>*Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1225 Orang | 1225 Orang | 40.143.200,00 | 40.143.200,00 | 37.703.200,00 | -2.440.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 67.951.730,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1099 Orang | 1099 Orang | 6.404.700,00 | 6.404.700,00 | 6.404.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 7.051.550,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1115 Orang | 1115 Orang | 5.051.200,00 | 102.551.200,00 | 159.801.200,00 | 154.750.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 12.230.790,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 5593 Orang | 5593 Orang | 14.743.000,00 | 14.743.000,00 | 9.743.000,00 | -5.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 13.521.970,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 16952 Orang | 16952 Orang | 6.945.000,00 | 7.685.000,00 | 6.425.000,00 | -520.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 229.077.310,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 83302 Orang | 83302 Orang | 58.749.400,00 | 58.749.400,00 | 44.419.400,00 | -14.330.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 808.512.210,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 19303 Orang | 19303 Orang | 5.005.900,00 | 11.505.900,00 | 9.615.900,00 | 4.610.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON<br>FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 42.167.510,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 39913 Orang | 39913 Orang | 15.930.900,00 | 15.930.900,00 | 9.820.900,00 | -6.110.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 92.861.010,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2873 Orang | 2873 Orang | 9.857.000,00 | 9.857.000,00 | 9.707.000,00 | -150.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 112.493.150,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 322 Orang | 322 Orang | 15.113.600,00 | 15.113.600,00 | 12.303.600,00 | -2.810.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 40.999.860,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 4738 Orang | 4738 Orang | 61.834.200,00 | 61.834.200,00 | 52.984.200,00 | -8.850.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 120.345.280,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 3040 Orang | 3040 Orang | 182.883.900,00 | 182.883.900,00 | 199.383.900,00 | 16.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 282.251.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.540.000,00 | -1.960.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 7.150.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 135.179.370,00 | 1.359.576.573,00 | 1.356.806.125,00 | 1.221.626.755,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 396.988.570,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.311.000,00 | 31.679.700,00 | 31.679.700,00 | 17.368.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 31.787.140,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.339.800,00 | 26.339.800,00 | 18.129.800,00 | -8.210.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 37.401.650,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 156.645.300,00 | 156.645.300,00 | 156.645.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.728.500,00 | 26.688.500,00 | 20.728.500,00 | -5.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 47.236.640,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 61.051.600,00 | 73.251.600,00 | 63.891.600,00 | 2.840.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 80.380.520,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 45.852.800,00 | 45.852.800,00 | 36.972.800,00 | -8.880.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 439.284.780,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.696.089.460,00 | 13.957.686.594,00 | 16.028.437.992,00 | 4.332.348.532,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 16.998.021.691,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 26299 Orang | 26299 Orang | 9.451.700,00 | 9.451.700,00 | 9.451.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 104.670.170,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 13 Paket | 13 Paket | 8.998.700,00 | 290.261.700,00 | 282.583.000,00 | 273.584.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 9.898.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 668.596.141,00 | 0,00 | 0,00 | -668.596.141,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 18.799.000,00 | 18.799.000,00 | 18.799.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON<br>FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 32.586.600,00 | 32.586.600,00 | 20.746.600,00 | -11.840.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 53.848.960,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37.505.500,00 | 37.505.500,00 | 36.545.500,00 | -960.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 70.781.040,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.112.199.030,00 | 1.112.198.226,00 | 1.318.253.252,00 | 206.054.222,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.492.722.163,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 975 Orang | 975 Orang | 31.226.000,00 | 31.226.000,00 | 9.096.000,00 | -22.130.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 167.317.040,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 217 Orang | 217 Orang | 45.896.800,00 | 45.896.800,00 | 38.306.800,00 | -7.590.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 64.811.120,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 5.799.600,00 | -1.160.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 7.656.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 52.170.000,00 | 52.170.000,00 | 52.170.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 16.750.000,00 | 16.750.000,00 | 16.750.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 16.750.000,00 | 16.750.000,00 | 16.750.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ijin Operasionalnya Berlaku Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi* | | | | - | 100 % | 508.719.300,00 | 381.824.400,00 | 382.859.700,00 | -125.859.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Magelang | | 721.687.670,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | | | | 36 Unit | 36 Unit | 15.555.200,00 | 15.555.200,00 | 10.390.500,00 | -5.164.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 30.837.180,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 71 Unit | 71 Unit | 242.466.100,00 | 242.466.100,00 | 249.466.100,00 | 7.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 380.141.190,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.340.000,00 | 3.340.000,00 | 2.540.000,00 | -800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 7.275.400,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **87.127.370,00** | **370.334.573,00** | **353.697.428,00** | **78.913.463,00** | | | | | | | **166.040.833,00** | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentase tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki SIP.* | | | | - | 100 % | 9.459.900,00 | 9.459.900,00 | 6.429.200,00 | -3.030.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Tenaga Kesehatan Kota Magelang | | 18.341.290,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 9.459.900,00 | 9.459.900,00 | 6.429.200,00 | -3.030.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 18.341.290,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan*<br>*Rasio dokter per satuan penduduk*<br>*Rasio SDM Kesehatan (komposit 3 rasio indikator2 di bawah)*<br>*Rasio tenaga medis per satuan penduduk* | | | | - | 10<br>2.5<br>3<br>4.4 | 53.502.670,00 | 70.588.873,00 | 65.829.828,00 | 12.327.158,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Tenaga Kesehatan Kota Magelang | | 102.851.003,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.769.970,00 | 33.762.173,00 | 33.499.928,00 | -2.270.042,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 47.370.743,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 33 Dokumen | 33 Dokumen | 17.732.700,00 | 36.826.700,00 | 32.329.900,00 | 14.597.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 55.480.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten* | | | | - | 100 % | 24.164.800,00 | 290.285.800,00 | 281.438.400,00 | 257.273.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Tenaga Kesehatan Kota Magelang | | 44.848.540,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 24.164.800,00 | 290.285.800,00 | 281.438.400,00 | 257.273.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 44.848.540,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat laik higiene** | | | | **-** | **100 %** | **226.469.700,00** | **394.493.800,00** | **378.457.500,00** | **58.418.332,00** | | | | | | | **284.888.032,00** | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | *Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin* | | | | - | 40 Unit | 11.074.100,00 | 59.004.100,00 | 55.934.900,00 | 44.860.800,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang beredar | | 18.345.030,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.074.100,00 | 59.004.100,00 | 55.934.900,00 | 44.860.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 18.345.030,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | *Jumlah Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga yang Diterbitkan* | | | | - | 60 Dokumen | 13.138.500,00 | 85.079.000,00 | 76.611.000,00 | 63.472.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Industri rumah tangga pangan di Kota Magelang | | 26.267.010,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.138.500,00 | 85.079.000,00 | 76.611.000,00 | 63.472.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 26.267.010,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | *Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diawasi kelayakannya* | | | | - | 100 % | 10.486.300,00 | 10.486.300,00 | 9.056.800,00 | -1.429.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Tempat Pengelolaan Makanan di Kota Magelang | | 24.198.460,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.486.300,00 | 10.486.300,00 | 9.056.800,00 | -1.429.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 24.198.460,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | *Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap jajanan yang beredar* | | | | - | 100 % | 22.460.200,00 | 22.460.200,00 | 22.460.200,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Sentra Makanan Jajanan di Kota Magelang | | 24.739.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 22.460.200,00 | 22.460.200,00 | 22.460.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 24.739.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | *Persentase sampel produk IRTP yang diperiksa* | | | | - | 100 % | 169.310.600,00 | 217.464.200,00 | 214.394.600,00 | 45.084.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Industri rumah tangga pangan di Kota Magelang | | 191.338.532,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 23.512.900,00 | 173.671.400,00 | 170.601.800,00 | 147.088.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 26.053.610,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri** | | | | **-** | **94,12 %** | **15.316.800,00** | **659.063.282,00** | **915.573.282,00** | **135.502.220,00** | | | | | | | **150.819.020,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase kegiatan penyuluhan kesehatan yang melibatkan masyarakat dan lintas sektor* | | | | - | 100 % | 6.388.800,00 | 6.388.800,00 | 262.898.800,00 | 256.510.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 33.033.220,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.388.800,00 | 6.388.800,00 | 262.898.800,00 | 256.510.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 33.033.220,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Peserta yang memperoleh penyuluhan gerakan hidup bersih dan sehat* | | | | - | 100 % | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 44.793.100,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 44.793.100,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio posyandu per satuan balita* | | | | - | 30 % | 4.928.000,00 | 648.674.482,00 | 648.674.482,00 | 643.746.482,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 72.992.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.928.000,00 | 580.294.482,00 | 580.294.482,00 | 575.366.482,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 72.992.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MAGELANG SELATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah** | | | | **-** | **100 undefined** | **330.315.377.252,00** | **331.071.034.299,00** | **393.903.857.781,00** | **-<br>231.295.261.318,00** | | | | | | | **99.020.115.934,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Terlaksananya Pelayanan BLUD* | | | | - | 100 % | 228.963.000.000,00 | 232.363.000.000,00 | 301.214.382.914,00 | 72.251.382.914,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Puskesmas Magelang Selatan | | 12.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.532.480.144,00 | 432.480.144,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 2.200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **24.192.864.215,00** | **37.249.770.843,00** | **45.892.523.943,00** | **6.463.028.349,00** | | | | | | | **30.655.892.564,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 18.412.099.165,00 | 25.700.756.593,00 | 29.182.872.455,00 | 10.770.773.290,00 | | | - | -<br>- | - | | 27.034.136.274,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 180 Orang | 0,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 120 Orang | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 10 Orang | 0,00 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 8 Orang | 0,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 275.310.000,00 | 275.310.000,00 | 275.310.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 28.200.000,00 | 28.200.000,00 | 28.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 60.488.000,00 | 60.488.000,00 | 60.488.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 2 Orang | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 71.610.000,00 | 71.610.000,00 | 71.610.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 380.126.211,00 | 619.389.948,00 | 619.389.948,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 147.730.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **15.316.800,00** | **659.063.282,00** | **915.573.282,00** | **135.502.220,00** | | | | | | | **150.819.020,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.928.000,00 | 648.674.482,00 | 648.674.482,00 | 643.746.482,00 | | | - | -<br>- | - | | 72.992.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 13.980.000,00 | 13.980.000,00 | 13.980.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS JURANGOMBO** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah** | | | | **-** | **100 %** | **330.315.377.252,00** | **331.071.034.299,00** | **393.903.857.781,00** | **-<br>231.295.261.318,00** | | | | | | | **99.020.115.934,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Terlaksananya Pelayanan BLUD* | | | | - | 100 % | 228.963.000.000,00 | 232.363.000.000,00 | 301.214.382.914,00 | 72.251.382.914,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Puskesmas Jurangombo | | 12.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.910.000.000,00 | 1.910.000.000,00 | 2.826.747.111,00 | 916.747.111,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.920.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **24.192.864.215,00** | **37.249.770.843,00** | **45.892.523.943,00** | **6.463.028.349,00** | | | | | | | **30.655.892.564,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 18.412.099.165,00 | 25.700.756.593,00 | 29.182.872.455,00 | 10.770.773.290,00 | | | - | - - | - | | 27.034.136.274,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 276.030.000,00 | 276.030.000,00 | 276.030.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 40.380.000,00 | 40.380.000,00 | 40.380.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 56.800.000,00 | 56.800.000,00 | 56.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 258.278.692,00 | 282.372.256,00 | 282.372.256,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 105.409.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **15.316.800,00** | **659.063.282,00** | **915.573.282,00** | **135.502.220,00** | | | | | | | **150.819.020,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.928.000,00 | 648.674.482,00 | 648.674.482,00 | 643.746.482,00 | | | - | -<br>- | - | | 72.992.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MAGELANG TENGAH (BOTTON)** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah** | | | | **-** | **100 %** | **330.315.377.252,00** | **331.071.034.299,00** | **393.903.857.781,00** | **- 231.295.261.318,00** | | | | | | | **99.020.115.934,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Terlaksananya Pelayanan BLUD* | | | | - | 100 % | 228.963.000.000,00 | 232.363.000.000,00 | 301.214.382.914,00 | 72.251.382.914,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Puskesmas Magelang Tengah | | 12.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 1.960.000.000,00 | 1.960.000.000,00 | 3.288.485.790,00 | 1.328.485.790,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 2.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **24.192.864.215,00** | **37.249.770.843,00** | **45.892.523.943,00** | **6.463.028.349,00** | | | | | | | **30.655.892.564,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 18.412.099.165,00 | 25.700.756.593,00 | 29.182.872.455,00 | 10.770.773.290,00 | | | - | -<br>- | - | | 27.034.136.274,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 19 Orang | 0,00 | 25.600.000,00 | 25.600.000,00 | 25.600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 339.850.000,00 | 339.850.000,00 | 339.850.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 70.200.000,00 | 70.200.000,00 | 70.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 409.945.211,00 | 649.208.948,00 | 649.208.948,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 168.654.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **15.316.800,00** | **659.063.282,00** | **915.573.282,00** | **135.502.220,00** | | | | | | | **150.819.020,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.928.000,00 | 648.674.482,00 | 648.674.482,00 | 643.746.482,00 | | | - | -<br>- | - | | 72.992.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KERKOPAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah** | | | | **-** | **100 %** | **330.315.377.252,00** | **331.071.034.299,00** | **393.903.857.781,00** | **-<br>231.295.261.318,00** | | | | | | | **99.020.115.934,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Terlaksananya Pelayanan BLUD* | | | | - | 100 % | 228.963.000.000,00 | 232.363.000.000,00 | 301.214.382.914,00 | 72.251.382.914,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Puskesmas Kerkopan | | 12.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 0 | 1 0 | 1.266.000.000,00 | 1.266.000.000,00 | 2.095.174.689,00 | 829.174.689,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.280.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **24.192.864.215,00** | **37.249.770.843,00** | **45.892.523.943,00** | **6.463.028.349,00** | | | | | | | **30.655.892.564,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 18.412.099.165,00 | 25.700.756.593,00 | 29.182.872.455,00 | 10.770.773.290,00 | | | - | -<br>- | - | | 27.034.136.274,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 15.400.000,00 | 15.400.000,00 | 15.400.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 90.966.000,00 | 90.966.000,00 | 90.966.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 20.372.000,00 | 20.372.000,00 | 20.372.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 36.890.000,00 | 36.890.000,00 | 36.890.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 242.904.865,00 | 273.021.820,00 | 273.021.820,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 105.409.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **15.316.800,00** | **659.063.282,00** | **915.573.282,00** | **135.502.220,00** | | | | | | | **150.819.020,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.928.000,00 | 648.674.482,00 | 648.674.482,00 | 643.746.482,00 | | | - | - - | - | | 72.992.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MAGELANG UTARA** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah** | | | | **-** | **100 %** | **330.315.377.252,00** | **331.071.034.299,00** | **393.903.857.781,00** | **- 231.295.261.318,00** | | | | | | | **99.020.115.934,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Terlaksananya Pelayanan BLUD* | | | | - | 100 % | 228.963.000.000,00 | 232.363.000.000,00 | 301.214.382.914,00 | 72.251.382.914,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Puskesmas Magelang Utara | | 12.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 2.227.000.000,00 | 2.227.000.000,00 | 3.636.090.227,00 | 1.409.090.227,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **24.192.864.215,00** | **37.249.770.843,00** | **45.892.523.943,00** | **6.463.028.349,00** | | | | | | | **30.655.892.564,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 18.412.099.165,00 | 25.700.756.593,00 | 29.182.872.455,00 | 10.770.773.290,00 | | | - | - - | - | | 27.034.136.274,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 213.460.000,00 | 213.460.000,00 | 213.460.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 93.856.000,00 | 93.856.000,00 | 93.856.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 53.200.000,00 | 53.200.000,00 | 53.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 361.577.384,00 | 606.864.512,00 | 606.864.512,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 168.654.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **15.316.800,00** | **659.063.282,00** | **915.573.282,00** | **135.502.220,00** | | | | | | | **150.819.020,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.928.000,00 | 648.674.482,00 | 648.674.482,00 | 643.746.482,00 | | | - | -<br>- | - | | 72.992.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **LABORATORIUM KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **330.315.377.252,00** | **331.071.034.299,00** | **393.903.857.781,00** | **-231.295.261.318,00** | | | | | | | **99.020.115.934,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 228.963.000.000,00 | 232.363.000.000,00 | 301.214.382.914,00 | 72.251.382.914,00 | | | - | -<br>- | - | | 12.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 900.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **24.192.864.215,00** | **37.249.770.843,00** | **45.892.523.943,00** | **6.463.028.349,00** | | | | | | | **30.655.892.564,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP* | | | | - | 100 % | 5.272.045.750,00 | 11.150.439.850,00 | 16.310.041.788,00 | 11.037.996.038,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Magelang | | 2.900.068.620,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 553.363.900,00 | 476.747.700,00 | 476.747.700,00 | -76.616.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 920.312.910,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP* | | | | - | 100 % | 18.412.099.165,00 | 25.700.756.593,00 | 29.182.872.455,00 | 10.770.773.290,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat Kota Magelang | | 27.034.136.274,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 506.856.100,00 | 402.426.500,00 | 402.426.500,00 | -104.429.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 734.270.790,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 455.440.422,00 | 470.607.286,00 | 470.607.286,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 112.588.200,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | -72.588.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 198.656.040,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ijin Operasionalnya Berlaku* | | | | - | 100 % | 508.719.300,00 | 381.824.400,00 | 382.859.700,00 | -125.859.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Magelang | | 721.687.670,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 247.358.000,00 | 120.463.100,00 | 120.463.100,00 | -126.894.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 303.433.900,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman** | | | | **-** | **100 %** | **226.469.700,00** | **394.493.800,00** | **378.457.500,00** | **58.418.332,00** | | | | | | | **284.888.032,00** | |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | *Persentase sampel produk IRTP yang diperiksa* | | | | - | 100 % | 169.310.600,00 | 217.464.200,00 | 214.394.600,00 | 45.084.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Labkes Kota Magelang, IRTP Kota Magelang | | 191.338.532,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan* | | | | 600 Unit | 600 Unit | 145.797.700,00 | 43.792.800,00 | 43.792.800,00 | -102.004.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 165.284.922,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **INSTALASI FARMASI** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar** | | | | **-** | **100 %** | **24.192.864.215,00** | **37.249.770.843,00** | **45.892.523.943,00** | **6.463.028.349,00** | | | | | | | **30.655.892.564,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP* | | | | - | 100 % | 18.412.099.165,00 | 25.700.756.593,00 | 29.182.872.455,00 | 10.770.773.290,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Instalasi Farmasi Kota Magelang | | 27.034.136.274,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 61.159.300,00 | 270.209.492,00 | 323.934.012,00 | 262.774.712,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 65.933.890,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **BLUD PUSKESMAS MAGELANG SELATAN** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **2.310.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **2.310.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **2.310.000.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.310.000.000,00** | | | | | | | **2.310.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - - | - | | 2.310.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | -<br>- | | | 2.310.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah** | | | | **-** | **100 %** | **330.315.377.252,00** | **331.071.034.299,00** | **393.903.857.781,00** | **-231.295.261.318,00** | | | | | | | **99.020.115.934,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Terlaksananya Pelayanan BLUD* | | | | - | 100 % | 228.963.000.000,00 | 232.363.000.000,00 | 301.214.382.914,00 | 72.251.382.914,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | RSUD Tidar Kota Magelang | | 12.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 215.000.000.000,00 | 217.000.000.000,00 | 275.947.679.055,00 | 60.947.679.055,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **354.837.155.337,00** | **369.744.696.797,00** | **441.444.109.934,00** | **86.606.954.597,00** | | | | | | | **130.277.756.383,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah** | | | | **-** | **100 %** | **330.315.377.252,00** | **331.071.034.299,00** | **393.903.857.781,00** | **-231.295.261.318,00** | | | | | | | **99.020.115.934,00** | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Pengadministrasian umum dengan lancar* | | | | - | 100 % | 194.872.000,00 | 164.186.400,00 | 111.464.600,00 | -83.407.400,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | RSUD Budi Rahayu | | 339.430.370,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 10.163.000,00 | 10.163.000,00 | 10.163.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 42.296.100,00 | 42.296.100,00 | 42.296.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | - | 100 % | 1.173.771.690,00 | 820.470.025,00 | 899.660.360,00 | -274.111.330,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | RSUD Budi Rahayu | | 1.343.025.026,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 0 | 12 Laporan | 16.344.400,00 | 16.344.400,00 | 16.344.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 330.117.400,00 | 330.117.400,00 | 382.163.040,00 | 52.045.640,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 340.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 219.966.100,00 | 219.966.100,00 | 219.966.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah* | | | | - | 100 % | 651.475.500,00 | 439.996.500,00 | 390.475.250,00 | -261.000.250,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | RSUD Budi Rahayu | | 982.898.336,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 147.748.000,00 | 147.748.000,00 | 120.273.000,00 | -27.475.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 170.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.333.000,00 | 25.333.000,00 | 25.333.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Terlaksananya Pelayanan BLUD* | | | | - | 100 % | 228.963.000.000,00 | 232.363.000.000,00 | 301.214.382.914,00 | 72.251.382.914,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | RSUD Budi Rahayu | | 12.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 4 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 4.500.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 9.687.725.898,00 | 5.187.725.898,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 4.700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar** | | | | **-** | **100 %** | **24.192.864.215,00** | **37.249.770.843,00** | **45.892.523.943,00** | **6.463.028.349,00** | | | | | | | **30.655.892.564,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP* | | | | - | 100 % | 5.272.045.750,00 | 11.150.439.850,00 | 16.310.041.788,00 | 11.037.996.038,00 | | | - | -<br>- | RSUD Budi Rahayu | | 2.900.068.620,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | - | 7 Unit | 0,00 | 1.079.320.000,00 | 6.079.320.000,00 | 6.079.320.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 120 Unit | 120 Unit | 5.878.000,00 | 5.878.000,00 | 5.878.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 416.323.150,00 | 416.323.150,00 | 416.323.150,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP* | | | | - | 100 % | 18.412.099.165,00 | 25.700.756.593,00 | 29.182.872.455,00 | 10.770.773.290,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | RSUD Budi Rahayu | | 27.034.136.274,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.344.360.564,00 | 2.801.993.423,00 | 3.217.975.904,00 | -126.384.660,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 3.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **76.409.935.179,00** | **81.664.991.735,00** | **48.275.327.271,00** | **-28.134.607.908,00** | | | | | | | **138.543.150.421,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **76.409.935.179,00** | **81.664.991.735,00** | **48.275.327.271,00** | **-28.134.607.908,00** | | | | | | | **138.543.150.421,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **76.409.935.179,00** | **81.664.991.735,00** | **48.275.327.271,00** | **-28.134.607.908,00** | | | | | | | **138.543.150.421,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pengangguran evaluasi kinerja dan administrasi perkantoran** | | | | **-** | **100,00 %** | **9.678.627.806,00** | **9.583.863.058,00** | **9.723.795.956,00** | **2.887.831.583,00** | | | | | | | **12.566.459.389,00** | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *% pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 63.518.770,00 | 61.507.523,00 | 55.789.240,00 | -7.729.530,00 | | | - | -<br>- | - | | 76.670.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.857.500,00 | -4.142.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 16.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.321.300,00 | 6.321.300,00 | 3.972.200,00 | -2.349.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.150.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.925.700,00 | -1.274.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.630.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.972.300,00 | 3.972.300,00 | 3.972.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.950.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.727.800,00 | 1.727.800,00 | 1.236.200,00 | -491.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.090.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 33.297.370,00 | 31.286.123,00 | 33.825.340,00 | 527.970,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 42.350.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *% pemenuhan layanan administrasi keuangan* | | | | - | 100 % | 7.066.091.136,00 | 7.411.822.796,00 | 7.583.658.411,00 | 517.567.275,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | - | | 7.970.490.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 42 Orang/ bulan | 42 Orang/ bulan | 7.025.685.066,00 | 7.355.326.750,00 | 7.519.243.631,00 | 493.558.565,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 7.920.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.729.470,00 | 50.819.446,00 | 59.764.580,00 | 25.035.110,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 43.890.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.838.300,00 | 2.838.300,00 | 2.558.300,00 | -280.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 3.300.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.838.300,00 | 2.838.300,00 | 2.091.900,00 | -746.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 3.300.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 99.995.000,00 | 99.995.000,00 | 99.995.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 134.385.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 99.995.000,00 | 99.995.000,00 | 99.995.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 134.385.900,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 172.832.000,00 | 177.832.000,00 | 128.297.000,00 | -44.535.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 203.247.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.200.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 16.062.000,00 | 21.062.000,00 | 21.062.000,00 | 5.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.700.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 10.500.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 16.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | 600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.640.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 4 Paket | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 27.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.370.000,00 | 3.600.000,00 | 2.700.000,00 | -670.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.707.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 104.000.000,00 | 103.770.000,00 | 58.035.000,00 | -45.965.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 121.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *% tersedianya barang milik daerah untuk menunjang perangkat daerah* | | | | - | 100 % | 776.463.900,00 | 97.873.200,00 | 135.957.800,00 | -640.506.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 2.096.053.740,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 2 Unit | 701.029.900,00 | 22.439.200,00 | 38.439.200,00 | -662.590.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.521.085.720,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 218 Unit | 218 Unit | 21.423.700,00 | 21.423.700,00 | 37.751.200,00 | 16.327.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 100.833.810,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 22 Unit | 4 Unit | 54.010.300,00 | 54.010.300,00 | 59.767.400,00 | 5.757.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 474.134.210,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *% pemenuhan jasa penunjang perangkat daerah* | | | | - | 100 % | 712.340.000,00 | 947.445.539,00 | 1.037.992.305,00 | 325.652.305,00 | | | - | -<br>- | - | | 863.398.800,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 135.780.000,00 | 123.712.518,00 | 124.285.305,00 | -11.494.695,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 175.929.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 243.436.000,00 | -26.564.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 297.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 71.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 241.560.000,00 | 488.733.021,00 | 605.271.000,00 | 363.711.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 318.969.200,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *% pemeliharaan barang milik daerah* | | | | - | 100 % | 787.387.000,00 | 787.387.000,00 | 682.106.200,00 | -105.280.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.222.213.949,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | 172.995.750,00 | -52.004.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 316.635.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 | 256.462.450,00 | -68.537.550,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 398.603.700,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 99.387.000,00 | 99.387.000,00 | 116.148.000,00 | 16.761.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 21 Unit | 28.000.000,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.524.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | -5.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.600.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 349.851.249,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **% Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik** | | | | **81 %** | **81 %** | **1.215.171.562,00** | **1.190.169.123,00** | **1.256.364.740,00** | **8.822.279.510,00** | | | | | | | **10.037.451.072,00** | |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *% Panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik* | | | | 81 % | 81 % | 1.215.171.562,00 | 1.190.169.123,00 | 1.256.364.740,00 | 41.193.178,00 | | | - | -<br>- | Saluran Irigasi Primer dan Sekunder yang ber SK Walikota Magelang | | 10.037.451.072,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan* | | | | 0.100 KM | 0.040 KM | 739.996.100,00 | 739.996.100,00 | 739.996.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 4.543.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 2.00 KM | 16.55 KM | 475.175.462,00 | 450.173.023,00 | 516.368.640,00 | 41.193.178,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.494.451.072,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **% Rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak**<br>**% Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan** | | | | **30 %**<br>**99 %** | **99 %**<br>**30 %** | **394.400.600,00** | **2.386.603.600,00** | **2.337.078.600,00** | **1.246.293.400,00** | | | | | | | **1.640.694.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *% rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak baik dari pipa atau non perpipaan* | | | | 99 % | 99 % | 394.400.600,00 | 2.386.603.600,00 | 2.337.078.600,00 | 1.942.678.000,00 | | | - | -<br>- | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang asetnya milik Pemkot Magelang | | 1.640.694.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 7.720.000,00 | 7.720.000,00 | 7.720.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.970.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 12.820.000,00 | 12.820.000,00 | 10.138.600,00 | -2.681.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.216.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 126.985.100,00 | 126.985.100,00 | 83.041.100,00 | -43.944.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | -<br>- | | | 140.800.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun* | | | | 1,5 Liter/ Detik | 1,5 Liter/ Detik | 184.400.000,00 | 2.176.603.000,00 | 2.174.743.000,00 | 1.990.343.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 170.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 62.475.500,00 | 62.475.500,00 | 61.435.900,00 | -1.039.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 70.708.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.226.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4. | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **% pembangunan TPST 3R** | | | | **70 %** | **70 %** | **0,00** | **0,00** | **235.856.800,00** | **2.044.460.000,00** | | | | | | | **2.044.460.000,00** | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | *Pematangan lahan TPST 3 R Bojong* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 235.856.800,00 | 235.856.800,00 | | | - | -<br>- | Pembangunan TPST 3R Bojong | | 2.044.460.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun* | | | | 30 Ton/hari | 30 Ton/hari | 0,00 | 0,00 | 85.968.000,00 | 85.968.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.044.460.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 149.888.800,00 | 149.888.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **% jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak** | | | | **92,82 %** | **92,82 %** | **1.559.603.250,00** | **5.255.976.557,00** | **5.069.687.610,00** | **198.886.428,00** | | | | | | | **1.758.489.678,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *% Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 1.559.603.250,00 | 5.255.976.557,00 | 5.069.687.610,00 | 3.510.084.360,00 | | | - | -<br>- | rumah tangga yang belum bersanitasi layak dalam wilayah Kota Magelang | | 1.758.489.678,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0029 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 157.296.320,00 | 157.296.320,00 | 157.296.320,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 173.162.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya* | | | | 16 Penyelenggara | 16 Penyelenggara | 42.084.600,00 | 42.084.600,00 | 42.084.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 58.220.250,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 274.171.190,00 | 258.081.214,00 | 306.958.150,00 | 32.786.960,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 306.593.628,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar* | | | | 15 Rumah Tangga | 15 Rumah Tangga | 799.896.000,00 | 4.534.483.000,00 | 4.518.686.400,00 | 3.718.790.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN | - | -<br>- | | | 905.330.800,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)* | | | | 400 Orang | 400 Orang | 66.138.340,00 | 44.014.623,00 | 44.662.140,00 | -21.476.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 83.083.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 220.016.800,00 | 220.016.800,00 | 0,00 | -220.016.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | -<br>- | | | 232.100.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase drainase dalam kondisi baik** | | | | **64 %** | **64 %** | **1.459.735.162,00** | **1.657.748.723,00** | **1.542.726.340,00** | **-381.669.655,00** | | | | | | | **1.078.065.507,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *% Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik* | | | | 64 % | 64 % | 1.459.735.162,00 | 1.657.748.723,00 | 1.542.726.340,00 | 82.991.178,00 | | | - | -<br>- | Saluran drainase primer dan sekunder yang terhubung langsung dengan sungai | | 1.078.065.507,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan* | | | | 6 Sistem Drainase Perkotaan | 4 Sistem Drainase Perkotaan | 972.745.200,00 | 1.207.245.200,00 | 1.007.245.200,00 | 34.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 538.450.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 15 Sistem Drainase Perkotaan | 29 Sistem Drainase Perkotaan | 486.989.962,00 | 450.503.523,00 | 535.481.140,00 | 48.491.178,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 539.615.507,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase bangunan yang memiliki PBG** | | | | **27,25 %** | **27,25 %** | **48.117.022.965,00** | **47.611.329.265,00** | **14.584.771.165,00** | **38.538.651.195,00** | | | | | | | **86.655.674.160,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *% bangunan gedung pemerintah dan non pemerintah yang memiliki PBG* | | | | 27,25 % | 27,25 % | 48.117.022.965,00 | 47.611.329.265,00 | 14.584.771.165,00 | -33.532.251.800,00 | | | - | -<br>- | Penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan non pemerintah di wilayah Kota magelang | | 86.655.674.160,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 47.864.431.165,00 | 47.364.431.165,00 | 14.351.957.065,00 | -33.512.474.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 86.312.283.200,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 252.591.800,00 | 246.898.100,00 | 232.814.100,00 | -19.777.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 343.390.960,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **Persentase kawasan strategis yang ditata** | | | | **100 %** | **100 %** | **120.000.000,00** | **270.000.000,00** | **314.770.000,00** | **56.000.000,00** | | | | | | | **176.000.000,00** | |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | *% Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 120.000.000,00 | 270.000.000,00 | 314.770.000,00 | 194.770.000,00 | | | - | -<br>- | Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis kota | | 176.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0007 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 22.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0009 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 21.100.000,00 | -3.900.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 27.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 95.000.000,00 | 245.000.000,00 | 293.670.000,00 | 198.670.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 126.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap** | | | | **94,88 %** | **94,88 %** | **12.922.349.734,00** | **12.936.515.309,00** | **12.506.322.860,00** | **8.310.894.781,00** | | | | | | | **21.233.244.515,00** | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *% kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik* | | | | 93 % | 93 % | 12.922.349.734,00 | 12.936.515.309,00 | 12.506.322.860,00 | -416.026.874,00 | | | - | -<br>- | Pemeliharaan infastruktur jalan dan jembatan yang ber SK Kota | | 21.233.244.515,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 345.000.000,00 | 345.000.000,00 | 345.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 412.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala* | | | | 3,5 KM | 1,5 KM | 11.350.900.000,00 | 11.350.898.500,00 | 10.673.553.500,00 | -677.346.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM<br>OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 19.250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar* | | | | - | 0 0 | 0,00 | 0,00 | 199.900.000,00 | 199.900.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 79 Jembatan | 79 Jembatan | 132.943.070,00 | 130.931.823,00 | 137.041.440,00 | 4.098.370,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 155.083.777,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 84 KM | 84 KM | 1.093.506.664,00 | 1.109.684.986,00 | 1.150.827.920,00 | 57.321.256,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.415.660.738,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi** | | | | **100 %** | **100 %** | **416.752.800,00** | **251.741.800,00** | **228.293.300,00** | **65.759.300,00** | | | | | | | **482.512.100,00** | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *terselenggaranya pengembangan jasa konstruksi di Kota Magelang* | | | | 30 Orang | 100 % | 146.184.100,00 | 146.184.100,00 | 129.777.000,00 | -16.407.100,00 | | | - | -<br>- | pelatihan tenaga konstruksi yang berdomisili di Kota Magelang | | 169.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* | | | | 30 Orang | 45 Orang | 99.222.400,00 | 99.222.400,00 | 93.613.000,00 | -5.609.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 121.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 110 Lembaga | 110 Lembaga | 46.961.700,00 | 46.961.700,00 | 36.164.000,00 | -10.797.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 48.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | *Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun*<br>*% penerbitan IUJK sesuai SPM* | | | | - | 10 %<br>1 Dokumen | 93.765.200,00 | 93.765.200,00 | 88.802.200,00 | -4.963.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.03.0007 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 93.765.200,00 | 93.765.200,00 | 88.802.200,00 | -4.963.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*<br>*% jumlah pengawasan yang sesuai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya* | | | | - | 100 %<br>13 Paket | 176.803.500,00 | 11.792.500,00 | 9.714.100,00 | -167.089.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 203.512.100,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 13 Paket Pekerjaan | 13 Paket Pekerjaan | 165.011.000,00 | 0,00 | 0,00 | -165.011.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 181.512.100,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 85 Lembaga | 85 Lembaga | 11.792.500,00 | 11.792.500,00 | 9.714.100,00 | -2.078.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 22.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 11. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **% kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan**<br>**Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang** | | | | **-** | **100 %**<br>**75 %** | **526.271.300,00** | **521.044.300,00** | **475.659.900,00** | **343.828.700,00** | | | | | | | **870.100.000,00** | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | *% penetapan dokumen penataan ruang* | | | | - | 100 % | 233.389.800,00 | 233.389.800,00 | 226.428.500,00 | -6.961.300,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Stakeholder di Kota Magelang | | 412.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0009 | Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 233.389.800,00 | 233.389.800,00 | 226.428.500,00 | -6.961.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 412.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang*<br>*% sinkronisasi pemanfaatan ruang* | | | | - | 100 %<br>1 Dokumen | 94.802.000,00 | 92.188.500,00 | 87.246.800,00 | -7.555.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 135.300.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang* | | | | 1 Dokumen Dokumen | 1 Dokumen Dokumen | 46.320.100,00 | 46.320.100,00 | 40.394.400,00 | -5.925.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 82.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang* | | | | 1 Aplikasi Sistem Informasi | 1 Aplikasi Sistem Informasi | 48.481.900,00 | 45.868.400,00 | 46.852.400,00 | -1.629.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 52.800.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *% pengendalian tata ruang kota* | | | | - | 100 % | 198.079.500,00 | 195.466.000,00 | 161.984.600,00 | -36.094.900,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Perseorangan, Badan Usaha dan Pemerintah yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Magelang | | 322.300.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | | | | 12 Dokumen Dokumen | 12 Dokumen Dokumen | 57.431.400,00 | 57.431.400,00 | 52.183.700,00 | -5.247.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 85.800.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 80.344.700,00 | 77.731.200,00 | 57.464.000,00 | -22.880.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.12.2.04.0015 | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 60.303.400,00 | 60.303.400,00 | 52.336.900,00 | -7.966.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 126.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **23.455.074.706,00** | **23.567.145.677,00** | **23.995.563.267,00** | **540.488.561,00** | | | | | | | **33.494.218.500,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **23.265.417.706,00** | **23.377.488.677,00** | **23.872.051.467,00** | **606.633.761,00** | | | | | | | **33.124.218.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **23.265.417.706,00** | **23.377.488.677,00** | **23.872.051.467,00** | **606.633.761,00** | | | | | | | **33.124.218.500,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Meningkatnya Nilai SAKIP** | | | | **A** | **A** | **4.673.702.551,00** | **4.720.018.913,00** | **5.218.683.491,00** | **470.216.449,00** | | | | | | | **5.143.919.000,00** | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD* | | | | 100 % | 100 % | 37.889.900,00 | 37.889.900,00 | 30.918.000,00 | -6.971.900,00 | | | - | - - | Disperkim | | 41.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 17.658.200,00 | 17.658.200,00 | 14.979.200,00 | -2.679.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 18.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.272.200,00 | 3.272.200,00 | 2.338.500,00 | -933.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 4.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.832.400,00 | 2.832.400,00 | 2.183.500,00 | -648.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 3.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.360.500,00 | 3.360.500,00 | 3.360.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 4.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.772.800,00 | 2.772.800,00 | 1.999.000,00 | -773.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 3.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 7.993.800,00 | 7.993.800,00 | 6.057.300,00 | -1.936.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 8.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan Laporan administrasi Keuangan PD sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 3.995.810.536,00 | 4.056.206.327,00 | 4.252.171.068,00 | 256.360.532,00 | | | - | - - | - | | 4.087.100.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 22 Orang/ bulan | 25 Orang/ bulan | 3.923.724.611,00 | 3.970.041.673,00 | 4.158.014.491,00 | 234.289.880,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - - | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 10.488.700,00 | 10.488.700,00 | 7.783.800,00 | -2.704.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 13.200.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.935.185,00 | 3.935.185,00 | 3.935.185,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 4.400.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 55.424.640,00 | 69.503.369,00 | 80.727.292,00 | 25.302.652,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 67.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.237.400,00 | 2.237.400,00 | 1.710.300,00 | -527.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan Urusan Umum OPD* | | | | 100 % | 100 % | 162.207.155,00 | 167.589.155,00 | 115.145.955,00 | -47.061.200,00 | | | - | - - | Disperkim Kota Magelang | | 177.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.146.755,00 | 6.146.755,00 | 6.146.755,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 6.800.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 23 Paket | 23 Paket | 19.313.400,00 | 19.313.400,00 | 19.313.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 19.600.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 13.126.900,00 | 13.126.900,00 | 11.092.700,00 | -2.034.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 13.400.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 6.700.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 19.017.100,00 | 19.017.100,00 | 19.017.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 19.300.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 4.320.000,00 | -1.440.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 6.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 92.393.000,00 | 97.775.000,00 | 48.806.000,00 | -43.587.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 105.200.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *cakupan kebutuhan PD* | | | | 100 % | 100 % | 13.350.600,00 | 14.850.600,00 | 374.850.600,00 | 361.500.000,00 | | | - | - - | - | | 47.150.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 13.350.600,00 | 14.850.600,00 | 14.850.600,00 | 1.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 47.150.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 % | 100 % | 198.038.210,00 | 182.720.681,00 | 221.879.968,00 | 23.841.758,00 | | | - | - - | - | | 218.928.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.525.800,00 | 1.025.800,00 | 839.800,00 | -1.686.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.528.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 42.536.520,00 | 42.536.520,00 | 42.536.520,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 42.700.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 152.975.890,00 | 139.158.361,00 | 178.503.648,00 | 25.527.758,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 173.700.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemeriintahan daera* | | | | 100 % | 100 % | 266.406.150,00 | 260.762.250,00 | 223.717.900,00 | -42.688.250,00 | | | - | -<br>- | Disperkim Kota Magelang | | 572.241.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 100.728.250,00 | 100.728.250,00 | 77.277.600,00 | -23.450.650,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 121.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 109.688.400,00 | 109.688.400,00 | 84.354.700,00 | -25.333.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 112.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.200.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 26 Unit | 29 Unit | 19.041.000,00 | 13.397.100,00 | 25.137.100,00 | 6.096.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 19.041.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 31.948.500,00 | 31.948.500,00 | 31.948.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 315.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota**<br>**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana** | | | | **100 %**<br>**35,09 %** | **35,09 %**<br>**100 %** | **1.810.249.708,00** | **1.733.822.322,00** | **2.057.852.780,00** | **339.750.292,00** | | | | | | | **2.150.000.000,00** | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang direhabilitasi dan terdata* | | | | 100 % | 100 % | 55.679.500,00 | 55.679.500,00 | 49.199.500,00 | -6.480.000,00 | | | - | -<br>- | Data Rumah | | 150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.679.500,00 | 55.679.500,00 | 49.199.500,00 | -6.480.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **232.902.200,00** | **232.902.200,00** | **196.199.150,00** | **35.757.800,00** | | | | | | | **268.660.000,00** | |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani* | | | | 77,11 % | 77,11 % | 232.902.200,00 | 232.902.200,00 | 196.199.150,00 | -36.703.050,00 | | | - | -<br>- | Kawasan Kumuh | | 268.660.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 204.266.100,00 | 204.266.100,00 | 174.702.075,00 | -29.564.025,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 215.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan* | | | | 14.46 Ha | 14.46 Ha | 28.636.100,00 | 28.636.100,00 | 21.497.075,00 | -7.139.025,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 53.660.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani** | | | | **80,41 %** | **80,41 %** | **2.380.662.700,00** | **2.380.662.700,00** | **2.379.322.700,00** | **1.619.337.300,00** | | | | | | | **4.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase pencegahan perumahan permukiman kumuh* | | | | 90 % | 90 % | 2.380.662.700,00 | 2.380.662.700,00 | 2.379.322.700,00 | -1.340.000,00 | | | - | -<br>- | RTLH di Kota Magelang | | 4.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki* | | | | 200 Unit Rumah | 143 Unit Rumah | 2.380.662.700,00 | 2.380.662.700,00 | 2.379.322.700,00 | -1.340.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 4.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 5. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **14.167.900.547,00** | **14.310.082.542,00** | **14.019.993.346,00** | **7.393.738.953,00** | | | | | | | **21.561.639.500,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *Presentase penyelenggaraan PSU permukiman* | | | | 100 % | 100 % | 14.167.900.547,00 | 14.310.082.542,00 | 14.019.993.346,00 | -147.907.201,00 | | | - | -<br>- | PSU Perumahan dan Permukiman di Kota Magelang | | 21.561.639.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 114.963.700,00 | 114.963.700,00 | 110.800.275,00 | -4.163.425,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 421.639.500,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian* | | | | 127 Lokasi | 87 Lokasi | 13.459.548.517,00 | 13.607.764.253,00 | 13.360.566.685,00 | -98.981.832,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 20.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 68.688.600,00 | 68.688.600,00 | 61.736.450,00 | -6.952.150,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 340.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 524.699.730,00 | 518.665.989,00 | 486.889.936,00 | -37.809.794,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 800.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **189.657.000,00** | **189.657.000,00** | **123.511.800,00** | **-66.145.200,00** | | | | | | | **370.000.000,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **189.657.000,00** | **189.657.000,00** | **123.511.800,00** | **-66.145.200,00** | | | | | | | **370.000.000,00** | |
| 1. | **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **Persentase luas lahan bersertifikat** | | | | **99,00 %** | **99,00 %** | **189.657.000,00** | **189.657.000,00** | **123.511.800,00** | **180.343.000,00** | | | | | | | **370.000.000,00** | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | *Prenstase jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah* | | | | 81 % | 81 % | 189.657.000,00 | 189.657.000,00 | 123.511.800,00 | -66.145.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 370.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 189.657.000,00 | 189.657.000,00 | 123.511.800,00 | -66.145.200,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 370.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **RUMAH SUSUN** | | | | | | | **23.455.074.706,00** | **23.567.145.677,00** | **23.995.563.267,00** | **540.488.561,00** | | | | | | | **33.494.218.500,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **23.265.417.706,00** | **23.377.488.677,00** | **23.872.051.467,00** | **606.633.761,00** | | | | | | | **33.124.218.500,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **23.265.417.706,00** | **23.377.488.677,00** | **23.872.051.467,00** | **606.633.761,00** | | | | | | | **33.124.218.500,00** | |
| 1. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/kota**<br>**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana** | | | | **89.47 %**<br>**100 %** | **89.47 %**<br>**100 %** | **1.810.249.708,00** | **1.733.822.322,00** | **2.057.852.780,00** | **339.750.292,00** | | | | | | | **2.150.000.000,00** | |
| | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | *Presentase pembinaan rumah susun dan rumah khusus* | | | | 100 % | 100 % | 1.754.570.208,00 | 1.678.142.822,00 | 2.008.653.280,00 | 254.083.072,00 | | | - | -<br>- | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.754.570.208,00 | 1.678.142.822,00 | 2.008.653.280,00 | 254.083.072,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | **12.468.649.271,00** | **11.925.394.980,00** | **12.628.480.972,00** | **159.831.701,00** | | | | | | | **11.055.464.830,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **12.468.649.271,00** | **11.925.394.980,00** | **12.628.480.972,00** | **159.831.701,00** | | | | | | | **11.055.464.830,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **12.468.649.271,00** | **11.925.394.980,00** | **12.628.480.972,00** | **159.831.701,00** | | | | | | | **11.055.464.830,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku** | | | | **-** | **100 %** | **8.161.926.705,00** | **8.062.206.605,00** | **8.039.472.033,00** | **643.502.589,00** | | | | | | | **8.805.429.294,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja* | | | | - | 100 % | 44.263.900,00 | 44.332.400,00 | 33.677.400,00 | -10.586.500,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | Masyarakat | | 24.862.750,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.631.600,00 | 20.178.800,00 | 15.521.600,00 | -5.110.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.480.300,00 | 2.839.300,00 | 2.129.900,00 | -350.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 2.728.660,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.630.300,00 | 2.790.100,00 | 2.093.100,00 | -537.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 3.289.660,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.351.100,00 | 2.734.000,00 | 2.050.500,00 | -300.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.564.900,00 | 3.044.800,00 | 2.323.200,00 | -241.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 3.085.720,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 24 Laporan | 4 Laporan | 13.605.700,00 | 12.745.400,00 | 9.559.100,00 | -4.046.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 15.758.710,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tertiba Laporan kinerja dan keuangan* | | | | - | 100 % | 6.983.727.087,00 | 7.180.880.028,00 | 7.248.741.376,00 | 265.014.289,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | Masyarakat | | 7.691.625.920,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 52 Orang/ bulan | 52 Orang/ bulan | 6.972.420.487,00 | 7.169.574.128,00 | 7.239.870.376,00 | 267.449.889,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 7.678.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 2.674.600,00 | 2.674.300,00 | 2.006.200,00 | -668.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 3.338.280,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 8.632.000,00 | 8.631.600,00 | 6.864.800,00 | -1.767.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 10.287.640,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran* | | | | - | 100 % | 153.358.680,00 | 134.551.680,00 | 118.150.680,00 | -35.208.000,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | Masyarakat | | 238.292.450,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.581.880,00 | 6.581.880,00 | 6.581.880,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 13.303.400,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.074.900,00 | 7.070.200,00 | 7.070.200,00 | -4.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 7.863.350,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 81.125.500,00 | 59.743.200,00 | 59.743.200,00 | -21.382.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 109.007.800,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 6.978.300,00 | 6.978.300,00 | 4.464.300,00 | -2.514.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 7.676.570,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 3.168.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 5.684.100,00 | 5.684.100,00 | 5.684.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 11.020.350,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 9.900.000,00 | 9.600.000,00 | 7.200.000,00 | -2.700.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 10.560.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 36.014.000,00 | 36.014.000,00 | 24.527.000,00 | -11.487.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 75.692.980,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000.000,00 | | | - | - - | - | | 46.241.580,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 8.800.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 21 Unit | 21 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 37.441.580,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran* | | | | - | 100 % | 153.741.280,00 | 144.260.499,00 | 158.221.060,00 | 4.479.780,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | Masyarakat | | 177.003.041,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.647.700,00 | 10.647.700,00 | 7.984.900,00 | -2.662.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 11.741.510,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 71.724.404,00 | 71.724.404,00 | 71.724.404,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 78.898.600,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 71.369.176,00 | 61.888.395,00 | 78.511.756,00 | 7.142.580,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 86.362.931,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya barang milik daerah* | | | | - | 100 % | 376.835.758,00 | 558.181.998,00 | 480.681.517,00 | 103.845.759,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | masyarakat | | 627.403.553,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 169.753.065,00 | 189.208.865,00 | 140.646.358,00 | -29.106.707,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 219.210.785,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 169.270.024,00 | 334.660.464,00 | 305.722.490,00 | 136.452.466,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 336.298.479,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 31.805.654,00 | 28.305.654,00 | 28.305.654,00 | -3.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 28.305.645,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 6.007.015,00 | 6.007.015,00 | 6.007.015,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 43.588.644,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **3.436.567.086,00** | **3.107.920.702,00** | **3.646.245.780,00** | **-1.271.987.966,00** | | | | | | | **2.164.579.120,00** | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Kasus Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 % | 100 % | 2.899.173.426,00 | 2.726.311.542,00 | 3.069.020.820,00 | 169.847.394,00 | | | - | -<br>- | masyarakat | | 2.164.579.120,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.058.000,00 | 13.058.000,00 | 7.383.100,00 | -5.674.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 44 Dokumen | 12 Dokumen | 729.828.450,00 | 711.277.800,00 | 703.950.200,00 | -25.878.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 119 Orang | 60 Orang | 7.409.400,00 | 5.366.900,00 | 4.428.500,00 | -2.980.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.853.800,00 | 100.880.200,00 | 91.220.400,00 | 89.366.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 218 laporan | 218 laporan | 1.700.004.176,00 | 1.539.809.442,00 | 1.967.799.120,00 | 267.794.944,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.164.579.120,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 752 Laporan | 752 Laporan | 445.737.800,00 | 354.637.400,00 | 293.289.500,00 | -152.448.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.281.800,00 | 1.281.800,00 | 950.000,00 | -331.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | - | | | | - | - | 530.307.960,00 | 379.705.360,00 | 575.797.360,00 | 45.489.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 30 Laporan | 12 Laporan | 13.300.800,00 | 20.525.200,00 | 216.617.200,00 | 203.316.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 317.007.160,00 | 359.180.160,00 | 359.180.160,00 | 42.173.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 7.085.700,00 | 1.903.800,00 | 1.427.600,00 | -5.658.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda* | | | | 6 Laporan | 2 Laporan | 7.085.700,00 | 1.903.800,00 | 1.427.600,00 | -5.658.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **PEMADAM KEBAKARAN** | | | | | | | **12.468.649.271,00** | **11.925.394.980,00** | **12.628.480.972,00** | **159.831.701,00** | | | | | | | **11.055.464.830,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **12.468.649.271,00** | **11.925.394.980,00** | **12.628.480.972,00** | **159.831.701,00** | | | | | | | **11.055.464.830,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **12.468.649.271,00** | **11.925.394.980,00** | **12.628.480.972,00** | **159.831.701,00** | | | | | | | **11.055.464.830,00** | |
| 1. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Presentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran** | | | | **-** | **100 %** | **870.155.480,00** | **755.267.673,00** | **942.763.159,00** | **-784.699.064,00** | | | | | | | **85.456.416,00** | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase wkatu tanggap kebakaran dan waktu tanggap penyelamatan* | | | | - | 100 % | 781.638.930,00 | 660.910.973,00 | 858.364.959,00 | 76.726.029,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | Masyarakat | | 85.456.416,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 777.868.230,00 | 657.110.073,00 | 854.564.059,00 | 76.695.829,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 85.456.416,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 45 Unit | 45 Unit | 3.770.700,00 | 3.800.900,00 | 3.800.900,00 | 30.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | - | | | | - | - | 80.141.850,00 | 79.640.500,00 | 78.260.200,00 | -1.881.650,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | | | | 200 Orang | 50 Orang | 10.518.450,00 | 10.017.100,00 | 9.398.700,00 | -1.119.750,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar* | | | | 105 Dokumen | 160 Dokumen | 69.623.400,00 | 69.623.400,00 | 68.861.500,00 | -761.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | - | | | | - | - | 8.374.700,00 | 14.716.200,00 | 6.138.000,00 | -2.236.700,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 8.374.700,00 | 14.716.200,00 | 6.138.000,00 | -2.236.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | **4.842.786.611,00** | **5.134.501.423,00** | **5.128.653.933,00** | **285.867.322,00** | | | | | | | **6.076.185.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.842.786.611,00** | **5.134.501.423,00** | **5.128.653.933,00** | **285.867.322,00** | | | | | | | **6.076.185.000,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **4.842.786.611,00** | **5.134.501.423,00** | **5.128.653.933,00** | **285.867.322,00** | | | | | | | **6.076.185.000,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terwujudnya Pelayanan Kantor, perencanaan, Penganggaran , Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja.** | | | | **-** | **100 %** | **3.839.893.131,00** | **4.145.700.242,00** | **4.138.666.854,00** | **422.791.869,00** | | | | | | | **4.262.685.000,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Presentase tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja* | | | | - | 100 % | 10.751.388,00 | 11.614.388,00 | 7.250.528,00 | -3.500.860,00 | | | - | -<br>- | - | | 18.485.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 1.718.500,00 | 2.581.500,00 | 2.581.500,00 | 863.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.235.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 634.000,00 | 634.000,00 | 444.000,00 | -190.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.650.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 634.000,00 | 634.000,00 | 444.000,00 | -190.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 754.800,00 | 754.800,00 | 754.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.050.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 754.800,00 | 754.800,00 | 613.600,00 | -141.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.050.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 6.255.288,00 | 6.255.288,00 | 2.412.628,00 | -3.842.660,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase tersedianya Admnistrasi Keuangan* | | | | - | 100 % | 3.369.810.687,00 | 3.687.683.128,00 | 3.730.088.712,00 | 360.278.025,00 | | | - | -<br>- | - | | 3.378.600.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/ bulan | 21 Orang/ bulan | 3.361.636.587,00 | 3.679.509.028,00 | 3.724.509.012,00 | 362.872.425,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 3.365.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 571.000,00 | 571.000,00 | 334.000,00 | -237.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 750.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.603.100,00 | 7.603.100,00 | 5.245.700,00 | -2.357.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.850.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Presentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 105.978.943,00 | 106.925.443,00 | 80.347.643,00 | -25.631.300,00 | | | - | -<br>- | - | | 125.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 2.387.843,00 | 2.387.843,00 | 2.986.043,00 | 598.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 1.548.000,00 | 1.548.000,00 | 1.011.400,00 | -536.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 22.650.200,00 | 25.860.700,00 | 26.360.700,00 | 3.710.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 8.098.400,00 | 8.098.400,00 | 7.237.000,00 | -861.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 3.660.000,00 | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | -420.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 10.178.500,00 | 10.178.500,00 | 11.466.500,00 | 1.288.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 960.000,00 | 960.000,00 | 720.000,00 | -240.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 56.496.000,00 | 54.652.000,00 | 27.326.000,00 | -29.170.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 125.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | - | 100 % | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 150.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | - | 100 % | 143.295.576,00 | 131.310.846,00 | 127.377.980,00 | -15.917.596,00 | | | - | -<br>- | - | | 155.600.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.204.400,00 | 20.204.400,00 | 12.956.300,00 | -7.248.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 68.304.000,00 | 68.304.000,00 | 59.400.000,00 | -8.904.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 54.787.176,00 | 42.802.446,00 | 55.021.680,00 | 234.504,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 60.600.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Presentase Pemeliharaan Barang Mllik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | - | 100 % | 159.056.537,00 | 157.166.437,00 | 142.601.991,00 | -16.454.546,00 | | | - | -<br>- | - | | 435.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 97.173.241,00 | 95.973.241,00 | 80.954.930,00 | -16.218.311,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 105.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 50.018.048,00 | 50.017.948,00 | 41.213.461,00 | -8.804.587,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 55.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 11.865.248,00 | 11.175.248,00 | 20.433.600,00 | 8.568.352,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 25.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Presentase Layanan Penangggulangan Bencana** | | | | **-** | **100 %** | **1.002.893.480,00** | **988.801.181,00** | **989.987.079,00** | **810.606.520,00** | | | | | | | **1.813.500.000,00** | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | *Prensentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 % | 23.260.800,00 | 23.260.800,00 | 19.280.800,00 | -3.980.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 300.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 23.260.800,00 | 23.260.800,00 | 19.280.800,00 | -3.980.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Presentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | | | | - | 100 % | 695.211.060,00 | 681.118.861,00 | 713.898.539,00 | 18.687.479,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.040.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 17 Unit | 16 Unit | 63.967.000,00 | 63.965.700,00 | 121.779.885,00 | 57.812.885,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 11.802.100,00 | 11.802.100,00 | 19.728.236,00 | 7.926.136,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau*<br>*kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana* | | | | 2 Kawasan | 2 Kawasan | 30.958.500,00 | 30.948.300,00 | 21.027.600,00 | -9.930.900,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 185.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 28.303.400,00 | 28.303.200,00 | 19.987.300,00 | -8.316.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 85.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 76.722.500,00 | 76.721.600,00 | 74.321.400,00 | -2.401.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 90.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 12 laporan | 12 laporan | 176.365.660,00 | 162.286.661,00 | 196.481.018,00 | 20.115.358,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 275.580.000,00 | 275.579.700,00 | 238.839.500,00 | -36.740.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 3 Kawasan | 3 Kawasan | 31.511.900,00 | 31.511.600,00 | 21.733.600,00 | -9.778.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *Presentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | - | 100 % | 234.012.620,00 | 234.012.620,00 | 225.463.740,00 | -8.548.880,00 | | | - | -<br>- | - | | 363.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.790.120,00 | 5.790.120,00 | 4.416.220,00 | -1.373.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 157.119.500,00 | 157.119.500,00 | 159.272.120,00 | 2.152.620,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 220.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 9.600.000,00 | -800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 21.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 35.954.600,00 | 35.954.600,00 | 28.889.700,00 | -7.064.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 80.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.748.400,00 | 24.748.400,00 | 23.285.700,00 | -1.462.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana* | | | | - | 100 % | 50.409.000,00 | 50.408.900,00 | 31.344.000,00 | -19.065.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan* | | | | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 50.409.000,00 | 50.408.900,00 | 31.344.000,00 | -19.065.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | | **13.527.624.400,00** | **10.872.868.306,00** | **10.732.873.772,00** | **-2.794.750.628,00** | | | | | | | **13.609.897.432,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **13.527.624.400,00** | **10.872.868.306,00** | **10.732.873.772,00** | **-2.794.750.628,00** | | | | | | | **13.609.897.432,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **13.527.624.400,00** | **10.872.868.306,00** | **10.732.873.772,00** | **-2.794.750.628,00** | | | | | | | **13.609.897.432,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **4.683.358.560,00** | **4.495.574.607,00** | **4.538.364.262,00** | **-92.158.560,00** | | | | | | | **4.591.200.000,00** | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 16.154.200,00 | 16.154.200,00 | 11.804.900,00 | -4.349.300,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah dan Masyarakat | | 32.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 6.965.400,00 | 6.965.400,00 | 5.086.500,00 | -1.878.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 961.200,00 | 961.200,00 | 766.900,00 | -194.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 839.400,00 | 839.400,00 | 628.500,00 | -210.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 799.000,00 | 799.000,00 | 799.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 815.500,00 | 815.500,00 | 411.700,00 | -403.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 5.773.700,00 | 5.773.700,00 | 4.112.300,00 | -1.661.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pengelolaan keuangan perangkat daerah* | | | | - | 100 % | 3.603.670.100,00 | 3.698.976.500,00 | 3.771.048.922,00 | 167.378.822,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Aparatur Sipil Negara SKPD | | 3.810.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/ bulan | 22 Orang/ bulan | 3.595.665.700,00 | 3.690.972.100,00 | 3.765.053.622,00 | 169.387.922,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 3.800.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 150 Laporan | 150 Laporan | 8.004.400,00 | 8.004.400,00 | 5.995.300,00 | -2.009.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Prosentase pengelolaan administrasi kepegawaian* | | | | 100 % | 100 % | 10.457.700,00 | 10.457.700,00 | 7.712.100,00 | -2.745.600,00 | | | - | -<br>- | SDM Dinas Sosial | | 11.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 10.457.700,00 | 10.457.700,00 | 7.712.100,00 | -2.745.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan* | | | | 100 % | 100 % | 136.238.250,00 | 136.037.800,00 | 131.998.700,00 | -4.239.550,00 | | | - | -<br>- | SDM Dinas Sosial | | 172.700.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 4.989.550,00 | 4.989.100,00 | 10.818.700,00 | 5.829.150,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 4.785.500,00 | 4.785.500,00 | 4.785.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 12.437.200,00 | 12.437.200,00 | 11.304.700,00 | -1.132.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 14.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 10.998.100,00 | 10.998.100,00 | 8.201.900,00 | -2.796.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.800.000,00 | 360.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 200.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 7.569.900,00 | 7.569.900,00 | 7.569.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 3.600.000,00 | -1.350.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 89.068.000,00 | 88.868.000,00 | 83.918.000,00 | -5.150.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 115.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan BMD penunjang urusan Perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 439.711.600,00 | 245.788.900,00 | 255.788.900,00 | -183.922.700,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 31 Unit | 32 Unit | 401.707.000,00 | 107.784.300,00 | 117.784.300,00 | -283.922.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 3 Unit | 38.004.600,00 | 138.004.600,00 | 138.004.600,00 | 100.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang urusan kantor* | | | | 100 % | 100 % | 150.253.710,00 | 161.296.092,00 | 157.508.060,00 | 7.254.350,00 | | | - | -<br>- | - | | 190.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.451.500,00 | 5.951.500,00 | 5.122.100,00 | -2.329.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 79.282.000,00 | 79.282.000,00 | 52.235.500,00 | -27.046.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 115.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 63.520.210,00 | 76.062.592,00 | 100.150.460,00 | 36.630.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan barang milik daerah* | | | | 100 % | 100 % | 326.873.000,00 | 226.863.415,00 | 202.502.680,00 | -124.370.320,00 | | | - | -<br>- | - | | 375.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 94.616.000,00 | 94.616.000,00 | 73.143.750,00 | -21.472.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 105.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 64.923.000,00 | 64.923.000,00 | 51.654.500,00 | -13.268.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 26 Unit | 17.398.000,00 | 17.398.000,00 | 21.658.000,00 | 4.260.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 12.000.000,00 | -13.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 2 Unit Unit | 124.936.000,00 | 24.926.415,00 | 44.046.430,00 | -80.889.570,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 120.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase PSKS yang diberdayakan** | | | | **83,33 %** | **83,33 %** | **196.246.710,00** | **190.212.269,00** | **221.257.620,00** | **65.651.550,00** | | | | | | | **261.898.260,00** | |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)* | | | | 83,33 % | 83,33 % | 196.246.710,00 | 190.212.269,00 | 221.257.620,00 | 25.010.910,00 | | | - | -<br>- | Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS individu dan lembaga) | | 261.898.260,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 17 Orang | 17 Orang | 53.634.700,00 | 53.634.700,00 | 53.484.700,00 | -150.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 65.995.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 62.351.410,00 | 56.316.969,00 | 74.585.820,00 | 12.234.410,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 76.246.160,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 9 Lembaga | 5 Lembaga | 68.711.200,00 | 68.711.200,00 | 83.711.200,00 | 15.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 81.769.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Sertifikat | 1 Sertifikat | 11.549.400,00 | 11.549.400,00 | 9.475.900,00 | -2.073.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 37.887.700,00 | DINAS SOSIAL |
| 3. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi** | | | | **100 %** | **100 %** | **4.891.550.310,00** | **5.618.974.392,00** | **5.410.212.760,00** | **2.906.723.822,00** | | | | | | | **7.798.274.132,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | *Persentase layanan Rehabilitasi Sosial PPKS/PMKS yang terpenuhi Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat layanan dasar rehabilitasi sosial* | | | | 100 % | 100 % | 4.323.533.070,00 | 5.054.979.646,00 | 4.837.826.380,00 | 514.293.310,00 | | | - | -<br>- | Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis | | 5.163.124.580,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1506 Orang | 1506 Orang | 2.834.177.500,00 | 2.834.177.500,00 | 2.834.177.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 3.117.595.580,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 41.389.600,00 | 41.389.600,00 | 41.389.600,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 45.529.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 134.526.800,00 | 178.908.023,00 | 205.768.540,00 | 71.241.740,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 564 Orang | 564 Orang | 1.313.439.170,00 | 2.000.504.523,00 | 1.756.490.740,00 | 443.051.570,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 1.800.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | *Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS yang terpenuhi Persentase PPKS/PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi sosial* | | | | 100 % | 100 % | 568.017.240,00 | 563.994.746,00 | 572.386.380,00 | 4.369.140,00 | | | - | -<br>- | PPKS/PMKS<br>Penyandang Disabilitas terlantar, Lanjut Usia Terlantar, gelandangan Pengemis | | 2.635.149.552,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 117.837.940,00 | 113.815.446,00 | 122.207.080,00 | 4.369.140,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 129.701.682,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 7000 Orang | 1500 Orang | 450.179.300,00 | 450.179.300,00 | 450.179.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 2.505.447.870,00 | DINAS SOSIAL |
| 4. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial** | | | | **100 %** | **100 %** | **3.554.623.240,00** | **374.320.746,00** | **347.680.370,00** | **-2.765.623.240,00** | | | | | | | **789.000.000,00** | |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | *Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial* | | | | 100 % | 100 % | 159.309.600,00 | 159.309.600,00 | 156.585.150,00 | -2.724.450,00 | | | - | -<br>- | Anak-Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Yang mengalami Masalah Hukum, Anak Jalanan | | 369.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 112 Orang | 112 Orang | 137.544.600,00 | 137.544.600,00 | 137.544.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Orang | 12 Orang | 9.455.000,00 | 9.455.000,00 | 8.296.250,00 | -1.158.750,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 112 Orang | 112 Orang | 12.310.000,00 | 12.310.000,00 | 10.744.300,00 | -1.565.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase data fakir miskin cakupan daerah yang terkelola Persentase DTKS , Data PMKS/PPKS yang diupdate* | | | | 100 % | 100 % | 3.395.313.640,00 | 215.011.146,00 | 191.095.220,00 | -3.204.218.420,00 | | | - | -<br>- | Fakir Miskin Cakupan Kota | | 420.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata* | | | | 6053 Orang | 5775 Orang | 142.524.040,00 | 138.501.546,00 | 119.670.420,00 | -22.853.620,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 890 Keluarga | 21 Keluarga | 3.237.976.600,00 | 61.696.600,00 | 56.611.800,00 | -3.181.364.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 20 Orang | 14.813.000,00 | 14.813.000,00 | 14.813.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 5. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani** | | | | **100 %** | **100 %** | **110.885.600,00** | **110.885.600,00** | **108.019.600,00** | **-38.885.600,00** | | | | | | | **72.000.000,00** | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | *Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial* | | | | 100 % | 100 % | 24.376.900,00 | 24.376.900,00 | 22.528.900,00 | -1.848.000,00 | | | - | -<br>- | Korban / Masyarakat rentan terkena bencana alam dan sosial, kejadian/peristiwa alam | | 22.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 24.376.900,00 | 24.376.900,00 | 22.528.900,00 | -1.848.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 22.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | *Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana* | | | | 100 % | 100 % | 86.508.700,00 | 86.508.700,00 | 85.490.700,00 | -1.018.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat , Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 86.508.700,00 | 86.508.700,00 | 85.490.700,00 | -1.018.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 6. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Persentase area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **90.959.980,00** | **82.900.692,00** | **107.339.160,00** | **6.565.060,00** | | | | | | | **97.525.040,00** | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara* | | | | 100 % | 100 % | 90.959.980,00 | 82.900.692,00 | 107.339.160,00 | 16.379.180,00 | | | - | -<br>- | Area Taman Makam Pahlawan | | 97.525.040,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Makam | 1092 Makam | 90.959.980,00 | 82.900.692,00 | 107.339.160,00 | 16.379.180,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 97.525.040,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **DINAS TENAGA KERJA** | | | | | | | **10.528.484.461,00** | **11.116.341.018,00** | **10.911.021.471,00** | **382.537.010,00** | | | | | | | **10.802.076.624,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **10.528.484.461,00** | **11.116.341.018,00** | **10.911.021.471,00** | **382.537.010,00** | | | | | | | **10.802.076.624,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **10.528.484.461,00** | **11.116.341.018,00** | **10.911.021.471,00** | **382.537.010,00** | | | | | | | **10.802.076.624,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **5.984.689.759,00** | **5.878.831.716,00** | **5.884.672.669,00** | **-805.015.159,00** | | | | | | | **5.179.674.600,00** | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Dokumen perencanaan dan dokumen laporan hasil kegiatan* | | | | 100 % | 100 % | 10.402.400,00 | 10.402.400,00 | 7.799.800,00 | -2.602.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 14.750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.015.600,00 | 3.015.600,00 | 2.261.250,00 | -754.350,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.583.400,00 | 1.583.400,00 | 1.187.075,00 | -396.325,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.385.400,00 | 1.385.400,00 | 1.038.675,00 | -346.725,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.229.400,00 | 1.229.400,00 | 921.675,00 | -307.725,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.156.600,00 | 1.156.600,00 | 867.250,00 | -289.350,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.032.000,00 | 2.032.000,00 | 1.523.875,00 | -508.125,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.150.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Gaji dan tunjangan PNS dan tersedianya laporan prognosis* | | | | 100 % | 100 % | 4.547.806.359,00 | 4.840.894.180,00 | 4.875.356.894,00 | 327.550.535,00 | | | - | -<br>- | - | | 4.601.400.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 27 Orang/ bulan | 27 Orang/ bulan | 4.546.466.359,00 | 4.839.554.180,00 | 4.874.351.894,00 | 327.885.535,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 4.600.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 1.005.000,00 | -335.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.400.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya pelayanan kantor* | | | | 100 % | 100 % | 2.550.500,00 | 2.550.500,00 | 1.912.875,00 | -637.625,00 | | | - | -<br>- | - | | 4.263.600,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 2.550.500,00 | 2.550.500,00 | 1.912.875,00 | -637.625,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.263.600,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pelayanan Kantor* | | | | 100 % | 100 % | 138.595.100,00 | 137.317.500,00 | 101.077.150,00 | -37.517.950,00 | | | - | -<br>- | - | | 155.700.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 15.999.100,00 | 15.999.100,00 | 15.999.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 10.000.000,00 | 9.237.400,00 | 6.928.050,00 | -3.071.950,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.900.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.600.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 17.999.000,00 | 17.999.000,00 | 17.999.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | -1.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 69.997.000,00 | 69.482.000,00 | 37.051.000,00 | -32.946.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 119.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya pelayanan kantor* | | | | 100 % | 100 % | 442.502.800,00 | 67.691.900,00 | 97.691.900,00 | -344.810.900,00 | | | - | -<br>- | - | | 98.061.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 1 Unit | 374.810.900,00 | 0,00 | 0,00 | -374.810.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | - | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 67.691.900,00 | 67.691.900,00 | 67.691.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 68.061.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya pelayanan kantor* | | | | 100 % | 100 % | 360.384.500,00 | 352.930.336,00 | 423.641.625,00 | 63.257.125,00 | | | - | -<br>- | - | | 125.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.998.900,00 | 10.880.460,00 | 8.276.345,00 | -1.722.555,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 109.448.400,00 | 124.835.200,00 | 124.835.200,00 | 15.386.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 110.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 240.937.200,00 | 217.214.676,00 | 290.530.080,00 | 49.592.880,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah* | | | | 100 % | 100 % | 482.448.100,00 | 467.044.900,00 | 377.192.425,00 | -105.255.675,00 | | | - | -<br>- | - | | 180.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 8 Unit | 145.601.700,00 | 136.026.100,00 | 105.633.325,00 | -39.968.375,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 10 Unit | 76.076.400,00 | 70.248.800,00 | 55.120.350,00 | -20.956.050,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 80.770.000,00 | 80.770.000,00 | 80.770.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 135.668.750,00 | -44.331.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 180.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| 2. | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **Presentase Jumlah Rencana Tenaga Kerja** | | | | **100 %** | **100 %** | **72.348.000,00** | **122.348.000,00** | **116.039.250,00** | **-72.348.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | *Terlaksananya perencanaan Tenaga Kerja Makro* | | | | 100 % | 100 % | 72.348.000,00 | 122.348.000,00 | 116.039.250,00 | 43.691.250,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.348.000,00 | 122.348.000,00 | 116.039.250,00 | 43.691.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| 3. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**<br>**Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja** | | | | **70 %**<br>**75 %** | **70 %**<br>**75 %** | **2.449.943.500,00** | **2.964.757.500,00** | **2.940.159.300,00** | **49.062.900,00** | | | | | | | **2.499.006.400,00** | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | *Peningkatan ketrampilan bagi Pencari Kerja* | | | | 100 % | 100 % | 2.432.211.700,00 | 2.947.025.700,00 | 2.927.287.700,00 | 495.076.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 2.462.100.800,00 | DINAS TENAGA KERJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 272 Orang | 272 Orang | 1.949.800.800,00 | 2.464.614.800,00 | 2.444.876.800,00 | 495.076.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 1.962.400.800,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 482.410.900,00 | 482.410.900,00 | 482.410.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 499.700.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | *Terbinanya LPK Swasta* | | | | 100 % | 100 % | 4.291.000,00 | 4.291.000,00 | 3.591.000,00 | -700.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 8.192.500,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | | | | 14 Lembaga | 14 Lembaga | 4.291.000,00 | 4.291.000,00 | 3.591.000,00 | -700.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 8.192.500,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | *Peningkatan produktivitas* | | | | 100 % | 100 % | 13.440.800,00 | 13.440.800,00 | 9.280.600,00 | -4.160.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 28.713.100,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas* | | | | 150 Perusa haan | 100 Perusa haan | 13.440.800,00 | 13.440.800,00 | 9.280.600,00 | -4.160.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 28.713.100,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| 4. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja**<br>**Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha** | | | | **70 %**<br>**75 %** | **75 %**<br>**70 %** | **1.450.773.802,00** | **1.450.773.802,00** | **1.340.905.427,00** | **1.070.534.322,00** | | | | | | | **2.521.308.124,00** | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | *Prosentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja* | | | | 100 % | 100 % | 1.375.349.102,00 | 1.375.349.102,00 | 1.271.638.402,00 | -103.710.700,00 | | | - | -<br>- | - | | 2.521.308.124,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi* | | | | 24 Orang | 24 Orang | 5.967.000,00 | 5.967.000,00 | 3.668.700,00 | -2.298.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL* | | | | 600 Orang | 600 Orang | 18.473.700,00 | 18.473.700,00 | 10.341.300,00 | -8.132.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan* | | | | 250 Orang | 250 Orang | 26.754.800,00 | 26.754.800,00 | 18.951.800,00 | -7.803.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD* | | | | 0 Orang | 200 Orang | 173.700.000,00 | 173.700.000,00 | 275.936.000,00 | 102.236.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja* | | | | 2227 Orang | 275 Orang | 1.150.453.602,00 | 1.150.453.602,00 | 962.740.602,00 | -187.713.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 2.521.308.124,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | *Penyebaran informasi lowongan kerja dan penggunaan tenaga kerja ke Pencari Kerja* | | | | 100 % | 100 % | 75.424.700,00 | 75.424.700,00 | 69.267.025,00 | -6.157.675,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | | | | 900 Orang | 900 Orang | 2.640.700,00 | 2.640.700,00 | 2.354.275,00 | -286.425,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 72.784.000,00 | 72.784.000,00 | 66.912.750,00 | -5.871.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| 5. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)** | | | | **45,00 %** | **45,00 %** | **570.729.400,00** | **699.630.000,00** | **629.244.825,00** | **31.358.100,00** | | | | | | | **602.087.500,00** | |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | *Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis* | | | | 100 % | 100 % | 570.729.400,00 | 699.630.000,00 | 629.244.825,00 | 58.515.425,00 | | | - | -<br>- | - | | 602.087.500,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | | | | 221 Perkara | 373 Perkara | 180.782.200,00 | 180.782.200,00 | 115.030.500,00 | -65.751.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 192.803.600,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | | | | 10 Perkara | 10 Perkara | 7.212.100,00 | 7.212.100,00 | 4.381.575,00 | -2.830.525,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.186.000,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 18.450.700,00 | 29.250.700,00 | 27.447.750,00 | 8.997.050,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.813.500,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja* | | | | 3500 Orang | 2300 Orang | 364.284.400,00 | 482.385.000,00 | 482.385.000,00 | 118.100.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 364.284.400,00 | DINAS TENAGA KERJA |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **31.756.552.717,00** | **30.491.665.904,00** | **35.128.999.183,00** | **3.372.446.466,00** | | | | | | | **36.005.771.100,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **31.756.552.717,00** | **30.491.665.904,00** | **35.128.999.183,00** | **3.372.446.466,00** | | | | | | | **36.005.771.100,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **31.756.552.717,00** | **30.491.665.904,00** | **35.128.999.183,00** | **3.372.446.466,00** | | | | | | | **36.005.771.100,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Meningkatnya Nilai SAKIP** | | | | **-** | **A Nilai** | **11.514.095.291,00** | **12.781.705.534,00** | **12.736.004.156,00** | **275.504.709,00** | | | | | | | **11.789.600.000,00** | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD* | | | | - | 100 % | 32.957.100,00 | 32.957.100,00 | 26.375.400,00 | -6.581.700,00 | | | - | -<br>- | - | | 47.650.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.641.300,00 | 18.641.300,00 | 13.701.900,00 | -4.939.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 19.250.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.430.700,00 | 2.430.700,00 | 1.860.800,00 | -569.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.750.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 1.594.100,00 | -445.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.150.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.536.600,00 | 2.536.600,00 | 2.536.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.203.900,00 | 2.203.900,00 | 1.577.400,00 | -626.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.350.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 5.104.600,00 | 5.104.600,00 | 5.104.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.650.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan laporan administrasi Keuangan PD sesuai aturan* | | | | - | 100 % | 8.819.561.436,00 | 10.142.168.067,00 | 9.931.573.166,00 | 1.112.011.730,00 | | | - | -<br>- | - | | 8.797.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 59 Orang/ bulan | 59 Orang/ bulan | 8.779.227.336,00 | 10.102.573.667,00 | 9.900.919.466,00 | 1.121.692.130,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 8.750.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.044.500,00 | 4.044.500,00 | 4.044.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.250.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 32.743.700,00 | 32.743.700,00 | 24.749.600,00 | -7.994.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 37.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.545.900,00 | 2.806.200,00 | 1.859.600,00 | -1.686.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.250.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan laporan administrasi barang milik daerah* | | | | - | 100 % | 2.499.700,00 | 2.499.700,00 | 36.851.310,00 | 34.351.610,00 | | | - | -<br>- | - | | 4.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.499.700,00 | 2.499.700,00 | 36.851.310,00 | 34.351.610,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan urusan umum OPD* | | | | - | 100 % | 188.377.650,00 | 188.377.650,00 | 125.772.800,00 | -62.604.850,00 | | | - | -<br>- | - | | 252.350.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 14 Paket | 14 Paket | 9.979.350,00 | 9.979.350,00 | 9.979.350,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.700.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 17.810.200,00 | 17.810.200,00 | 17.810.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 17.593.100,00 | 17.593.100,00 | 14.680.250,00 | -2.912.850,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 21.600.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.150.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 28 Paket | 28 Paket | 11.543.000,00 | 11.543.000,00 | 11.543.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | -1.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.900.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 122.812.000,00 | 122.812.000,00 | 64.620.000,00 | -58.192.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 175.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan ketersediaan barang milik daerah* | | | | - | 100 % | 26.552.200,00 | 26.552.200,00 | 110.294.240,00 | 83.742.040,00 | | | - | -<br>- | - | | 270.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 26.552.200,00 | 26.552.200,00 | 26.552.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 83.742.040,00 | 83.742.040,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 235.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | - | 100 % | 878.494.700,00 | 840.934.037,00 | 952.118.960,00 | 73.624.260,00 | | | - | -<br>- | - | | 893.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.593.900,00 | 9.593.900,00 | 7.507.300,00 | -2.086.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 476.190.000,00 | 476.190.000,00 | 476.190.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 310.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 392.710.800,00 | 355.150.137,00 | 468.421.660,00 | 75.710.860,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 575.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 1.565.652.505,00 | 1.548.216.780,00 | 1.553.018.280,00 | -12.634.225,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.525.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 214.138.600,00 | 213.839.500,00 | 149.746.000,00 | -64.392.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 79 Unit | 79 Unit | 1.284.442.625,00 | 1.267.306.000,00 | 1.334.011.000,00 | 49.568.375,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.275.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 42 Unit | 42 Unit | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 19.590.000,00 | 2.190.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 46.671.280,00 | 46.671.280,00 | 46.671.280,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun** | | | | **100 %** | **100 %** | **105.964.000,00** | **109.674.000,00** | **103.048.600,00** | **-964.000,00** | | | | | | | **105.000.000,00** | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen kajian penyusunan RPPLH yang tersusun dalam waktu tertentu* | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 105.964.000,00 | 109.674.000,00 | 103.048.600,00 | -2.915.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 105.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.964.000,00 | 109.674.000,00 | 103.048.600,00 | -2.915.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 105.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan** | | | | **100 %** | **100 %** | **325.108.100,00** | **319.974.100,00** | **315.551.600,00** | **39.891.900,00** | | | | | | | **365.000.000,00** | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan* | | | | 4 dokumen | 4 dokumen | 236.958.100,00 | 231.824.100,00 | 236.696.700,00 | -261.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 255.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 153.679.100,00 | 148.545.100,00 | 155.335.500,00 | 1.656.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 83.279.000,00 | 83.279.000,00 | 81.361.200,00 | -1.917.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen pemberian informasi lingkungan* | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 88.150.000,00 | 88.150.000,00 | 78.854.900,00 | -9.295.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 88.150.000,00 | 88.150.000,00 | 78.854.900,00 | -9.295.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati** | | | | **31,33 %** | **31,33 %** | **10.498.749.727,00** | **8.395.121.095,00** | **10.969.776.645,00** | **-3.398.749.727,00** | | | | | | | **7.100.000.000,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Luasan RTH publik kewenangan DLH yang terkelola* | | | | 94.06 ha | 94.06 ha | 10.498.749.727,00 | 8.395.121.095,00 | 10.969.776.645,00 | 471.026.918,00 | | | - | -<br>- | - | | 7.100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 90,81 Ha | 90,81 Ha | 8.787.950.527,00 | 6.583.159.350,00 | 8.910.138.510,00 | 122.187.983,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH | - | -<br>- | | | 5.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3** | | | | **83,33 %** | **83,33 %** | **9.910.200,00** | **9.910.200,00** | **7.228.400,00** | **-9.910.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | *Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 di tahun terlaksana* | | | | 5 usaha dan/atau kegiatan | 5 usaha dan/atau kegiatan | 9.910.200,00 | 9.910.200,00 | 7.228.400,00 | -2.681.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 9.910.200,00 | 9.910.200,00 | 7.228.400,00 | -2.681.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan** | | | | **46,67 %** | **46,67 %** | **63.817.900,00** | **63.817.900,00** | **53.530.000,00** | **-18.817.900,00** | | | | | | | **45.000.000,00** | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana* | | | | 30 % | 30 % | 63.817.900,00 | 63.817.900,00 | 53.530.000,00 | -10.287.900,00 | | | - | -<br>- | - | | 45.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20.635.600,00 | 20.635.600,00 | 15.353.600,00 | -5.282.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 30 Badan Usaha | 30 Badan Usaha | 43.182.300,00 | 43.182.300,00 | 38.176.400,00 | -5.005.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup** | | | | **11,84 %** | **11,84 %** | **203.130.200,00** | **203.130.100,00** | **174.539.300,00** | **-20.630.200,00** | | | | | | | **182.500.000,00** | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan sampai tahun n* | | | | 85 lembaga | 85 lembaga | 203.130.200,00 | 203.130.100,00 | 174.539.300,00 | -28.590.900,00 | | | - | - - | - | | 182.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 67.217.500,00 | 67.217.500,00 | 55.372.900,00 | -11.844.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 72.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat* | | | | 480 Orang | 480 Orang | 135.912.700,00 | 135.912.600,00 | 119.166.400,00 | -16.746.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat** | | | | **6,25 %** | **6,25 %** | **210.421.600,00** | **210.421.600,00** | **211.885.200,00** | **64.578.400,00** | | | | | | | **275.000.000,00** | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kota* | | | | 10 penghar gaan | 10 penghar gaan | 210.421.600,00 | 210.421.600,00 | 211.885.200,00 | 1.463.600,00 | | | - | - - | - | | 275.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH* | | | | 10 Entitas | 10 Entitas | 210.421.600,00 | 210.421.600,00 | 211.885.200,00 | 1.463.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 275.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan** | | | | **75 %** | **75 %** | **10.999.500,00** | **10.999.500,00** | **8.541.700,00** | **2.500.500,00** | | | | | | | **13.500.000,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Rasio penanganan pengaduan masyarakat* | | | | 1 | 1 | 10.999.500,00 | 10.999.500,00 | 8.541.700,00 | -2.457.800,00 | | | - | - - | - | | 13.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 4 Pengaduan | 4 Pengaduan | 10.999.500,00 | 10.999.500,00 | 8.541.700,00 | -2.457.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 13.500.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 10. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Peningkatan persentase sampah yang terkelola** | | | | **3,50 %** | **3,50 %** | **8.814.356.199,00** | **8.386.911.875,00** | **10.548.893.582,00** | **7.315.814.901,00** | | | | | | | **16.130.171.100,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Persentase sampah yang terkelola* | | | | 97.15 % | 97.15 % | 8.806.974.199,00 | 8.379.529.875,00 | 10.544.459.882,00 | 1.737.485.683,00 | | | - | - - | - | | 16.121.171.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | | | | 17 Kelompok | 17 Kelompok | 425.069.500,00 | 499.855.100,00 | 1.044.031.100,00 | 618.961.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 459.031.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan* | | | | 7300 Ton | 7300 Ton | 1.723.949.640,00 | 1.581.623.856,00 | 2.086.220.616,00 | 362.270.976,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 1.700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | | | | 20 Ton | 20 Ton | 43.854.400,00 | 39.054.400,00 | 60.123.600,00 | 16.269.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 62.760.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 69.085.290,00 | 67.405.290,00 | 66.910.690,00 | -2.174.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase luas layanan pengumpulan sampah* | | | | 65 Persentase | 65 Persentase | 2.418.646.710,00 | 2.213.174.769,00 | 2.972.549.085,00 | 553.902.375,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan* | | | | 1500 Ton | 1500 Ton | 497.559.780,00 | 454.352.306,00 | 697.890.416,00 | 200.330.636,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 510.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 13.072.100,00 | 13.072.100,00 | 7.546.400,00 | -5.525.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 14.380.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | *Jumlah laporan persampahan yang tersedia* | | | | 7 dokumen | 7 dokumen | 7.382.000,00 | 7.382.000,00 | 4.433.700,00 | -2.948.300,00 | | | - | -<br>- | - | | 9.000.100,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.03.0003 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 7.382.000,00 | 7.382.000,00 | 4.433.700,00 | -2.948.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.000.100,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR** | | | | | | | **31.756.552.717,00** | **30.491.665.904,00** | **35.128.999.183,00** | **3.372.446.466,00** | | | | | | | **36.005.771.100,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **31.756.552.717,00** | **30.491.665.904,00** | **35.128.999.183,00** | **3.372.446.466,00** | | | | | | | **36.005.771.100,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **31.756.552.717,00** | **30.491.665.904,00** | **35.128.999.183,00** | **3.372.446.466,00** | | | | | | | **36.005.771.100,00** | |
| 1. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati** | | | | **31,33 %** | **31,33 %** | **10.498.749.727,00** | **8.395.121.095,00** | **10.969.776.645,00** | **-3.398.749.727,00** | | | | | | | **7.100.000.000,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Luasan RTH publik kewenangan DLH yang terkelola* | | | | 94.06 ha | 94.06 ha | 10.498.749.727,00 | 8.395.121.095,00 | 10.969.776.645,00 | 471.026.918,00 | | | - | -<br>- | - | | 7.100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0003 | Pengelolaan Kebun Raya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 69 Ha | 69 Ha | 1.710.799.200,00 | 1.811.961.745,00 | 2.059.638.135,00 | 348.838.935,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.100.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH AKHIR** | | | | | | | **31.756.552.717,00** | **30.491.665.904,00** | **35.128.999.183,00** | **3.372.446.466,00** | | | | | | | **36.005.771.100,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **31.756.552.717,00** | **30.491.665.904,00** | **35.128.999.183,00** | **3.372.446.466,00** | | | | | | | **36.005.771.100,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **31.756.552.717,00** | **30.491.665.904,00** | **35.128.999.183,00** | **3.372.446.466,00** | | | | | | | **36.005.771.100,00** | |
| 1. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Peningkatan persentase sampah yang terkelola** | | | | **3,50 %** | **3,50 %** | **8.814.356.199,00** | **8.386.911.875,00** | **10.548.893.582,00** | **7.315.814.901,00** | | | | | | | **16.130.171.100,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Persentase sampah yang terkelola* | | | | 97.15 % | 97.15 % | 8.806.974.199,00 | 8.379.529.875,00 | 10.544.459.882,00 | 1.737.485.683,00 | | | - | -<br>- | - | | 16.121.171.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | | | | 23725 Ton | 23725 Ton | 3.615.736.779,00 | 3.510.992.054,00 | 3.609.187.975,00 | -6.548.804,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.800.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **6.207.709.428,00** | **6.476.399.434,00** | **6.651.755.833,00** | **444.046.405,00** | | | | | | | **6.824.520.700,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.207.709.428,00** | **6.476.399.434,00** | **6.651.755.833,00** | **444.046.405,00** | | | | | | | **6.824.520.700,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **6.207.709.428,00** | **6.476.399.434,00** | **6.651.755.833,00** | **444.046.405,00** | | | | | | | **6.824.520.700,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase realisasi anggaran tahun berkenaan**<br>**Persentase laporan Capaian Kierja dan realisasi keuangan yang tepat waktu**<br>**Persentase indikator program yang mencapai target**<br>**Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak** | | | | **87 %**<br>**93 %**<br>**92 %**<br>**95 %** | **93 %**<br>**92 %**<br>**95 %**<br>**87 %** | **5.539.988.138,00** | **5.832.890.073,00** | **6.009.640.375,00** | **228.211.862,00** | | | | | | | **5.768.200.000,00** | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Renstra PD Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Pelaporan Dokumen Perencanaan Anggaran Jumlah Rencana Kerja PD yang disusun* | | | | 1 dokumen<br>2 dokumen | 1 dokumen<br>2 dokumen | 46.160.400,00 | 46.160.400,00 | 39.506.100,00 | -6.654.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Masyarakat Kota Magelang | | 64.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 20.515.900,00 | 20.515.900,00 | 16.965.900,00 | -3.550.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 27.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.026.400,00 | 3.026.400,00 | 3.026.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.782.400,00 | 2.782.400,00 | 2.782.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.484.700,00 | 1.484.700,00 | 1.484.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.378.500,00 | 1.378.500,00 | 1.378.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 4.406.300,00 | 4.406.300,00 | 4.406.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 12.566.200,00 | 12.566.200,00 | 9.461.900,00 | -3.104.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 20.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Dokumen Keuangan*<br>*Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Sesuai SAP* | | | | 12 Dokumen<br>2 dokumen | 12 Dokumen<br>2 dokumen | 4.300.652.778,00 | 4.660.660.465,00 | 4.747.933.987,00 | 447.281.209,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 3.909.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25 Orang/ bulan | 25 Orang/ bulan | 4.288.169.578,00 | 4.648.177.265,00 | 4.737.169.187,00 | 448.999.609,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.894.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 55 Dokumen | 55 Dokumen | 11.438.200,00 | 11.438.200,00 | 9.719.800,00 | -1.718.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 13.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pelaporan Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Dinas* | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 144.954.800,00 | 16.088.700,00 | 16.088.700,00 | -128.866.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 207.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 25 Unit | 23 Unit | 2.829.500,00 | 2.829.500,00 | 2.829.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 1 Paket | 9.409.500,00 | 9.409.500,00 | 9.409.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 24.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 3.849.700,00 | 3.849.700,00 | 3.849.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 128.866.100,00 | 0,00 | 0,00 | -128.866.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 175.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 234.332.800,00 | 234.332.800,00 | 125.947.300,00 | -108.385.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 502.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.700.500,00 | 4.700.500,00 | 4.700.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.200.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 51.202.400,00 | 51.202.400,00 | 0,00 | -51.202.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 250.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.541.300,00 | 2.541.300,00 | 2.541.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.400.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.690.400,00 | 29.690.400,00 | 29.015.400,00 | -675.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 33.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.291.000,00 | 15.291.000,00 | 11.790.900,00 | -3.500.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 16.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 645.000,00 | -3.555.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.400.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.999.800,00 | 12.999.800,00 | 12.999.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 14.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | 3.230.000,00 | -1.080.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 28 Laporan | 11 Laporan | 98.709.000,00 | 98.709.000,00 | 52.336.000,00 | -46.373.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 160.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.688.400,00 | 10.688.400,00 | 8.688.400,00 | -2.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 11.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pelaporan dan Penatausahaan Aset Dinas* | | | | - | 1 dokumen | 295.602.500,00 | 389.851.500,00 | 546.610.157,00 | 251.007.657,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 350.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 295.602.500,00 | 0,00 | 0,00 | -295.602.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 389.851.500,00 | 501.510.157,00 | 501.510.157,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 350.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 45.100.000,00 | 45.100.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran* | | | | 3 dokumen | 3 dokumen | 350.228.790,00 | 318.290.138,00 | 359.147.840,00 | 8.919.050,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 371.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1500 Laporan | 1500 Laporan | 5.689.000,00 | 5.688.800,00 | 5.688.800,00 | -200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 198.744.000,00 | 198.744.000,00 | 202.944.000,00 | 4.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 145.795.790,00 | 113.857.338,00 | 150.515.040,00 | 4.719.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 165.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah dokumen Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 168.056.070,00 | 167.506.070,00 | 174.406.291,00 | 6.350.221,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 364.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 54.498.970,00 | 54.498.970,00 | 45.147.910,00 | -9.351.060,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 65.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 46.259.600,00 | 46.259.600,00 | 31.974.688,00 | -14.284.912,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 57.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 50 Unit | 30 Unit | 42.297.500,00 | 41.747.500,00 | 44.747.500,00 | 2.450.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 91.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 52.536.193,00 | 27.536.193,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 151.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentase Kepemilikan KIA**<br>**Persentase Kepemilikan KK**<br>**Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL** | | | | **100 %**<br>**98 %**<br>**99,95 %** | **98 %**<br>**100 %**<br>**99,95 %** | **390.180.540,00** | **364.633.176,00** | **392.922.468,00** | **153.319.460,00** | | | | | | | **543.500.000,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *Jumlah penduduk yang direkam KTP-el*<br>*Jumlah penerbitan KK*<br>*Jumlah penerbitan KTP-el* | | | | 11500 keping<br>2010 penduduk<br>6400 Dokumen | 11500 keping<br>2010 penduduk<br>6400 Dokumen | 364.332.540,00 | 338.785.176,00 | 374.275.668,00 | 9.943.128,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 481.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk* | | | | 36600 Dokumen | 36600 Dokumen | 189.561.190,00 | 173.897.561,00 | 199.950.048,00 | 10.388.858,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 240.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0003 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | | | | 48 Laporan | 20 Laporan | 32.208.600,00 | 32.208.600,00 | 24.991.500,00 | -7.217.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 65.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0007 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 139.642.750,00 | 129.759.015,00 | 146.414.120,00 | 6.771.370,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 170.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | *Jumlah Penerbitan KIA* | | | | 3100 keping | 3100 keping | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | 9.240.000,00 | -3.080.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | 9.240.000,00 | -3.080.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | *Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk* | | | | 70 kali | 70 kali | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | 2.779.800,00 | -1.500.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk* | | | | 70 Laporan | 70 Laporan | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | 2.779.800,00 | -1.500.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | *Jumlah pembinaan admiduk pada aparat kelurahan dan kecamatan* | | | | 4 kali | 2 kali | 9.248.000,00 | 9.248.000,00 | 6.627.000,00 | -2.621.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 16.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.04.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk* | | | | 4 Laporan | 2 Laporan | 9.248.000,00 | 9.248.000,00 | 6.627.000,00 | -2.621.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 16.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Persentase pasangan yang memiliki akta Perkawinan**<br>**Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran** | | | | **99,40 %**<br>**100 %** | **100 %**<br>**99,40 %** | **213.802.750,00** | **215.138.185,00** | **204.891.390,00** | **196.617.950,00** | | | | | | | **410.420.700,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | *Jumlah penerbitan akta perceraian*<br>*Jumlah penerbitan akta perkawinan* | | | | 20 Dokumen<br>90 Dokumen | 20 Dokumen<br>90 Dokumen | 164.635.350,00 | 153.549.215,00 | 163.473.320,00 | -1.162.030,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 240.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* | | | | 4000 Dokumen | 4000 Dokumen | 147.735.350,00 | 136.649.215,00 | 158.613.320,00 | 10.877.970,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 220.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0005 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 4.860.000,00 | -12.040.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 20.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | *Jumlah akta kelahiran penduduk 0-18 tahun yang diterbitkan*<br>*Jumlah akta kematian yang diterbitkan* | | | | 2000 akta | 2000 akta | 49.167.400,00 | 61.588.970,00 | 41.418.070,00 | -7.749.330,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 170.420.700,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0003 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil* | | | | 2 Laporan | 1 Laporan | 3.733.000,00 | 4.933.000,00 | 3.333.000,00 | -400.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 7.600.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil* | | | | 32 Laporan | 10 Laporan | 4.297.600,00 | 4.297.600,00 | 2.617.600,00 | -1.680.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 11.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 14.467.100,00 | 14.467.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 85.820.700,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil* | | | | 3 Laporan | 1 Laporan | 41.136.800,00 | 52.358.370,00 | 21.000.370,00 | -20.136.430,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 66.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis Teknologi Informasi** | | | | **100 %** | **100 %** | **57.738.000,00** | **57.738.000,00** | **39.974.600,00** | **31.662.000,00** | | | | | | | **89.400.000,00** | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | *Persentase pengelolaan data kependudukan yang dimanfaatkan* | | | | 100 % | 100 % | 12.919.000,00 | 10.439.000,00 | 6.037.500,00 | -6.881.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah se Kota Magelang dan lintas sektor | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.999.700,00 | 2.999.700,00 | 2.237.900,00 | -761.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 7.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 9.919.300,00 | 7.439.300,00 | 3.799.600,00 | -6.119.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 18.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *Persentase pengelolaan informasi adminduk* | | | | 100 % | 100 % | 44.819.000,00 | 47.299.000,00 | 33.937.100,00 | -10.881.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 64.400.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.183.100,00 | 6.183.100,00 | 4.777.100,00 | -1.406.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.400.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 38.635.900,00 | 41.115.900,00 | 29.160.000,00 | -9.475.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan** | | | | **95,00 %** | **95,00 %** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **4.327.000,00** | **7.000.000,00** | | | | | | | **13.000.000,00** | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | *Jumlah jenis data kependudukan yang tersusun pada profil kependudukan* | | | | 57 jenis | 57 jenis | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.327.000,00 | -1.673.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat dan lintas sektor | | 13.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.327.000,00 | -1.673.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 13.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **9.921.311.240,00** | **11.699.517.417,00** | **13.274.354.590,00** | **3.353.043.350,00** | | | | | | | **12.520.093.847,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.921.311.240,00** | **11.699.517.417,00** | **13.274.354.590,00** | **3.353.043.350,00** | | | | | | | **12.520.093.847,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **6.688.432.227,00** | **6.894.888.389,00** | **6.779.407.127,00** | **90.974.900,00** | | | | | | | **6.885.659.647,00** | |
| 1. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD**<br>**Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga**<br>**Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan (DOI kelompok2 perempuan, pkk, ormas perempuan, dst)**<br>**Persentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender** | | | | **17.34 %**<br>**20.90 %**<br>**20,00 %** | **24 %**<br>**23,03 %**<br>**22,22 %**<br>**17,54 %** | **1.256.414.800,00** | **1.117.752.100,00** | **887.628.700,00** | **-779.232.000,00** | | | | | | | **477.182.800,00** | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)* | | | | 28 OPD | 100 % | 91.481.600,00 | 91.481.600,00 | 40.931.900,00 | -50.549.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | OPD, Masyarakat Kota Magelang | | 149.010.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 38.245.700,00 | 38.245.700,00 | 13.674.900,00 | -24.570.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 70.270.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota* | | | | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan | 44.197.000,00 | 44.197.000,00 | 20.724.900,00 | -23.472.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota* | | | | 70 Orang | 70 Orang | 9.038.900,00 | 9.038.900,00 | 6.532.100,00 | -2.506.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 28.740.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase Pemberdayaan Perempuan dibidang politik dan ekonomi* | | | | 20 % | 23,03 % | 176.068.600,00 | 174.584.700,00 | 149.424.500,00 | -26.644.100,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | OPD, Masyarakat Kota Magelang | | 328.172.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 152.478.700,00 | 150.994.800,00 | 134.137.800,00 | -18.340.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 265.549.600,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 23.589.900,00 | 23.589.900,00 | 15.286.700,00 | -8.303.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 62.622.800,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah lembaga yang anggotanya diberdayakan* | | | | 3 lembaga | 3 lembaga | 988.864.600,00 | 851.685.800,00 | 697.272.300,00 | -291.592.300,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | OPD, Masyarakat Kota Magelang | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 525 Orang | 525 Orang | 864.999.900,00 | 727.821.100,00 | 573.407.600,00 | -291.592.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 123.864.700,00 | 123.864.700,00 | 123.864.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **161.735.840,00** | **356.246.246,00** | **342.177.220,00** | **32.402.160,00** | | | | | | | **194.138.000,00** | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 51.250.000,00 | 51.250.000,00 | 51.250.000,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 51.250.000,00 | 51.250.000,00 | 51.250.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | *Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 % | 161.735.840,00 | 270.486.246,00 | 256.417.220,00 | 94.681.380,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 194.138.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 161.735.840,00 | 157.720.246,00 | 143.651.220,00 | -18.084.620,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 194.138.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 Layanan | 0,00 | 112.766.000,00 | 112.766.000,00 | 112.766.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan (DOI kelompok2 perempuan, pkk, ormas perempuan, dst)* | | | | 20.90 % | 20.90 % | 0,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | - | 250 Orang | 0,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Persentase Keluarga Berkualitas** | | | | **14,29 %** | **14,29 %** | **45.000.000,00** | **45.000.000,00** | **45.000.000,00** | **22.902.000,00** | | | | | | | **67.902.000,00** | |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 % | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat Kota Magelang | | 67.902.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Orang | 1 Lembaga Orang | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 67.902.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **Persentase PD yang mengelola data gender dan anak** | | | | **100 %** | **100 %** | **11.312.100,00** | **11.312.100,00** | **4.659.200,00** | **27.407.300,00** | | | | | | | **38.719.400,00** | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase PD yang menyediakan data gender dan anak* | | | | 100 % | 100 % | 11.312.100,00 | 11.312.100,00 | 4.659.200,00 | -6.652.900,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | OPD, Masyarakat Kota Magelang | | 38.719.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.312.100,00 | 11.312.100,00 | 4.659.200,00 | -6.652.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 38.719.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak** | | | | **17,24 %** | **17,24 %** | **212.083.200,00** | **212.083.200,00** | **169.419.500,00** | **650.634.247,00** | | | | | | | **862.717.447,00** | |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | *Terbentuknya lembaga pelayanan* | | | | 0 % | 100 % | 212.083.200,00 | 212.083.200,00 | 169.419.500,00 | -42.663.700,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | OPD, Masyarakat Kota Magelang | | 862.717.447,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 500 Orang | 500 Orang | 147.844.200,00 | 147.844.200,00 | 120.401.900,00 | -27.442.300,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 862.717.447,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 64.239.000,00 | 64.239.000,00 | 49.017.600,00 | -15.221.400,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| 6. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Persentase Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan** | | | | **-** | **100 %** | **233.333.450,00** | **425.428.465,00** | **412.531.400,00** | **-30.333.450,00** | | | | | | | **203.000.000,00** | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase anak yang mengalami tindak kekerasan dan mendapat mendapat pendampingan* | | | | - | 100 % | 66.271.500,00 | 116.521.500,00 | 74.616.600,00 | 8.345.100,00 | | | - | - - | OPD, Masyarakat Kota Magelang | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA* | | | | - | 50 Orang | 0,00 | 50.250.000,00 | 50.250.000,00 | 50.250.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 66.271.500,00 | 66.271.500,00 | 24.366.600,00 | -41.904.900,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan perlindungan khusus* | | | | - | 100 % | 167.061.950,00 | 274.396.965,00 | 303.404.800,00 | 136.342.850,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 203.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 167.061.950,00 | 157.022.965,00 | 186.030.800,00 | 18.968.850,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 203.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan* | | | | - | 97 Layanan | 0,00 | 117.374.000,00 | 117.374.000,00 | 117.374.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK* | | | | - | 250 Orang | 0,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | 34.510.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | - | - - | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7. | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **4.768.552.837,00** | **4.727.066.278,00** | **4.917.991.107,00** | **273.447.163,00** | | | | | | | **5.042.000.000,00** | |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD* | | | | 100 % | 100 % | 28.464.800,00 | 28.464.800,00 | 21.395.300,00 | -7.069.500,00 | | | - | -<br>- | - | | 38.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 19.544.600,00 | 19.544.600,00 | 14.527.100,00 | -5.017.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.970.600,00 | 1.970.600,00 | 1.603.100,00 | -367.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.490.200,00 | 1.490.200,00 | 1.122.100,00 | -368.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.745.300,00 | 1.745.300,00 | 1.326.000,00 | -419.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.885.700,00 | 1.885.700,00 | 1.419.100,00 | -466.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.828.400,00 | 1.828.400,00 | 1.397.900,00 | -430.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan PD sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 3.716.813.963,00 | 3.701.430.804,00 | 3.727.705.561,00 | 10.891.598,00 | | | - | -<br>- | - | | 3.808.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/ bulan | 18 Orang/ bulan | 3.710.904.363,00 | 3.695.521.204,00 | 3.723.170.761,00 | 12.266.398,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 3.800.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.326.800,00 | 1.326.800,00 | 984.800,00 | -342.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 744.100,00 | -255.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.582.800,00 | 3.582.800,00 | 2.805.900,00 | -776.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Cakupan barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik* | | | | 100 % | 100 % | 2.399.900,00 | 2.399.900,00 | 2.124.625,00 | -275.275,00 | | | - | -<br>- | - | | 3.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.399.900,00 | 2.399.900,00 | 2.124.625,00 | -275.275,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Cakupan pegawai yang data kepegawaiannya teradministrasi* | | | | 100 % | 100 % | 3.809.500,00 | 3.809.500,00 | 2.879.800,00 | -929.700,00 | | | - | -<br>- | - | | 4.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.809.500,00 | 3.809.500,00 | 2.879.800,00 | -929.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum OPD* | | | | 100 % | 100 % | 99.181.900,00 | 99.181.900,00 | 72.141.600,00 | -27.040.300,00 | | | - | -<br>- | - | | 113.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 5.621.200,00 | 5.621.200,00 | 5.621.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 16.535.000,00 | 16.535.000,00 | 16.535.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 8.153.600,00 | 8.153.600,00 | 6.455.700,00 | -1.697.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 16.736.500,00 | 16.736.500,00 | 16.914.000,00 | 177.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.250.000,00 | -1.750.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 41.136.000,00 | 41.136.000,00 | 18.416.000,00 | -22.720.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.999.600,00 | 3.999.600,00 | 2.949.700,00 | -1.049.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan barang yang layak untuk digunakan* | | | | 0 % | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | - | 200 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 14 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyedia Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 559.140.610,00 | 533.039.249,00 | 611.727.432,00 | 52.586.822,00 | | | - | -<br>- | - | | 595.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.494.600,00 | 4.494.600,00 | 4.278.700,00 | -215.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 290.652.000,00 | 290.652.000,00 | 290.652.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 320.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 263.994.010,00 | 237.892.649,00 | 316.796.732,00 | 52.802.722,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 270.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 358.742.164,00 | 358.740.125,00 | 480.016.789,00 | 121.274.625,00 | | | - | -<br>- | - | | 480.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 14 Unit | 7 Unit | 151.136.380,00 | 139.209.000,00 | 104.917.000,00 | -46.219.380,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 155.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 39 Unit | 46 Unit | 85.531.300,00 | 97.458.736,00 | 74.973.000,00 | -10.558.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 22.074.989,00 | 22.074.989,00 | 30.129.389,00 | 8.054.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 1 Unit | 99.999.495,00 | 99.997.400,00 | 269.997.400,00 | 169.997.905,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **2.852.704.510,00** | **2.845.673.119,00** | **4.498.213.700,00** | **1.645.509.190,00** | | | | | | | **3.856.049.000,00** | |
| 1. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **Persentase Kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat** | | | | **88,00 %** | **88,00 %** | **2.571.544.110,00** | **2.564.512.719,00** | **3.710.133.875,00** | **992.504.890,00** | | | | | | | **3.564.049.000,00** | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | *Persentase kelurahan yang difasilitasi dalam Program TMMD (TNI manunggal Membangun kelurahan) Persentase kelurahan yang menerima pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat dan Bahagia* | | | | 100 % | 100 % | 2.571.544.110,00 | 2.564.512.719,00 | 3.710.133.875,00 | 1.138.589.765,00 | | | - | -<br>- | - | | 3.564.049.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 454.696.800,00 | 454.696.800,00 | 1.135.093.875,00 | 680.397.075,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | -<br>- | | | 1.064.049.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.116.847.310,00 | 2.109.815.919,00 | 2.575.040.000,00 | 458.192.690,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi** | | | | **88,00 %** | **88,00 %** | **29.017.100,00** | **29.017.100,00** | **21.146.500,00** | **2.982.900,00** | | | | | | | **32.000.000,00** | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi* | | | | 15 kelurahan | 17 kelurahan | 29.017.100,00 | 29.017.100,00 | 21.146.500,00 | -7.870.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 32.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 12.643.400,00 | 12.643.400,00 | 9.363.700,00 | -3.279.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 14.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 16.373.700,00 | 16.373.700,00 | 11.782.800,00 | -4.590.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase kelurahan yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan (yang di hitung adalah kelurahannya, kelurahan yang mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatannya)** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **252.143.300,00** | **252.143.300,00** | **766.933.325,00** | **7.856.700,00** | | | | | | | **260.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah diberdayakan (yang di hitung adalah lembaga kemasyarakatannya)* | | | | 88 % | 88 % | 252.143.300,00 | 252.143.300,00 | 766.933.325,00 | 514.790.025,00 | | | - | -<br>- | - | | 260.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 3 dokumen Lembaga | 3 dokumen Lembaga | 215.877.100,00 | 215.877.100,00 | 738.660.325,00 | 522.783.225,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 36.266.200,00 | 36.266.200,00 | 28.273.000,00 | -7.993.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **380.174.503,00** | **1.958.955.909,00** | **1.996.733.763,00** | **1.616.559.260,00** | | | | | | | **1.778.385.200,00** | |
| 1. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Persentase Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)** | | | | **23,00 %** | **23,00 %** | **206.973.940,00** | **311.704.346,00** | **314.930.680,00** | **222.320.260,00** | | | | | | | **429.294.200,00** | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | *Jumlah regulasi yang dilakukan pemaduan dan sinkronisasi* | | | | 0 % | 1 Regulasi | 7.480.000,00 | 7.477.000,00 | 0,00 | -7.480.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.480.000,00 | 7.477.000,00 | 0,00 | -7.480.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase data kependudukan yang diintegrasikan dalam program KKBPK* | | | | 100 % | 100 % | 199.493.940,00 | 304.227.346,00 | 314.930.680,00 | 115.436.740,00 | | | - | -<br>- | - | | 429.294.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga* | | | | - | 2 Laporan | 0,00 | 42.149.000,00 | 42.149.000,00 | 42.149.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.493.940,00 | 195.478.346,00 | 206.181.680,00 | 6.687.740,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 302.694.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | | | | - | 2 Laporan | 0,00 | 30.600.000,00 | 30.600.000,00 | 30.600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 30.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 36.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Contraceptive Prevalence Rate (CPR) / Cakupan PUS yang ikut KB** | | | | **-** | **58,45 %** | **0,00** | **853.651.000,00** | **857.379.520,00** | **728.251.000,00** | | | | | | | **728.251.000,00** | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Persentase PUS peserta KB Aktif* | | | | - | 73 % | 0,00 | 450.920.000,00 | 454.648.520,00 | 454.648.520,00 | | | - | -<br>- | - | | 368.120.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | - | 2 Laporan | 0,00 | 186.600.000,00 | 190.328.520,00 | 190.328.520,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 103.800.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)* | | | | - | 2 Laporan | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 66.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | | | | - | 4 Organisasi | 0,00 | 152.820.000,00 | 152.820.000,00 | 152.820.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 152.820.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | *Prosentase PKB/PLKB yang berdaya* | | | | - | 100 % | 0,00 | 136.000.000,00 | 136.000.000,00 | 136.000.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 136.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* | | | | - | 215 Orang | 0,00 | 136.000.000,00 | 136.000.000,00 | 136.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 136.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terdistribusikan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsinya* | | | | - | 100 % | 0,00 | 233.131.000,00 | 233.131.000,00 | 233.131.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 224.131.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | | | | - | 422 Orang | 0,00 | 224.131.000,00 | 224.131.000,00 | 224.131.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 224.131.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | - | 2 Laporan | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan<br>Ber-KB | *Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pelayanan KB* | | | | - | 13 stakeholder dan mitra | 0,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | - | 3 Kampung | 0,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB** | | | | **73,00 %** | **73,00 %** | **173.200.563,00** | **793.600.563,00** | **824.423.563,00** | **447.639.437,00** | | | | | | | **620.840.000,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina* | | | | 51 kelompok | 51 kelompok | 43.205.500,00 | 43.205.500,00 | 99.735.500,00 | 56.530.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 147.440.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,*<br>*PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* | | | | 1 Kelompok | 3 Kelompok | 43.205.500,00 | 43.205.500,00 | 99.735.500,00 | 56.530.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 147.440.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga* | | | | 51 kelompok | 51 kelompok | 129.995.063,00 | 750.395.063,00 | 724.688.063,00 | 594.693.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 473.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,*<br>*PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 129.995.063,00 | 129.995.063,00 | 104.288.063,00 | -25.707.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 135.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)* | | | | - | 2 laporan | 0,00 | 282.000.000,00 | 282.000.000,00 | 282.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan* | | | | - | 2 laporan | 0,00 | 338.400.000,00 | 338.400.000,00 | 338.400.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | -<br>- | | | 338.400.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | **16.756.697.611,00** | **17.306.452.430,00** | **18.229.769.516,00** | **1.473.071.905,00** | | | | | | | **21.719.117.792,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **16.756.697.611,00** | **17.306.452.430,00** | **18.229.769.516,00** | **1.473.071.905,00** | | | | | | | **21.719.117.792,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **16.756.697.611,00** | **17.306.452.430,00** | **18.229.769.516,00** | **1.473.071.905,00** | | | | | | | **21.719.117.792,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Sakip OPD**<br>**Cakupan Pelayanan Perkantoran** | | | | **BB**<br>**87,00 %** | **BB**<br>**87,00 %** | **6.073.270.992,00** | **6.775.442.397,00** | **6.943.784.630,00** | **269.729.008,00** | | | | | | | **6.343.000.000,00** | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Prosentase Pemenuhan Laporan Perencanaan Program* | | | | - | 100 % | 28.140.500,00 | 28.140.500,00 | 36.221.375,00 | 8.080.875,00 | | | - | -<br>- | - | | 39.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.281.500,00 | 9.281.500,00 | 22.048.125,00 | 12.766.625,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.987.500,00 | 3.987.500,00 | 3.270.625,00 | -716.875,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.265.500,00 | 3.265.500,00 | 2.198.125,00 | -1.067.375,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.776.500,00 | 7.776.500,00 | 5.832.375,00 | -1.944.125,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.829.500,00 | 3.829.500,00 | 2.872.125,00 | -957.375,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Prosentase Pemenuhan Laporan Keuangan* | | | | - | 100 % | 4.934.235.724,00 | 5.654.477.302,00 | 5.960.489.854,00 | 1.026.254.130,00 | | | - | -<br>- | - | | 5.118.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 34 Orang/ bulan | 34 Orang/ bulan | 4.916.506.724,00 | 5.636.748.302,00 | 5.947.135.104,00 | 1.030.628.380,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 5.100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.080.500,00 | 10.080.500,00 | 7.507.000,00 | -2.573.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.648.500,00 | 7.648.500,00 | 5.847.750,00 | -1.800.750,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Cakupan Administrasi Kepegawaian* | | | | - | 100 % | 5.158.000,00 | 5.158.000,00 | 3.868.500,00 | -1.289.500,00 | | | - | -<br>- | - | | 5.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.158.000,00 | 5.158.000,00 | 3.868.500,00 | -1.289.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Perlengkapan Kerja Perkantoran* | | | | - | 100 % | 221.099.450,00 | 208.499.450,00 | 132.762.625,00 | -88.336.825,00 | | | - | -<br>- | - | | 226.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.814.000,00 | 5.814.000,00 | 5.814.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.324.400,00 | 3.324.400,00 | 2.656.150,00 | -668.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 23.230.000,00 | 23.230.000,00 | 23.230.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 24.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.918.800,00 | 2.918.800,00 | 2.229.600,00 | -689.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.253.500,00 | 7.253.500,00 | 7.253.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 6.700.000,00 | -1.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 14.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 170.358.750,00 | 157.758.750,00 | 84.879.375,00 | -85.479.375,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 165.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Prosentase Pemenuhan Peralatan Kerja* | | | | - | 100 % | 25.069.400,00 | 25.069.400,00 | 8.914.200,00 | -16.155.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 32 Unit | 12 Unit | 25.069.400,00 | 25.069.400,00 | 8.914.200,00 | -16.155.200,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Prosentase Pembangunan Sarpras Pendukung Kantor* | | | | - | 100 % | 390.595.918,00 | 385.125.745,00 | 432.573.576,00 | 41.977.658,00 | | | - | -<br>- | - | | 450.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 0 | 1 0 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.308.000,00 | -192.000,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 172.551.000,00 | 185.151.000,00 | 185.151.000,00 | 12.600.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 215.544.918,00 | 197.474.745,00 | 245.114.576,00 | 29.569.658,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Prosentase Pemeliharaan Aset Perkantoran* | | | | - | 100 % | 468.972.000,00 | 468.972.000,00 | 368.954.500,00 | -100.017.500,00 | | | - | -<br>- | - | | 465.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 108.626.000,00 | 108.626.000,00 | 83.444.500,00 | -25.181.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 90.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 21 Unit | 21 Unit | 252.094.000,00 | 252.094.000,00 | 192.895.500,00 | -59.198.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 65 Unit | 65 Unit | 44.850.000,00 | 44.850.000,00 | 44.850.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 63.402.000,00 | 63.402.000,00 | 47.764.500,00 | -15.637.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)**<br>**Pengguna moda transportasi umum di perkotaaan (PPTUK)** | | | | **6,81 vcr**<br>**0,76 %** | **0,76 vcr**<br>**6,81 %** | **10.683.426.619,00** | **10.531.010.033,00** | **11.285.984.886,00** | **4.692.691.173,00** | | | | | | | **15.376.117.792,00** | |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | *Cakupan Pengaturan Prasarana LL* | | | | 95 % | 95 % | 20.849.500,00 | 20.849.500,00 | 141.471.500,00 | 120.622.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 45.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 20.849.500,00 | 20.849.500,00 | 141.471.500,00 | 120.622.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Persentase Ruas Jalan Yang Memiliki Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik* | | | | - | 95 % | 6.681.939.648,00 | 6.650.971.592,00 | 7.348.437.475,00 | 666.497.827,00 | | | - | -<br>- | - | | 8.400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 225 Unit | 225 Unit | 5.754.066.076,00 | 5.582.691.305,00 | 6.232.691.305,00 | 478.625.229,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | - | -<br>- | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 1800 Unit | 1800 Unit | 836.198.572,00 | 975.450.287,00 | 998.435.170,00 | 162.236.598,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 91.675.000,00 | 92.830.000,00 | 117.311.000,00 | 25.636.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | *Prosentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C* | | | | - | 84 % | 296.465.970,00 | 274.380.203,00 | 344.563.990,00 | 48.098.020,00 | | | - | -<br>- | - | | 443.457.432,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 261.583.370,00 | 239.497.603,00 | 276.781.390,00 | 15.198.020,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 313.900.512,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0007 | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.882.600,00 | 34.882.600,00 | 67.782.600,00 | 32.900.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 129.556.920,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | *Prosentase Fasilitas Parkir Berijin* | | | | - | 90 % | 1.769.228.791,00 | 1.802.912.291,00 | 1.297.636.392,00 | -471.592.399,00 | | | - | -<br>- | - | | 2.160.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.741.634.491,00 | 1.775.317.991,00 | 1.274.103.242,00 | -467.531.249,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.100.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 27.594.300,00 | 27.594.300,00 | 23.533.150,00 | -4.061.150,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Prosentase Angkutan Umum yang tidak Melaksanakan Uji KIR*<br>*Prosentase Kelaikan Alat Uji Berdasarkan Hasil Kalibrasi dan Umur Ekonomis Alat Uji Prosentase Kendaraan Bermotor yang Melakukan Uji Berkala* | | | | - | 0 %<br>100 % | 423.793.200,00 | 413.741.200,00 | 411.767.200,00 | -12.026.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 863.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 75.100.200,00 | 75.100.200,00 | 54.300.200,00 | -20.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 320.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 2.443.000,00 | 2.443.000,00 | 2.443.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar* | | | | 4200 Unit | 4200 Unit | 58.455.800,00 | 58.455.800,00 | 58.455.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 4200 Dokumen | 4200 Dokumen | 123.542.800,00 | 123.542.800,00 | 123.542.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 135.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 126.524.200,00 | 120.324.200,00 | 152.324.200,00 | 25.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 37.727.200,00 | 33.875.200,00 | 20.701.200,00 | -17.026.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 75.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Prosentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | - | 95 % | 1.337.255.960,00 | 1.217.511.697,00 | 1.304.712.379,00 | -32.543.581,00 | | | - | -<br>- | - | | 3.225.100.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 847.005.460,00 | 692.700.297,00 | 817.393.254,00 | -29.612.206,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.400.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 84.344.800,00 | 84.344.800,00 | 68.897.975,00 | -15.446.825,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 120.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.864.000,00 | 4.864.000,00 | 3.560.850,00 | -1.303.150,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.100.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 401.041.700,00 | 435.602.600,00 | 414.860.300,00 | 13.818.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.700.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | *Prosentase Hasil Andalalin yang disetujui* | | | | - | 95 % | 7.382.200,00 | 7.382.200,00 | 5.414.600,00 | -1.967.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 11.200.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.384.300,00 | 2.384.300,00 | 1.709.550,00 | -674.750,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.100.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 4.997.900,00 | 4.997.900,00 | 3.705.050,00 | -1.292.850,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.100.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | *Prosentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan* | | | | - | 70 % | 28.260.050,00 | 28.260.050,00 | 23.050.050,00 | -5.210.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 64.595.520,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 28.260.050,00 | 28.260.050,00 | 23.050.050,00 | -5.210.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 64.595.520,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Load Factor Angkutan Umum* | | | | - | 34,24 % | 91.128.500,00 | 91.128.500,00 | 385.058.500,00 | 293.930.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 109.354.560,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 91.128.500,00 | 91.128.500,00 | 385.058.500,00 | 293.930.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 109.354.560,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Rasio Konektivitas Kota* | | | | - | 98 % | 10.962.900,00 | 10.962.900,00 | 10.962.900,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 19.737.960,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.962.900,00 | 10.962.900,00 | 10.962.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 19.737.960,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Prosentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang Diterbitkan* | | | | - | 98 % | 16.159.900,00 | 12.909.900,00 | 12.909.900,00 | -3.250.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 34.672.320,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.14.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 300 Unit | 300 Unit | 16.159.900,00 | 12.909.900,00 | 12.909.900,00 | -3.250.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | - | -<br>- | | | 34.672.320,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK** | | | | | | | **16.313.193.050,00** | **15.479.101.169,00** | **15.531.130.795,00** | **-782.062.255,00** | | | | | | | **14.177.224.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **16.313.193.050,00** | **15.479.101.169,00** | **15.531.130.795,00** | **-782.062.255,00** | | | | | | | **14.177.224.000,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **15.794.540.000,00** | **14.760.822.550,00** | **14.924.255.245,00** | **-870.284.755,00** | | | | | | | **13.814.224.000,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas** | | | | **100 %** | **100 %** | **6.045.121.309,00** | **5.839.019.762,00** | **5.715.133.453,00** | **563.880.691,00** | | | | | | | **6.609.002.000,00** | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 14.298.400,00 | 14.298.400,00 | 10.707.875,00 | -3.590.525,00 | | | - | -<br>- | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | | 18.586.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.669.800,00 | 4.669.800,00 | 3.489.500,00 | -1.180.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.843.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.098.600,00 | -367.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.198.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.766.900,00 | 1.766.900,00 | 1.324.700,00 | -442.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.177.800,00 | 2.177.800,00 | 1.633.200,00 | -544.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.977.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.088.900,00 | 1.088.900,00 | 815.700,00 | -273.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.977.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 21 Laporan | 21 Laporan | 3.129.000,00 | 3.129.000,00 | 2.346.175,00 | -782.825,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.591.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan* | | | | - | 100 % | 4.701.322.109,00 | 4.954.811.793,00 | 4.933.575.508,00 | 232.253.399,00 | | | - | -<br>- | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | | 5.739.988.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 26 Orang/ bulan | 34 Orang/ bulan | 4.684.125.109,00 | 4.937.614.793,00 | 4.920.393.058,00 | 236.267.949,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 5.710.770.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.068.000,00 | 14.068.000,00 | 10.840.650,00 | -3.227.350,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 24.717.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.129.000,00 | 3.129.000,00 | 2.341.800,00 | -787.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.501.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian OPD* | | | | - | 100 % | 8.630.000,00 | 8.630.000,00 | 6.417.400,00 | -2.212.600,00 | | | - | -<br>- | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | | 17.749.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 8.630.000,00 | 8.630.000,00 | 6.417.400,00 | -2.212.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.749.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah* | | | | - | 100 % | 196.449.800,00 | 211.009.800,00 | 142.354.500,00 | -54.095.300,00 | | | - | -<br>- | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | | 126.586.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 8.642.000,00 | 8.642.000,00 | 8.642.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.654.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 1.482.400,00 | 1.482.400,00 | 1.482.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.196.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 21.275.700,00 | 21.275.700,00 | 21.275.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 34.026.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 10.769.000,00 | 10.769.000,00 | 8.076.200,00 | -2.692.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 25.307.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.404.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 14.358.100,00 | 14.358.100,00 | 14.358.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 21.024.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 8.500.000,00 | -2.900.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 116.162.000,00 | 130.722.000,00 | 68.818.000,00 | -47.344.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.975.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.740.600,00 | 4.740.600,00 | 3.582.100,00 | -1.158.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai* | | | | - | 100 % | 622.378.900,00 | 172.378.900,00 | 172.378.900,00 | -450.000.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 172.378.900,00 | 172.378.900,00 | 172.378.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 179.442.300,00 | 173.511.669,00 | 191.840.520,00 | 12.398.220,00 | | | - | -<br>- | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | | 302.261.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 720.000,00 | 720.000,00 | 62.000,00 | -658.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.196.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 118.488.000,00 | 118.488.000,00 | 119.146.000,00 | 658.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 197.654.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 3 Laporan | 60.234.300,00 | 54.303.669,00 | 72.632.520,00 | 12.398.220,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 102.411.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 322.599.800,00 | 304.379.200,00 | 257.858.750,00 | -64.741.050,00 | | | - | -<br>- | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | | 403.832.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 155.748.800,00 | 154.011.200,00 | 126.691.400,00 | -29.057.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 201.612.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 48.278.000,00 | 46.595.000,00 | 36.394.350,00 | -11.883.650,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 49.507.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 80 Unit | 80 Unit | 118.573.000,00 | 103.773.000,00 | 94.773.000,00 | -23.800.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 152.713.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Tingkat Keterbukaan Informasi Publik** | | | | **Informatif** | **Informatif** | **1.460.504.751,00** | **1.122.289.981,00** | **1.103.568.691,00** | **-936.308.751,00** | | | | | | | **524.196.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi*<br>*yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota* | | | | 100 % | 100 % | 1.460.504.751,00 | 1.122.289.981,00 | 1.103.568.691,00 | -356.936.060,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kab/kota | | 524.196.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo* | | | | 18 Komunitas | 18 Komunitas | 117.293.700,00 | 117.293.700,00 | 100.221.100,00 | -17.072.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 248.280.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan* | | | | 2 Permohonan | 2 Permohonan | 74.019.800,00 | 74.019.800,00 | 48.285.300,00 | -25.734.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 56.382.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah* | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 147.196.500,00 | 147.196.500,00 | 143.829.825,00 | -3.366.675,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 49.121.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0020 | Diseminasi Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase khalayak yang terpapar informasi publik* | | | | 100 % | 100 % | 626.661.260,00 | 308.558.960,00 | 294.467.960,00 | -332.193.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | | | | 3 Media | 3 Media | 402.432.557,00 | 382.320.087,00 | 377.453.809,00 | -24.978.748,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Konten Informasi Publik* | | | | 84 Konten | 84 Konten | 92.900.934,00 | 92.900.934,00 | 139.310.697,00 | 46.409.763,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 170.413.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase pemanfaatan aplikasi informatika** | | | | **100 %** | **100 %** | **8.288.913.940,00** | **7.799.512.807,00** | **8.105.553.101,00** | **-1.607.887.940,00** | | | | | | | **6.681.026.000,00** | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.261.700,00 | 1.261.700,00 | 943.100,00 | -318.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.261.700,00 | 1.261.700,00 | 943.100,00 | -318.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE* | | | | - | 29 OPD | 8.287.652.240,00 | 7.798.251.107,00 | 8.104.610.001,00 | -183.042.239,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD yang terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah daerah | | 6.681.026.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 370.778.600,00 | 283.637.100,00 | 526.466.300,00 | 155.687.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 211.179.400,00 | 211.179.400,00 | 208.429.600,00 | -2.749.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah* | | | | 6 Aplikasi | 6 Aplikasi | 988.931.800,00 | 974.853.061,00 | 944.277.940,00 | -44.653.860,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 283.201.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas* | | | | 29 unit | 29 unit | 87.334.000,00 | 87.334.000,00 | 53.165.000,00 | -34.169.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.140.904.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota* | | | | 29 Perangkat Daerah | 29 Perangkat Daerah | 1.492.232.240,00 | 1.098.051.346,00 | 1.234.800.761,00 | -257.431.479,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.446.100.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.16.03.2.02.0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas* | | | | 29 Perangkat Daerah | 29 Perangkat Daerah | 5.137.196.200,00 | 5.143.196.200,00 | 5.137.470.400,00 | 274.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.810.821.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **259.234.700,00** | **462.883.023,00** | **417.655.380,00** | **158.420.680,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data** | | | | **39 %** | **39 %** | **259.234.700,00** | **462.883.023,00** | **417.655.380,00** | **-259.234.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase produsen data yang berkontribusi pada portal satu data* | | | | - | 100 % | 259.234.700,00 | 462.883.023,00 | 417.655.380,00 | 158.420.680,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Produsen data yang berkontribusi pada pada portal satu data | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 48.963.000,00 | 48.963.000,00 | 40.506.200,00 | -8.456.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0008 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan* | | | | 100% | 100% | 105.285.100,00 | 103.308.223,00 | 70.253.380,00 | -35.031.720,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu* | | | | 100% | 100% | 92.668.600,00 | 92.668.600,00 | 103.446.400,00 | 10.777.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 12.318.000,00 | 217.943.200,00 | 203.449.400,00 | 191.131.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **259.418.350,00** | **255.395.596,00** | **189.220.170,00** | **-70.198.180,00** | | | | | | | **363.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi**<br>**Nilai Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi**<br>**Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi**<br>**Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi**<br>**Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi** | | | | **47 nilai**<br>**48 nilai**<br>**65 nilai**<br>**81 nilai**<br>**84 nilai** | **65 nilai**<br>**48 nilai**<br>**81 nilai**<br>**84 nilai**<br>**47 nilai** | **259.418.350,00** | **255.395.596,00** | **189.220.170,00** | **103.581.650,00** | | | | | | **363.000.000,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota* | | | | - | 3 OPD | 259.418.350,00 | 255.395.596,00 | 189.220.170,00 | -70.198.180,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Perangkata daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi | | 363.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 184.170.600,00 | 184.170.600,00 | 101.007.200,00 | -83.163.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 154.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi* | | | | 29 Perangkat Daerah | 29 Perangkat Daerah | 75.247.750,00 | 71.224.996,00 | 88.212.970,00 | 12.965.220,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 208.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | **6.032.437.085,00** | **5.910.487.589,00** | **5.721.918.727,00** | **-310.518.358,00** | | | | | | | **6.490.528.204,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.032.437.085,00** | **5.910.487.589,00** | **5.721.918.727,00** | **-310.518.358,00** | | | | | | | **6.490.528.204,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **6.032.437.085,00** | **5.910.487.589,00** | **5.721.918.727,00** | **-310.518.358,00** | | | | | | | **6.490.528.204,00** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **5.354.187.125,00** | **5.089.316.498,00** | **4.965.944.497,00** | **-522.487.125,00** | | | | | | | **4.831.700.000,00** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD* | | | | 11 Dokumen | 12 Dokumen | 13.316.700,00 | 13.316.700,00 | 10.179.500,00 | -3.137.200,00 | | | - | -<br>- | DPMPTSP | | 19.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 7.316.700,00 | 7.316.700,00 | 5.313.400,00 | -2.003.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 980.000,00 | 980.000,00 | 417.100,00 | -562.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 900.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 855.700,00 | 855.700,00 | 781.200,00 | -74.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.011.800,00 | 1.011.800,00 | 1.011.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.091.300,00 | 1.091.300,00 | 594.800,00 | -496.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 903.100,00 | 903.100,00 | 903.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.600.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.158.100,00 | 1.158.100,00 | 1.158.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD* | | | | - | 15 Laporan | 4.234.525.026,00 | 3.979.182.488,00 | 3.833.681.892,00 | -400.843.134,00 | | | - | -<br>- | DPMPTSP | | 3.512.700.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 21 Orang/ bulan | 19 Orang/ bulan | 4.227.594.926,00 | 3.972.252.388,00 | 3.827.941.692,00 | -399.653.234,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 3.500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.283.700,00 | 1.283.700,00 | 1.281.700,00 | -2.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 5.141.400,00 | 5.141.400,00 | 4.123.200,00 | -1.018.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 505.000,00 | 505.000,00 | 335.300,00 | -169.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian* | | | | - | 1 Laporan | 2.979.500,00 | 2.979.500,00 | 2.234.700,00 | -744.800,00 | | | - | -<br>- | DPMPTSP | | 4.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.979.500,00 | 2.979.500,00 | 2.234.700,00 | -744.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya tertib administrasi umum OPD* | | | | - | 7 Kegiatan | 93.268.500,00 | 93.268.500,00 | 80.005.000,00 | -13.263.500,00 | | | - | -<br>- | - | | 170.100.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 5 Paket | 1.885.200,00 | 1.885.200,00 | 1.885.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 23.666.800,00 | 23.666.800,00 | 25.156.800,00 | 1.490.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 38.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 6.947.800,00 | 6.947.800,00 | 5.070.300,00 | -1.877.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.190.000,00 | 4.190.000,00 | 4.190.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 23 Paket | 23 Paket | 23.449.700,00 | 23.449.700,00 | 23.449.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.440.000,00 | -860.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.800.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.829.000,00 | 29.829.000,00 | 17.813.000,00 | -12.016.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 67.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | - | 1 Laporan | 14.999.859,00 | 15.010.899,00 | 15.010.899,00 | 11.040,00 | | | - | -<br>- | DPMPTSP | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 14.999.859,00 | 15.010.899,00 | 15.010.899,00 | 11.040,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya jasa penunjang kantor* | | | | - | 3 Kegiatan | 773.162.790,00 | 763.634.061,00 | 721.550.768,00 | -51.612.022,00 | | | - | -<br>- | DPMPTSP | | 791.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.358.100,00 | 5.358.100,00 | 3.954.500,00 | -1.403.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 581.174.000,00 | 581.174.000,00 | 498.237.988,00 | -82.936.012,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 600.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 186.630.690,00 | 177.101.961,00 | 219.358.280,00 | 32.727.590,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 185.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara* | | | | - | 5 Jenis | 221.934.750,00 | 221.924.350,00 | 303.281.738,00 | 81.346.988,00 | | | - | -<br>- | DPMPTSP | | 314.100.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 15 Unit | 3 Unit | 77.607.200,00 | 45.141.650,00 | 34.727.660,00 | -42.879.540,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 17 Unit | 33.700.400,00 | 66.155.550,00 | 51.076.980,00 | 17.376.580,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 62.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.100.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 24 Unit | 66 Unit | 21.877.150,00 | 21.877.150,00 | 51.557.150,00 | 29.680.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 3 Unit | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 162.169.948,00 | 77.169.948,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 103.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Persentase Investor PMA/PMDN** | | | | **100 %** | **100 %** | **82.720.900,00** | **82.720.900,00** | **77.423.600,00** | **52.149.100,00** | | | | | | | **134.870.000,00** | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan PM dengan SOP* | | | | 100 % | 100 % | 9.868.600,00 | 9.868.600,00 | 7.758.600,00 | -2.110.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 29.870.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 9.868.600,00 | 9.868.600,00 | 7.758.600,00 | -2.110.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 29.870.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya* | | | | 80 % | 100 % | 72.852.300,00 | 72.852.300,00 | 69.665.000,00 | -3.187.300,00 | | | - | -<br>- | - | | 105.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.852.300,00 | 72.852.300,00 | 69.665.000,00 | -3.187.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 105.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase LOI yang ditindaklanjuti** | | | | **100 %** | **100 %** | **156.695.170,00** | **158.183.923,00** | **144.705.440,00** | **474.589.497,00** | | | | | | | **631.284.667,00** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)* | | | | 10 % | 10 % | 156.695.170,00 | 158.183.923,00 | 144.705.440,00 | -11.989.730,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Masyarakat | | 631.284.667,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 156.695.170,00 | 158.183.923,00 | 144.705.440,00 | -11.989.730,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 631.284.667,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP** | | | | **-** | **98.82 %** | **371.950.820,00** | **365.230.445,00** | **339.870.050,00** | **353.827.917,00** | | | | | | | **725.778.737,00** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *Persentase Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan yang dilayani* | | | | - | 100 % | 371.950.820,00 | 365.230.445,00 | 339.870.050,00 | -32.080.770,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Masyarakat | | 725.778.737,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.952.100,00 | 11.952.100,00 | 11.322.100,00 | -630.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 23.817.310,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 3000 Pelaku Usaha | 3210 Pelaku Usaha | 282.770.520,00 | 280.073.199,00 | 245.213.270,00 | -37.557.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 499.265.573,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 860 Pelaku Usaha | 400 Pelaku Usaha | 50.309.700,00 | 46.286.946,00 | 56.416.480,00 | 6.106.780,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 60.925.502,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | | | 100 Kegiatan Usaha | 100 Kegiatan Usaha | 26.918.500,00 | 26.918.200,00 | 26.918.200,00 | -300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 141.770.352,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku** | | | | **-** | **30 %** | **45.673.470,00** | **141.826.223,00** | **114.325.540,00** | **59.326.530,00** | | | | | | | **105.000.000,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM* | | | | - | 90 % | 45.673.470,00 | 141.826.223,00 | 114.325.540,00 | 68.652.070,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Masyarakat | | 105.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 448 Pelaku Usaha | 448 Pelaku Usaha | 6.883.200,00 | 61.547.200,00 | 45.501.500,00 | 38.618.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan*<br>*; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 100 Kegiatan Usaha | 100 Kegiatan Usaha | 38.790.270,00 | 80.279.023,00 | 68.824.040,00 | 30.033.770,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 80.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | | | | **-** | **100 %** | **21.209.600,00** | **73.209.600,00** | **79.649.600,00** | **40.685.200,00** | | | | | | | **61.894.800,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pengelolaan data , informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik* | | | | - | 100 % | 21.209.600,00 | 73.209.600,00 | 79.649.600,00 | 58.440.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Masyarakat | | 61.894.800,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 12 Dokumen | 5 Dokumen | 21.209.600,00 | 73.209.600,00 | 79.649.600,00 | 58.440.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 61.894.800,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA** | | | | | | | **15.413.462.168,00** | **16.342.153.821,00** | **17.722.435.577,00** | **2.308.973.409,00** | | | | | | | **20.537.298.298,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **13.950.028.768,00** | **14.703.622.961,00** | **15.786.405.662,00** | **1.836.376.894,00** | | | | | | | **20.537.298.298,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **13.950.028.768,00** | **14.703.622.961,00** | **15.786.405.662,00** | **1.836.376.894,00** | | | | | | | **20.537.298.298,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang OPD** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **4.710.543.663,00** | **4.868.987.697,00** | **4.937.791.283,00** | **-233.557.365,00** | | | | | | | **4.476.986.298,00** | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD* | | | | 100 % | 100 % | 30.954.000,00 | 30.954.000,00 | 23.215.500,00 | -7.738.500,00 | | | - | -<br>- | - | | 28.090.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 14.712.000,00 | 14.712.000,00 | 10.415.250,00 | -4.296.750,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.432.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.868.000,00 | 2.868.000,00 | 2.151.000,00 | -717.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.471.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.972.000,00 | 2.972.000,00 | 2.229.000,00 | -743.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.597.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.996.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.684.000,00 | 2.684.000,00 | 2.013.000,00 | -671.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.249.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 5.243.000,00 | 5.243.000,00 | 3.932.250,00 | -1.310.750,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.345.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase penyediaan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 3.416.491.643,00 | 3.997.565.337,00 | 4.084.625.978,00 | 668.134.335,00 | | | - | -<br>- | - | | 3.367.886.500,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/ bulan | 18 Orang/ bulan | 3.323.623.243,00 | 3.910.782.347,00 | 4.019.726.853,00 | 696.103.610,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 3.254.900.600,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.445.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 88.368.400,00 | 82.282.990,00 | 60.399.125,00 | -27.969.275,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 107.540.900,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 135.440.200,00 | 135.440.200,00 | 96.987.925,00 | -38.452.275,00 | | | - | - - | - | | 240.367.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 7.193.300,00 | 7.193.300,00 | 7.193.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 12.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 12.494.200,00 | 12.494.200,00 | 12.494.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 13.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 8.000.100,00 | 8.000.100,00 | 6.000.075,00 | -2.000.025,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 8.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 6.600.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.925.600,00 | 20.925.600,00 | 20.925.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 39.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 26.367.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 71.827.000,00 | 71.827.000,00 | 38.374.750,00 | -33.452.250,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 134.400.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 485.637.300,00 | 35.637.200,00 | 35.637.200,00 | -450.000.100,00 | | | - | - - | - | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM | - | - - | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 2 Unit | 35.637.300,00 | 35.637.200,00 | 35.637.200,00 | -100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 395.667.920,00 | 413.038.360,00 | 478.246.000,00 | 82.578.080,00 | | | - | - - | - | | 418.083.798,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.483.200,00 | 13.483.200,00 | 10.667.400,00 | -2.815.800,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 14.850.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 90.897.640,00 | 92.059.720,00 | 87.058.240,00 | -3.839.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 99.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 291.287.080,00 | 307.495.440,00 | 380.520.360,00 | 89.233.280,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 304.233.798,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 246.352.600,00 | 256.352.600,00 | 219.078.680,00 | -27.273.920,00 | | | - | -<br>- | - | | 322.559.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 14 Unit | 8 Unit | 115.421.200,00 | 97.006.000,00 | 78.042.000,00 | -37.379.200,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 175.861.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 10 Unit | 63.336.400,00 | 81.751.600,00 | 79.850.500,00 | 16.514.100,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 87.998.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 29 Unit | 21 Unit | 17.493.000,00 | 17.493.000,00 | 32.493.000,00 | 15.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 25.200.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 3 Unit | 50.102.000,00 | 60.102.000,00 | 28.693.180,00 | -21.408.820,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 33.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| 2. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan Persentase peningkatan pemuda yang dibina** | | | | **6,15 %**<br>**77,72 %** | **77,72 %**<br>**6,15 %** | **1.237.101.500,00** | **1.486.900.600,00** | **1.884.536.375,00** | **1.423.210.500,00** | | | | | | | **2.660.312.000,00** | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Persentase Sarana Kepemudaan* | | | | 14,29 % | 14,29 % | 1.087.101.500,00 | 1.336.900.600,00 | 1.734.536.375,00 | 647.434.875,00 | | | - | -<br>- | - | | 2.260.312.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 100 orang | 295 Orang | 239.456.500,00 | 449.255.700,00 | 760.255.700,00 | 520.799.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 700.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah yang menerima penghargaan pemuda* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 619.507.400,00 | 619.507.400,00 | 616.704.900,00 | -2.802.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 1.260.312.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda* | | | | 34 Orang | 34 Orang | 228.137.600,00 | 268.137.500,00 | 357.575.775,00 | 129.438.175,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pemuda Dan Persentase OKP Yang Dibina* | | | | 39,22 % | 39,22 % | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 400.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| 3. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Persentase peningkatan atlet yang dibina Persentase pelatih yang bersertifikat**<br>**Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga** | | | | **83,87 %**<br>**17,65 %**<br>**11,76 %** | **11,76 %**<br>**83,87 %**<br>**17,65 %** | **8.002.383.605,00** | **8.347.734.664,00** | **8.964.078.004,00** | **5.397.616.395,00** | | | | | | | **13.400.000.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengcabor Yang Terakreditasi*<br>*Persentase sarpras yang layak* | | | | 34,00 %<br>43,31 % | 34,00 %<br>43,31 % | 3.096.869.605,00 | 3.009.336.595,00 | 3.517.785.235,00 | 420.915.630,00 | | | - | -<br>- | - | | 4.200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota* | | | | 2 Unit | 3 Unit | 450.010.800,00 | 450.010.800,00 | 493.831.400,00 | 43.820.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase prestasi dibidang olahraga* | | | | 10,00 % | 10,00 % | 2.073.574.800,00 | 2.073.571.769,00 | 1.364.113.869,00 | -709.460.931,00 | | | - | -<br>- | - | | 3.400.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 391.331.900,00 | 391.328.869,00 | 381.324.669,00 | -10.007.231,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 900.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota* | | | | 550 Orang | 550 Orang | 1.682.242.900,00 | 1.682.242.900,00 | 982.789.200,00 | -699.453.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | *Persentase Tenaga Ahli Talent Scouting* | | | | 10,00 % | 10,00 % | 1.769.006.500,00 | 2.268.606.500,00 | 3.110.552.400,00 | 1.341.545.900,00 | | | - | -<br>- | - | | 5.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan* | | | | 230 Orang | 230 Orang | 1.769.006.500,00 | 2.268.606.500,00 | 3.110.552.400,00 | 1.341.545.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | *Persentase Jumlah Penduduk Yang berpartisipasi dalam olahraga dibagi jumlah penduduk*<br>*Persentase pengguna prasarana olahraga*<br>*Persentase sarana prasarana olahraga rekreasi masyarakat dalam kondisi layak* | | | | 2 buah<br>3,19 %<br>43,31 % | 2 buah<br>3,19 %<br>43,31 % | 1.062.932.700,00 | 996.219.800,00 | 971.626.500,00 | -91.306.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 800.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi* | | | | 6 Lembaga | 3 Lembaga | 1.062.932.700,00 | 996.219.800,00 | 971.626.500,00 | -91.306.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 800.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **1.463.433.400,00** | **1.638.530.860,00** | **1.936.029.915,00** | **472.596.515,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **1.463.433.400,00** | **1.638.530.860,00** | **1.936.029.915,00** | **472.596.515,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Presentase Destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik** | | | | **86,67 %** | **86,67 %** | **211.168.200,00** | **211.168.200,00** | **120.148.080,00** | **-211.168.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/ kota* | | | | 5 buah | 5 buah | 211.168.200,00 | 211.168.200,00 | 120.148.080,00 | -91.020.120,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 88.532.700,00 | 88.532.700,00 | 67.148.080,00 | -21.384.620,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0008 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 122.635.500,00 | 122.635.500,00 | 53.000.000,00 | -69.635.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| 2. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Magelang**<br>**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara** | | | | **11,11 %**<br>**13,33 %** | **13,33 %**<br>**11,11 %** | **1.068.345.300,00** | **1.255.996.760,00** | **1.660.180.610,00** | **-1.068.345.300,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen kajian perencanaan strategis pariwisata* | | | | 1 buah | 1 buah | 1.068.345.300,00 | 1.255.996.760,00 | 1.660.180.610,00 | 591.835.310,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.735.000,00 | 53.735.000,00 | 50.185.000,00 | -3.550.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 89.891.500,00 | 89.887.000,00 | 64.972.725,00 | -24.918.775,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 750.428.500,00 | 942.141.400,00 | 1.375.940.765,00 | 625.512.265,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Promosi | 1 Promosi | 174.290.300,00 | 170.233.360,00 | 169.082.120,00 | -5.208.180,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| 3. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Persentase peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya**<br>**Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kapasitasnya** | | | | **4,72 %**<br>**33,33 %** | **33,33 %**<br>**4,72 %** | **183.919.900,00** | **171.365.900,00** | **155.701.225,00** | **-183.919.900,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | *Jumlah Pembinaan Pariwisata* | | | | 7 buah | 7 buah | 183.919.900,00 | 171.365.900,00 | 155.701.225,00 | -28.218.675,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 44.761.600,00 | 40.261.600,00 | 33.418.900,00 | -11.342.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 51.133.700,00 | 51.133.700,00 | 50.436.275,00 | -697.425,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 88.024.600,00 | 79.970.600,00 | 71.846.050,00 | -16.178.550,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | | **PENGELOLAAN SPORT CENTER** | | | | | | | **15.413.462.168,00** | **16.342.153.821,00** | **17.722.435.577,00** | **2.308.973.409,00** | | | | | | | **20.537.298.298,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **13.950.028.768,00** | **14.703.622.961,00** | **15.786.405.662,00** | **1.836.376.894,00** | | | | | | | **20.537.298.298,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **13.950.028.768,00** | **14.703.622.961,00** | **15.786.405.662,00** | **1.836.376.894,00** | | | | | | | **20.537.298.298,00** | |
| 1. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Persentase peningkatan atlet yang dibina**<br>**Persentase pelatih yang bersertifikat**<br>**Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga** | | | | **11,76 %**<br>**83,87 %**<br>**17,65 %** | **11,76 %**<br>**83,87 %**<br>**17,65 %** | **8.002.383.605,00** | **8.347.734.664,00** | **8.964.078.004,00** | **5.397.616.395,00** | | | | | | | **13.400.000.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengcabor Yang Terakreditasi*<br>*Persentase sarpras yang layak* | | | | 34,00 %<br>43,31 % | 34,00 %<br>43,31 % | 3.096.869.605,00 | 3.009.336.595,00 | 3.517.785.235,00 | 420.915.630,00 | | | - | -<br>- | - | | 4.200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 2.646.858.805,00 | 2.559.325.795,00 | 3.023.953.835,00 | 377.095.030,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | | **7.065.394.411,00** | **7.422.113.936,00** | **6.984.624.609,00** | **-80.769.802,00** | | | | | | | **8.573.410.506,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **7.065.394.411,00** | **7.422.113.936,00** | **6.984.624.609,00** | **-80.769.802,00** | | | | | | | **8.573.410.506,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **6.337.499.290,00** | **6.675.612.103,00** | **6.290.685.002,00** | **-46.814.288,00** | | | | | | | **7.772.712.872,00** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Prosentase terlaksananya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku** | | | | **-** | **100 %** | **5.650.805.330,00** | **5.844.510.618,00** | **5.514.144.005,00** | **221.407.542,00** | | | | | | | **5.872.212.872,00** | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Prosentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 42.511.600,00 | 45.178.500,00 | 35.169.700,00 | -7.341.900,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 45.928.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 18.457.000,00 | 21.123.900,00 | 16.639.000,00 | -1.818.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 20.790.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.731.500,00 | 2.731.500,00 | 2.048.950,00 | -682.550,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 5.865.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.818.600,00 | 2.818.600,00 | 2.113.750,00 | -704.850,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 3.371.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.138.300,00 | 2.138.300,00 | 2.093.200,00 | -45.100,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 2.741.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.495.900,00 | 2.495.900,00 | 1.871.900,00 | -624.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 3.925.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 22 Laporan | 22 Laporan | 13.870.300,00 | 13.870.300,00 | 10.402.900,00 | -3.467.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 9.236.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Prosentase pengelolaan keuangan Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 4.755.924.126,00 | 4.886.295.453,00 | 4.569.271.068,00 | -186.653.058,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 4.760.156.286,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 28 Orang/ bulan | 28 Orang/ bulan | 4.667.909.086,00 | 4.801.862.507,00 | 4.472.712.588,00 | -195.196.498,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 4.667.909.086,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 43.869.400,00 | 44.302.900,00 | 38.828.000,00 | -5.041.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 37.579.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 44.145.640,00 | 40.130.046,00 | 57.730.480,00 | 13.584.840,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 54.668.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Prosentase pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan* | | | | - | 100 % | 3.028.700,00 | 3.028.700,00 | 2.272.500,00 | -756.200,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 5.553.570,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.028.700,00 | 3.028.700,00 | 2.272.500,00 | -756.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 5.553.570,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Prosentase pengelolaan administrasi pegawai perangkat daerah yang dilaksanakan* | | | | - | 100 % | 1.035.900,00 | 1.035.900,00 | 798.100,00 | -237.800,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 1.903.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 27 Dokumen | 27 Dokumen | 1.035.900,00 | 1.035.900,00 | 798.100,00 | -237.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.903.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan* | | | | - | 100 % | 111.493.750,00 | 111.476.250,00 | 78.426.450,00 | -33.067.300,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 169.448.840,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.529.350,00 | 8.529.350,00 | 8.529.350,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 15.647.280,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.610.100,00 | 2.592.600,00 | 2.592.600,00 | -17.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 4.756.620,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 572.000,00 | 572.000,00 | 2.565.800,00 | 1.993.800,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.036.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 21.389.700,00 | 21.389.700,00 | 15.615.100,00 | -5.774.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 39.054.180,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 2.500.200,00 | 2.500.200,00 | 1.875.200,00 | -625.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 4.584.030,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.704.400,00 | 13.704.400,00 | 13.704.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 25.083.630,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 21 Laporan | 21 Laporan | 62.188.000,00 | 62.188.000,00 | 33.544.000,00 | -28.644.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 79.286.900,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Prosentase Penyediaan jasa penunjang urusan kantor* | | | | - | 100 % | 505.361.990,00 | 493.514.725,00 | 559.952.329,00 | 54.590.339,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 599.382.969,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.306.000,00 | 4.770.400,00 | 4.571.200,00 | 2.265.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.850.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 261.220.350,00 | 271.002.249,00 | 263.951.049,00 | 2.730.699,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 287.342.385,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 241.835.640,00 | 217.742.076,00 | 291.430.080,00 | 49.594.440,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 310.190.584,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Prosentase pemeliharaan Barang Milik Daerah* | | | | - | 100 % | 231.449.264,00 | 303.981.090,00 | 268.253.858,00 | 36.804.594,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 289.840.207,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 17 Unit | 17 Unit | 67.239.310,00 | 67.239.270,00 | 55.961.840,00 | -11.277.470,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 96.985.024,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 97.277.720,00 | 97.274.620,00 | 79.649.418,00 | -17.628.302,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 83.998.380,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 3.000.000,00 | 1.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 3.300.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 33.567.200,00 | 43.567.200,00 | 47.642.200,00 | 14.075.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 60.638.820,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 31.565.034,00 | 94.100.000,00 | 82.000.400,00 | 50.435.366,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 44.917.983,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Persentase peningkatan anggota perpustakaan**<br>**Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan**<br>**Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan**<br>**Persentase Perpustakaan ber-SNP**<br>**Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan**<br>**Prosentase pemerataan layanan perpustakaan**<br>**Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan** | | | | **-** | **28.30 %**<br>**21.21 %**<br>**24.02 %**<br>**50 %**<br>**51 %**<br>**60 %**<br>**70.41 %** | **686.693.960,00** | **831.101.485,00** | **776.540.997,00** | **1.213.806.040,00** | | | | | | | **1.900.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Prosentase meningkatnya koleksi, kualitas layanan dan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah* | | | | - | 100 % | 530.139.760,00 | 655.747.285,00 | 643.043.697,00 | 112.903.937,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 805.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 72 Perpustakaan | 60 Perpustakaan | 61.560.000,00 | 158.509.900,00 | 111.757.600,00 | 50.197.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 40 Orang | 23.106.000,00 | 23.106.000,00 | 19.115.600,00 | -3.990.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan informasi Perpustakaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.443.740,00 | 57.148.146,00 | 63.040.980,00 | 6.597.240,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 75.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 500 Eksemplar | 500 Eksemplar | 56.000.000,00 | 96.000.000,00 | 86.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK* | | | | 20 Perpustakaan | 19 Perpustakaan | 333.030.020,00 | 320.983.239,00 | 363.129.517,00 | 30.099.497,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Prosentase peningkatan masyarakat dalam kegiataan perpustakaan* | | | | - | 100 % | 156.554.200,00 | 175.354.200,00 | 133.497.300,00 | -23.056.900,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 1.095.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 37.825.000,00 | 37.825.000,00 | 33.885.800,00 | -3.939.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 45.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 12 Perpustakaan | 10 Perpustakaan | 24.000.000,00 | 31.000.000,00 | 20.629.800,00 | -3.370.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 650.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat* | | | | 5 Lokus | 3 Lokus | 94.729.200,00 | 106.529.200,00 | 78.981.700,00 | -15.747.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 400.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **727.895.121,00** | **746.501.833,00** | **693.939.607,00** | **-33.955.514,00** | | | | | | | **800.697.634,00** | |
| 1. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan** | | | | **-** | **100 %** | **342.934.810,00** | **377.894.415,00** | **325.650.840,00** | **34.306.483,00** | | | | | | | **377.241.293,00** | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | *Prosentase penataaan berkas arsip dinamis sesuai ketentuan* | | | | - | 100 % | 162.080.400,00 | 203.064.196,00 | 178.245.180,00 | 16.164.780,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Arsip dinamis yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | 178.301.442,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan* | | | | 3000 Berkas | 3000 Berkas | 87.508.700,00 | 83.492.846,00 | 83.916.180,00 | -3.592.520,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 96.272.572,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 27 Laporan | 27 Laporan | 37.297.600,00 | 37.297.600,00 | 24.566.650,00 | -12.730.950,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 41.027.360,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0009 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.678.100,00 | 30.678.100,00 | 23.006.500,00 | -7.671.600,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 33.745.910,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0010 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis* | | | | 17 Instansi | 17 Instansi | 6.596.000,00 | 51.595.650,00 | 46.755.850,00 | 40.159.850,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 7.255.600,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | *Prosentase penataaan berkas arsip statis sesuai ketentuan* | | | | - | 100 % | 87.644.410,00 | 81.620.419,00 | 77.248.260,00 | -10.396.150,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | OPD se- Kota Magelang | | 96.408.851,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 3300 Arsip | 3300 Arsip | 87.644.410,00 | 81.620.419,00 | 77.248.260,00 | -10.396.150,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 96.408.851,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | *Presentase Arsip Statis yang dapat diakses melalui JIKN* | | | | - | 100 % | 93.210.000,00 | 93.209.800,00 | 70.157.400,00 | -23.052.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Arsip statis yang diakses melalui JIKN | | 102.531.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | | | | 60 Pengguna | 60 Pengguna | 83.539.600,00 | 83.539.600,00 | 62.809.700,00 | -20.729.900,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 91.893.560,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.670.400,00 | 9.670.200,00 | 7.347.700,00 | -2.322.700,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 10.637.440,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2. | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan** | | | | **-** | **100 %** | **384.960.311,00** | **368.607.418,00** | **368.288.767,00** | **38.496.030,00** | | | | | | | **423.456.341,00** | |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | *Prosentase pemusnahan arsip sesuai NSPK* | | | | - | 100 % | 2.140.000,00 | 2.139.400,00 | 1.668.900,00 | -471.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Arsip retensi musnah yang ada di Depo Arsip | | 2.354.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan* | | | | 500 Berkas | 500 Berkas | 2.140.000,00 | 2.139.400,00 | 1.668.900,00 | -471.100,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.354.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | *Prosentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola* | | | | - | 100 % | 382.820.311,00 | 366.468.018,00 | 366.619.867,00 | -16.200.444,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Khasanah arsip statis yang ada di Depo Arsip | | 421.102.341,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan* | | | | 3000 Arsip | 3000 Arsip | 260.000.141,00 | 255.984.346,00 | 255.822.828,00 | -4.177.313,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 286.000.154,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip* | | | | 1000 Arsip | 1000 Arsip | 122.820.170,00 | 110.483.672,00 | 110.797.039,00 | -12.023.131,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 135.102.187,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN** | | | | | | | **9.253.223.143,00** | **9.752.193.315,00** | **9.880.011.406,00** | **626.788.263,00** | | | | | | | **10.800.023.945,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **432.386.110,00** | **447.743.022,00** | **487.149.444,00** | **54.763.334,00** | | | | | | | **788.053.900,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **432.386.110,00** | **447.743.022,00** | **487.149.444,00** | **54.763.334,00** | | | | | | | **788.053.900,00** | |
| 1. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Cakupan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | | **-** | **100,00 %** | **318.657.920,00** | **338.030.426,00** | **363.351.962,00** | **291.013.180,00** | | | | | | | **609.671.100,00** | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Jumlah ketersediaan pangan (ton)* | | | | - | 13271 ton | 108.707.820,00 | 104.692.226,00 | 147.249.662,00 | 38.541.842,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 132.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0009 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 43.445.500,00 | 43.445.500,00 | 35.184.400,00 | -8.261.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 12 Laporan | 9.701.700,00 | 9.701.700,00 | 6.418.400,00 | -3.283.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis* | | | | 1 Laporan | 12 Laporan | 55.560.620,00 | 51.545.026,00 | 105.646.862,00 | 50.086.242,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | *Jumlah cadangan pangan yang dikelola Pemerintah Kota Magelang* | | | | - | 22 ton | 99.717.500,00 | 99.717.500,00 | 96.101.600,00 | -3.615.900,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 276.917.500,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Ton | 20,76 Ton | 87.230.900,00 | 87.230.900,00 | 84.910.900,00 | -2.320.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 139.030.900,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota* | | | | 0 Ton | 8 Ton | 12.486.600,00 | 12.486.600,00 | 11.190.700,00 | -1.295.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 137.886.600,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | *Angka konsumsi energi* *Angka konsumsi protein* | | | | - | 1953,00 Kkal/ kap/ hari 56,92 gram/ kap/ hari | 110.232.600,00 | 133.620.700,00 | 120.000.700,00 | 9.768.100,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 200.753.600,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 110.232.600,00 | 133.620.700,00 | 120.000.700,00 | 9.768.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 200.753.600,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan** | | | | **-** | **60,00 %** | **44.394.800,00** | **44.394.800,00** | **39.903.500,00** | **53.605.200,00** | | | | | | | **98.000.000,00** | |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan* | | | | - | 2 kegiatan | 44.394.800,00 | 44.394.800,00 | 39.903.500,00 | -4.491.300,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 98.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 44.394.800,00 | 44.394.800,00 | 39.903.500,00 | -4.491.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 98.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 3. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase Pangan Segar yang Aman** | | | | **-** | **86,00 %** | **69.333.390,00** | **65.317.796,00** | **83.893.982,00** | **11.049.410,00** | | | | | | | **80.382.800,00** | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase jumlah sampel PSAT yang diuji* | | | | - | 82 % | 69.333.390,00 | 65.317.796,00 | 83.893.982,00 | 14.560.592,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 80.382.800,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 69.333.390,00 | 65.317.796,00 | 83.893.982,00 | 14.560.592,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 80.382.800,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **8.820.837.033,00** | **9.304.450.293,00** | **9.392.861.962,00** | **572.024.929,00** | | | | | | | **10.011.970.045,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **722.737.806,00** | **887.635.089,00** | **933.870.412,00** | **211.132.606,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya** | | | | **-** | **1,00 %** | **454.323.596,00** | **625.254.620,00** | **664.511.364,00** | **-454.323.596,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | *Jumlah Produksi Benih Ikan* | | | | - | 760 kg | 225.283.300,00 | 412.304.300,00 | 404.204.300,00 | 178.921.000,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | | | | 0 Kelompok | 0 Kelompok | 61.389.300,00 | 61.389.300,00 | 60.139.300,00 | -1.250.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan* | | | | 30 Kelompok | 30 Kelompok | 163.894.000,00 | 350.915.000,00 | 344.065.000,00 | 180.171.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan* | | | | - | 164000 kg | 229.040.296,00 | 212.950.320,00 | 260.307.064,00 | 31.266.768,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 229.040.296,00 | 212.950.320,00 | 260.307.064,00 | 31.266.768,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Jumlah total produksi olahan perikanan** | | | | **-** | **238,00 Ton** | **268.414.210,00** | **262.380.469,00** | **269.359.048,00** | **-268.414.210,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | *Jumlah pemeriksaan hasil perikanan* | | | | - | 36 kali | 40.303.800,00 | 40.303.800,00 | 37.171.200,00 | -3.132.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko* | | | | 0 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 40.303.800,00 | 40.303.800,00 | 37.171.200,00 | -3.132.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Angka Konsumsi Ikan* | | | | - | 26,5 Kg/Kapita/Tahun | 228.110.410,00 | 222.076.669,00 | 232.187.848,00 | 4.077.438,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Ton | 238 Ton | 228.110.410,00 | 222.076.669,00 | 232.187.848,00 | 4.077.438,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **8.098.099.227,00** | **8.416.815.204,00** | **8.458.991.550,00** | **360.892.323,00** | | | | | | | **10.011.970.045,00** | |
| 1. | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas** | | | | **-** | **100,00 %** | **5.899.242.375,00** | **5.982.460.693,00** | **6.098.394.643,00** | **601.085.020,00** | | | | | | | **6.500.327.395,00** | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu* | | | | - | 4 dokumen | 21.627.000,00 | 21.627.000,00 | 16.206.800,00 | -5.420.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 61.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.469.000,00 | 9.469.000,00 | 7.101.300,00 | -2.367.700,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 38.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.459.300,00 | -1.140.700,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.427.700,00 | -1.172.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.958.000,00 | 2.958.000,00 | 2.218.500,00 | -739.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik* | | | | - | 1 unit kerja | 5.172.377.395,00 | 5.283.719.036,00 | 5.363.900.939,00 | 191.523.544,00 | | | - | -<br>- | - | | 5.177.327.395,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/ bulan | 12 Orang/ bulan | 5.156.827.395,00 | 5.268.169.036,00 | 5.351.375.439,00 | 194.548.044,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 5.156.827.395,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.349.800,00 | -450.200,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 9.676.000,00 | -2.074.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 14.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.499.700,00 | -500.300,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah* | | | | - | 100 % | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 1.940.100,00 | -684.900,00 | | | - | -<br>- | - | | 4.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 1.940.100,00 | -684.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah sarana yang layak fungsi* | | | | - | 10 jenis | 131.776.400,00 | 134.648.000,00 | 105.137.400,00 | -26.639.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 242.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 2.405.400,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 394.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 28.632.000,00 | 29.409.000,00 | 29.409.000,00 | 777.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 33.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 9 Paket | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 3.144.400,00 | -1.055.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 7.979.000,00 | 7.979.000,00 | 7.979.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.960.000,00 | -1.040.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 60.000.000,00 | 61.700.000,00 | 34.285.000,00 | -25.715.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 148.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi* | | | | - | 5 jenis | 26.438.300,00 | 13.428.500,00 | 43.503.000,00 | 17.064.700,00 | | | - | -<br>- | - | | 128.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 1 Unit | 26.438.300,00 | 13.428.500,00 | 43.503.000,00 | 17.064.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 128.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan* | | | | - | 4 jenis | 341.620.630,00 | 325.435.507,00 | 379.783.246,00 | 38.162.616,00 | | | - | -<br>- | - | | 388.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.700.000,00 | 4.500.000,00 | 3.582.100,00 | 882.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 142.894.800,00 | 142.979.850,00 | 142.979.850,00 | 85.050,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 145.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 | 8.830.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 187.195.830,00 | 169.125.657,00 | 224.391.296,00 | 37.195.466,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 225.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara* | | | | - | 7 jenis | 202.777.650,00 | 200.977.650,00 | 187.923.158,00 | -14.854.492,00 | | | - | -<br>- | - | | 499.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 71.909.550,00 | 71.909.550,00 | 56.616.800,00 | -15.292.750,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 133.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 29 Unit | 29 Unit | 115.868.100,00 | 114.068.100,00 | 86.306.358,00 | -29.561.742,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 26 Unit | 26 Unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 21.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase sarana pembibitan yang terpelihara**<br>**Persentase Peningkatan sarana Peternakan** | | | | **-** | **66,89 %**<br>**10,00 %** | **1.204.488.300,00** | **1.295.959.199,00** | **1.158.974.658,00** | **345.511.700,00** | | | | | | | **1.550.000.000,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Jumlah pengolah pangan asal hewan yang dilatih* | | | | - | 50 Orang | 31.244.400,00 | 31.244.400,00 | 27.251.400,00 | -3.993.000,00 | | | - | -<br>- | Kota Magelang | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 31.244.400,00 | 31.244.400,00 | 27.251.400,00 | -3.993.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase Jumlah Sarana Pembibitan yang terpelihara* | | | | - | 86,00 % | 1.015.505.100,00 | 1.106.975.999,00 | 995.864.758,00 | -19.640.342,00 | | | - | -<br>- | Kota Magelang | | 1.200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman* | | | | 8 Dokumen | 5 Dokumen | 633.548.800,00 | 751.166.100,00 | 565.888.100,00 | -67.660.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 550.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian* | | | | 2 Varietas Unggul Baru (VUB) | 2 Varietas Unggul Baru (VUB) | 381.956.300,00 | 355.809.899,00 | 429.976.658,00 | 48.020.358,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 650.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Pesentase Peningkatan nilai jual ternak/hewan kontes* | | | | - | 10 % | 157.738.800,00 | 157.738.800,00 | 135.858.500,00 | -21.880.300,00 | | | - | -<br>- | - | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.05.0002 | Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 157.738.800,00 | 157.738.800,00 | 135.858.500,00 | -21.880.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Persentase Prasarana Pertanian**<br>**Persentase Peningkatan prasarana Peternakan** | | | | **-** | **57,50 %**<br>**10,00 %** | **222.671.390,00** | **212.096.811,00** | **240.173.912,00** | **148.924.600,00** | | | | | | | **371.595.990,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian* | | | | - | 1 dokumen | 23.598.100,00 | 23.598.100,00 | 16.738.100,00 | -6.860.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 80.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 23.598.100,00 | 23.598.100,00 | 16.738.100,00 | -6.860.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 80.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 4. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan**<br>**Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH** | | | | **-** | **5,00 %**<br>**2,00 %** | **674.120.992,00** | **832.745.255,00** | **844.191.405,00** | **460.925.668,00** | | | | | | | **1.135.046.660,00** | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kasus penyakit hewan zoonosis* | | | | - | 10 kasus | 39.944.500,00 | 39.944.500,00 | 37.502.400,00 | -2.442.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 61.600.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan* | | | | 17 Wilayah | 17 Wilayah | 39.944.500,00 | 39.944.500,00 | 37.502.400,00 | -2.442.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 61.600.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | *Angka konsumsi protein hewani* | | | | - | 6,20 Kg/ Kapita/ Tahun | 76.079.670,00 | 74.068.423,00 | 60.382.916,00 | -15.696.754,00 | | | - | -<br>- | - | | 111.250.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.02.0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 38.438.670,00 | 36.427.423,00 | 40.337.016,00 | 1.898.346,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 66.250.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | *Persentase jumlah daging yang sehat* | | | | - | 96 % | 240.157.800,00 | 398.941.700,00 | 371.103.075,00 | 130.945.275,00 | | | - | -<br>- | - | | 565.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 27.182.400,00 | 27.182.400,00 | 22.687.875,00 | -4.494.525,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.04.0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner* | | | | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 10.271.000,00 | 10.271.000,00 | 8.063.000,00 | -2.208.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.04.0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi* | | | | 4 Unit Usaha | 4 Unit Usaha | 202.704.400,00 | 361.488.300,00 | 340.352.200,00 | 137.647.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | *Persentase peningkatan produk peternakan (daging, susu, telur)* | | | | - | 2 % | 10.249.200,00 | 6.769.200,00 | 6.376.900,00 | -3.872.300,00 | | | - | -<br>- | - | | 13.558.600,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 6.769.200,00 | 6.376.900,00 | 6.376.900,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.558.600,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani** | | | | **-** | **84,00 %** | **25.556.300,00** | **25.556.300,00** | **25.556.300,00** | **99.443.700,00** | | | | | | | **125.000.000,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | *Persentase jenis bencana pertanian yang tertangani* | | | | - | 100 % | 25.556.300,00 | 25.556.300,00 | 25.556.300,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kota Magelang | | 125.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 12 Ha | 12 Ha | 25.556.300,00 | 25.556.300,00 | 25.556.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 125.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 6. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala** | | | | **-** | **10,00 %** | **34.782.670,00** | **32.771.423,00** | **32.981.466,00** | **15.217.330,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan Kelayakan Unit Usaha (Praktek Dokter Hewan, Depo, Budidaya dll)* | | | | - | 10 % | 34.782.670,00 | 32.771.423,00 | 32.981.466,00 | -1.801.204,00 | | | - | -<br>- | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 34.782.670,00 | 32.771.423,00 | 32.981.466,00 | -1.801.204,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 7. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya**<br>**Persentase kelompok tani yang naik kelas** | | | | **-** | **10,00 %**<br>**24,00 %** | **37.237.200,00** | **35.225.523,00** | **58.719.166,00** | **242.762.800,00** | | | | | | | **280.000.000,00** | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *Cakupan penyuluhan pertanian* | | | | - | 10 % | 37.237.200,00 | 35.225.523,00 | 58.719.166,00 | 21.481.966,00 | | | - | -<br>- | Kota Magelang | | 280.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 4 Unit | 1 Unit | 15.526.500,00 | 15.526.500,00 | 33.357.400,00 | 17.830.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | - | -<br>- | | | 160.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | | | | 4 Unit | 3 Unit | 21.710.700,00 | 19.699.023,00 | 25.361.766,00 | 3.651.066,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 120.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | **RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | **9.253.223.143,00** | **9.752.193.315,00** | **9.880.011.406,00** | **626.788.263,00** | | | | | | | **10.800.023.945,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **8.820.837.033,00** | **9.304.450.293,00** | **9.392.861.962,00** | **572.024.929,00** | | | | | | | **10.011.970.045,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **8.098.099.227,00** | **8.416.815.204,00** | **8.458.991.550,00** | **360.892.323,00** | | | | | | | **10.011.970.045,00** | |
| 1. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Persentase Prasarana Pertanian**<br>**Persentase Peningkatan prasarana Peternakan** | | | | **-** | **57,50 %**<br>**10,00 %** | **222.671.390,00** | **212.096.811,00** | **240.173.912,00** | **148.924.600,00** | | | | | | | **371.595.990,00** | |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Jumlah Prasarana Peternakan yang terpelihara*<br>*Persentase Jumlah Jenis Prasarana Pertanian yang terpelihara* | | | | - | 1,00 unit<br>50 % | 199.073.290,00 | 188.498.711,00 | 223.435.812,00 | 24.362.522,00 | | | - | -<br>- | - | | 291.595.990,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 199.073.290,00 | 188.498.711,00 | 223.435.812,00 | 24.362.522,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 291.595.990,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH**<br>**Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan** | | | | **-** | **2,00 %**<br>**5,00 %** | **674.120.992,00** | **832.745.255,00** | **844.191.405,00** | **460.925.668,00** | | | | | | | **1.135.046.660,00** | |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah pemeriksaan sampel dan hewan di Lab Kesmavet dan Puskeswan* | | | | - | 833 Hewan | 307.689.822,00 | 313.021.432,00 | 368.826.114,00 | 61.136.292,00 | | | - | -<br>- | - | | 383.638.060,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 23.741.800,00 | 23.741.800,00 | 21.961.800,00 | -1.780.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 28.638.060,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | *Persentase peningkatan produk peternakan (daging, susu, telur)* | | | | - | 2 % | 10.249.200,00 | 6.769.200,00 | 6.376.900,00 | -3.872.300,00 | | | - | -<br>- | - | | 13.558.600,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.249.200,00 | 0,00 | 0,00 | -10.249.200,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | **PUSAT KESEHATAN HEWAN** | | | | | | | **9.253.223.143,00** | **9.752.193.315,00** | **9.880.011.406,00** | **626.788.263,00** | | | | | | | **10.800.023.945,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **8.820.837.033,00** | **9.304.450.293,00** | **9.392.861.962,00** | **572.024.929,00** | | | | | | | **10.011.970.045,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **8.098.099.227,00** | **8.416.815.204,00** | **8.458.991.550,00** | **360.892.323,00** | | | | | | | **10.011.970.045,00** | |
| 1. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan**<br>**Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH** | | | | **-** | **5,00 %**<br>**2,00 %** | **674.120.992,00** | **832.745.255,00** | **844.191.405,00** | **460.925.668,00** | | | | | | | **1.135.046.660,00** | |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | *Angka konsumsi protein hewani* | | | | - | 6,20 Kg/ Kapita/ Tahun | 76.079.670,00 | 74.068.423,00 | 60.382.916,00 | -15.696.754,00 | | | - | -<br>- | - | | 111.250.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 37.641.000,00 | 37.641.000,00 | 20.045.900,00 | -17.595.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah pemeriksaan sampel dan hewan di Lab Kesmavet dan Puskeswan* | | | | - | 833 Hewan | 307.689.822,00 | 313.021.432,00 | 368.826.114,00 | 61.136.292,00 | | | - | -<br>- | - | | 383.638.060,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 283.948.022,00 | 289.279.632,00 | 346.864.314,00 | 62.916.292,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 355.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | **DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO** | | | | | | | **19.270.990.015,00** | **19.416.890.904,00** | **20.426.626.888,00** | **1.155.636.873,00** | | | | | | | **21.736.192.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.587.485.900,00** | **865.893.320,00** | **773.997.460,00** | **-813.488.440,00** | | | | | | | **1.244.692.000,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **1.587.485.900,00** | **865.893.320,00** | **773.997.460,00** | **-813.488.440,00** | | | | | | | **1.244.692.000,00** | |
| 1. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan** | | | | **42,91 %** | **42,91 %** | **30.699.200,00** | **30.699.200,00** | **21.773.500,00** | **9.300.800,00** | | | | | | | **40.000.000,00** | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | *Prosentase koperasi, KSP, USP, koperasi yang mendapat pemeriksaan dan pengawasan* | | | | 12.65 % | 12.65 % | 30.699.200,00 | 30.699.200,00 | 21.773.500,00 | -8.925.700,00 | | | - | -<br>- | KSP/USP Koperasi | | 40.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 80 Unit Usaha | 80 Unit Usaha | 30.699.200,00 | 30.699.200,00 | 21.773.500,00 | -8.925.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| 2. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya** | | | | **26,18 %** | **26,18 %** | **39.101.400,00** | **38.301.400,00** | **26.013.600,00** | **5.898.600,00** | | | | | | | **45.000.000,00** | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Prosentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota* | | | | 48 % | 48 % | 39.101.400,00 | 38.301.400,00 | 26.013.600,00 | -13.087.800,00 | | | - | -<br>- | Pengurus / pengelola koperasi | | 45.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 39.101.400,00 | 38.301.400,00 | 26.013.600,00 | -13.087.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| 3. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan** | | | | **20,00 %** | **20,00 %** | **1.517.685.300,00** | **796.892.720,00** | **726.210.360,00** | **-357.993.300,00** | | | | | | | **1.159.692.000,00** | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | *Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin/legalitas usaha* | | | | 3.90 % | 3.90 % | 1.517.685.300,00 | 796.892.720,00 | 726.210.360,00 | -791.474.940,00 | | | - | -<br>- | Pelaku usaha mikro | | 1.159.692.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | | | | 2000 Unit Usaha | 2000 Unit Usaha | 387.829.700,00 | 351.689.120,00 | 460.045.760,00 | 72.216.060,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 709.692.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 2.17.07.2.01.0008 | Pemulihan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 480 Unit Usaha | 480 Unit Usaha | 769.917.000,00 | 0,00 | 0,00 | -769.917.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | | | | 275 Orang | 275 Orang | 359.938.600,00 | 445.203.600,00 | 266.164.600,00 | -93.774.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 450.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **17.683.504.115,00** | **18.550.997.584,00** | **19.652.629.428,00** | **1.969.125.313,00** | | | | | | | **20.491.500.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **5.236.362.586,00** | **5.467.954.098,00** | **6.513.715.490,00** | **1.277.352.904,00** | | | | | | | **7.200.000.000,00** | |
| 1. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik** | | | | **55 %** | **55 %** | **4.567.672.986,00** | **4.771.334.032,00** | **5.722.103.948,00** | **1.707.327.014,00** | | | | | | | **6.275.000.000,00** | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya* | | | | 100 % | 100 % | 3.318.322.456,00 | 3.287.607.425,00 | 3.721.398.097,00 | 403.075.641,00 | | | - | -<br>- | pedagang pasar dan pengunjung pasar | | 5.400.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 236.630.828,00 | 336.449.244,00 | 336.449.244,00 | 99.818.416,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 900.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 3.081.691.628,00 | 2.951.158.181,00 | 3.384.948.853,00 | 303.257.225,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | *Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya* | | | | 40 % | 40 % | 1.249.350.530,00 | 1.483.726.607,00 | 2.000.705.851,00 | 751.355.321,00 | | | - | -<br>- | PKL dan Pengelola sarana distribusi perdagangan | | 875.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.142.838.430,00 | 1.358.480.107,00 | 1.787.520.551,00 | 644.682.121,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 750.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 106.512.100,00 | 125.246.500,00 | 213.185.300,00 | 106.673.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 125.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| 2. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Persentase koefisien variasi harga antar waktu** | | | | **8,00 %** | **8,00 %** | **48.712.900,00** | **89.655.700,00** | **73.873.000,00** | **31.287.100,00** | | | | | | | **80.000.000,00** | |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | *Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun* | | | | 65.57 % | 65.57 % | 48.712.900,00 | 89.655.700,00 | 73.873.000,00 | 25.160.100,00 | | | - | -<br>- | masyarakat | | 80.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.712.900,00 | 89.655.700,00 | 73.873.000,00 | 25.160.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 80.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| 3. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **Nilai ekspor** | | | | **2.707.000 US$** | **2.707.000 US$** | **443.146.840,00** | **438.165.746,00** | **561.736.278,00** | **156.853.160,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah*<br>*Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar negeri* | | | | 10 %<br>2.50 % | 10 %<br>2.50 % | 443.146.840,00 | 438.165.746,00 | 561.736.278,00 | 118.589.438,00 | | | - | -<br>- | Pelaku usaha | | 600.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal* | | | | 80 Pelaku Usaha | 80 Pelaku Usaha | 443.146.840,00 | 438.165.746,00 | 561.736.278,00 | 118.589.438,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 600.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **12.447.141.529,00** | **13.083.043.486,00** | **13.138.913.938,00** | **691.772.409,00** | | | | | | | **13.291.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **3.31.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase terlaksananya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku** | | | | **93,00 %** | **93,00 %** | **11.136.960.823,00** | **11.739.100.997,00** | **11.806.915.788,00** | **689.539.177,00** | | | | | | | **11.826.500.000,00** | |
| | 3.31.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengangaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 14.673.900,00 | 14.673.900,00 | 10.661.700,00 | -4.012.200,00 | | | - | -<br>- | Pengelola perencanaan dan keuangan | | 26.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 7.363.000,00 | 7.363.000,00 | 5.391.200,00 | -1.971.800,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 670.500,00 | 670.500,00 | 451.600,00 | -218.900,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.250.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 627.600,00 | 627.600,00 | 427.300,00 | -200.300,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 706.400,00 | 706.400,00 | 486.400,00 | -220.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.750.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 763.200,00 | 763.200,00 | 546.200,00 | -217.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 4.543.200,00 | 4.543.200,00 | 3.359.000,00 | -1.184.200,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan* | | | | 90 % | 90 % | 9.595.579.222,00 | 10.064.208.926,00 | 10.239.722.327,00 | 644.143.105,00 | | | - | -<br>- | aparatur sipil negara | | 10.092.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 60 Orang/ bulan | 60 Orang/ bulan | 9.531.582.722,00 | 10.004.228.046,00 | 10.173.373.387,00 | 641.790.665,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 10.000.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.586.200,00 | 4.586.200,00 | 3.429.600,00 | -1.156.600,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.452.400,00 | 2.452.400,00 | 1.839.300,00 | -613.100,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 56.957.900,00 | 52.942.280,00 | 61.080.040,00 | 4.122.140,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 80.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.31.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum* | | | | - | 90 % | 144.664.680,00 | 166.129.680,00 | 102.397.180,00 | -42.267.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SDM perangkat daerah | | 199.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.153.080,00 | 4.153.080,00 | 4.153.080,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 6.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 16.450.400,00 | 16.450.400,00 | 16.450.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 20.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 11.501.700,00 | 11.501.700,00 | 8.542.200,00 | -2.959.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 14.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 3.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.002.500,00 | 12.002.500,00 | 12.002.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 16.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 6.110.000,00 | 6.110.000,00 | 3.000.000,00 | -3.110.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 9.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 93.547.000,00 | 115.012.000,00 | 57.349.000,00 | -36.198.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 130.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 95 % | 805.749.184,00 | 779.647.654,00 | 854.245.544,00 | 48.496.360,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SDM perangkat daerah | | 833.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.512.000,00 | 3.512.000,00 | 3.118.500,00 | -393.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 1.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 528.341.184,00 | 528.341.184,00 | 528.341.184,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 532.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 273.896.000,00 | 247.794.470,00 | 322.785.860,00 | 48.889.860,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 80 % | 576.293.837,00 | 714.440.837,00 | 599.889.037,00 | 23.595.200,00 | | | - | - - | - | | 676.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 18.389.850,00 | 123.302.650,00 | 97.951.000,00 | 79.561.150,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 25.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 65 Unit | 65 Unit | 374.100.000,00 | 388.683.600,00 | 306.983.450,00 | -67.116.550,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 435.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 26 Unit | 26 Unit | 18.720.000,00 | 18.545.000,00 | 18.545.000,00 | -175.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 26.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 22.500.000,00 | -7.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 135.083.987,00 | 153.909.587,00 | 153.909.587,00 | 18.825.600,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 190.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| 2. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah** | | | | **1,99 %** | **1,99 %** | **1.310.180.706,00** | **1.343.942.489,00** | **1.331.998.150,00** | **154.819.294,00** | | | | | | | **1.465.000.000,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | *Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK* | | | | 83 % | 83 % | 1.310.180.706,00 | 1.343.942.489,00 | 1.331.998.150,00 | 21.817.444,00 | | | - | -<br>- | Pelaku industri kecil | | 1.465.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 506.301.775,00 | 530.571.485,00 | 642.605.155,00 | 136.303.380,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 769.006.331,00 | 778.498.404,00 | 663.218.995,00 | -105.787.336,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 925.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 34.872.600,00 | 34.872.600,00 | 26.174.000,00 | -8.698.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | | **METROLOGI LEGAL** | | | | | | | **19.270.990.015,00** | **19.416.890.904,00** | **20.426.626.888,00** | **1.155.636.873,00** | | | | | | | **21.736.192.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **17.683.504.115,00** | **18.550.997.584,00** | **19.652.629.428,00** | **1.969.125.313,00** | | | | | | | **20.491.500.000,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **5.236.362.586,00** | **5.467.954.098,00** | **6.513.715.490,00** | **1.277.352.904,00** | | | | | | | **7.200.000.000,00** | |
| 1. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku** | | | | **79,17 %** | **79,17 %** | **176.829.860,00** | **168.798.620,00** | **156.002.264,00** | **68.170.140,00** | | | | | | | **245.000.000,00** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | *Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan* | | | | 73 % | 73 % | 176.829.860,00 | 168.798.620,00 | 156.002.264,00 | -20.827.596,00 | | | - | -<br>- | Pemilik UTTP dan konsumen | | 245.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 7300 Unit | 7300 Unit | 133.878.260,00 | 125.847.020,00 | 123.074.164,00 | -10.804.096,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 185.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 42.951.600,00 | 42.951.600,00 | 32.928.100,00 | -10.023.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO |
| | | **BAGIAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan administrasi umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **34.624.989.740,00** | **35.176.614.326,00** | **38.926.008.007,00** | **2.426.251.915,00** | | | | | | | **37.051.241.655,00** | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 3.742.372.208,00 | 3.758.138.700,00 | 4.177.591.188,00 | 435.218.980,00 | | | - | -<br>- | Administrasi Umum Bagian Pemerintahan | | 4.218.759.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 1 Paket | 2.919.000,00 | 2.919.000,00 | 2.919.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.919.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 2.615.600,00 | 2.615.600,00 | 1.957.100,00 | -658.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.615.600,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 3 Laporan | 1 Laporan | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | -225.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 900.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 55.460.000,00 | 55.460.000,00 | 15.130.000,00 | -40.330.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 27.483.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.938.632.400,00 | 1.948.632.400,00 | 3.100.566.400,00 | 1.161.934.000,00 | | | - | - - | Peralatan Bagian Pemerintahan | | 2.173.274.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 5.320.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **4.590.959.150,00** | **4.456.375.156,00** | **3.709.496.274,00** | **1.313.515.780,00** | | | | | | | **5.904.474.930,00** | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Persentase capaian pelaksanaan administrasi pemerintahan* | | | | 100 % | 100 % | 930.747.200,00 | 930.747.200,00 | 561.400.100,00 | -369.347.100,00 | | | - | - - | Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Kota Magelang | | 1.000.987.230,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 671.179.400,00 | 671.179.400,00 | 359.901.000,00 | -311.278.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 683.265.030,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 34.013.600,00 | 34.013.600,00 | 23.712.900,00 | -10.300.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 104.603.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 225.554.200,00 | 225.554.200,00 | 177.786.200,00 | -47.768.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 213.118.300,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Persentase penyusunan kebijakan terkait kerjasama* | | | | 100 % | 100 % | 39.278.600,00 | 39.278.600,00 | 7.959.200,00 | -31.319.400,00 | | | - | - - | OPD yang akan melaksanakan kerja sama | | 64.512.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 25.689.600,00 | 25.689.600,00 | 6.118.200,00 | -19.571.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 35.356.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.589.000,00 | 13.589.000,00 | 1.841.000,00 | -11.748.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 29.155.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan administrasi umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **34.624.989.740,00** | **35.176.614.326,00** | **38.926.008.007,00** | **2.426.251.915,00** | | | | | | | **37.051.241.655,00** | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 3.742.372.208,00 | 3.758.138.700,00 | 4.177.591.188,00 | 435.218.980,00 | | | - | - - | Administrasi Umum Bagian Kesra | | 4.218.759.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 3.794.000,00 | 3.794.000,00 | 3.794.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 5.472.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 2.643.000,00 | 3.221.000,00 | 2.788.000,00 | 145.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.907.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.200.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 240.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.640.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 900.000,00 | 900.000,00 | 675.000,00 | -225.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 1.573.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 17.798.000,00 | 17.798.000,00 | 530.000,00 | -17.268.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 70.694.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.938.632.400,00 | 1.948.632.400,00 | 3.100.566.400,00 | 1.161.934.000,00 | | | - | - - | Peralatan Bagian Kesejahteraan Rakyat | | 2.173.274.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 5 Unit | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 6.308.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan** | | | | **100 %** | **100 %** | **4.590.959.150,00** | **4.456.375.156,00** | **3.709.496.274,00** | **1.313.515.780,00** | | | | | | | **5.904.474.930,00** | |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Cakupan kebijakan kesejahteraan rakyat* | | | | 100 % | 100 % | 2.893.930.650,00 | 2.759.346.656,00 | 2.501.231.962,00 | -392.698.688,00 | | | - | - - | Masyarakat, OPD, Organisasi dan Lembaga Keagamaan | | 3.904.975.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.690.620.600,00 | 2.560.870.600,00 | 2.330.534.100,00 | -360.086.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 3.610.498.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 153.880.650,00 | 156.665.056,00 | 139.510.962,00 | -14.369.688,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 187.688.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 49.429.400,00 | 41.811.000,00 | 31.186.900,00 | -18.242.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 106.789.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BAGIAN HUKUM** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan administrasi umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **34.624.989.740,00** | **35.176.614.326,00** | **38.926.008.007,00** | **2.426.251.915,00** | | | | | | | **37.051.241.655,00** | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 3.742.372.208,00 | 3.758.138.700,00 | 4.177.591.188,00 | 435.218.980,00 | | | - | - - | Administrasi Umum Bagian Hukum | | 4.218.759.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 2.965.600,00 | 2.965.600,00 | 2.965.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.988.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 4.086.500,00 | 4.086.500,00 | 3.008.000,00 | -1.078.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 4.087.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.440.000,00 | -480.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.750.000,00 | 19.750.000,00 | 3.958.888,00 | -15.791.112,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 38.960.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | - | 100 % | 321.219.100,00 | 1.541.345.900,00 | 1.826.628.600,00 | 1.505.409.500,00 | | | - | -<br>- | - | | 168.262.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 18.262.800,00 | 18.262.800,00 | 18.262.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.262.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.938.632.400,00 | 1.948.632.400,00 | 3.100.566.400,00 | 1.161.934.000,00 | | | - | -<br>- | Peralatan & Mebel Bagian Hukum | | 2.173.274.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 6.210.000,00 | 6.210.000,00 | 6.210.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.800.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **4.590.959.150,00** | **4.456.375.156,00** | **3.709.496.274,00** | **1.313.515.780,00** | | | | | | | **5.904.474.930,00** | |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | *Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan koordinasi bagian hukum* | | | | 100 % | 100 % | 727.002.700,00 | 727.002.700,00 | 638.905.012,00 | -88.097.688,00 | | | - | -<br>- | roduk Hukum Daerah, OPD, Stakeholder dan Masyarakat Kota Magelang | | 934.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 800 Dokumen | 800 Dokumen | 273.408.800,00 | 273.408.800,00 | 263.670.700,00 | -9.738.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 380.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 2 Kasus | 2 Kasus | 299.939.700,00 | 305.072.600,00 | 293.845.122,00 | -6.094.578,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 800 Dokumen | 800 Dokumen | 153.654.200,00 | 148.521.300,00 | 81.389.190,00 | -72.265.010,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 204.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan administrasi umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **34.624.989.740,00** | **35.176.614.326,00** | **38.926.008.007,00** | **2.426.251.915,00** | | | | | | | **37.051.241.655,00** | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 3.742.372.208,00 | 3.758.138.700,00 | 4.177.591.188,00 | 435.218.980,00 | | | - | -<br>- | Administrasi Umum Bagian Perekonomian & SDA | | 4.218.759.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 1.873.608,00 | 1.873.000,00 | 1.325.500,00 | -548.108,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.400.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 40.774.000,00 | 40.774.000,00 | 4.000.000,00 | -36.774.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 90.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.938.632.400,00 | 1.948.632.400,00 | 3.100.566.400,00 | 1.161.934.000,00 | | | - | -<br>- | Peralatan Bagian Perekonomian dan SDA | | 2.173.274.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 6.280.000,00 | 6.280.000,00 | 7.700.000,00 | 1.420.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **1.354.218.210,00** | **1.453.193.019,00** | **1.155.324.345,00** | **684.984.690,00** | | | | | | | **2.039.202.900,00** | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Persentase pengelolaan perekonomian daerah yang sehat dan akuntabel* | | | | 100 % | 100 % | 297.804.400,00 | 297.803.600,00 | 133.653.360,00 | -164.151.040,00 | | | - | -<br>- | BUMD, BLUD, UMKM dan Pemantauan Barang Kepokmas | | 396.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 164.674.000,00 | 164.673.600,00 | 78.752.960,00 | -85.921.040,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 156.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 93.073.000,00 | 93.073.000,00 | 35.499.900,00 | -57.573.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 120.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 40.057.400,00 | 40.057.000,00 | 19.400.500,00 | -20.656.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | *Cakupan rekomendasi kebijakan SDA* | | | | 100 % | 100 % | 228.203.000,00 | 353.202.000,00 | 317.261.900,00 | 89.058.900,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kota Magelang dan OPD terkait | | 345.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 111.080.000,00 | 236.080.000,00 | 229.180.000,00 | 118.100.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 86.726.200,00 | 86.726.000,00 | 78.415.400,00 | -8.310.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.396.800,00 | 30.396.000,00 | 9.666.500,00 | -20.730.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan administrasi umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **34.624.989.740,00** | **35.176.614.326,00** | **38.926.008.007,00** | **2.426.251.915,00** | | | | | | | **37.051.241.655,00** | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD* | | | | 100 % | 100 % | 20.966.300,00 | 20.966.300,00 | 15.724.725,00 | -5.241.575,00 | | | - | -<br>- | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah | | 31.130.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.734.000,00 | 3.734.000,00 | 2.800.500,00 | -933.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.773.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.099.300,00 | 3.099.300,00 | 2.324.475,00 | -774.825,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.840.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.716.000,00 | 2.716.000,00 | 2.037.000,00 | -679.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.114.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.673.000,00 | 2.673.000,00 | 2.004.750,00 | -668.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.673.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.786.000,00 | 2.786.000,00 | 2.089.500,00 | -696.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.086.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.958.000,00 | 5.958.000,00 | 4.468.500,00 | -1.489.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.644.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 3.742.372.208,00 | 3.758.138.700,00 | 4.177.591.188,00 | 435.218.980,00 | | | - | -<br>- | Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan | | 4.218.759.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 3.681.000,00 | 3.681.000,00 | 3.681.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.682.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 2.278.000,00 | 2.278.000,00 | 1.708.500,00 | -569.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.278.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.400.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.284.000,00 | 13.284.000,00 | 3.468.000,00 | -9.816.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 37.136.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.938.632.400,00 | 1.948.632.400,00 | 3.100.566.400,00 | 1.161.934.000,00 | | | - | -<br>- | Peralatan dan Aplikasi Simbangda Bagian Administrasi Pembangunan | | 2.173.274.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.370.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase progres fisik seluruh OPD** | | | | **99,00 %** | **99,00 %** | **1.354.218.210,00** | **1.453.193.019,00** | **1.155.324.345,00** | **684.984.690,00** | | | | | | | **2.039.202.900,00** | |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | *Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan* | | | | 100 % | 100 % | 558.253.900,00 | 558.253.900,00 | 552.816.125,00 | -5.437.775,00 | | | - | -<br>- | Program dan Pelaksanaan Pembangunan Program Pembangunan | | 754.562.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 81.814.000,00 | 81.814.000,00 | 117.407.000,00 | 35.593.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.871.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 417.343.000,00 | 417.343.000,00 | 366.879.950,00 | -50.463.050,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 650.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 59.096.900,00 | 59.096.900,00 | 68.529.175,00 | 9.432.275,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 73.691.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan administrasi umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **34.624.989.740,00** | **35.176.614.326,00** | **38.926.008.007,00** | **2.426.251.915,00** | | | | | | | **37.051.241.655,00** | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 3.742.372.208,00 | 3.758.138.700,00 | 4.177.591.188,00 | 435.218.980,00 | | | - | -<br>- | Administrasi Umum Bagian Pengadaan Barang/Jasa | | 4.218.759.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 14.791.000,00 | 14.791.000,00 | 14.791.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 33.657.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 8.926.900,00 | 8.926.900,00 | 6.694.900,00 | -2.232.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 31.912.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.369.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.520.000,00 | -480.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 87.222.000,00 | 87.222.000,00 | 4.440.000,00 | -82.782.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 503.750.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 321.219.100,00 | 1.541.345.900,00 | 1.826.628.600,00 | 1.505.409.500,00 | | | - | -<br>- | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | 168.262.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 67.561.900,00 | 87.561.900,00 | 87.561.900,00 | 20.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.938.632.400,00 | 1.948.632.400,00 | 3.100.566.400,00 | 1.161.934.000,00 | | | - | -<br>- | Peralatan dan Mebel Bagian Pengadaan Barang/Jasa | | 2.173.274.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 2 Unit | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 19.980.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 464.264.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Tingkat kematangan UKPBJ** | | | | **2 level** | **2 level** | **1.354.218.210,00** | **1.453.193.019,00** | **1.155.324.345,00** | **684.984.690,00** | | | | | | | **2.039.202.900,00** | |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *Prosentase penggunaan e procurement terhadap belanja pengadaan* | | | | 40 % | 40 % | 269.956.910,00 | 243.933.519,00 | 151.592.960,00 | -118.363.950,00 | | | - | -<br>- | Para pelaku pengadaan Barang dan Jasa baik ASN di OPD maupun Penyedia | | 543.640.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 116.148.910,00 | 110.125.519,00 | 70.969.360,00 | -45.179.550,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 163.875.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 104.035.600,00 | 84.035.600,00 | 47.201.700,00 | -56.833.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 179.765.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 54 Orang | 54 Orang | 49.772.400,00 | 49.772.400,00 | 33.421.900,00 | -16.350.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BAGIAN UMUM** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan administrasi umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **34.624.989.740,00** | **35.176.614.326,00** | **38.926.008.007,00** | **2.426.251.915,00** | | | | | | | **37.051.241.655,00** | |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan PD sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 22.663.003.349,00 | 21.623.501.479,00 | 23.342.606.426,00 | 679.603.077,00 | | | - | -<br>- | ASN dan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah | | 23.830.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 148 Orang/ bulan | 148 Orang/ bulan | 22.596.003.349,00 | 21.556.507.679,00 | 23.275.612.626,00 | 679.609.277,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 23.760.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 28 Laporan | 28 Laporan | 67.000.000,00 | 66.993.800,00 | 66.993.800,00 | -6.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Prosentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan* | | | | 100 % | 100 % | 29.299.900,00 | 29.299.900,00 | 29.299.900,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Pakaian Dinas Sekretaris Daerah | | 33.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 16.300.300,00 | 16.300.300,00 | 16.300.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.999.600,00 | 12.999.600,00 | 12.999.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 16.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 3.742.372.208,00 | 3.758.138.700,00 | 4.177.591.188,00 | 435.218.980,00 | | | - | -<br>- | Administrasi Umum Bagian Umum | | 4.218.759.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 70.000.000,00 | 69.996.700,00 | 110.000.000,00 | 40.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 80.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 389.917.400,00 | 389.917.400,00 | 411.991.300,00 | 22.073.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 30.000.000,00 | 29.988.200,00 | 39.994.400,00 | 9.994.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 42.000.000,00 | 41.998.200,00 | 48.998.100,00 | 6.998.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 43.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 72.946.000,00 | 72.946.000,00 | 72.946.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | -30.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 97.134.000,00 | 97.134.000,00 | 159.999.100,00 | 62.865.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.346.000.000,00 | 1.361.000.000,00 | 1.829.100.000,00 | 483.100.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.510.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.247.035.000,00 | 1.247.031.000,00 | 1.318.526.200,00 | 71.491.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 850.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 321.219.100,00 | 1.541.345.900,00 | 1.826.628.600,00 | 1.505.409.500,00 | | | - | -<br>- | Bagian Umum | | 168.262.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | - | 3 Unit | 0,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 101.200.000,00 | 101.200.000,00 | 308.800.000,00 | 207.600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 177.682.700,00 | 69.682.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.499.233.770,00 | 2.525.328.331,00 | 2.836.116.508,00 | 336.882.738,00 | | | - | -<br>- | ATK, Jasa Kebersihan dan Lang ganan-langganan pada Bagian Umum | | 2.520.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 37.317.000,00 | 37.310.200,00 | 39.999.000,00 | 2.682.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.598.970.000,00 | 1.598.970.000,00 | 1.623.970.000,00 | 25.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.610.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 862.946.770,00 | 889.048.131,00 | 1.172.147.508,00 | 309.200.738,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 870.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.938.632.400,00 | 1.948.632.400,00 | 3.100.566.400,00 | 1.161.934.000,00 | | | - | -<br>- | Kendaraan Jabatan & Operasional, Mebel, Peralatan dan Mesin lainnya, Aset tetap lainnya, Gedung & Bangunan lainnya | | 2.173.274.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 45 Unit | 45 Unit | 754.992.400,00 | 764.992.400,00 | 1.079.992.400,00 | 325.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 609.988.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 65 Unit | 65 Unit | 519.700.000,00 | 519.700.000,00 | 584.700.000,00 | 65.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 414.993.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 80.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 135.660.000,00 | 65.660.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 473.146.000,00 | 473.146.000,00 | 1.127.000.000,00 | 653.854.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 473.146.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 893.894.268,00 | 897.705.492,00 | 1.004.850.732,00 | 110.956.464,00 | | | - | -<br>- | KDH dan WKDH | | 891.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/ Bulan | 2 Orang/ Bulan | 178.894.268,00 | 182.705.492,00 | 229.850.732,00 | 50.956.464,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 165.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 165.000.000,00 | 60.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 16.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/ Bulan | 2 Orang/ Bulan | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 600.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | *Rasio pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH, WKDH dan Setda* | | | | 100 % | 100 % | 886.428.795,00 | 861.388.765,00 | 831.708.392,00 | -54.720.403,00 | | | - | -<br>- | Kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah, KDH & WKDH | | 903.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 477.816.895,00 | 452.776.865,00 | 452.237.192,00 | -25.579.703,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 480.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 9 Paket | 168.611.900,00 | 168.611.900,00 | 139.471.200,00 | -29.140.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 173.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BAGIAN ORGANISASI** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan administrasi umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **34.624.989.740,00** | **35.176.614.326,00** | **38.926.008.007,00** | **2.426.251.915,00** | | | | | | | **37.051.241.655,00** | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 3.742.372.208,00 | 3.758.138.700,00 | 4.177.591.188,00 | 435.218.980,00 | | | - | -<br>- | Administrasi Umum Bagian Organisasi | | 4.218.759.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 6.391.000,00 | 6.391.000,00 | 6.391.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.715.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.333.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.772.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.192.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 29.386.000,00 | 29.386.000,00 | 14.096.000,00 | -15.290.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 51.897.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.938.632.400,00 | 1.948.632.400,00 | 3.100.566.400,00 | 1.161.934.000,00 | | | - | -<br>- | Peralatan Bagian Organisasi | | 2.173.274.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.600.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel* | | | | 100 % | 100 % | 458.012.000,00 | 494.529.600,00 | 306.691.900,00 | -151.320.100,00 | | | - | -<br>- | Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang | | 673.530.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 118.203.000,00 | 118.203.000,00 | 68.132.000,00 | -50.071.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 244.575.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 87.908.000,00 | 87.908.000,00 | 38.263.000,00 | -49.645.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 147.136.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 251.901.000,00 | 288.418.600,00 | 200.296.900,00 | -51.604.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 281.819.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **40.570.167.100,00** | **41.086.182.501,00** | **43.790.828.626,00** | **3.220.661.526,00** | | | | | | | **44.994.919.485,00** | |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan administrasi umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **34.624.989.740,00** | **35.176.614.326,00** | **38.926.008.007,00** | **2.426.251.915,00** | | | | | | | **37.051.241.655,00** | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi* | | | | 100 % | 100 % | 3.742.372.208,00 | 3.758.138.700,00 | 4.177.591.188,00 | 435.218.980,00 | | | - | -<br>- | Administrasi Umum Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan | | 4.218.759.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.690.000,00 | 3.690.000,00 | 3.690.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.031.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.388.600,00 | 5.388.600,00 | 4.037.600,00 | -1.351.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.500.300,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.740.000,00 | 39.740.000,00 | 39.740.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 56.660.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 600.000,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | -150.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.300.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 47.900.000,00 | 47.900.000,00 | 12.290.000,00 | -35.610.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 89.536.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 321.219.100,00 | 1.541.345.900,00 | 1.826.628.600,00 | 1.505.409.500,00 | | | - | -<br>- | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | 168.262.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 2 Unit | 26.194.400,00 | 26.321.200,00 | 34.321.200,00 | 8.126.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.938.632.400,00 | 1.948.632.400,00 | 3.100.566.400,00 | 1.161.934.000,00 | | | - | -<br>- | Peralatan dan Mebel Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | 2.173.274.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 11.364.000,00 | 11.364.000,00 | 11.364.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 20.485.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | *Tingkat Kepuasan Pimpinan* | | | | 100 % | 100 % | 1.171.927.650,00 | 1.475.777.459,00 | 1.454.223.236,00 | 282.295.586,00 | | | - | -<br>- | Pimpinan Daerah | | 1.609.285.155,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 331.409.000,00 | 431.409.000,00 | 158.226.650,00 | -173.182.350,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 417.633.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 569.362.410,00 | 773.212.219,00 | 911.672.146,00 | 342.309.736,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 818.621.955,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 271.156.240,00 | 271.156.240,00 | 384.324.440,00 | 113.168.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 373.029.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | | | | | **31.307.000.729,00** | **53.338.121.120,00** | **41.852.282.980,00** | **10.545.282.251,00** | | | | | | | **54.039.259.512,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **31.307.000.729,00** | **53.338.121.120,00** | **41.852.282.980,00** | **10.545.282.251,00** | | | | | | | **54.039.259.512,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **31.307.000.729,00** | **53.338.121.120,00** | **41.852.282.980,00** | **10.545.282.251,00** | | | | | | | **54.039.259.512,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi** | | | | **-** | **100,00 %** | **25.918.707.729,00** | **43.330.219.520,00** | **36.048.074.090,00** | **19.133.141.783,00** | | | | | | | **45.051.849.512,00** | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang Tersusun Tepat Waktu* | | | | - | 100 % | 19.466.000,00 | 19.466.000,00 | 14.510.500,00 | -4.955.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 19.687.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.298.000,00 | 5.298.000,00 | 3.953.000,00 | -1.345.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 4.450.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.328.000,00 | 2.328.000,00 | 1.749.400,00 | -578.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 2.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 | 2.074.900,00 | -820.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 2.990.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.597.000,00 | 2.597.000,00 | 1.918.000,00 | -679.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 2.797.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.927.000,00 | 1.927.000,00 | 1.468.200,00 | -458.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 2.200.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 4.421.000,00 | 4.421.000,00 | 3.347.000,00 | -1.074.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 4.750.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana* | | | | - | 100 % | 3.541.817.173,00 | 3.970.686.446,00 | 3.969.803.623,00 | 427.986.450,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 3.652.771.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 22 Orang/ bulan | 25 Orang/ bulan | 3.412.899.593,00 | 3.847.802.877,00 | 3.861.264.363,00 | 448.364.770,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 3.501.921.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 894.300,00 | 894.300,00 | 894.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 950.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 13 Laporan | 128.023.280,00 | 121.989.269,00 | 107.644.960,00 | -20.378.320,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 149.900.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana* | | | | - | 100 Satuan | 7.372.000,00 | 7.372.000,00 | 5.815.000,00 | -1.557.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 7.570.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 7.372.000,00 | 7.372.000,00 | 5.815.000,00 | -1.557.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.570.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana* | | | | - | 100 % | 155.513.000,00 | 224.077.000,00 | 115.423.750,00 | -40.089.250,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 232.329.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 5.513.000,00 | 5.513.000,00 | 4.424.750,00 | -1.088.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 5.769.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 16 Orang | 16 Orang | 150.000.000,00 | 218.564.000,00 | 110.999.000,00 | -39.001.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 226.560.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana* | | | | - | 100 % | 1.496.417.400,00 | 3.390.115.200,00 | 1.991.072.000,00 | 494.654.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 4.794.090.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 21.113.000,00 | 21.113.000,00 | 26.154.000,00 | 5.041.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 20.985.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 185.324.000,00 | 227.771.300,00 | 279.964.000,00 | 94.640.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 187.257.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 6.024.400,00 | 6.024.400,00 | 9.951.500,00 | 3.927.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.350.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 50.836.000,00 | 53.260.500,00 | 53.260.500,00 | 2.424.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 57.860.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 22.372.000,00 | 22.372.000,00 | 12.456.500,00 | -9.915.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 22.975.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 8.400.000,00 | 1.200.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 7.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 74.424.000,00 | 74.424.000,00 | 74.424.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 75.965.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 124.490.000,00 | 124.490.000,00 | 93.367.500,00 | -31.122.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 159.550.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 999.576.000,00 | 2.848.402.000,00 | 1.429.300.500,00 | 429.724.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.250.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.058.000,00 | 5.058.000,00 | 3.793.500,00 | -1.264.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.648.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Terpenuhi* | | | | - | 100 Satuan | 33.858.200,00 | 2.166.923.486,00 | 2.227.211.586,00 | 2.193.353.386,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 136.600.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 33 Unit | 3.858.200,00 | 583.791.700,00 | 632.875.100,00 | 629.016.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 11.600.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 23 Unit | 30.000.000,00 | 1.583.131.786,00 | 1.594.336.486,00 | 1.564.336.486,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 125.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia* | | | | - | 100 % | 849.255.616,00 | 791.926.183,00 | 980.741.651,00 | 131.486.035,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.007.075.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.663.000,00 | 6.663.000,00 | 5.549.575,00 | -1.113.425,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.580.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 240.915.816,00 | 240.915.816,00 | 240.915.816,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 245.750.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 601.676.800,00 | 544.347.367,00 | 734.276.260,00 | 132.599.460,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 756.745.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi* | | | | - | 100 % | 599.149.650,00 | 3.102.061.000,00 | 2.838.083.050,00 | 2.238.933.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 625.646.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 220.227.250,00 | 225.423.000,00 | 180.056.750,00 | -40.170.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 229.389.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 16 Unit | 17 Unit | 117.016.300,00 | 132.356.000,00 | 111.997.500,00 | -5.018.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 125.832.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 8.600.000,00 | 2.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.800.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 62 Unit | 55 Unit | 83.838.100,00 | 81.410.900,00 | 81.410.900,00 | -2.427.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 77.945.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 171.468.000,00 | 2.656.271.100,00 | 2.456.017.900,00 | 2.284.549.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 185.680.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Terpenuhi* | | | | - | 100 % | 17.610.613.790,00 | 17.633.113.790,00 | 16.874.446.790,00 | -736.167.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | 16.508.941.512,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 25 Orang/ bulan | 25 Orang/ bulan | 17.265.674.790,00 | 17.265.674.790,00 | 16.506.658.790,00 | -759.016.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 16.130.966.512,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 304.939.000,00 | 304.939.000,00 | 305.288.000,00 | 349.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 315.475.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 40.000.000,00 | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 22.500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 62.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | *Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi* | | | | - | 100 % | 1.605.244.900,00 | 12.024.478.415,00 | 7.030.966.140,00 | 5.425.721.240,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Layanan Administrasi DPRD | | 18.067.140.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 104.825.000,00 | 104.825.000,00 | 102.332.700,00 | -2.492.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 112.790.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.216.019.900,00 | 11.635.253.415,00 | 6.598.633.440,00 | 5.382.613.540,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 17.656.850.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 284.400.000,00 | 284.400.000,00 | 330.000.000,00 | 45.600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 297.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana** | | | | **-** | **100,00 %** | **5.388.293.000,00** | **10.007.901.600,00** | **5.804.208.890,00** | **3.599.117.000,00** | | | | | | | **8.987.410.000,00** | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Terfasilitasi* | | | | - | 100 % | 961.166.500,00 | 2.884.801.000,00 | 255.304.600,00 | -705.861.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | 2.011.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 5 Dokumen | 8 Dokumen | 203.875.000,00 | 203.875.000,00 | 17.825.400,00 | -186.049.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 206.500.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 7 Dokumen | 8 Dokumen | 663.877.500,00 | 2.587.512.000,00 | 144.920.800,00 | -518.956.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.711.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan* | | | | 1 0 | 1 Dokumen | 93.414.000,00 | 93.414.000,00 | 92.558.400,00 | -855.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 94.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Persentase Pembahasan kebijakan Anggaran yang Terfasilitasi* | | | | - | 100 % | 98.421.000,00 | 98.421.000,00 | 66.559.215,00 | -31.861.785,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | 100.175.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.103.000,00 | 27.103.000,00 | 17.601.000,00 | -9.502.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 27.650.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.200.000,00 | 27.200.000,00 | 17.259.600,00 | -9.940.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 27.600.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.746.000,00 | 13.746.000,00 | 9.254.975,00 | -4.491.025,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 14.175.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.773.000,00 | 13.773.000,00 | 10.225.500,00 | -3.547.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 13.950.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.599.000,00 | 16.599.000,00 | 12.218.140,00 | -4.380.860,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 16.800.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terfasilitasi* | | | | - | 100 % | 396.846.000,00 | 396.846.000,00 | 387.199.775,00 | -9.646.225,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | 398.418.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 96.932.000,00 | 96.932.000,00 | 95.788.075,00 | -1.143.925,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 97.275.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 96.932.000,00 | 96.932.000,00 | 95.788.075,00 | -1.143.925,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 97.275.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 96.932.000,00 | 96.932.000,00 | 95.788.075,00 | -1.143.925,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 97.275.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.118.000,00 | 9.118.000,00 | 4.038.100,00 | -5.079.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.318.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 96.932.000,00 | 96.932.000,00 | 95.797.450,00 | -1.134.550,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 97.275.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terfasilitasi Pelaksanaannya* | | | | - | 100 % | 2.220.802.000,00 | 3.788.855.000,00 | 3.270.846.200,00 | 1.050.044.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Peningkatan Kapasitas DPRD | | 3.487.415.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.188.970.000,00 | 2.054.071.000,00 | 2.052.890.250,00 | 863.920.250,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.837.950.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 57 Orang | 57 Orang | 258.875.000,00 | 256.701.000,00 | 234.415.900,00 | -24.459.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 275.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 268.761.000,00 | 268.761.000,00 | 245.550.300,00 | -23.210.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 279.860.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.722.000,00 | 6.722.000,00 | 5.007.900,00 | -1.714.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.870.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 497.474.000,00 | 1.202.600.000,00 | 732.981.850,00 | 235.507.850,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.087.735.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Persentase Usulan Masyarakat yang terhimpun* | | | | - | 100 % | 1.098.085.500,00 | 1.045.002.600,00 | 908.972.100,00 | -189.113.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | 1.223.652.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 409.832.500,00 | 356.749.600,00 | 227.504.700,00 | -182.327.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 457.965.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 688.253.000,00 | 688.253.000,00 | 681.467.400,00 | -6.785.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 765.687.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | *Persentase Tugas DPRD yang Terfasilitasi* | | | | - | 100 % | 612.972.000,00 | 1.793.976.000,00 | 915.327.000,00 | 302.355.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Fasilitasi Tugas DPRD | | 1.766.250.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 607.140.000,00 | 1.788.144.000,00 | 912.633.800,00 | 305.493.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.758.670.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.832.000,00 | 5.832.000,00 | 2.693.200,00 | -3.138.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 7.580.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH** | | | | | | | **9.526.367.877,00** | **9.561.516.393,00** | **9.913.029.828,00** | **386.661.951,00** | | | | | | | **10.035.754.352,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **9.526.367.877,00** | **9.561.516.393,00** | **9.913.029.828,00** | **386.661.951,00** | | | | | | | **10.035.754.352,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | | **8.745.974.677,00** | **8.811.380.947,00** | **9.134.524.048,00** | **388.549.371,00** | | | | | | | **9.300.754.352,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas** | | | | **85,70 %** | **100 %** | **7.481.154.477,00** | **7.504.532.625,00** | **8.020.545.148,00** | **924.994.075,00** | | | | | | | **8.406.148.552,00** | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD* | | | | 100 % | 100 % | 5.916.800,00 | 6.182.200,00 | 4.376.700,00 | -1.540.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Internal OPD | | 9.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.459.100,00 | 2.724.500,00 | 2.116.800,00 | -342.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 356.700,00 | 356.700,00 | 211.800,00 | -144.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 310.400,00 | 310.400,00 | 211.800,00 | -98.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 502.300,00 | 502.300,00 | 502.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 425.700,00 | 425.700,00 | 302.800,00 | -122.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 1.862.600,00 | 1.862.600,00 | 1.031.200,00 | -831.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.700.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan* | | | | 98 % | 100 % | 6.616.807.200,00 | 6.594.602.564,00 | 6.569.327.311,00 | -47.479.889,00 | | | - | -<br>- | Internal OPD | | 7.042.648.552,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 38 Orang/ bulan | 38 Orang/ bulan | 6.573.008.100,00 | 6.553.325.341,00 | 6.526.909.771,00 | -46.098.329,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 7.000.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 41.282.100,00 | 39.473.223,00 | 40.613.540,00 | -668.560,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.131.552,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.274.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.243.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | -713.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.243.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Cakupan laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.764.200,00 | -1.235.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Internal OPD | | 6.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.764.200,00 | -1.235.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 6.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Cakupan laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 159.540.100,00 | 154.040.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 6.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 4.944.200,00 | -555.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | - | 220 Orang | 0,00 | 0,00 | 154.595.900,00 | 154.595.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah* | | | | - | 100 % | 196.047.400,00 | 257.677.600,00 | 169.128.300,00 | -26.919.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 313.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 28 Paket | 28 Paket | 12.341.800,00 | 12.341.800,00 | 12.341.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 49 Paket | 49 Paket | 36.287.800,00 | 36.287.800,00 | 36.287.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 9.908.200,00 | 9.908.200,00 | 7.491.200,00 | -2.417.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 14.799.500,00 | 14.799.500,00 | 14.799.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 4.320.000,00 | -1.440.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 78 Laporan | 78 Laporan | 106.326.000,00 | 167.666.000,00 | 84.514.000,00 | -21.812.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.984.100,00 | 5.274.300,00 | 3.734.000,00 | -1.250.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 296.804.100,00 | 296.804.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 17 Unit | 0,00 | 0,00 | 296.804.100,00 | 296.804.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 287.583.677,00 | 271.768.661,00 | 304.069.837,00 | 16.486.160,00 | | | - | -<br>- | - | | 423.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.987.400,00 | 1.987.400,00 | 1.552.200,00 | -435.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 119.971.477,00 | 119.971.477,00 | 119.971.477,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 165.624.800,00 | 149.809.784,00 | 182.546.160,00 | 16.921.360,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 270.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 364.299.400,00 | 363.801.600,00 | 513.534.600,00 | 149.235.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 605.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 186.711.000,00 | 186.354.000,00 | 225.796.000,00 | 39.085.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 67.043.000,00 | 66.938.000,00 | 100.204.000,00 | 33.161.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 75.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 54.990.400,00 | 54.954.600,00 | 54.954.600,00 | -35.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 65.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 52.555.000,00 | 52.555.000,00 | 39.580.000,00 | -12.975.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas** | | | | **68,49 %** | **68,49 %** | **597.551.200,00** | **595.544.323,00** | **566.726.740,00** | **-107.551.200,00** | | | | | | | **490.000.000,00** | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Persentase elemen pembangunan yang terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan* | | | | 85 % | 85 % | 540.818.800,00 | 538.811.923,00 | 498.295.240,00 | -42.523.560,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD Kota Magelang | | 415.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | | | | 4 Berita Acara | 2 Berita Acara | 30.106.900,00 | 30.106.900,00 | 26.832.600,00 | -3.274.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 5.740.000,00 | -1.760.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 94.162.000,00 | 94.162.000,00 | 82.400.700,00 | -11.761.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 115.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 409.049.900,00 | 407.043.023,00 | 383.321.940,00 | -25.727.960,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 240.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase ketersediaan data dukung perencanaan* | | | | 96 % | 96 % | 49.999.300,00 | 49.999.300,00 | 52.751.700,00 | 2.752.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Pengelola Satu Data dan Masyarakat | | 64.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 49.999.300,00 | 49.999.300,00 | 52.751.700,00 | 2.752.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 64.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev* | | | | 80 % | 80 % | 6.733.100,00 | 6.733.100,00 | 15.679.800,00 | 8.946.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD Kota Magelang | | 11.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.733.100,00 | 6.733.100,00 | 15.679.800,00 | 8.946.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 11.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | | | | **100 %** | **100 %** | **667.269.000,00** | **711.303.999,00** | **547.252.160,00** | **-262.663.200,00** | | | | | | | **404.605.800,00** | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* | | | | 100 % | 100 % | 415.108.100,00 | 413.131.223,00 | 333.860.540,00 | -81.247.560,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | OPD Kota Magelang | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 31.257.000,00 | 31.257.000,00 | 23.442.700,00 | -7.814.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 73.424.600,00 | 71.447.723,00 | 60.665.940,00 | -12.758.660,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.915.000,00 | 9.915.000,00 | 7.435.900,00 | -2.479.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 64.599.100,00 | 64.599.100,00 | 48.448.900,00 | -16.150.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 96.587.800,00 | 96.587.800,00 | 56.374.100,00 | -40.213.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 139.324.600,00 | 139.324.600,00 | 137.493.000,00 | -1.831.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | *Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)* | | | | 95 % | 95 % | 137.927.500,00 | 135.916.253,00 | 102.236.580,00 | -35.690.920,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | OPD Kota Magelang | | 211.697.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.869.200,00 | 22.869.200,00 | 13.144.400,00 | -9.724.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 34.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 52.375.400,00 | 50.364.153,00 | 39.638.480,00 | -12.736.920,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 69.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.203.200,00 | 4.203.200,00 | 3.272.500,00 | -930.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 17.023.100,00 | 17.023.100,00 | 12.535.200,00 | -4.487.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 25.782.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.629.500,00 | 35.629.500,00 | 29.464.600,00 | -6.164.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 54.805.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.827.100,00 | 5.827.100,00 | 4.181.400,00 | -1.645.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 10.610.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | *Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan* | | | | 100 % | 100 % | 114.233.400,00 | 162.256.523,00 | 111.155.040,00 | -3.078.360,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | OPD Kota Magelang | | 192.908.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.248.700,00 | 22.248.700,00 | 16.674.000,00 | -5.574.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 32.908.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 86.573.500,00 | 84.596.623,00 | 85.856.640,00 | -716.860,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 105.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 0 Laporan | 1 Laporan | 5.411.200,00 | 55.411.200,00 | 8.624.400,00 | 3.213.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 55.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **780.393.200,00** | **750.135.446,00** | **778.505.780,00** | **-1.887.420,00** | | | | | | | **735.000.000,00** | |
| 1. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Persentase pemanfaatan hasil penelitian** **Persentase pemanfaatan hasil inovasi** | | | | **-** | **25 %** **24 %** | **780.393.200,00** | **750.135.446,00** | **778.505.780,00** | **-45.393.200,00** | | | | | | | **735.000.000,00** | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | *Cakupan dokumen data, riset, dan kebijakan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan* | | | | - | 70 % | 549.031.000,00 | 487.727.000,00 | 426.491.900,00 | -122.539.100,00 | | | - | - - | - | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan* | | | | 6 Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 549.031.000,00 | 487.727.000,00 | 426.491.900,00 | -122.539.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | - - | | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | *Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan* | | | | - | 65 % | 231.362.200,00 | 262.408.446,00 | 352.013.880,00 | 120.651.680,00 | | | - | - - | - | | 435.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 84.340.300,00 | 82.363.423,00 | 92.472.340,00 | 8.132.040,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 215.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 65.688.000,00 | 100.688.000,00 | 153.504.100,00 | 87.816.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | - | - - | | | 115.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 74.333.900,00 | 72.357.023,00 | 75.037.440,00 | 703.540,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 78.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 31.000.000,00 | 24.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 27.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | **24.152.237.256,00** | **41.418.904.450,00** | **24.603.717.875,00** | **451.480.619,00** | | | | | | | **24.498.079.731,45** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **24.152.237.256,00** | **41.418.904.450,00** | **24.603.717.875,00** | **451.480.619,00** | | | | | | | **24.498.079.731,45** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **24.152.237.256,00** | **41.418.904.450,00** | **24.603.717.875,00** | **451.480.619,00** | | | | | | | **24.498.079.731,45** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **12.591.857.907,00** | **13.164.294.417,00** | **15.352.988.868,00** | **-206.142.102,55** | | | | | | | **12.385.715.804,45** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD* | | | | 100 % | 100 % | 28.518.400,00 | 28.518.400,00 | 20.716.800,00 | -7.801.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah Kota Magelang | | 39.944.890,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 7.048.900,00 | 7.048.900,00 | 5.198.800,00 | -1.850.100,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 7.624.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.604.700,00 | 2.604.700,00 | 1.622.000,00 | -982.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.261.218,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.132.900,00 | 3.132.900,00 | 2.303.400,00 | -829.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.953.289,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.901.500,00 | 2.901.500,00 | 2.289.500,00 | -612.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.694.169,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.951.600,00 | 2.951.600,00 | 2.119.700,00 | -831.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.687.224,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 9.878.800,00 | 9.878.800,00 | 7.183.400,00 | -2.695.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 14.724.990,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 11.108.463.050,00 | 11.670.943.425,00 | 13.960.218.776,00 | 2.851.755.726,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah Kota Magelang | | 10.820.809.914,45 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 38 Orang/ bulan | 38 Orang/ bulan | 11.046.586.210,00 | 11.613.020.079,00 | 13.910.051.386,00 | 2.863.465.176,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 10.735.940.952,45 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 10.501.200,00 | 10.501.200,00 | 7.831.700,00 | -2.669.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 18.136.511,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 51.375.640,00 | 47.422.146,00 | 42.335.690,00 | -9.039.950,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 66.732.451,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 1.479.000,00 | 1.479.000,00 | 1.022.700,00 | -456.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah Kota Magelang | | 1.630.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.479.000,00 | 1.479.000,00 | 1.022.700,00 | -456.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.630.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah* | | | | 100,00 % | 100,00 % | 138.301.185,00 | 138.277.285,00 | 152.755.085,00 | 14.453.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah Kota Magelang | | 122.374.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 11 Paket | 4.480.485,00 | 4.480.485,00 | 4.480.485,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.938.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 67 Paket | 67 Paket | 17.060.300,00 | 17.036.400,00 | 17.036.400,00 | -23.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 18.806.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 14 Paket | 14 Paket | 7.165.800,00 | 7.165.800,00 | 5.305.600,00 | -1.860.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 7.882.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 4.620.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 21 Paket | 21 Paket | 4.892.600,00 | 4.892.600,00 | 4.892.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.385.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 7.800.000,00 | -2.600.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 11.954.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 40 Laporan | 40 Laporan | 90.102.000,00 | 90.102.000,00 | 109.040.000,00 | 18.938.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 68.789.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 240.356.100,00 | 240.356.100,00 | 286.941.200,00 | 46.585.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah Kota Magelang | | 268.840.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 28 Unit | 34 Unit | 240.356.100,00 | 240.356.100,00 | 286.941.200,00 | 46.585.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 268.840.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 461.113.932,00 | 471.308.167,00 | 411.600.980,00 | -49.512.952,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah Kota Magelang | | 501.487.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.125.060,00 | 60.125.060,00 | 24.531.420,00 | -35.593.640,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 61.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 320.676.992,00 | 320.676.992,00 | 266.015.360,00 | -54.661.632,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 351.644.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 80.311.880,00 | 90.506.115,00 | 121.054.200,00 | 40.742.320,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 88.343.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 613.626.240,00 | 613.412.040,00 | 519.733.327,00 | -93.892.913,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah Kota Magelang | | 630.630.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 224.295.760,00 | 224.186.560,00 | 172.995.040,00 | -51.300.720,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 246.796.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 97.824.200,00 | 97.719.200,00 | 76.602.900,00 | -21.221.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 139.422.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 36 Unit | 36 Unit | 36.321.937,00 | 36.321.937,00 | 36.769.937,00 | 448.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 39.954.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 192.025.000,00 | 192.025.000,00 | 192.025.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 134.970.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 63.159.343,00 | 63.159.343,00 | 41.340.450,00 | -21.818.893,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 69.488.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran** | | | | **100 %** | **100 %** | **6.623.544.400,00** | **23.116.632.181,00** | **4.295.967.907,00** | **171.044.672,00** | | | | | | | **6.794.589.072,00** | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Presentase Penganggaran sesuai ketentuan* | | | | 98.67 % | 98.67 % | 1.137.669.700,00 | 1.130.605.575,00 | 895.627.165,00 | -242.042.535,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah Kota Magelang | | 782.308.240,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 315.590.400,00 | 315.590.400,00 | 293.419.550,00 | -22.170.850,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 70.719.440,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 76.303.700,00 | 76.303.700,00 | 65.748.250,00 | -10.555.450,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 44.444.070,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 43.432.600,00 | 43.432.600,00 | 32.621.800,00 | -10.810.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 47.775.860,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 23.574.300,00 | 23.574.300,00 | 17.545.500,00 | -6.028.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.931.730,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 7.372.700,00 | 3.069.700,00 | 2.283.400,00 | -5.089.300,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 12.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 7.398.600,00 | 7.398.600,00 | 5.462.200,00 | -1.936.400,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 331.789.100,00 | 309.208.975,00 | 246.588.975,00 | -85.200.125,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 246.498.010,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 255.061.500,00 | 239.412.500,00 | 183.802.675,00 | -71.258.825,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 241.077.650,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 77.146.800,00 | 112.614.800,00 | 48.154.815,00 | -28.991.985,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 84.861.480,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan* | | | | 100 % | 100 % | 230.521.800,00 | 234.627.900,00 | 200.820.800,00 | -29.701.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Pemerintah Kota Magelang | | 249.757.680,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 7.721.000,00 | 7.721.000,00 | 5.615.200,00 | -2.105.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 8.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | | | | 112 Dokumen | 112 Dokumen | 5.979.000,00 | 5.821.100,00 | 4.413.500,00 | -1.565.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 11.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.140.100,00 | 10.140.100,00 | 7.592.100,00 | -2.548.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 11.154.110,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* | | | | 102 Dokumen | 130 Dokumen | 37.548.700,00 | 37.548.700,00 | 22.740.200,00 | -14.808.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 41.303.570,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* | | | | 22 Laporan | 22 Laporan | 56.225.000,00 | 60.489.000,00 | 49.958.100,00 | -6.266.900,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 61.800.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.915.000,00 | 5.915.000,00 | 1.801.900,00 | -4.113.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 6.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 93.093.000,00 | 93.093.000,00 | 76.336.800,00 | -16.756.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 95.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 32.363.000,00 | 18.463.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 14.500.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan* | | | | 100 % | 100 % | 255.352.900,00 | 251.398.706,00 | 211.749.380,00 | -43.603.520,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Pemerintah Kota Magelang | | 262.523.152,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* | | | | 102 Dokumen | 101 Dokumen | 43.194.500,00 | 41.217.623,00 | 42.888.140,00 | -306.360,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 44.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 75.082.200,00 | 73.105.323,00 | 50.693.080,00 | -24.389.120,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 77.334.666,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 57.541.900,00 | 57.541.900,00 | 56.248.900,00 | -1.293.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 59.268.157,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.630.200,00 | 8.030.200,00 | 6.011.000,00 | -6.619.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 13.009.106,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 204 Orang | 204 Orang | 66.904.100,00 | 71.503.660,00 | 55.908.260,00 | -10.995.840,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 68.911.223,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku* | | | | - | 100 % | 5.000.000.000,00 | 21.500.000.000,00 | 2.987.770.562,00 | -2.012.229.438,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah dan Masyarakat Kota Magelang | | 5.500.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000.000,00 | 21.500.000.000,00 | 2.987.770.562,00 | -2.012.229.438,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.500.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Cakupan pengelolaan barang milik daerah** | | | | **89,29 %** | **89,29 %** | **2.477.955.246,00** | **2.412.078.744,00** | **2.385.048.190,00** | **60.235.818,00** | | | | | | | **2.538.191.064,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD* | | | | 80.71 % | 80.71 % | 2.477.955.246,00 | 2.412.078.744,00 | 2.385.048.190,00 | -92.907.056,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pemerintah Kota Magelang | | 2.538.191.064,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 110.461.300,00 | 110.461.300,00 | 105.579.800,00 | -4.881.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 112.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 18.840.900,00 | 18.840.900,00 | 13.793.600,00 | -5.047.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 19.406.127,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 5 Laporan | 190.680.680,00 | 182.773.692,00 | 207.062.660,00 | 16.381.980,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 196.401.100,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 424.590.000,00 | 409.494.000,00 | 88.103.900,00 | -336.486.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 425.000.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 304.411.400,00 | 304.411.400,00 | 341.050.235,00 | 36.638.835,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 313.543.742,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 152.917.700,00 | 152.917.700,00 | 147.704.600,00 | -5.213.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 157.505.231,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.115.888.046,00 | 1.052.268.026,00 | 1.315.973.395,00 | 200.085.349,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 1.149.364.687,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 132.395.820,00 | 153.142.326,00 | 144.840.800,00 | 12.444.980,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 136.367.695,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 27.769.400,00 | 27.769.400,00 | 20.939.200,00 | -6.830.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 28.602.482,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah** | | | | **165,48 %** | **165,48 %** | **2.458.879.703,00** | **2.725.899.108,00** | **2.569.712.910,00** | **320.704.088,00** | | | | | | | **2.779.583.791,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 2.458.879.703,00 | 2.725.899.108,00 | 2.569.712.910,00 | 110.833.207,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Pemerintah Kota Magelang | | 2.779.583.791,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 1.552.177.803,00 | 1.619.198.408,00 | 1.572.427.410,00 | 20.249.607,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 1.925.833.621,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 74.540.200,00 | 74.540.200,00 | 47.476.200,00 | -27.064.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 83.255.130,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | | | | 17 Laporan | 18 Laporan | 275.837.500,00 | 475.837.100,00 | 512.797.900,00 | 236.960.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 126.131.250,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | | | | 1200 Obyek Pajak | 1200 Obyek Pajak | 19.787.900,00 | 19.787.500,00 | 14.837.200,00 | -4.950.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 25.389.000,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | | | | 36000 Dokumen | 36000 Dokumen | 104.388.700,00 | 104.388.500,00 | 96.327.800,00 | -8.060.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 70.788.060,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.878.900,00 | 7.878.900,00 | 5.909.000,00 | -1.969.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 8.272.845,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 227.055.600,00 | 227.055.600,00 | 189.696.900,00 | -37.358.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 347.765.985,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 66.527.400,00 | 66.527.400,00 | 42.056.300,00 | -24.471.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 69.853.770,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 97.258.900,00 | 97.258.700,00 | 69.839.600,00 | -27.419.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 84.224.490,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 33.426.800,00 | 33.426.800,00 | 18.344.600,00 | -15.082.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 38.069.640,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | **28.415.527.906,00** | **10.361.785.141,00** | **9.903.356.066,00** | **-18.512.171.840,00** | | | | | | | **12.179.685.469,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **28.415.527.906,00** | **10.361.785.141,00** | **9.903.356.066,00** | **-18.512.171.840,00** | | | | | | | **12.179.685.469,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **26.235.522.606,00** | **8.181.779.841,00** | **7.749.684.116,00** | **-18.485.838.490,00** | | | | | | | **8.397.189.653,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase capaian pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan capaian kinerja** | | | | **100 %** | **100 %** | **24.451.989.306,00** | **6.399.850.041,00** | **6.319.388.416,00** | **-18.405.243.953,00** | | | | | | | **6.046.745.353,00** | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja* | | | | 100 % | 100 % | 21.026.650,00 | 21.026.650,00 | 16.106.050,00 | -4.920.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD | | 21.027.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | 2.791.700,00 | -698.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.490.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.598.000,00 | 1.598.000,00 | 1.435.700,00 | -162.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.598.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.598.000,00 | 1.598.000,00 | 1.435.700,00 | -162.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.598.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.216.800,00 | 3.216.800,00 | 2.306.500,00 | -910.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.217.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.091.800,00 | 3.091.800,00 | 2.288.700,00 | -803.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.092.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 6.434.050,00 | 6.434.050,00 | 4.249.750,00 | -2.184.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.434.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.598.000,00 | 1.598.000,00 | 1.598.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.598.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 23.286.901.926,00 | 5.780.348.092,00 | 5.762.366.496,00 | -17.524.535.430,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pengelolaan Keuangan SKPD | | 5.534.053.231,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 840 Orang/ bulan | 840 Orang/ bulan | 23.280.723.826,00 | 5.775.119.992,00 | 5.758.052.596,00 | -17.522.671.230,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.527.874.731,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 6.178.100,00 | 5.228.100,00 | 4.313.900,00 | -1.864.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.178.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terwujudnya layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan baik* | | | | - | 100 % | 0,00 | 0,00 | 1.068.400,00 | 1.068.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Administrasi kepegawaian OPD | | 1.068.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.068.400,00 | 1.068.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.068.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan penyediaan administrasi umum perkantoran* | | | | 100 % | 100 % | 120.278.400,00 | 120.278.400,00 | 96.717.800,00 | -23.560.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pengelolaan administrasi umum perkantoran | | 178.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 1.032.200,00 | 1.032.200,00 | 1.032.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 14.309.000,00 | 14.309.000,00 | 14.309.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 16.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 10.584.900,00 | 10.584.900,00 | 7.311.800,00 | -3.273.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 4.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.423.500,00 | 9.423.500,00 | 9.423.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 15.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | -500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 4.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 73.178.000,00 | 73.178.000,00 | 55.176.000,00 | -18.002.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 115.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.750.800,00 | 6.750.800,00 | 4.965.300,00 | -1.785.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 6.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan penyediaan barang sarana dan prasarana milik daerah* | | | | 100 % | 100 % | 181.252.000,00 | 181.252.000,00 | 181.252.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Penyediaan barang milik daerah OPD | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 15 Unit | 173.052.000,00 | 173.052.000,00 | 173.052.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 633.839.000,00 | 86.753.569,00 | 86.120.760,00 | -547.718.240,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Penyediaan jasa penunjang BKPSDM | | 103.904.892,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.999.900,00 | 8.949.900,00 | 6.128.800,00 | -1.871.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 8.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 23.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 12 Laporan | 602.339.100,00 | 54.303.669,00 | 56.491.960,00 | -545.847.140,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 72.404.892,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 208.691.330,00 | 210.191.330,00 | 175.756.910,00 | -32.934.420,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pengelolaan barang milik daerah OPD | | 208.691.330,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 128.219.560,00 | 128.219.560,00 | 101.114.670,00 | -27.104.890,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 128.219.560,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 35.518.120,00 | 37.018.120,00 | 29.688.590,00 | -5.829.530,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 35.518.120,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 44 Unit | 44 Unit | 39.953.650,00 | 39.953.650,00 | 39.953.650,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 39.953.650,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Persentase rata-rata capaian target Aspek Sistem Merit** | | | | **95 %** | **95 %** | **1.783.533.300,00** | **1.781.929.800,00** | **1.430.295.700,00** | **566.911.000,00** | | | | | | | **2.350.444.300,00** | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *Nilai aspek pengadaan ASN Nilai aspek perencanaan kebutuhan*<br>*Nilai aspek perlindungan dan pelayanan*<br>*Nilai aspek sistem informasi* | | | | 12 Skor<br>18 Skor<br>40 Skor | 13 Skor<br>20 Skor<br>40 Skor | 1.052.999.600,00 | 1.051.396.100,00 | 762.497.700,00 | -290.501.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pegawai ASN Kota Magelang | | 1.242.268.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.937.000,00 | 30.937.000,00 | 11.123.800,00 | -19.813.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.453.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 610.239.500,00 | 608.636.000,00 | 512.249.400,00 | -97.990.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 682.445.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | | | | 250 Dokumen | 12 Dokumen | 267.677.600,00 | 267.677.600,00 | 146.410.400,00 | -121.267.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 387.079.900,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 106.481.500,00 | 106.481.500,00 | 82.396.700,00 | -24.084.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 101.220.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 18.793.000,00 | 18.793.000,00 | 9.314.000,00 | -9.479.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 21.514.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.871.000,00 | 18.871.000,00 | 1.003.400,00 | -17.867.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 24.555.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | *Nilai aspek promosi dan mutasi ASN* | | | | 32,5 Skor | 34 Skor | 136.912.700,00 | 136.912.700,00 | 146.088.000,00 | 9.175.300,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Pegawai ASN Kota Magelang | | 243.693.600,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 13.931.000,00 | 13.931.000,00 | 3.141.200,00 | -10.789.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 20.157.300,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 18.002.100,00 | 18.002.100,00 | 8.216.000,00 | -9.786.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 45.966.300,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 104.979.600,00 | 104.979.600,00 | 134.730.800,00 | 29.751.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 177.570.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Nilai aspek pengembangan karier* | | | | 87,5 Skor | 90 Skor | 275.510.700,00 | 275.510.700,00 | 240.588.100,00 | -34.922.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Pegawai ASN Kota Magelang | | 444.401.200,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 227.851.700,00 | 227.851.700,00 | 199.126.200,00 | -28.725.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 396.658.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.139.300,00 | 14.139.300,00 | 8.262.200,00 | -5.877.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 14.223.300,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 33.519.700,00 | 33.519.700,00 | 33.199.700,00 | -320.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 33.519.900,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | *Nilai Aspek Manajemen Kinerja*<br>*Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin*<br>*Nilai aspek perlindungan dan pelayanan* | | | | 12 Skor<br>40 Skor<br>67,5 Skor | 13 Skor<br>40 Skor<br>69 Skor | 318.110.300,00 | 318.110.300,00 | 281.121.900,00 | -36.988.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pegawai ASN Kota Magelang | | 420.081.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 348 Dokumen | 348 Dokumen | 30.626.200,00 | 30.626.200,00 | 17.731.600,00 | -12.894.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 31.192.700,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 72.483.900,00 | 72.483.900,00 | 63.881.100,00 | -8.602.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 120.382.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | | | | 356 Orang | 356 Orang | 171.233.900,00 | 171.233.900,00 | 165.435.900,00 | -5.798.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 224.734.200,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 5.929.300,00 | 5.929.300,00 | 5.431.700,00 | -497.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.930.900,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 10.231.100,00 | 10.231.100,00 | 8.527.000,00 | -1.704.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 10.233.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 9.552.300,00 | 9.552.300,00 | 5.106.800,00 | -4.445.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.554.100,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 6.816.100,00 | 6.816.100,00 | 5.267.900,00 | -1.548.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.816.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.03.02.2.04.0010 | Evaluasi Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN* | | | | 348 Laporan | 348 Laporan | 11.237.500,00 | 11.237.500,00 | 9.739.900,00 | -1.497.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 11.237.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **2.180.005.300,00** | **2.180.005.300,00** | **2.153.671.950,00** | **-26.333.350,00** | | | | | | | **3.782.495.816,00** | |
| 1. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya** | | | | **35 %** | **35 %** | **2.180.005.300,00** | **2.180.005.300,00** | **2.153.671.950,00** | **1.602.490.516,00** | | | | | | | **3.782.495.816,00** | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | *Persentase pegawai ASN yang mengikuti pelatihan teknis* | | | | 17 Persen | 17 Persen | 611.105.500,00 | 611.105.500,00 | 702.756.250,00 | 91.650.750,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pegawai ASN Kota Magelang | | 1.116.137.916,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi* | | | | 450 Orang | 550 Orang | 611.105.500,00 | 611.105.500,00 | 702.756.250,00 | 91.650.750,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.116.137.916,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | *Persentase pegawai ASN yang mengikuti pelatihan manajerial atau fungsional* | | | | 18 Persen | 18 Persen | 1.568.899.800,00 | 1.568.899.800,00 | 1.450.915.700,00 | -117.984.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Pegawai ASN Kota Magelang | | 2.666.357.900,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.568.899.800,00 | 1.568.899.800,00 | 1.450.915.700,00 | -117.984.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.666.357.900,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **14.436.756.946,00** | **17.774.539.930,00** | **16.282.352.465,00** | **1.845.595.519,00** | | | | | | | **9.953.710.800,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **14.436.756.946,00** | **17.774.539.930,00** | **16.282.352.465,00** | **1.845.595.519,00** | | | | | | | **9.953.710.800,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **14.436.756.946,00** | **17.774.539.930,00** | **16.282.352.465,00** | **1.845.595.519,00** | | | | | | | **9.953.710.800,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Penunjang Kinerja OPD** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **10.437.700.946,00** | **12.453.822.630,00** | **11.842.467.380,00** | **-2.288.150.946,00** | | | | | | | **8.149.550.000,00** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja* | | | | 100 % | 100 % | 74.260.400,00 | 74.260.400,00 | 47.574.300,00 | -26.686.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 73.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 29.919.900,00 | 29.919.900,00 | 19.300.300,00 | -10.619.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.999.800,00 | 1.999.800,00 | 1.248.100,00 | -751.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.999.800,00 | 1.999.800,00 | 1.248.100,00 | -751.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.609.400,00 | -390.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.999.800,00 | 1.999.800,00 | 1.625.400,00 | -374.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 36.341.100,00 | 36.341.100,00 | 22.543.000,00 | -13.798.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 35.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan Pemerintah Daerah sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 8.265.973.677,00 | 9.208.385.570,00 | 8.682.898.994,00 | 416.925.317,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 7.210.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 32 Orang/ bulan | 32 Orang/ bulan | 8.256.226.477,00 | 9.198.638.370,00 | 8.675.090.494,00 | 418.864.017,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 7.200.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.677.700,00 | 5.677.700,00 | 4.129.600,00 | -1.548.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 6.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.069.800,00 | 2.069.800,00 | 2.069.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 2.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.999.700,00 | 1.999.700,00 | 1.609.100,00 | -390.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 2.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *persentase pemenuhan laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 15.713.900,00 | 10.230.400,00 | 6.795.400,00 | -8.918.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 5.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 34 Paket | 34 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.713.900,00 | 10.230.400,00 | 6.795.400,00 | -8.918.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 5.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 232.407.000,00 | 345.591.000,00 | 356.928.800,00 | 124.521.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 235.550.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 9.753.100,00 | 9.753.100,00 | 5.676.100,00 | -4.077.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 9.750.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 15.799.100,00 | 15.799.100,00 | 19.899.800,00 | 4.100.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | | | 15.800.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 17.999.900,00 | 18.040.900,00 | 13.132.700,00 | -4.867.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 19.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 14.996.900,00 | 14.996.900,00 | 25.219.200,00 | 10.222.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 17.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.950.000,00 | 30.137.000,00 | 36.137.000,00 | 22.187.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 14.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 159.908.000,00 | 256.864.000,00 | 256.864.000,00 | 96.956.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 160.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | | 1.306.627.700,00 | 2.259.958.800,00 | 2.259.958.800,00 | 953.331.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 85.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 295.422.700,00 | 295.422.700,00 | 295.422.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 1 Unit | 0,00 | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 267.004.800,00 | 267.004.800,00 | 267.004.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 50.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 66 Unit | 62 Unit | 744.200.200,00 | 737.531.300,00 | 737.531.300,00 | -6.668.900,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 35.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 254.972.989,00 | 267.665.280,00 | 260.048.006,00 | 5.075.017,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 255.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 19.314.900,00 | 19.314.900,00 | 17.415.200,00 | -1.899.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 12.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 161.369.600,00 | 168.038.500,00 | 145.789.446,00 | -15.580.154,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 170.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 74.288.489,00 | 80.311.880,00 | 96.843.360,00 | 22.554.871,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 73.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 % | 100 % | 287.745.280,00 | 287.731.180,00 | 228.263.080,00 | -59.482.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 286.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 119.696.400,00 | 119.693.400,00 | 91.970.050,00 | -27.726.350,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 120.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 131.640.100,00 | 131.629.000,00 | 99.884.250,00 | -31.755.850,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 130.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 32 Unit | 32 Unit | 22.990.000,00 | 22.990.000,00 | 22.990.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 22.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 9.668.780,00 | 9.668.780,00 | 9.668.780,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 11.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Persentase penyelenggaraan pengawasan** | | | | **96,00 %** | **96,00 %** | **844.248.700,00** | **1.026.659.400,00** | **674.137.350,00** | **-331.087.900,00** | | | | | | | **513.160.800,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan* | | | | 96 % | 96 % | 667.716.700,00 | 850.127.400,00 | 554.651.150,00 | -113.065.550,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 357.693.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 34 Laporan | 11 Laporan | 158.252.800,00 | 169.472.800,00 | 101.137.600,00 | -57.115.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 158.693.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 7 Laporan | 15 Laporan | 91.845.700,00 | 102.965.700,00 | 72.640.400,00 | -19.205.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 20.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 25 Laporan | 35 Laporan | 46.605.400,00 | 205.415.100,00 | 144.671.450,00 | 98.066.050,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 43.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 29 Laporan | 29 Laporan | 69.931.700,00 | 71.192.700,00 | 44.053.900,00 | -25.877.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 46.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 301.081.100,00 | 301.081.100,00 | 192.147.800,00 | -108.933.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 90.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | *persentase laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tepat waktu* | | | | 95 % | 95 % | 176.532.000,00 | 176.532.000,00 | 119.486.200,00 | -57.045.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 155.467.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 176.532.000,00 | 176.532.000,00 | 119.486.200,00 | -57.045.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 155.467.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi** | | | | **85,00 %** | **85,00 %** | **3.154.807.300,00** | **4.294.057.900,00** | **3.765.747.735,00** | **-1.863.807.300,00** | | | | | | | **1.291.000.000,00** | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | *Persentase kebijakan teknis yang dirumuskan tepat waktu* | | | | 100 persen | 100 persen | 37.711.700,00 | 37.711.700,00 | 27.032.300,00 | -10.679.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 5.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 2 Rekomendasi | 2 Rekomendasi | 37.711.700,00 | 37.711.700,00 | 27.032.300,00 | -10.679.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | *Persentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIP nya meningkat*<br>*Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan Pemerintah Daerah sesuai aturan*<br>*Persentase Penyelenggaraan Pengawasan* | | | | 100 %<br>16.67 %<br>96 % | 100 %<br>16.67 %<br>96 % | 3.117.095.600,00 | 4.256.346.200,00 | 3.738.715.435,00 | 621.619.835,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Inspektorat Daerah Kota Magelang | | 1.286.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 11 perangkat daerah | 28 perangkat daerah | 40.758.400,00 | 80.726.400,00 | 52.206.700,00 | 11.448.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 36.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 30 perangkat daerah | 28 perangkat daerah | 878.726.600,00 | 1.044.875.700,00 | 851.583.275,00 | -27.143.325,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 780.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 26 Kegiatan | 26 Kegiatan | 2.111.168.000,00 | 3.044.301.500,00 | 2.752.896.660,00 | 641.728.660,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 370.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 30 perangkat daerah | 28 perangkat daerah | 86.442.600,00 | 86.442.600,00 | 82.028.800,00 | -4.413.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | **KECAMATAN MAGELANG SELATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.545.118.843,00** | **12.831.375.411,00** | **13.043.668.460,00** | **41.851.047,00** | | | | | | | **11.586.969.890,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja* | | | | - | 100 % | 44.708.200,00 | 44.108.800,00 | 32.072.900,00 | -12.635.300,00 | | | - | - - | - | | 51.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 13.500.000,00 | 15.590.600,00 | 11.963.600,00 | -1.536.400,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.740.000,00 | 4.740.000,00 | 4.126.200,00 | -613.800,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.740.000,00 | 4.740.000,00 | 4.126.200,00 | -613.800,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.992.000,00 | 2.647.000,00 | 2.647.000,00 | -1.345.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.992.000,00 | 2.647.000,00 | 2.647.000,00 | -1.345.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.744.200,00 | 13.744.200,00 | 6.562.900,00 | -7.181.300,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan* | | | | - | 100 % | 8.769.257.003,00 | 10.175.409.334,00 | 10.195.710.399,00 | 1.426.453.396,00 | | | - | - - | - | | 8.324.800.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 61 Orang/ bulan | 61 Orang/ bulan | 8.742.792.003,00 | 10.148.944.334,00 | 10.173.831.099,00 | 1.431.039.096,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - - | | | 8.294.800.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 26.465.000,00 | 26.465.000,00 | 21.879.300,00 | -4.585.700,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan layanan kebutuhan kantor* | | | | - | 100 % | 297.689.485,00 | 357.059.150,00 | 292.521.083,00 | -5.168.402,00 | | | - | - - | - | | 370.057.340,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 2.018.900,00 | 2.018.900,00 | 2.018.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.443.700,00 | 2.443.700,00 | 2.443.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 8.211.600,00 | 8.207.400,00 | 8.207.400,00 | -4.200,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 2.774.600,00 | 2.774.600,00 | 2.080.600,00 | -694.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.560.000,00 | 4.560.000,00 | 3.400.000,00 | -1.160.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 23.862.000,00 | 36.062.000,00 | 21.256.000,00 | -2.606.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 1.659.185.205,00 | 1.502.366.017,00 | 1.814.703.818,00 | 155.518.613,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Masyarakat Kecmatan | | 1.793.780.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.946.800,00 | -553.200,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 61.792.000,00 | 50.760.000,00 | 50.760.000,00 | -11.032.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 200.779.700,00 | 181.012.230,00 | 242.108.400,00 | 41.328.700,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 240.935.520,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 774.278.950,00 | 752.432.110,00 | 643.634.860,00 | -130.644.090,00 | | | - | -<br>- | - | | 982.306.250,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 62.530.000,00 | 62.458.000,00 | 47.481.000,00 | -15.049.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 45.990.000,00 | 45.980.000,00 | 34.999.500,00 | -10.990.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 21 Unit | 21 Unit | 20.010.000,00 | 20.010.000,00 | 20.010.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | | | | **100 %** | **100 %** | **184.416.700,00** | **230.480.700,00** | **223.410.600,00** | **231.583.300,00** | | | | | | | **416.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan* | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 4.999.900,00 | 4.999.900,00 | 24.591.000,00 | 19.591.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.999.900,00 | 4.999.900,00 | 24.591.000,00 | 19.591.100,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah kegiatan yang dilaksanakan* | | | | - | 4 kegiatan | 104.080.600,00 | 150.144.600,00 | 132.094.800,00 | 28.014.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 333.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.065.200,00 | 24.065.200,00 | 23.904.800,00 | -160.400,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.618.200,00 | 5.618.200,00 | 3.218.200,00 | -2.400.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 74.397.200,00 | 120.461.200,00 | 104.971.800,00 | 30.574.600,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 75.336.200,00 | 75.336.200,00 | 66.724.800,00 | -8.611.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 77.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.336.200,00 | 75.336.200,00 | 66.724.800,00 | -8.611.400,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 77.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | | | | **-** | **100 %** | **539.374.400,00** | **539.974.400,00** | **526.851.500,00** | **1.165.300,00** | | | | | | | **540.539.700,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah laporan rapat koordinasi keamanan, ketertiban dan linmas* | | | | - | 12 laporan | 539.374.400,00 | 539.974.400,00 | 526.851.500,00 | -12.522.900,00 | | | - | -<br>- | - | | 540.539.700,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 528.539.700,00 | 528.539.700,00 | 524.151.500,00 | -4.388.200,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 528.539.700,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.834.700,00 | 11.434.700,00 | 2.700.000,00 | -8.134.700,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum** | | | | **-** | **100,00 %** | **13.538.800,00** | **19.850.000,00** | **17.235.000,00** | **961.200,00** | | | | | | | **14.500.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah* | | | | - | 100 % | 13.538.800,00 | 19.850.000,00 | 17.235.000,00 | 3.696.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 14.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 105 Orang | 105 Orang | 3.038.800,00 | 9.350.000,00 | 7.260.000,00 | 4.221.200,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 9.975.000,00 | -525.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | | **KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.545.118.843,00** | **12.831.375.411,00** | **13.043.668.460,00** | **41.851.047,00** | | | | | | | **11.586.969.890,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan layanan kebutuhan kantor* | | | | - | 100 % | 297.689.485,00 | 357.059.150,00 | 292.521.083,00 | -5.168.402,00 | | | - | -<br>- | - | | 370.057.340,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 873.700,00 | 873.700,00 | 873.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 6.507.800,00 | 6.507.800,00 | 7.492.800,00 | 985.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 4.199.500,00 | 4.199.465,00 | 3.149.598,00 | -1.049.902,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.620.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 3.420.000,00 | 360.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.618.600,00 | 2.618.600,00 | 3.618.600,00 | 1.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 14.572.000,00 | 22.572.000,00 | 15.170.600,00 | 598.600,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.377.200,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 1.659.185.205,00 | 1.502.366.017,00 | 1.814.703.818,00 | 155.518.613,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.793.780.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.911.100,00 | 27.911.100,00 | 30.128.666,00 | 2.217.566,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 28.600.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 203.177.075,00 | 183.028.899,00 | 227.383.556,00 | 24.206.481,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 774.278.950,00 | 752.432.110,00 | 643.634.860,00 | -130.644.090,00 | | | - | -<br>- | - | | 982.306.250,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 19.108.950,00 | 19.108.950,00 | 15.483.950,00 | -3.625.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 32.297.000,00 | 32.297.000,00 | 43.455.000,00 | 11.158.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.526.700,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 44.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.466.022.626,00** | **10.819.129.004,00** | **4.377.872.930,00** | **423.869.524,00** | | | | | | | **11.889.892.150,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | - | 18 Dokumen | 11.466.022.626,00 | 10.819.129.004,00 | 4.377.872.930,00 | -7.088.149.696,00 | | | - | -<br>- | - | | 11.889.892.150,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 26.514.800,00 | 26.514.800,00 | 22.788.025,00 | -3.726.775,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 26.515.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 957.254.913,00 | 921.480.713,00 | 6.145.000,00 | -951.109.913,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 957.254.913,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 613.079.100,00 | 537.177.100,00 | 575.605.625,00 | -37.473.475,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 731.807.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | | **KELURAHAN JURANGOMBO UTARA** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.545.118.843,00** | **12.831.375.411,00** | **13.043.668.460,00** | **41.851.047,00** | | | | | | | **11.586.969.890,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan layanan kebutuhan kantor* | | | | - | 100 % | 297.689.485,00 | 357.059.150,00 | 292.521.083,00 | -5.168.402,00 | | | - | -<br>- | - | | 370.057.340,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.960.400,00 | 1.960.400,00 | 1.960.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.200.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 971.100,00 | 971.100,00 | 971.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.100.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 12.605.400,00 | 12.605.400,00 | 12.605.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.800.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.060.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 5.829.400,00 | 5.829.400,00 | 5.829.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.423.340,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.305.000,00 | 1.350.000,00 | 675.000,00 | -630.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.313.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.676.000,00 | 19.664.000,00 | 10.006.000,00 | -1.670.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 1.659.185.205,00 | 1.502.366.017,00 | 1.814.703.818,00 | 155.518.613,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.793.780.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 22.399.000,00 | 22.399.000,00 | 25.605.000,00 | 3.206.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 20.400.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 210.419.350,00 | 184.302.922,00 | 245.849.560,00 | 35.430.210,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 255.722.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 774.278.950,00 | 752.432.110,00 | 643.634.860,00 | -130.644.090,00 | | | - | -<br>- | - | | 982.306.250,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 16.061.600,00 | 16.061.600,00 | 12.791.000,00 | -3.270.600,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 41.187.850,00 | 41.442.700,00 | 35.763.400,00 | -5.424.450,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 43.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 13.674.800,00 | 13.674.800,00 | 13.674.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.800.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 38.680.100,00 | -1.319.900,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.466.022.626,00** | **10.819.129.004,00** | **4.377.872.930,00** | **423.869.524,00** | | | | | | | **11.889.892.150,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | - | 18 Dokumen | 11.466.022.626,00 | 10.819.129.004,00 | 4.377.872.930,00 | -7.088.149.696,00 | | | - | -<br>- | - | | 11.889.892.150,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 19.610.000,00 | 19.610.000,00 | 18.970.500,00 | -639.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 37 Unit | 37 Unit | 799.472.616,00 | 791.693.836,00 | 19.938.020,00 | -779.534.596,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 880.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 511.564.300,00 | 467.210.200,00 | 488.175.800,00 | -23.388.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Jurangombo Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 650.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | | **KELURAHAN TIDAR SELATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.545.118.843,00** | **12.831.375.411,00** | **13.043.668.460,00** | **41.851.047,00** | | | | | | | **11.586.969.890,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan layanan kebutuhan kantor* | | | | - | 100 % | 297.689.485,00 | 357.059.150,00 | 292.521.083,00 | -5.168.402,00 | | | - | -<br>- | - | | 370.057.340,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 7.892.800,00 | 7.892.800,00 | 7.892.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 3.926.000,00 | 3.926.000,00 | 2.944.500,00 | -981.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.400.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.100.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 3.115.600,00 | 3.115.600,00 | 3.115.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.200.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 3 Laporan | 6 Laporan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.700.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 6 Laporan | 13 Laporan | 15.110.000,00 | 25.510.000,00 | 19.000.000,00 | 3.890.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 1.659.185.205,00 | 1.502.366.017,00 | 1.814.703.818,00 | 155.518.613,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.793.780.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 23.085.000,00 | 23.267.400,00 | 22.187.400,00 | -897.600,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.100.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 255.412.800,00 | 231.043.260,00 | 261.050.480,00 | 5.637.680,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 253.797.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 774.278.950,00 | 752.432.110,00 | 643.634.860,00 | -130.644.090,00 | | | - | -<br>- | - | | 982.306.250,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 14.767.500,00 | 18.880.000,00 | 16.972.500,00 | 2.205.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 14.989.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 23.117.400,00 | 19.523.400,00 | 13.217.550,00 | -9.899.850,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.118.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 14 Unit | 18 Unit | 12.730.000,00 | 12.730.000,00 | 12.730.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 36.840.000,00 | 26.419.600,00 | 26.419.600,00 | -10.420.400,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 36.840.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.466.022.626,00** | **10.819.129.004,00** | **4.377.872.930,00** | **423.869.524,00** | | | | | | | **11.889.892.150,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | - | 18 Dokumen | 11.466.022.626,00 | 10.819.129.004,00 | 4.377.872.930,00 | -7.088.149.696,00 | | | - | -<br>- | - | | 11.889.892.150,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 25.185.800,00 | 25.185.800,00 | 24.451.000,00 | -734.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 25.185.800,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 986.090.260,00 | 947.439.760,00 | 25.418.960,00 | -960.671.300,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 1.001.001.600,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1<br>Pokmas / Ormas | 2<br>Pokmas / Ormas | 625.718.800,00 | 591.533.800,00 | 564.487.800,00 | -61.231.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 684.632.100,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | | **KELURAHAN TIDAR UTARA** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.545.118.843,00** | **12.831.375.411,00** | **13.043.668.460,00** | **41.851.047,00** | | | | | | | **11.586.969.890,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan layanan kebutuhan kantor* | | | | - | 100 % | 297.689.485,00 | 357.059.150,00 | 292.521.083,00 | -5.168.402,00 | | | - | -<br>- | - | | 370.057.340,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 3.417.250,00 | 3.417.250,00 | 3.417.250,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.759.800,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.897.500,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 7.233.800,00 | 7.231.000,00 | 7.231.000,00 | -2.800,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.235.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 5.276.000,00 | 4.901.000,00 | 3.651.000,00 | -1.625.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.276.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.060.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 2.901.000,00 | 2.901.000,00 | 2.901.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.903.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 1.600.000,00 | -680.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 2.280.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 15.902.000,00 | 23.902.000,00 | 16.030.000,00 | 128.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 22.476.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 1.659.185.205,00 | 1.502.366.017,00 | 1.814.703.818,00 | 155.518.613,00 | | | - | - - | - | | 1.793.780.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.033.200,00 | 28.033.200,00 | 28.033.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 28.033.200,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 153.097.200,00 | 138.158.676,00 | 152.031.616,00 | -1.065.584,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 153.509.640,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 774.278.950,00 | 752.432.110,00 | 643.634.860,00 | -130.644.090,00 | | | - | - - | - | | 982.306.250,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 17.487.000,00 | 17.480.000,00 | 13.180.000,00 | -4.307.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 17.490.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 23.096.000,00 | 23.065.200,00 | 17.794.500,00 | -5.301.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 25.405.600,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 6.480.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 20.295.000,00 | -14.705.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.466.022.626,00** | **10.819.129.004,00** | **4.377.872.930,00** | **423.869.524,00** | | | | | | | **11.889.892.150,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | - | 18 Dokumen | 11.466.022.626,00 | 10.819.129.004,00 | 4.377.872.930,00 | -7.088.149.696,00 | | | - | - - | - | | 11.889.892.150,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 27.620.000,00 | 27.620.000,00 | 26.180.000,00 | -1.440.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 27.620.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 1.506.674.226,00 | 1.463.443.600,00 | 329.499.600,00 | -1.177.174.626,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 1.506.674.226,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 723.020.700,00 | 634.820.700,00 | 607.957.200,00 | -115.063.500,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Utara | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 769.388.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | | **KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.545.118.843,00** | **12.831.375.411,00** | **13.043.668.460,00** | **41.851.047,00** | | | | | | | **11.586.969.890,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan layanan kebutuhan kantor* | | | | - | 100 % | 297.689.485,00 | 357.059.150,00 | 292.521.083,00 | -5.168.402,00 | | | - | -<br>- | - | | 370.057.340,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 3.199.635,00 | 3.199.635,00 | 3.199.635,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.520.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 8.762.900,00 | 8.762.900,00 | 8.762.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.762.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.150.500,00 | 7.150.500,00 | 7.150.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.150.800,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.680.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -1.680.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.680.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.999.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.280.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 22.376.000,00 | 30.376.000,00 | 25.334.000,00 | 2.958.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.532.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 65.025.400,00 | 65.025.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 65.025.400,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | - | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 27.559.400,00 | 27.559.400,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 27.559.400,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 22.226.600,00 | 22.226.600,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 22.226.600,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 1.659.185.205,00 | 1.502.366.017,00 | 1.814.703.818,00 | 155.518.613,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.793.780.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.791.500,00 | 25.776.648,00 | 28.970.600,00 | 3.179.100,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 25.791.500,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 172.863.460,00 | 156.136.014,00 | 193.406.560,00 | 20.543.100,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 173.949.220,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 774.278.950,00 | 752.432.110,00 | 643.634.860,00 | -130.644.090,00 | | | - | -<br>- | - | | 982.306.250,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 21.067.000,00 | 21.550.000,00 | 16.520.000,00 | -4.547.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.230.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 11.563.200,00 | 11.958.000,00 | 9.392.000,00 | -2.171.200,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.988.600,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 12 Unit | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.150.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 65.498.450,00 | 58.373.260,00 | 47.373.260,00 | -18.125.190,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 65.948.450,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.466.022.626,00** | **10.819.129.004,00** | **4.377.872.930,00** | **423.869.524,00** | | | | | | | **11.889.892.150,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | - | 18 Dokumen | 11.466.022.626,00 | 10.819.129.004,00 | 4.377.872.930,00 | -7.088.149.696,00 | | | - | -<br>- | - | | 11.889.892.150,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 25.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 1.112.881.075,00 | 1.112.881.075,00 | 10.400.000,00 | -1.102.481.075,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 1.125.297.075,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 994.267.200,00 | 949.771.200,00 | 769.811.100,00 | -224.456.100,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Rejowinangun Selatan<br>Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 933.090.600,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | | **KELURAHAN MAGERSARI** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.545.118.843,00** | **12.831.375.411,00** | **13.043.668.460,00** | **41.851.047,00** | | | | | | | **11.586.969.890,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan layanan kebutuhan kantor* | | | | - | 100 % | 297.689.485,00 | 357.059.150,00 | 292.521.083,00 | -5.168.402,00 | | | - | -<br>- | - | | 370.057.340,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 854.500,00 | 854.500,00 | 854.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 5.975.300,00 | 5.975.300,00 | 5.975.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.975.300,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.200.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.999.600,00 | 2.998.300,00 | 2.998.300,00 | -1.300,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.999.600,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 2.840.000,00 | -960.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.902.000,00 | 22.702.000,00 | 14.558.700,00 | -1.343.300,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 22.476.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | **7.01** | **KECAMATAN ADMINISTRASI** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 65.025.400,00 | 65.025.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 65.025.400,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 15.239.400,00 | 15.239.400,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 15.239.400,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **23.748.471.369,00** | **24.440.809.515,00** | **18.189.038.490,00** | **-5.559.432.879,00** | | | | | | | **24.447.901.740,00** | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 1.659.185.205,00 | 1.502.366.017,00 | 1.814.703.818,00 | 155.518.613,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.793.780.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.000.900,00 | 29.000.900,00 | 29.000.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 29.000.900,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 242.922.920,00 | 219.035.768,00 | 276.241.080,00 | 33.318.160,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 243.441.920,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | - | 100 % | 774.278.950,00 | 752.432.110,00 | 643.634.860,00 | -130.644.090,00 | | | - | -<br>- | - | | 982.306.250,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 14.783.200,00 | 16.312.000,00 | 12.466.000,00 | -2.317.200,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 40.749.000,00 | 33.387.600,00 | 25.715.700,00 | -15.033.300,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.749.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 9 Unit | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.480.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 61.610.000,00 | 61.610.000,00 | 54.110.000,00 | -7.500.000,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 241.610.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **11.466.022.626,00** | **10.819.129.004,00** | **4.377.872.930,00** | **423.869.524,00** | | | | | | | **11.889.892.150,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | - | 18 Dokumen | 11.466.022.626,00 | 10.819.129.004,00 | 4.377.872.930,00 | -7.088.149.696,00 | | | - | -<br>- | - | | 11.889.892.150,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 75 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 24.398.000,00 | 24.398.000,00 | 24.398.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 24.398.000,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 1.690.159.336,00 | 1.527.999.820,00 | 10.124.200,00 | -1.680.035.136,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 1.690.159.336,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 797.011.500,00 | 724.848.600,00 | 828.022.100,00 | 31.010.600,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 810.368.500,00 | KECAMATAN MAGELANG SELATAN |
| | | **KECAMATAN MAGELANG TENGAH** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Tengah** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **12.562.207.954,00** | **12.645.265.502,00** | **13.217.607.227,00** | **-140.537.568,00** | | | | | | | **12.421.670.386,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat DAerah* | | | | 100 % | 100 % | 64.961.870,00 | 63.201.000,00 | 58.951.200,00 | -6.010.670,00 | | | - | -<br>- | - | | 71.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 8.722.400,00 | 8.722.400,00 | 6.536.600,00 | -2.185.800,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.886.800,00 | 4.886.800,00 | 4.286.800,00 | -600.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.753.800,00 | 5.753.800,00 | 4.897.300,00 | -856.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.193.000,00 | 4.193.000,00 | 2.727.000,00 | -1.466.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.861.700,00 | 3.861.700,00 | 2.985.200,00 | -876.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 37.544.170,00 | 35.783.300,00 | 37.518.300,00 | -25.870,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan Laporan Administrasi Keuangan Daerah Sesuai aturan* | | | | - | 100 % | 9.408.903.222,00 | 10.392.369.830,00 | 10.531.091.735,00 | 1.122.188.513,00 | | | - | -<br>- | - | | 9.023.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 62 Orang/ bulan | 62 Orang/ bulan | 9.390.600.022,00 | 10.374.066.630,00 | 10.515.143.335,00 | 1.124.543.313,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 9.000.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 18.303.200,00 | 18.303.200,00 | 15.948.400,00 | -2.354.800,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Pengeloaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 393.078.100,00 | 411.329.400,00 | 335.507.300,00 | -57.570.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 473.916.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 4.497.000,00 | 4.497.000,00 | 4.497.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.538.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 13.909.500,00 | 13.909.500,00 | 13.909.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 4.597.900,00 | 4.597.900,00 | 4.099.800,00 | -498.100,00 | Kota Magelang, Magelang Selatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 9.790.600,00 | 9.790.600,00 | 9.790.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 31.294.400,00 | 31.294.400,00 | 17.627.200,00 | -13.667.200,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 64.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 311.976.400,00 | 311.976.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 59.330.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 1.201.717.762,00 | 1.126.924.672,00 | 1.334.717.372,00 | 132.999.610,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.135.606.086,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 0 | 1 0 | 2.528.000,00 | 2.528.000,00 | 2.341.000,00 | -187.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 63.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 80.450.000,00 | 72.990.000,00 | 97.320.000,00 | 16.870.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 81.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* | | | | - | 100 % | 1.493.547.000,00 | 651.440.600,00 | 645.363.220,00 | -848.183.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.658.817.700,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 50.224.200,00 | 50.136.000,00 | 40.077.000,00 | -10.147.200,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 66.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 35.554.000,00 | 35.554.000,00 | 29.266.000,00 | -6.288.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 38.722.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 15.850.000,00 | 13.850.000,00 | 13.850.000,00 | -2.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 7.906.000,00 | 7.906.000,00 | 7.906.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | | | | **-** | **100,00 %** | **304.252.980,00** | **289.609.300,00** | **285.179.600,00** | **85.131.696,00** | | | | | | | **389.384.676,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Cakupan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik* | | | | - | 100 % | 4.999.900,00 | 4.999.900,00 | 21.915.200,00 | 16.915.300,00 | | | - | -<br>- | - | | 18.460.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 4.999.900,00 | 4.999.900,00 | 21.915.200,00 | 16.915.300,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.460.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintaham yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan* | | | | - | 100 % | 220.272.880,00 | 205.629.200,00 | 203.412.600,00 | -16.860.280,00 | | | - | -<br>- | - | | 290.924.676,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.358.000,00 | 29.358.000,00 | 27.439.300,00 | -1.918.700,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 183.689.280,00 | 169.045.600,00 | 170.104.200,00 | -13.585.080,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 252.924.676,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.225.600,00 | 7.225.600,00 | 5.869.100,00 | -1.356.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat* | | | | - | 100 % | 78.980.200,00 | 78.980.200,00 | 59.851.800,00 | -19.128.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 80.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 78.980.200,00 | 78.980.200,00 | 59.851.800,00 | -19.128.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **14.124.677.236,00** | **12.217.808.548,00** | **4.645.879.275,00** | **1.556.928.398,00** | | | | | | | **15.681.605.634,00** | |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | | | | - | - | 173.579.000,00 | 221.879.000,00 | 194.229.800,00 | 20.650.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 210.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat* | | | | 180 Keluarga | 180 Keluarga | 173.579.000,00 | 221.879.000,00 | 194.229.800,00 | 20.650.800,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 210.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | | | | **-** | **100 %** | **710.338.890,00** | **710.338.890,00** | **674.578.690,00** | **18.561.110,00** | | | | | | | **728.900.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *cakupan kegiatan koordinasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat* | | | | - | 100 % | 710.338.890,00 | 710.338.890,00 | 674.578.690,00 | -35.760.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 728.900.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 525.339.150,00 | 525.339.150,00 | 531.875.050,00 | 6.535.900,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 543.900.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 184.999.740,00 | 184.999.740,00 | 142.703.640,00 | -42.296.100,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 185.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum** | | | | **-** | **100,00 %** | **14.000.000,00** | **14.000.000,00** | **14.070.400,00** | **0,00** | | | | | | | **14.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.070.400,00 | 70.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 14.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.070.400,00 | 70.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | | **KELURAHAN KEMIRIREJO** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Tengah** | | | | **-** | **100,00 %** | **12.562.207.954,00** | **12.645.265.502,00** | **13.217.607.227,00** | **-140.537.568,00** | | | | | | | **12.421.670.386,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Pengeloaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 393.078.100,00 | 411.329.400,00 | 335.507.300,00 | -57.570.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 473.916.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.952.200,00 | 1.952.200,00 | 1.952.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.661.500,00 | 5.661.500,00 | 5.182.700,00 | -478.800,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 7.072.700,00 | 7.072.700,00 | 7.072.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 5.705.600,00 | 5.705.600,00 | 4.609.100,00 | -1.096.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.075.100,00 | 3.075.100,00 | 3.075.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 3.870.000,00 | -1.290.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 25.108.000,00 | 27.000.000,00 | 16.988.600,00 | -8.119.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | **7.01** | **KECAMATAN ADMINISTRASI** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 311.976.400,00 | 311.976.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 59.330.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 16.409.900,00 | 16.409.900,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 1.201.717.762,00 | 1.126.924.672,00 | 1.334.717.372,00 | 132.999.610,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.135.606.086,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 17.397.792,00 | 17.397.792,00 | 17.397.792,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 225.393.120,00 | 204.741.480,00 | 238.079.980,00 | 12.686.860,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 270.124.224,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* | | | | - | 100 % | 1.493.547.000,00 | 651.440.600,00 | 645.363.220,00 | -848.183.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.658.817.700,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 15.371.000,00 | 15.371.000,00 | 18.020.000,00 | 2.649.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 18.669.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 41.937.000,00 | 41.937.000,00 | 43.971.270,00 | 2.034.270,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 42.027.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 5.790.000,00 | 5.790.000,00 | 5.790.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.790.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.370.000,00 | 20.370.000,00 | 15.277.500,00 | -5.092.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 20.370.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **14.124.677.236,00** | **12.217.808.548,00** | **4.645.879.275,00** | **1.556.928.398,00** | | | | | | | **15.681.605.634,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Maszarakat Desa dan Kelurahan* | | | | - | 100 % | 13.951.098.236,00 | 11.995.929.548,00 | 4.451.649.475,00 | -9.499.448.761,00 | | | - | -<br>- | - | | 15.471.605.634,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 66 Lembaga Kemasyarakatan | 66 Lembaga Kemasyarakatan | 29.190.000,00 | 29.190.000,00 | 28.218.100,00 | -971.900,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 21.690.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 57 Unit | 57 Unit | 1.381.385.915,00 | 1.165.140.789,00 | 98.000.000,00 | -1.283.385.915,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 1.460.385.915,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 0 | 1 Pokmas / Ormas | 919.980.570,00 | 741.318.300,00 | 694.957.500,00 | -225.023.070,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 1.079.684.540,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | | **KELURAHAN CACABAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Tengah** | | | | **-** | **100,00 %** | **12.562.207.954,00** | **12.645.265.502,00** | **13.217.607.227,00** | **-140.537.568,00** | | | | | | | **12.421.670.386,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Pengeloaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 393.078.100,00 | 411.329.400,00 | 335.507.300,00 | -57.570.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 473.916.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.750.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.538.000,00 | 6.538.000,00 | 7.903.500,00 | 1.365.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.191.800,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 7.005.300,00 | 3.005.300,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 5.800.000,00 | -3.800.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.560.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.208.500,00 | 18.378.800,00 | 10.388.600,00 | -4.819.900,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 20.215.800,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 311.976.400,00 | 311.976.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 59.330.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 2.620.300,00 | 2.620.300,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 1.201.717.762,00 | 1.126.924.672,00 | 1.334.717.372,00 | 132.999.610,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.135.606.086,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 2.882.100,00 | 1.556.100,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.458.600,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 25.775.000,00 | 5.775.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 24.793.890,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 114.649.880,00 | 103.770.000,00 | 110.610.000,00 | -4.039.880,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 147.393.628,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* | | | | - | 100 % | 1.493.547.000,00 | 651.440.600,00 | 645.363.220,00 | -848.183.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.658.817.700,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 16.829.000,00 | 16.829.000,00 | 13.067.000,00 | -3.762.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 66.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 21.427.000,00 | 21.427.000,00 | 16.969.000,00 | -4.458.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.569.700,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 9.860.000,00 | 9.860.000,00 | 14.860.000,00 | 5.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.846.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 22.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **14.124.677.236,00** | **12.217.808.548,00** | **4.645.879.275,00** | **1.556.928.398,00** | | | | | | | **15.681.605.634,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Maszarakat Desa dan Kelurahan* | | | | - | 100 % | 13.951.098.236,00 | 11.995.929.548,00 | 4.451.649.475,00 | -9.499.448.761,00 | | | - | -<br>- | - | | 15.471.605.634,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 74 Lembaga Kemasyarakatan | 74 Lembaga Kemasyarakatan | 31.772.400,00 | 31.772.400,00 | 31.772.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 34.949.640,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 74 Unit | 74 Unit | 1.490.057.560,00 | 1.318.167.860,00 | 0,00 | -1.490.057.560,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 1.639.063.316,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 935.170.380,00 | 734.510.500,00 | 720.119.000,00 | -215.051.380,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Cacaban | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 1.048.928.608,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | | **KELURAHAN MAGELANG** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Tengah** | | | | **-** | **100,00 %** | **12.562.207.954,00** | **12.645.265.502,00** | **13.217.607.227,00** | **-140.537.568,00** | | | | | | | **12.421.670.386,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Pengeloaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 393.078.100,00 | 411.329.400,00 | 335.507.300,00 | -57.570.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 473.916.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 2.006.000,00 | 2.006.000,00 | 2.006.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 7.188.600,00 | 7.188.600,00 | 7.188.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.331.500,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 9.938.000,00 | 9.938.000,00 | 10.108.000,00 | 170.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.938.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.560.000,00 | 360.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 3.599.000,00 | 3.599.000,00 | 3.599.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.600.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 10 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 9.600.000,00 | 1.600.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.840.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.604.000,00 | 22.600.000,00 | 20.800.000,00 | 2.196.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 24.298.800,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 311.976.400,00 | 311.976.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 59.330.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 2.620.300,00 | 2.620.300,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.620.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 1.201.717.762,00 | 1.126.924.672,00 | 1.334.717.372,00 | 132.999.610,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.135.606.086,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 831.000,00 | -169.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24.037.800,00 | 24.037.800,00 | 24.037.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.069.400,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 993.300,00 | 993.300,00 | 993.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 126.702.790,00 | 130.928.000,00 | 149.175.500,00 | 22.472.710,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.699.344,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* | | | | - | 100 % | 1.493.547.000,00 | 651.440.600,00 | 645.363.220,00 | -848.183.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.658.817.700,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 24.092.400,00 | 24.084.000,00 | 25.788.000,00 | 1.695.600,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 24.840.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 32.465.000,00 | 32.465.000,00 | 40.175.000,00 | 7.710.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 37.255.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 10.594.000,00 | 10.594.000,00 | 9.614.000,00 | -980.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.529.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **14.124.677.236,00** | **12.217.808.548,00** | **4.645.879.275,00** | **1.556.928.398,00** | | | | | | | **15.681.605.634,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Maszarakat Desa dan Kelurahan* | | | | - | 100 % | 13.951.098.236,00 | 11.995.929.548,00 | 4.451.649.475,00 | -9.499.448.761,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | - | | 15.471.605.634,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 21.300.000,00 | 21.300.000,00 | 20.100.000,00 | -1.200.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 23.645.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 1.173.989.172,00 | 1.057.089.472,00 | 0,00 | -1.173.989.172,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 1.173.989.172,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 795.634.950,00 | 638.110.100,00 | 616.174.900,00 | -179.460.050,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 918.121.844,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | | **KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Tengah** | | | | **-** | **100,00 %** | **12.562.207.954,00** | **12.645.265.502,00** | **13.217.607.227,00** | **-140.537.568,00** | | | | | | | **12.421.670.386,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Pengeloaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 393.078.100,00 | 411.329.400,00 | 335.507.300,00 | -57.570.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 473.916.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 1.692.000,00 | 1.692.000,00 | 1.692.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.850.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 9.889.200,00 | 9.882.200,00 | 9.882.200,00 | -7.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.350.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 5.895.000,00 | 5.895.000,00 | 4.421.000,00 | -1.474.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.650.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 1.628.000,00 | 1.628.000,00 | 1.628.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.785.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.400.000,00 | -1.600.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.345.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 17.586.000,00 | 20.280.000,00 | 12.512.000,00 | -5.074.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 21.650.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 311.976.400,00 | 311.976.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 59.330.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 2.620.300,00 | 2.620.300,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.210.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 1.201.717.762,00 | 1.126.924.672,00 | 1.334.717.372,00 | 132.999.610,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.135.606.086,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.250.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 26.716.000,00 | 26.716.000,00 | 29.413.000,00 | 2.697.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 26.850.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.400.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.562.350,00 | 91.237.500,00 | 121.650.000,00 | 21.087.650,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 120.467.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* | | | | - | 100 % | 1.493.547.000,00 | 651.440.600,00 | 645.363.220,00 | -848.183.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.658.817.700,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 21.856.000,00 | 21.884.000,00 | 20.469.000,00 | -1.387.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 12.350.000,00 | 12.322.000,00 | 11.588.000,00 | -762.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.480.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 12.017.000,00 | 12.017.000,00 | 9.787.000,00 | -2.230.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 12.175.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 14.986.000,00 | -15.014.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.345.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **14.124.677.236,00** | **12.217.808.548,00** | **4.645.879.275,00** | **1.556.928.398,00** | | | | | | | **15.681.605.634,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Maszarakat Desa dan Kelurahan* | | | | - | 100 % | 13.951.098.236,00 | 11.995.929.548,00 | 4.451.649.475,00 | -9.499.448.761,00 | | | - | -<br>- | - | | 15.471.605.634,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 23.379.000,00 | 23.379.000,00 | 23.379.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 23.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 56 Unit | 56 Unit | 1.731.043.244,00 | 1.700.042.772,00 | 0,00 | -1.731.043.244,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Rejowinangun Utara | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 2.150.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.158.333.610,00 | 897.188.700,00 | 865.121.200,00 | -293.212.410,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 1.389.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | | **KELURAHAN PANJANG** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Tengah** | | | | **-** | **100,00 %** | **12.562.207.954,00** | **12.645.265.502,00** | **13.217.607.227,00** | **-140.537.568,00** | | | | | | | **12.421.670.386,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Pengeloaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 393.078.100,00 | 411.329.400,00 | 335.507.300,00 | -57.570.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 473.916.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.974.900,00 | 1.974.900,00 | 1.974.900,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.172.400,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.252.400,00 | 5.252.400,00 | 4.669.200,00 | -583.200,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.600.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.950.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | -600.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 1 Laporan Laporan | 29.908.000,00 | 33.720.000,00 | 19.335.000,00 | -10.573.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | **7.01** | **KECAMATAN ADMINISTRASI** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 311.976.400,00 | 311.976.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 59.330.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 277.265.000,00 | 277.265.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 7.820.300,00 | 7.820.300,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 1.201.717.762,00 | 1.126.924.672,00 | 1.334.717.372,00 | 132.999.610,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.135.606.086,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.100.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 29.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 229.392.310,00 | 209.880.200,00 | 257.966.700,00 | 28.574.390,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* | | | | - | 100 % | 1.493.547.000,00 | 651.440.600,00 | 645.363.220,00 | -848.183.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.658.817.700,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 16.298.000,00 | 16.298.000,00 | 12.448.500,00 | -3.849.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 29.772.600,00 | 29.772.600,00 | 47.516.950,00 | 17.744.350,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 32.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 11.234.000,00 | 11.234.000,00 | 7.234.000,00 | -4.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 120.000.000,00 | 115.000.000,00 | 95.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **14.124.677.236,00** | **12.217.808.548,00** | **4.645.879.275,00** | **1.556.928.398,00** | | | | | | | **15.681.605.634,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Maszarakat Desa dan Kelurahan* | | | | - | 100 % | 13.951.098.236,00 | 11.995.929.548,00 | 4.451.649.475,00 | -9.499.448.761,00 | | | - | -<br>- | - | | 15.471.605.634,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 25.962.500,00 | 25.962.500,00 | 25.962.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.237.738.200,00 | 957.148.100,00 | 0,00 | -1.237.738.200,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 957.147.599,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 890.978.100,00 | 728.286.300,00 | 689.851.875,00 | -201.126.225,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Panjang | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 1.000.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | | **KELURAHAN GELANGAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **27.715.477.060,00** | **25.877.022.240,00** | **18.837.315.192,00** | **-8.878.161.868,00** | | | | | | | **29.235.560.696,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Tengah** | | | | **-** | **100,00 %** | **12.562.207.954,00** | **12.645.265.502,00** | **13.217.607.227,00** | **-140.537.568,00** | | | | | | | **12.421.670.386,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Pengeloaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 393.078.100,00 | 411.329.400,00 | 335.507.300,00 | -57.570.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 473.916.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.700.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 6.187.500,00 | -2.062.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 6.120.000,00 | 720.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 19 Paket | 19 Paket | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 21.106.000,00 | 23.800.000,00 | 14.062.000,00 | -7.044.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 26.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 311.976.400,00 | 311.976.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 59.330.300,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 2.620.300,00 | 2.620.300,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 1.201.717.762,00 | 1.126.924.672,00 | 1.334.717.372,00 | 132.999.610,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.135.606.086,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 890.600,00 | -209.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.993.600,00 | 15.993.600,00 | 15.273.600,00 | -720.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 120.674.820,00 | 109.485.000,00 | 145.980.000,00 | 25.305.180,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* | | | | - | 100 % | 1.493.547.000,00 | 651.440.600,00 | 645.363.220,00 | -848.183.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.658.817.700,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 24.481.800,00 | 24.472.000,00 | 18.606.000,00 | -5.875.800,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 26.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 22.750.000,00 | 22.750.000,00 | 37.329.000,00 | 14.579.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 24.800.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 7.518.000,00 | 7.518.000,00 | 7.518.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 955.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.250.000,00 | -943.750.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.000.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **-** | **100,00 %** | **14.124.677.236,00** | **12.217.808.548,00** | **4.645.879.275,00** | **1.556.928.398,00** | | | | | | | **15.681.605.634,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Maszarakat Desa dan Kelurahan* | | | | - | 100 % | 13.951.098.236,00 | 11.995.929.548,00 | 4.451.649.475,00 | -9.499.448.761,00 | | | - | -<br>- | - | | 15.471.605.634,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 22.323.000,00 | 22.323.000,00 | 22.323.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 24.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 65 Unit | 1.238.453.355,00 | 1.238.453.355,00 | 0,00 | -1.238.453.355,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | - | -<br>- | | | 1.500.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 844.406.280,00 | 666.546.400,00 | 615.670.000,00 | -228.736.280,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Gelangan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 1.000.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG TENGAH |
| | | **KECAMATAN MAGELANG UTARA** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **10.136.473.024,00** | **10.622.533.291,00** | **10.728.267.136,00** | **-1.146.752.153,00** | | | | | | | **8.989.720.871,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 37.582.500,00 | 35.182.500,00 | 27.147.900,00 | -10.434.600,00 | | | - | -<br>- | OPD Kecamatan Magelang Utara | | 47.217.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.313.700,00 | 11.313.700,00 | 8.214.500,00 | -3.099.200,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.903.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.192.500,00 | 6.192.500,00 | 4.830.500,00 | -1.362.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.591.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.677.600,00 | 5.677.600,00 | 4.566.800,00 | -1.110.800,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.355.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.501.500,00 | 3.301.500,00 | 2.513.800,00 | -1.987.700,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.084.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.678.200,00 | 3.478.200,00 | 2.600.500,00 | -2.077.700,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.065.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.219.000,00 | 5.219.000,00 | 4.421.800,00 | -797.200,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.219.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan* | | | | 100 % | 100 % | 7.714.218.073,00 | 8.872.442.722,00 | 8.923.328.754,00 | 1.209.110.681,00 | | | - | -<br>- | OPD Kecamatan Magelang Utara | | 8.050.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 53 Orang/ bulan | 53 Orang/ bulan | 7.679.987.873,00 | 8.835.812.522,00 | 8.906.095.554,00 | 1.226.107.681,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | -<br>- | | | 8.000.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 34.230.200,00 | 36.630.200,00 | 17.233.200,00 | -16.997.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 315.316.535,00 | 286.148.235,00 | 248.687.585,00 | -66.628.950,00 | | | - | -<br>- | OPD Kecamatan Magelang Utara | | 154.984.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.386.800,00 | 2.386.800,00 | 3.586.100,00 | 1.199.300,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.687.500,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 1.780.500,00 | 1.780.500,00 | 2.680.000,00 | 899.500,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.088.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 12.704.400,00 | 12.704.400,00 | 11.526.600,00 | -1.177.800,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 13.706.300,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.499.500,00 | 3.499.500,00 | 2.625.000,00 | -874.500,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.799.600,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 4.897.000,00 | 4.897.000,00 | 6.072.700,00 | 1.175.700,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.597.300,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 1.520.000,00 | -505.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.325.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.475.000,00 | 28.000.000,00 | 21.219.000,00 | -14.256.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 35.481.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang utara* | | | | 100 % | 100 % | 138.854.246,00 | 138.853.846,00 | 190.553.846,00 | 51.699.600,00 | | | - | -<br>- | OPD Kecamatan Magelang Utara | | 256.980.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 103 Unit | 66 Unit | 52.988.700,00 | 52.988.700,00 | 52.988.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 45.550.500,00 | 45.550.500,00 | 52.550.500,00 | 7.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 732.428.252,00 | 680.917.080,00 | 820.423.677,00 | 87.995.425,00 | | | - | -<br>- | OPD Kecamatan Magelang Utara | | 256.656.971,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 12.700.300,00 | 12.700.300,00 | 9.483.700,00 | -3.216.600,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 10.200.300,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 58.199.400,00 | 58.199.400,00 | 57.000.000,00 | -1.199.400,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 58.199.400,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 60.234.300,00 | 54.303.669,00 | 72.632.520,00 | 12.398.220,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 66.257.271,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara* | | | | 100 % | 100 % | 1.198.073.418,00 | 608.988.908,00 | 518.125.374,00 | -679.948.044,00 | | | - | -<br>- | OPD Kecamatan Magelang Utara | | 223.880.800,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 10 Unit | 14 Unit | 56.613.496,00 | 63.613.496,00 | 48.572.622,00 | -8.040.874,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 50.635.500,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.277.000,00 | 10.277.000,00 | 8.969.250,00 | -1.307.750,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.975.800,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 14 Unit | 11.386.760,00 | 11.386.760,00 | 16.615.000,00 | 5.228.240,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.072.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 34.787.602,00 | 34.787.602,00 | 34.787.602,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 32.197.500,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | | | | **100 %** | **100 %** | **264.559.250,00** | **294.425.515,00** | **277.837.580,00** | **12.211.050,00** | | | | | | | **276.770.300,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 1.860.900,00 | 1.860.900,00 | 16.422.900,00 | 14.562.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | OPD Kecamatan Magelang Utara | | 2.282.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.860.900,00 | 1.860.900,00 | 16.422.900,00 | 14.562.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 2.282.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Cakupan Penyeleng garaan Urusan Pemerintah an yang tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 139.590.540,00 | 175.387.046,00 | 151.720.120,00 | 12.129.580,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | warga masyarakat | | 153.161.420,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31.503.000,00 | 31.503.000,00 | 31.503.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 31.503.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 42.910.440,00 | 38.956.946,00 | 34.346.220,00 | -8.564.220,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 48.676.520,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 65.177.100,00 | 104.927.100,00 | 85.870.900,00 | 20.693.800,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 72.981.900,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | | | | - | 100 % | 123.107.810,00 | 117.177.569,00 | 109.694.560,00 | -13.413.250,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | - | | 121.326.880,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 61.788.210,00 | 55.857.969,00 | 57.654.560,00 | -4.133.650,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 63.612.280,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 61.319.600,00 | 61.319.600,00 | 52.040.000,00 | -9.279.600,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 57.714.600,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| 3. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **433.052.250,00** | **434.202.000,00** | **425.227.600,00** | **16.159.750,00** | | | | | | | **449.212.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum* | | | | 100 % | 100 % | 433.052.250,00 | 434.202.000,00 | 425.227.600,00 | -7.824.650,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | warga masyarakat dan aparat keamanan | | 449.212.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 433.052.250,00 | 434.202.000,00 | 425.227.600,00 | -7.824.650,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 449.212.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **11.469.800,00** | **11.409.800,00** | **11.190.400,00** | **1.700.000,00** | | | | | | | **13.169.800,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah* | | | | 100 % | 100 % | 11.469.800,00 | 11.409.800,00 | 11.190.400,00 | -279.400,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | warga masyarakat | | 13.169.800,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.469.800,00 | 11.409.800,00 | 11.190.400,00 | -279.400,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 13.169.800,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | | **KELURAHAN KRAMAT UTARA** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **10.136.473.024,00** | **10.622.533.291,00** | **10.728.267.136,00** | **-1.146.752.153,00** | | | | | | | **8.989.720.871,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 315.316.535,00 | 286.148.235,00 | 248.687.585,00 | -66.628.950,00 | | | - | - - | Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara | | 154.984.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.683.500,00 | 1.683.500,00 | 1.683.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 2.308.100,00 | 2.308.100,00 | 2.105.600,00 | -202.500,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.963.200,00 | 1.963.200,00 | 1.963.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 14.144.200,00 | 14.144.200,00 | 14.144.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 2.812.500,00 | -937.500,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 7.356.000,00 | 7.356.000,00 | 7.356.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.440.000,00 | -3.060.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 21.534.000,00 | 20.200.000,00 | 13.390.000,00 | -8.144.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 732.428.252,00 | 680.917.080,00 | 820.423.677,00 | 87.995.425,00 | | | - | - - | Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara | | 256.656.971,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.660.000,00 | 5.660.000,00 | 4.287.100,00 | -1.372.900,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 17.828.000,00 | 17.828.000,00 | 17.828.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 102.285.250,00 | 92.401.515,00 | 122.588.500,00 | 20.303.250,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara* | | | | 100 % | 100 % | 1.198.073.418,00 | 608.988.908,00 | 518.125.374,00 | -679.948.044,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Kramat Utara | | 223.880.800,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 30.035.400,00 | 31.962.000,00 | 30.332.000,00 | 296.600,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 37.594.150,00 | 37.821.200,00 | 35.883.700,00 | -1.710.450,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 14 Unit | 9.530.000,00 | 9.530.000,00 | 9.530.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 19.341.000,00 | 19.341.000,00 | 19.341.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **100 %** | **100 %** | **12.004.536.788,00** | **10.061.244.988,00** | **3.650.144.595,00** | **-8.774.536.788,00** | | | | | | | **3.230.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 12.004.536.788,00 | 10.061.244.988,00 | 3.650.144.595,00 | -8.354.392.193,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | warga masyarakat | | 3.230.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 26.171.600,00 | 26.171.600,00 | 26.171.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 952.176.600,00 | 952.176.600,00 | 65.499.000,00 | -886.677.600,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 730.580.981,00 | 608.825.115,00 | 486.779.040,00 | -243.801.941,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Utara | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | | **KELURAHAN KRAMAT SELATAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **10.136.473.024,00** | **10.622.533.291,00** | **10.728.267.136,00** | **-1.146.752.153,00** | | | | | | | **8.989.720.871,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 315.316.535,00 | 286.148.235,00 | 248.687.585,00 | -66.628.950,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan | | 154.984.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.318.500,00 | 1.318.500,00 | 1.318.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.328.400,00 | 1.328.400,00 | 1.603.800,00 | 275.400,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 9.508.100,00 | 9.507.900,00 | 9.507.900,00 | -200,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | -500.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 3.290.700,00 | 3.290.700,00 | 3.290.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 21.004.000,00 | 22.600.000,00 | 15.000.000,00 | -6.004.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 732.428.252,00 | 680.917.080,00 | 820.423.677,00 | 87.995.425,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan | | 256.656.971,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.913.700,00 | 3.913.700,00 | 3.007.650,00 | -906.050,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 16.073.400,00 | 16.073.400,00 | 16.735.200,00 | 661.800,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.899.900,00 | 91.005.515,00 | 89.107.305,00 | -11.792.595,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara* | | | | 100 % | 100 % | 1.198.073.418,00 | 608.988.908,00 | 518.125.374,00 | -679.948.044,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Kramat Selatan | | 223.880.800,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 6 Unit | 25.329.000,00 | 25.290.000,00 | 19.580.000,00 | -5.749.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 21.353.600,00 | 21.740.000,00 | 19.957.500,00 | -1.396.100,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 8 Unit | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.979.190,00 | 1.979.190,00 | 1.979.190,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **100 %** | **100 %** | **12.004.536.788,00** | **10.061.244.988,00** | **3.650.144.595,00** | **-8.774.536.788,00** | | | | | | | **3.230.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 12.004.536.788,00 | 10.061.244.988,00 | 3.650.144.595,00 | -8.354.392.193,00 | | | - | -<br>- | warga masyarakat | | 3.230.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 21.671.000,00 | 21.671.000,00 | 20.915.750,00 | -755.250,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 1.444.126.827,00 | 1.136.695.136,00 | 83.194.000,00 | -1.360.932.827,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 842.019.900,00 | 734.507.784,00 | 673.958.260,00 | -168.061.640,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kramat Selatan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | | **KELURAHAN KEDUNGSARI** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **10.136.473.024,00** | **10.622.533.291,00** | **10.728.267.136,00** | **-1.146.752.153,00** | | | | | | | **8.989.720.871,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 315.316.535,00 | 286.148.235,00 | 248.687.585,00 | -66.628.950,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Kedungsari | | 154.984.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.577.410,00 | 1.577.410,00 | 1.577.410,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 754.000,00 | 754.000,00 | 603.200,00 | -150.800,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.013.500,00 | 6.013.500,00 | 6.013.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | -600.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.975.300,00 | 2.975.300,00 | 2.975.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 4.800.000,00 | 2.880.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 27.352.000,00 | 17.000.000,00 | 14.002.000,00 | -13.350.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Kecamatan Magelang utara* | | | | 100 % | 100 % | 138.854.246,00 | 138.853.846,00 | 190.553.846,00 | 51.699.600,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Kedungsari | | 256.980.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 49 Unit | 21 Unit | 20.266.000,00 | 20.265.600,00 | 20.265.600,00 | -400,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 13 Unit | 10 Unit | 20.049.046,00 | 20.049.046,00 | 20.049.046,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 732.428.252,00 | 680.917.080,00 | 820.423.677,00 | 87.995.425,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Kedungsari | | 256.656.971,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.974.400,00 | 4.974.400,00 | 3.690.100,00 | -1.284.300,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.891.150,00 | 21.891.150,00 | 21.891.150,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 68.118.810,00 | 62.084.769,00 | 79.004.820,00 | 10.886.010,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara* | | | | 100 % | 100 % | 1.198.073.418,00 | 608.988.908,00 | 518.125.374,00 | -679.948.044,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Kedungsari | | 223.880.800,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 25.347.000,00 | 25.347.000,00 | 22.020.000,00 | -3.327.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 14.263.000,00 | 14.263.000,00 | 21.940.000,00 | 7.677.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 16.223.000,00 | 0,00 | 14.883.000,00 | -1.340.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 601.759.760,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | -601.759.760,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **100 %** | **100 %** | **12.004.536.788,00** | **10.061.244.988,00** | **3.650.144.595,00** | **-8.774.536.788,00** | | | | | | | **3.230.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 12.004.536.788,00 | 10.061.244.988,00 | 3.650.144.595,00 | -8.354.392.193,00 | | | - | -<br>- | warga masyarakat | | 3.230.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 19.950.000,00 | -3.250.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 58 Unit | 58 Unit | 1.658.291.553,00 | 1.128.227.073,00 | 97.388.000,00 | -1.560.903.553,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 10 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 782.648.380,00 | 736.390.439,00 | 587.870.600,00 | -194.777.780,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Kedungsari | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | | **KELURAHAN WATES** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **10.136.473.024,00** | **10.622.533.291,00** | **10.728.267.136,00** | **-1.146.752.153,00** | | | | | | | **8.989.720.871,00** | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 315.316.535,00 | 286.148.235,00 | 248.687.585,00 | -66.628.950,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Wates | | 154.984.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.900.600,00 | 1.900.600,00 | 1.900.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.549.800,00 | 1.549.800,00 | 1.347.300,00 | -202.500,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 913.900,00 | 672.400,00 | 672.400,00 | -241.500,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.370.200,00 | 11.370.200,00 | 11.370.200,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 17.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.984.500,00 | 3.984.500,00 | 3.984.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 1.515.000,00 | -510.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 16.788.000,00 | 17.800.000,00 | 11.388.600,00 | -5.399.400,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 138.854.246,00 | 138.853.846,00 | 190.553.846,00 | 51.699.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 256.980.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | - | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | -<br>- | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 732.428.252,00 | 680.917.080,00 | 820.423.677,00 | 87.995.425,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Wates | | 256.656.971,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.814.600,00 | -1.185.400,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24.859.000,00 | 24.859.000,00 | 44.855.000,00 | 19.996.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.551.710,00 | 54.621.469,00 | 72.933.820,00 | 12.382.110,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara* | | | | 100 % | 100 % | 1.198.073.418,00 | 608.988.908,00 | 518.125.374,00 | -679.948.044,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Wates | | 223.880.800,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 34.682.400,00 | 34.682.400,00 | 28.053.000,00 | -6.629.400,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 42.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.586.500,00 | 5.586.500,00 | 3.680.500,00 | -1.906.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 6.940.000,00 | 6.940.000,00 | 6.940.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 47.839.760,00 | 47.839.760,00 | 36.622.010,00 | -11.217.750,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 58.500.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **100 %** | **100 %** | **12.004.536.788,00** | **10.061.244.988,00** | **3.650.144.595,00** | **-8.774.536.788,00** | | | | | | | **3.230.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 12.004.536.788,00 | 10.061.244.988,00 | 3.650.144.595,00 | -8.354.392.193,00 | | | - | -<br>- | warga masyarakat | | 3.230.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 21.660.800,00 | 21.660.800,00 | 21.660.800,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 1.876.067.607,00 | 1.539.186.657,00 | 158.957.000,00 | -1.717.110.607,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 1.950.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 1.099.350.480,00 | 903.888.792,00 | 734.668.640,00 | -364.681.840,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Wates | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 1.250.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | | **KELURAHAN POTROBANGSAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **22.850.091.112,00** | **21.423.815.594,00** | **15.092.667.311,00** | **-7.757.423.801,00** | | | | | | | **12.958.872.971,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Magelang Utara** | | | | **100,00 %** | **100,00 %** | **10.136.473.024,00** | **10.622.533.291,00** | **10.728.267.136,00** | **-1.146.752.153,00** | | | | | | | **8.989.720.871,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 315.316.535,00 | 286.148.235,00 | 248.687.585,00 | -66.628.950,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Potrobangsan | | 154.984.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.116.825,00 | 2.116.825,00 | 2.116.825,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 1.489.600,00 | 1.489.600,00 | 1.117.200,00 | -372.400,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 8.873.600,00 | 8.868.000,00 | 8.868.000,00 | -5.600,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.543.000,00 | 3.543.000,00 | 2.657.250,00 | -885.750,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 3.984.400,00 | 3.984.400,00 | 3.984.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 25.368.000,00 | 13.000.000,00 | 12.288.600,00 | -13.079.400,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 138.854.246,00 | 138.853.846,00 | 190.553.846,00 | 51.699.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 256.980.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | - | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | - | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 44.700.000,00 | 44.700.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 78.980.700,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan Magelang Utara* | | | | 100 % | 100 % | 732.428.252,00 | 680.917.080,00 | 820.423.677,00 | 87.995.425,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Potrobangsan | | 256.656.971,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 4.999.600,00 | 4.999.600,00 | 3.923.700,00 | -1.075.900,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 23.692.632,00 | 23.692.632,00 | 28.164.632,00 | 4.472.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 140.546.700,00 | 126.708.561,00 | 169.475.880,00 | 28.929.180,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Kecamatan magelang utara* | | | | 100 % | 100 % | 1.198.073.418,00 | 608.988.908,00 | 518.125.374,00 | -679.948.044,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Kelurahan Potrobangsan | | 223.880.800,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 31.186.800,00 | 31.184.000,00 | 33.740.000,00 | 2.553.200,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 108.930.000,00 | 108.330.000,00 | 63.772.500,00 | -45.157.500,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 17 Unit | 5 Unit | 7.968.000,00 | 7.968.000,00 | 10.456.500,00 | 2.488.500,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.600.000,00 | 34.600.000,00 | 25.950.000,00 | -8.650.000,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | | | | **100 %** | **100 %** | **12.004.536.788,00** | **10.061.244.988,00** | **3.650.144.595,00** | **-8.774.536.788,00** | | | | | | | **3.230.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 12.004.536.788,00 | 10.061.244.988,00 | 3.650.144.595,00 | -8.354.392.193,00 | | | - | -<br>- | warga masyarakat | | 3.230.000.000,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 25.020.000,00 | 25.020.000,00 | 24.652.900,00 | -367.100,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 1.768.253.460,00 | 1.585.032.660,00 | 88.721.000,00 | -1.679.532.460,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 733.297.600,00 | 618.591.332,00 | 559.758.005,00 | -173.539.595,00 | Kota Magelang, Magelang Utara, Potrobangsan | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAGELANG UTARA |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **8.776.650.717,00** | **8.657.226.088,00** | **7.800.365.299,00** | **-976.285.418,00** | | | | | | | **9.849.058.026,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **8.776.650.717,00** | **8.657.226.088,00** | **7.800.365.299,00** | **-976.285.418,00** | | | | | | | **9.849.058.026,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **8.776.650.717,00** | **8.657.226.088,00** | **7.800.365.299,00** | **-976.285.418,00** | | | | | | | **9.849.058.026,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **4.978.822.607,00** | **4.777.397.978,00** | **4.665.800.714,00** | **-165.238.381,00** | | | | | | | **4.813.584.226,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 18.120.400,00 | 18.120.400,00 | 14.440.750,00 | -3.679.650,00 | | | - | -<br>- | Dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja PD | | 21.781.100,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.779.000,00 | 10.779.000,00 | 8.429.125,00 | -2.349.875,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.649.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 856.000,00 | 856.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.246.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 772.000,00 | 772.000,00 | 598.775,00 | -173.225,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.122.600,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.634.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.041.500,00 | 1.041.500,00 | 801.050,00 | -240.450,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.515.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 21 Laporan | 21 Laporan | 3.630.900,00 | 3.630.900,00 | 2.714.800,00 | -916.100,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.614.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.085.728.307,00 | 4.193.805.107,00 | 4.110.736.949,00 | 25.008.642,00 | | | - | -<br>- | OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang | | 4.042.665.306,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 22/14 Orang/ bulan | 22/14 Orang/ bulan | 4.077.447.407,00 | 4.185.524.207,00 | 4.103.932.449,00 | 26.485.042,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.032.813.806,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.478.400,00 | 7.478.400,00 | 6.202.550,00 | -1.275.850,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 8.684.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 802.500,00 | 802.500,00 | 601.950,00 | -200.550,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.167.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan laporan administrasi umum PD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 96.736.200,00 | 96.736.200,00 | 65.406.800,00 | -31.329.400,00 | | | - | -<br>- | OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang | | 94.071.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.693.600,00 | 1.693.600,00 | 1.693.600,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 1.778.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 11.638.500,00 | 11.638.500,00 | 11.638.500,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.841.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 6.559.300,00 | 6.559.300,00 | 6.559.300,00 | 0,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 6.887.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 4.252.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.743.400,00 | 6.743.400,00 | 6.743.400,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 7.080.900,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 7.200.000,00 | -2.400.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 5.838.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 33 Laporan | 33 Laporan | 55.701.400,00 | 55.701.400,00 | 26.772.000,00 | -28.929.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 56.393.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 405.951.400,00 | 110.528.700,00 | 110.528.700,00 | -295.422.700,00 | | | - | -<br>- | OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang | | 233.209.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 295.422.700,00 | 0,00 | 0,00 | -295.422.700,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 110.528.700,00 | 110.528.700,00 | 110.528.700,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 233.209.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemernitahan daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 202.102.400,00 | 188.023.671,00 | 231.544.590,00 | 29.442.190,00 | | | - | -<br>- | OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang | | 202.628.420,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.683.100,00 | 9.683.100,00 | 9.683.100,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 9.696.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 51.273.600,00 | 51.273.600,00 | 52.027.200,00 | 753.600,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 51.786.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 141.145.700,00 | 127.066.971,00 | 169.834.290,00 | 28.688.590,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 141.145.720,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 170.183.900,00 | 170.183.900,00 | 133.142.925,00 | -37.040.975,00 | | | - | -<br>- | OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang | | 219.229.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 127.491.200,00 | 127.491.200,00 | 97.129.650,00 | -30.361.550,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 127.491.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 28.517.700,00 | 28.517.700,00 | 21.838.275,00 | -6.679.425,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 28.517.700,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 14.175.000,00 | 14.175.000,00 | 14.175.000,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 14.175.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 49.045.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Jumlah Konflik SARA** | | | | **0 Angka** | **0 Angka** | **1.282.488.110,00** | **1.282.488.110,00** | **983.514.310,00** | **389.660.190,00** | | | | | | | **1.672.148.300,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | *Persentase Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.282.488.110,00 | 1.282.488.110,00 | 983.514.310,00 | -298.973.800,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | Masyarakat Kota Magelang | | 1.672.148.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 1450 Orang | 1450 Orang | 261.891.100,00 | 261.891.100,00 | 250.061.000,00 | -11.830.100,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 346.448.550,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 1320 Orang | 1320 Orang | 342.984.630,00 | 342.984.630,00 | 233.873.630,00 | -109.111.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 314.704.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 68.969.900,00 | 68.969.900,00 | 48.790.900,00 | -20.179.000,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 204.265.100,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 210.783.000,00 | 210.783.000,00 | 193.875.200,00 | -16.907.800,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 278.948.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | | | | 45 Orang | 45 Orang | 199.660.500,00 | 199.660.500,00 | 159.703.300,00 | -39.957.200,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 265.840.990,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 96.710.280,00 | 96.710.280,00 | 35.226.780,00 | -61.483.500,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 127.947.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 47.407.900,00 | 47.407.900,00 | 27.206.300,00 | -20.201.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 62.513.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 70 Orang | 70 Orang | 54.080.800,00 | 54.080.800,00 | 34.777.200,00 | -19.303.600,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | - - | | | 71.480.760,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik** | | | | **5.18 %** | **5.18 %** | **1.225.690.500,00** | **1.307.690.500,00** | **1.078.268.600,00** | **406.457.200,00** | | | | | | | **1.632.147.700,00** | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | *Cakupan pemberdayaan Parpol* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.225.690.500,00 | 1.307.690.500,00 | 1.078.268.600,00 | -147.421.900,00 | | | - | - - | Partai Politik di Wilayah Kota Magelang | | 1.632.147.700,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 400 Orang | 300 Orang | 248.795.400,00 | 248.795.400,00 | 146.085.300,00 | -102.710.100,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 409.956.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 662.552.000,00 | 662.552.000,00 | 643.882.750,00 | -18.669.250,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 806.394.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka* | | | | 1 Dokumen Kegiatan | 1 Dokumen Kegiatan | 314.343.100,00 | 396.343.100,00 | 288.300.550,00 | -26.042.550,00 | Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 415.797.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Persentase Organisasi Kemasyarak atan yang Aktif**<br>**Persentase Oganisasi Kemasyarak atan yang dibina dan dipantau** | | | | **86.99 %**<br>**65.04 %** | **86.99 %**<br>**65.04 %** | **313.703.200,00** | **313.703.200,00** | **264.141.300,00** | **64.614.100,00** | | | | | | | **378.317.300,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | *Cakupan pembinaan dan pemantauan Ormas* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 313.703.200,00 | 313.703.200,00 | 264.141.300,00 | -49.561.900,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | Organisasi Masyarakat Kota Magelang | | 378.317.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 385 Orang | 370 Orang | 122.313.100,00 | 122.313.100,00 | 81.873.100,00 | -40.440.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 171.155.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 191.390.100,00 | 191.390.100,00 | 182.268.200,00 | -9.121.900,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 207.162.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya** | | | | **10.06 %** | **10.06 %** | **364.023.400,00** | **364.023.400,00** | **319.011.200,00** | **75.523.600,00** | | | | | | | **439.547.000,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | *Cakupan pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 364.023.400,00 | 364.023.400,00 | 319.011.200,00 | -45.012.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Masyarakat Kota Magelang | | 439.547.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 48.974.400,00 | 48.974.400,00 | 39.540.900,00 | -9.433.500,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 49.910.200,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 300 Orang | 150 Orang | 54.553.700,00 | 54.553.700,00 | 35.675.425,00 | -18.878.275,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 68.016.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 215.017.300,00 | 215.017.300,00 | 201.927.875,00 | -13.089.425,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 275.687.300,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 45.478.000,00 | 45.478.000,00 | 41.867.000,00 | -3.611.000,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 45.932.700,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Jumlah Konflik Sosial** | | | | **0 Anga** | **0 Anga** | **611.922.900,00** | **611.922.900,00** | **489.629.175,00** | **301.390.600,00** | | | | | | | **913.313.500,00** | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Cakupan Pemantapan Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 611.922.900,00 | 611.922.900,00 | 489.629.175,00 | -122.293.725,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Wilayah Kota Magelang | | 913.313.500,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 400 Orang | 400 Orang | 41.383.600,00 | 41.383.600,00 | 36.865.200,00 | -4.518.400,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 72.602.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 267.460.100,00 | 267.460.100,00 | 243.736.075,00 | -23.724.025,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 267.460.100,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 303.079.200,00 | 303.079.200,00 | 209.027.900,00 | -94.051.300,00 | Kota Magelang, Magelang Tengah, Kemirirejo | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 573.251.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **992.833.376.534,00** | **1.115.098.216.295,00** | **1.114.209.134.178,00** | **121.375.757.644,00** | | | | | | | **883.443.879.531,45** | |

# BAB 6
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik untuk masukan, proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat, dan/atau dampak (*impact*) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang akan dicapai suatu program, atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun hasil perencanaan pembangunan yang sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah baik yang menyangkut pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Magelang 2005-2025.

Sebagai alat ukur pencapaian kinerja tujuan, sasaran, yang diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun sebagai satu BAB tersendiri dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Bab ini memuat rincian indikator kinerja beserta target yang direncanakan untuk dapat dicapai di akhir pelaksanaan perencanaan tahun 2024 sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan sebagai Indiator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang **menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan**, digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya mencapai tujuan jangka pendek yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka dalam RKPD tahun 2024 disusun program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan serta indikator kinerja pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang terkait. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024 memuat dua hal, yaitu Indikator Kinerja Utama Daerah dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1, Tabel 6.2 dan Tabel 6.3 berikut ini.

*Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Magelang Tahun 2025*

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target RKPD Tahun 2025 | Formulasi Perhitungan / Penjelasan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq** | | | | | | |
| **Tujuan: Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter** | | | | | | |
| 1 | Nilai Pembangunan Masyarakat | Nilai | 81,19 | 85,67*) | (Nilai Penguatan Toleransi + Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum + Nilai Stabilitas Daerah + Nilai Pemajuan Kebudayaan + Nilai Partisipasi Masyarakat) / 5 | |
| **Sasaran 1: Meningkatnya toleransi** | | | | | | |
| 2 | Nilai penguatan toleransi | Nilai | 63 | 100,00*) | (Persentase fasilitasi dialog antar agama + Persentase pembinaan tokoh agama + Persentase santunan kepada pengelola tempat ibadah) / 3 | Kesbangpol, Bagian Kesra |
| **Sasaran 2: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum** | | | | | | |
| 3 | Nilai penguatan ketentraman dan ketertiban umum | Nilai | 94,61 | 94,61 | Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda + Persentase linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas + Persentase siskamling aktif | Satpol PP |
| **Sasaran 3: Meningkatnya stabilitas daerah** | | | | | | |
| 4 | Nilai stabilitas daerah | Nilai | 93,98 | 97,03*) | $\frac{(\text{Persentase kriminalitas} + \text{Persentase konflik SARA})}{2}$ | Kesbangpol |
| **Sasaran 4: Meningkatnya penguatan kebudayaan** | | | | | | |
| 5 | Nilai pemajuan kebudayaan | Nilai | 66,36 | 66,36 | Cakupan pembinaan lembaga pendidikan kebudayaan + Cakupan register obyek pemajuan kebudayaan + Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan + Cakupan pemenuhan sarpras kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **Sasaran 5: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan** | | | | | | |
| 6 | Nilai partisipasi masyarakat | Nilai | 88,00 | 93,91*) | Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan | Kecamatan, DPMP4KB |
| **MISI 2: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM** | | | | | | |
| **Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM** | | | | | | |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 82,64 | 82,64 | Menghitung IPM<br>IPM dihitung sebagai rata-rata geometric dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran<br>$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ | Sekretariat Daerah |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target RKPD Tahun 2025 | Formulasi Perhitungan / Penjelasan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing** | | | | | | |
| 8 | Indeks Pendidikan | Indeks | 0,782 | 0,782 | $I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <br> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ <br> $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 17,00 | 17,00 | Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat / Aspek Masyarakat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat** | | | | | | |
| 10 | Indeks Kesehatan | Indeks | 0,878 | 0,88*) | $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ | Dinas Kesehatan |
| **Sasaran 3: Meningkatnya daya beli masyarakat** | | | | | | |
| 11 | Pengeluaran per kapita yang disesuaikan | Ribu Rp | 12.987,00 | 13.175,00 | $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{max})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ | Bagian Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **Sasaran 4: Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan** | | | | | | |
| 12. | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 96,00 | 96,00 | $IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{laki-laki}}$ | DPMP4KB |
| **MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif** | | | | | | |
| **Tujuan: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif** | | | | | | |
| 13 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 83,10 | 83,10 | Komponen Pengungkit (1. Pemenuhan; 2. Hasil Antara Area Perubahan; 3. Reform) <br> Komponen Hasil (1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan; 2. Kualitas pelayanan publik; 3. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 4. Kinerja organisasi) | Sekretariat Daerah |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target RKPD Tahun 2025 | Formulasi Perhitungan / Penjelasan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik** | | | | | | |
| 14 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 85,41 | 88,90*) | Rata-rata nilai IKM OPD yang disurvey | Kecamatan, DPMPTSP |
| **Sasaran 2: Menciptakan birokrasi yang kapabel** | | | | | | |
| 15 | Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) | Tingkat | 30,80 | 37,11*) | $KOD = \frac{TNPD}{JPD}$<br>KOD = Kematangan Organisasi Daerah<br>TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah<br>JPD = Jumlah Perangkat Daerah | Bagian Organisasi |
| 16 | Indeks Sistem Merit | Indeks | 0,730 | 0,8232*) | - | BKPSDM |
| 17 | Indeks SPBE | Indeks | 2,98 | 2,98 | Penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indicator tersebut | Dinas Kominsta |
| **Sasaran 3: Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel** | | | | | | |
| 18 | Maturitas SPIP | Nilai | 3,921 | 3,921 | (1) SPIP terdiri atas unsur:<br>a. lingkungan pengendalian;<br>b. penilaian risiko;<br>c. kegiatan pengendalian;<br>d. informasi dan komunikasi; dan<br>e. pemantauan pengendalian intern. | Inspektorat |
| 19 | Nilai SAKIP | Nilai | A | A | Sistem AKIP<br>FORMAL / KUALITAS / PEMANFAATAN / TOTAL<br>Perencanaan Kinerja: 6% / 15% / 9% / 30%<br>Pengukuran Kinerja: 5% / 12,5% / 7,5% / 25%<br>Pelaporan Kinerja: 3% / 7,5% / 4,5% / 15%<br>Evaluasi: 2% / 5% / 3% / 10%<br>80%<br>Kinerja<br>FORMAL / KUALITAS / PEMANFAATAN / TOTAL<br>Capaian Kinerja: 5% / 10% / 5% / 20% | Bappeda, Setda, Inspektorat |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target RKPD Tahun 2025 | Formulasi Perhitungan / Penjelasan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | 93,60 | 93,60 | IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:<br>1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;<br>2. pengalokasian anggaran belanja dan APBD;<br>3. transparansi pengelolaan keuangan daerah;<br>4. penyerapan anggaran;<br>5. kondisi keuangan daerah; dan<br>6. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD | BPKAD |
| **MISI 4: Meningkatnya Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan** | | | | | | |
| **Tujuan: Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif** | | | | | | |
| 21 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,18 – 5,43 | 5,13 – 5,77*) | PDRB t – PDRB (t-1) / PDRB (t-1) x 100% | Setda |
| 22 | Persentase penduduk miskin | % | 6,12 – 6,76 | 6,11 | Total penduduk miskin / total penduduk x 100% | Setda |
| 23 | Ketimpangan Pendapatan | % | 16,46 sedang | 16,46 sedang | Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:<br>1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi<br>2. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah<br>3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah | Setda |
| **Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan** | | | | | | |
| 24 | Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan (%) | % | 29,85 | 30,49*) | PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan / total PDRB x 100% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target RKPD Tahun 2025 | Formulasi Perhitungan / Penjelasan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan investasi** | | | | | | |
| 25 | Persentase pertumbuhan investasi | % | 16,00 | 16,29*) | Nilai investasi t – Nilai Investasi (t-1) / Nilai Investasi (t-1) x 100% | DPMPTSP |
| **Sasaran: Meningkatnya angka kunjungan wisatawan** | | | | | | |
| 26 | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | % | 3,18 | 14,20*) | Kunjungan Wisatawan t – kunjungan Wisatawan (t-1) / Kunjungan Wisatawan (t-1) x 100% | Disporapar |
| **Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial** | | | | | | |
| 27 | Persentase PMKS | % | 9,18 | 4,72*) | Total PMKS / total penduduk x 100% | Dinas Sosial |
| **Sasaran: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah** | | | | | | |
| 28 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Angka | 5,3 – 6,3 | 5,25*) | Total pengangguran / total angkatan kerja x 100% | Dinas Tenaga Kerja |
| **Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro** | | | | | | |
| 29 | Persentase Pertumbuhan UMKM | % | 4,5 | 4,5 | Total UMKM t – total UMKM (t-1) / Total UMKM (t-1) x 100% | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **MISI 5: Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur** | | | | | | |
| **Tujuan: Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan** | | | | | | |
| 30 | Indeks Kualitas Ruang Kota | Indeks | 68,64 | 68,64 | Indeks Infrastruktur Wilayah + Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang + Indeks aksesibilitas perkotaan + Persentase luas Kawasan tidak kumuh + IKLH + Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik | DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup |
| **Sasaran: Meningkatnya kualitas infrastruktur kota** | | | | | | |
| 31 | Indeks infrastruktur wilayah | Indeks | 91,86 | 91,86 | (Cakupan jalan kondisi baik + Cakupan drainase kondisi baik + Cakupan irigasi kondisi baik + Cakupan sarpras persampahan kondisi baik + Cakupan jembatan kondisi baik + Cakupan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik + Cakupan sarpras pengolahan limbah kondisi baik) / 7 | DPUPR, Dinas Perhubungan |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target RKPD Tahun 2025 | Formulasi Perhitungan / Penjelasan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran: Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang** | | | | | | |
| 32 | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | % | 78,00 | 83,40*) | Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW<br>(luas realisasi rencana pola ruang : luas rencana pola ruang) x 100% | DPUPR |
| Sasaran: Meningkatnya aksesibilitas perkotaan | | | | | | |
| 33 | Indeks aksesibilitas perkotaan | Indeks | 73,00 | 73,00 | (Cakupan universal design di sarana pendidikan + Cakupan universal design di sarana kesehatan + Cakupan universal design di sarana perdagangan + Cakupan universal design di sarana kebudayaan dan rekreasi + Cakupan universal design di sarana pemerintahan + Cakupan transportasi terintegrasi daerah) / 6 | DPUPR, Dinas Perhubungan |
| **Sasaran: kualitas lingkungan permukiman** | | | | | | |
| 34 | Persentase luas kawasan kumuh | % | 0,00 | 0,00 | Total kawasan kumuh / total luas kawasan kota x 100% | Dinas Perkim |
| **Sasaran: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan** | | | | | | |
| 35 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 51,00 | 64,80*) | IKLH=(0,376xIKA)+(0,45xIKU)+(0,219xIKL) | DLH |
| 36 | Persentase ruang terbuka hijau publik | % | 17,50 | 17,50 | Persentase luas kawasan terbuka hijau / total luas kawasan kota x 100% | DLH |
| **Tujuan: Meningkatnya Ketahanan Daerah** | | | | | | |
| 37 | Indeks Resiliensi Daerah | Indeks | 71,94 | 71,94 | (Indeks Ketahanan Daerah + Skor PPH) / 2 | Dinas Pertanian Pangan, Satpol PP |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target RPJMD Tahun 2025 | Penyesuaian Target RKPD Tahun 2025 | Formulasi Perhitungan / Penjelasan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sasaran: Meningkatnya ketahanan terhadap bencana** | | | | | | |
| 38 | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 57,40 | 57,40 | | Satpol PP, BPBD |
| **Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan daerah** | | | | | | |
| 39 | Skor PPH | Skor | 92,74 | 93,10*) | PPH= % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing Pangan | Dinas Pertanian Pangan |

*Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026*
**) : Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022-2023*

*Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025*

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **B** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| **1.1** | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | |
| | Angka Partisipasi Murni SD/MI | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Angka Partisipasi Murni Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | % | NA | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | % | 0 | 0,0032 | 0,0016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | % | 0 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Kelulusan (AL) Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C) | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun | % | 97,63 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | 100 |
| | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | | | | | | | | |
| | - PAUD | % | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| | - SD/MI | % | 95,3 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 95,9 | 96 | 96 |
| | - SMP/MTs | % | 95,71 | 97 | 97,25 | 97,5 | 98 | 98,5 | 98,5 |
| **1.2** | **KESEHATAN** | | | | | | | | |
| | Indeks Kesehatan | Indeks | 0,875 | 0,876 | 0,877 | 0,878 | 0,878 | 0,879 | 0,879 |
| | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | Angka | 138,79 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 100 |
| | Angka Kematian Balita (AKBa per 1.000 kelahiran hidup | Angka | 16,66 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | Angka | 13,88 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup | Angka | 16 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe | % | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Persentase warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | % | 85,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat | % | NA | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 75 |
| | Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular | % | NA | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 70 |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | % | NA | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 80 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |
| **1.3** | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | |
| | Persentase kualitas infrastruktur wilayah | % | NA | 75,14 | 76,88 | 78,75 | 82,05 | 84,50 | 84,50 |
| | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | % | NA | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| | Jumlah aksesibilitas sarana pemerintahan daerah yang sesuai universal desain | unit | NA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| **1.4** | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | |
| | Cakupan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman berkualitas | % | NA | 51,47 | 52,52 | 54,53 | 58,65 | 59,79 | 59,79 |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni pada kawasan bencana dan relokasi program pemerintah | % | NA | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | Luas kawasan permukiman kumuh | Ha | 39,91 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.5** | **KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | |
| | Persentase kriminalitas yang tertangani | % | 73,88 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 82,5 |
| | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk | Angka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir | Angka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tingkat Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilu | % | 77,41 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| | Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | NA | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | Persentase penurunan gangguan trantibum | % | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | Indeks | NA | 35,29 | 41,18 | 47,06 | 52,94 | 58,82 | 58,82 |
| | Rasio Resiko Dampak Bencana | Angka | NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **1.6** | **SOSIAL** | | | | | | | | |
| | Persentase Penurunan PMKS | % | NA | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| | Persentase penanganan PMKS | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2 | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 2.1 | TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | NA | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 80 |
| | Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 51,42 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 2.2 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| | Sumbangan pendapatan perempuan | % | NA | 43,18 | 43,41 | 43,53 | 43,66 | 43,88 | 43,88 |
| | Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan | % | NA | 15 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 15,4 |
| | Rasio KDRT | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 2.3 | PANGAN | | | | | | | | |
| | Tingkat Ketersediaan Energi | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tingkat Ketersediaan Protein | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Penguatan cadangan pangan | % | NA | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 30 |
| 2.4 | PERTANAHAN | | | | | | | | |
| | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 93,12 | 93,20 | 93,23 | 93,36 | 93,44 | 93,53 | 93,53 |
| | Penyelesaian kasus tanah Negara (Penyelesaian kasus tanah) | % | NA | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 2.5 | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Air | Indeks | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 83,67 | 85.92 | 88.25 | 93.03 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
| | Presentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap pelaksanaan dokumen lingkungkan | % | NA | 43,33 | 43,33 | 46,67 | 46,67 | 50,00 | 50,00 |
| | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 31,38 | 31,38 | 31,66 | 31,93 | 32,21 | 32,48 | 32,48 |
| | Persentase Sampah yang Terkelola | % | 84,11 | 88,05 | 90,65 | 93,65 | 97,15 | 99,65 | 99,65 |
| 2.6 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | |
| | Nilai kualitas administrasi kependudukan | % | NA | 84,37 | 88,07 | 91,21 | 94,63 | 95,83 | 95,83 |
| | IKM OPD | Indeks | 82,83 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 |
| | Nilai tertib administrasi kependudukan | % | NA | 99,10 | 99,20 | 99,30 | 99,38 | 99,50 | 99,50 |
| | Cakupan pemanfaatan data kependudukan | % | NA | 70,00 | 80,00 | 88,33 | 97,50 | 100,00 | 100,00 |
| 2.7 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | |
| | Persentase keswadayaan masyarakat | % | NA | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 50 |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang | % | NA | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 82 |
| **2.8** | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | |
| | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | NA | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| | Total Fertility Rate (TFR) | Angka | NA | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| **2.9** | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | | |
| | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan | % | NA | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| **2.10** | **KOMUNIKASI, INFORMATIKA** | | | | | | | | |
| | Indeks SPBE | Indeks | 3,21 | 2,4 | 2,55 | 2,675 | 2,975 | 3,25 | 3,25 |
| | Nilai domain kebijakan SPBE; | Angka | 3,21 | 2,9 | 3 | 3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| | Nilai domain tata kelola SPBE; | Angka | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 |
| | Nilai domain Manajemen SPBE | Angka | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3 |
| | Nilai domain layanan SPBE | Angka | 0 | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| **2.11** | **KOPERASI DAN UMKM** | | | | | | | | |
| | Peningkatan omzet pelaku usaha mikro | % | -8,22 | - 3 | - 2 | - 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Peningkatan volume usaha koperasi | Rp | 41,227,671,003 | 41,928,541,411 | 43,895,483,280 | 45,939,758,280 | 48,065,748,585 | 50,278,072,095 | 50,278,072,095 |
| **2.12** | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan Nilai investasi PMA PMDN | % | NA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) | Angka | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| | Rata-rata lama waktu pelayanan perizinan | Hari | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| | IKM Pelayanan Perijinan | Indeks | 83.41 | 83,5 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85 |
| **2.13** | **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | |
| | Persentase prestasi kepemudaan, olahraga dan pramuka | % | NA | 40,67 | 41,43 | 43,28 | 44,74 | 46,85 | 46,85 |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | NA | 2,09 | 2,12 | 2,15 | 2,18 | 2,22 | 2,22 |
| | Jumlah atlet berprestasi | Angka | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| | Jumlah prestasi olahraga | Angka | 25 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 225 |
| **2.14** | **STATISTIK** | | | | | | | | |
| | Indeks kepuasan pengguna data sektoral (skala 5) | Indeks | 3,21 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,6 |
| **2.15** | **PERSANDIAN** | | | | | | | | |
| | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) | Indeks | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **2.16** | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | | |
| | Cakupan obyek pemajuan kebudayaan | % | NA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| | Cakupan pengelolaan kesenian, kebudayaan, cagar budaya dan museum | % | NA | 53 | 57 | 59 | 61 | 64 | 64 |
| **2.17** | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | NA | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Persentase peningkatan layanan perpustakaan | % | NA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| | Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang dibina | % | NA | 31.01 | 33.54 | 36.07 | 38.60 | 41.13 | 41.13 |
| **1.18** | **KEARSIPAN** | | | | | | | | |
| | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | |
| **3** | **URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | |
| **3.1** | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | |
| | Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Budidaya | % | NA | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **3.2** | **PARIWISATA** | | | | | | | | |
| | Persentase PAD sektor pariwisata | % | 2,89 | 3,73 | 3,83 | 4,17 | 4,26 | 4,52 | 4,52 |
| | Persentase kunjungan wisata kota | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Lama kunjungan Wisata | Angka | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari | 1-2 hari |
| **3.3** | **PERTANIAN** | | | | | | | | |
| | Produktivitas produksi pertanian | Ton/Ha | 6,05 | 6,15 | 6,25 | 6,35 | 6,45 | 6,5 | 6,5 |
| | Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya | % | NA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| **3.4** | **ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | | | |
| **3.5** | **PERDAGANGAN** | | | | | | | | |
| | Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan | % | 14,3 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 |
| **3.6** | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | |
| | Prosentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan | % | 16,12 | 16,14 | 16,16 | 16,18 | 16,20 | 16,22 | 16,22 |
| **3.7** | **TRANSMIGRASI** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4 | **URUSAN PENUNJANG** | | | | | | | | |
| **4.1** | **FUNGSI LAIN** | | | | | | | | |
| | Persentase Pemenuhan Sasaran dan Area Perubahan RB yang nilainya telah mencapai B | % | NA | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase kebijakan bidang Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Barang Jasa yang terpenuhi | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase kebijakan bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang terpenuhi | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase OPD dengan nilai SAKIP A | % | NA | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Nilai LPPD | Angka | NA | 3,6000 | 3,7000 | 3,8000 | 3,9000 | 4,0000 | 4,0000 |
| | Persentase dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tingkat kepuasan pimpinan | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) | Indeks | NA | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 80 |
| | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD | Nilai | NA | 68 (B) | 69 (B) | 70(B) | 71(BB) | 72(BB) | 72(BB) |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Utara) | Indeks | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 82,5 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Tengah) | Indeks | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 82,5 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Selatan) | Indeks | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 82,5 |
| **4.2** | **KEUANGAN** | | | | | | | | |
| | Nilai Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | % | 89,76 | 89,76 | 91,43 | 91,43 | 93,10 | 93,10 | 93,10 |
| | Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah | % | 88,79 | 89,77 | 90,76 | 92,64 | 94,29 | 94,64 | 94,64 |
| | Rasio kemandirian keuangan daerah | % | 32,02 | 36,16 | 34,61 | 35,64 | 36,69 | 36,69 | 36,69 |
| | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah | % | 23,82 | 26,05 | 25,25 | 25,81 | 26,37 | 26,37 | 26,37 |
| **4.3** | **PERENCANAAN** | | | | | | | | |
| | Nilai SAKIP dari aspek perencanaan | % | 22,49 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 |
| | Persentase Tingkat efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah dan kualitas dokumen perencanaan | % | 53,25 | 76,0 | 81 | 86,5 | 92 | 93,25 | 93,25 |
| **4.4** | **KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | |
| | Indeks sistem merit | Indeks | NA | 0,645 | 0,6825 | 0,705 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| | Nilai sistem merit | Angka | NA | B (250 - 324) | B (250 - 324) | B (250 - 324) | B (250 - 324) | B (250 - 324) | B (250 - 324) |

| No | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **4.5** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | |
| | Persentase implementasi rencana kelitbangan | % | NA | 17,02 | 36,17 | 55,32 | 76,60 | 100 | 100 |
| | Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi | % | NA | 24 | 49 | 65,17 | 66,31 | 68,44 | 68,44 |
| **4.6** | **PENGAWASAN** | | | | | | | | |
| | Kapabilitas APIP | Angka | 3 | 3,16 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| | MRI | Angka | 2,12 | 2,29 | 2,47 | 2,65 | 2,82 | 3 | 3 |
| | Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal | Angka | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |
| | Indeks Persepsi Korupsi | Indeks | 3,38 | 3,4 | 3,4 | 3,42 | 3,43 | 3,45 | 3,45 |

*Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026*

*Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Program Kota Magelang Tahun 2025*

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| 1.1 | **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan** | | | | |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | APK PAUD | 98,00% | 98,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | APM SD/ MI | 100,00% | 100,00% | |
| | | APK SD/ MI | 100,00% | 100,00% | |
| | | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,00% | 0,00% | |
| | | APM SMP/MTs | 100,00% | 100,00% | |
| | | APK SMP/MTs | 100,00% | 100,00% | |
| | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,00% | 0,00% | |
| | | Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan | 97,00% | 100,00% | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | 72,51% | 95,24% | |
| | | Persentase SD Terakreditasi | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase SMP Terakreditasi | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi | 100,00% | 100,00% | |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum | 100,00% | 100,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase guru di satuan Pendidikan Dasar yang berkualifikasi minimal S1 | 99,50% | 99,50% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Persentase guru di satuan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi minimal S1 | 77,50% | 96,63% | |
| 4 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin (memiliki izin rekomendasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan) | 100,00% | 100,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra | Persentase Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar yang membuat karya sastra (dalam bentuk buku) | 30,00% | 30,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.2 | **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan** | | | | |
| 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular | 67,00% | 100,00% | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit tidak menular | 77,00% | 100,00% | |
| | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100,00% | 100,00% | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | 100,00% | 100,00% | |
| | | Indeks Keluarga Sehat | 0,80 | 0,80 | |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar (sertifikat kompetensi) | 100,00% | 100,00% | Dinas Kesehatan |
| 3 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Cakupan perijinan, pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 100,00% | 100,00% | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang bersertifikat layak hygiene | 100,00% | 100,00% | |
| 4 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri | 94,12% | 94,12% | Dinas Kesehatan |
| 1.3 | **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | |
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Kondisi Baik | 81,00% | 81,00% | DPUPR |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik | 64,00% | 64,00% | DPUPR |
| 3 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang memiliki PBG | 27,25% | 27,25% | DPUPR |
| | | Persentase Progres Pembangunan Gedung Balai Kota | 100,00% | 100,00% | |
| 4 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase kawasan strategis yang ditata | 100,00% | 100,00% | DPUPR |
| 5 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab | 94,88% | 94,88% | DPUPR |
| 6 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 100,00% | 100,00% | DPUPR |
| 7 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 75,00% | 83,40% | DPUPR |
| 8 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak* | 92,82% | 98,81% | DPUPR |
| 9 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga yang memiliki askes terhadap pelayanan sumber air minum layak* | 98,50% | 98,50% | DPUPR |
| | | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum, aman, dan berkelanjutan | 30,00% | 88,05% | |
| 10 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Pembangunan TPST/3R | 70,00% | 70,00% | DPUPR |
| 1.4 | **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | |
| 1 | Program pengembangan perumahan | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 90,00% | 100,00% | Disperkim |
| | | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota | 35,09% | 100% | |
| 2 | Program Kawasan Permukiman | Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata | 100,00% | 100,00% | Disperkim |
| 3 | Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Persentase rumah tidak layak huni di luar permukiman kumuh yang tertangani | 80,41% | 80,41% | Disperkim |
| 4 | Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 100,00% | 99,03% | Disperkim |
| 5 | Program Penatagunaan Tanah | Persentase luas lahan bersertifikat | 90,00% | 98,50% | Disperkim |
| 1.5 | **Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | | | | |
| 1 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelesaian pelanggaran perda | 100,00% | 100,00% | Satpol PP |
| 2 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase layanan penanggulangan bencana | 100,00% | 100,00% | BPBD |
| 3 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan | 100,00% | 100,00% | Satpol PP |
| | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran* | 15 menit (SPM) | 15 menit (SPM) | |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** | | | | |
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi | 100,00% | 100,00% | Dinas Sosial |
| 2 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang menerima bantuan | 100,00% | 100,00% | Dinas Sosial |
| 3 | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani | 100,00% | 100,00% | Dinas Sosial |
| 4 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS yang diberdayakan | 83,33% | 83,33% | Dinas Sosial |
| 5 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase luas taman makam pahlawan yang dipelihara | 100,00% | 100,00% | Dinas Sosial |
| | | | | | |
| II. | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| 2.1 | **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja** | | | | |
| 1 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 70,00% | 75,83% | Disnaker |
| | | Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja | 75,00% | 82,53% | |
| 2 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja | 75,00% | 84,45% | Disnaker |
| | | Persentase peserta pelatihan yang menjalankan wirausaha | 70,00% | 70,00% | |
| 3 | Program Hubungan Industrial | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 45,00% | 45,00% | Disnaker |
| 2.2 | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | |
| 1 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase program perangkat daerah yang responsif gender | 17,34% | 17,54% | DPMP4KB |
| | | Persentase perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan terlatih dalam perekonomian keluarga | 20,00% | 23,03% | |
| | | Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | 20,00% | 24% | |
| | | Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan | 20,90% | 22,22% | |
| 2 | Program Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)* | 0,04% | 0,01% | DPMP4KB |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Keluarga Berkualitas | 14,29% | 14,29% | DPMP4KB |
| 4 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase PD yang mengelola data gender dan anak | 17,24% | 100,00% | DPMP4KB |
| 5 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase capaian 4 (empat) kluster pemenuhan hak anak | 17,24% | 61,29% | DPMP4KB |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** | | | | |
| 1 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Ketersediaan Pangan | 100,00% | 100,00% | Dispertan |
| 2 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan | 60,00% | 66,67% | Dispertan |
| 3 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pangan Segar yang Aman | 86,00% | 96,51% | Dispertan |
| 2.4 | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan** | | | | |
| 1 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani | 80,00% | 80,00% | Disperkim |
| 2 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase kasus permasalahan pengadaan tanah yang mendapat penyelesaian ganti rugi/santunan tanah | 80,00% | 80,00% | Disperkim |
| 3 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase masalah pada tanah kosong yang terselesaikan | 80,00% | 100,00% | Disperkim |
| 4 | Program Penatagunaan Tanah | Persentase luas lahan bersertifikat | 99,00% | 99,00% | Disperkim |
| 2.5 | **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup** | | | | |
| 1 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | 0% | | DLH |
| 2 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | 100,00% | 100,00% | DLH |
| 3 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) | Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3 | 83,33% | 83,33% | DLH |
| 4 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan | 46,67% | 46,67% | DLH |
| 5 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan | 75,00% | 100,00% | DLH |
| 6 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 11,84% | 24,14% | DLH |
| 7 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat | 6,25% | 11,98% | DLH |
| 8 | Program Pengelolaan Persampahan | Peningkatan persentase sampah yang terkelola | 3,50% | 3% | DLH |
| 9 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati | 31,33% | 31,33% | DLH |
| 2.6 | **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | |
| 1 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase penduduk usia wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-el | 99,95% | 100,00% | Disdukcapil |
| | | Persentase kepemilikan KK | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase kepemilikan KIA | 98,00% | 100,00% | |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Program Pencatatan Sipil | Persentase pasangan yang memiliki Akta Perkawinan | 100,00% | 100,00% | Disdukcapil |
| | | Persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki memiliki Akta kelahiran | 99,40% | 100,00% | |
| | | Persentase penerbitan Akta kematian | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase penerbitan Akta Perceraian | 100,00% | 100,00% | |
| 3 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasi TI | 100,00% | 100,00% | Disdukcapil |
| 4 | Program pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase Jenis Data yang tersaji dalam Profil Kependudukan | 95,00% | 100,00% | Disdukcapil |
| 2.7 | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | |
| 1 | Program peningkatan kerja sama desa | Persentase kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat | 88,00% | 100,00% | DPMP4KB |
| 2 | Program administrasi pemerintahan desa | Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi | 84,00% | 100,00% | DPMP4KB |
| 3 | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Persentase kelurahan yang lembaga masyarakatnya diberdayakan | 88,00% | 100,00% | DPMP4KB |
| 2.8 | **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | |
| 1 | Program Pengendalian penduduk | Persentase penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th) | 23,00% | 23,00% | DPMP4KB |
| 2 | Program pembinaan keluarga berencana | Persentase *Contraceptive Prevelance Rate* (CPR) | 58,45% | 70,09% | DPMP4KB |
| 3 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera | Persentase anggota keluarga tribina, UPPKS yang ber-KB | 73,00% | 75,00% | DPMP4KB |
| 2.9 | **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan** | | | | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) | 0,76 | 0,61 | Dishub |
| | | Pengguna moda transportasi umum di perkotaan (PPTUK)* | 6,81 | 7,84 | |
| 2.10 | **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika** | | | | |
| 1 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase pemanfaatan aplikasi informatika | 100,00% | 100,00% | Diskominfo |
| 2 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 5 | 5 | Diskominfo |
| 2.11 | **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam | 58,87% | 58,87% | Disperindag |
| 2 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang-undangan | 42,91% | 55,00% | Disperindag |
| 3 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya | 27,55% | 27,55% | Disperindag |
| 4 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya | 26,18% | 39,57% | Disperindag |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi berkualitas | 46,00% | 46,00% | Disperindag |
| 6 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan | 20,00% | 52,82% | Disperindag |
| 7 | Program Pengembangan UMKM | Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro | 2,00% | 2,85% | Disperindag |
| 2.12 | **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP | 95,00% | 96,38% | DPMPTSP |
| 2 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, informasi, dan Sistem Informasi PM | 10,00% | 10,60% | DPMPTSP |
| 3 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Investor PMA/PMDN | 100,00% | 100,00% | DPMPTSP |
| 4 | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase LOI yang ditindaklanjuti | 100,00% | 100,00% | DPMPTSP |
| 5 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku | 30,00% | 30,00% | DPMPTSP |
| 2.13 | **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga** | | | | |
| 1 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan | 77,27% | 85,11% | Disporapar |
| | | Persentase peningkatan pemuda yang dibina | 6,15% | 29,71% | |
| 2 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase peningkatan prestasi di bidang olahraga | 17,65% | 36,29% | Disporapar |
| | | Persentase peningkatan atlet yang dibina | 11,76% | | |
| | | Persentase pelatih yang bersertifikat | 83,87% | 83,87% | |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase organisasi kepramukaan yang dibina | 97,14% | 100,00% | Disporapar |
| 2.14 | **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik** | | | | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data | 39,00% | 39,00% | Diskominsta |
| 2.15 | **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian** | | | | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi | 84 | 109 | Diskominsta |
| | | Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi | 48 | 61 | |
| | | Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi | 47 | 61 | |
| | | Nilai Pengelolaan Aset Informasi | 81 | 138 | |
| | | Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi | 65 | 72 | |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** | | | | |
| 1 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan | 100,00% | 100,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | 92,00% | 92,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Program Pembinaan Sejarah | Cakupan pembinaan sejarah | 67,00% | 77,78% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 17,00% | 23,53% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase peningkatan kunjungan museum | 20,00% | 54,13% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2.17 | **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** | | | | |
| 1 | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase pemerataan layanan perpustakaan | 60,00% | 60,00% | Disperpusip |
| | | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan | 51,00% | 51,00% | |
| | | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan | 70,41% | 70,41% | |
| | | Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan | 24,02% | | |
| | | Persentase Perpustakaan ber-SNP | 50,00% | 50,00% | |
| | | Persentase peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan | 21,21% | 25,69% | |
| | | Persentase peningkatan anggota perpustakaan | 28,30% | 31,61% | |
| 2.18 | **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** | | | | |
| 1 | Program Pengelolaan Arsip | Persentase berkas yang dikelola sesuai ketentuan | 100,00% | 100,00% | Disperpusip |
| 2 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan | 100,00% | 100,00% | Disperpusip |
| III. | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | |
| 3.1 | **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan** | | | | |
| 1 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 1,00 | 1,00 | Dispertan |
| 2 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah total produksi olahan perikanan (ton) | 238 | 238 | Dispertan |
| 3.2 | **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | | | | |
| 1 | Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata | Persentase destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik | 86,67% | 86,67% | Disporapar |
| 2 | Program pemasaran pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara | 11,11% | 11,11% | Disporapar |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota | 13,33% | 13,33% | |
| 3 | Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase SDM pariwisata yang meningkat kapasitasnya | 4,72% | 9,35% | Disporapar |
| | | Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya | 33,33% | 33,33% | |
| 3.3 | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** | | | | |
| 1 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase sarana pembibitan yang terpelihara | 66,89% | 73,51% | Dispertan |
| | | Persentase Peningkatan sarana Peternakan | 10,00% | 14,29% | |
| 2 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian | 57,50% | 57,50% | Dispertan |
| | | Persentase Peningkatan prasarana Peternakan | 10,00% | 14,29% | |
| 3 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan | 5,00% | 6,62% | Dispertan |
| | | Persentase peningkatan produk pangan asal hewan yang ASUH | 2,00% | 3,36% | |
| 4 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase luasan lahan bencana pertanian yang tertangani | 84,00% | 100,00% | Dispertan |
| 5 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase peningkatan kelayakan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala | 10,00% | 10,00% | Dispertan |
| 6 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya | 10,00% | 12,00% | Dispertan |
| | | Persentase kelompok tani yang naik kelas | 24,00% | 24,00% | |
| 3.4 | **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan** | | | | |
| 1 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik | 55,00% | 85,19% | Disperindag |
| 2 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase koefisien variasi harga antar waktu | 8,00% | 8% | Disperindag |
| 3 | Program pengembangan ekspor | Nilai ekspor | 2.707.000 | 3.421.982 | Disperindag |
| 4 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase Alat-alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 79,17% | 94,42% | Disperindag |
| 5 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha | 96,00% | 95,92% | Disperindag |
| 3.5 | **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian** | | | | |
| 1 | Program Perencana dan Pembangunan Industri | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah | 1,99% | 4,90% | Disperindag |
| 2 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 85,00% | 100,00% | Disperindag |
| | | Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha | 0,84% | 17,20% | |
| 3 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap | 90,00% | 100,00% | Disperindag |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| 4.1 | **Sekretariat Daerah** | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Sedang | 30,80% | 100,00% | Setda (Bag Organisasi) |
| | | Indeks Kepuasan Pimpinan (Prokompim) | 85,00% | 92,16% | Setda (Bag Prokompim) |
| | | Indeks Kepuasan Pimpinan (Umum) | 85,00% | 85,00% | Setda (Bag Umum) |
| 2 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi | 100,00% | 100,00% | Setda (Bagian Pemerintahan) |
| | | Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan | 100,00% | 100,00% | Setda (Bag Kesra) |
| | | Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi | 100,00% | 100,00% | Setda (Bag Hukum) |
| 3 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase progres fisik seluruh OPD | 99,00% | 99,60% | Setda (Bag AdBang) |
| | | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan | 100,00% | 100,00% | Setda (Bagian Perekonomian & SDA) |
| | | Tingkat kematangan UKPBJ | 2 | 3 | Setda (Bag PBJ) |
| 4.2 | **Sekretariat DPRD** | | | | |
| 1 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana | 100,00% | 100% | Setwan |
| V. | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| 5.1 | **Perencanaan** | | | | |
| 1 | Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas | 68,49% | 81,74% | Bapperida |
| 2 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100,00% | 100,00% | Bapperida |
| | | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 100,00% | 100,00% | |
| | | Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100,00% | 100,00% | |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | **Keuangan** | | | | |
| 1 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran | 100,00% | 100,00% | BPKAD |
| | | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan | 100,00% | 100,00% | |
| | | Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi | 100,00% | 100,00% | |
| 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Cakupan pengelolaan barang milik daerah | 89,29% | 100,00% | BPKAD |
| 3 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 121,15% | 165,48% | BPKAD |
| 5.3 | **Kepegawaian** | | | | |
| 1 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase capaian target aspek sistem merit | 95,00% | 100,00% | BKPSDM |
| 5.4 | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | |
| 1 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi | 35,00% | 48,70% | BKPSDM |
| 5.5 | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | |
| 1 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan | 42,31% | 42,31% | Bapperida |
| | | Persentase pemanfaatan hasil inovasi | 24,00% | 27,78% | |
| VI. | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase penyelenggaraan pengawasan | 96,00% | 96,00% | Inspektorat |
| 2 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan | 85,00% | 85,00% | Inspektorat |
| VII. | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100,00% | 100,00% | Kecamatan (KMU, KMT, KMS) |
| 2 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100,00% | 100,00% | Kecamatan (KMU, KMT, KMS) |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100,00% | 100,00% | Kecamatan (KMU, KMT, KMS) |
| VIII. | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | |
| 1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 60,38% | 60,38% | Bakesbangpol |
| 2 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan | 65,04% | 65,04% | Bakesbangpol |
| | | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | 86,99% | 86,99% | |
| 3 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 10,06% | 10,06% | Bakesbangpol |

| NO | URUSAN / BIDANG / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | PENYESUAIAN TARGET RKPD TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Konflik Sosial | 0 | 0 | Bakesbangpol |
| 5 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik | 5,18% | 5,18% | Bakesbangpol |

*Sumber: RPJMD Kota Magelang 2021-2026*
**) : Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022-2023*

# BAB 7
# PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dalam penyusunannya, RKPD 2025 mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026, berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2025, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2025 ini juga yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan pertama Tahun 2025, dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2025, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Dengan demikian maka dokumen Perubahan RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, serta sebagai acuan dan pedoman OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan RKPD tahun 2025 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan perangkat daerah di Kota Magelang tahun 2025 sehingga akan menjadi landasan setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2025. Usulan kegiatan yang menjadi bagian dari RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Pemerintah Pusat melalui APBN.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan melakukan analisa terhadap penjabaran dan sinergitas Perubahan RKPD tahun 2025 ke dalam Perubahan Renja OPD 2025 serta prioritas dan pagu indikatif OPD 2025.

Demikian agar dokumen Perubahan RKPD 2025 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA MAGELANG,

H. DAMAR PRASETYONO